PT AKR Corporindo Tbk

Menggerakkan Sinergi, Mewujudkan Cita

Powering Synergy, Growing Hope

Laporan Tahunan **2025** Annual Report



Sanggahan dan **Batasan Tanggung Jawab**

Laporan Tahunan 2025 memuat pernyataan mengenai kondisi keuangan, hasil operasi, kebijakan, rencana, proyeksi, serta tujuan Perseroan yang tergolong sebagai pernyataan prospektif (*forward-looking statements*), kecuali untuk hal-hal yang bersifat historis.

Pernyataan prospektif dalam Laporan Tahunan ini disusun berdasarkan asumsi mengenai kondisi terkini dan kondisi mendatang yang terkait dengan lingkungan bisnis Perseroan serta kebijakan Manajemen Perseroan. Pernyataan tersebut mengandung berbagai risiko dan ketidakpastian yang dapat menyebabkan kondisi dan hasil aktual Perseroan di masa mendatang berbeda secara material dari yang diharapkan. Oleh karena itu, tidak terdapat jaminan bahwa hasil yang diantisipasi oleh Perseroan akan tercapai. Perseroan tidak berkewajiban untuk memperbarui pernyataan-pernyataan tersebut apabila terjadi perubahan kondisi, estimasi, maupun opini di masa mendatang.

Dalam Laporan Tahunan ini, istilah "Perseroan" atau "AKR" merujuk pada PT AKR Corporindo Tbk beserta Entitas Anak, yang menjalankan kegiatan usaha di bidang perdagangan dan distribusi, jasa logistik, pabrikan, serta kawasan industri.

Penyusunan Laporan Tahunan Perseroan mengacu pada Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 29/POJK.04/2016 tentang Laporan Tahunan Emiten atau Perusahaan Publik, serta Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 16/SEOJK.04/2021 tentang Bentuk dan Isi Laporan Tahunan Emiten atau Perusahaan Publik.

2025

Menggerakan Sinergi Mewujudkan Cita



Penjelasan Tema **Tahun 2025**

Kemajuan AKR didorong oleh pilar strategis yang sejalan dengan arah pembangunan ekonomi Indonesia Maju, khususnya dalam memperkuat kemandirian energi, mendukung industrialisasi, hilirisasi, dan digitalisasi. Upaya tersebut ditopang oleh pengembangan infrastruktur terintegrasi, peningkatan ketahanan rantai pasok, serta komitmen yang kuat pada tata kelola dan keberlanjutan. Sinergi ini menjadi fondasi resiliensi dan keberlangsungan bisnis Perseroan. AKR menjalankan peran penting dalam ekosistem industri nasional melalui pengembangan segmen kimia dasar, dengan menyediakan berbagai bahan kimia dasar yang digunakan dalam produk sehari-hari sekaligus mendukung kebutuhan industri strategis, termasuk hilirisasi mineral. Selanjutnya, Perseroan juga memperkuat perannya dalam ekosistem energi melalui integrasi distribusi Bahan Bakar Minyak (BBM) baik untuk industri maupun ritel, serta layanan logistik, kawasan industri, dan pelabuhan. Pendekatan terintegrasi ini memastikan kelancaran rantai pasok dan memperkuat konektivitas lintas industri.

Selama 65 tahun, AKR membangun jaringan infrastruktur yang mencakup pelabuhan, terminal, fasilitas penyimpanan, armada transportasi, serta jaringan distribusi terintegrasi di berbagai wilayah operasional. Perseroan mengoptimalkan distribusi kimia dasar, energi dan logistik dengan mengintegrasikan infrastruktur logistik dan kapabilitas digitalisasi. Pendekatan ini meningkatkan efisiensi, memperkuat keterhubungan antar simpul distribusi, serta memastikan ketersediaan energi yang andal bagi sektor produktif dan ritel. Dengan fondasi tersebut, AKR menjaga relevansi perannya melalui pengelolaan yang konsisten, sehingga dapat terus mendukung ketahanan energi, kebutuhan industri, dan pertumbuhan jangka panjang.

Dengan mengedepankan kepercayaan dan inovasi, AKR mencatat perkembangan positif pada Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) JIIPE Gresik yang ditandai dengan meningkatnya aktivitas *tenant* strategis di sektor logam, kimia, dan kaca. Perkembangan tersebut menguatkan posisi kawasan sebagai katalis hilirisasi dan investasi manufaktur, sekaligus memperkuat model bisnis Perseroan melalui pendapatan berulang berbasis aset utilitas. Sebagai ekosistem industri terintegrasi, JIIPE turut mendukung peningkatan aktivitas ekonomi regional, penciptaan lapangan kerja, serta efisiensi biaya logistik industri.

Sepanjang tahun 2025, Perseroan mencatat perkembangan usaha yang solid melalui pertumbuhan segmen distribusi BBM dan kimia dasar, penguatan infrastruktur logistik yang handal, serta beroperasinya *tenant* utama di JIIPE. Perseroan juga memperkuat kemitraan strategis guna meningkatkan kelancaran operasional, memitigasi risiko, dan mendorong pertumbuhan kawasan industri. Pencapaian ini didukung oleh fundamental keuangan yang kuat, dengan struktur permodalan yang sehat dan arus kas yang terjaga. Selain itu, integrasi tata kelola dan prinsip ESG dalam proses pengambilan keputusan menjadi fondasi penting dalam menjaga kesinambungan usaha serta memastikan dampak yang berkelanjutan.

Kemajuan AKR hari ini dan ke depan bertumpu pada ketahanan yang telah dibangun secara konsisten sepanjang perjalanan transformasi Perseroan. Melalui sinergi berbagai aspek utama, Perseroan terus mengarahkan langkah strategisnya untuk memperkuat nilai tambah, meningkatkan daya saing, dan menjawab kebutuhan industri yang terus berkembang. Kontribusi yang dihadirkan Perseroan diharapkan dapat memberikan dampak yang terpercaya kepada seluruh pemangku kepentingan, dan mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.



Kesinambungan **Tema**

2024



Beyond Strategy, Value, and Legacy

Sektor logistik memainkan peran penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi nasional dan menjaga ketahanan energi. Namun, tantangan seperti *gap* infrastruktur, biaya tinggi, dan operasional yang belum efisien masih menjadi hambatan. Kehadiran PT AKR Corporindo Tbk (AKR) menjadi solusi strategis dalam mengatasi tantangan logistik Indonesia dengan pendekatan yang melampaui strategi konvensional, menciptakan nilai, dan membangun *legacy* berkelanjutan. Melalui jaringan distribusi yang terintegrasi, investasi berkelanjutan dalam infrastruktur, serta keunggulan kompetitif yang dimiliki, AKR berkontribusi dalam meningkatkan efisiensi rantai pasok dan menurunkan biaya logistik. Melalui bisnis model sebagai fondasi, inovasi sebagai motor penggerak, dan keberlanjutan sebagai arah strategis, AKR menegaskan posisinya sebagai pelaku industri yang relevan dan visioner.

2023



Meningkatkan Standar Mencapai Pertumbuhan Baru

PT AKR Corporindo Tbk terus memperkuat posisinya sebagai pemimpin di sektor logistik dan *supply chain* dengan rekam jejak enam dekade yang solid. Dengan mengembangkan jaringan distribusi dari kimia dasar, petroleum hingga bahan bakar penerbangan serta mengoptimalkan Kawasan Ekonomi Khusus JIIPE di Gresik, AKR berperan penting dalam menciptakan ekosistem *supply chain* terintegrasi. Strategi ini tidak hanya meningkatkan daya saing infrastruktur logistik tetapi juga menarik investasi asing langsung. Keunggulan JIIPE dalam utilitas dan fasilitas kelas dunia turut mendukung pertumbuhan bisnis AKR, terutama dalam menghadapi tren hilirisasi industri di Indonesia. Dengan penerapan prinsip ESG dan model bisnis yang kuat, AKR berhasil mencatat pertumbuhan laba neto sebesar Rp2,780 miliar atau naik 16% dari tahun sebelumnya. Keberlanjutan pertumbuhan AKR dalam lima tahun terakhir mencerminkan visi strategis, ketahanan, serta adaptasi yang kuat terhadap dinamika bisnis, mengukuhkan optimisme untuk terus berkembang seiring pertumbuhan ekonomi Indonesia di masa depan.

2022

Tahun Bertumbuh dan Tetap Tangguh



Tahun 2022, menjadi catatan penting bagi perjalanan bisnis AKR, di mana tantangan dan peluang tidak dapat terpisahkan, menjadi dinamika tersendiri bagi AKR untuk menghadapinya. Dengan *Business model* yang kuat, diikuti oleh ketangguhan, keandalan, dan kapabilitas sumber daya manusia, teknologi, dan Keuangan yang dijaga oleh Perseroan, AKR berhasil mencetak pencapaian yang positif. Lebih dari itu, inisiatif strategis yang telah dijalankan sejak tahun 2013; KEK Gresik JIIPE Gresik mulai menunjukkan hasil dan memasuki momentum monetisasi *asset*. Hal ini ditunjukkan oleh meningkatnya ROE AKR (21,9%) dan ROA AKR (8,8%).

2021

Mengembangkan Nilai Berkelanjutan untuk Tumbuh Bersama Bangsa



PT AKR Corporindo Tbk berkomitmen untuk terus meningkatkan penerapan praktik terbaik dalam inisiatif Lingkungan, Sosial dan Tata Kelola (ESG). Perseroan meyakini penerapan aspek ESG secara konsisten tidak hanya akan memberikan dampak positif bagi Perseroan, tetapi juga bagi pemangku kepentingan secara keseluruhan. Karena itu, AKR tidak hanya fokus untuk meningkatkan nilai bagi pemegang saham, tapi juga berupaya untuk meningkatkan kontribusi untuk pembangunan bangsa. Dengan bertumpu pada kekuatan model bisnis yang telah teruji yang ditunjang oleh sumber daya manusia yang andal dan platform teknologi informasi yang telah teruji, Perseroan yakin dapat terus tumbuh dan berkembang sejalan dengan pertumbuhan perekonomian nasional.

Visi dan **Misi**

Visi

Menjadi pemain utama di bidang penyedia jasa logistik dan solusi pengadaan untuk bahan kimia dan energi di Indonesia.

Misi

Mengoptimalkan potensi kita untuk meningkatkan nilai para pemegang saham dan pihak-pihak terkait secara berkesinambungan.

Kajian dan Persetujuan Dewan Komisaris dan Direksi atas Visi dan Misi Perusahaan

Dewan Komisaris dan Direksi secara berkelanjutan melakukan penelaahan atas Visi dan Misi Perseroan guna memastikan keselarasan dengan arah strategis serta tujuan jangka panjang Perseroan. Proses peninjauan tersebut mempertimbangkan dinamika lingkungan usaha, perkembangan industri, serta prioritas strategis yang ditetapkan oleh manajemen. Hasil peninjauan dan persetujuan atas Visi dan Misi Perseroan kemudian dievaluasi dan ditetapkan secara berkala sebagai dasar dalam pengukuran kinerja dan pencapaian sasaran Perseroan.

Pilar Strategi dalam Menjaga Sinergi **dan Mewujudkan Cita**

Konektivitas Energi & Industri

Menggerakkan Sinergi Infrastruktur & Rantai Pasok: Melalui jaringan distribusi dan infrastruktur logistik, Perseroan mengantarkan pasokan energi dan bahan baku kepada pelanggan industri. Setiap sinergi mendukung stabilitas industri strategis, serta keandalan pasokan kimia dasar, biodiesel & BBM Ritel.

Ekosistem Industri Terintegrasi yang Kompetitif

Mengusung Cita Kawasan Industri Berdaya Saing Global: JIIPE mendorong kemandirian ekonomi yang didukung oleh utilitas untuk menurunkan biaya logistik dan mendukung kelancaran operasional para *tenant*. Ekosistem Logam – Kimia – Kaca yang terbentuk di JIIPE mendukung peningkatan investasi regional, dan penciptaan lapangan kerja.

Keandalan Operasional dan Ketahanan Keuangan

Fondasi Ketahanan di Tengah Dinamika Ekonomi: Kegiatan usaha AKR didukung oleh infrastruktur logistik yang terintegrasi, mencakup pelabuhan, fasilitas penyimpanan, jaringan transportasi, serta penguatan kapabilitas digital. Integrasi tersebut memungkinkan terciptanya efisiensi operasional melalui pemanfaatan *economies of scale*, sekaligus memperkuat ketahanan operasional dan stabilitas kinerja Perseroan.

Tata kelola Terpercaya dan Pertumbuhan yang Bertangung Jawab

Kepercayaan sebagai Modal Utama: Integrasi tata kelola dan prinsip ESG menjadi landasan keputusan strategis untuk menjaga keberlanjutan usaha. AKR memastikan pengelolaan yang transparan, bertanggung jawab, dan berorientasi pada mitigasi risiko serta pengelolaan dampak lingkungan.

Kemitraan Strategis dan Keterlibatan Pemangku Kepentingan

Sinergi dengan Principal, Pemerintah, Pelanggan & Investor: Perseroan menjadikan kemitraan strategis sebagai fondasi untuk dapat bertumbuh secara berkelanjutan. Membangun kolaborasi kredibel berbasis nilai jangka panjang untuk memperkuat ekosistem usaha dan hubungan dengan pelanggan industri. AKR menjaga transparansi dan komunikasi dengan para pemangku kepentingan untuk terus menjaga kepercayaan pasar.



65 Tahun AKR Tangguh di Setiap Siklus Ekonomi

Titik Awal Pertumbuhan

Perjalanan AKR berawal dari perdagangan bahan kimia kering yang dirintis oleh Bapak Soegiarto Adikoesoemo di Surabaya. Dari langkah sederhana tersebut, lahirlah PT Aneka Kimia Raya pada 1970 yang menjadi fondasi bagi perjalanan panjang Perseroan.





Ekspansi dan Penguatan Infrastruktur

Seiring melonjaknya permintaan bahan kimia dasar, AKR memindahkan kantor pusat ke Jakarta dan memperluas jangkauan ke berbagai kota besar. AKR pun memperluas jaringan produknya dengan masuk ke bisnis Sorbitol yang dibutuhkan banyak industri bersama Sorini. Selain itu, AKR juga membentuk Entitas Anak bernama PT Saritanam Pratama untuk mengintegrasikan bisnis sorbitol dari hulu ke hilir.

Krisis Energi dan Transformasi Awal

Krisis energi 1970–1980 mengguncang dunia, harga energi yang membumbung tinggi membuka peluang baru bagi bisnis kimia. Untuk menangkap peluang tersebut, AKR bertransformasi dari perdagangan kering ke *bulk* cair. Keputusan berani ini menuntut infrastruktur logistik modern dan menjadi titik awal pembangunan rantai pasok terintegrasi perusahaan.



Peralihan Kepemimpinan

Tongkat estafet kepemimpinan beralih kepada Bapak Haryanto Adikoesoemo. Berbekal pendidikan global, ia memperkuat fondasi keuangan sejak 1983 hingga menjadi Presiden Direktur pada 1992. Menggabungkan visi kewirausahaan dan tata kelola yang disiplin untuk membawa AKR tumbuh berkelanjutan.





Menjadi Perusahaan Publik

Seiring pertumbuhan bisnis, AKR mencatatkan sahamnya di Bursa Efek Indonesia pada 1994 dengan kode saham AKRA. Ini menandai babak baru transparansi, tata kelola yang lebih kuat, serta akses pendanaan untuk ekspansi jangka panjang.









Langkah Menuju Panggung Global

Ekspansi global dimulai pada 2004 melalui akuisisi Khalista di Tiongkok serta penguatan kepemilikan PT Sorini Corporation Tbk. Pada 2006, AKR tumbuh menjadi salah satu pemain utama sorbitol di Asia Pasifik dan terbesar kedua di dunia. Ini membuktikan daya saing AKR di pasar internasional.

Bertahan dan Tumbuh di Tengah Krisis

Menghadapi tekanan krisis moneter 1998, AKR tidak berhenti melangkah. Perseroan justru memperluas jaringan ke lebih dari 20 lokasi, melengkapi portofolio produk serta armada darat dan laut, dan membangun jaringan distribusi nasional yang efisien serta andal bagi industri Indonesia.









Penguatan Ketahanan Energi Nasional

Pada Oktober 2004, deregulasi hilir BBM membuka babak baru. AKR menjadi perusahaan swasta pertama penyalur BBM non-subsidi dan pada 2010 ditunjuk sebagai satu-satunya perusahaan swasta yang mendistribusikan BBM bersubsidi. Dengan jangkauan distribusi dari hulu hingga hilir, termasuk wilayah pesisir dan nelayan, AKR berperan menjaga ketahanan energi nasional.



Akuisisi Pelabuhan

Akuisisi lima pelabuhan sungai di Guigang memperkuat jejak global. Melalui Sungai Yangtze, AKR mengoperasikan terminal peti kemas dan curah—menjangkau pusat pertumbuhan ekonomi Tiongkok dan membuktikan kapabilitas logistik kelas internasional.







AKR dan Mitra Kelas Dunia

AKR dan Perusahaan Ternama Kelas Dunia Dalam perjalanannya, AKR bermitra dengan beberapa Perusahaan Ternama Kelas Dunia untuk terus menjaga dan mengembangkan keunggulan kompetitifnya, seperti dengan Royal Vopak untuk pengembangan Jakarta Tank Terminal, bp untuk pengembangan jaringan bisnis ritel SPBU, bahan bakar aviasi, dan pelumas industrial, serta metanol dengan Petronas.



Penajaman Fokus Bisnis

AKR melepas kepemilikannya di PT Sorini pada tahun 2011, diikuti dengan divestasi bisnis di China termasuk Pelabuhan Guigang dan entitas Khalista pada tahun 2016/2017. Hal ini dilakukan agar Perusahaan dapat lebih memfokuskan perhatian kepada bisnis inti AKR yaitu logistik dan rantai pasok, terutama di dalam negeri. Sebuah keputusan yang membuka peluang baru atas bisnis di masa depan.







Kawasan Industri sebagai Daya Saing Nasional





Peluang tersebut hadir melalui pengembangan bersama Pelindo, suatu kawasan Industri dan pelabuhan terpadu yang diharapkan dapat mengurangi biaya logistik secara signifikan, yang tidak hanya berdampak kepada tenant, tetapi juga kawasan. Maka lahirlah *Java Integrated Industrial and Port Estate* (JIIPE), sebuah Kawasan Industri yang mengintegrasikan kawasan industri dan pelabuhan laut dalam. Inilah puncak visi enam dekade membangun ekosistem logistik terintegrasi demi efisiensi dan daya saing Indonesia. Kawasan industri ini menawarkan daya saing dari lokasi yang strategis dan integrasi dengan pelabuhan laut dalam, dikombinasikan dengan fasilitas dan utilitas kelas dunia. Kawasan ini pun dianugerahi status Kawasan Ekonomi Khusus pada tahun 2018 dan berhasil menarik investasi yang signifikan baik asing maupun domestik.

Orkestrasi Rantai Pasok Terintegrasi



AKR terus berupaya menjaga stabilitas melalui efisiensi operasional, digitalisasi, dan penguatan rantai pasok. Distribusi BBM serta kimia dasar membutuhkan peran digitalisasi untuk meningkatkan keunggulan kompetitif dan juga transparansi. Sejak awal, AKR berkomitmen untuk dapat meningkatkan layanan dengan mengembangkan sistem *monitoring* yang kini berevolusi menjadi *control tower*. Teknologi *control tower* ini memungkinkan AKR mampu beroperasi secara efisien dan aman di tengah volatilitas energi global maupun pandemi yang terjadi.







65 Tahun Ketangguhan dan Keberlanjutan

Kini, dengan pengalaman panjang selama 65 tahun, AKR terus mengukuhkan posisinya sebagai simpul penting di logistik dan rantai pasok energi dan bahan kimia. Kehadirannya dalam berperan untuk mendukung industrialisasi dan ketahanan energi nasional semakin nyata. Ke depan, AKR akan terus bertumbuh secara berkelanjutan dan memberikan dampak yang meluas termasuk ke area baru seperti Indonesia Timur dan juga pengembangan energi yang lebih bersih di masa depan.

Penguatan Posisi KEK JIIPE **sebagai Hub Industri Strategis Nasional**

KEK JIIPE semakin menegaskan perannya sebagai pusat pertumbuhan industri baru yang strategis. Berkembang sebagai simpul dalam ekosistem industri nasional, KEK JIIPE berkontribusi dalam mendorong hilirisasi serta integrasi rantai pasok yang lebih efisien. Aktivitas kawasan industri pun turut membuka peluang kerja yang memberikan dampak positif terhadap pembangunan manusia di Gresik. Momentum ini mencerminkan kemajuan JIIPE sebagai bagian dari upaya memperkuat pertumbuhan ekonomi regional dan mendukung perkembangan industri nasional secara berkelanjutan.

Kemajuan signifikan KEK JIIPE tercermin dari penguatan fasilitas, meningkatnya aktivitas *tenant*, serta pengembangan ekosistem industri:

a. JIIPE bersama Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Jawa Timur resmi meluncurkan Unit Layanan Izin Tinggal dan Informasi Keimigrasian (ULITIK) pada November 2025.
b. Meluncurkan uji coba (*piloting*) *Auto Gate System* Bea Cukai di kawasan pabean untuk mempercepat arus logitik.
c. Meresmikan penguatan pasokan listrik bersama PLN dengan kapasitas 40 MVA.
d. Mendukung kelancaran operasional kawasan industri melalui penyelesaian pembangunan kantor polisi.

33 *tenant*

Tenant strategis

Rp111,5 Triliun

Akumulasi capaian investasi

+40.000 orang

Penyerapan tenaga kerja di Gresik selama 5 tahun terakhir

5 kluster industri terbentuk:

- Logam (pemurnian tembaga)
- Bahan kimia
- Kaca/gelas/energi terbarukan
- Logistik & pelabuhan
- Elektronik

Pengakuan atas peran KEK JIIPE dalam mendorong investasi:

- Excellence in Investment Dominance & Strategic Downstreaming dari Bisnis Indonesia Group (BIG)
- CSR Award dari Pemerintah Kabupaten Gresik
- Investment Award dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur

Keberhasilan JIIPE didukung oleh:

Pengembangan utilitas kluster kawasan berstandar internasional, termasuk suplai energi, pengolahan air, dan infrastruktur pendukung industri berteknologi tinggi



Peningkatan realisasi investasi dan penyerapan tenaga kerja



Penguatan peran sebagai hub industri strategis nasional, khususnya untuk sektor logam, kimia, energi terbarukan, hilirisasi, serta logistik dan pelabuhan



Optimalisasi Status Kawasan Ekonomi Khusus yang memberikan insentif fiskal dan non-fiskal, sehingga meningkatkan daya tarik investasi



Transformasi menjadi salah satu pusat hilirisasi logam terbesar di Asia Tenggara ditandai dengan diresmikannya fasilitas peleburan dan pemurnian mineral oleh Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto



JIIPE Mendukung Energi Bersih dan Rendah Karbon



Menyediakan energi yang lebih bersih dan terbarukan



Panel surya di *rooftop* telah dipasang pada pusat utilitas JIIPE, mendukung pemanfaatan sumber energi terbarukan.



Kawasan industri tanpa limpasan air.



Fasilitas pengolahan air dan air limbah (WTP & WWTP) untuk menyediakan air bersih dan daur ulang serta mengurangi limpasan air.



Pembangkit listrik tenaga gas menjadi beroperasi sebagai sumber listrik alternatif untuk melengkapi listrik tegangan tinggi dari PLN.

Menggerakkan Indonesia Maju dengan **Kepercayaan dan Inovasi**

AKR merupakan perusahaan terkemuka di Indonesia dalam bidang logistik dan rantai pasok, serta pengembang kawasan industri dan pelabuhan terintegrasi terbesar di Indonesia. Perseroan menyediakan produk bahan kimia dasar, energi, dan infrastruktur terintegrasi untuk mendukung kebutuhan industri serta mendorong masa depan yang berkelanjutan.

Kekuatan AKR

- **Model bisnis yang telah teruji**
- **Efisiensi biaya**
- **Manajemen modal kerja yang disiplin**
- **Investasi pada pertumbuhan baru**

Komitmen untuk menyalurkan energi dan solusi industri secara andal diwujudkan melalui kepercayaan dan inovasi yang berkelanjutan. Upaya ini tercermin dalam pemenuhan kebutuhan pelanggan industri, peran sebagai mitra strategis bagi pemasok, kepatuhan terhadap regulasi, serta penciptaan nilai bagi pemegang saham dan pemangku kepentingan.

Ketahanan AKR tercermin dari model bisnis yang solid dan infrastruktur terintegrasi yang komprehensif. Jaringan logistik Perseroan didukung oleh 13 pelabuhan laut, 6 pelabuhan sungai, serta fasilitas tangki penyimpanan dan gudang di 21 lokasi di seluruh Indonesia, memastikan distribusi yang efisien dan andal di berbagai wilayah kepulauan Indonesia.

Lokasi Tank Terminal

13 Cabang
19 Pelabuhan Laut dan Sungai



Sumatera
46.100 KL

- Medan Anggada
- Medan Gabion
- Palembang Andahanesa
- Lampung

Jawa-Bali
584.200 KL

- Banten Ciwandan
- Jakarta Tank Terminal (JTT)
- Tj Priok
- Bandung
- Semarang Tj Emas
- Surabaya Nilam Timur
- Surabaya Nilam Utara
- Manyar - KEK JIIPE
- Anugrah Kreasi Pratama Indonesia (AKPI)
- Terminal Nilam Utara (TNU)
- Bali

Kalimantan
159.600 KL

- Pontianak
- Buntok Muara Teweh
- Banjarmasin
- Stagen – Kalsel
- Palaran

Sulawesi
30.500 KL

- Morowali
- Bitung



19
Pelabuhan Laut dan Sungai

176
SPBU oleh AKR & bp AKR

820.400 KL
Terminal Tangki Penyimpanan

14
Unit Kapal/SPOB

50.000 Sq.m
Kapasitas Gudang

±250
Unit Truk Tangki BBM & Kimia

Pencapaian AKR **Tahun 2025**

Total Penjualan dan Pendapatan

Rp46.018 miliar

Perdagangan dan Distribusi

Rp34.013 miliar

Bahan Bakar Minyak

Perdagangan dan Distribusi

Rp7.301 miliar

Bahan Kimia Dasar

Pabrikan

Rp464 miliar

Kawasan Industri

Rp2.741 miliar

Jasa Logistik

Rp1.499 miliar



Total Aset

Rp36.562 miliar

Total Ekuitas

Rp15.610 miliar

EBITDA

Rp3.674 miliar

Laba Neto

Rp2.473 miliar

ROE

20 %

ROA

7 %

Net Gearing

-0,08 kali

Net Cash



Memperluas Aksi Keberlanjutan, **Menjaga Ketahanan Energi**

AKR menjadikan keberlanjutan sebagai inti dari strategi bisnis untuk menciptakan nilai jangka panjang. Melalui peran strategisnya dalam menjaga ketahanan dan pemerataan distribusi energi, praktik usaha yang bertanggung jawab, tata kelola yang kuat, serta kolaborasi yang mendukung pembangunan sosial ekonomi di berbagai wilayah Indonesia, AKR memastikan pertumbuhan usaha yang selaras dengan kepentingan para pemangku kepentingan.

Setiap langkah strategis AKR diarahkan untuk mendorong kemajuan yang inklusif, meningkatkan kualitas hidup masyarakat sekitar wilayah operasi, serta memperkuat daya saing usaha secara berkesinambungan. Sebagai pelaku usaha dalam distribusi energi dan pengembangan kawasan industri, AKR secara konsisten meningkatkan kontribusi terhadap masa depan hijau dengan menekan jejak lingkungan, memperluas dukungan terhadap bahan bakar yang lebih bersih, mendorong praktik bisnis rendah karbon di seluruh ekosistem usahanya sebagai bagian dari kontribusi nyata terhadap transisi energi nasional.

Dengan pendekatan yang terukur dan berbasis nilai, AKR mengintegrasikan aspek Lingkungan, Sosial, dan Tata Kelola (ESG) ke dalam proses pengambilan keputusan dan operasional sehari-hari. Pembentukan Komite ESG memperkuat pengawasan dan evaluasi atas implementasi kebijakan serta program keberlanjutan, sehingga setiap strategi dan inisiatif berjalan konsisten, terukur, dan selaras dengan tujuan jangka panjang Perseroan.

Pencapaian Kinerja ESG 2025

E
Environmental

- **187.083 GJ** penggunaan energi terbarukan ↑ dari 156.557 GJ di tahun 2024
- **50.124 ton CO_2e** emisi cakupan 1 & 2 ↓ dari 53.596 ton CO_2e di tahun 2024
- **0,012 ton CO_2e / Rp juta** intensitas emisi ↓ dari 0,015 ton CO_2e / Rp juta di tahun 2024
- **+26%** peningkatan bauran energi ternormalisasi
- **Rp9,1 miliar** biaya pengelolaan lingkungan ↑ dari Rp8,2 miliar di tahun 2024

S
Social

- **Rp32,80 miliar** realisasi investasi CSR ↑ meningkat signifikan dari Rp10,3 miliar di tahun 2024
- **23% perempuan** pada posisi *middle-up management*
- **13,6 juta km** jarak tempuh armada tanpa kecelakaan ↑ dari 12,7 juta km di tahun 2024
- **+15%** peningkatan penyerapan tenaga kerja lokal (SPBU)
- **62%** karyawan putra daerah dalam operasional ↓ dari 64% di tahun 2024
- **Nihil** insiden keselamatan mayor
- **100%** entitas anak menjalankan program ESG

G
Governance

- **101,06 Skor** tata kelola ACGS menunjukkan peningkatan kualitas tata Kelola
  Lihat pada **halaman 175**
- **Nihil** pelanggaran hukum dan regulasi
- **Peningkatan skor** ESG
- **Sosialisasi PSPK 1 & 2** mencerminkan kesiapan menghadapi regulasi keberlanjutan dan pelaporan
- **Total investasi** di KEK JIIPE berkontribusi pada ekonomi Jawa Timur

Lihat pada **halaman 119–120**

Indeks saham utama dan ESG

LQ45
Bisnis 27
IDX Sharia Growth
MNC 36
Kompas100
MSCI SMALL CAPS INDEX
Investor 33
Pefindo IGrade 30
Top 8 IDX ESG Star Listed Company
IDX LQ45 Low Carbon Leaders
IDX ESG Leader Index
ESG Sector Leaders IDX KEHATI
ESG Quality 45 IDX KEHATI

Rating ESG oleh Lembaga Internasional





S&P Global CSA
Meningkat menjadi 38, terjaga di atas rata-rata industri

S&P Global





Daftar Isi

Sanggahan dan Batasan Tanggung Jawab	1
Penjelasan Tema Tahun 2025	2
Kesinambungan Tema	4
Visi dan Misi	6
Pilar Strategi dalam Menjaga Sinergi dan Mewujudkan Cita	7
65 Tahun AKR Tangguh di Setiap Siklus Ekonomi	8
Penguatan Posisi KEK JIIPE sebagai Hub Industri Strategis Nasional	12
Menggerakkan Indonesia Maju melalui Kepercayaan dan Inovasi	14
Pencapaian AKR Tahun 2025	16
Memperluas Aksi Keberlanjutan, Menjaga Ketahanan Energi	18
Daftar Isi	20

01 Ikhtisar Keuangan dan Operasional

Ikhtisar Keuangan	24
Ikhtisar Operasional	28
Ikhtisar Saham	28
Ikhtisar Dividen	30
Ikhtisar Efek Lainnya	30
Penghargaan dan Sertifikasi	32
Peristiwa Penting	34

02 Laporan Manajemen

Laporan Dewan Komisaris	38
Laporan Direksi	44
Surat Pernyataan Dewan Komisaris Tentang Tanggung Jawab atas Laporan Tahunan 2025 PT AKR Corporindo Tbk	54
Surat Pernyataan Direksi Tentang Tanggung Jawab atas Laporan Tahunan 2025 PT AKR Corporindo Tbk	55

03 Profil Perusahaan

Informasi Umum	58
Sejarah Singkat	60
Nilai-Nilai Perusahaan	62
Makna Logo Perusahaan	62
Jejak Langkah Perusahaan	64
Bidang Usaha	66
Segmen Usaha, Produk, dan Jasa	68
Keanggotaan dalam Asosiasi	73
Struktur Organisasi	74
Profil Dewan Komisaris	75
Profil Direksi	78
Informasi Perubahan Anggota Manajemen Setelah Tahun Buku 2025	85
Pejabat Eksekutif	86
Komposisi Pemegang Saham Perusahaan	91
Kronologis Pencatatan Saham	96
Informasi tentang Sukuk dan Obligasi Konversi	97
Struktur Grup Perusahaan	98
Entitas Anak dan Entitas Asosiasi	99
Kantor Akuntan Publik	101
Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal	102
Situs Web Perusahaan	104
Wilayah Operasional dan Daftar Alamat Kantor	106

04 Analisis dan Pembahasan Manajemen

Tinjauan Ekonomi dan Industri	112
Tinjauan Operasional	113
Kinerja Masing-Masing Segmen Bisnis	114
Tinjauan Keuangan	122
Kemampuan Membayar Utang	133
Struktur Modal dan Kebijakan Manajemen atas Struktur Modal	134
Ikatan Material untuk Investasi Barang Modal	135
Realisasi Investasi Barang Modal	136
Target dan Realisasi 2025	136
Proyeksi 2026	137
Program Kepemilikan Saham oleh Karyawan dan Manajemen (MESOP)	138
Informasi dan Fakta Material setelah Tanggal Laporan Akuntan	138
Prospek Usaha	139
Dividen	143

	Aspek Pemasaran	144
	Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum	145
	Informasi Material mengenai Investasi, Ekspansi, Divestasi, Penggabungan/ Peleburan Usaha, Akuisisi, dan Restrukturisasi Utang/Modal	145
	Informasi Transaksi Material yang Mengandung Benturan Kepentingan dan/atau Transaksi dengan Pihak Afiliasi	146
	Perubahan Peraturan Perundang-Undangan	148
	Perubahan Kebijakan Akuntansi yang Berdampak pada Perseroan	148
	Informasi Kelangsungan Usaha	149
05 Fungsi Penunjang Bisnis	Sumber Daya Manusia	152
06 Tata Kelola Perusahaan	Pencapaian Tata Kelola Perusahaan	166
	Komitmen Membangun Tata Kelola Perusahaan	169
	Penilaian Penerapan Tata Kelola	174
	Rapat Umum Pemegang Saham	176
	Pelaksanaan RUPS Tahun 2025	178
	Pelaksanaan RUPS Tahun 2024	183
	Dewan Komisaris	186
	Komisaris Independen	193
	Direksi	194
	Independensi dan Transparansi Informasi Dewan Komisaris dan Direksi	201
	Penilaian Kinerja Dewan Komisaris dan Direksi	208
	Kebijakan Nominasi dan Remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi	208
	Komite Penunjang Dewan Komisaris	211
	Komite-Komite Lain di Bawah Dewan Komisaris yang Dimiliki oleh Perusahaan	220
	Komite Penunjang Direksi	221
	Sistem Pengendalian Internal	230
	Manajemen Risiko	234
	Permasalahan Hukum	240
	Sanksi Administratif	240
	Akses Informasi dan Data Perusahaan	241
	Jalinan Keterikatan dan Komunikasi Investor	242
	Pedoman Etika dan Perilaku	244
	Kebijakan Pemberian Kompensasi Jangka Panjang Berbasis Kinerja Kepada Manajemen dan/atau Karyawan	246
	Kebijakan Anti Korupsi dan Gratifikasi	247
	Whistleblowing System	248
	Upaya Peningkatan Kualitas Penerapan Tata Kelola Perusahaan	250
	Kebijakan *Insider Trading*	250
	Tata Kelola Teknologi Informasi	251
	Pengadaan Barang dan Jasa	256
	Pedoman Penerapan Prinsip Tata Kelola Perusahaan	256
	Keterbukaan Praktik *Bad Governance*	277
07 Tanggung Jawab Sosial Perusahaan	Komitmen Keberlanjutan untuk Masa Depan Bernilai	280
	Implementasi Konsep Keberlanjutan dan Prosedur Penyusunan Laporan Keberlanjutan	280
	Laporan Keuangan	282
	Indeks Pengungkapan Kriteria Isi Laporan Sesuai SEOJK No. 16/SEOJK.04/2021	438

01

Ikhtisar Keuangan dan Operasional

16,4 % CAGR

Pertumbuhan laba neto sejak tahun 2005-2025

Lihat pertumbuhan laba neto pada **halaman 25**




INDONESIA
SEZ
ANDA MEMASUKI
KAWASAN
EKONOMI KHUSUS
GRESIK

Ikhtisar Keuangan

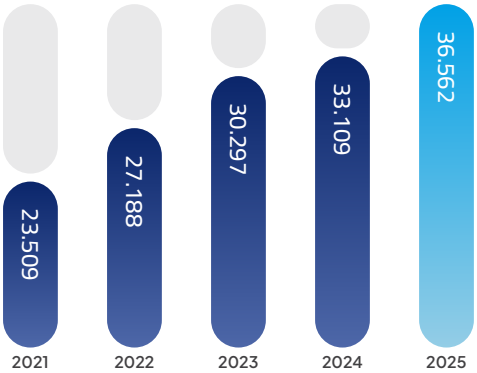
Posisi Keuangan Konsolidasian

dalam Miliar Rupiah

Uraian	2025	2024	2023	2022	2021
Modal Kerja Bersih	7.487	7.544	5.588	4.561	2.716
Investasi pada Entitas Asosiasi	536	492	446	417	402
Aset Lancar	23.324	20.998	18.163	15.841	12.023
Aset Tidak Lancar	13.239	12.111	12.134	11.346	11.486
Jumlah Aset	**36.562**	**33.109**	**30.297**	**27.188**	**23.509**
Liabilitas Jangka Pendek	15.837	13.454	12.575	11.280	9.307
Liabilitas Jangka Panjang	5.115	5.030	3.678	2.752	2.903
Jumlah Liabilitas	**20.952**	**18.485**	**16.254**	**14.033**	**12.210**
Ekuitas yang Dapat Diatribusikan kepada Pemilik Entitas Induk	12.156	11.563	11.263	10.969	9.345
Kepentingan Non-pengendali	3.454	3.061	2.780	2.186	1.954
Jumlah Ekuitas	**15.610**	**14.624**	**14.043**	**13.155**	**11.299**

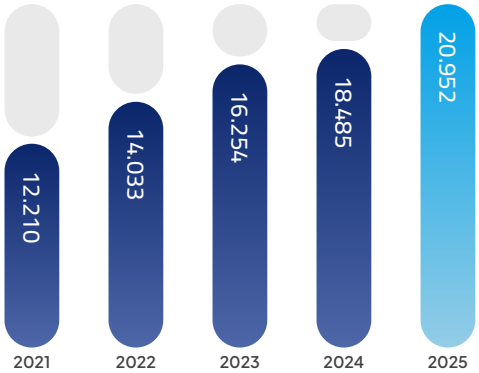
Jumlah Aset

Rp Miliar



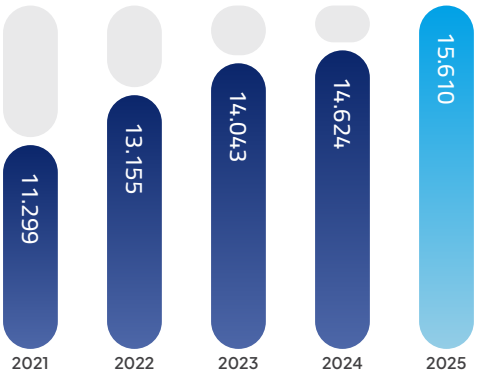
Jumlah Liabilitas

Rp Miliar



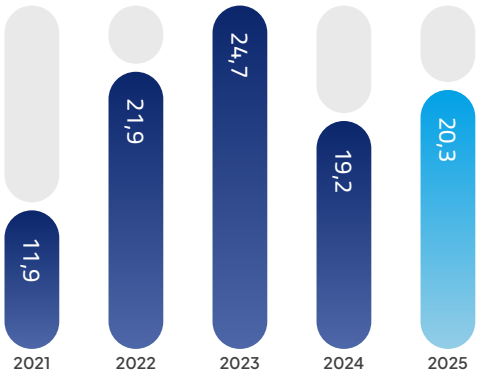
Jumlah Ekuitas

Rp Miliar



Rasio Laba terhadap Ekuitas

%



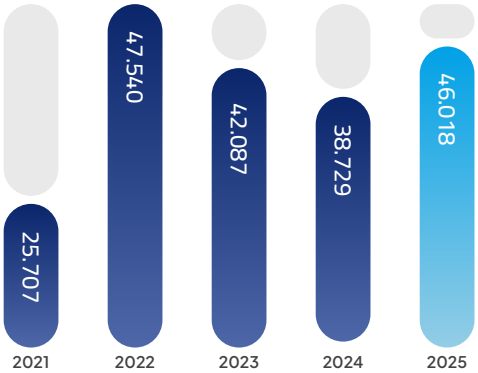
Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian

dalam Miliar Rupiah

Uraian	2025	2024	2023	2022	2021
Penjualan dan Pendapatan	46.018	38.729	42.087	47.540	25.707
Laba Bruto	4.098	3.509	4.473	4.252	2.293
Laba Usaha	3.084	2.578	3.561	3.087	1.455
Laba Neto Tahun Berjalan	2.823	2.399	3.078	2.479	1.135
Laba Tahun Berjalan yang Dapat Diatribusikan kepada Pemilik Entitas Induk	2.473	2.225	2.780	2.403	1.112
Laba Tahun Berjalan yang Dapat Diatribusikan kepada Kepentingan Non-Pengendali	351	174	298	76	23
Jumlah Penghasilan Komprehensif Tahun Berjalan	2.867	2.452	3.048	2.576	1.158
Jumlah Penghasilan Komprehensif Tahun Berjalan yang Dapat Diatribusikan kepada Pemilik Entitas Induk	2.491	2.254	2.761	2.453	1.126
Jumlah Penghasilan Komprehensif Tahun Berjalan yang Dapat Diatribusikan kepada Kepentingan Non-Pengendali	376	199	287	123	32
Laba per Saham (Rupiah Penuh)	125,24	112,73	140,87	121,77	56,32

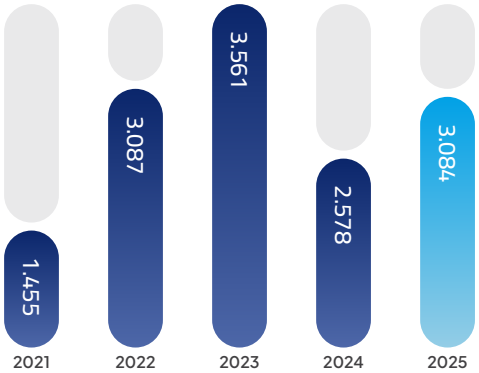
Penjualan dan Pendapatan

Rp Miliar



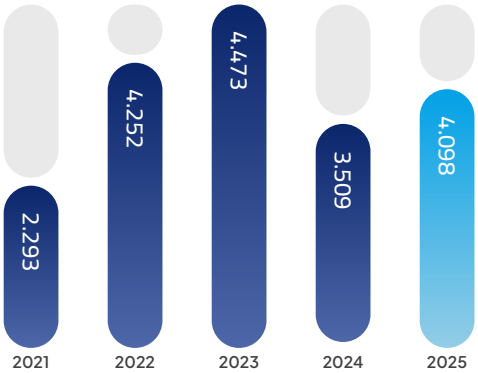
Laba Usaha

Rp Miliar



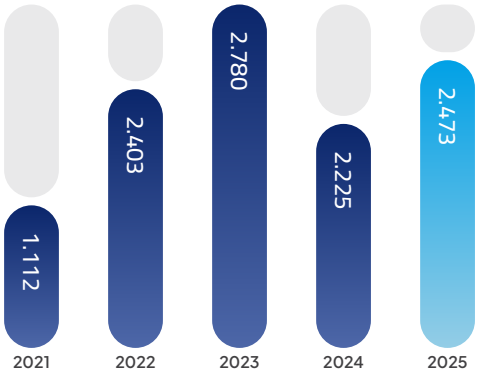
Laba Bruto

Rp Miliar



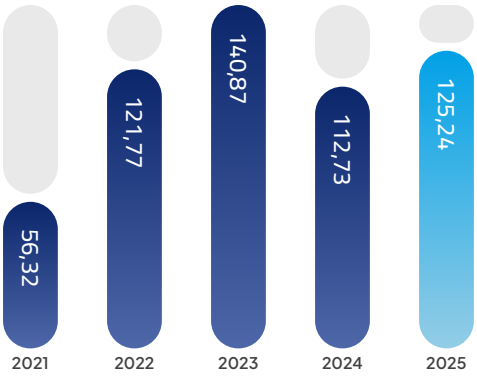
Laba Tahun Berjalan yang Dapat Diatribusikan kepada Pemilik Entitas Induk

Rp Miliar



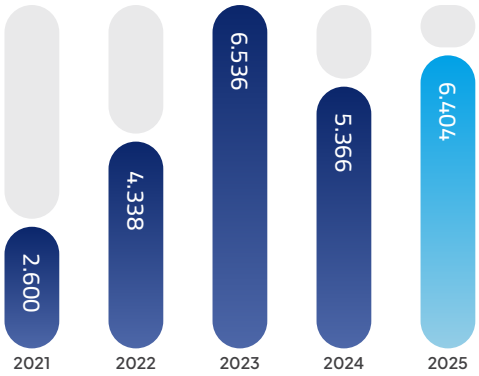
Laba per Saham

Rp



Saldo Kas dan Setara Kas

Rp Miliar



Arus Kas Konsolidasian

dalam Miliar Rupiah

Uraian	2025	2024	2023	2022	2021
Kas Neto yang Diperoleh dari Aktivitas Operasi	3.941	1.347	3.502	2.629	2.945
Kas Neto yang Digunakan untuk Aktivitas Investasi	(1.309)	(1.173)	(584)	(276)	(208)
Kas Neto yang Digunakan untuk Aktivitas Pendanaan	(1.689)	(1.470)	(648)	(873)	(1.683)
Kenaikan (Penurunan) Neto Kas dan Setara Kas	**943**	**(1.296)**	**2.270**	**1.479**	**1.053**
Dampak Perubahan Selisih Kurs	96	127	(72)	258	(2)
Kas dan Setara Kas Awal Tahun	**5.366**	**6.536**	**4.338**	**2.600**	**1.549**
Kas dan Setara Kas Akhir Tahun	**6.404**	**5.366**	**6.536**	**4.338**	**2.600**

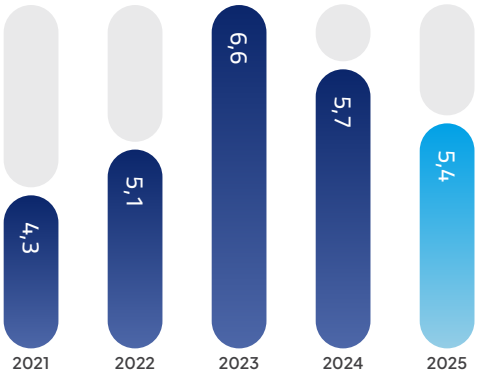
Rasio Keuangan Konsolidasian

dalam % kecuali dinyatakan lain

Uraian	2025	2024	2023	2022	2021
Rasio Laba terhadap Jumlah Aset	6,8	6,7	9,2	8,8	4,7
Rasio Laba terhadap Ekuitas	20,3	19,2	24,7	21,9	11,9
Rasio Laba terhadap Pendapatan	5,4	5,7	6,6	5,1	4,3
Rasio Lancar (kali)	1,5	1,6	1,4	1,4	1,3
Rasio Liabilitas terhadap Ekuitas (kali)	1,3	1,3	1,2	1,1	1,1
Rasio Utang terhadap Ekuitas (kali)	0,3	0,3	0,3	0,2	0,2
Rasio Liabilitas terhadap Jumlah Aset (kali)	0,6	0,6	0,5	0,5	0,5
Marjin Laba Bruto	8,9	9,1	10,6	8,9	8,9
Marjin Laba Usaha	6,7	6,7	8,5	6,5	5,7
Tingkat Perputaran Jumlah Aset (kali)	1,3	1,2	1,4	1,7	1,1
Rasio *Gearing* Bersih (kali)	-0,08	-0,04	-0,16	-0,12	0,02
Rasio Harga terhadap Laba (kali)	10,7	9,9	10,5	11,5	14,6

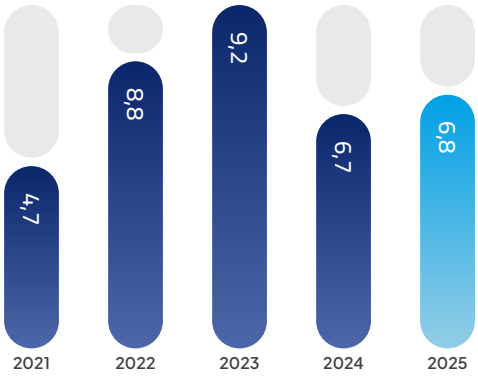
Rasio Laba terhadap Pendapatan

%



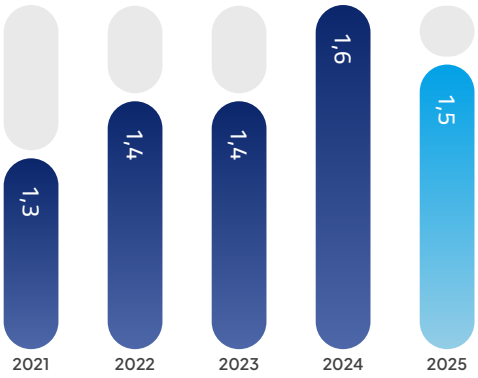
Rasio Laba terhadap Jumlah Aset

%



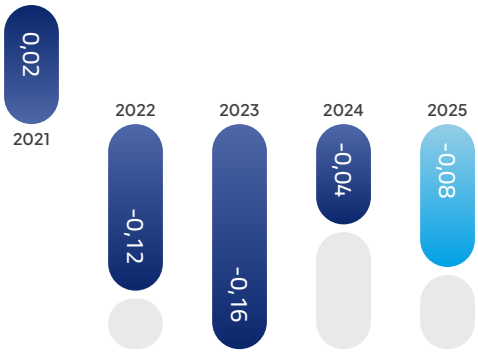
Rasio Lancar

kali



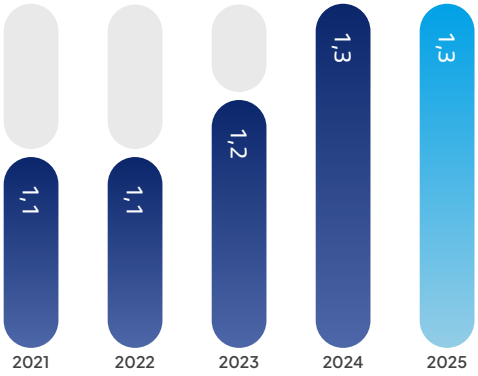
Rasio *Gearing* Bersih

kali



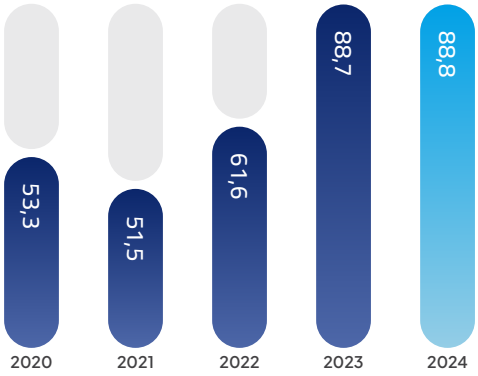
Rasio Liabilitas terhadap Ekuitas

kali



Rasio Pembagian Dividen

%



Ikhtisar Operasional

Segmen Operasi terhadap Penjualan dan Pendapatan

dalam Miliar Rupiah

Uraian	2025	2024	2023	2022	2021
Perdagangan dan Distribusi	41.314	35.532	38.213	44.698	23.712
Jasa Logistik	1.499	1.165	993	893	772
Pabrikan	464	652	558	800	684
Kawasan Industri	2.741	1.381	2.323	1.149	539

Ikhtisar Saham

Kinerja Perdagangan Saham

Pada 3 Oktober 1994, PT AKR Corporindo Tbk menandai tonggak penting dalam perjalanan usahanya dengan melaksanakan Penawaran Umum Perdana dan mencatatkan sahamnya di Bursa Efek Indonesia dengan kode saham AKRA.

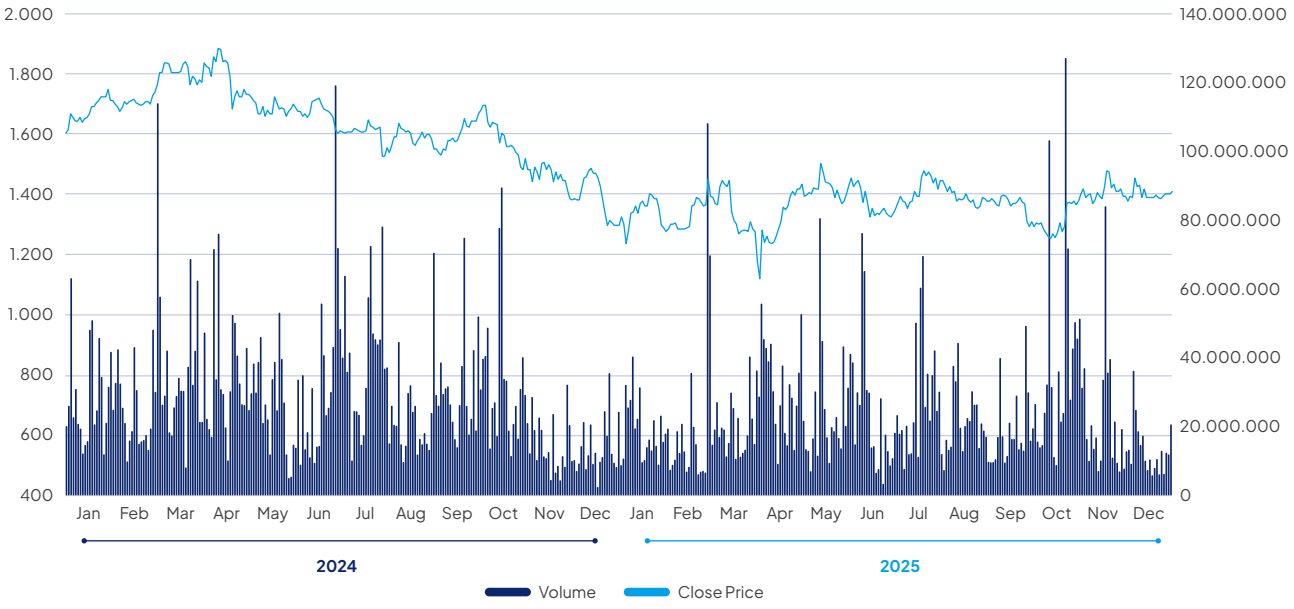
Uraian	2025	2024	2023	2022	2021
Kapitalisasi Pasar (Rp Miliar)	25.293	22.482	29.608	28.103	16.500
Harga Tertinggi (Rp)	1.430	1.865	1.670	1.580	944
Harga Terendah (Rp)	890	1.075	1.200	685	554
Harga Penutupan (Rp)	1.260	1.120	1.475	1.400	822
Volume Perdagangan (Lembar Saham)	5.473.770.000	6.634.160.000	8.660.986.800	13.281.510.800	15.728.500.500
Jumlah Saham Beredar (Lembar Saham)	20.073.474.600	20.073.474.600	20.073.474.600	20.073.474.600	20.073.474.600

Kinerja Saham Per Triwulan

Periode	Harga Saham (Rp)			Volume Perdagangan (Lembar Saham)	Jumlah Saham Beredar (Lembar Saham)	Kapitalisasi Pasar (Rp miliar)
	Tertinggi	Terendah	Penutupan			
2025						
Triwulan 1	1.330	1.030	1.095	1.126.200.000	20.073.474.600	21.980
Triwulan 2	1.380	890	1.160	1.466.800.000	20.073.474.600	23.285
Triwulan 3	1.365	1.105	1.210	1.315.660.000	20.073.474.600	24.289
Triwulan 4	1.430	1.065	1.260	1.565.050.400	20.073.474.600	25.293

Periode	Harga Saham (Rp)			Volume Perdagangan (Lembar Saham)	Jumlah Saham Beredar (Lembar Saham)	Kapitalisasi Pasar (Rp miliar)
	Tertinggi	Terendah	Penutupan			
2024						
Triwulan 1	1.825	1.475	1.720	1.741.810.000	20.073.474.600	34.526
Triwulan 2	1.865	1.530	1.620	1.474.260.000	20.073.474.600	32.519
Triwulan 3	1.620	1.530	1.550	2.125.090.000	20.073.474.600	31.114
Triwulan 4	1.650	1.075	1.120	1.293.000.000	20.073.474.600	22.482

Grafik Perdagangan Saham Tahun 2024 – 2025



Aksi Korporasi

Hingga akhir tahun 2025, Perseroan tidak melakukan aksi korporasi yang berdampak pada perubahan struktur saham, termasuk pemecahan saham (*stock split*), penggabungan saham (*reverse stock*), penerbitan saham bonus, maupun perubahan nilai nominal saham.

Sanksi atas Perdagangan Saham

Per 31 Desember 2025, AKR tidak pernah dikenakan sanksi yang berdampak pada aktivitas perdagangan saham di Bursa Efek tempat Perseroan tercatat, termasuk penghentian sementara perdagangan saham (*suspension*) maupun pembatalan pencatatan saham (*delisting*).

Ikhtisar **Dividen**

Dividen Kas	Dividen Kas Tahun Buku 2024	Dividen Kas Tahun Buku 2023
Dividen Kas yang Dibagikan (Rp Miliar)	1.975	2.467
Dividen per Lembar Saham (Rp)	Rp100	Rp125
Rasio Pembayaran Dividen (%)	88,77%	88,73%

Keterangan	Tahun Buku 2024		Tahun Buku 2023		
	Interim 1	Final	Interim 1	Interim 2	Final
Tanggal Keputusan RUPS dan Keputusan Direksi	23 Juli 2024 Rp50 saham	28 April 2025 Rp50 saham	24 Juli 2023 Rp50 saham	23 Oktober 2023 Rp25 saham	29 April 2024 Rp50 saham
Tanggal Pembayaran	15 Agustus 2024 Rp50 saham	22 Mei 2025 Rp50 saham	16 Agustus 2023 Rp50 saham	15 November 2023 Rp25 saham	27 Mei 2024 Rp50 saham

Ikhtisar **Efek Lainnya**

Sepanjang tahun 2025, Perseroan tidak memiliki efek lainnya yang masih *outstanding* di Bursa Efek manapun. Dengan demikian, informasi mengenai hal tersebut tidak disajikan dalam Laporan Tahunan ini.


AKR

Penghargaan dan **Sertifikasi**

01 **Best of The Best Execution Winner across All Industries**
SPEX2 Award 2025

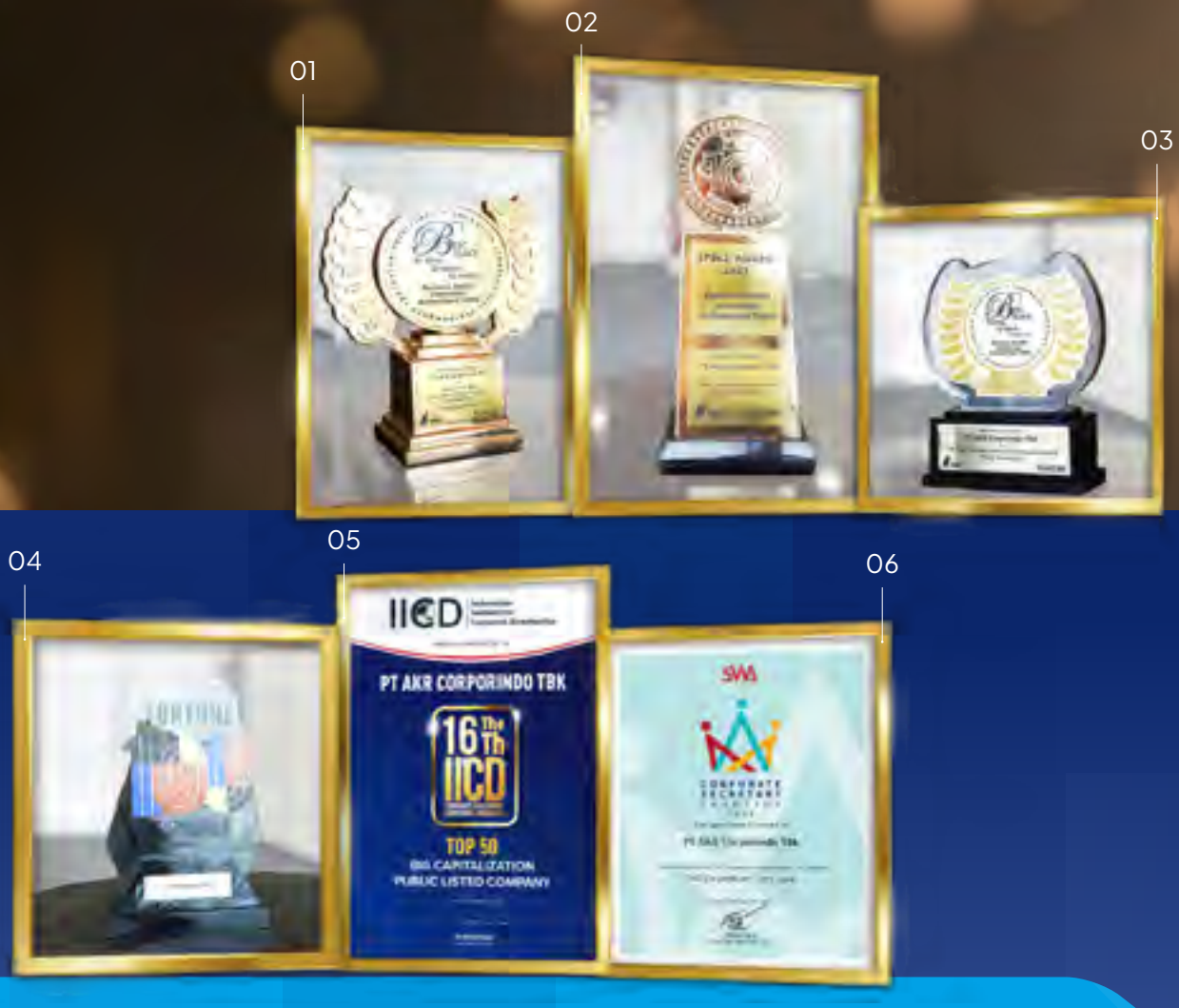
02 **Triple Excellence Platinum Award**
SPEX2 Award 2025

03 **The Best Execution Winner in Distribution Industry**
SPEX2 Award 2025

04 **Fortune 100 Indonesia's Biggest Companies 2025**
Fortune Magazine

05 **Top 50 Big Capitalization Public Listed Company 2025**
Indonesian Institute for Corporate Directorship (IICD)

06 **Corporate Secretary Champion Award 2025**
SWA Magazine



07 **The Best Indonesia GCG Award IX 2025**
Economic Review

08 **Best Strategy Execution in Uncertain Times**
SPEX2 Award 2025

09 **Keselamatan Migas 2025 :**
- **Patra Nirbhaya Karya Utama untuk AKR**
- **Patra Nirbhaya Karya Utama untuk PT Aneka Petroindo Raya (bp AKR)**
- **Patra Nirbhaya Karya Madya untuk PT Jakarta Tank Terminal (JTT)**

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) melalui Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi

10 **2025 Asia (ex Japan/ANZ) Equities Awards :**
- **Best CEO (3rd Rank)**
- **Best Investor Relations (2nd Rank) Professional & Team**
- **Best Company Board of Directors (2nd Rank)**

Extel Insight, Hong Kong

11 **ASEAN Asset Class Public Listed Companies**
ASEAN Corporate Governance Conference & Awards (ASEAN CGCA) 2025

12 **The Best Indonesia Annual Report Award 2025 (Skor 85,10)**
Economic Review

13 **Castrol Global Award for Sustained Growth and Technical Excellence (ALR)**
Castrol Global Conference



Peristiwa Penting **Tahun 2025**



17 Maret 2025

Peresmian Fasilitas Pemurnian Logam Mulia oleh Presiden RI Prabowo Subianto

AKR melalui JIIPE mencatat tonggak strategis melalui peresmian fasilitas *Precious Metal Refinery* di Gresik. Kehadiran fasilitas pemurnian berteknologi tinggi ini memperkuat implementasi hilirisasi mineral nasional dengan meningkatkan nilai tambah sumber daya dalam negeri. Hal ini juga mengukuhkan posisi JIIPE sebagai pusat terintegrasi industri logam mulia yang berdaya saing global.



25 April 2025

Ekspansi Global JIIPE Melalui Kemitraan dengan GESC

JIIPE menandai langkah strategis dengan dimulainya investasi *Golden Elephant Sincerity* (GESC) melalui serah terima lahan lebih dari 20 hektare di Gresik, Jawa Timur. Proyek senilai sekitar USD 600 juta ini menjadi ekspansi global perdana GESC dan menempatkan Indonesia sebagai basis pengembangan regionalnya.



28 April 2025

Persetujuan Pembagian Dividen Tahun Buku 2024

RUPS 2025 menyetujui pembagian dividen AKR Tahun Buku 2024 sebanyak Rp1.975 miliar atau Rp100/saham dengan *payout ratio* 88,77% dari laba neto. Hal ini menandai komitmen Perseroan dalam memberikan nilai tambah yang berkelanjutan kepada para pemegang saham, seiring dengan kinerja keuangan yang solid.



22 Juli 2025

Peresmian SPBU ke-70 di Kawasan BSD

Dengan diresmikannya SPBU ke-70 di BSD, Tangerang Selatan, bp AKR melanjutkan ekspansi jaringan ritel bahan bakar secara konsisten. Peresmian SPBU ini juga memperkuat posisi Perseroan dalam mendukung mobilitas dan kebutuhan energi berbasis layanan berkualitas di pasar domestik.



25 Juli 2025

Tonggak Penting AKR di ASEAN

Perseroan mendapat pengakuan sebagai ASEAN Asset Class Public Listed Company dalam hasil ASEAN Corporate Governance Scorecard (ACGS) 2024. Penghargaan ini diumumkan pada ASEAN Corporate Governance Awards 2025 di Malaysia, yang menempatkan Perseroan di antara perusahaan publik teratas di Asia Tenggara dalam penilaian tata kelola perusahaan. Pengakuan ini mencerminkan konsistensi dalam praktik transparansi, efektivitas Manajemen, dan kepercayaan jangka panjang para pemangku kepentingan.



14 November 2025

Penghargaan Keselamatan Migas AKR Group

AKR Group menerima penghargaan Patra Nirbhaya Karya Utama dan Patra Nirbhaya Karya Madya dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral dalam ajang Penghargaan Keselamatan Migas. Penghargaan tersebut diberikan atas keberhasilan unit-unit operasional AKR Group dalam mempertahankan kinerja keselamatan kerja yang unggul tanpa kecelakaan yang mengakibatkan kehilangan jam kerja. Capaian ini mencerminkan penerapan sistem keselamatan dan kesehatan kerja yang disiplin serta konsisten di seluruh aktivitas operasional.



11 Desember 2025

Pengakuan Nasional untuk KEK JIIPE Gresik

Kawasan Ekonomi Khusus JIIPE Gresik memperoleh penghargaan pada BIG 40 Awards 2025 dalam kategori *Excellence in Investment Dominance and Strategic Downstreaming*, atas kontribusinya dalam mendorong investasi dan pengembangan industri hilir yang terintegrasi. Sebagai kawasan industri dan pelabuhan terpadu, JIIPE berperan dalam memperkuat rantai nilai industri serta meningkatkan daya saing manufaktur nasional. Pengakuan tersebut sejalan dengan strategi pengembangan kawasan yang berfokus pada penciptaan nilai tambah, efisiensi logistik, dan keberlanjutan pertumbuhan ekonomi.



15 Januari 2026

Operasional Perdana Fasilitas Kaca Fotovoltaik di JIIPE

JIIPE memasuki fase baru pengembangan industri hijau dengan mulai beroperasinya fasilitas kaca fotovoltaik milik Xinyi Solar. Kehadiran pabrik berteknologi tinggi ini memperkuat kapasitas produksi komponen energi surya di kawasan serta menegaskan daya tarik JIIPE sebagai destinasi investasi manufaktur berkelanjutan di tingkat regional.

02

Laporan Manajemen

Konsistensi penerapan prinsip tata kelola tercermin dari berbagai pencapaian sepanjang tahun pelaporan.

Lihat pencapaian tata kelola pada **halaman 41**

AKR mencatat kinerja operasional dan peristiwa penting yang mendorong ketahanan usaha sepanjang tahun 2025.

Lihat pencapaian usaha pada **halaman 47**





Laporan Dewan Komisaris

Menjaga Fondasi yang Kuat Sambil Mendorong Pertumbuhan Jangka Panjang

Pada tahun 2025, AKR memberikan kinerja yang tangguh di tengah ketidakpastian global, didukung oleh eksekusi yang disiplin dan posisi keuangan yang kuat. Pendapatan mencapai Rp46.018 miliar dengan laba neto Rp2.473 miliar (+11% YoY). Strategi Perseroan difokuskan pada penguatan peran dalam distribusi energi, logistik, dan infrastruktur industri, sekaligus memajukan penciptaan nilai jangka panjang.

Para Pemegang Saham dan Pemangku Kepentingan yang Terhormat,

Dewan Komisaris mengucapkan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas karunia-Nya, serta mengapresiasi komitmen dan dedikasi Direksi, Tim Manajemen, serta seluruh Insan AKR dalam mempertahankan stabilitas usaha dan memperkuat peran PT AKR Corporindo Tbk sebagai mitra distribusi energi dan logistik terpercaya. Dewan Komisaris juga menyampaikan penghargaan kepada para pemegang saham dan pemangku kepentingan atas kepercayaan serta dukungan yang terus diberikan kepada Perseroan.

Saya telah menyaksikan perjalanan AKR selama lebih dari enam dekade dari perusahaan perdagangan kimia dasar hingga berevolusi menjadi perusahaan terintegrasi di bidang distribusi energi, logistik, dan infrastruktur industri. Sepanjang perjalanan tersebut, AKR secara konsisten mendukung pembangunan ekonomi Indonesia melalui penyediaan pasokan energi dan bahan kimia penting, penguatan jaringan distribusi, dan pembangunan infrastruktur yang menghubungkan industri di seluruh kepulauan Indonesia.

Laporan ini merupakan bagian dari pelaksanaan fungsi pengawasan Dewan Komisaris terhadap Direksi dalam menjalankan kegiatan usaha Perseroan sepanjang tahun 2025. Melalui mekanisme pengawasan yang dilakukan secara berkelanjutan, Dewan Komisaris senantiasa memberikan arahan strategis guna memastikan pengelolaan usaha tetap sejalan dengan strategi jangka panjang dan prinsip tata kelola perusahaan yang baik.

Kondisi Ekonomi dan Dinamika Industri Tahun 2025

Sepanjang tahun 2025, perekonomian Indonesia menunjukkan ketahanan yang relatif kuat di tengah perlambatan pertumbuhan global, tekanan dinamika geopolitik, serta volatilitas harga energi dan komoditas. Kondisi ini telah menciptakan tantangan bagi industri di seluruh dunia, khususnya yang bergantung pada logistik dan pasokan energi yang stabil.

Meski menghadapi berbagai tantangan, ekonomi Indonesia tetap tumbuh 5,11% (yoy), didukung konsumsi domestik, investasi, serta berlanjutnya hilirisasi dan pembangunan infrastruktur. Dalam konteks tersebut, keandalan distribusi energi, efisiensi logistik, dan integrasi infrastruktur menjadi semakin krusial, terutama mengingat tantangan struktural sebagai negara kepulauan dalam menjaga konektivitas dan rantai pasok.

Dewan Komisaris memandang dinamika tersebut selaras dengan peran jangka panjang dan posisi strategis Perseroan dalam mendukung pertumbuhan industri dan daya saing nasional.

Peran AKR dalam Pembangunan Nasional dan Ketahanan Energi

Selama lebih dari 65 tahun, Perseroan telah membangun fondasi yang kuat sebagai mitra terpercaya dalam pembangunan Indonesia. Peran Perseroan melampaui aktivitas komersial semata, dengan kontribusi langsung terhadap perekonomian nasional melalui penyediaan energi dan bahan kimia penting bagi industri dan masyarakat secara andal dan berkelanjutan.

Melalui jaringan infrastruktur nasional yang mencakup terminal, fasilitas penyimpanan, armada transportasi, serta sistem distribusi terintegrasi, Perseroan berkontribusi dalam memperkuat ketahanan energi dan efisiensi rantai pasok Indonesia. Infrastruktur tersebut memungkinkan distribusi energi dan bahan kimia dasar ke berbagai wilayah yang tersebar secara geografis, sehingga mendukung aktivitas industri, manufaktur, dan pertumbuhan ekonomi nasional.

Soegiarto Adikoesoemo

Presiden Komisaris



Investasi berkelanjutan Perseroan dalam infrastruktur logistik dan distribusi telah berperan penting dalam mengurangi inefisiensi rantai pasok serta meningkatkan konektivitas antarwilayah. Kontribusi ini menjadi semakin signifikan dalam mendukung pengembangan industri di luar pusat-pusat ekonomi utama.

Selain itu, partisipasi Perseroan dalam berbagai inisiatif energi nasional, termasuk distribusi biodiesel dan perluasan akses bahan bakar, mencerminkan komitmen Perseroan dalam mendukung kebijakan pemerintah serta memastikan ketersediaan energi yang lebih merata bagi masyarakat dan dunia usaha.

Pengembangan JIIPE sebagai Ekosistem Industri Strategis

Salah satu tonggak penting dalam evolusi Perseroan adalah pengembangan *Java Integrated Industrial and Port Estate* (JIIPE), yang merupakan kontribusi strategis Perseroan terhadap penguatan infrastruktur industri nasional.

JIIPE tidak hanya merupakan kawasan industri, melainkan sebuah ekosistem terintegrasi yang menggabungkan lahan industri, fasilitas pelabuhan laut dalam, utilitas, serta konektivitas logistik dalam satu platform terpadu yang dirancang untuk mendukung aktivitas industri berskala besar.

Dewan Komisaris secara aktif memantau perkembangan JIIPE dan memandangnya sebagai inisiatif strategis yang memperkuat prospek pertumbuhan jangka panjang Perseroan. Peningkatan jumlah *tenant* industri, pertumbuhan layanan utilitas, serta semakin optimalnya pemanfaatan infrastruktur mencerminkan kemajuan yang dicapai sepanjang tahun 2025.

JIIPE memainkan peran penting dalam mendukung agenda hilirisasi nasional, menarik investasi asing langsung, serta meningkatkan daya saing sektor manufaktur Indonesia. Pada saat yang sama, pengembangan JIIPE juga memberikan kontribusi yang semakin signifikan terhadap pendapatan berulang Perseroan, sehingga memperkuat stabilitas dan kualitas kinerja keuangan. Dewan Komisaris meyakini bahwa JIIPE akan terus menjadi salah satu penggerak utama penciptaan nilai jangka panjang Perseroan.

Pengawasan terhadap Strategi dan Kinerja Perseroan

Dalam menjalankan fungsi pengawasan, Dewan Komisaris secara konsisten memastikan bahwa strategi yang diterapkan oleh Direksi selaras dengan tujuan jangka panjang Perseroan. Pengawasan terhadap pelaksanaan strategi Perseroan, termasuk penguatan kapasitas distribusi energi dan bahan kimia dasar, pengembangan infrastruktur logistik yang andal, serta pengembangan ekosistem industri terintegrasi di Kawasan Ekonomi Khusus *Java Integrated Industrial and Port Estate* (KEK JIIPE) Gresik sebagai pilar pertumbuhan jangka panjang.

Dewan Komisaris mencermati dan mengevaluasi pelaksanaan dan penyelarasan pengelolaan risiko, struktur permodalan secara prudent, serta konsistensi penerapan tata kelola dan prinsip ESG. Pendekatan tersebut menjadi landasan penting dalam menjaga stabilitas operasional dan keberlanjutan usaha Perseroan.

Berdasarkan pengawasan tersebut, Direksi telah menerapkan strategi usaha secara disiplin dan responsif terhadap dinamika pasar, sehingga mampu menjaga ketahanan bisnis dan kinerja Perseroan tetap solid sepanjang tahun 2025. Stabilitas tersebut didukung oleh kemampuan Perseroan mempertahankan margin usaha, meningkatnya kontribusi pendapatan berulang dari layanan utilitas di KEK JIIPE, serta struktur permodalan yang sehat yang memberikan fleksibilitas keuangan untuk mendukung pertumbuhan berkelanjutan. Pencapaian kinerja AKR berkat kepemimpinan konsisten Direksi sebagai berikut:

Kinerja Keuangan Utama

Profitabilitas Terjaga

Laba neto tahun berjalan sebesar **Rp2.473 miliar**, menegaskan ketahanan kinerja Perseroan di tengah dinamika pasar serta dukungan model bisnis yang terdiversifikasi.

Struktur Keuangan Sehat

Posisi net gearing **–0,08 kali** (*net cash*) menunjukkan kondisi likuiditas yang kuat serta pengelolaan struktur permodalan yang sehat.

Kontribusi Segmen Usaha terhadap Capaian Laba Bruto

73% segmen perdagangan & distribusi
20% segmen kawasan industri
6% segmen logistik dan pabrikan

Efektivitas Pengelolaan Modal

Return on Equity (ROE) sebesar **20%** dan *Return on Assets* (ROA) di **7%**, mencerminkan kemampuan Perseroan dalam mengelola aset dan modal untuk menghasilkan nilai tambah yang berkelanjutan.



Kinerja EBITDA Stabil

Mencapai **Rp3.674 miliar**, mencerminkan kemampuan Perseroan menjaga stabilitas operasional dan menjaga tingkat profitabilitas yang berkelanjutan.



Pandangan atas Penerapan Tata Kelola Perusahaan

Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (GCG) merupakan fondasi utama dalam menjaga keberlanjutan usaha dan memperkuat kepercayaan para pemangku kepentingan. Dewan Komisaris memastikan bahwa pengelolaan usaha sesuai dengan regulasi yang berlaku, standar etika bisnis, serta kebijakan internal Perseroan.

Dewan Komisaris didukung oleh Komite Audit serta Komite Nominasi dan Remunerasi yang berperan penting dalam memperkuat penerapan tata kelola di seluruh organisasi. Kedua komite menjalankan fungsi pengawasan atas pelaporan keuangan, kepatuhan terhadap regulasi, manajemen risiko, serta kesinambungan kepemimpinan Perseroan.

Selain itu, Dewan Komisaris juga memantau efektivitas kerangka manajemen risiko Perseroan, termasuk risiko pasar, risiko operasional, dan dinamika regulasi, guna memastikan bahwa risiko-risiko utama dikelola secara *prudent* dan terukur. Konsistensi penerapan prinsip GCG tercermin dari berbagai pencapaian sepanjang tahun pelaporan.

Pencapaian Penting GCG Tahun 2025

Pengakuan **AKR sebagai ASEAN Asset Class Public Listed Company** mencerminkan konsistensi Perseroan dalam memperkuat praktik transparansi, akuntabilitas, dan GCG.

Penghargaan **Corporate Secretary Champion 2025** merupakan pengakuan atas kualitas keterbukaan informasi serta efektivitas komunikasi Perseroan dengan para pemangku kepentingan.

AKR memperoleh **peningkatan rating MSCI ESG Ratings dari A menjadi AA**, yang menunjukkan penguatan praktik ESG terutama pada dimensi tata kelola dan manajemen risiko.

Penilaian **Sustainalytics tetap terjaga pada tingkat risiko medium dengan skor 20,9**, mencerminkan efektivitas AKR dalam mengelola eksposur terhadap risiko ESG.

Disiplin pengembalian nilai kepada pemegang saham tercermin melalui **pembagian dividen dengan payout ratio sebesar 88,77%**, yang menunjukkan pengelolaan keuangan yang sehat serta komitmen Perseroan dalam memberikan imbal hasil yang berkelanjutan.

Memperoleh skor tinggi **101,06 poin dalam ASEAN Corporate Governance Scorecard** (ACGS), mencerminkan kualitas tata kelola yang unggul di tingkat regional.

Penghargaan The Most Honored Company dan Best Investor Relation Team dari Extel Insight di Hong Kong menjadi refleksi kepercayaan dan pengakuan global atas kepemimpinan model bisnis, keterbukaan informasi, dan efektivitas Direksi dalam eksekusi strategi.



Pandangan atas Prospek Usaha

Dewan Komisaris memandang bahwa prospek usaha Perseroan tetap positif. Pertumbuhan ekonomi Indonesia yang berkelanjutan, dikombinasikan dengan meningkatnya permintaan energi, logistik, dan infrastruktur industri, memberikan fondasi yang kuat untuk pertumbuhan di masa depan.

Dewan Komisaris mendukung arah strategis Direksi yang berfokus pada penguatan bisnis inti, perluasan KEK JIIPE dan layanan utilitas, serta peningkatan pendapatan berulang dengan tetap menjaga disiplin keuangan dan manajemen risiko. Pada saat yang sama, Dewan Komisaris menekankan pentingnya kemampuan adaptasi dalam merespons ketidakpastian global dan dinamika industri yang terus berkembang.

Perubahan Komposisi Dewan Komisaris

Sepanjang tahun 2025, tidak terdapat perubahan komposisi Dewan Komisaris. Berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) yang diselenggarakan pada tanggal 28 April 2025, seluruh anggota Dewan Komisaris telah diangkat kembali untuk masa jabatan terhitung hingga penutupan RUPST tahun 2030. Adapun keanggotaan Dewan Komisaris Perseroan, sebagai berikut:

Nama	Jabatan
Soegiarto Adikoesoemo	Presiden Komisaris
Sofyan A. Djalil	Komisaris
Fauzi Ichsan	Komisaris Independen

Penutup dan Apresiasi

Dewan Komisaris meyakini bahwa Perseroan telah membangun fondasi yang kuat melalui model bisnis, infrastruktur, dan praktik tata kelola yang solid. Dewan Komisaris meyakini bahwa sinergi yang kuat antara Perseroan, pemerintah, serta para pemangku kepentingan akan terus mendukung ketahanan energi dan penguatan industrialisasi sejalan dengan arah pembangunan Indonesia ke depan yang semakin mandiri dan berdaya saing.

Atas nama Dewan Komisaris, kami menyampaikan apresiasi kepada Direksi, manajemen, karyawan, pemegang saham, dan seluruh pemangku kepentingan atas kepercayaan dan dukungan yang berkelanjutan

Jakarta, 2 April 2026
Atas Nama Dewan Komisaris



Soegiarto Adikoesoemo
Presiden Komisaris

Dewan **Komisaris**



Dari kiri ke kanan:

Fauzi Ichsan
Komisaris Independen

Soegiarto Adikoesoemo
Presiden Komisaris

Sofyan A. Djalil
Komisaris

Laporan **Direksi**

Menjaga Kinerja yang Resilien dan Memperkuat Fondasi Bisnis

Pada tahun 2025, AKR membukukan kinerja yang resilien di tengah ketidakpastian global. Perseroan mencatatkan pendapatan sebesar Rp46.018 miliar dan laba neto sebesar Rp2.473 miliar (11% YoY) dibandingkan tahun sebelumnya, dengan tetap menjaga posisi keuangan yang kuat dan posisi kas bersih.

Kinerja tersebut didukung oleh stabilitas bisnis perdagangan dan distribusi, serta pertumbuhan berkelanjutan pada segmen kawasan industri, khususnya JIIPE. Peningkatan aktivitas *tenant* mendorong pertumbuhan pendapatan utilitas dan meningkatkan porsi pendapatan berulang, sehingga memperkuat kualitas kinerja Perseroan.

Perseroan terus memperkuat perannya sebagai penyedia terintegrasi di bidang distribusi energi, logistik, dan infrastruktur industri, didukung oleh disiplin eksekusi strategi, pengembangan infrastruktur yang berkelanjutan, serta fokus yang jelas pada penciptaan nilai jangka panjang.

Pemegang Saham dan Pemangku Kepentingan yang Terhormat

Atas nama Direksi, saya menyampaikan rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, serta apresiasi kepada pemegang saham, pelanggan, mitra bisnis, regulator, dan semua pemangku kepentingan atas kepercayaan dan dukungan yang berkelanjutan sepanjang tahun 2025. Dukungan tersebut memungkinkan PT AKR Corporindo Tbk (AKR) mencatat kinerja yang resilien dan terus menciptakan nilai jangka panjang di tengah dinamika lingkungan usaha yang terus berkembang.

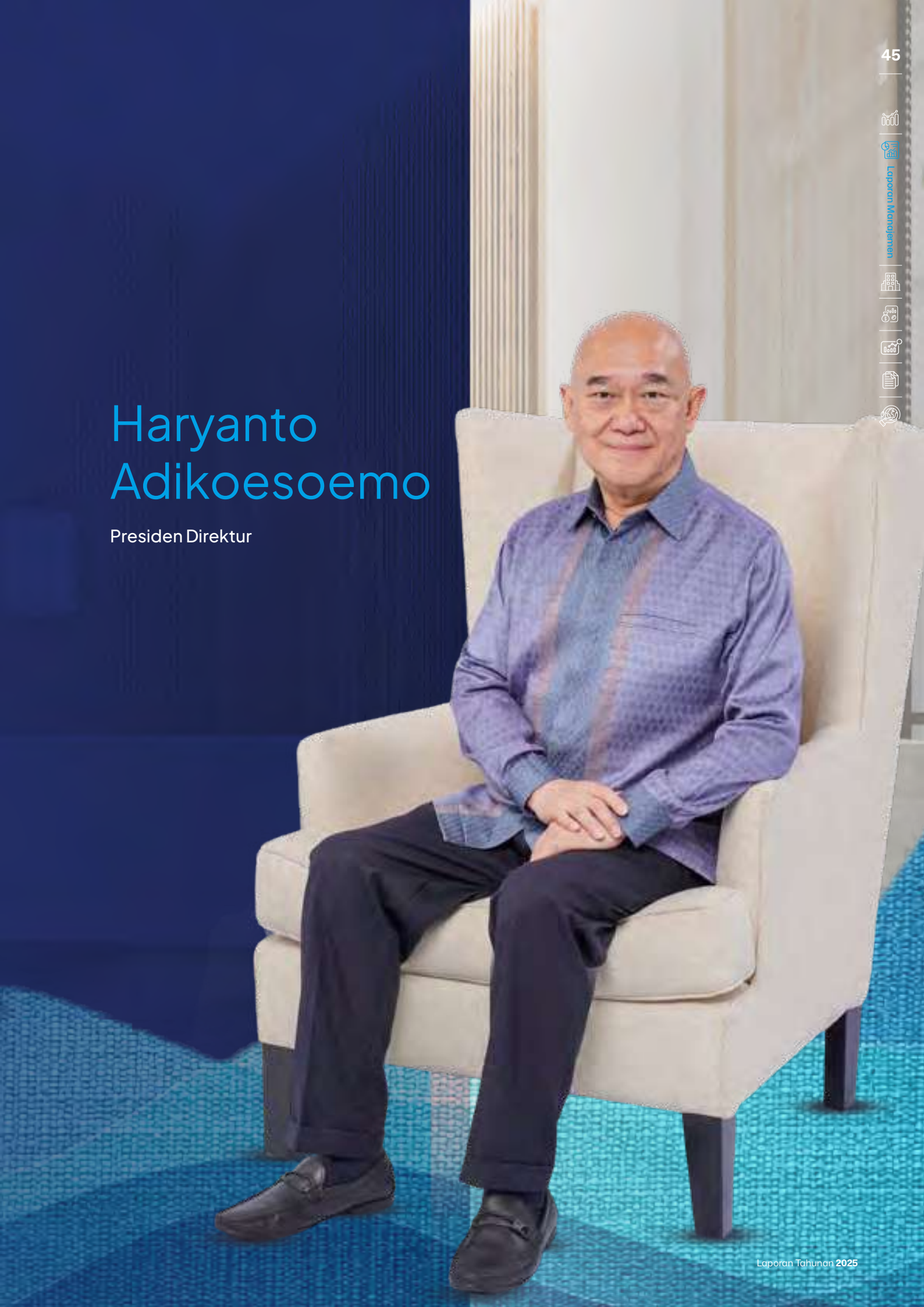
Tahun 2025 menegaskan kekuatan fondasi bisnis AKR melalui model usaha yang terintegrasi. Perseroan terus memperkuat kapabilitas operasional, disiplin eksekusi strategi, dan ketahanan keuangan, didukung oleh pengembangan infrastruktur distribusi energi, jaringan logistik yang andal, serta pengembangan *Java Integrated Industrial and Port Estate* (JIIPE) di Gresik sebagai bisnis yang menopang pertumbuhan jangka panjang.

Kondisi Makroekonomi dan Tantangan Industri

Lanskap ekonomi global pada tahun 2025 tetap menantang akibat kebijakan tarif, ketegangan geopolitik, serta volatilitas harga energi dan komoditas, serta dinamika rantai pasok global. Di tengah kondisi tersebut, Indonesia tetap menunjukkan ketahanan ekonomi dengan mencatatkan pertumbuhan sebesar 5,11% (yoy), didukung konsumsi domestik, investasi, serta keberlanjutan agenda hilirisasi industri.

Haryanto Adikoesoemo

Presiden Direktur



Dalam konteks tersebut, keandalan pasokan energi, efisiensi sistem logistik, dan ketersediaan infrastruktur industri yang terintegrasi menjadi faktor kunci dalam menjaga daya saing nasional. Perseroan tetap fokus memperkuat perannya dalam memastikan keandalan pasokan energi dan efisiensi distribusi, sambil menjaga disiplin operasional dan keuangan.

Analisa Kinerja Perseroan Tahun 2025

Tantangan dan Inisiatif Strategis
Dalam merespons ketidakpastian ekonomi global dan dinamika industri, Perseroan secara aktif menjalankan berbagai inisiatif strategis untuk memperkuat ketahanan usaha dan menjaga momentum pertumbuhan. Seluruh inisiatif strategis tersebut dijalankan berdasarkan fondasi ketahanan usaha, kekuatan model bisnis terintegrasi, tata kelola yang konsisten, serta kemampuan adaptasi terhadap dinamika pasar dan kebijakan.

Sepanjang tahun 2025, Direksi mengeksekusi strategi Perseroan berdasarkan lima pilar strategis utama, yaitu penguatan distribusi energi dan bahan kimia, pengembangan kawasan industri terintegrasi JIIPE, peningkatan efisiensi operasional melalui digitalisasi, penguatan penerapan prinsip Lingkungan, Sosial, dan Tata Kelola (ESG), serta pengembangan kemitraan strategis dengan pemerintah dan para pemangku kepentingan.

Kelima pilar tersebut dieksekusi secara disiplin untuk memperkuat model bisnis terintegrasi Perseroan di bidang distribusi energi, logistik, dan kawasan industri, sekaligus meningkatkan keandalan operasional dan efisiensi rantai pasok. Sejalan dengan tantangan Indonesia sebagai negara kepulauan, Perseroan menjalankan berbagai inisiatif penguatan infrastruktur distribusi energi dan logistik secara selektif, didukung pemanfaatan teknologi informasi.

Di sisi lain, pengembangan JIIPE difokuskan sebagai platform pertumbuhan jangka panjang melalui penguatan ekosistem industri dan peningkatan kontribusi pendapatan berulang. Perseroan juga menjalankan inisiatif peningkatan efisiensi operasional, disiplin pengelolaan keuangan, serta penguatan tata kelola dan prinsip ESG guna menjaga keberlanjutan usaha dan kepercayaan pemangku kepentingan.

5 Pilar Strategi

Distribusi Energi dan Kimia Terintegrasi

Penguatan kapasitas dan konektivitas distribusi energi, kimia dasar, dan logistik.

Pengembangan Kawasan Industri JIIPE

Pengembangan KEK JIIPE Gresik sebagai kawasan industri terintegrasi yang menarik bagi pelaku industri global.

Efisiensi Operasional dan Digitalisasi

Peningkatan efisiensi melalui digitalisasi dan optimalisasi rantai distribusi.

Integrasi Prinsip ESG

Penguatan penerapan prinsip ESG yang selaras dengan strategi bisnis Perseroan.

Kemitraan Strategis

Pengembangan kemitraan strategis dengan pemerintah, pelanggan industri, investor, serta mitra pengembangan jaringan ritel.

Peran Direksi dalam Penetapan dan Pengawasan Strategi

Direksi secara proaktif menetapkan dan mengevaluasi arah strategis Perseroan melalui analisis kinerja, risiko, serta dinamika industri dan makroekonomi guna memastikan keselarasan dengan visi jangka panjang dan prinsip tata kelola. Implementasi strategi dijalankan secara disiplin melalui mekanisme pengawasan yang terstruktur untuk memastikan efektivitas eksekusi serta pencapaian tujuan strategis Perseroan.

Sepanjang tahun buku 2025, Direksi secara aktif menjalankan fungsi pengurusan dan pengawasan melalui forum rapat dan mekanisme koordinasi yang berjalan secara teratur. Melalui forum tersebut, Direksi mengevaluasi kinerja operasional, meninjau realisasi strategi, serta merespons dinamika eksternal yang relevan guna memastikan efektivitas pelaksanaan strategi dan pencapaian tujuan Perseroan.

Kinerja Keuangan dan Operasional AKR Tahun 2025

Pada tahun 2025, Perseroan mencatatkan kinerja keuangan yang solid, yang merefleksikan ketahanan model bisnis dan efektivitas eksekusi strategi. Perseroan membukukan pendapatan sebesar Rp46.018 miliar dan laba neto sebesar Rp2.473 miliar, meningkat 11% dibandingkan tahun sebelumnya. EBITDA mencapai Rp3.674 miliar, didukung oleh peningkatan efisiensi operasional dan pengendalian biaya yang disiplin.

Kontribusi Segmen Utama terhadap Total Pendapatan

Rp41.314 miliar
Perdagangan dan Distribusi (+16%)

Rp2.741 miliar
Kawasan Industri (+99%)

Rp1.499 miliar
Logistik (+29%)

Rp464 miliar
Pabrikan (-29%)

Profitabilitas dan Pengelolaan Keuangan

Rp2.473 miliar
Laba Neto, didukung oleh model bisnis yang resilien, diversifikasi strategis, dan disiplin pengelolaan keuangan yang ketat.



Rp3.674 miliar
EBITDA

-0,08 kali
Net Gearing (net cash)

20 %
Return on Equity (ROE)

7 %
Return on Asset (ROA)

Profitabilitas tetap terjaga dengan *Return on Equity* sebesar 20% dan *Return on Assets* sebesar 7%. Perseroan juga mempertahankan struktur permodalan yang sehat dengan *Debt to Equity Ratio* sebesar 0,3 kali serta posisi kas bersih, yang memberikan fleksibilitas keuangan untuk mendukung pertumbuhan jangka panjang. Kinerja tersebut mencerminkan tidak hanya pertumbuhan, tetapi juga peningkatan kualitas dan keberlanjutan pendapatan Perseroan.

Kinerja Segmen Usaha AKR Tahun 2025

Kinerja Perseroan didukung oleh seluruh segmen usaha utama, segmen perdagangan dan distribusi mencatat laba bruto sebesar Rp3.004 miliar. Segmen perdagangan dan distribusi terus mencatatkan kinerja yang stabil, didukung oleh pengelolaan margin yang disiplin dan jaringan logistik yang efisien.

Segmen Kawasan Industri mencatat laba bruto sebesar Rp836 miliar, naik signifikan dibandingkan tahun sebelumnya. Peningkatan ini didorong oleh meningkatnya aktivitas *tenant*, monetisasi lahan, serta utilisasi utilitas, yang mendorong peningkatan pendapatan berulang. Perkembangan ini mendorong peningkatan pendapatan berulang dan memperkuat profil pendapatan Perseroan. Segmen logistik juga berperan penting dalam mendukung integrasi rantai pasok dan efisiensi operasional secara keseluruhan.

AKR mencatat kinerja operasional dan peristiwa penting yang mendorong ketahanan usaha sepanjang tahun 2025:

- Jumlah **SPBU bp AKR yang beroperasi meningkat menjadi 72 *outlet*** di sekitar Jabodetabek, Surabaya, Gresik, Malang, dan *Toll Rest Area*.
- Penguatan peran JIIPE sebagai hub industri strategis dengan **terbentuknya ekosistem di sektor logam, kimia, dan energi terbarukan**
- Pembagian dividen tunai sebesar **Rp1.975 miliar** dan pengakuan sebagai **ASEAN Asset Class Public Listed Company**
- AKR berperan aktif melalui **jaringan terminal BBM, armada kapal, serta infrastruktur logistik** yang dimiliki untuk mendukung kebijakan pemerintah terkait pemenuhan cadangan energi nasional
- Pelaksanaan program distribusi **biodiesel (B40)** sebagai bagian dari dukungan terhadap kebijakan transisi energi nasional
- Mengoperasikan **104 *outlet* ritel BBM** yang tersebar di wilayah 3T (Terluar, Terdepan, Tertinggal)
- Penguatan infrastruktur rantai pasok didukung oleh **14 kapal** untuk mendukung distribusi baik BBM maupun kimia dasar

Peran AKR dalam Ketahanan Energi dan Infrastruktur

Selama lebih dari enam dekade, Perseroan turut berkontribusi dalam mendukung pembangunan ekonomi Indonesia melalui distribusi energi dan bahan kimia yang andal, serta pengembangan infrastruktur logistik dan industri.

Melalui jaringan infrastruktur logistik penting yang mencakup terminal, fasilitas penyimpanan, armada transportasi, dan sistem distribusi terintegrasi, Perseroan memastikan keberlanjutan pasokan energi di berbagai wilayah Indonesia. Perseroan juga terus mendukung inisiatif energi nasional, termasuk distribusi biodiesel dan pengembangan solusi energi yang lebih bersih.

JIIPE sebagai Segmen Pertumbuhan Strategis

JIIPE merupakan tonggak penting dalam transformasi Perseroan menuju model bisnis berbasis infrastruktur dan pendapatan berulang. Sebagai kawasan industri terintegrasi, JIIPE menggabungkan lahan industri, pelabuhan laut dalam, utilitas, dan konektivitas logistik dalam satu ekosistem terpadu.

Sepanjang tahun 2025, pengembangan JIIPE terus menunjukkan kemajuan dengan meningkatnya jumlah *tenant* dan utilisasi layanan utilitas. Perseroan melalui KEK JIIPE Gresik mendukung agenda hilirisasi nasional, menarik investasi, dan meningkatkan daya saing sektor manufaktur Indonesia.

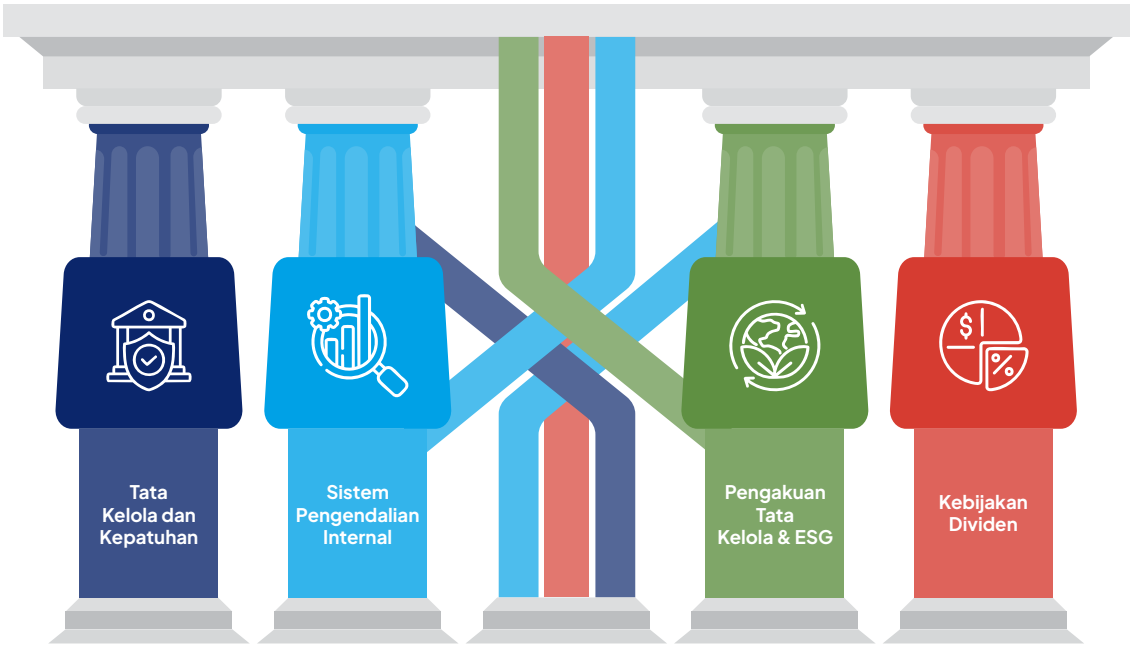
Perkembangan KEK JIIPE Gresik difokuskan pada strategi kemudahan berusaha untuk menarik investasi global dan nasional. Layanan perizinan terpadu satu pintu serta dukungan dokumen lingkungan turut mempercepat proses investasi, termasuk realisasi pembangunan pabrik dan operasional *tenant*. Kawasan ini juga mengedepankan kemitraan dengan prinsip bahwa keberhasilan *tenant* merupakan keberhasilan bersama. Dukungan terhadap kelancaran operasional, penetapan sebagai objek vital nasional, serta kolaborasi aktif dengan aparat keamanan memberikan kenyamanan dan kepastian berusaha bagi para investor.

Penerapan Tata Kelola Perusahaan

Perseroan terus memperkuat penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (GCG) dan praktik keberlanjutan yang terintegrasi sebagai fondasi pengelolaan usaha yang bertanggung jawab. Sistem pengendalian internal, manajemen risiko, serta kepatuhan terhadap regulasi menjadi bagian dari pengelolaan usaha sehari-hari. Sepanjang tahun 2025, fungsi pengawasan dan pengendalian internal juga terus diperkuat melalui pelaksanaan audit internal serta tindak lanjut atas rekomendasi perbaikan untuk menjaga efektivitas sistem pengendalian dan integritas operasional.

Komitmen terhadap prinsip ESG tercermin dalam penguatan praktik tata kelola dan pengelolaan risiko, termasuk peningkatan peringkat MSCI ESG menjadi AA serta pengakuan sebagai ASEAN Asset Class Public Listed Company. Perseroan terus mengintegrasikan prinsip keberlanjutan ke dalam strategi bisnis guna mendukung penciptaan nilai jangka panjang yang berkelanjutan bagi para pemangku kepentingan.

Implementasi Tata Kelola



Pengembangan Sumber Daya Manusia

Direksi secara aktif mengelola dan mengembangkan Sumber Daya Manusia untuk memastikan kesiapan organisasi dalam mendukung pertumbuhan bisnis Perseroan. Melalui keterlibatan langsung dalam *Talent Committee*, Direksi memastikan proses identifikasi, pengembangan, dan perencanaan suksesi bagi posisi-posisi strategis berjalan secara disiplin. Komitmen ini tercermin pada penguatan kepemimpinan, peningkatan kompetensi, serta terjaganya keberagaman, di mana 23% posisi *middle-up management* telah diisi oleh perempuan.

Sejalan dengan transformasi industri dan percepatan digitalisasi, Perseroan memprioritaskan pengembangan kapabilitas SDM melalui pelatihan teknis, penguatan kemampuan manajerial, dan literasi digital. Inisiatif ini ditujukan untuk meningkatkan produktivitas, kualitas pengambilan keputusan, dan ketahanan organisasi dalam mendukung pertumbuhan berkelanjutan.

Optimalisasi Teknologi Informasi dan Transformasi Digital

Perseroan terus memperkuat kapabilitas operasional melalui pemanfaatan teknologi dan sistem digital. Platform digital digunakan untuk pemantauan distribusi, persediaan, dan logistik secara *real-time*, sehingga meningkatkan efisiensi dan keandalan layanan, dan kualitas pengambilan keputusan operasional.

Perseroan juga mengadopsi analitik data dan penerapan Kecerdasan Buatan/*Artificial Intelligence* (AI) secara selektif untuk mendukung perencanaan, pemeliharaan prediktif, dan optimalisasi operasi. Pemanfaatan teknologi ini memungkinkan pengambilan keputusan yang lebih cepat dan berbasis data, meningkatkan produktivitas aset dan sumber daya manusia, serta meminimalkan potensi gangguan operasional.

Dalam praktiknya, sistem digital dan AI dimanfaatkan untuk mengoptimalkan perencanaan distribusi, pengelolaan armada truk, kapal dan kelautan, serta pengelolaan perawatan dan ketersediaan aset. Pendekatan prediktif ini memungkinkan Perseroan mengantisipasi risiko operasional lebih dini dan menekan waktu henti aset.

Ke depan, pengembangan sistem digital diarahkan untuk semakin adaptif terhadap dinamika operasional, termasuk faktor cuaca dan kompleksitas distribusi. Dengan pendekatan teknologi yang semakin prediktif dan terukur, Perseroan optimistis dapat terus meningkatkan efisiensi operasional, keselamatan, dan keandalan layanan secara berkelanjutan.

Pelaksanaan Inisiatif Keberlanjutan dan ESG

Sepanjang tahun 2025, Perseroan menjalankan berbagai inisiatif keberlanjutan yang terintegrasi dengan strategi bisnis untuk mendukung penciptaan nilai jangka panjang. Inisiatif tersebut mencakup penguatan aspek sosial dan keselamatan kerja, dukungan terhadap transisi energi nasional, serta penguatan tata kelola keberlanjutan.

Pendekatan ini ditujukan untuk memperkuat ketahanan usaha, meningkatkan keandalan operasional, serta memastikan integrasi prinsip Lingkungan, Sosial, dan Tata Kelola (ESG) dalam pengambilan keputusan bisnis. Komitmen terhadap prinsip ESG juga didukung oleh struktur tata kelola keberlanjutan yang solid, termasuk peran Komite ESG dalam memastikan integrasi ESG ke dalam strategi dan pengambilan keputusan bisnis. Direksi memandang bahwa keberlanjutan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari strategi pertumbuhan Perseroan ke depan.



*Dalam pengembangan

Prospek Usaha Tahun 2026

Direksi terus memperkuat arah strategi Perseroan agar tetap selaras dengan agenda pembangunan nasional dan kebutuhan industri. Dengan proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia yang tetap solid, Perseroan memandang peluang pertumbuhan di sektor distribusi energi, logistik, dan kawasan industri masih terbuka, didukung oleh meningkatnya aktivitas industri dan kebutuhan akan infrastruktur yang andal.

Ke depan, fokus Perseroan diarahkan pada penguatan bisnis inti perdagangan dan distribusi energi serta bahan kimia, pengembangan kawasan industri terintegrasi JIIPE sebagai platform pertumbuhan jangka panjang, serta penguatan infrastruktur dan kapabilitas distribusi secara selektif. Perseroan juga terus mengevaluasi peluang pengembangan jaringan ritel energi dan infrastruktur yang mendukung transisi energi nasional guna memperkuat ketahanan energi dan keberlanjutan usaha.

Direksi meyakini bahwa sinergi dengan pemerintah dan para pemangku kepentingan menjadi kunci dalam mendorong pertumbuhan yang berkelanjutan. Melalui pengembangan sistem distribusi energi, logistik terintegrasi, dan kawasan industri yang kompetitif, Perseroan berkomitmen untuk terus menciptakan nilai jangka panjang bagi pemegang saham dan pemangku kepentingan.



Energi & Kimia Dasar
- Pertumbuhan volume dan profitabilitas
- Efisiensi distribusi
- Optimalisasi jaringan dan teknologi

Logistik
- Penguatan kapasitas distribusi
- Penambahan armada truk dan kapal untuk operasional darat dan laut
- Keandalan rantai pasok

Strategic Enablers
- Disiplin risiko & keuangan
- Digitalisasi & teknologi
- Sinergi dengan pemerintah dan pemangku kepentingan

Transisi Energi
- Infrastruktur energi bersih
- Distribusi biofuel
- Integrasi keberlanjutan

JIIPE
- Mendukung agenda hilirisasi
- Peningkatan utilitasasi infrastruktur
- Mengembangkan kawasan industri terintegrasi

Ritel
- Ekspansi jaringan
- Perluasan akses energi

Perubahan Komposisi Direksi

Komposisi Direksi tidak mengalami perubahan di sepanjang tahun 2025 sesuai dengan persetujuan RUPS tanggal 28 April 2025, Perseroan telah mengangkat kembali seluruh anggota Direksi dengan masa jabatan terhitung hingga penutupan RUPS tahun 2030, sebagai berikut:

Nama	Jabatan
Haryanto Adikoesoemo	Presiden Direktur
Jimmy Tandyo	Direktur
Bambang Soetiono Soedijanto	Direktur
Mery Sofi	Direktur
Suresh Vembu	Direktur
Nery Polim	Direktur
Termurti Tiban	Direktur

Penutup dan Apresiasi

AKR berkomitmen untuk terus menjaga perannya sebagai mitra energi dan logistik yang terpercaya bagi Indonesia. Perseroan akan melanjutkan pertumbuhan operasional guna mendukung ketahanan energi serta mendorong proses industrialisasi dan hilirisasi nasional melalui penerapan tata kelola dan praktik ESG yang kuat.

Dengan dukungan dan upaya kolektif seluruh Insan AKR, Perseroan mampu menjaga kinerja yang solid di tengah dinamika lingkungan usaha. Perseroan berada pada fondasi yang kuat, didukung oleh model bisnis terintegrasi, posisi keuangan yang sehat, dan arah strategis yang jelas.

Arah bisnis Perseroan tetap selaras dengan kebijakan pemerintah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Didukung oleh budaya kerja yang *agile*, kolaboratif, dan berbasis analisis, Perseroan optimistis dapat terus bertumbuh secara sehat, adaptif terhadap perubahan, serta menciptakan nilai jangka panjang bagi seluruh pemangku kepentingan.

Atas implementasi strategi usaha dan kinerja Perseroan sepanjang tahun 2025, saya mewakili Direksi menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada seluruh Insan AKR atas dedikasi, komitmen, dan kerja keras yang telah diberikan. Kami juga menyampaikan terima kasih kepada pemegang saham, pelanggan, mitra bisnis, serta pemangku kepentingan lainnya atas kepercayaan dan dukungan berkelanjutan yang menjadi fondasi bagi pertumbuhan Perseroan.

Jakarta, 2 April 2026
Atas Nama Direksi



Haryanto Adikoesoemo
Presiden Direktur

Direksi



Dari kiri ke kanan:

Suresh Vembu
Direktur

Termurti Tiban
Direktur

Nery Polim
Direktur

Mery Sofi
Direktur



Dari kiri ke kanan:

Bambang Soetiono Soedijanto
Direktur

Haryanto Adikoesoemo
Presiden Direktur

Jimmy Tandyo
Direktur

Surat Pernyataan Dewan Komisaris Tentang Pertanggung Jawaban atas Laporan Tahunan 2025 PT AKR Corporindo Tbk

Kami yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa semua informasi dalam Laporan Tahunan PT AKR Corporindo Tbk tahun 2025 telah dimuat secara lengkap dan bertanggung jawab penuh atas kebenaran isi Laporan Tahunan Perusahaan.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Jakarta, 2 April 2026
Dewan Komisaris



Soegiarto Adikoesoemo
Presiden Komisaris



Sofyan A. Djalil
Komisaris



Fauzi Ichsan
Komisaris Independen

Surat Pernyataan Direksi Tentang Pertanggung Jawaban atas Laporan Tahunan 2025 PT AKR Corporindo Tbk

Kami yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa semua informasi dalam Laporan Tahunan PT AKR Corporindo Tbk tahun 2025 telah dimuat secara lengkap dan bertanggung jawab penuh atas kebenaran isi Laporan Tahunan Perusahaan.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Jakarta, 2 April 2026
Direksi



Haryanto Adikoesoemo
Presiden Direktur



Jimmy Tandyo
Direktur



Bambang Soetiono Soedijanto
Direktur



Mery Sofi
Direktur



Suresh Vembu
Direktur



Nery Polim
Direktur



Termurti Tiban
Direktur

03

Profil Perusahaan

Diversifikasi usaha AKR yang didukung infrastruktur dan kapabilitas operasional guna memperkuat ketahanan energi dan aktivitas industri

Lihat bisnis usaha pada **halaman 68**

65 tahun membangun ketangguhan melalui nilai yang tak tergoyahkan

Lihat perjalanan kami pada **halaman 64**




AKR
1700 KL
SAFETY FIRST

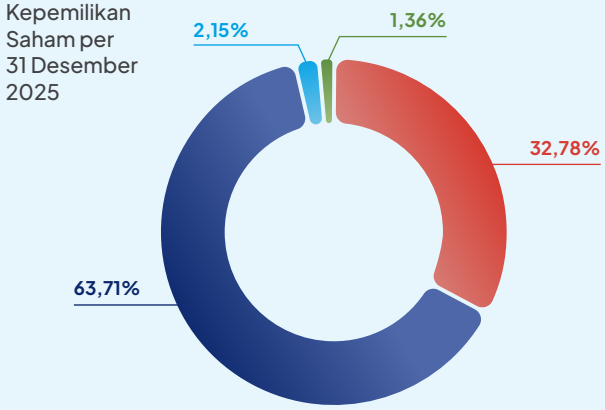


Informasi **Umum**

Nama Perusahaan	PT AKR Corporindo Tbk	Tanggal Pendirian	28 November 1977
Status Badan Hukum	Perseroan Terbatas Terbuka (Tbk)	Bidang Usaha	• Perdagangan dan Distribusi • Jasa Logistik • Pabrikan • Kawasan Industri
Dasar Hukum Pendirian	Akta Nomor 46 tanggal 28 November 1977, dibuat di hadapan Sastra Kosasih Notaris di Surabaya, dan telah mendapatkan pengesahan sebagai badan hukum berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor Y.A.5/151/7 tanggal 14 Juni 1978, dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia Nomor 101 tanggal 19 Desember 1978, Tambahan Nomor 741/1978.	Modal Dasar	Rp750.000.000.000 terbagi atas 37.500.000.000 saham, masing-masing saham bernilai nominal sebesar Rp20
		Modal Ditempatkan dan Disetor	Rp401.469.492.000 dengan komposisi saham 20.073.474.600 saham dengan nilai nominal Rp20 yang telah ditempatkan dalam Perusahaan.



Kepemilikan Saham per 31 Desember 2025



Kode Emiten **AKRA**

Pencatatan di Bursa Efek Indonesia: Bursa Efek Indonesia pada tanggal 3 Oktober 1994

Jumlah Karyawan per 31 Desember 2025: **2.474** Karyawan

Kantor Pusat:
AKR Tower Lantai 26
Jl. Panjang No.5 Kebon Jeruk
Jakarta Barat 11530, Indonesia

Kontak Perusahaan:
+62 21 5311110
corporate.secretary@akr.co.id
www.akr.co.id

Sejarah **Singkat**

PT AKR Corporindo Tbk ("AKR" atau "Perseroan") didirikan di Surabaya pada tanggal 28 November 1977 berdasarkan Akta Notaris Sastra Kosasih Nomor 46 dengan nama PT Aneka Kimia Raya. Pada fase awal pendirian, Perseroan memulai dari perdagangan bahan kimia sederhana yang kemudian berkembang menjadi distributor bahan kimia terkemuka di Indonesia, didukung oleh jaringan tangki penyimpanan dan gudang di berbagai pelabuhan utama Indonesia.

Memasuki 1980-an, AKR memindahkan kantor pusat ke Jakarta untuk memperkuat pengelolaan operasional dan mendukung ekspansi usaha. Dalam rangka meningkatkan akses pendanaan dan memperluas skala bisnis, Perseroan mencatatkan sahamnya di Bursa Efek Indonesia pada 3 Oktober 1994 dengan kode saham AKRA, yang menjadi tonggak penting dalam perjalanan AKR di sektor energi dan logistik.

Pada tahun 2004, Perseroan resmi mengubah nama menjadi PT AKR Corporindo Tbk sebagai bagian dari transformasi bisnis yang memperluas ruang lingkup usaha dari perdagangan bahan kimia dasar, ke perdagangan BBM, memperluas jaringan logistik, dengan menambah armada transportasi, pergudangan, penyewaan tangki, serta berbagai jasa pendukung industri. Perubahan ini juga mendorong AKR sebagai perusahaan swasta nasional pertama yang berpartisipasi dalam distribusi BBM. Sejak 2010, AKR ditunjuk oleh BPH Migas sebagai Badan Usaha Pelaksana P3JBT untuk menyalurkan BBM bersubsidi ke berbagai daerah di Indonesia, didukung teknologi distribusi terintegrasi yang memastikan akurasi, pengawasan, dan akuntabilitas.

Dalam rangka memperkuat posisi di sektor energi, pada tahun 2017, AKR menjalin kemitraan strategis dengan bp (British Petroleum dan membentuk bp AKR. Kolaborasi ini menghadirkan jaringan ritel BBM bp AKR berstandar internasional dengan pertumbuhan *outlet* yang konsisten hingga mencapai 72 *outlet* pada tahun 2025. AKR dan bp mengembangkan jaringan ritel bahan bakar berkualitas tinggi di Indonesia. Kemitraan ini menggabungkan pengalaman global bp di sektor energi dengan kapabilitas AKR dalam distribusi, logistik, dan pemahaman pasar domestik sebagai landasan dalam menghadirkan layanan ritel BBM berstandar internasional. Selain ritel BBM, di tahun yang sama, kerja sama bp AKR juga mencakup pengembangan pasar pelumas dan distribusi avtur di sejumlah bandara baru,

AKR juga menjangkau masyarakat di wilayah 3T (Terdepan, Terluar, dan Tertinggal) dengan membangun SPBU AKR untuk mendistribusikan BBM bersubsidi. Hingga tahun 2025, jaringan ritel AKR & bp AKR telah berkembang menjadi 176 *outlet* yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia, didukung oleh kemitraan strategis lintas sektor untuk memperluas jangkauan pasar dan basis pelanggan Perseroan.

Di sektor infrastruktur industri, AKR mengambil langkah penting melalui kemitraan dengan Pelindo pada tahun 2013 untuk mengembangkan *Java Integrated Industrial Port Estate* (JIIPE) di Gresik - Jawa Timur seluas ±3.000 hektare. Kawasan ini mencakup kawasan industri seluas 1.761 ha, pelabuhan laut dalam seluas 406 hektare, dan area residensial seluas 800 hektare yang dikembangkan oleh perusahaan afiliasi. Melalui PT Usaha Era Pratama Nusantara, AKR memiliki 60% saham pada PT Berkah Manyar Kawasan Sejahtera selaku pengelola kawasan industri JIIPE. Penetapan JIIPE sebagai Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Teknologi - Manufaktur melalui Peraturan Pemerintah (PP) No. 71 Tahun 2021 yang disahkan pada tanggal 28 Juni 2021, memperkuat daya tarik investasi, sekaligus menjadikannya lokasi pembangunan pabrik peleburan tembaga terbesar di dunia.

Sebagai KEK, JIIPE kini mulai membentuk ekosistem industri terintegrasi yang sejalan dengan kebijakan hilirisasi nasional. Kawasan ini dikembangkan menjadi ekosistem berkelas dunia dengan fokus pada industri berbasis produk hasil pengolahan logam, bahan kimia, dan energi terbarukan. Sebagian besar penyewa JIIPE saat ini berasal dari sektor-sektor tersebut, yang mendukung agenda peningkatan nilai tambah dan menarik investasi asing langsung (FDI) ke Indonesia.

Sebagai bagian dari strategi transisi ke energi bersih, pada tahun 2021, AKR mendirikan PT Berkah Buana Energi bersama PT Bayu Buana Gemilang untuk mendistribusikan gas alam untuk memenuhi kebutuhan energi di KEK JIIPE Gresik dan wilayah sekitarnya. Perseroan juga membentuk PT Anugrah Kreasi Pratama Indonesia pada tahun 2023 dan PT Berkah Bunker Service pada tahun 2024 untuk memperkuat layanan logistik di dalam kawasan.

Pada tahun 2023 dan 2024, AKR kembali memperkuat ekosistem JIIPE melalui kerja sama dengan bp Gas & Power Investments Limited untuk pengembangan fasilitas impor LNG dan terminal regasifikasi yang akan menyediakan pasokan gas andal bagi para *tenant*. Perseroan juga membentuk PT Berkah Renewable Energi Nusantara sebagai operator pembangkit listrik di kawasan JIIPE serta PT Terminal Energi Primer sebagai penyedia layanan penyimpanan dan logistik energi.

Sejak ditetapkan sebagai Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), JIIPE telah menunjukkan perkembangan operasional yang signifikan dengan sejumlah *anchor tenant* mulai beroperasi dan memanfaatkan utilitas kawasan seperti listrik, air, dan fasilitas pengolahan limbah. Pendapatan dari layanan utilitas JIIPE pada tahun 2025 mencatat pertumbuhan yang signifikan didorong oleh *commissioning tenant* utama. Ini menandakan bahwa JIIPE mulai berfungsi sebagai ekosistem industri modern yang mendukung produksi dan aktivitas operasional berbagai sektor industri di dalamnya, sekaligus mendorong *multiplier effect* bagi Perseroan.

Kronologis Perubahan Nama dan Badan Hukum

Perseroan didirikan berdasarkan Akta Nomor 46 tanggal 28 November 1977 yang dibuat di hadapan Notaris Sastra Kosasih. Seiring dengan perkembangan usaha dan penyesuaian strategi bisnis, Perseroan kemudian melakukan beberapa kali perubahan nama sebagaimana diuraikan dalam kronologi berikut:

- Setelah melaksanakan Penawaran Umum Perdana dan resmi tercatat di Bursa Efek Indonesia pada 3 Oktober 1994, Perseroan mengubah nama menjadi PT Aneka Kimia Raya Tbk. Perubahan nama ini telah disetujui oleh seluruh pemegang saham dan dituangkan dalam Akta Nomor 163 tanggal 16 Mei 1994 yang dibuat di hadapan Poerbaningsih Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta, serta memperoleh persetujuan Menteri Kehakiman Republik Indonesia melalui Surat Keputusan Nomor C2-12686.HT.01.04.Th.94 tanggal 23 Agustus 1994.
- Seiring dengan perluasan lini usaha, Perseroan kembali mengubah nama menjadi PT AKR Corporindo Tbk. Perubahan ini dituangkan dalam Akta Nomor 36 tanggal 23 September 2004 yang dibuat di hadapan Dr. Amrul Partomuan Pohan, S.H., LLM, Notaris di Jakarta, dan telah memperoleh persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Surat Keputusan Nomor C-24263 HT.01.04.Th.2004 tanggal 29 September 2004.

Sekilas Perubahan Nama Perseroan

28 November 1977	3 Oktober 1994	23 September 2004 - sekarang
PT Aneka Kimia Raya	PT Aneka Kimia Raya Tbk	PT AKR Corporindo Tbk



Nilai-Nilai **Perusahaan**

Memiliki Jiwa **Kewirausahaan**

Berkolaborasi

Menghargai **Kinerja Tinggi**

Makna Logo **Perusahaan**

PT AKR Corporindo Tbk

Tangkas

Memberdayakan **Tim**

Tidak **Berkompromi**

Logo AKR mencerminkan arah strategis dan karakter Perseroan sebagai penyedia terkemuka layanan logistik serta solusi pengadaan bahan kimia dan energi di Indonesia. Identitas visual ini merepresentasikan tekad Perseroan untuk membangun kapabilitas yang berdaya saing global melalui pengelolaan aset dan sumber daya yang andal, kolaborasi yang kuat dengan mitra strategis, serta penerapan strategi yang adaptif dan inovatif.

Nilai-nilai tersebut menjadi landasan bagi AKR dalam memperkuat kinerja usaha dan mendorong pertumbuhan yang berkelanjutan dalam skala yang lebih luas. Adapun makna logo AKR secara detail sebagai berikut:

Logo Perseroan dibuat dengan menjadikan huruf "AKR" dari akronim Perseroan sebagai elemen pusatnya.

Akronim "AKR" ditempatkan di dalam sebuah lingkaran berwarna biru, mencerminkan status AKR sebagai entitas usaha yang diakui dan memiliki reputasi yang mendunia.

Warna merah pada huruf "A" dalam akronim "AKR" menggambarkan cahaya, melambangkan ketulusan dan kejujuran Perseroan dalam menjalankan bisnis, dengan fokus pada aktivitas usaha yang sehat dan bertanggung jawab.

Warna putih pada akronim "AKR" mencerminkan sikap profesionalisme dan kepatuhan Perseroan terhadap regulasi usaha yang berlaku, serta komitmennya untuk selalu mengutamakan praktik persaingan usaha yang adil dan setara.

Jejak Langkah **Perusahaan**

1960–2006

1960
Bisnis perdagangan bahan kimia dasar mulai beroperasi di Surabaya.

1977
Usaha diformalkan dengan pendirian PT Aneka Kimia Raya pada 28 November 1977.

1980
AKR memulai pembangunan tangki penyimpanan bahan kimia dasar serta fasilitas gudang di berbagai pelabuhan.

1994
AKR melakukan penawaran umum perdana pada tanggal 3 Oktober 1994, saham AKR dicatatkan di Bursa Efek Indonesia dengan kode saham "AKRA".

2004
- PT Aneka Kimia Raya Tbk resmi berganti nama menjadi PT AKR Corporindo Tbk pada 23 September 2004.
- AKR mengakuisisi saham pabrik Sorbitol Sorini dan Khalista.

2005
AKR menjadi perusahaan swasta nasional pertama yang mendistribusikan BBM non-subsidi di Indonesia.

2006
AKR mengakuisisi dan mulai mengoperasikan pelabuhan-pelabuhan sungai di Tiongkok.

2008–2017

2008
- AKR membeli kapal pengangkut BBM pertama, yaitu SPOB AKRA-10.
- Terminal Stagen dengan kapasitas 50.000 KL resmi beroperasi.

2010
- AKR menjadi perusahaan swasta nasional pertama yang mendistribusikan BBM bersubsidi di Indonesia melalui pengelolaan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (SPBKB) dan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Nelayan (SPBN).
- Fase I PT Jakarta Tank Terminal, entitas anak yang bergerak di bidang terminal tangki penyimpanan BBM di Tanjung Priok, diresmikan pada April 2010.
- AKR mendivestasikan pabrikan Sorbitol Sorini.

2013
AKR bersama Pelindo memulai pengembangan *Java Integrated Industrial and Ports Estate* (JIIPE), sebuah kawasan yang mengintegrasikan area industri dengan pelabuhan laut dalam di Gresik, Jawa Timur.

2015
Serah terima lahan Kawasan Industri yang pertama:
- JIIPE mendapat persetujuan dari pemerintah melalui program KLIK.
- Penandatanganan Perjanjian *Joint Venture* untuk mendistribusikan avtur bagi kebutuhan penerbangan.
- Pelabuhan JIIPE resmi memulai operasionalnya

2017
- bp dan AKR menandatangani Perjanjian *Joint Venture* untuk bisnis ritel di Indonesia.
- Castrol dan AKR menjalin kerja sama melalui Perjanjian Distribusi Pelumas.
- AKR mendivestasikan Pelabuhan Guigang di Tiongkok.
- PT Berlian Manyar Sejahtera berhasil memperoleh konsesi 76 tahun.

2018–2021

2018

- AKR menyelesaikan divestasi dari Kalista Liuzhou Chemical Industries Ltd di China.
- JIIPE diresmikan sebagai salah satu Proyek Strategis Nasional.
- Proyek JTT Fase 2A dengan peningkatan kapasitas 100.000 KL resmi dimulai.
- SPBU pertama hasil kerja sama bp dan AKR resmi beroperasi.

2019

- Penyerahan lahan untuk proyek *Smelter* di kawasan JIIPE.
- Terminal Avtur hasil kerja sama JV Air bp dan AKR resmi dibuka di Morowali, Sulawesi Tengah.
- Kawasan Industri JIIPE, melalui PT Berkah Kawasan Manyar Sejahtera, memperoleh Sertifikasi ISO Terintegrasi.

2020

- AKR melunasi Obligasi Berkelanjutan AKR Corporindo Tahap I Tahun 2017 Seri A senilai Rp895 miliar.
- AKR berhasil meraih Sertifikasi ISO 9001:2015 untuk Sistem Manajemen Perdagangan dan Distribusi BBM Industri.
- AKR menandatangani perjanjian kerja sama dengan Petronas Chemicals Group Berhad (PCG) untuk mendistribusikan bahan kimia dan meresmikan PT Anugerah Kimia Indonesia.

2021

- Kawasan Industri JIIPE diresmikan sebagai Kawasan Ekonomi Khusus untuk Sektor Teknologi & Manufaktur.
- Lokasi untuk *smelter* tembaga dan *Precious Metal Refinery* terbesar ditetapkan di KEK JIIPE Gresik.
- Perusahaan usaha *Joint Venture* didirikan untuk bisnis distribusi Gas Bumi.
- Perjanjian sewa tanah jangka panjang ditandatangani untuk pembangunan dan pengoperasian pelabuhan khusus bagi *smelter* tembaga.
- AKRA masuk dalam Indeks ESG utama, termasuk Indeks SRI-KEHATI, Indeks ESG Quality 45 IDX KEHATI, dan Indeks ESG Sector Leaders IDX KEHATI.
- Anugerah Kimia Indonesia melakukan pengiriman bahan kimia dasar pertama kepada pelanggan.

2022–2025

2022

- AKRA melakukan *Stock Split* saham dengan rasio 1:5.
- KEK JIIPE Gresik memasang sistem panel surya (PLTS Atap) untuk mendukung komitmen penggunaan energi terbarukan.
- Surat Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik antara BKMS dan PLN ditandatangani untuk memasok kebutuhan listrik proyek *smelter* tembaga single line di KEK JIIPE.
- AKR melunasi Obligasi Berkelanjutan AKR Corporindo Tahap I Tahun 2017 Seri B senilai Rp68 miliar.
- JIIPE menerima Sertifikat Operasional sebagai KEK Gresik.
- Sebanyak 11 terminal penyimpanan AKR, 1 cabang AKR, dan JTT menerima Sertifikat Proper BIRU.
- Penugasan untuk penyediaan dan pendistribusian biodiesel bersubsidi untuk periode 2023 - 2027

2023

- PT Anugrah Kreasi Pratama Indonesia didirikan untuk mengoperasikan *Bonded Warehousing* di JIIPE.
- PT Berkah Bunker Service didirikan untuk menjalankan kegiatan usaha Pelayanan Kepelabuhan Laut di JIIPE.
- AKR menandatangani Perjanjian Pengembangan Bersama dengan bp GAS & POWER untuk mengembangkan proyek LNG di JIIPE.

2024

- PT Berkah Renewable Energi Nusantara didirikan untuk mengoperasikan Pembangkit Tenaga Listrik di Wilayah JIIPE.
- Dimulainya perluasan Terminal Penyimpanan di Morowali
- AKR menambah 2 kapal baru, yaitu AKRA 103 dan AKRA 105, sehingga jumlah kapal total menjadi 14.
- Perseroan melakukan registrasi atas kepemilikan saham Chemical Petroleum International Trading Pte. Ltd untuk memperkuat aktivitas perdagangan kimia dan BBM.
- PT Terminal Energi Primer didirikan untuk melayani Pergudangan dan Penyimpanan serta kegiatan lain yang berkaitan dengan penyediaan energi di wilayah JIIPE.
- KEK JIIPE Gresik memperoleh penghargaan Kawasan Ekonomi Khusus Industri Terbaik dari Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia.

2025

- KEK JIIPE Gresik diresmikan menjadi Pusat Hilirisasi Logam Mulia Indonesia.
- KEK JIIPE Gresik semakin dikembangkan menjadi ekosistem industri dengan fokus utama pada pengolahan tembaga, bahan kimia, dan energi terbarukan.
- AKRA berhasil masuk sebagai Perusahaan Tercatat Kelas Aset ASEAN (ASEAN Asset Class Public Listed Companies).

Bidang Usaha

Kegiatan Usaha Berdasarkan Anggaran Dasar

Berdasarkan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan sebagaimana telah disahkan perubahannya dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa pada 28 April 2022, maksud dan tujuan Perseroan adalah bergerak dalam bidang:

1. Industri;
2. Perdagangan;
3. Pengangkutan dan pergudangan (aktivitas penyewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi, ketenagakerjaan, agen perjalanan dan penunjang usaha lainnya);
4. Pengadaan listrik, gas, uap, air panas dan udara dingin;
5. Aktivitas profesional, ilmiah dan teknis (jasa); dan
6. Konstruksi.

Kegiatan Usaha yang Dijalankan

Untuk mendukung pencapaian tujuan Perseroan, kegiatan usaha yang dijalankan meliputi:

Kegiatan Usaha Utama

1. Industri:
   - Industri yang memproduksi hasil dari kilang minyak bumi mencakup sektor pengolahan aspal/ter, bitumen, dan lilin (yang dapat digunakan untuk pelapisan jalan, atap, kayu, kertas, dan lainnya), serta *Petroleum Coke*. Selain itu, kategori ini juga mencakup industri produk yang digunakan dalam industri petrokimia dan produk-produk lainnya, seperti *white spirit*, *vaseline*, lilin parafin, *petroleum jelly*, industri briket minyak bumi, serta pencampuran *biopetroleum*, seperti pencampuran alkohol dengan minyak bumi (misalnya gasohol); dan
   - Industri bahan bakar minyak dari proses pemurnian dan pengilangan minyak bumi meliputi kegiatan pemurnian dan pengilangan yang menghasilkan berbagai jenis bahan bakar, seperti Avigas, Avtur, *Gasoline*, Minyak Tanah atau Kerosin, Minyak Solar, Minyak Diesel, Minyak Bakar atau Bensin, serta *Solvent*/Pelarut. Kategori ini juga mencakup produksi LPG yang berasal dari hasil pengilangan minyak bumi.
2. Perdagangan
   - Perdagangan besar bahan bakar padat, cair, dan gas, beserta produk terkait, meliputi minyak bumi mentah, minyak mentah, bahan bakar diesel, bensin, bahan bakar oli, kerosin, premium, solar, minyak tanah, batu bara, arang, ampas arang batu, bahan bakar kayu, nafta, *biopetroleum*, bahan bakar gas seperti LPG, gas butana, dan propana, minyak semir, minyak pelumas, serta produk minyak bumi yang telah diproses dan dimurnikan;
   - Perdagangan besar bahan dan barang kimia dasar mencakup aktivitas perdagangan bahan dan barang kimia dasar atau kimia industri, seperti tinta printer, minyak esensial, gas industri, perekat kimia, pewarna, resin sintetis, metanol, parafin, perasa dan pewangi, soda, garam industri, asam, sulfur, serta produk sejenis lainnya; dan
   - Perdagangan eceran Bahan Bakar Minyak (BBM), Bahan Bakar Gas (BBG), dan *Liquefied Petroleum Gas* (LPG) di fasilitas pengisian bahan bakar untuk transportasi darat, laut, dan udara, mencakup kegiatan penjualan eceran BBM, BBG, LPG, atau jenis bahan bakar lainnya di sarana pengisian bahan bakar untuk transportasi darat, laut, dan udara seperti SPBU, SPBG, dan sejenisnya. Ini juga mencakup bahan bakar untuk *speed boat* dan generator set (genset). Kegiatan ini turut melibatkan penjualan pelumas, produk pendingin, bahan pembersih, serta barang-barang lain yang mendukung kebutuhan kendaraan seperti mobil dan sepeda motor.
3. Pengangkutan dan Pergudangan (Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi, Ketenagakerjaan, Agen Perjalanan, dan Penunjang Usaha Lainnya):
   - Angkutan melalui saluran pipa, mencakup kegiatan pengangkutan minyak dan gas bumi (minyak mentah, bahan bakar minyak, produk olahan, dan gas bumi), cairan, air, lumpur, serta komoditas lainnya dari lokasi produksi (produsen) ke lokasi konsumen menggunakan saluran pipa berdasarkan pembayaran jasa (*fee*) atau kontrak, termasuk pengoperasian gardu pompa;
   - Angkutan bermotor untuk barang umum, meliputi kegiatan pengangkutan barang dengan kendaraan bermotor yang dapat mengangkut lebih dari satu jenis barang, seperti truk, *pick up*, bak terbuka, dan bak tertutup (*box*);
   - Angkutan bermotor untuk barang khusus, mencakup kegiatan pengangkutan barang dengan kendaraan bermotor yang dirancang khusus untuk mengangkut jenis barang tertentu, seperti BBM, minyak bumi, produk olahan, LPG, LNG, CNG, barang berbahaya, limbah bahan berbahaya dan beracun, alat berat, peti kemas, tumbuhan hidup, hewan hidup, dan kendaraan bermotor;
   - Angkutan laut dalam negeri untuk barang khusus, mencakup pengangkutan barang menggunakan kapal laut yang dirancang untuk mengangkut barang tertentu, seperti barang berbahaya, limbah berbahaya, bahan bakar minyak, minyak bumi, produk olahan, LPG, LNG, CNG, ikan, dan sejenisnya;
   - Pergudangan dan penyimpanan, meliputi kegiatan penyimpanan sementara barang sebelum dikirim ke tujuan akhir untuk tujuan komersial;
   - Penyimpanan Minyak dan Gas Bumi, meliputi kegiatan penyimpanan, penerimaan, pengumpulan, penampungan, dan pengeluaran minyak bumi, bahan bakar minyak, gas, dan/atau hasil olahan di lokasi permukaan tanah, bawah tanah, atau permukaan air untuk tujuan komersial, termasuk penyimpanan di zona perdagangan bebas;

- Aktivitas Penyimpanan Bahan Berbahaya dan Beracun (B3), mencakup penyimpanan barang yang memerlukan fasilitas khusus sesuai dengan sifat bahan berbahaya dan beracun;
- Aktivitas *bonded warehousing* atau kawasan berikat, mencakup kegiatan usaha di wilayah pabean dengan perlakuan khusus, seperti yang dikelola oleh perusahaan di daerah industri tertentu seperti Pulau Batam; dan
- Aktivitas penyewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi untuk kendaraan darat, mencakup penyewaan atau sewa guna usaha tanpa hak opsi (*operational leasing*) berbagai jenis alat transportasi darat tanpa operatornya, seperti mobil, truk dan mobil derek.

4. Aktivitas Profesional, Ilmiah, dan Teknis (Jasa)
   - Aktivitas konsultasi manajemen lainnya mencakup pemberian nasihat, bimbingan, dan dukungan operasional terkait berbagai aspek organisasi dan manajemen. Ini mencakup perencanaan strategi dan organisasi, keputusan berkaitan dengan keuangan, kebijakan pemasaran, perencanaan sumber daya manusia, serta perencanaan penjadwalan dan pengontrolan produksi; dan
   - Penyediaan jasa usaha ini dapat mencakup bantuan nasihat, bimbingan, dan dukungan operasional untuk berbagai fungsi manajemen. Hal ini meliputi konsultasi manajemen yang diberikan oleh *agronomist* dan *agricultural economics* dalam bidang pertanian dan sejenisnya, serta perancangan metode dan prosedur akuntansi, program akuntansi biaya, dan pengawasan anggaran belanja. Selain itu, jasa juga mencakup pemberian nasihat dan bantuan untuk usaha serta pelayanan masyarakat terkait dengan perencanaan, pengorganisasian, efisiensi, dan pengawasan, serta informasi manajemen. Layanan studi investasi infrastruktur juga termasuk dalam lingkup ini.

Kegiatan Usaha Penunjang

1. Pengangkutan dan Pergudangan
   - Aktivitas pelayanan kepelabuhan laut, meliputi kegiatan pelayanan kepelabuhan laut yang terkait dengan transportasi perairan untuk penumpang, hewan, atau barang, seperti pengoperasian fasilitas terminal, misalnya pelabuhan dan dermaga, kegiatan navigasi, pemeriksaan muatan kargo dan/atau peti kemas dengan menggunakan sumber radiasi pengion (zat radioaktif dan pembakar radiasi pengion), pelayaran, kegiatan berlabuh, serta jasa penambatan; dan
   - Aktivitas pelayanan kepelabuhan sungai dan danau, meliputi penyelenggaraan pelabuhan yang terletak di sungai dan danau yang mencakup berbagai kegiatan terkait angkutan perairan untuk penumpang, hewan, atau barang. Aktivitas ini melibatkan pengoperasian fasilitas terminal seperti pelabuhan dan dermaga, navigasi, pemeriksaan muatan kargo dan/atau peti kemas dengan menggunakan sumber radiasi pengion (zat radioaktif dan pembakar radiasi pengion), pelayaran, kegiatan berlabuh, serta penyediaan jasa penambatan, pemanduan, dan penundaan.
2. Konstruksi
   - Konstruksi bangunan sipil jembatan dan jalan layang, *flyover*, dan *underpass* mencakup kegiatan pembangunan, pemeliharaan, dan/atau pembangunan kembali bangunan jembatan (termasuk jembatan rel), jalan layang, *underpass*, dan *flyover*. Kegiatan yang termasuk dalam klasifikasi ini adalah pembangunan, peningkatan, pemeliharaan penunjang, pelengkap, dan perlengkapan jembatan dan jalan layang, seperti pagar/tembok penahan, drainase jalan, marka jalan, dan rambu-rambu;
   - Jasa Pekerjaan Konstruksi Prapabrikasi Bangunan Sipil, meliputi pemasangan bahan hasil produksi pabrik, seperti beton pracetak, baja, plastik, karet, dan hasil produksi pabrik lainnya. Proses ini dilakukan dengan metode pabrikasi, *erection*, dan/atau perakitan untuk bangunan sipil;
   - Konstruksi Bangunan Pelabuhan Bukan Perikanan, meliputi usaha pembangunan, pemeliharaan, dan/atau pembangunan kembali bangunan dermaga (*jetty*), *trestle*, sarana pelabuhan, dan sejenisnya untuk pelabuhan bukan perikanan. Termasuk konstruksi jalan air atau terusan, pelabuhan, sarana jalur sungai, *dock* (pangkalan), *lock* (Panama *Canal Lock*, *Hoover Dam*), dan lain-lain; dan
   - Konstruksi bangunan sipil minyak dan gas bumi, meliputi kegiatan usaha pembangunan, pemeliharaan, dan/atau pembangunan kembali bangunan sipil dalam konteks kegiatan usaha hulu dan hilir minyak dan gas.
3. Pengadaan Listrik, Gas, Uap, Air Panas, dan Udara Dingin
   - Pembangkitan tenaga listrik mencakup aktivitas pembangkitan listrik dari berbagai sumber energi, baik fosil maupun terbarukan. Sumber energi fosil meliputi batu bara, gas, bahan bakar minyak, dan diesel, sementara sumber energi terbarukan mencakup panas bumi, angin, bioenergi, sinar matahari, aliran dan terjunan air, gerakan, serta perbedaan suhu lapisan laut. Selain itu, pembangkitan dari sumber energi *hybrid* yang menggabungkan energi fosil dengan energi terbarukan, serta energi dari teknologi *energy storage*;
   - Aktivitas penunjang tenaga listrik lainnya mencakup jasa-jasa yang secara langsung berkaitan dengan penyediaan dan pemanfaatan tenaga listrik, namun tidak termasuk dalam kelompok 35121 hingga 35122. Contohnya meliputi jasa pencatatan meteran, penyusunan tagihan, perdagangan pulsa atau token listrik, serta berbagai kegiatan penunjang kelistrikan lainnya;
   - Pengadaan gas alam dan buatan mencakup usaha pengolahan bahan bakar gas yang dapat dimanfaatkan secara langsung sebagai bahan bakar, dengan proses yang meliputi peningkatan mutu gas seperti pemurnian, pencampuran, dan metode lainnya yang dihasilkan dari gas alam (termasuk LPG), karbonasi, gasifikasi batu bara, atau bahan hidrokarbon lainnya; dan
   - Distribusi gas alam dan buatan meliputi usaha penyaluran gas melalui jaringan dengan tekanan ekstra tinggi (lebih dari 10 bar), tekanan tinggi (antara 4 bar hingga 10 bar), serta tekanan menengah ke bawah (di bawah 4 bar), baik dari produksi sendiri maupun pihak lain hingga ke konsumen atau pelanggan. Penyaluran gas melalui pipa berdasarkan balas jasa atau *fee* termasuk dalam kelompok 49300. Kegiatan ini mencakup penyaluran, distribusi, dan pengadaan semua jenis bahan bakar gas melalui sistem saluran, perdagangan gas kepada konsumen melalui saluran, kegiatan agen gas yang memperdagangkan gas melalui sistem distribusi yang dioperasikan pihak lain, serta pengoperasian pertukaran komoditas dan kapasitas pengangkutan bahan bakar gas.

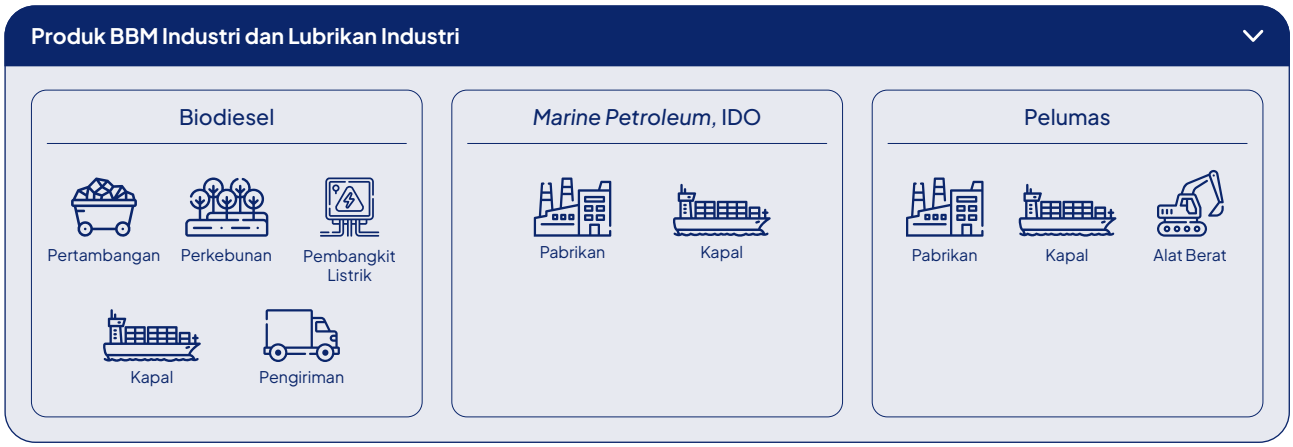
Segmen Usaha, **Produk, dan Jasa**

Untuk mendukung fokus dan efektivitas pengelolaan bisnis, Perseroan mengelompokkan kegiatan usahanya ke dalam 4 (empat) segmen utama sebagai berikut:
1. Perdagangan dan Distribusi BBM dan Bahan Kimia Dasar;
2. Infrastruktur Logistik;
3. Pabrikan; dan
4. Kawasan Industri dan Pelabuhan yang Terintegrasi.

Perseroan menyediakan berbagai produk yang disesuaikan dengan masing-masing segmen kegiatan usaha, antara lain:

Perdagangan dan Distribusi

Dalam segmen perdagangan dan distribusi, Perseroan berfokus pada pengembangan usaha dalam 2 (dua) lini produk utama, yaitu BBM dan bahan kimia dasar.



1. Bahan Bakar Minyak Industri Non-Subsidi

Sejak 2005, Perseroan mengembangkan bisnis distribusi BBM industri non-subsidi dan secara konsisten memperluas jaringan logistik untuk melayani pelanggan di sektor pertambangan, pembangkit listrik, manufaktur, transportasi, dan bunker. Distribusi ini didukung oleh fasilitas terminal tangki di sejumlah pelabuhan utama yang berlokasi strategis di Indonesia, dengan total kapasitas 820.400 KL.

Perseroan memiliki keunggulan kompetitif melalui sistem manajemen rantai pasok yang andal, sehingga mampu menjamin kapasitas, kualitas, dan ketepatan waktu distribusi BBM ke pelanggan di berbagai wilayah Indonesia. Keandalan ini didukung oleh armada pengangkut BBM yang terdiri dari kapal tanker, tongkang, dan kapal tongkang bermesin (*Self-Propelled Oil Barge*/SPOB) untuk distribusi melalui laut dan sungai, termasuk kapal yang dirancang khusus untuk perairan dangkal di Kalimantan dengan kedalaman hingga 2,7 meter. Selain itu, Perseroan mengoperasikan sekitar ±250 unit truk untuk mendukung pengiriman darat ke seluruh Indonesia.

Sejalan dengan kebijakan Pemerintah dalam mendorong transisi energi dan penguatan ketahanan energi nasional, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral pada Agustus 2018 menetapkan kewajiban penggunaan biodiesel bagi sektor industri dan transportasi dengan pengecualian terbatas. AKR memainkan peran penting dalam implementasi program B40 tersebut. Perseroan menerima alokasi *Fatty Acid Methyl Ester* (FAME) terbesar di antara pelaku usaha swasta untuk proses *blending* biodiesel.

Produk BBM Ritel dan Aviasi

Subsidi	Non-Subsidi	BBM Aviasi
Biodiesel (B40)	Bensin beroktan tinggi (RON 92 dan RON 95) dengan *active technology* dan diesel (CN 48 dan CN 51)	Avtur
Kendaraan non-komersial; Kapal Nelayan	Kendaraan Bermotor	Pesawat



2. BBM Ritel Non-Subsidi

Perseroan menjalin kemitraan strategis dengan bp untuk mengembangkan bisnis ritel BBM di Indonesia pada tahun 2017. Kolaborasi ini diwujudkan melalui pembentukan perusahaan *Joint Venture* PT Aneka Petroindo Raya, yang beroperasi dengan merek "bp AKR Petroleum Retail". Melalui perjanjian eksklusif tersebut, kedua pihak berkomitmen menghadirkan pengalaman ritel BBM yang unik dan bernilai tambah, dengan memadukan keunggulan global bp serta kapabilitas AKR dalam memahami dan melayani pasar ritel Indonesia yang terus berkembang.

Hingga akhir tahun 2025, AKR telah mengoperasikan 72 SPBU bp AKR yang tersebar di wilayah Jabodetabek, Surabaya, Gresik, Malang, serta sejumlah rest area jalan Tol Cipularang dan Tol Pasuruan-Probolinggo. Selain melalui jaringan ritel bp AKR, Perseroan juga melayani penjualan BBM ritel non subsidi secara terbatas melalui SPBU AKR untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di daerah terpencil. Seiring dinamika industri yang terus berkembang, segmen ritel BBM diharapkan tetap berperan sebagai salah satu pendorong pertumbuhan Perseroan yang berkelanjutan dalam jangka panjang.

3. Bahan Bakar Minyak Ritel Bersubsidi

Selama hampir 16 tahun, Perseroan dipercaya oleh Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) untuk melaksanakan distribusi BBM bersubsidi, seiring dengan kapasitas operasional dan rekam jejak yang solid. Penyaluran BBM bersubsidi tersebut dilakukan melalui Stasiun Pengisian Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (SPBKB) dan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Nelayan (SPBN) dengan merek AKRA SOL, yang saat ini telah bertransformasi menjadi produk berbasis Biodiesel.

Perseroan mengelola jaringan SPBKB dan SPBN yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia, meliputi Sumatera, Jawa, Bali, dan Kalimantan. Didukung oleh jaringan terminal yang terintegrasi serta armada transportasi yang memadai, Perseroan secara konsisten memperoleh penugasan distribusi biodiesel bersubsidi dari BPH Migas, sekaligus berperan aktif dalam mendukung program BBM Satu Harga di wilayah 3T. Kapabilitas ini semakin menegaskan posisi Perseroan sebagai salah satu pelaku utama dalam bisnis distribusi BBM nasional.

Tipe Produk	Produk
BBM Industri Non-Subsidi	• Biodiesel (B40) • *Industrial Diesel Oil* (IDO) • *Marine Fuel Oil*
BBM Ritel Non-Subsidi	• *Gasoline* RON 92 dan RON 95 • *High Quality* Diesel (CN 48 dan CN 51)
BBM Subsidi	Biodiesel (B40)







4. Bahan Kimia Dasar

AKR merupakan distributor utama PT Asahimas Chemical dengan tanggung jawab mendistribusikan berbagai jenis bahan kimia dasar, termasuk chlor alkali, pelarut (*solvents*), asam, serta bahan kimia organik dan anorganik. Perseroan juga melakukan kegiatan perdagangan dan distribusi bahan kimia dasar yang bersumber dari pemasok domestik maupun internasional guna memastikan keberlanjutan dan fleksibilitas pasokan bagi pelanggan.

Sejak mendirikan terminal tangki penyimpanan pertama di Indonesia pada dekade 1960-an, AKR berkembang menjadi distributor bahan kimia dengan pangsa pasar terbesar di Indonesia. Pencapaian tersebut ditopang oleh infrastruktur penyimpanan yang memadai serta sistem rantai pasok dan logistik yang terintegrasi. Kombinasi kapabilitas tersebut menjadikan AKR mitra tepercaya bagi berbagai sektor industri, termasuk pemurnian mineral (*smelter*), barang konsumsi, tekstil, kaca, dan industri lainnya.

Produk Kimia Dasar	Konsumen
• *Caustic Soda* • *Sodium Hypochlorite* • *Hydrogen Peroxide* • *PVC Resins* • *Soda Ash* • *Sulphuric Acid* • *Hydrochloric Acid* • *Sodium Sulphate* • *Methanol*	• Produsen Produk Rumah Tangga • Tekstil • Kaca • Kertas • Pupuk • Kimia dan Farmasi • Plastik • *Food Additive* • *Smelter*

5. Pelumas

AKR mempercepat pengembangan bisnis di sektor pelumas melalui PT Anugerah Lubrindo Raya (ALR), anak perusahaan yang didirikan pada 7 Februari 2019 sebagai entitas anak PT Anugerah Krida Retailindo. ALR berfokus pada kegiatan perdagangan dan distribusi pelumas bermerek Castrol yang ditujukan untuk segmen industri, kelautan, pertambangan, serta kendaraan komersial. Inisiatif ini merupakan bagian dari strategi diversifikasi Perseroan untuk memperluas portofolio usaha sekaligus memperkuat posisi dan daya saing di sektor pelumas.

6. Avtur

Pada tahun 2016, Perseroan menandatangani perjanjian pembentukan perusahaan dengan Air bp untuk mengembangkan bisnis distribusi bahan bakar pesawat terbang di bandara-bandara Indonesia. Kolaborasi strategis ini diwujudkan melalui pendirian PT Dirgantara Petroindo Raya (DPR) sebagai entitas *Joint Venture*. Selanjutnya, pada Agustus 2019, DPR meresmikan pengoperasian Depot Pengisian Pesawat Udara (DPPU) pertamanya yang berlokasi di bandara khusus IMIP Morowali, Sulawesi Tengah, serta Cibubur. Melalui inisiatif ini, Perseroan mencatatkan tonggak penting sebagai perusahaan swasta pertama di Indonesia yang menjalankan kegiatan distribusi bahan bakar pesawat terbang.

7. Gas

Pada 4 Agustus 2021, Perseroan menjalin kerja sama dengan PT Bayu Buana Gemilang (BBG) untuk mendirikan perusahaan *Joint Venture* bernama PT Berkah Buana Energi (BBE). Perusahaan ini dibentuk untuk menjalankan kegiatan pembangunan, pengelolaan, serta pengembangan jaringan distribusi gas alam melalui pipa dari sumber gas hingga ke pelanggan akhir.

Fokus pengembangan usaha BBE diarahkan ke KEK JIIPE di Gresik, Jawa Timur, guna mendukung kebutuhan energi sektor industri di kawasan tersebut. Perseroan memiliki 65% saham, sementara BBG memegang 35%, mencerminkan peran strategis Perseroan dalam pengelolaan dan pengembangan bisnis distribusi gas alam.

Jasa Logistik

Infrastruktur logistik Perseroan mencakup gudang, tangki penyimpanan, kapal, dan truk pengangkut. Kapabilitas ini memungkinkan Perseroan menyediakan layanan logistik dan distribusi yang efisien bagi pihak ketiga, termasuk pengelolaan kargo curah secara andal dan terpercaya di sejumlah pelabuhan utama di Indonesia.

PT AKR Transportasi Indonesia sebagai anak perusahaan menyediakan jasa angkutan darat untuk mendukung layanan logistik dan distribusi. Selain itu, Perseroan juga mengoperasikan armada kapal melalui PT AKR Sea Transport untuk memastikan pengiriman produk yang aman dan tepat waktu, baik kepada pelanggan internal maupun pihak ketiga.

Dalam memperkuat kapasitas penyimpanan dan distribusi BBM, Perseroan memiliki 51% kepemilikan saham di PT Jakarta Tank Terminal (JTT), perusahaan *Joint Venture* dengan Royal Vopak. JTT mengoperasikan terminal tangki penyimpanan BBM independen berkapasitas total 350.000 cbm yang berlokasi di Pelabuhan Tanjung Priok dan dilengkapi dengan fasilitas dermaga serta jaringan pipa bawah laut.

Sebagai salah satu pemilik terminal tangki swasta terbesar di Indonesia, JTT berperan strategis dalam meningkatkan efisiensi distribusi BBM Perseroan sekaligus melayani pelanggan dari perusahaan-perusahaan minyak terkemuka. Adapun jenis produk dan layanan yang disediakan meliputi:

Pelayanan
Jasa Penanganan Barang Curah
Jasa Penanganan Peti Kemas
Transportasi Darat dan Laut
Tangki Penyimpanan
Vendor Managed Inventory (VMI)
Pergudangan
Jasa pelabuhan melalui perusahaan afiliasi PT BMS

Bagi pelanggan utama, Perseroan menyediakan layanan VMI yaitu sistem pengelolaan persediaan BBM langsung di lokasi pelanggan. Melalui skema ini, pelanggan hanya dikenakan biaya berdasarkan volume pemakaian aktual, sementara Perseroan bertanggung jawab atas perencanaan, ketersediaan, dan optimalisasi pengelolaan persediaan. Penerapan VMI mencerminkan komitmen Perseroan dalam menghadirkan solusi yang meningkatkan efisiensi operasional pelanggan sekaligus menciptakan nilai tambah yang berkelanjutan.

Pabrikan

Segmen pabrikan bergerak dalam produksi bahan perekat kayu berkualitas tinggi melalui entitas anak PT Arjuna Utama Kimia (Aruki) yang berlokasi di Surabaya, Jawa Timur. Aruki berfokus pada penyediaan solusi bahan perekat bagi pelaku industri kayu dan kertas di Indonesia, guna mendukung kebutuhan produksi yang konsisten, efisien, dan berstandar tinggi.

Tipe Produk	Merek	Produk Akhir
Urea-formaldehyde Resin	Uloid	Kayu lapis dan perkayuan
High Solid Urea-formaldehyde Resin	Uloid	*Particle Board* and MDF
Melamine-formaldehyde Resin	Uloid	Kayu lapis dan perkayuan
Planol-formaldehyde Resin	Uloid	Kayu lapis dan perkayuan
Two Component Vinyl Urethane Adhesive	Struct Bond	*Wood working*, *Furniture*, *Flooring* & FJLB
Polyacrylamide Monomer (PAM) Resin	HOFMANN	*High performance dry strength enhancement resin for paper*
Polyacrylamide Monomer (PAM) Resin	HOPELON	*High performance dry strength enhancement resin for paper*
Melamine Resin	URAMIN	*Paper wet strength improvement resin*
Poly Vinyl Acetate	PVAc	Lem multiguna untuk kayu dan kertas

Kawasan Industri

Sebagai bagian dari strategi pertumbuhan jangka panjang, Perseroan memperluas portofolio investasinya dalam pengembangan Java Integrated Industrial and Port Estate (JIIPE) yang berlokasi di Gresik, Jawa Timur. Investasi ini ditujukan untuk memenuhi kebutuhan logistik dan solusi energi bagi pelanggan industri. JIIPE memiliki pelabuhan laut dalam yang terintegrasi dengan kawasan industri berskala besar serta konektivitas yang kuat di salah satu provinsi dengan tingkat pertumbuhan ekonomi yang pesat.

Dengan total luas lebih dari 3.000 hektare, JIIPE dikembangkan sebagai kawasan industri terpadu yang terhubung langsung dengan pelabuhan laut dalam, menjadikannya salah satu kawasan industri dan pelabuhan terintegrasi terbesar di Indonesia. Pengembangan kawasan ini mencakup 1.761 hektare untuk area industri, 406 hektare untuk fasilitas pelabuhan laut, serta sekitar 800 hektare untuk kawasan residensial dan komersial yang dikembangkan oleh perusahaan afiliasi yaitu PT AKR Land.

Sebagai KEK berfokus pada teknologi dan manufaktur dalam mendukung agenda hilirisasi nasional, JIIPE dilengkapi dengan berbagai fasilitas penunjang berstandar internasional, antara lain pembangkit listrik, saluran air, *waste water treatment* dan Teknologi Informasi. Keberadaan fasilitas-fasilitas ini dapat meningkatkan daya tarik kawasan bagi *tenant* industri, sekaligus menciptakan sumber pendapatan berkelanjutan bagi Perseroan, sehingga model bisnis kawasan industri tidak semata bergantung pada penjualan dan penyewaan lahan. Adapun jenis produk dan layanan yang disediakan dirinci sebagai berikut:

Pelayanan
Kawasan Industri
Port and Port Operator
Utilities & Infrastructures
Suplai Gas

Pasar yang Dilayani

Sebagai penyedia layanan logistik dan solusi pengadaan terpadu untuk energi dan bahan kimia di Indonesia, Perseroan ditopang oleh infrastruktur dan jaringan logistik yang luas dan andal. Perseroan mengoperasikan fasilitas tangki penyimpanan dan terminal distribusi di 19 pelabuhan strategis yang tersebar di seluruh Indonesia, serta didukung armada logistik yang komprehensif, mencakup kapal pengangkut dan truk distribusi untuk BBM dan bahan kimia dasar. Dengan kapabilitas tersebut, Perseroan telah melayani berbagai pelanggan dari berbagai sektor industri.

Selain itu, Perseroan mendistribusikan biodiesel dan *fuel oil* kepada pelanggan di sektor komersial, pertambangan, pembangkit listrik, manufaktur, konstruksi, perikanan, dan bunker. Perseroan juga memperluas layanan ke segmen ritel dengan menghadirkan bahan bakar berstandar Euro 4 melalui jaringan *outlet* ritel, sebagai bagian dari komitmen terhadap kualitas produk dan standar lingkungan yang lebih tinggi.

Dalam mengembangkan bisnis BBM ritel non-subsidi dan avtur, Perseroan menjalin kemitraan strategis dengan bp Global melalui pembentukan *Joint Venture*, seperti bp AKR yang hingga akhir Desember 2025 telah mengoperasikan 72 SPBU, serta PT Dirgantara Petroindo Raya (DPR) yang mengelola 2 depo avtur di Indonesia. Di segmen ritel bersubsidi, Perseroan mendistribusikan biodiesel untuk kendaraan bermotor dan nelayan, menjangkau wilayah Jawa, Sumatera, Kalimantan, dan Sulawesi. Selain melalui jaringan ritel bp AKR, Perseroan juga melayani penjualan BBM ritel non subsidi secara terbatas melalui SPBU AKR untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di daerah terpencil.

Perseroan aktif dalam perdagangan dan distribusi bahan kimia dasar, bertindak sebagai distributor bagi produsen kimia internasional di Indonesia. Produk-produk tersebut menjadi bahan baku bagi beragam industri, termasuk smelter, kimia, tekstil, pulp dan kertas, barang konsumsi, pupuk, produk olahan kayu, makanan, farmasi, serta sektor industri lainnya.

Keanggotaan dalam Asosiasi

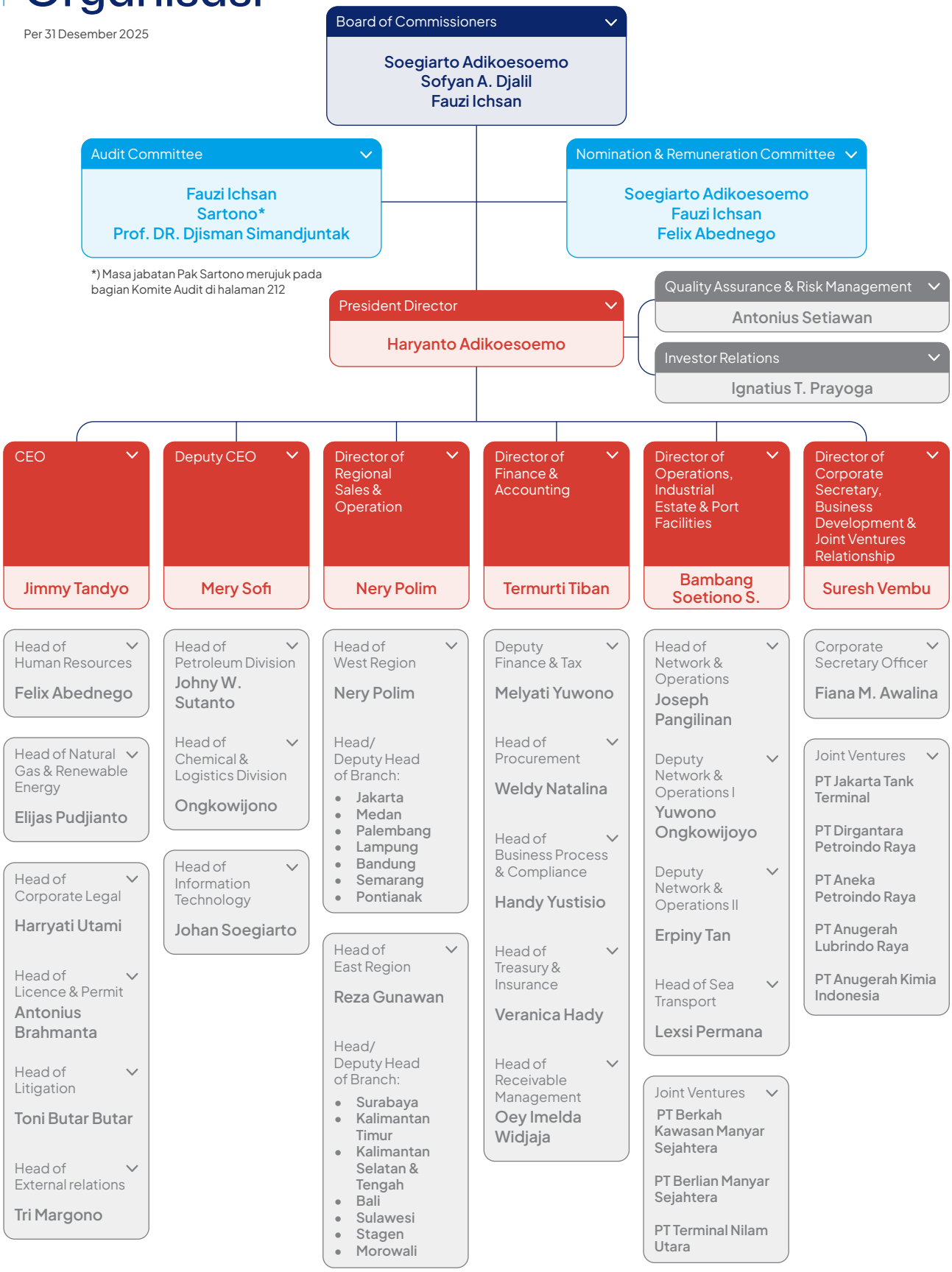
Perseroan aktif tergabung dalam berbagai asosiasi dan organisasi bisnis untuk memperluas jaringan dan memperkuat komunikasi dengan pemangku kepentingan. Sepanjang tahun 2025, AKR tercatat sebagai anggota dalam asosiasi berikut:

Nama Organisasi	Posisi di Asosiasi	Iuran Keanggotaan/Tahun (Rp)
Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO)	Anggota	Rp27.500.000
Asosiasi Emiten Indonesia (AEI)	Anggota	Rp12.000.000
Kamar Dagang dan Industri Indonesia (KADIN)	Anggota	Rp3.500.000
Indonesia Corporate Secretary Association (ICSA)	Anggota	Rp5.000.000
Association of Indonesian Investor Relations	Wakil Ketua	Rp2.000.000



Struktur Organisasi

Per 31 Desember 2025



Profil
Dewan Komisaris



Soegiarto Adikoesoemo

Komisaris Utama

Kewarganegaraan
Indonesia

Domisili
Surabaya

Tempat dan Tanggal Lahir
Malang, 24 Maret 1938

Usia
88 Tahun

Dasar Hukum Penunjukan
Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan berdasarkan Akta No. 16 tanggal 28 April 2025.

Riwayat Pendidikan
- SMA Yong Ching Night School, Surabaya (1957)
- SMP Yong Ching Night School, Surabaya (1954)
- SD Chung Hua Sie Siau Lawang, Malang (1951)

Riwayat Jabatan
- Founder & Chairman AKR (Guangxi) Coal Trading Co. Ltd, Guigang, Tiongkok (2008 – 2019)
- Founder & Chairman AKR (Guigang) transshipment port, Co. Ltd, Guigang, Tiongkok (2016 – 2017)
- Founder & Chairman AKR Guangxi (Guigang) AKR Container Port Co. Ltd, Guigang, tiongkok (2006 – 2017)
- Presiden Direktur AKR (1982 – 1992)
- Pendiri AKR Group (1960)
- Mendirikan perusahaan sendiri bernama UD. Sinar Djaja (1960)

Rangkap Jabatan
- Presiden Komisaris PT Arjuna Utama Kimia (2007 – sekarang)
- Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi PT AKR Corporindo Tbk
- Komisaris Utama PT AKR Land Development (d/h PT Union Perkasa Wisesa) Jakarta (1998 – sekarang)
- Presiden Komisaris PT Arthakencana Rayatama (1992 – sekarang)
- Komisaris Utama PT Andahanesa Abadi (1992 – sekarang)

Hubungan Afiliasi
Memiliki hubungan keluarga dengan Direktur Utama dan Pemegang Saham Pengendali.

Kepemilikan Saham
Memiliki 145.267.000 saham di Perseroan.



Sofyan A. **Djalil**

Komisaris

Kewarganegaraan
Indonesia

Domisili
Jakarta

Tempat dan Tanggal Lahir
Aceh, 23 September 1953

Usia
72 Tahun

Dasar Hukum Penunjukan
Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan berdasarkan Akta No. 16 tanggal 28 April 2025.

Riwayat Pendidikan
- Ph.D Hukum dan Kebijakan Pasar Modal, Fletcher School of Law and Diplomacy, Tufts University (1993)
- Master of Arts in Law and Diplomacy, Tufts University (1991)
- Master of Arts (MA), Kebijakan Publik, Tufts University (1989)
- Sarjana Hukum, Universitas Indonesia (1984)

Riwayat Jabatan
- Menteri Agraria dan Tata Ruang (2016 – 2022)
- Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (2015 – 2016)
- Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (2014 – 2015)
- Ketua Tim Kajian Strategis Wakil Presiden Budiono (2010 – 2014)
- Menteri Komunikasi dan Informatika (2004 – 2007)
- Konsultan Community Relation Chevron Indonesia (2000)
- Asisten Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara (1998 – 2000)
- Vice President Research & Development Bursa Efek Jakarta (1998)

Rangkap Jabatan
- CEO Indonesia Business Council (IBC) (2023 – sekarang)
- Komisaris Utama dan Independen PT Pembangunan Jaya Ancol Tbk (2023 – sekarang)
- Dewan Pengarah Indonesian Palm Oil Strategic Studies (IPOSS) (2023 – sekarang)
- Komisaris Utama PT Indika Nature (2022 – sekarang)

Hubungan Afiliasi
Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan Dewan Komisaris, Direksi dan Pemegang Saham Pengendali.

Kepemilikan Saham
Tidak memiliki saham di Perseroan.



Fauzi Ichsan

Komisaris Independen

Kewarganegaraan
Indonesia

Domisili
Surabaya

Tempat dan Tanggal Lahir
Jakarta, 27 Januari 1970

Usia
56 Tahun

Dasar Hukum Penunjukan
Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan berdasarkan Akta No. 16 tanggal 28 April 2025.

Riwayat Pendidikan
- Master of Science, Development Studies, Massachusetts Institute of Technology (MIT), Massachusetts, USA, (1995)
- Bachelor of Science, London School of Economics (LSE), University of London, UK (1991)
- Ordinary and Advanced Level Certificates of Education, Cambridge University Board, UK (1988)

Riwayat Jabatan
- Executive Committee Member of International Association of Deposit Insurers, IADI, Basel, Switzerland (2017 – 2020)
- Kepala Eksekutif Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) (2015 – 2019)
- Anggota Dewan Komisaris LPS (2014 – 2015)
- Managing Director, Senior Economist, and Head of Government Relations, Standard Chartered Bank (SCB) Jakarta (2001 – 2014)
- Senior Economic Adviser for British Ambassador to Indonesia (1998 – 2000)
- Bond Trader Citibank Singapore (1997 – 1998)
- Head of Fixed Income Sales Desk Citibank Jakarta (1995 – 1997)
- Research Analyst, Harvard Institute for International Development, Advisory Team for Minister of Finance, Departemen Keuangan (1991 – 1993)

Rangkap Jabatan
- Komisaris Independen Minamas Plantation (2023 – sekarang)
- Komisaris Independen PT Unilever Indonesia Tbk (2021 – sekarang)
- Komisaris Independen PT Manulife Investment Management (2020 – sekarang)
- Komisaris Utama Indonesia Financial Group (IFG) (2020 – sekarang)
- Ketua Komite Nominasi dan remunerasi PT AKR Corporindo Tbk (2020 – sekarang)
- Ketua Komite Audit PT AKR Corporindo Tbk (2020 – sekarang)

Hubungan Afiliasi
Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan Dewan Komisaris, Direksi dan Pemegang Saham Pengendali.

Pernyataan Independensi
Bapak Fauzi Ichsan sebagai Komisaris Independen yang saat ini memasuki periode jabatan kedua, memenuhi seluruh kriteria independensi sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kepemilikan Saham
Tidak memiliki saham di Perseroan.

Profil **Direksi**



Haryanto **Adikoesoemo**

Presiden Direktur

Kewarganegaraan
Indonesia

Domisili
Jakarta

Tempat dan Tanggal Lahir
Surabaya, 21 September 1962

Usia
63 Tahun

Dasar Hukum Penunjukan
Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan berdasarkan Akta No. 16 tanggal 28 April 2025.

Riwayat Pendidikan
- Executive Management Program Harvard Business School (1993)
- Bachelor of Science, University Bradford, United Kingdom (1983)
- "A" Level Hall Green Technical College, United Kingdom (1980)
- "O" Level St. Patrick's School, Singapura (1978)

Riwayat Jabatan
- Wakil Ketua, Khalista (Liuzhou) Chemical Industries Ltd (2004 – 2018)
- Komisaris Utama PT Bumi Karunia Pertiwi (2009 – 2018)
- Direktur AKR (Guigang) Coal Trading Co. Ltd (2008 – 2017)
- Direktur AKR (Guigang) Transshipment Port Co. Ltd (2006 – 2017)
- Direktur AKR (Guigang) Port Co. Ltd (2006 – 2017)
- Direktur Guangxi (Guigang) AKR Container Port Co.Ltd (2006 – 2017)
- Komisaris Utama PT Jabal Nor (2011 – 2017)
- Executive Committee of Business office Ministry (2003)

Rangkap Jabatan
- Direktur Lubrindo Shipping Services Pte Ltd (2019–sekarang)
- Komisaris Utama PT Anugerah Lubrindo Batam (2019–sekarang)
- Komisaris Utama PT Anugerah Lubrindo Raya (2019–sekarang)
- Komisaris Utama PT Anugerah Krida Retailindo (2017 – sekarang)
- Presiden Komisaris PT AKR Niaga Indonesia (2012 – sekarang)
- Presiden Komisaris PT AKR Sea Transport (2011 – sekarang)
- Komisaris Utama PT Anugrah Karya Raya (2009 – sekarang)
- Komisaris PT Andahanesa Abadi (2008 – sekarang)
- Presiden Komisaris PT Arjuna Utama Kimia (2007–sekarang)
- Presiden Komisaris PT Jakarta Tank Terminal (2005 – sekarang)
- Komisaris Utama PT Usaha Era Pratama Nusantara (2002 – sekarang)
- Presiden Direktur PT Arthakencana Rayatama (1992 – sekarang)
- Presiden Direktur PT AKR Land Development (d/h PT Union Perkasa Wisesa) (1985 – sekarang)

Hubungan Afiliasi
Memiliki hubungan keluarga dengan Presiden Komisaris dan Pemegang Saham Pengendali.

Kepemilikan Saham
Memiliki 212.604.600 saham di Perseroan.



Jimmy Tandyo

Direktur

Kewarganegaraan
Indonesia

Domisili
Jakarta

Tempat dan Tanggal Lahir
Surabaya, 22 Agustus 1951

Usia
74 Tahun

Dasar Hukum Penunjukan
Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan berdasarkan Akta No. 16 tanggal 28 April 2025.

Riwayat Pendidikan
- Advance Management Program di Harvard Business School (2005)
- Lulusan Institut Bahasa Asing (1970)

Riwayat Jabatan
- Direktur AKR (Guangxi) Coal Trading Co Ltd. (2008 – 2019)
- Direktur Khalista (Liuzhou) Chemical Industries Ltd, (2012 – 2018)
- Komisaris PT Bumi Karunia Pertiwi (2009 – 2018)
- Komisaris PT Jabal Nor (2011 – 2017)
- Direktur AKR Guangxi (Guigang) AKR Container Port Co.Ltd. (2006 – 2017)
- Direktur AKR (Guigang) Port Co. Ltd (2006 – 2017)
- Direktur AKR (Guigang) Transshipment Port Co. Ltd (2006 – 2017)
- Direktur PT Sorini Corporation Tbk (1985 – 2006)
- General Manager PT Aneka Kimia Raya (1974 – 1985)

Rangkap Jabatan
- Komisaris Utama PT Terminal Energi Primer (2024 – sekarang)
- Komisaris PT Berkah Renewable Energi Nusantara (2024 – sekarang)
- Komisaris Utama PT Berkah Buana Energi (2021 – sekarang)
- Komisaris PT Anugerah Krida Retailindo (2017 – sekarang)
- Komisaris Utama PT Terminal Nilam Utara (2015 – sekarang)
- Komisaris PT AKR Niaga Indonesia (2012 – sekarang)
- Komisaris Utama PT Berkah Kawasan Manyar Sejahtera (2012 – sekarang)
- Komisaris PT AKR Sea Transport (2011 – sekarang)
- Komisaris PT Anugrah Karya Raya (2009 – sekarang)
- Direktur Utama PT Andahanesa Abadi (2008 – sekarang)
- Komisaris PT Jakarta Tank Terminal (2007 – sekarang)
- Komisaris PT Usaha Era Pratama Nusantara (2002 – sekarang)
- Direktur PT Arthakencana Rayatama (1992 – sekarang)
- Komisaris PT Arjuna Utama Kimia (1985 – sekarang)

Hubungan Afiliasi
Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan anggota Dewan Komisaris, Direksi dan Pemegang Saham Pengendali.

Kepemilikan Saham
Memiliki 48.000.000 saham di Perseroan.



Bambang **Soetiono Soedijanto**

Direktur

- **Kewarganegaraan**
  Indonesia
- **Domisili**
  Jakarta
- **Tempat dan Tanggal Lahir**
  Rembang, 8 Februari 1962
- **Usia**
  64 Tahun

Dasar Hukum Penunjukan
Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan berdasarkan Akta No. 16 tanggal 28 April 2025.

Riwayat Pendidikan
Sarjana Ekonomi Akuntansi, STIE Surabaya (1986)

Riwayat Jabatan
- Komisaris PT Berlian Manyar Stevedore (2016 – 2019)
- Direktur AKR (Guigang) Transshipment Port Co. Ltd (2006 – 2017)
- Kepala Kantor Cabang surabaya PT AKR Corporindo Tbk (1992 – 1994)
- Ketua Divisi Keuangan dan akuntansi di PT AKR Corporindo Tbk Kantor Cabang surabaya (1989 – 1992)

Rangkap Jabatan
- Komisaris PT Terminal Energi Primer (2024 – sekarang)
- Komisaris PT Berkah Buana Energi (2021 – sekarang)
- Direktur Utama PT Terminal Nilam Utara (2014 – sekarang)
- Direktur Utama PT Berkah Kawasan Manyar Sejahtera (2012 – sekarang)
- Komisaris PT Berlian Manyar Sejahtera (2012 – sekarang)
- Presiden Direktur PT AKR Niaga Indonesia (2012 – sekarang)
- Presiden Direktur PT AKR Sea Transport (2011 – sekarang)
- Direktur PT Andahanesa Abadi (2008 – sekarang)
- Direktur PT Arjuna Utama Kimia (2007 – sekarang)
- Direktur PT Jakarta Tank Terminal (2005 – sekarang)
- Direktur Utama PT Usaha Era Pratama Nusantara (2002 – sekarang)

Hubungan Afiliasi
Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan anggota Dewan Komisaris, Direksi dan Pemegang Saham Pengendali.

Kepemilikan Saham
Memiliki 7.780.000 saham di Perseroan.



Mery Sofi

Direktur

Kewarganegaraan
Indonesia

Domisili
Jakarta

Tempat dan Tanggal Lahir
Bagan Siapi-api, 25 April 1967

Usia
59 Tahun

Dasar Hukum Penunjukan
Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan berdasarkan Akta No. 16 tanggal 28 April 2025.

Riwayat Pendidikan
Sarjana Ekonomi Akuntansi, Universitas Krida Wacana, Jakarta (1990)

Riwayat Jabatan
- Direktur Utama PT Berkah Buana Energi (2021 – 2023)
- Direktur Utama PT Bumi Karunia Pertiwi (2012 – 2018)
- Direktur AKR (Guigang) Transshipment Port Co.Ltd. (2006 – 2017)
- Direktur Guangxi (Guigang) AKR Container Port Co. Ltd (2006 – 2017)
- Financial Controller PT AKR Corporindo Tbk (1997 – 2006)
- Manajer Keuangan dan Akuntansi pada Divisi Kemasan PT Indofood Sukses Makmur Tbk (1988 – 1997)

Rangkap Jabatan
- Direktur Utama PT Terminal Energi Primer (2024 – sekarang)
- Direktur Chemical Petroleum International Trading PTE. LTD (2024 – sekarang)
- Presiden Komisaris PT AKR Transportasi Indonesia (2024 – sekarang)
- Komisaris PT Berkah Kawasan Manyar Sejahtera (2017 – sekarang)
- Komisaris Utama PT Dirgantara Petroindo Raya (2017 – sekarang)
- Direktur PT Anugerah Krida Retailindo (2017 – sekarang)
- Direktur PT AKR Niaga Indonesia (2012 – sekarang)
- Direktur PT AKR Sea Transport (2011 – sekarang)
- Direktur PT Andahanesa Abadi (2008 – sekarang)
- Direktur PT Arjuna Utama Kimia (2007 – sekarang)

Hubungan Afiliasi
Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan anggota Dewan Komisaris, Direksi dan Pemegang Saham Pengendali.

Kepemilikan Saham
Memiliki 8.303.000 saham di Perseroan.



Suresh Vembu

Direktur

Kewarganegaraan
India

Domisili
Jakarta

Tempat dan Tanggal Lahir
Nagapattinam, 23 Juni 1964

Usia
61 Tahun

Dasar Hukum Penunjukan
Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan berdasarkan Akta No. 16 tanggal 28 April 2025.

Riwayat Pendidikan
- Bachelor of Commerce dari Bangalore University, MES College (1984)
- Chartered Accountancy dari Indian Institute of Chartered Accountants, New Delhi (1987)

Riwayat Jabatan
- Corporate Secretary dan Head Investor Relations PT AKR Corporindo Tbk dan PT Sorini Agro Asia Corporindo Tbk (2007 – 2009)
- Head of Corporate Finance & Investor Relations PT AKR Corporindo Tbk (2004 – 2007)
- General Manager Corporate Finance (Engineering) – Texmaco, indonesia (2001 – 2004)
- Finance Manager Texmaco Perkasa Engineering (1998 – 2001)
- Manajer Komersial PT Perkasa Heavyndo Engineering (1995 – 1998)
- Manajer Keuangan, Birla 3M Limited, Bangalore (1991 – 1995)
- Asisten Manajer Keuangan TVs electronics Limited, Bangalore (1984 – 1991)

Rangkap Jabatan
- Wakil Presiden Komisaris PT Anugerah Kimia Indonesia (2020 – sekarang)
- Direktur PT Anugerah Lubrindo Batam (2020 – sekarang)
- Direktur PT Anugerah Lubrindo Raya (2020 – sekarang)
- Komisaris PT Dirgantara Petroindo Raya (2018 – sekarang)
- Komisaris Utama PT Aneka Petroindo Raya (2018 – sekarang)

Hubungan Afiliasi
Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan anggota Dewan Komisaris, Direksi dan Pemegang Saham Pengendali.

Kepemilikan Saham
Memiliki 4.927.500 saham di Perseroan.



Nery Polim

Direktur

Kewarganegaraan
Indonesia

Domisili
Jakarta

Tempat dan Tanggal Lahir
Medan, 17 Desember 1964

Usia
61 Tahun

Dasar Hukum Penunjukan
Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan berdasarkan Akta No. 16 tanggal 28 April 2025.

Riwayat Pendidikan
Sarjana Akuntansi dari California State University of Bakersfield, USA (1988)

Riwayat Jabatan
- Direktur AKR (Guigang) Transshipment Port Company (2014 – 2017)
- Kepala People Development (1993 – 2012)

Rangkap Jabatan
- Direktur Utama PT Anugerah Krida Retailindo (2017 - sekarang)
- Direktur PT AKR Niaga Indonesia (2015 – sekarang)
- Komisaris PT Anugrah Karya Raya (2011 – sekarang)
- Komisaris PT Usaha Era Pratama Nusantara (2006 – sekarang)

Hubungan Afiliasi
Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan anggota Dewan Komisaris, Direksi dan Pemegang Saham Pengendali.

Kepemilikan Saham
Memiliki 2.965.000 saham di Perseroan.



Termurti Tiban

Direktur

Kewarganegaraan
Indonesia

Domisili
Jakarta

Tempat dan Tanggal Lahir
Medan, 19 Juli 1970

Usia
55 Tahun

Dasar Hukum Penunjukan
Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan berdasarkan Akta No. 16 tanggal 28 April 2025.

Riwayat Pendidikan
- Sarjana Ekonomi, Universitas Trisakti (1993)
- Indonesia Certified Public Accountant (CPA -IAPI) and Chartered Accountant (CA - IAI)

Riwayat Jabatan
Kantor Akuntan Publik (KAP) Purwantono, Suherman & Surja (Member Firm of Ernst & Young) (sebelum tahun 2014)

Rangkap Jabatan
- Direktur PT Terminal Energi Primer (2024 – sekarang)
- Direktur Chemical Petroleum International Trading PTE. LTD (2024 – sekarang)
- Komisaris PT AKR Transportasi Indonesia (2024 – sekarang)
- Direktur PT Berkah Renewable Energi Nusantara (2024 – sekarang)
- Komisaris Utama PT Berkah Bunker Service (2023 – sekarang)
- Komisaris Utama PT Anugerah Kreasi Pratama Indonesia (2023 – sekarang)
- Direktur PT Berkah Buana Energi (2021 – sekarang)
- Direktur PT Anugerah Lubrindo Batam (2019 – sekarang)
- Direktur PT Anugerah Lubrindo Raya (2019 – sekarang)
- Komisaris PT Berkah Kawasan Manyar Sejahtera (2017 – sekarang)
- Direktur PT Anugerah Krida Retailindo (2017 – sekarang)
- Direktur PT Usaha Era Pratama Nusantara (2019 – sekarang)
- Direktur PT AKR Sea Transport (2015 – sekarang)

Hubungan Afiliasi
Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan anggota Dewan Komisaris, Direksi dan Pemegang Saham Pengendali.

Kepemilikan Saham
Memiliki 1.650.000 saham di Perseroan.

Informasi Perubahan Anggota Manajemen **Selama Tahun Buku 2025**

Pada RUPS Tahunan tanggal 28 April 2025, seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan menyelesaikan masa jabatan dan diangkat kembali untuk periode baru hingga penutupan RUPS Tahunan tahun 2030. Pengangkatan ini didasarkan pada keputusan RUPS Tahunan sebagaimana tercatat dalam Akta No. 16 tanggal 28 April 2025.



Pejabat **Eksekutif**



Johny W Sutanto

Head of Petroleum Division

Bergabung sejak
1 Maret 2004

Usia
60 Tahun

Riwayat Pendidikan
- Master of Business Adiministration dari University of Technology Sydney (2003)
- Sarjana Ekonomi dari Universitas Kristen Satya Wacana Salatiga tahun (1988)

Riwayat Jabatan
- Head of Petroleum Division, PT AKR Corporindo Tbk (2020 – sekarang)
- Commercial Petroleum, PT AKR Corporindo Tbk (2016 – 2020)
- Business Development, PT AKR Corporindo Tbk (2006 – 2016)
- Supply Chain Manager, PT AKR Corporindo Tbk (2004 – 2006)
- Group Product Manager di PT Warner Lambert Indonesia / Pfizer Indonesia (1992 – 2001)



Ongkowijono Soehardjo Hartono

Head Of Chemical & Logistics Division

Bergabung sejak
1 November 2002

Usia
56 Tahun

Riwayat Pendidikan
Sarjana Pertanian dari Universitas Kristen Satya Wacana (1993)

Riwayat Jabatan
- Head of Chemical & Logistics Division, PT AKR Corporindo Tbk (2020 – sekarang)
- Head of Branch Jakarta, PT AKR Corporindo Tbk (2008 – 2020)
- Head of Branch Surabaya, PT AKR Corporindo Tbk (2002 – 2008)
- Head of Branch Banking, Preferred Banking & Commercial Lending PT Universal, Cabang Surabaya, PT Bank Universal (2000 – 2002)
- Branch Manager Solo, PT Bank Bali (1998 – 2000)



Reza Gunawan

Head of East Region

Bergabung sejak
16 September 1996

Usia
53 Tahun

Riwayat Pendidikan
Sarjana Teknik Industri dari Universitas Surabaya (1996)

Riwayat Jabatan
- Head of EAST Region, PT AKR Corporindo Tbk (2018 – sekarang)
- Head of Branch Surabaya, PT AKR Corporindo Tbk (2013 – 2018)
- Deputy of Commercial Director, PT AKR Corporindo Tbk (2012 – 2013)
- Head of Branch Surabaya, PT AKR Corporindo Tbk (2008 – 2012)
- Head of Sales Chemicals, PT AKR Corporindo Tbk (2007 – 2008)



Joseph Pangilinan

Head of Network & Operations Division

Bergabung sejak
1 Agustus 2018

Usia
58 Tahun

Riwayat Pendidikan
Sarjana Teknik Sipil dari University of San Carlos, Filipina (1988)

Riwayat Jabatan
- Director – Head of Network & Operation Division, PT AKR Corporindo Tbk (2018 – sekarang)
- Regional Logistics & Technical Manager – Total Oil Asia – Pacific PTE LTD (2013 – 2018)



Felix Abednego

Head of Human Resources Division

Bergabung sejak
17 Mei 2021

Usia
53 Tahun

Riwayat Pendidikan
- Master of Business Administration dari Rotterdam School of Management, Erasmus University, The Netherlands (2000)
- Sarjana Biologi, jurusan Mikrobiologi Lingkungan, Universitas Kristen Satya Wacana Salatiga (1995)

Riwayat Jabatan
- Director – Human Resources Division PT AKR Corporindo Tbk (2021 – sekarang)
- Human Resources Director, South East Asia Region, Mundipharma (2020 – 2021)
- Human Resources Director, PT Mundipharma Healthcare Indonesia (2017–2020)
- Human Resources Development Center Head, Upstream Business, PT SMART Tbk (2013–2016)
- Head of Human Resources and General Affairs, PT Nissan Motor Indonesia (2011–2013)



Elijas Pudjianto

Head of Natural Gas & Renewable Energy

Bergabung sejak
1 Februari 2022

Usia
60 Tahun

Riwayat Pendidikan
Sarjana Teknik Kimia dari Institut Teknologi Sepuluh November (1990)

Riwayat Jabatan
- Director – Head of Natural Gas & Renewable Energy, PT AKR Corporindo Tbk (2022 – sekarang)
- President Director of PT Jasatama Petroindo (a wholly owned subsidiary of bp) / Head of bp Trading & Shipping - Indonesia di bp Trading & Shipping, Jakarta (2014 – 2021)
- Business Development Director - Middle East di bp, Singapore (2012 – 2014)
- Vice President, Sales and Marketing di bp Indonesia – Tangguh LNG, London (2010 – 2012)
- Marketing, Sales Operations and Shipping Manager di bp Indonesia – Tangguh LNG, Jakarta (2005 – 2009)



Johan Soegiarto

Head of Information Technology Division

Bergabung sejak
17 September 2024

Usia
52 Tahun

Riwayat Pendidikan
- Innovation, Harvard Extension School (2019)
- Magister Manajemen dari Universitas Pelita Harapan (2019)
- Sarjana Informatika, Sekolah Tinggi Teknik Surabaya (1997)

Riwayat Jabatan
- Head of Information Technology Division PT AKR Corporindo Tbk (2024 - sekarang)
- DCIO, Gill Capital Group (2022–2024)
- Corporate IT Director, RS Mitra Keluarga (2019–2021)
- VP IT, PT Matahari Department Store Tbk (2014–2019)
- Senior IS Manager, PT Merck Tbk (2008–2014)



Melyati Yuwono

Deputy Tax & Accounting

Bergabung sejak
1 Agustus 1995

Usia
54 Tahun

Riwayat Pendidikan
Sarjana Manajemen dari Universitas Kristen Satya Wacana (1994)

Riwayat Jabatan
- Deputy Tax & Accounting PT AKR Corporindo Tbk (2023 - sekarang)
- Finance Controller PT AKR Corporindo Tbk (2012 - 2023)
- Head of Taxation PT AKR Corporindo Tbk (2010–2012)
- Finance Controller PT AKR Corporindo Tbk (2009 - 2010)
- Head of Accounting Jakarta Branch PT AKR Corporindo Tbk (2007–2009)



Yuwono Ongkowijoyo

Deputy Network & Operations I

Bergabung sejak
12 September 2000

Usia
49 Tahun

Riwayat Pendidikan
- General Management Program, Havard Business School, Executive Education
- Master Of Information & Technology System dari University of New South Wales (2000)
- Sarjana Teknik Mesin dari University of Wollongong (1998)

Riwayat Jabatan
- Deputy Network and Operation I, PT AKR Corporindo Tbk (2023 – sekarang)
- Head Of Network & Distribution, PT AKR Corporindo Tbk (2018 – 2023)
- Head of Improvement, PT AKR Corporindo Tbk (2017 – 2018)
- Head of Operation WEST Region, PT AKR Corporindo Tbk (2016 – 2017)
- Head of SHE, PT AKR Corporindo Tbk (2011 – 2016)



Erpiny Tan

Deputy Network & Operations II

Bergabung sejak
1 April 2003

Usia
47 Tahun

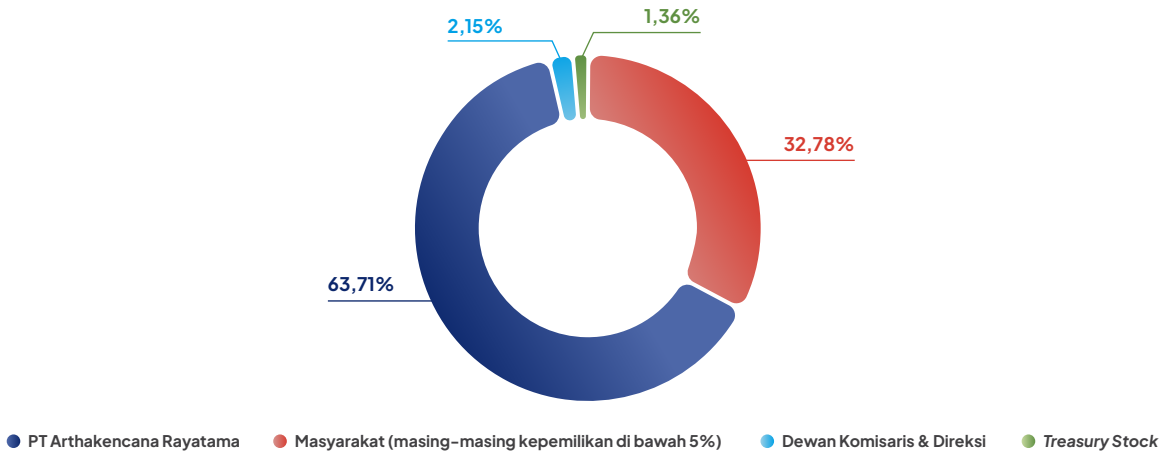
Riwayat Pendidikan
Sarjana Teknologi Informasi dari Universitas Bina Nusantara (2000)

Riwayat Jabatan
- Deputy Network & Operations II, PT AKR Corporindo Tbk (2023 – sekarang)
- Head of Operations Services & Improvement, PT AKR Corporindo Tbk (2019 – 2023)
- Head of IT Business Partner, PT AKR Corporindo Tbk (2018 – 2019)
- Lead of Technology Enterprise Enablement Build, PT AKR Corporindo Tbk (2011 – 2017)
- IT Business Analyst, PT AKR Corporindo Tbk (2006 – 2011)

Komposisi Pemegang **Saham Perusahaan**

Komposisi Pemegang Saham Berdasarkan Kepemilikan 5% atau Lebih dan <5%

No	Pemegang Saham	1 Januari 2025		31 Desember 2025	
		Jumlah Saham (Lembar)	Persentase Kepemilikan Saham (%)	Jumlah Saham (Lembar)	Persentase Kepemilikan Saham (%)
Kepemilikan Saham 5% atau Lebih					
1.	PT Arthakencana Rayatama	12.768.961.300	63,61%	12.787.818.600	63,71%
Kepemilikan <5%					
2.	Dewan Komisaris & Direksi	358.519.900	1,79%	431.497.100	2,15%
3.	Masyarakat	6.625.338.400	33,00%	6.580.453.900	32,78%
4.	*Treasury Stock*	320.655.000	1,60%	273.705.000	1,36%
Jumlah		**20.073.474.600**	**100,00%**	**20.073.474.600**	**100,00%**



20 Pemegang Saham Terbesar

No	Pemegang Saham	Status	31 Desember 2025	
			Jumlah Saham (Lembar)	Persentase Kepemilikan Saham (%)
1.	PT ARTHAKENCANA RAYATAMA	PERUSAHAAN TERBATAS	12.787.818.600	63,71%
2.	BNYM RE BNYMLB RE EMPLOYEES PROVIDENTFD BOARD-2039927326	MALAYSIA - TAX TREATY	647.500.000	3,23%
3.	NTC-CIM INVESTMENT FUND ICAV	INSTITUTION - FOREIGN	363.735.400	1,81%
4.	BNPP LDN/2S/ABERDEEN ASIA FOCUS PLC	INSTITUTION - FOREIGN	228.918.000	1,14%
5.	HARYANTO ADIKOESOEMO	INDIVIDUAL - DOMESTIC	212.604.600	1,06%

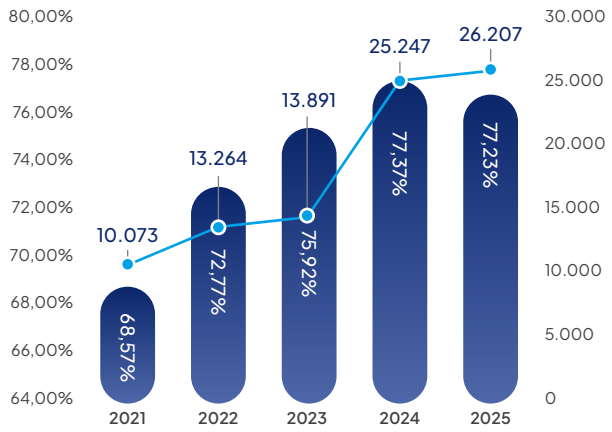
No	Pemegang Saham	Status	31 Desember 2025	
			Jumlah Saham (Lembar)	Persentase Kepemilikan Saham (%)
6.	CITIBANK NEW YORK S/A GOVERNMENT OF NORWAY - 16	NORWAY - GOVERNMENT_TAX_ TREATY	209.486.500	1,04%
7.	CITIBANK NEW YORK S/A GOVERNMENT OF NORWAY - 15	NORWAY - GOVERNMENT_TAX_ TREATY	193.957.800	0,97%
8.	CITIBANK NEW YORK S/A GOVERNMENT OF NORWAY - 2	NORWAY - GOVERNMENT_TAX_ TREATY	151.232.200	0,75%
9.	SOEGIARTO ADIKOESOEMO	INDIVIDUAL - DOMESTIC	145.267.000	0,72%
10.	CITIBANK SINGAPORE S/A ART A/C PUBLIC ISLAMIC ASEAN GROWTH FUND	MALAYSIA - TAX TREATY	136.590.700	0,68%
11.	CITIBANK LONDON S/A PACIFIC CAPITAL UCITS FUNDS PLC	INSTITUTION - FOREIGN	136.034.700	0,68%
12.	DB SPORE SES CLT A/C FOR Pangolin Asia Fund-864134001	INSTITUTION - FOREIGN	126.873.600	0,63%
13.	CITIBANK NEW YORK S/A ISHARES CORE MSCI EMERGING MARKETS ETF	UNITED STATES OF AMERICA - TAX TREATY	123.303.900	0,61%
14.	PT. AXA MANDIRI FINANCIAL SERVICES S/A MANDIRI DYNAMIC EQUITY MONEY RUPIAH	INSURANCE NPWP	114.245.600	0,57%
15.	CITIBANK SINGAPORE S/A ART AC PUBLIC INDONESIA SELECT FUND	MALAYSIA - TAX TREATY	88.358.300	0,44%
16.	JPMCB NA RE-VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX FUND	UNITED STATES OF AMERICA - TAX TREATY	86.933.307	0,43%
17.	JPMCB NA RE - VANGUARD EMERGING MARKETS STOCK INDEX FUND	UNITED STATES OF AMERICA - TAX TREATY	80.642.825	0,40%
18.	ALLIANZ LIFE IND - Smartlink Rupiah Equity Fund	INSURANCE NPWP	78.729.000	0,39%
19.	CITIBANK LONDON S/A EQ EMERGING DIVIDEND FUND	FINLAND - TAX TREATY	76.156.700	0,38%
20.	HSBC BANK PLC RE: LXG/HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS ASIA PACIFIC EX JAPAN EQUITY HIGH DIVIDEND	INSTITUTION - FOREIGN	74.427.800	0,37%
Jumlah				**78,45%**

Komposisi Pemegang Saham Berdasarkan Status Kepemilikan

Pemegang Saham	1 Januari 2025			31 Desember 2025		
	Jumlah Pemilik	Jumlah Saham (Lembar)	Persentase Kepemilikan Saham (%)	Jumlah Pemilik	Jumlah Saham (Lembar)	Persentase Kepemilikan Saham (%)
Pemegang Saham Domestik						
Perorangan	24.816	965.300.583	4,81%	25.801	985.105.785	4,91%
Perseroan Terbatas	73	13.163.594.263	65,58%	90	13.137.605.582	65,45%

Pemegang Saham	1 Januari 2025			31 Desember 2025		
	Jumlah Pemilik	Jumlah Saham (Lembar)	Persentase Kepemilikan Saham (%)	Jumlah Pemilik	Jumlah Saham (Lembar)	Persentase Kepemilikan Saham (%)
Reksadana	162	492.390.077	2,45%	121	400.850.696	2,00%
Asuransi	137	636.411.500	3,17%	139	685.267.500	3,41%
Yayasan	59	272.246.100	1,36%	55	293.451.125	1,46%
Koperasi & Lain-lain	0	0	0,00%	1	200.000	0,00%
Sub-Jumlah Institusi Domestik	431	14.564.641.940	72,56%	406	14.517.374.903	72,32%
Jumlah Pemegang Saham Domestik	**25.247**	**15.529.942.523**	**77,37%**	**26.207**	**15.502.480.688**	**77,23%**
Pemegang Saham Asing						
Perorangan	77	10.684.100	0,05%	86	10.568.500	0,05%
Badan Usaha	304	4.532.847.977	22,58%	277	4.560.425.412	22,72%
Jumlah Pemegang Saham Asing	**381**	**4.543.532.077**	**22,63%**	**363**	**4.570.993.912**	**22,77%**
Jumlah	**25.628**	**20.073.474.600**	**100,00%**	**26.570**	**20.073.474.600**	**100,00%**

Persentase Pemegang Saham Dosmetik



Informasi *Stock Split*

Perseroan melaksanakan pemecahan saham (*stock split*) AKRA dengan rasio 1:5 sebagaimana diputuskan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) pada 11 November 2021, dan memperoleh persetujuan pemegang saham secara bulat dalam RUPSLB pada 20 Desember 2021 sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Setelah memperoleh persetujuan tersebut, Perseroan mengajukan permohonan pencatatan saham pada 24 Desember 2021, dan pemecahan saham efektif berlaku pada 12 Januari 2022. Pasca pelaksanaan pemecahan saham, nilai nominal saham AKRA menjadi Rp20 per saham dari sebelumnya Rp100 per saham, dengan jumlah saham beredar meningkat menjadi 20.073.474.600 saham dari 4.014.694.920 saham.

Kepemilikan Saham Langsung Dewan Komisaris dan Direksi

No	Pemegang Saham	Jabatan	1 Januari 2025		31 Desember 2025	
			Jumlah Saham (Lembar)	Persentase Kepemilikan Saham (%)	Jumlah Saham (Lembar	Persentase Kepemilikan Saham (%)
Dewan Komisaris						
1	Soegiarto Adikoesoemo	Presiden Komisaris	101.604.800	0,51%	145.267.000	0,72%
2	Sofyan A. Djalil	Komisaris	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil
3	Fauzi Ichsan	Komisaris Independen	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil
Direksi						
4	Haryanto Adikoesoemo	Presiden Direktur	205.604.600	1,02%	212.604.600	1,06%
5	Jimmy Tandyo	Direktur	39.000.000	0,19%	48.000.000	0,24%
6	Bambang Soetiono Soedijanto	Direktur	4.780.000	0,02%	7.780.000	0,04%
7	Mery Sofi	Direktur	2.303.000	0,011%	8.303.000	0,04%
8	Suresh Vembu	Direktur	3.727.500	0,02%	4.927.500	0,02%
9	Nery Polim	Direktur	1.050.000	0,005%	2.965.000	0,01%
10	Termurti Tiban	Direktur	450.000	0,0022%	1.650.000	0,01%
Jumlah			**358.519.900**	**1,79%**	**431.497.100**	**2,15%**

Profil Pemegang Saham Utama/Pengendali Hingga Nama Pemilik Akhir

PT Arthakencana Rayatama (AKRT)

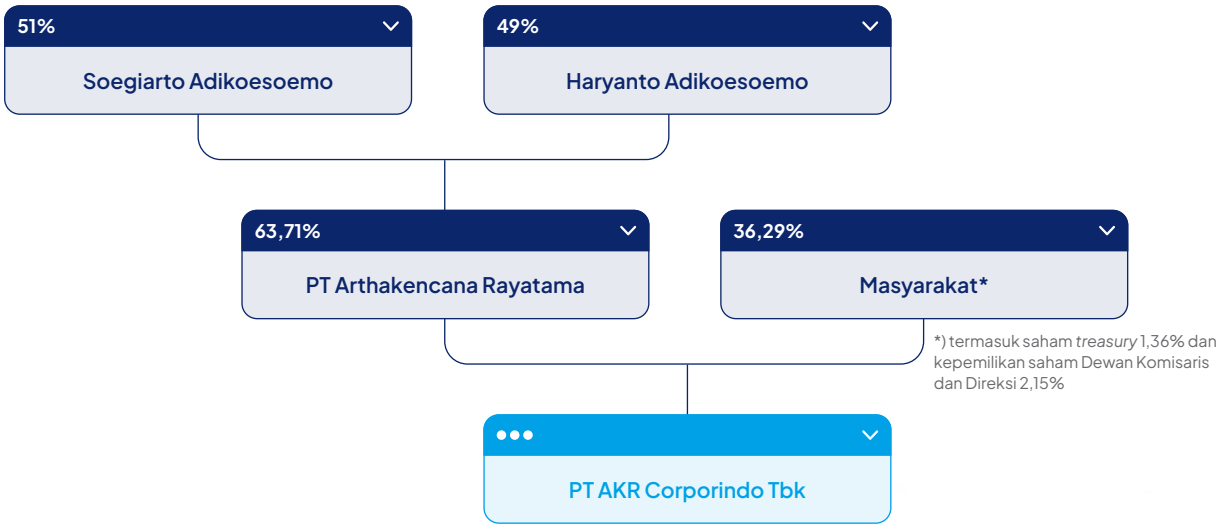
Riwayat Singkat

PT Arthakencana Rayatama (AKRT) adalah entitas induk Perseroan yang memegang kepemilikan 63,71% saham Perseroan. AKRT didirikan berdasarkan Akta Perseroan Terbatas AKRT No. 297 tanggal 23 November 1992, yang dibuat di hadapan Tegoeh Hartanto, S.H., Notaris di Jakarta. Perseroan memperoleh persetujuan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia melalui Surat Keputusan No. C2-10481.HT.01.01.Th.92 tanggal 26 Desember 1992 dan diumumkan dalam Berita Negara No. 51 tanggal 25 Juni 1993, Tambahan Berita Negara No. 2860/1993.

Anggaran Dasar Perusahaan telah mengalami beberapa kali perubahan. Perubahan terakhir dituangkan dalam Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham AKRT No. 23 tanggal 12 April 2023, yang dibuat oleh Yulia, S.H., Notaris di Jakarta Selatan. Akta ini telah disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui Keputusan No. 0088097.AH.01.02.Tahun 2022 tanggal 14 April 2023.

Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha	Sebagaimana tercantum dalam Pasal 3 Anggaran Dasar AKRT yang termuat dalam Akta No. 23 tanggal 12 April 2023, yang dibuat oleh Yulia, S.H., Notaris di Jakarta Selatan, ruang lingkup kegiatan usaha AKRT meliputi Aktivitas Perusahaan *Holding*; Perdagangan Besar Atas Dasar Balas Jasa (*Fee*) atau Kontrak; Perdagangan Besar Bahan Bakar Padat, Cair, dan Gas serta Produk Terkait; Perdagangan Besar Bahan dan Barang Kimia; Perdagangan Besar Alat Transportasi Udara, Suku Cadang, dan Perlengkapannya; Industri Produk Hasil Kilang Minyak Bumi; Angkutan Melalui Saluran Pipa, Angkutan Bermotor untuk Barang Umum dan Barang Khusus, serta Angkutan Laut Dalam Negeri untuk Barang Khusus, Pergudangan dan Penyimpanan, Aktivitas *Bounded Warehousing* atau Wilayah Kawasan Berikat, Penyimpanan Minyak dan Gas Bumi; Aktivitas Pelayanan Kepelabuhan Laut, Sungai, dan Danau; Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi untuk Mobil, Bus, Truk, Sejenisnya, serta Alat Transportasi Udara; Jasa Pekerjaan Konstruksi Prapabrikasi Bangunan Sipil; Aktivitas Penunjang Tenaga Listrik Lainnya; Pengadaan dan Distribusi Gas Alam dan Buatan; Aktivitas Konsultasi Manajemen Lainnya; serta *Real Estate* yang Dimiliki Sendiri atau Disewa.
Kepengurusan	**Dewan Komisaris** Presiden Komisaris : Soegiarto Adikoesoemo Komisaris : Yuwono Ongkowijoyo Komisaris : Irawati Adikoesoemo Komisaris : Sintawati Ongkowijoyo **Direksi** Presiden Direktur : Haryanto Adikoesoemo Direktur : Jimmy Tandyo Direktur : Cynthia Theresia Buniardi
Alamat Perusahaan	AKR Tower Lantai 26, Jl. Panjang No 5, Kelurahan Kebon Jeruk, Kecamatan Kebon Jeruk, Kota Administrasi Jakarta Barat 11530, Telp: 021 5311110

Struktur Kepemilikan per 31 Desember 2025



Kronologis **Pencatatan Saham**

AKR resmi mencatatkan sahamnya di Bursa Efek Indonesia pada 3 Oktober 1994. Kronologi pencatatan saham Perseroan hingga 31 Desember 2024 disajikan sebagai berikut:

Tanggal	Aksi Korporasi	Nominal/ Saham (Rp)	Tambahan Saham yang Diterbitkan	Jumlah Saham Beredar	Pencatatan
3 Oktober 1994	Penawaran Umum Perdana Saham @ Rp1.000	1.000	15.000.000	65.000.000	Bursa Efek Indonesia
27 Februari 1996	Saham Bonus 6 : 10	1.000	39.000.000	104.000.000	Bursa Efek Indonesia
25 September 1996	Pemecahan Nilai Nominal Saham 1 : 1	500	104.000.000	208.000.000	Bursa Efek Indonesia
1 Oktober 2004	Penawaran Umum Terbatas 1 : 2 @ Rp500	500	416.000.000	624.000.000	Bursa Efek Indonesia
27 Juli 2007	Pemecahan Nilai Nominal Saham 1 : 5	100	2.496.000.000	3.120.000.000	Bursa Efek Indonesia
April & Oktober 2008	Konversi MSOP 2007 Tahap I	100	5.400.000	3.125.400.000	Bursa Efek Indonesia
Oktober 2009	Konversi MSOP 2007 Tahap I dan II	100	12.892.500	3.138.292.500	Bursa Efek Indonesia
29 Januari 2010	Penawaran Umum Terbatas II 1 : 5 @ Rp860	100	627.658.500	3.765.951.000	Bursa Efek Indonesia
April & Oktober 2010	Konversi MSOP 2007 Tahap I, II, dan III	100	26.985.000	3.792.936.000	Bursa Efek Indonesia
April & Oktober 2011	Konversi MSOP 2007 Tahap II, III, dan IV	100	29.050.000	3.821.986.000	Bursa Efek Indonesia
April 2012	Konversi MSOP 2007 Tahap III, IV, dan V	100	29.457.500	3.851.443.500	Bursa Efek Indonesia
April 2013	Konversi MSOP 2007 Tahap IV dan V; dan Konversi MSOP 2011 Tahap I	100	29.284.000	3.880.727.500	Bursa Efek Indonesia
April & Oktober 2014	Konversi MSOP 2007 Tahap V; dan Konversi MSOP 2011 Tahap I dan II	100	32.910.174	3.913.637.674	Bursa Efek Indonesia
April & Oktober 2015	Konversi MSOP 2011 Tahap I dan II, dan Konversi MSOP 2014	100	35.392.561	3.949.030.235	Bursa Efek Indonesia
April & Oktober 2016	Konversi MSOP 2011 Tahap II, Konversi MSOP 2014 dan Konversi MSOP 2015	100	42.750.935	3.991.781.170	Bursa Efek Indonesia
April dan Oktober 2017	Konversi MSOP MSOP Plan I (2015) Atas Program MSOP 2015 dan Konversi MSOP Plan II (2016) Atas Program MSOP 2015	100	14.548.250	4.006.329.420	Bursa Efek Indonesia
April 2018	Konversi MSOP MSOP Plan I (2015) Atas Program MSOP 2015, Konversi MSOP Plan II (2016) Atas Program MSOP 2015 dan Konversi MSOP Plan III (2017) Atas Program MSOP 2015	100	8.365.500	4.014.694.920	Bursa Efek Indonesia

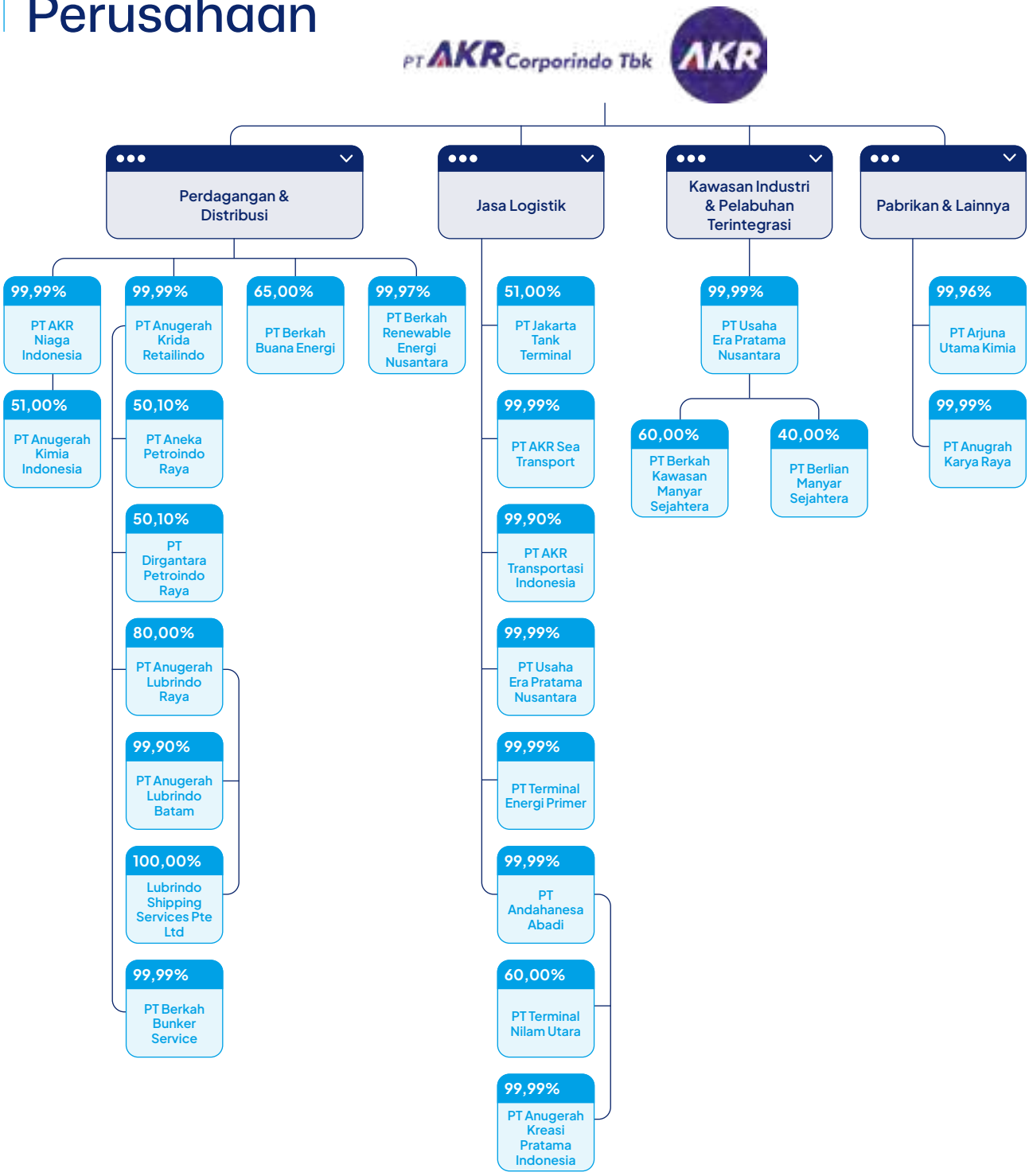
Tanggal	Aksi Korporasi	Nominal/ Saham (Rp)	Tambahan Saham yang Diterbitkan	Jumlah Saham Beredar	Pencatatan
2019	Tidak ada aksi korporasi sepanjang tahun 2019	100	0	4.014.694.920	Bursa Efek Indonesia
16 Maret 2020 - 12 Juni 2020	Pembelian Kembali Saham-Saham Treasuri		(67.261.000)	4.014.694.920	Bursa Efek Indonesia
12 Januari 2022	Pemecahan Nilai Nominal Saham 1 : 5	20		20.073.474.600	Bursa Efek Indonesia
2 Agustus 2024 - 31 Agustus 2024	Konversi MSOP Plan I (2024)-Penerbitan Ulang Saham Treasuri	20	15.650.000	20.073.474.600	Bursa Efek Indonesia
1 Agustus 2025 - 31 Agustus 2025	Konversi MSOP Plan II (2025)-Penerbitan Ulang Saham Treasuri	20	46.950.000	20.073.474.600	Bursa Efek Indonesia

Informasi tentang Sukuk **dan Obligasi Konversi**

Hingga 31 Desember 2025, Perseroan tidak menerbitkan sukuk dan obligasi konversi. Oleh karena itu, informasi mengenai jumlah sukuk/obligasi konversi yang beredar (*outstanding*) tidak diungkapkan dalam laporan tahunan ini.



Struktur Grup Perusahaan



Our Joint Venture

- PT Anugerah Kimia Indonesia
- PT Berkah Kawasan Manyar Sejahtera
- PT Berlian Manyar Sejahtera
- PT Jakarta Tank Terminal
- PT Aneka Petro Indo Raya
- PT Dirgantara Petroindo Raya
- PT Anugerah Lubrindo Raya

Entitas Anak dan **Entitas Asosiasi**

Entitas Anak	Bidang Usaha	Alamat	% Kepemilikan AKR	Status Operasi	Tahun Mulai Operasi	Tahun Penyertaan Modal	Total Aset 2025 (Rp Juta)
Kepemilikan Langsung							
PT Usaha Era Pratama Nusantara (UEPN)	Jasa Logistik bongkar muat barang dari dan ke kapal	Surabaya, Jawa Timur	99,99%	Beroperasi	2000	2000	13.077.498
PT Andahanesa Abadi (Andahanesa)	Jasa Logistik	Jakarta Barat, DKI Jakarta	99,99%	Beroperasi	1982	2007/1982	558.650
PT Arjuna Utama Kimia (Aruki)	Pabrikan Bahan Perekat	Surabaya, Jawa Timur	99,96%	Beroperasi	1976	1996/1976	335.507
PT Anugrah Karya Raya (Anugrah)	Pertambangan dan Perdagangan Batu Bara	Jakarta Barat, DKI Jakarta	99,99%	Beroperasi	2011	2009	710
PT Jakarta Tank Terminal (JTT)	Terminal Tangki Penyimpanan (pengelolaan dan penyewaan tangki penyimpanan BBM termasuk turunannya)	Jakarta Utara, DKI Jakarta	51,00%	Beroperasi	2010	2005	1.349.634
PT AKR Sea Transport (AST)	Pelayaran Domestik (jasa transportasi laut)	Jakarta Barat, DKI Jakarta	99,99%	Beroperasi	2013	2011	938.602
PT AKR Niaga Indonesia (ANI)	Perdagangan Kimia Dasar	Jakarta Barat, DKI Jakarta	99,99%	Beroperasi	2013	2012	106.315
PT AKR Transportasi Indonesia (ATI)	Jasa Logistik (jasa transportasi darat)	Jakarta Barat, DKI Jakarta	99,90%	Beroperasi	2013	2013	325.244
PT Anugerah Krida Retailindo (AKRIDA)	Perdagangan Umum	Jakarta Barat, DKI Jakarta	99,99%	Beroperasi	2018	2016	2.212.100
PT Berkah Buana Energi (BBE)	Perdagangan & Distribusi Gas	Jakarta Barat, DKI Jakarta	65,00%	Beroperasi	2025	2021	102.427
PT Berkah Renewable Energi Nusantara (BREN)	Pembangkitan, Pengoperasian, Konstruksi dan Instalasi Tenaga Listrik	Gresik, Jawa Timur	99,97%	Belum Beroperasi	-	2024	32.090
PT Terminal Energi Primer (TEP)	Jasa Logistik Energi	Gresik, Jawa Timur	99,99%	Belum Beroperasi	-	2024	26.095
Chemical Petroleum International Trading PTE. LTD	Perdagangan Kimia Dasar dan BBM	Singapura	100,00%	Beroperasi	2024	2024	186.808

Entitas Anak	Bidang Usaha	Alamat	% Kepemilikan AKR	Status Operasi	Tahun Mulai Operasi	Tahun Penyertaan Modal	Total Aset 2025 (Rp Juta)
Kepemilikan Tidak Langsung Melalui PT Usaha Era Pratama Nusantara (UEPN)							
PT Berkah Kawasan Manyar Sejahtera (BKMS)	Kawasan Industri	Gresik, Jawa Timur	60,00	Beroperasi	2015	2012	12.556.694
PT Berlian Manyar Sejahtera	Kawasan Pelabuhan	Gresik, Jawa Timur	40,00	Beroperasi	2015	2002	2.218.117
Kepemilikan Tidak Langsung, Melalui PT Andahanesa Abadi							
PT Terminal Nilam Utara (TNU)	Jasa Logistik	Surabaya, Jawa Timur	60,00	Beroperasi	2018	2013	337.717
PT Anugerah Kreasi Pratama Indonesia (AKPI)	Pergudangan dan Penyimpanan	Gresik, Jawa Timur	99,99	Beroperasi	2025	2023	208.954
PT Krida Jasa Utama (KJU)	Jasa Logistik	Jakarta Barat, DKI Jakarta	99,80	Belum Beroperasi	-	2023	434
Kepemilikan Tidak Langsung, Melalui PT Anugerah Krida Retailindo (AKRIDA)							
PT Aneka Petroindo Raya (APR)	Perdagangan (Pemasaran BBM Ritel)	Jakarta Barat, DKI Jakarta	50,10	Beroperasi	2018	2017	1.984.248
PT Dirgantara Petroindo Raya (DPR)	Perdagangan (pelayanan jasa terkait bandar udara di Indonesia)	Jakarta Barat, DKI Jakarta	50,10	Beroperasi	2019	2017	98.937
PT Anugerah Lubrindo Raya (ALR)	Perdagangan (pemasaran minyak pelumas)	Jakarta Barat, DKI Jakarta	80,00	Beroperasi	2019	2019	108.404
PT Berkah Bunker Service (BBS)	Pelayanan Kepelabuhan Laut	Jakarta Utara, DKI Jakarta	99,99	Belum Beroperasi	-	2023	18.996
Kepemilikan Tidak Langsung, Melalui PT Anugerah Lubrindo Raya (ALR)							
PT Anugerah Lubrindo Batam (ALB)	Perdagangan (pemasaran minyak pelumas)	Jakarta Barat, DKI Jakarta	99,90	Beroperasi	2019	2019	5.172
Lubrindo Shipping Services Pte, Ltd (LSS)	Perdagangan Umum (pemasaran minyak pelumas)	Singapura	100,00	Beroperasi	2019	2019	1.143
Melalui PT AKR Niaga Indonesia							
PT Anugerah Kimia Indonesia (AKI)	Perdagangan Besar Barang dan Bahan Kimia Dasar	Jakarta Barat, DKI Jakarta	51,00	Beroperasi	2021	2020	105.277

Kantor Akuntan **Publik**

AKR telah menunjuk Kantor Akuntan Publik eksternal independen yaitu Purwanto Susanti dan Surja (sebelumnya dikenal sebagai Purwantono, Sungkoro & Surja), dan partner Feniwati Chendana, CPA, untuk mengaudit laporan keuangan konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tahun 31 Desember 2025. Penunjukkan ini berdasarkan pada POJK No. 9 Tahun 2023 tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik dalam Kegiatan Jasa Keuangan serta hasil Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahunan tanggal 28 April 2025 yang berdasarkan rekomendasi Dewan Komisaris dan Komite Audit.

KAP dan Akuntan Publik memberikan opini atas kewajaran penyajian Laporan Keuangan Perseroan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) yang berlaku di Indonesia. Dalam pelaksanaan audit, KAP yang ditunjuk bersikap independen dan bebas dari benturan kepentingan guna menjamin objektivitas dan kualitas hasil audit. Komite Audit bersama Unit Audit Internal melakukan pengawasan atas proses audit eksternal, memastikan kesesuaiannya dengan ketentuan yang berlaku, serta mengevaluasi kualitas pelaksanaan audit.

Mekanisme Penunjukkan Akuntan Publik

Mekanisme penunjukan Akuntan Publik yang diimplementasikan oleh Perseroan adalah sebagai berikut:

1. Komite Audit melakukan evaluasi terhadap Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik.
2. Pengadaan jasa Kantor Akuntan Publik untuk Tahun Buku 2025 dilaporkan oleh Komite Audit kepada Dewan Komisaris.
3. Dewan Komisaris memberikan persetujuan atas penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk melaksanakan audit umum atas Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk Tahun Buku 2025.
4. Dewan Komisaris mengusulkan penunjukan Kantor Akuntan Publik kepada RUPS Tahun 2025 untuk mendapatkan persetujuan.

KAP dan Akuntan Publik Selama 5 Tahun Terakhir

Penunjukan KAP Purwanto Susanti dan Surja ditetapkan berdasarkan Keputusan RUPS Tahunan sebagaimana tertuang dalam Akta No. 16 tanggal 28 April 2025, untuk melakukan audit yang berakhir pada 31 Desember 2025. Informasi mengenai KAP dan Akuntan Publik yang melakukan audit selama 5 (lima) tahun terakhir disajikan sebagai berikut:

Tahun Buku	Kantor Akuntan Publik	Nama Akuntan	Biaya (Rupiah Penuh)
2025	KAP Purwanto Susanti dan Surja	Feniwati Chendana, CPA	Rp1.775.000.000
2024	KAP Purwantono, Sungkoro & Surja	Benyanto Suherman	Rp1.700.000.000
2023	KAP Purwantono, Sungkoro & Surja	Benyanto Suherman	Rp1.460.000.000
2022	KAP Purwantono, Sungkoro & Surja	Feniwati Chendana, CPA	Rp1.390.000.000
2021	KAP Purwantono, Sungkoro & Surja	Feniwati Chendana, CPA	Rp1.390.000.000

Jasa Lain yang Diberikan

Untuk Tahun Buku 2025, KAP Purwanto Susanti dan Surja juga memberikan jasa prosedur yang disepakati terkait Laporan Kegiatan Penerapan Prinsip Kehati-hatian dalam Pengelolaan Utang Luar Negeri Korporasi Non-Bank (Laporan KPPK). Biaya yang dikeluarkan untuk jasa ini adalah sebesar Rp190 juta.

Lembaga dan Profesi Penunjang **Pasar Modal**

Nama Lembaga/Profesi	Alamat	Jasa yang Diberikan	Periode Penugasan
Biro Administrasi Efek			
PT Raya Saham Registra	Gedung Plaza Sentral, Lt.2 Jl. Jend. Sudirman Kav. 47–48 Jakarta 12930 021–2525666 021–2525028 usi@registra.co.id www.registra.co.id	Jasa Administrasi Saham	2025
Konsultan Hukum			
Makes & Partners Law Firm	Menara Batavia Lt. 7 Jl. K.H. Mas Mansyur Kav.126, Jakarta 10220, Indonesia 021–574–7181 021–574–7180 makes@makeslaw.com www.makeslaw.com	Jasa konsultasi Hukum	2025
Notaris			
Kantor Notaris Aryanti Artisari, S.H., M.Kn	Menara Sudirman Lt. 18, Jl Jend Sudirman Kav. 60, Jakarta Selatan 021 - 5204778	Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan AKR 2025	2025
Informasi Perdagangan Saham dan Efek			
PT Bursa Efek Indonesia	Indonesia Stock Exchange Building, 1st Tower Jl. Jend. Sudirman Kav 52–53 Jakarta Selatan 12190, Indonesia 0800–100–9000 (*Free*)	Pencatatan Saham	2025



Situs Web **Perusahaan**

AKR secara konsisten mengungkapkan informasi Perseroan secara transparan dan informatif sebagai sarana komunikasi yang efektif bagi pemegang saham, pelanggan, masyarakat, pemerintah, serta pemangku kepentingan lainnya melalui situs web resmi Perseroan, yaitu www.akr.co.id. Situs web tersebut menjadi salah satu wujud komitmen Perseroan terhadap keterbukaan informasi sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) No. 8/POJK.04/2015 tentang Situs Web Emiten atau Perusahaan Publik.

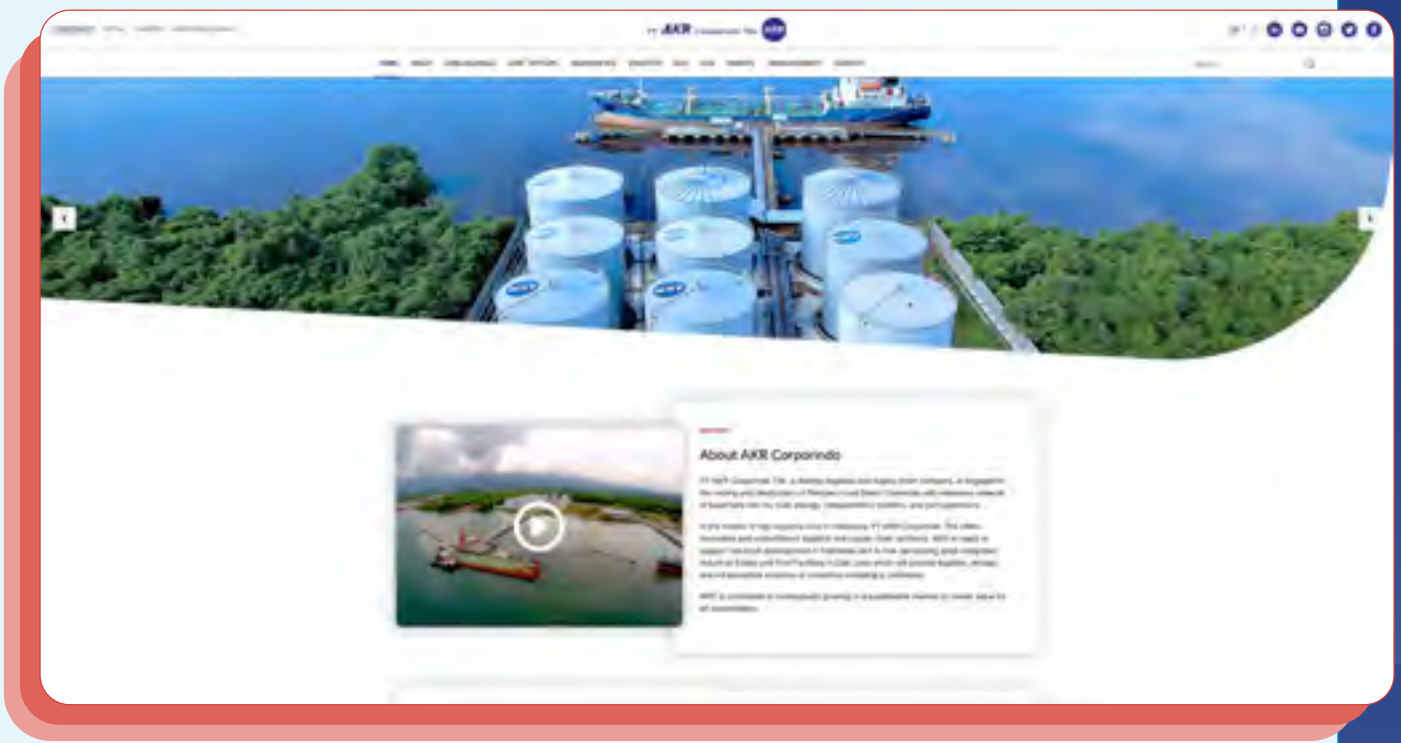
Seiring dengan itu, Perseroan terus melakukan penyempurnaan atas kualitas dan fungsionalitas situs web guna meningkatkan kemudahan akses dan kenyamanan pengguna. Pembaruan informasi dilakukan secara berkala agar pemangku kepentingan dapat memperoleh informasi terkini mengenai Perseroan dan produk-produknya. Seluruh informasi disajikan dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris dengan struktur yang jelas dan cakupan yang komprehensif mengenai berbagai aspek Perseroan, antara lain:

Informasi/Profil Perusahaan	• Sejarah Perusahaan • Struktur Bisnis • Profil Dewan Komisaris dan Direksi • Nilai Perusahaan • Pesan Presiden Komisaris dan Presiden Direktur • Informasi Auditor • Profil Komite Audit
Bisnis Utama	• Perdagangan & Distribusi Bahan Kimia Dasar • Perdagangan dan Distribusi BBM Industri • Pelumas • Logistik • JIIPE
Investor	• Kontak Investor • Informasi Stok • Informasi Pemegang Saham • Informasi Dividen • Kalender Acara • Laporan Tahunan dan Triwulan • Laporan Keberlanjutan • Laporan Keuangan Triwulan • Presentasi Perusahaan • Berita terbaru mengenai AKR • *Public Expose* • Daftar Jangkauan dan Rekomendasi Analis • Keterbukaan informasi terkait pemegang saham, RUPS, dan RUPSLB

GCG	• Laporan Tata Kelola Perusahaan • Pedoman Dewan Komisaris dan Direksi • Kebijakan Perusahaan • Sekretaris Perusahaan • Komite Audit • Internal Audit • Anggaran Dasar • Piagam Komite Audit • Piagam Komite Nominasi dan Remunerasi • Piagam Internal Audit • Kode Etik • Kebijakan Perusahaan (Manajemen Risiko, Anti Korupsi, Seleksi Pemasok, dan Hak-Hak Kreditur) • ASEAN Corporate Governance Scorecard • *Whistleblowing System*
Joint Venture	• bp - AKR Retail • Air bp - AKR • JIIPE • JTT
ESG	• Pelestarian Lingkungan • SHE • Pengembangan Sosial & Kominitas • Kegiatan CSR • Pelanggan
Lainnya	• Entitas Anak • Penghargaan • *Microsite HR Department* • *Microsite Retail*

Situs web AKR juga menyajikan berbagai informasi lainnya yang relevan untuk mendukung kebutuhan pemangku kepentingan, meliputi:

Uraian	Ketersediaan di *Website* AKR	Keterangan
Informasi pemegang saham sampai dengan pemilik akhir individu	Tersedia	https://www.akr.co.id/shareholding-information
Struktur Grup Perusahaan	Tersedia	https://www.akr.co.id/business-structure
Isi Kode Etik	Tersedia	https://www.akr.co.id/gcg/charter-policies/code-of-conduct-2
Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)	Tersedia	https://www.akr.co.id/shareholders-agm-eogm
Laporan Keuangan Tahunan Triwulan	Tersedia	https://www.akr.co.id/quarterly-financial-report
Profil Dewan Komisaris dan Direksi	Tersedia	https://www.akr.co.id/board-of-commissioners-directors
Piagam/*Charter* Dewan Komisaris, Direksi, Komite-Komite, dan Unit Audit Internal	Tersedia	https://www.akr.co.id/gcg/charter-policies/guideline-for-bod-boc https://www.akr.co.id/gcg/charter-policies/audit-committee- charter https://www.akr.co.id/gcg/charter-policies/nomination-remuneration-charter https://www.akr.co.id/gcg/charter-policies/ internal-audit-charter
Whistleblowing system	Tersedia	https://www.akr.co.id/gcg/charter-policies/ whistleblowing-system- anti-corruption-policy https://wbs.akr.co.id/



Wilayah Operasional dan Daftar Alamat Kantor



Kantor Pusat

PT AKR Corporindo Tbk
AKR Tower Lt 26
Jl. Panjang No.5, Kebon Jeruk
Jakarta Barat 11530, Indonesia
Telp : +62 21 531 1110
Fax : +62 21 531 1388, 531 1185

Kantor Cabang/Perwakilan

West Region

BANDUNG
Jl. Industri Cimareme V
No. 5 Cimerang Padalarang,
Kabupaten Bandung Barat,
Jawa Barat, 40553, Indonesia
Telp : +62 22 686 5000
Fax : +62 22 686 4649

SEMARANG
Menara Bank Panin, lt 4
Jl. Pandanaran, No 6–8
Miroto, Pekunden, Semarang Tengah,
Kota Semarang, 50134
Telp : +62 24 351 2132

LAMPUNG
Jl. Sumatera, Komplek Pelindo II
Cabang Panjang,
Samping Pertamina Lampung 35241, Indonesia
Telp : +62 721 343100, 343200
Fax : +62 721 343333

MEDAN
Jl. Road 3 Gabion (Samping Semen Padang)
Medan Belawan, 20413
Telp : +62 61 6944090, 6945353

PALEMBANG
Jl. Belabak 36A/ 3 Ilir
Palembang 30116, Indonesia
Telp : +62 711 717645
Fax : +62 711 710072

PONTIANAK
Jl Raya Wajok Hilir km 16, Desa Wajok Hilir,
Kecamatan Jongkat, Kabupaten Mempawah,
Kalimantan Barat, 78111
Telp : +62 561 763771

East Region

BALI
Komplek Pelabuhan Benoa
Jl. Ikan Tuna I, Pelabuhan Benoa
Pesanggaran, Denpasar Selatan, Bali
Telp : +62 361 720743, 720563
Fax : +62 361 720563

BALIKPAPAN
Gedung BRI Lt.5,
Jl. Jend. Sudirman No. 40,
Balikpapan,Kalimantan Timur 76112, Indonesia
Telp : +62 542 736771

BANJARMASIN
Gerbang Martapura Baru, Kawasan Pelindo III Trisakti,
Kelurahan Basirih, Kecamatan Banjarmasin Barat
Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan 70245, Indonesia
Telp : +62 511 442 3279
Fax : +62 511 442 3289

MANADO dan Sekitarnya
Grand Kawanua Novotel Manado Lt III,
Jl. AA Maramis - Kayuwatu/
Kairagi II Manado 95254,
Sulawesi Utara
Telp : +62 431 818 911–12

SURABAYA
Jl. Sumatera No. 51–53
Surabaya 60281, Indonesia
Telp : +62 31 503 4871/72
Fax : +62 31 328 4726

MOROWALI
Jl. Trans Sulawesi, Desa Bahomotefe
Kecamatan Bungku Timur, Morowali,
Sulawesi Tengah, 94973
Telp : +62 409 223 0033



Terminal/Transportasi/Gudang

West Region

TANJUNG PRIOK
Jl. Aceh, Pelabuhan Tanjung Priok,
Pos E Samping PT. Bimoli,
Jakarta Utara, Indonesia
Telp : +62 21 4372318
Fax : +62 21 43930017

CIWANDAN
Jl. Pelindo II Ciwandan,
Cilegon, Banten,
Telp : +62 254 602088/87
Fax : +62 251 602130, 602132

MARUNDA 1
Jl. Ambon Blok A1 No. 5,6,7
KBN Marunda Jakarta Utara, Indonesia
Telp : +62 21 440 6570
Fax : +62 21 440 6571

MARUNDA 2
Jl. Semarang Blok A6 No. 2
KBN Marunda, Jakarta Utara, Indonesia
Telp : +62 21 441 5979

MEDAN 1
Jl. Anggada 1, Pelabuhan Ujung Baru
Belawan, Medan 20411,
Indonesia
Telp : +62 694 40089, 694 5425
Fax : +62 61 649 4268

MEDAN 2
Jl. Road III Gabion,
Samping Semen Padang,
Belawan, Medan 20413, Indonesia
Telp : +62 694 4089, 694 5425

East Region

STAGEN
Komplek Pelabuhan Pelindo III,
Desa Stagen, Kecamatan Pulau Laut Utara,
Kabupaten Kota Baru,
Kalimantan Selatan, 72151, Indonesia
Telp : +62 518 607 2372

MARGOMULYO
Jl. Raya Margomulyo, No 44
Komplek Pergudangan Suri Mulia Permai Kav A 6-8,
Kelurahan Tambak Sarioso, Kecamatan Asemrowo,
Kota Surabaya, 7491041
Telp : +62 31 749 1041
Fax : +62 31 749 1045, 748 2241

NILAM TIMUR
Terminal AKR I, Jl. Nilam Timur, No. 21,
Kelurahan Perak Utara, Kecamatan Pabean Cantian
Kota Surabaya, Indonesia
Telp : +62 31 328 2965, 329 1979
Fax : +62 31 329 1977

NILAM UTARA
Terminal AKR II, Jl. Nilam Utara, No.2,
Kelurahan Perak Utara, Kecamatan Pabean Cantian,
Kota Surabaya, Indonesia
Telp : +62 31 329 5008
Fax : +62 31 329 2252

PALARAN
Jl. Trikora RT 25, Jembatan Kuning,
Kelurahan Handil Bakti, Palaran, Samarinda,
Kalimantan Timur, Indonesia
Telp : +62 541 6522 544

BITUNG 1
Jl. Wolter Monginsidi KM 4
Kelurahan Paceda,
Kecamatan Madidir, Kota Bitung,
Sulawesi Utara, Indonesia
Telp : +62 438 223 0733

LAMPUNG 1
Jl. Sumatera, Komplek Pelindo II,
Cabang Panjang,
Samping Pertamina Lampung 35241, Indonesia
Telp : +62 721 343100, 343200
Fax : +62 721 343333

LAMPUNG 2
Gudang Bulog Soekarno Hatta,
Jl. Tembesu V No. 5 Campang Raya,
Bandar Lampung,
Telp : +62 721 803 0091/92/93

SEMARANG
Jl. Coaster No. 16 Pelabuhan, Tanjung Mas
Semarang 50174, Indonesia
Telp : +62 518 607 2372

BITUNG 2
Jl. AA Maramis No. 52, Lingkungan III
RT 02/02, Kelurahan Kadoodan,
Kecamatan Bitung Tengah, Kota Bitung,
Sulawesi Utara, Indonesia
Telp : +62 438 2230733

BALI
Komplek Pelabuhan Benoa
Jl. Ikan Tuna I, Pelabuhan Benoa
Pesanggaran, Denpasar Selatan, 80222, Bali
Telp : +62 361 720743, 720563
Fax : +62 361 720563

BUNTOK
Jl. Nanas No. 20, Muara Teweh
Kepulauan Barito Utara
Kalimantan Tengah







BANDUNG
Jl. Industri Cimareme V
No. 5 Cimerang Padalarang,
Kabupaten Bandung Barat,
Jawa Barat, 40553, Indonesia
Telp : +62 22 686 5000
Fax : +62 22 686 4649

PALEMBANG
Jl. Belabak, No 36A, 3 Ilir
Palembang, 30116, Indonesia
Telp : +62 711 717 645

PONTIANAK
Jl. Raya Wajok Hilir KM 16,
Desa Wajok Hilir, Kecamatan Jongkat,
Kabupaten Mempawah, Kalimantan Barat, 78111
Telp : +62 561 763 771

MOROWALI TERMINAL
Jl. Trans Sulawesi, Lorong Depan Bank Sulawesi Tengah,
Desa Bahomotefe, Kecamatan Bungku Timur, Morowali,
Sulawesi Tengah, 94973

MOROWALI TRANSPORT
Jl. Trans Sulawesi, Desa Bahomotefe
Kecamatan Bungku Timur, Morowali,
Sulawesi Tengah, 94973
Telp : +62 409 223 0033

BANJARMASIN TERMINAL
Gerbang Martapura Baru, Kawasan Pelindo III Trisakti,
Kelurahan Basirih, Kecamatan Banjarmasin Barat,
Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan, 70245
Telp : +62 511 442 3279

BANJARMASIN TRANSPORT
Jl. Gubernur Soebarjo, Basiri,
Kecamatan Banjarmasin Barat,
Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan, 70119







04

Analisis dan Pembahasan Manajemen

Realisasi investasi JIIPE mendorong penciptaan lapangan kerja dan *multiplier effect* bagi perekonomian Jawa Timur serta kontribusi nasional

Lihat ulasan kinerja JIIPE pada **halaman 119-120**

Mendukung kelancaran jaringan logistik dan rantai pasok nasional dengan infrastruktur pelabuhan, terminal, dan transportasi terintegrasi

Lihat aktivitas distribusi BBM pada **halaman 115-116**





Tinjauan Ekonomi dan Industri

Didukung oleh pengalaman panjang di industri, AKR berupaya menciptakan manfaat ekonomi dan sosial yang berkontribusi terhadap pembangunan Indonesia. Strategi bisnis Perseroan difokuskan pada penciptaan nilai yang berkelanjutan bagi pemegang saham serta pemangku kepentingan lainnya.

Analisis Ekonomi Global dan Nasional

Sepanjang 2025, ekonomi global diliputi ketidakpastian akibat ketegangan perdagangan dan kebijakan tarif Amerika Serikat. Meski dampaknya lebih ringan dari perkiraan, arah kebijakan tetap menahan investasi dan arus dagang. Dalam menghadapi dinamika tersebut, kelancaran sistem distribusi energi nasional tetap menjadi faktor penting dalam menopang stabilitas ekonomi domestik. Stabilitas tersebut turut didukung oleh finansial yang lebih kuat dan kemampuan adaptasi rantai pasok yang berkelanjutan.

Ekonomi global menunjukkan ketahanan yang solid, tercermin dari proyeksi International Monetary Fund dalam *World Economic Outlook* Januari 2026 yang memperkirakan pertumbuhan ekonomi global sebesar 3,3% pada 2025, sedikit lebih tinggi dibandingkan proyeksi Oktober 2025 sebesar 3,2%. Peningkatan ini didukung oleh stabilnya permintaan global dan kondisi keuangan yang relatif kondusif, meskipun risiko geopolitik dan fragmentasi perdagangan masih menjadi tantangan ke depan. Merespon dinamika tersebut, penguatan fondasi domestik melalui pengembangan infrastruktur logistik dan keandalan pasokan industri menjadi fokus Perseroan.

Sementara itu, inflasi global diproyeksikan turun ke sekitar 4,2% pada 2025. Stabilitas harga di Amerika Serikat dan rendahnya inflasi Tiongkok mendukung perdagangan dunia tumbuh 2,9%. Momentum ini membuka peluang ekspor Indonesia, yang direspon melalui penguatan keandalan dan efisiensi distribusi energi serta bahan baku guna mendukung kelancaran aktivitas industri dan perdagangan.

Dalam lingkup nasional, Indonesia mencatat inflasi sebesar 2,92%, lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya. Kenaikan ini dipicu oleh normalisasi harga pangan serta peningkatan permintaan domestik, yang turut diperkuat oleh tekanan pada distribusi dan logistik. Kondisi tersebut menegaskan pentingnya sistem distribusi yang terintegrasi dalam menjaga ketersediaan pasokan nasional.

Meski tekanan biaya meningkat, inflasi tetap berada dalam sasaran Bank Indonesia, mencerminkan efektivitas koordinasi kebijakan. Kelancaran distribusi energi menjadi faktor pendukung penting. AKR berkontribusi dalam menjaga efisiensi rantai pasok serta kepastian pasokan. Berdasarkan Badan Pusat Statistik, Ekonomi Indonesia tumbuh sebesar 5,11% pada 2025, angka ini lebih tinggi dibandingkan capaian tahun 2024. Pertumbuhan ini didukung oleh pendapatan Produk Domestik Bruto (PDB) sebesar Rp23.821,1 triliun. Dukungan AKR pada distribusi energi dan kawasan industri memperkuat daya tahan ekonomi nasional.

Analisis Industri dan Posisi Perusahaan dalam Industri

Industri minyak global sepanjang 2025 bergerak dinamis dipengaruhi kebijakan produksi Organisasi Negara-Negara Pengekspor Minyak dan sekutunya (OPEC+), permintaan energi, dan faktor geopolitik. Data *Indonesian Crude Price* (ICP) menunjukkan tren penurunan harga dalam beberapa bulan. Dalam situasi volatil ini, stabilitas pasokan energi menjadi faktor krusial dalam mendukung aktivitas industri dan kegiatan masyarakat.

Pada periode April - Mei 2025, ICP turun dari USD65,29 menjadi USD62,75 per barel. Harga acuan seperti West Texas Intermediate dan Brent juga melemah pada periode tertentu. Penurunan tersebut dipicu oleh peningkatan pasokan dan stok Amerika Serikat. Kondisi ini mendorong perlunya pengelolaan pengadan yang terukut guna menjaga kesinambungan suplai domestik.

Setelah periode panjang kebijakan pemangkasan produksi yang mencapai lebih dari 5 juta barel per hari, delapan anggota utama negara pengekspor minyak meningkatkan suplai secara bertahap. Keputusan tersebut menyebabkan harga minyak sempat turun di bawah USD63 per barel yang merupakan titik terendah dalam empat tahun. Produksi Juli bertambah 411.000 barel per hari menegaskan tekad untuk merebut kembali pangsa pasar global.

Selain kebijakan produksi, faktor geopolitik juga turut memengaruhi harga minyak dunia. Meredanya ketegangan di Timur Tengah dan pencapaian gencatan senjata di beberapa konflik dapat menurunkan kekhawatiran pasar terhadap gangguan pasokan dari kawasan penting seperti Teluk Arab. Tekanan risiko geopolitik pun berkurang dalam jangka pendek. Dalam kondisi tersebut, AKR memastikan ketersediaan pasokan energi bagi pelanggan industri tetap stabil dan terencana.

Perseroan menggunakan Mean of Platts Singapore sebagai referensi harga utama. Pendekatan ini membantu mengurangi dampak volatilitas harga yang dipicu oleh konflik geopolitik, kebijakan OPEC+, maupun gangguan pasar global lainnya. Melalui mekanisme tersebut, AKR membantu menjaga kepastian biaya energi bagi sektor usaha.

Dalam menjalankan aktivitas distribusi BBM dan kimia dasar, Perseroan menerapkan pengelolaan risiko melalui model bisnis yang disiplin. Kebijakan pengadaan dan penetapan harga didasarkan pada mekanisme *pass-through pricing*, di mana perubahan harga minyak global maupun fluktuasi nilai tukar mata uang secara prinsip diteruskan kepada pelanggan, sehingga eksposur risiko harga dan nilai tukar berada pada tingkat yang nihil atau dapat diabaikan (*net open position*). Struktur ini memungkinkan AKR fokus pada efisiensi operasional dan pelayanan nasional.

Seiring momentum investasi nasional yang tetap kuat pada 2025, Kementerian Investasi dan Hilirisasi mencatat realisasi investasi mencapai Rp1.931,2 triliun serta pertumbuhan investasi di sektor hilirisasi yang mencapai Rp584,1 triliun. Indonesia semakin mengukuhkan posisinya sebagai tujuan utama investasi manufaktur dan pengolahan komoditas. Perseroan melalui kawasan industri *Java Integrated Industrial and Port Estate* (JIIPE) terus mengembangkan basis industri hilir yang kuat dan terintegrasi.

Sebagai Kawasan Ekonomi Khusus, JIIPE memberikan kontribusi signifikan terhadap pendapatan Perseroan, khususnya dari pendapatan utilitas dan penjualan lahan, sekaligus berhasil menarik investasi dari sektor hilirisasi mineral, logam, kimia, dan material. Kehadiran *tenant-tenant* strategis seperti *smelter* tembaga, industri kaca, dan pabrik kimia mencerminkan bahwa JIIPE telah berkembang menjadi ekosistem hilirisasi industri yang terintegrasi, yang mendukung transformasi struktur industri nasional serta menghasilkan pendapatan berulang (*recurring income*).

Melalui pengembangan infrastruktur kawasan, penyediaan fasilitas utilitas terpadu, serta ketersediaan lahan industri yang kompetitif, posisi AKR di JIIPE semakin memperkuat peran Perseroan sebagai *enabler* industri hilir dalam rantai nilai industri nasional.

Tinjauan **Operasional**

Segmen Bisnis yang Dilayani Perseroan

Pada tahun 2025, Perseroan dan Entitas Anak mengelola 4 (empat) segmen operasi, diantaranya:

1. **Perdagangan dan Distribusi**
   Distribusi produk BBM dan beragam jenis bahan kimia dasar, termasuk *caustic soda*, *sodium* sulfat, PVC resin, *soda ash* dan lainnya.
2. **Jasa & Logistik**
   Penyediaan beragam jasa logistik seperti penyewaan tangki penyimpanan dan gudang, jasa pengepakan, bongkar muat dan jasa transportasi, terutama untuk produk-produk kimia cair dan padat di Indonesia serta produk BBM.
3. **Pabrikan**
   Memproduksi bahan perekat oleh Entitas Anak Perseroan, yakni PT Arjuna Utama Kimia (Aruki).
4. **Kawasan Industri**
   Kawasan industri yang merupakan segmen kelompok usaha di bawah PT Berkah Kawasan Manyar Sejahtera (BKMS), Entitas Anak yang dimiliki secara tidak langsung melalui UEPN. Kawasan ini merupakan proyek JIIPE di Gresik yang dikembangkan bersama Pelindo.

Jumlah dan Kontribusi Segmen Operasi Terhadap Penjualan dan Pendapatan Konsolidasian

dalam Miliar Rupiah

Uraian	2025		2024		Pertumbuhan (Penurunan)	
	Jumlah	Kontribusi (%)	Jumlah	Kontribusi (%)	Jumlah	Persentase (%)
Perdagangan dan Distribusi	41.314	90%	35.532	92%	5.782	16%

Uraian	2025		2024		Pertumbuhan (Penurunan)	
	Jumlah	Kontribusi (%)	Jumlah	Kontribusi (%)	Jumlah	Persentase (%)
Jasa Logistik	1.499	3%	1.165	3%	334	29%
Pabrikan	464	1%	652	2%	(187)	-29%
Kawasan Industri	2.741	6%	1.381	4%	1.361	99%
Jumlah Penjualan dan Pendapatan Konsolidasian	**46.018**	**100%**	**38.729**	**100%**	**7.289**	**19%**

Kontribusi terbesar segmen operasional terhadap penjualan dan pendapatan bersumber dari segmen perdagangan dan distribusi. Stabilitas penjualan BBM dan kimia dasar mendorong pertumbuhan segmen yang akhirnya menumbuhkan kinerja secara umum. Pada tahun 2025, segmen perdagangan dan distribusi berkontribusi sebesar 90% atau tercatat sebesar Rp41.314 miliar.

Di tengah perkembangan pesat operasional *tenant* dan utilitas ekosistem JIIPE sepanjang tahun 2025, segmen kawasan industri mengalami kenaikan kinerja tercatat sebesar Rp2.741 miliar, naik sebesar 99% dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp1.381 miliar. Segmen kawasan industri menyumbang sebanyak 6% terhadap penjualan dan pendapatan Perseroan. Saat ini, terdapat ekosistem JIIPE yang mulai terbentuk yaitu pemurnian tembaga, bahan kimia, serta kaca dan energi terbarukan, sehingga mendorong pertumbuhan pendapatan utilitias.

Segmen jasa logistik memberikan kontribusi sebesar 3% terhadap total pendapatan atau tercatat sebesar Rp1.499 miliar. Kinerja segmen logistik mengalami pertumbuhan sebesar 29%, yang didorong oleh peningkatan aktivitas operasional pelabuhan dan transportasi, termasuk optimalisasi sinergi dengan pihak berelasi yang memperkuat volume dan efisiensi layanan logistik Perseroan.

Selain itu, kinerja segmen pabrikan tercatat sebesar Rp464 miliar, turun sebesar 29% dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp652 miliar. Kontribusi segmen pabrikan menyumbang sebesar 1% terhadap jumlah pendapatan dan penjualan sepanjang tahun 2025. Penurunan ini disebabkan oleh penyesuaian volume produksi bahan perekat dan dinamika permintaan pasar.

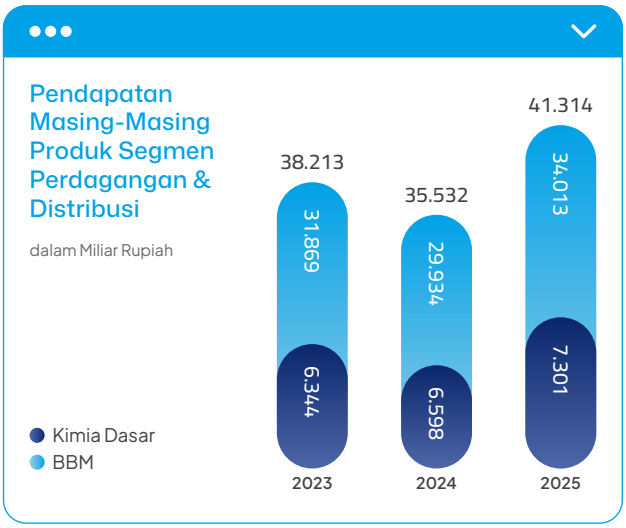
Secara keseluruhan, komposisi pendapatan Perseroan pada tahun 2025 tetap ditopang oleh segmen perdagangan dan distribusi sebagai kontributor utama, dengan kontribusi segmen kawasan industri yang terus meningkat seiring strategi jangka panjang Perseroan dalam mengembangkan sumber pendapatan berulang dan memperkuat ketahanan usaha.

Kinerja Masing-Masing **Segmen Bisnis**

Perdagangan dan Distribusi

Dalam segmen perdagangan dan distribusi, AKR memfokuskan kegiatan pada 2 (dua) produk utama, yakni Bahan Bakar Minyak (BBM) dan bahan kimia dasar. Melalui jaringan infrastruktur dan logistik terintegrasi, Perseroan menyalurkan energi ke sektor manufaktur, pertambangan, energi, dan transportasi. Keandalan pasokan tersebut membantu industri nasional beroperasi secara konsisten dan berkesinambungan.

Segmen ini menjadi fondasi kinerja Perseroan dalam menjaga kesinambungan energi dan bahan kimia bagi sektor strategis Indonesia. Dengan pengelolaan rantai pasok efisien serta kemitraan jangka panjang, AKR mendukung kelancaran produksi pelanggan industri. Kontribusi tersebut memperkuat stabilitas operasional dan daya saing industri nasional.



Bahan Bakar Minyak

Perseroan berfokus pada distribusi BBM tanpa menjalankan produksi, sehingga seluruh kapabilitas diarahkan pada penguatan ketersediaan energi nasional. Melalui pengelolaan rantai pasok yang terintegrasi, AKR memastikan pasokan yang andal, aman, dan tepat waktu. Keandalan ini menopang kelancaran sektor industri dan transportasi serta memperkuat fondasi ketahanan energi Indonesia.

Aktivitas distribusi BBM mencakup:
1. Biodiesel non-subsidi untuk industri
2. Biodiesel subsidi untuk pelanggan ritel sesuai kuota Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas)
3. BBM non-subsidi ritel dan layanan non BBM untuk pelanggan ritel
4. Bahan bakar penerbangan.

Ragam layanan tersebut memperluas akses energi bagi berbagai segmen industri dan memperkuat posisi AKR dalam rantai pasok nasional. Perseroan memastikan distribusi yang tepat sasaran, andal, dan efisien sehingga mendukung keberlangsungan operasional pelanggan. Peran ini menegaskan kontribusi AKR dalam menjaga kesinambungan sektor-sektor strategis nasional serta menciptakan nilai jangka panjang bagi pemangku kepentingan.

Kekuatan utama Perseroan terletak pada infrastruktur logistik berskala nasional yang terintegrasi. Jaringan pelabuhan, terminal penyimpanan, serta armada transportasi modern terhubung dalam satu sistem yang terkoordinasi, sehingga memungkinkan distribusi menjangkau berbagai wilayah di seluruh kepulauan secara efisien. Dengan jangkauan yang luas dan kapasitas operasional yang kuat, AKR senantiasa memastikan kelancaran pasokan, berperan strategis dalam mendorong pemerataan akses energi di Indonesia serta memperkuat fondasi pertumbuhan berkelanjutan.

Keunggulan kompetitif AKR semakin diperkuat melalui sistem teknologi informasi terintegrasi. *Monitoring real-time* dari terminal hingga *nozzle* meningkatkan akurasi, transparansi, dan pengendalian operasional. Data operasional dimanfaatkan untuk mendukung pengambilan keputusan yang cepat dan presisi, sehingga meningkatkan responsivitas terhadap dinamika kebutuhan pasar. Pemanfaatan teknologi informasi ini meningkatkan efisiensi dan menjaga keandalan pasokan secara konsisten serta memperkuat peran Perseroan dalam menjaga stabilitas distribusi energi nasional.

Dalam pengelolaan risiko, Perseroan menerapkan model bisnis yang disiplin dengan menerapkan kebijakan *zero net open position*. Fluktuasi harga dan nilai tukar dimitigasi melalui kebijakan komersial terukur. Pendekatan ini mendukung stabilitas kinerja keuangan dan memastikan kegiatan distribusi tetap berjalan tanpa gangguan di tengah volatilitas pasar energi global.

AKR juga berperan aktif dalam implementasi mandatori biodiesel B40 sejak 1 Januari 2025. Program biodiesel B40 merupakan kelanjutan dari program biodiesel sebelumnya yang berpotensi mengurangi ketergantungan terhadap impor BBM, meningkatkan nilai tambah sektor pertanian, serta mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Kebijakan ini sejalan dengan komitmen Perseroan dalam mendukung kemandirian Indonesia di bidang ketahanan energi serta kontribusi terhadap pencapaian target *net zero emission* pada tahun 2060.

Sebagai pelaksana Penugasan Badan Usaha untuk Melaksanakan Penyediaan dan Pendistribusian Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu (P3JBT), AKR memastikan solar bersubsidi tersalurkan tepat sasaran. Dukungan sistem digital terintegrasi memperkuat akuntabilitas dan pengawasan secara menyeluruh, sehingga setiap proses dapat dipantau dengan lebih transparan. Hal ini tidak hanya meningkatkan kepercayaan publik, tetapi juga menegaskan peran strategis Perseroan dalam menjaga stabilitas pasokan energi bagi masyarakat yang berhak.

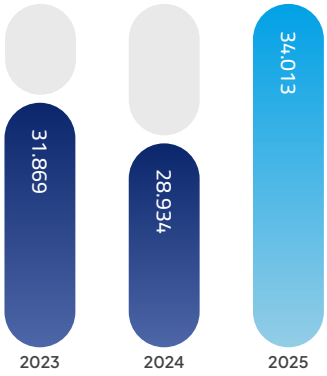
Pada tahun 2025, Perseroan meresmikan **SPBU bp Asterra West** yang berlokasi di BSD City, Tangerang Selatan. SPBU ini merupakan hasil kemitraan strategis dengan Sinar Mas Land dan beroperasi dengan skema *Dealer-Owned Dealer-Operated* (DODO). Kehadiran SPBU baru ini menegaskan komitmen Perseroan dalam memperluas jaringan dan memperkuat kehadiran di sektor energi ritel nasional.



Seiring strategi perluasan jaringan ritel, ekspansi jaringan ritel, termasuk kemitraan dengan bp turut memperluas akses masyarakat terhadap BBM berkualitas di berbagai kota. Hingga tahun 2025, sebanyak 72 SPBU beroperasi melayani pelanggan nasional yang berlokasi di Jabodetabek, Surabaya, Gresik, Malang, dan *Toll Rest Area*. Secara keseluruhan, Perseroan mengoperasikan 176 *outlet* di berbagai wilayah Indonesia. Infrastruktur ritel modern tersebut berkontribusi terhadap peningkatan standar layanan dan perluasan basis pelanggan, serta memperkuar ketahanan sistem distribusi energi nasional.

Penjualan BBM

dalam Miliar Rupiah

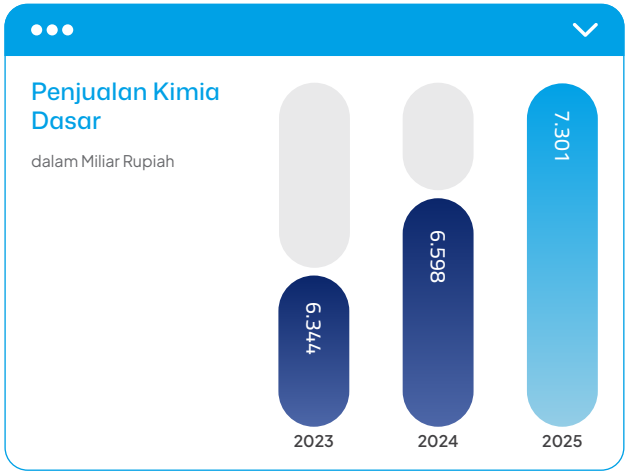


Hingga akhir tahun 2025, Perseroan mencatat penjualan BBM sebesar Rp34.013 miliar, naik sebesar 18% dibandingkan tahun 2024 sebesar Rp28.934 miliar. Kenaikan tersebut terutama didorong oleh pertumbuhan volume penjualan dan perluasan jaringan distribusi.

Kimia Dasar

Segmen kimia dasar dijalankan Perseroan melalui distribusi dengan dukungan rantai pasok dan logistik terintegrasi berskala nasional. Tanpa melakukan produksi, AKR memfokuskan kapabilitas pada ketersediaan bahan baku industri. Peran sebagai distributor utama produsen kimia global memastikan pasokan berkelanjutan yang berkontribusi dalam memperkuat fondasi industrialisasi dan hilirisasi di Indonesia.

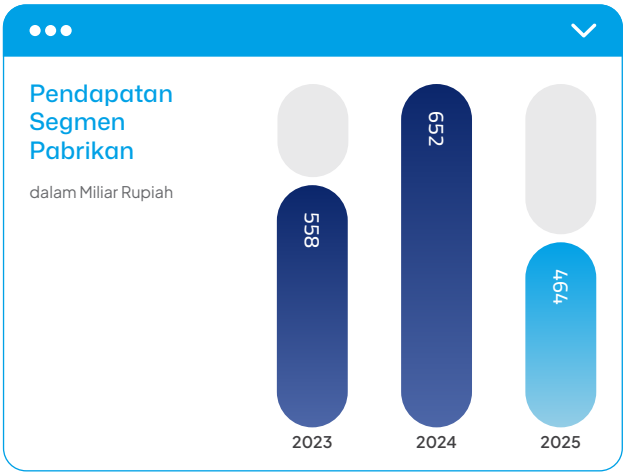
Produk kimia dasar yang didistribusikan menjadi elemen kunci dalam rantai nilai manufaktur. Pasokan tersebut mendukung industri nikel, tekstil, *pulp* dan kertas, pupuk, makanan, farmasi, hingga alumina. Ketersediaan bahan baku yang stabil meningkatkan nilai tambah domestik. Dengan demikian, AKR berperan strategis dalam mendorong transformasi struktur industri nasional.



Perseroan mencatat penjualan kimia dasar mencapai Rp7.301 miliar, mengalami peningkatan sebesar 11% dari tahun sebelumnya sebesar Rp6.598 miliar. Hal ini terutama disebabkan oleh penguatan permintaan produk kimia dasar dari sektor industri, seiring dengan perluasan basis pelanggan Perseroan.

Pabrikan

Dalam segmen pabrikan, Perseroan melalui Entitas Anak yaitu Aruki menjalankan kegiatan produksi perekat kayu di Surabaya. Produk yang dihasilkan ditujukan bagi industri kayu dan kertas dengan kapasitas produksi mencapai 100.000 MT. Sebagai bagian dari komitmen dalam menjalankan kegiatan usaha yang berkelanjutan, Aruki menerapkan standar internasional melalui implementasi ISO9001–2015 *Quality Management System* dan ISO 14001–2004 *Environment Management System* dalam seluruh kegiatan operasionalnya.



Pada tahun 2025, perseroan mencatat penurunan pendapatan segmen pabrikan sebesar 29% dari sebesar Rp652 miliar pada tahun 2024 menjadi sebesar Rp464 miliar pada tahun 2025. Penurunan kinerja segmen ini terutama disebabkan oleh melemahnya permintaan produk bahan perekat. Kinerja segmen ini juga dipengaruhi oleh dinamika perdagangan global, termasuk kebijakan tarif dan hambatan perdagangan internasional yang berdampak pada rantai pasok dan aktivitas ekspor. Kondisi tersebut memengaruhi pola produksi industri pengguna akhir, khususnya sektor kayu dan kertas, sehingga mendorong pelanggan melakukan penyesuaian volume produksi dan persediaan.

Dalam menghadapi kondisi tersebut, Perseroan melalui Entitas Anak Aruki menerapkan pengelolaan produksi secara selektif serta penguatan efisiensi operasional guna menjaga keberlangsungan usaha segmen pabrikan di tengah ketidakpastian perdagangan global.

Jasa Logistik

Segmen jasa logistik Perseroan beroperasi di berbagai pelabuhan utama Indonesia dengan mengedepankan kekuatan infrastruktur terintegrasi. Layanan mencakup operasional pelabuhan, transportasi, penyimpanan tangki, dan pergudangan. Seluruh aktivitas layanan logistik didukung sistem digital terpadu untuk meningkatkan efisiensi proses memperkuat standar keselamatan operasional dan keandalan layanan. Melalui dukungan sistem *monitoring* berbasis teknologi informasi, Perseroan dapat memantau level dan pergerakan barang secara *real time*. Pendekatan ini meminimalkan risiko serta meningkatkan keamanan penyimpanan.

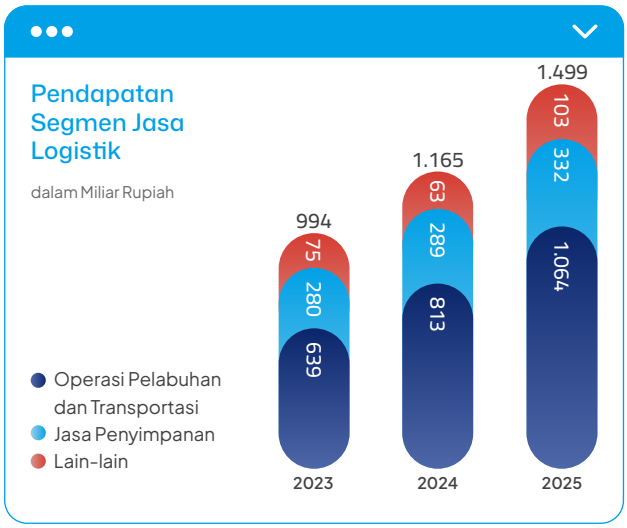
Perseroan menyediakan jasa penyewaan tangki untuk produk curah cair, antara lain *Crude Palm Oil* (CPO) dan kimia cair, serta penyewaan gudang untuk produk curah kering yang mencakup kimia kering, gula, pupuk, dan pakan ternak. Seluruh kegiatan penyewaan dilakukan melalui kontrak jangka panjang guna memberikan kepastian layanan bagi pelanggan.

Selain layanan penyewaan, jasa kepelabuhanan Perseroan mencakup *port handling*, kepabeanan, kegiatan bongkar muat dengan *Harbor Mobile Crane*, pergudangan, transportasi truk, hingga *bagging*. Operasional layanan ini tersebar di Medan, Surabaya, Semarang, dan Jakarta. Seluruh proses tersebut terintegrasi dalam platform digital terpadu yang meningkatkan visibilitas, efisiensi operasional, serta keselamatan kerja.

Melalui PT Jakarta Tank Terminal, Perseroan menyediakan jasa penyewaan terminal tangki penyimpanan BBM dengan kapasitas 350.000 cbm yang berlokasi di Tanjung Priok, Jakarta. Fasilitas ini merupakan salah satu terminal tangki swasta terbesar di Indonesia dan dilengkapi dengan *jetty* serta pipa bawah laut yang mendukung kelancaran distribusi.

Kapasitas Infrastruktur Logistik

Rincian kapasitas infrastruktur logistik di Indonesia dapat dilihat pada bagian Jaringan Infrastruktur Logistik yang disajikan dalam Pendahuluan Laporan Tahunan ini.



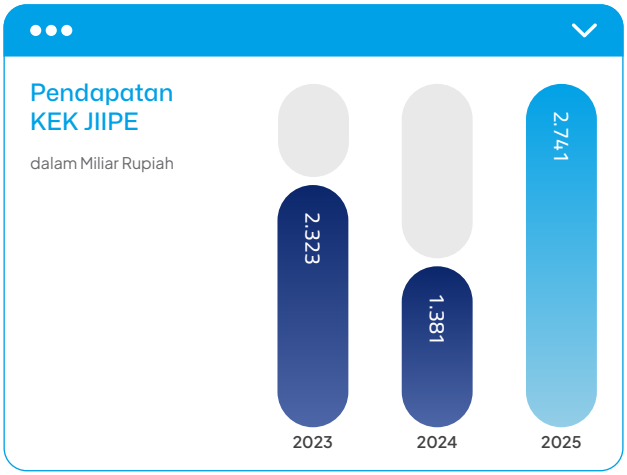
Pendapatan segmen logistik pada tahun 2025 mencapai Rp1.499 miliar, naik 29% dibandingkan tahun 2024 sebesar Rp1.165 miliar. Hal ini terutama disebabkan oleh peningkatan aktivitas operasional pelabuhan, transportasi, serta layanan penyimpanan yang mencerminkan optimalisasi kapasitas dan penguatan kinerja bisnis logistik Perseroan.

Distribusi pendapatan segmen jasa logistik terdiri dari segmen operasi pelabuhan dan transportasi sebesar Rp1.064 miliar, segmen jasa penyimpanan sebesar Rp332 miliar, dan segmen lain-lain sebesar Rp103 miliar. Secara umum, masing-masing segmen mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya.

Kawasan Industri JIIPE

Java Integrated Industrial and Port Estate (JIIPE) di Gresik, Jawa Timur, dikembangkan sebagai kawasan industri terintegrasi seluas 3.000 hektare yang secara langsung terhubung dengan pelabuhan laut dalam. Kolaborasi antara AKR dan Pelindo menghadirkan integrasi kawasan industri, pelabuhan multiguna, serta area komersial dan residensial dalam satu ekosistem terpadu. Konektivitas langsung ini memangkas biaya logistik secara signifikan dengan mengurangi *double handling* dan waktu tunggu kapal. Hasilnya, *tenant* memperoleh efisiensi biaya transportasi dan distribusi yang kompetitif untuk pasar domestik maupun ekspor.

Sebagai Kawasan Ekonomi Khusus berbasis teknologi dan manufaktur, JIIPE menyediakan utilitas kelas dunia yang reliabel, mulai dari pasokan listrik industri, air bersih, gas, hingga fasilitas pengolahan limbah terpadu. Infrastruktur tersebut dirancang untuk mendukung operasi industri berskala besar dan berorientasi ekspor. Kehadiran *smelter* tembaga terbesar di dunia di dalam kawasan mempertegas posisi JIIPE sebagai pusat hilirisasi bernilai tambah tinggi. Keandalan utilitas dan akses pelabuhan laut dalam menciptakan kepastian operasional sekaligus meningkatkan daya saing industri nasional.



Hingga akhir tahun 2025, pendapatan kawasan industri JIIPE adalah sebesar Rp2.741 miliar, naik sebesar 99% dibandingkan tahun 2024 yang mencapai Rp1.381 miliar yang terbagi menjadi:

1. Penjualan lahan industri sebesar Rp1.820 miliar
2. Pendapatan sewa tanah industri sebesar Rp194 miliar
3. Layanan utilitas (*recurring income*) sebesar Rp727 miliar

Peningkatan kinerja kawasan industri pada tahun 2025 didorong oleh lonjakan penjualan lahan sebesar 107% serta kenaikan pendapatan utilitas sebesar 129%, seiring meningkatnya aktivitas operasional *tenant* utama. Kondisi ini mencerminkan semakin kuatnya kontribusi pendapatan utilitas yang bersifat berulang (*recurring income*) dalam struktur pendapatan kawasan industri JIIPE, yang memperkuat kualitas dan keberlanjutan pendapatan Perseroan.

Berlokasi sekitar 24 kilometer dari Surabaya, JIIPE memiliki keunggulan geo-ekonomi strategis di jalur perdagangan utama Indonesia. Integrasi pusat logistik, fasilitas berikat, dan pelabuhan memungkinkan arus barang yang lebih cepat dan efisien. Skema ini mendukung target nasional penurunan biaya logistik sekaligus memperkuat konektivitas dengan jaringan perdagangan internasional. Kombinasi infrastruktur darat dan laut menjadikan JIIPE sebagai hub industri terdepan di kawasan Asia Pasifik.

Easy Access Creates Low Logistic Costs

JIIPE memiliki lokasi yang strategis yakni di muara Selat Madura, jalur utama yang menghubungkan Surabaya dengan Laut Jawa. Pelabuhan terpadu JIIPE, akan menjadi yang terdalam di Jawa Timur, dengan kedalaman -16 LWS. Dilengkapi dengan empat dermaga dengan area berlabuh gabungan seluas 6.200 meter, pelabuhan ini dapat menampung kapal pengangkut curah besar hingga 100.000 DWT. Konektivitas multimoda ini memastikan aliran rantai pasokan yang optimal dengan biaya yang kompetitif.



Penetapan JIIPE sebagai KEK melalui Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2021 yang ditandatangani oleh Presiden Republik Indonesia menghadirkan berbagai insentif fiskal dan non-fiskal bagi investor. Kemudian, JIIPE resmi menerima sertifikat operasional berdasarkan Keputusan Ketua Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus Nomor 1 tahun 2022 tentang Penetapan Beroperasi KEK Gresik yang disahkan oleh Menko Perekonomian Airlangga Hartarto selaku Ketua Dewan Nasional. Fasilitas seperti *tax holiday*, kemudahan bea cukai, serta layanan perizinan satu atap meningkatkan kemudahan berusaha. Dukungan regulasi ini mempercepat realisasi investasi manufaktur dan hilirisasi. Lingkungan usaha yang kompetitif tersebut memperkuat daya tarik Indonesia sebagai destinasi investasi global.

Hingga akhir 2025, JIIPE memiliki 33 *tenant* aktif dari berbagai sektor strategis dengan kluster industri meliputi metal, elektronik, kimia, energi, serta logistik & pelabuhan. Sepanjang tahun 2025, kawasan ini mencatat penjualan lahan 84 hektare, dengan total kumulatif 466 hektare terjual dan tersewa dari awal beroperasi. Realisasi investasi tersebut mendorong penciptaan ribuan lapangan kerja langsung dan tidak langsung. Dengan ekosistem industri terintegrasi dan biaya logistik rendah, JIIPE berperan nyata sebagai katalis pertumbuhan ekonomi dan industrialisasi nasional.

Tenant yang Telah Bergabung dalam Kawasan Industri JIIPE


Freeport Cooper Smelter & PMR


Xinyi Glass Factory


Xinyi Solar Indonesia


Hailiang Nova Material


AKR Corp-Tank Storage


Nippon Sari Roti Bread Factory


Unichem Salt Factory


Clariant Specialty Chemical


Fertilizer Inti Tech Fertilizer


Adhimix Precast


Cahaya Maju Lestari Castor Oil


Bank Indonesia Cash Depot & Data Centre


Waskita Beton-Precast

Hebang Biotechnology Indonesia

Golden Elephant

Aneka Tambang

Rodamas

Pangansari Utama-Food

Sumberbaja Sejati Light

Steel Manufacturer

Tirtamas-Warehouse

BJTI-Port Services

Utilitas

Sebagai kawasan industri terintegrasi, KEK JIIPE Gresik dirancang bukan sekadar menyediakan lahan, tetapi membangun *industrial ecosystem* yang meningkatkan daya saing *tenant* melalui utilitas kelas dunia yang reliabel, efisien, dan berkelanjutan. Dengan infrastruktur yang terintegrasi langsung dengan pelabuhan laut dalam, kawasan ini memastikan operasional industri berjalan tanpa gangguan, dengan standar mutu global serta kepastian pasokan jangka panjang.

Berikut adalah fondasi utilitas strategis yang menopang kompetitivitas *tenant*:

1. **Energi Andal hingga 515 MW: Menjamin Kepastian Produksi**
   KEK JIIPE Gresik memiliki lisensi pembangkitan dan distribusi listrik berbasis gas hingga 515 MW, menjadikannya salah satu kawasan industri dengan kapasitas energi terbesar di Indonesia. Pasokan gas disuplai melalui jaringan pipa langsung dari Perusahaan Gas Negara, memastikan stabilitas tekanan dan kontinuitas energi untuk industri padat energi seperti *smelter*, kimia, dan manufaktur berat.

   Sebagai penguat sistem, Perusahaan Listrik Negara berkomitmen menyediakan dukungan hingga 500 MVA, dengan realisasi penyalaan listrik tegangan tinggi sebesar 40 MVA pada Triwulan III-2025. Skema ini menciptakan *redundancy system* yang meminimalkan risiko *downtime* dan meningkatkan *operational reliability tenant*.

   Dari sisi keberlanjutan, kawasan ini telah mengoperasikan Pembangkit Listrik Tenaga Surya 400 kWp yang mampu:
   a. Menghemat 483.917 kWh per tahun
   b. Mengurangi emisi 451.978 kg CO_2 per tahun
   c. Setara dengan penanaman 5.671 pohon selama 10 tahun
   d. Setara penghematan 126.236 liter bensin per tahun

   Langkah ini memperkuat posisi *tenant* dalam memenuhi standar ESG global dan ketentuan rantai pasok internasional.
2. **Sistem Air Mandiri: 2.400 m³/hari dari Desalinasi**
   Untuk menjamin ketersediaan air industri yang stabil dan independen dari sumber darat, kawasan mengoperasikan fasilitas *Sea Water Reverse Osmosis* (SWRO) berkapasitas 2.400 m³ per hari. Sistem desalinasi ini memastikan kontinuitas suplai air berkualitas tinggi, terutama bagi industri yang membutuhkan air proses dalam volume besar dan spesifikasi ketat. Pendekatan ini tidak hanya meningkatkan *water security*, tetapi juga mengurangi tekanan terhadap sumber daya air tawar regional.
3. **IPAL Berteknologi MBR: 2.500 m³/hari & Sistem Daur Ulang Air**
   Pengelolaan limbah cair dikelola melalui Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) berkapasitas rata-rata 2.500 m³/hari, menggunakan teknologi *Membrane Bio Reactor* (MBR) yang efisien lahan dan mampu menghasilkan kualitas air sesuai baku mutu pemerintah.

   Air hasil olahan kemudian diproses kembali melalui *Ultra Filtration* dan *Reverse* Osmosis, sehingga dapat digunakan kembali oleh *tenant*. Sistem *water recycling* ini memberikan berbagai manfaat strategis, meliputi:
   a. Meningkatkan efisiensi konsumsi air secara signifikan
   b. Mengurangi eksploitasi sumber daya alam secara berkelanjutan
   c. Menurunkan biaya operasional jangka panjang melalui pengelolaan air yang lebih efisien
   d. Mendukung pencapaian sertifikasi lingkungan bagi *tenant* dengan menerapkan praktik pengelolaan air sesuai standar keberlanjutan
   e. Pendekatan *closed-loop water system* ini menjadi nilai tambah strategis bagi industri berorientasi ekspor yang mensyaratkan standar keberlanjutan tinggi.
4. **Infrastruktur Digital & Keamanan 24/7**
   Kawasan dilengkapi jaringan *fiber optic broadband* bekerja sama dengan penyedia telekomunikasi nasional, mendukung kebutuhan *smart manufacturing*, *automation*, dan integrasi sistem *Enterprise Resource Planning* (ERP) *tenant*.

   Penguatan infrastruktur turut diiringi dengan peningkatan layanan operasional berbasis digital, yaitu peluncuran Unit Layanan Izin Tinggal dan Informasi Keimigrasian (ULITIK) pada November 2025, serta uji coba (*piloting*) *Auto Gate System* Bea Cukai di kawasan pabean guna mempercepat arus logistik. Selain itu, sejak tahun 2025, JIIPE telah meresmikan Kantor Polisi setingkat sektor di JIIPE dengan potensi peningkatan setingkat resor. Hal ini meningkatkan kepastian keamanan di lingkungan JIIPE.

   Untuk memastikan keamanan operasional, kawasan didukung oleh berbagai fasilitas dan sistem terpadu, antara lain:
   a. Tim pemadam kebakaran siaga 24 jam/7 hari untuk menjamin respons cepat terhadap potensi risiko
   b. Sistem keamanan kawasan terpadu yang memantau aktivitas secara menyeluruh
   c. Protokol tanggap darurat industri yang terstandarisasi untuk memastikan keberlangsungan operasional

Mode Konektivitas JIIPE yang Unik

Mode konektivitas JIIPE menyesuaikan kondisi Indonesia sebagai negara kepulauan. JIIPE terkoneksi dengan jalur transportasi laut, darat, dan udara. Pelabuhan tersebut dikelola oleh PT Berlian Manyar Sejahtera (BMS) yang memiliki konsesi dari Kementerian Transportasi untuk melakukan pelayanan pelabuhan di Terminal Manyar, Pelabuhan Gresik, Jawa Timur hingga 2094.

Jasa yang dilayani mencakup pelabuhan & logistik multi layanan untuk pengangkutan, kontainer, mobil/kendaraan, kargo umum, halaman kontainer, multiguna, industri perikanan, kargo cair dan massal, pusat logistik berikat, pemeliharaan lepas pantai.

Ulasan Kinerja JIIPE 2025

Pengembangan **KEK JIIPE** terus menunjukkan **kemajuan pesat sepanjang 2025** dengan sejumlah *tenant* yang telah memasuki tahap operasional. Realisasi investasi yang tercapai telah mendorong penciptaan lapangan kerja dan menghasilkan *multiplier effect* yang signifikan bagi perekonomian Jawa Timur serta kontribusi nasional.



Sebagai kawasan industri terintegrasi yang terhubung langsung dengan pelabuhan laut dalam, KEK JIIPE Gresik memiliki posisi geoekonomi yang sangat strategis untuk mendukung aktivitas ekspor ke pasar Asia sekaligus distribusi industri ke seluruh wilayah Indonesia. Berlokasi sekitar 24 km dari Surabaya, kawasan ini berada di jalur pelayaran utama Asia Pasifik yang menghubungkan pusat perdagangan di Asia Timur, Asia Tenggara, dan Australia. Kedekatan dengan pusat industri Jawa Timur, menyumbang sekitar 25% Produk Domestik Bruto manufaktur nasional. Ini menjadikan kawasan ini simpul logistik penting bagi industri berorientasi ekspor maupun pasar domestik.

Keunggulan utama kawasan ini terletak pada konektivitas multimoda yang terintegrasi. KEK JIIPE terhubung langsung dengan pelabuhan laut dalam di dalam kawasan yang mampu melayani kapal besar untuk perdagangan internasional, sekaligus memiliki akses strategis ke jaringan transportasi nasional.

Kawasan ini berada dalam jangkauan Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya, salah satu pelabuhan tersibuk di Indonesia, serta terhubung dengan jaringan jalan tol TransJawa yang memungkinkan distribusi barang secara efisien ke pasar utama seperti Jakarta, Jawa Tengah, dan Jawa Barat. Selain itu, konektivitas dengan Bandara Internasional Juanda yang berjarak sekitar 40 km memberikan akses logistik udara bagi pengiriman bernilai tinggi dan waktu sensitif. Integrasi transportasi laut, jalan raya, dan udara ini menciptakan rantai pasok yang lebih efisien dan kompetitif bagi tenant di kawasan industri.

Didukung oleh konektivitas tersebut, KEK JIIPE terus mencatat pertumbuhan investasi yang signifikan. Hingga Triwulan I 2025, kawasan ini mencatat realisasi investasi kumulatif lebih dari Rp87 triliun, termasuk komitmen penanaman modal asing sekitar Rp10 triliun. Aktivitas industri di kawasan ini turut berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi regional Jawa Timur, yang pada tahun 2025 mencatat realisasi investasi sebesar Rp74,69 triliun atau sekitar 7,9% dari total investasi nasional, serta mendukung penyerapan lebih dari 130 ribu tenaga kerja di tingkat provinsi. Atas kontribusi tersebut, KEK JIIPE meraih peringkat II kategori Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur.

Perkembangan kawasan juga tercermin dari masuknya investasi industri baru. Pada tahun 2025, KEK JIIPE menyerahkan lahan industri kepada Golden Elephant Specialty Chemicals untuk pembangunan fasilitas kimia ramah lingkungan yang akan memproduksi melamin, asam nitrat, dan amonium nitrat. Proyek ini memperkuat rantai pasok industri kimia nasional sekaligus mendukung agenda hilirisasi berbasis bahan baku domestik.

Ekosistem industri yang berkembang di kawasan ini menciptakan rantai nilai terintegrasi di sektor logam, kimia, dan material industri. *Tenant* strategis yang telah beroperasi atau berinvestasi di kawasan ini antara lain PT Freeport Indonesia (industri tembaga), Hailiang Group (*copper foil*), Golden Elephant Specialty Chemicals (kimia), serta Xinyi Glass Holdings (kaca industri). Sinergi antar tenant tersebut membentuk klaster industri bernilai tambah tinggi yang memperkuat posisi kawasan sebagai salah satu destinasi utama *Foreign Direct Investment* (FDI) di sektor strategis Indonesia.

Menegaskan peran kawasan ini dalam mendukung hilirisasi nasional, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto meresmikan fasilitas *Precious Metal Refinery* (PMR) yang berlokasi di kawasan industri KEK JIIPE. Fasilitas ini menjadi tonggak penting dalam pengembangan industri pengolahan logam mulia di dalam negeri, yang memungkinkan peningkatan nilai tambah mineral nasional melalui proses pemurnian domestik. Kehadiran fasilitas ini memperkuat posisi KEK JIIPE sebagai pusat hilirisasi logam strategis sekaligus mendukung penguatan kemandirian industri nasional.

Dengan kombinasi lokasi strategis di jalur perdagangan Asia, konektivitas multimoda yang kuat, serta ekosistem industri yang terintegrasi, KEK JIIPE semakin mempertegas perannya sebagai pusat pertumbuhan industri baru di Indonesia. Kawasan ini tidak hanya menjadi gerbang ekspor bagi industri manufaktur nasional, tetapi juga platform logistik yang memperkuat efisiensi distribusi ke seluruh pasar domestik.

Profitabilitas Masing-Masing Pilar Bisnis

dalam Miliar Rupiah

Segmen Perdagangan dan Distribusi

Uraian	2025	2024	Pertumbuhan (Penurunan)	Persentase (%)
Penjualan dan Pendapatan	41.314	35.532	5.782	16%
Beban Pokok Penjualan dan Pendapatan	38.310	32.903	5.407	16%
Laba Bruto	**3.004**	**2.629**	**375**	**14%**
Marjin Laba Bruto	7,3%	7,4%		0,1%

Hingga akhir tahun 2025, Perseroan mencatat profitabilitas laba bruto dari segmen perdagangan dan distribusi sebesar Rp3.004 miliar, naik sebesar Rp375 miliar atau 14% dibandingkan tahun 2024 sebesar Rp2.629 miliar. Marjin laba bruto berada pada tingkat 7,3% pada tahun 2025, mencerminkan upaya Perseroan dalam menjaga stabilitas profitabilitas di tengah meningkatnya aktivitas operasional dan dinamika biaya distribusi dan logistik. Peningkatan laba bruto ini sejalan dengan pertumbuhan volume penjualan serta efektivitas pengelolaan rantai pasok dan biaya operasional.

dalam Miliar Rupiah

Segmen Pabrikan

Uraian	2025	2024	Pertumbuhan (Penurunan)	Persentase (%)
Penjualan dan Pendapatan	464	652	(188)	-29%
Beban Pokok Penjualan dan Pendapatan	256	356	(100)	-28%
Laba Bruto	**208**	**296**	**(88)**	**-30%**
Marjin Laba Bruto	44,8%	45,4%		-0,6%

Pada segmen pabrikan, AKR mencatat penurunan laba bruto tahun 2025 mencapai Rp208 miliar atau turun 30% dibandingkan jumlah laba bruto tahun 2024. Meskipun terjadi penurunan laba bruto, marjin laba bruto tetap relatif stabil pada tingkat 44,8%, yang mencerminkan ketahanan struktur biaya dan efektivitas pengendalian operasional di tengah pelemahan permintaan pasar.

dalam Miliar Rupiah

Segmen Logistik

Uraian	2025	2024	Pertumbuhan (Penurunan)	Persentase (%)
Penjualan dan Pendapatan	1.499	1.165	334	29%
Beban Pokok Penjualan dan Pendapatan	1.449	1.178	271	23%
Laba Bruto	**49**	**(13)**	**62**	**N/M**
Marjin Laba Bruto	3,3%	-1,12%		N/M

Di segmen logistik, laba bruto di tahun 2025 tercatat sebesar Rp49 miliar, mengalami peningkatan sebesar Rp62 miliar dibandingkan tahun 2024 sebesar Rp13 miliar. Hal ini mencerminkan peningkatan volume distribusi dan efisiensi biaya. Marjin laba bruto meningkat menjadi 3,3% menunjukkan pemulihan kinerja dan penguatan profitabilitas segmen logistik seiring optimalisasi kapasitas dan sinergi operasional.

dalam Miliar Rupiah

Segmen Kawasan Industri

Uraian	2025	2024	Pertumbuhan (Penurunan)	Persentase (%)
Penjualan dan Pendapatan	2.741	1.381	1.360	98%
Beban Pokok Penjualan dan Pendapatan	1.905	783	1.122	143%
Laba Bruto	**836**	**597**	**239**	**40%**
Marjin Laba Bruto	30,5%	43,3%		12,8%

Pada tahun 2025, AKR mencatatkan laba bruto segmen kawasan industri sebesar Rp836 miliar, mengalami kenaikan 40% dibandingkan tahun 2024. Marjin laba bruto mengalami penyesuaian menjadi 30,5% seiring dengan peningkatan aktivitas operasional kawasan, serta bertambahnya kontribusi pendapatan utilitas dan layanan yang bersifat berulang (*recurring income*) dalam struktur pendapatan kawasan industri.

Tinjauan **Keuangan**

Tinjauan kinerja keuangan Perseroan disusun berdasarkan Laporan Keuangan Konsolidasian *Audited* PT AKR Corporindo Tbk dan Entitas Anak untuk tanggal dan tahun yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024. Laporan Keuangan tersebut telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwanto Susanti dan Surja (a member firm of Ernst & Young Global Limited) pada laporannya tertanggal 18 Maret 2026. Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan mendapat opini wajar "dalam semua hal yang material" serta sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Laporan Keuangan Konsolidasian telah disusun berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) yang berlaku di Indonesia, terdiri dari Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) dan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan (ISAK) yang dikeluarkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia. Rupiah menjadi mata uang fungsional dalam penyajian keuangan Perseroan, sedangkan mata uang asing ditulis menggunakan kurs yang berlaku pada tanggal transaksi.

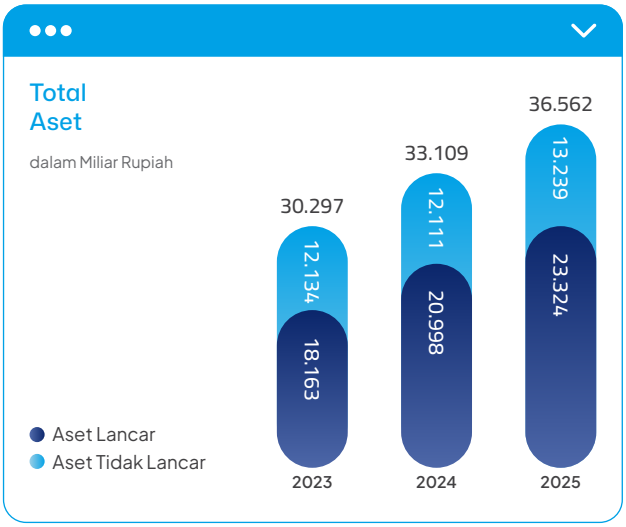
Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian

Berdasarkan Laporan Keuangan *Audited* per 31 Desember 2025, Perseroan mencatatkan kinerja yang solid menunjukkan pertumbuhan berkelanjutan dan keunggulan operasional. Laba neto AKR tercatat sebesar Rp2.473 miliar, mengalami peningkatan sebesar 11% dibandingkan jumlah laba tahun 2024 sebesar Rp2.225 miliar. Pertumbuhan kinerja tersebut terutama didorong oleh kinerja stabil dari segmen perdagangan dan distribusi serta aktivitas berbagai *tenant* di kawasan industri JIIPE yang telah beroperasi dan lonjakan pendapatan utilitas.

Aset

Pada tahun 2025, total aset tercatat sebesar Rp36.562 miliar, mengalami peningkatan sebesar Rp3.453 miliar atau 10% dibandingkan tahun 2024 sebesar Rp33.109 miliar. Peningkatan aset terutama didorong oleh kenaikan pada aset lancar, terutama dari pertumbuhan piutang usaha dan persediaan tanah kawasan industri yang mencerminkan peningkatan aktivitas operasional.

Di sisi lain, aset tidak lancar juga mengalami peningkatan, terutama berasal dari penguatan aset tetap serta investasi jangka panjang yang menunjukkan berlanjutnya ekspansi dan pengembangan infrastruktur Perseroan. Komposisi ini mencerminkan keseimbangan antara likuiditas jangka pendek dan investasi jangka panjang dalam mendukung pertumbuhan usaha secara berkelanjutan.



Aset Lancar

dalam Miliar Rupiah

Aset Lancar	2025		2024		Pertumbuhan (Penurunan)	Persentase (%)
	Nominal	Kontribusi (%)	Nominal	Kontribusi (%)		
Kas dan Setara Kas	6.404	27%	5.366	26%	1.038	19%
Piutang Usaha	9.544,7	40,9%	7.563,5	36,0%	1.981,2	26%
Piutang Lain-Lain	45,7	0,2%	44.3	0,2%	1,4	3%
Persediaan Neto	2.601	11,2%	3.463	16%	(862)	-25%
Persediaan Tanah Kawasan Industri	4.013	17%	3.757	18%	256	7%

Aset Lancar	2025		2024		Pertumbuhan (Penurunan)	Persentase (%)
	Nominal	Kontribusi (%)	Nominal	Kontribusi (%)		
Pajak Dibayar di Muka	136	1%	147	1%	(11)	-8%
Biaya Dibayar di Muka	88	0,4%	82	0%	6	7,1%
Uang Muka	60	0,2%	147	1%	(87)	-59%
Aset Lancar Lainnya	431	2%	428	2%	3	1%
Jumlah Aset Lancar	**23.324**	**100%**	**20.998**	**100%**	**2.326**	**11%**

Aset lancar Perseroan mengalami peningkatan sebesar Rp2.326 miliar atau 11% dari jumlah tahun 2024 sebesar Rp20.998 miliar menjadi sebesar Rp23.324 miliar pada tahun 2025. Hal ini terutama disebabkan oleh peningkatan arus kas dan piutang usaha seiring dengan peningkatan volume aktivitas operasional.

Persediaan Tanah Kawasan Industri dalam Aset Lancar
Perseroan mencatat persediaan tanah kawasan industri yang siap untuk dijual hingga akhir tahun 2025 sebesar Rp4.013 miliar, naik sebesar Rp256 miliar atau 7,1% dibandingkan tahun 2024 sebesar Rp3.757 miliar. Pertumbuhan ini didorong oleh percepatan pengembangan kawasan dan proses *landbanking* yang berkelanjutan untuk memenuhi permintaan investor dan *tenant* ke depan.

Kas dan Setara Kas

dalam Miliar Rupiah

Kas dan Setara Kas	2025		2024		Pertumbuhan (Penurunan)	Persentase (%)
	Nominal	Kontribusi (%)	Nominal	Kontribusi (%)		
Kas	18	0%	17	0%	0,6	4%
Bank – Pihak Ketiga						
Rupiah	3.819	60%	2.254	42%	1.565	69%
Dolar Amerika Serikat	2.015	31%	2.621	49%	(606)	23%
Lainnya	2	0%	2	0%	0	0%
Jumlah Kas pada Bank	**5.836**	**91%**	**4.877**	**91%**	**959**	**20%**
Deposito Berjangka – Pihak Ketiga						
Rupiah	239	4%	416	8%	(177)	-43%
Dolar	311	5%	56	1%	255	460%
Jumlah Deposito Berjangka	**550**	**9%**	**472**	**9%**	**78**	**17%**
Jumlah Kas dan Setara Kas	**6.404**	**100%**	**5.366**	**100%**	**1.038**	**19%**

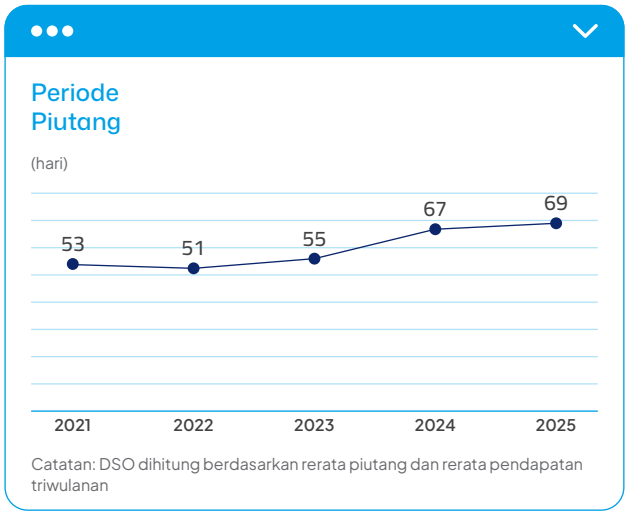
Per 31 Desember 2025, kas dan setara kas tercatat sebesar Rp6.404 miliar, naik sebesar Rp1.038 miliar atau 19% dibandingkan jumlah per 31 Desember 2024 sebesar Rp5.366 miliar. Jumlah kas dan setara kas terdiri atas kas di bank sebanyak Rp5.836 miliar, serta deposito berjangka sebanyak Rp550 miliar, yang mencerminkan posisi likuiditas Perseroan yang kuat dalam mendukung kebutuhan operasional dan ekspansi usaha.

Piutang Usaha

dalam Miliar Rupiah

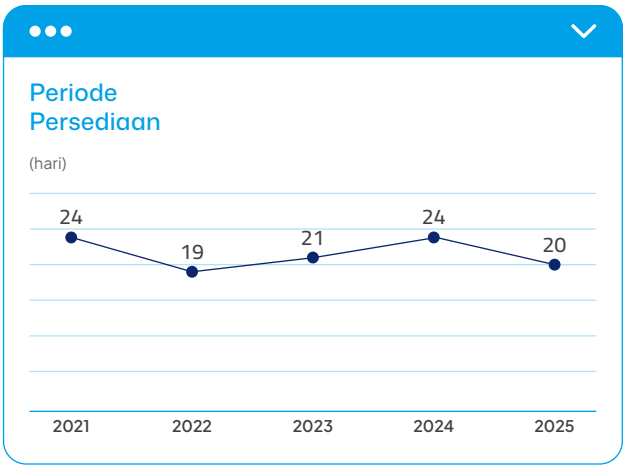
Piutang Usaha	2025		2024		Pertumbuhan (Penurunan)	Persentase (%)
	Nominal	Kontribusi (%)	Nominal	Kontribusi (%)		
Belum Jatuh Tempo	9.984	93%	6.903	88%	3.081	45%
Jatuh Tempo:						
1–30 hari	221	2%	372	5%	(151)	-41%
31–60 hari	98	1%	132	2%	(33)	-26%

Piutang Usaha	2025		2024		Pertumbuhan (Penurunan)	Persentase (%)
	Nominal	Kontribusi (%)	Nominal	Kontribusi (%)		
> 60 hari	769	7%	581	7%	188	32%
Sub Total	**11.072**	**103%**	**7.988**	**102%**	**3.084**	**39%**
WAPU PPN	23	0%	47	1%	(24)	-51%
Dikurangi:						
Penyisihan Kerugian Kredit Ekspektasian	(106)	-1%	(99)	-1%	(7)	-7%
Penyesuaian Nilai Wajar	(220)	-2%	(68)	-1%	152	224%
Piutang Usaha Neto	**10.769**	**100%**	**7.868**	**100%**	**2.901**	**37%**



Pada tahun 2025, rata-rata periode penagihan piutang usaha naik menjadi 69 hari dibandingkan 67 hari pada tahun 2024. Meskipun mengalami kenaikan, sebagian besar piutang usaha Perseroan berada dalam kondisi sehat, dengan piutang usaha belum jatuh tempo sebesar Rp9.984 miliar atau 93% dari jumlah piutang usaha bersih. Perseroan menerapkan kebijakan pengelolaan piutang yang berorientasi pada kualitas aset dan mitigasi risiko kredit. Dalam mendukung kebijakan tersebut, Perseroan mengakumulasikan Rp106 miliar sebagai cadangan kerugian penurunan kredit dan mencatat penyesuaian nilai wajar piutang usaha sebesar Rp220 miliar yang mencerminkan pendekatan konservatif Manajemen dalam menjaga kualitas piutang dan kestabilan kinerja keuangan.

Perseroan mencatat piutang usaha neto tahun 2025 sebesar Rp10.769 miliar, mengalami peningkatan sebesar Rp2.901 miliar atau 37% dibandingkan tahun 2024 sebesar Rp7.868 miliar. Hal tersebut terutama disebabkan oleh pertumbuhan volume penjualan serta peningkatan aktivitas transaksi dengan pelanggan seiring dengan ekspansi usaha yang berlangsung sepanjang tahun 2025.



Hingga akhir tahun 2025, periode perputaran persediaan Perseroan mengalami perbaikan menjadi 20 hari dibandingkan tahun 2024 sebanyak 24 hari. Manajemen secara konsisten mengoptimalkan pengelolaan persediaan untuk mendukung perputaran barang yang semakin efisien dan keseimbangan modal kerja.

Aset Tidak Lancar

dalam Miliar Rupiah

Aset Tidak Lancar	2025		2024		Pertumbuhan (Penurunan)	Persentase (%)
	Nominal	Kontribusi (%)	Nominal	Kontribusi (%)		
Piutang Usaha Jangka Panjang dari Pihak Ketiga Neto	1.225	9%	304	3%	921	302%
Investasi pada Entitas Asosiasi	536	4%	492	4%	44	9%
Aset Pajak Tangguhan Neto	181	1%	188	2%	(7)	-4%
Properti Investasi	1.817	14%	1.817	15%	0	0%
Aset Tetap Neto	6.811	51%	6.365	53%	446	7%

Aset Tidak Lancar	2025		2024		Pertumbuhan (Penurunan)	Persentase (%)
	Nominal	Kontribusi (%)	Nominal	Kontribusi (%)		
Aset Keuangan pada Nilai Wajar melalui Laba Rugi	250	2%	0	0%	250	100%
Aset Hak Guna Neto	839	6%	793	7%	46	6%
Estimasi Tagihan Pajak Penghasilan Jangka Panjang	70	1%	16	0%	54	344%
Persediaan Tanah Kawasan Industri untuk Pengembangan	1.421	11%	1.983	16%	(562)	-28%
Uang Muka	0	0%	27	0%	(27)	-100%
Aset Keuangan Tidak Lancar Lainnya Neto	38	0%	75	1%	(37)	-49%
Aset Tidak Lancar Lainnya Neto	51	0%	50	0%	1	2%
Jumlah Aset Tidak Lancar	**13.239**	**100%**	**12.111**	**100%**	**1.128**	**9%**

Perseroan mencatat aset tidak lancar sebesar Rp13.239 miliar, mengalami peningkatan sebesar Rp1.128 miliar atau 9% dibandingkan jumlah pada tahun 2024 sebesar Rp12.111 miliar. Peningkatan aset tidak lancar terutama berasal dari kenaikan piutang usaha jangka panjang dan peningkatan aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi, yang mencerminkan strategi penempatan aset jangka panjang dan pengelolaan portofolio keuangan secara aktif.

Aset Tetap

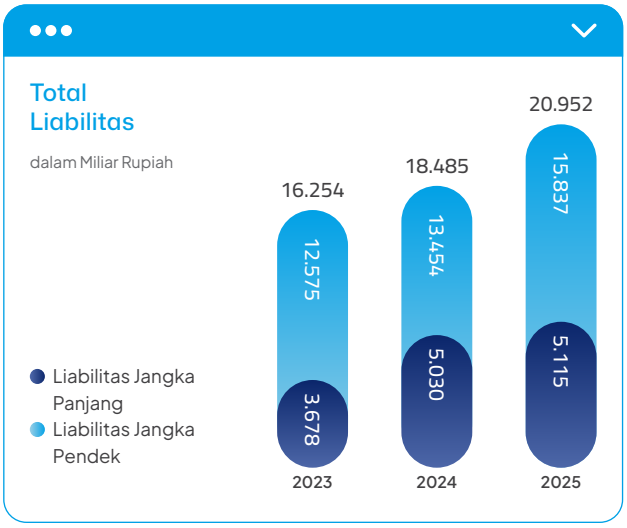
dalam Miliar Rupiah

Aset tetap	2025		2024		Pertumbuhan (Penurunan)	Persentase (%)
	Nominal	Kontribusi (%)	Nominal	Kontribusi (%)		
Hak Atas Tanah	722	11%	689	11%	33	5%
Bangunan, Dermaga, Gudang dan Tangki Penyimpanan	5.601	82%	5.251	82%	350	7%
Mesin dan Peralatan	1.665	24%	1.219	19%	446	37%
Peralatan Gudang dan Peralatan Pembongkaran di Pelabuhan	692	10%	628	10%	64	10%
Kendaraan	504	7%	469	7%	35	7%
Pengembangan Gedung yang Disewa	95	1%	97	2%	(2)	-1%
Renovasi Gedung	610	9%	611	10%	(1)	0,2%
Peralatan Kantor	180	3%	170	3%	10	6%
Kapal	1.065	16%	957	15%	108	11%
Aset dalam Penyelesaian	697	10%	838	13%	(141)	-17%
Akumulasi Penyusutan	(5.021)	-74%	(4.564)	-72%	(457)	-10%
Jumlah Aset Tetap	**6.811**	**100%**	**6.365**	**100%**	**446**	**7%**

Aset tetap Perseroan pada tahun 2025 tercatat sebesar Rp6.811 miliar, naik sebesar Rp446 miliar atau 7%, dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp6.365 miliar. Kenaikan nilai pada aset tetap terutama dikarenakan oleh penambahan aset dari hasil investasi dan pengembangan fasilitas seiring dengan berjalannya proyek konstruksi terminal dan SPBU dengan persentase penyelesaian antara 20 hingga 95%.

Liabilitas

Liabilitas Perseroan mengalami peningkatan sebesar Rp2.467 miliar atau 13% dari tahun 2024 sebesar Rp18.485 miliar menjadi Rp20.952 miliar pada tahun 2025. Peningkatan ini terutama dipengaruhi oleh kenaikan hutang usaha seiring dengan meningkatnya aktivitas operasional, serta penambahan liabilitas lainnya dalam rangka mendukung kebutuhan pendanaan dan ekspansi usaha Perseroan.

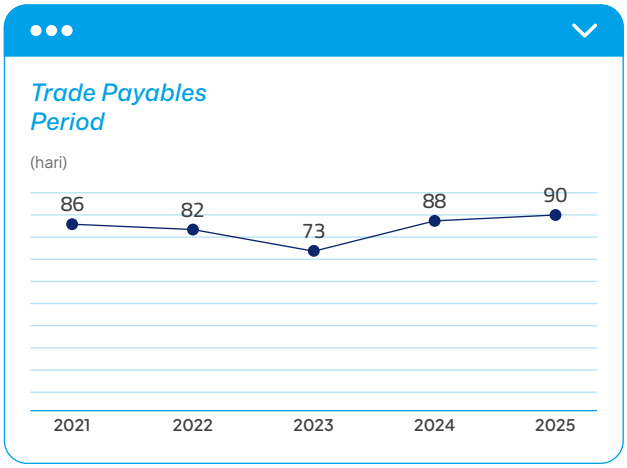


Liabilitas Jangka Pendek

dalam Miliar Rupiah

Liabilitas Jangka Pendek	2025		2024		Pertumbuhan (Penurunan)	Persentase (%)
	Nominal	Kontribusi (%)	Nominal	Kontribusi (%)		
Hutang Bank Jangka Pendek	237	1%	7	0%	230	3285%
Hutang Usaha	12.334	78%	10.392	77%	1.942	19%
Hutang Pajak	654	4%	403	3%	251	62%
Biaya Masih Harus Dibayar	663	4%	586	4%	77	13%
Liabilitas Imbalan Kerja Jangka Pendek	118	1%	144	1%	(26)	-18%
Liabilitas Sewa Jangka Pendek	71	0%	45	0%	26	58%
Liabilitas Kontrak Jangka Pendek	311	2%	272	2%	39	14%
Hutang Bank Jangka Panjang dan Lainnya yang Jatuh Tempo dalam Satu Tahun	1.182	7%	1.141	8%	41	4%
Hutang Dividen	57	0%	1	0%	56	5560%
Jumlah Liabilitas Jangka Pendek	**15.837**	**100%**	**13.454**	**100%**	**2.383**	**18%**

Jumlah liabilitas jangka pendek pada tahun 2025 sebesar Rp15.837 miliar, mengalami peningkatan sebesar Rp2.383 miliar atau 18% dibandingkan tahun 2024 sebesar Rp13.454 miliar. Perubahan ini terutama dipengaruhi oleh kenaikan signifikan dari hutang bank jangka pendek dan liabilitas dividen, yang dikelola secara terukur untuk menjaga keseimbangan antara kebutuhan likuiditas dan struktur pendanaan yang sehat.



Pada tahun 2025, Perseroan mencatat hutang usaha sebesar Rp12.334 miliar, mengalami kenaikan sebesar Rp1.942 miliar atau 19% dibandingkan tahun 2024 sebesar Rp10.392 miliar. Sejalan dengan peningkatan volume usaha, periode pembayaran utang meningkat menjadi 90 hari pada tahun 2025 dari 88 hari pada tahun 2024, yang tetap berada dalam rentang pengelolaan modal kerja yang terkontrol.

Liabilitas Jangka Panjang

dalam Miliar Rupiah

Liabilitas Jangka Panjang	2025		2024		Pertumbuhan (Penurunan)	Persentase (%)
	Nominal	Kontribusi (%)	Nominal	Kontribusi (%)		
Liabilitas Pajak Tangguhan Neto	41	1%	26	1%	15	58%
Hutang Bank Jangka Panjang dan Lainnya	3.703	72%	3.645	72%	58	2%
Liabilitas Imbalan Pasca Kerja	210	4%	179	4%	31	17%
Liabilitas Kontrak Jangka Panjang	631	12%	631	13%	0	0%
Liabilitas Sewa Jangka Panjang	518	10%	479	10%	39	8%
Liabilitas Jangka Panjang Lainnya	11	0%	70	1%	(59)	-84%
Jumlah Liabilitas Jangka Panjang	**5.115**	**100%**	**5.030**	**100%**	**85**	**2%**

Jumlah liabilitas jangka panjang mengalami kenaikan sebesar Rp85 miliar atau 2% dari tahun 2024 sebesar Rp5.030 miliar menjadi Rp5.115 miliar di tahun 2025. Kenaikan liabilitas jangka panjang umumnya disebabkan oleh meningkatnya liabilitas pajak tangguhan dan hutang bank yang telah dikurangi bagian jatuh tempo dalam satu tahun. Komposisi liabilitas jangka panjang mencerminkan struktur pendanaan yang relatif stabil dalam mendukung kebutuhan pembiayaan Perseroan.

Ekuitas

dalam Miliar Rupiah

Ekuitas	2025	2024	Pertumbuhan (Penurunan)	Persentase (%)
Modal Saham	401	401	0	0%
Tambahan Modal Disetor	1.366	1.301	65	5%
Saham Treasuri – 273.705.000 Saham	(96)	(113)	(17)	-15%
Saldo laba				
Ditentukan Penggunaannya	4	4	0	0%

Ekuitas	2025	2024	Pertumbuhan (Penurunan)	Persentase (%)
Tidak Ditentukan Penggunaannya	10.137	9.647	490	5%
Selisih Kurs Karena Penjabaran Laporan Keuangan	275	252	23	9%
Bagian Atas Perubahan Lainnya dari Ekuitas Entitas Anak	69	69	0	0%
Jumlah Ekuitas yang dapat Diatribusikan kepada Pemilik Entitas Induk	**12.156**	**11.563**	**593**	**5%**
Kepentingan NonPengendali	**3.454**	**3.061**	**393**	**13%**
Jumlah Ekuitas	**15.610**	**14.624**	**986**	**7%**

Jumlah ekuitas Perseroan mengalami peningkatan sebesar Rp986 miliar atau 7%, dari sebesar Rp14.624 miliar pada tahun 2024 menjadi Rp15.610 miliar pada tahun 2025. Kenaikan ekuitas utamanya disebabkan oleh pertumbuhan saldo laba yang tidak ditentukan penggunaannya, serta kontribusi dari kepentingan non-pengendali, yang mencerminkan penguatan struktur permodalan Perseroan seiring dengan kinerja usaha yang positif.

Saldo laba yang ditentukannya penggunaannya tercatat sebesar Rp4 miliar, sedangkan laba yang tidak ditentukan penggunaannya tercatat sebesar Rp10.137 miliar, menunjukkan kapasitas internal Perseroan yang memadai untuk mendukung pembiayaan pertumbuhan dan pengembangan usaha ke depan.

Laporan Laba (Rugi) dan Penghasilan Komprehensif Lain

dalam Miliar Rupiah

Laporan Laba Rugi	2025	2024	Pertumbuhan (Penurunan)	Persentase (%)
Penjualan dan Pendapatan	46.018	38.729	7.289	19%
Beban Pokok Penjualan dan Pendapatan	(41.920)	(35.220)	6.700	19%
Laba Bruto	4.098	3.509	589	17%
Beban Usaha	(1.059)	(975)	85	9%
Beban Umum dan Administrasi	(961)	(873)	88	10%
Beban Penjualan	(98)	(101)	(3)	-3%
Pendapatan (Beban) Usaha Lainnya				
Laba Atas Penjualan/Pengalihan Aset Tetap Neto	3	4	(1)	-28%
Laba (Rugi) Selisih Kurs Neto	15	14	1	8%
Pendapatan Usaha Lainnya	28	27	1	4%
Laba Usaha	**3.084**	**2.578**	**505**	**20%**
Penghasilan Keuangan	291	332	(42)	-13%
Pajak Final Terkait Penghasilan keuangan	(45)	(54)	(8)	-15%
Beban Keuangan	(74)	(65)	(9)	-14%
Bagian Atas Laba Entitas Asosiasi	52	47	6	11%
Laba Sebelum Pajak Final dan Pajak Penghasilan	**3.308**	**2.839**	**469**	**17%**
Pajak Final	(25)	(27)	(2)	-7%
Laba Sebelum Pajak Penghasilan	3.282	2.812	470	17%

Laporan Laba Rugi	2025	2024	Pertumbuhan (Penurunan)	Persentase (%)
Pajak Penghasilan Neto	(459)	(413)	46	11%
Laba Neto Tahun Berjalan	**2.823**	**2.399**	**424**	**18%**
Selisih Kurs Karena Penjabaran Laporan Keuangan	48	50	(2)	-3%
Keuntungan (Kerugian) Aktuarial atas Imbalan Pasca Kerja	(6)	4	(11)	-250%
Pajak Tangguhan Terkait	2	(1)	3	265%
Penghasilan (Rugi) Komprehensif Lain Tahun Berjalan Setelah Pajak	43	53	(10)	-19%
Jumlah Penghasilan Komprehensif Tahun Berjalan	**2.867**	**2.452**	**415**	**17%**
Laba Tahun Berjalan yang dapat Diatribusikan Kepada:				
Pemilik Entitas Induk	2.473	2.225	248	11%
Kepentingan NonPengendali	351	174	177	102%
Laba Neto Tahun Berjalan	**2.823**	**2.399**	**424**	**18%**
Jumlah Penghasilan Komprehensif Tahun Berjalan yang dapat Diatribusikan Kepada:				
Pemilik Entitas Induk	2.491	2.254	237	11%
Kepentingan NonPengendali	376	199	177	89%
Jumlah Penghasilan Komprehensif Tahun Berjalan	**2.867**	**2.452**	**415**	**17%**
Laba Per Saham yang Diatribusikan kepada Pemilik Entitas Induk Dasar (Dalam Rupiah Penuh)	125,24	112,73	12,51	11%

Penjualan dan Pendapatan

dalam Miliar Rupiah

Penjualan dan Pendapatan	2025		2024		Pertumbuhan (Penurunan)	Persentase (%)
	Nominal	Kontribusi (%)	Nominal	Kontribusi (%)		
Perdagangan dan Distribusi						
BBM	34.013	74%	28.934	75%	5.079	18%
Kimia Dasar	7.301	16%	6.598	17%	703	11%
Sub Jumlah	41.314	90%	**35.532**	**92%**	**5.782**	**16%**
Pabrikan						
Pabrikan Pihak Ketiga Adhesive	464	1%	652	2%	(187)	-29%
Sub Jumlah	464	1%	**652**	**2%**	**(187)**	**-29%**
Jasa Logistik						
Operasi Pelabuhan dan Transportasi	1.064	2%	813	2%	251	31%
Penyewaan Tangki Penyimpanan	332	1%	289	1%	43	15%
Lain-Lain	103	0%	63	0%	40	63%
Sub Jumlah	1.499	3%	**1.165**	**3%**	**334**	**29%**
Tanah Kawasan Industri	2.741	6%	1.381	4%	1.361	99%
Jumlah Penjualan dan Pendapatan	46.018	100%	**38.729**	**100%**	**7.289**	**19%**

Hingga akhir tahun 2025, Perseroan mencatat pendapatan sebesar Rp46.018 miliar, mengalami kenaikan sebesar Rp7.289 miliar atau 19% dibandingkan tahun 2024 sebesar Rp38.729 miliar. Faktor utama yang mendorong peningkatan pendapatan adalah kinerja stabil dari segmen perdagangan dan distribusi serta pertumbuhan signifikan pada segmen kawasan industri, khususnya dari penjualan lahan dan pendapatan utilitas yang semakin berkontribusi terhadap total pendapatan Perseroan. Perkembangan ini mencerminkan keberhasilan strategi diversifikasi sumber pendapatan serta penguatan kontribusi pendapatan berulang (*recurring income*) dari kawasan industri.

Pembahasan lebih lengkap mengenai penjualan dan pendapatan tiap segmen usaha terdapat pada Tinjauan Operasional dalam Bab Analisis Manajemen dan Bisnis Laporan Tahunan ini.

Beban Pokok Penjualan dan Pendapatan

dalam Miliar Rupiah

Beban Pokok Penjualan dan Pendapatan	2025		2024		Pertumbuhan (Penurunan)	Persentase (%)
	Nominal	Kontribusi (%)	Nominal	Kontribusi (%)		
Perdagangan dan Distribusi	38.310	91%	32.903	93%	5.407	16%
Pabrikan	256	1%	356	1%	(100)	-28%
Jasa Logistik	1.449	3%	1.178	3%	271	23%
Tanah Kawasan Industri	1.905	5%	783	2%	1.122	143%
Jumlah Beban Pokok Penjualan dan Pendapatan	**41.920**	**100%**	**35.220**	**100%**	**6.700**	**19%**

Per 31 Desember 2025, Perseroan mencatat beban pokok penjualan dan pendapatan sebesar Rp41.920 miliar, naik sebesar Rp6.700 miliar atau 19% dibandingkan posisi per 31 Desember 2024 sebesar Rp35.220 miliar. Peningkatan ini terutama didorong oleh pertumbuhan volume penjualan dan kenaikan harga minyak dunia pada segmen perdagangan dan distribusi, serta peningkatan aktivitas pada kawasan industri yang turut mendorong kenaikan beban pokok secara keseluruhan.

Laba Bruto

dalam Miliar Rupiah

Laba Bruto	2025		2024		Pertumbuhan (Penurunan)	Persentase (%)
	Nominal	Kontribusi (%)	Nominal	Kontribusi (%)		
Perdagangan dan Distribusi	3.004	73%	2.629	75%	375	14%
Pabrikan	208	5%	296	8%	(88)	-30%
Jasa Logistik	50	1%	(13)	0%	62	N/M
Tanah Kawasan Industri	836	20%	597	17%	239	40%
Jumlah Laba Bruto	**4.098**	**100%**	**3.509**	**100%**	**589**	**17%**

Perseroan mencatat kenaikan laba bruto sebesar Rp589 miliar atau 17% dari jumlah pada tahun 2024 sebesar Rp3.509 miliar menjadi sebesar Rp4.098 miliar pada tahun 2025. Peningkatan ini utamanya didorong oleh pertumbuhan pendapatan yang solid, khususnya dari kenaikan laba bruto sebesar 14% dari segmen perdagangan dan distribusi serta kenaikan laba 40% dari kawasan industri, yang secara agregat mampu mengimbangi kenaikan beban pokok penjualan dan pendapatan dan menjaga margin Perseroan.

Beban Usaha

dalam Miliar Rupiah

Beban Usaha	2025		2024		Pertumbuhan (Penurunan)	Persentase (%)
	Nominal	Kontribusi (%)	Nominal	Kontribusi (%)		
Beban Umum dan Administrasi						
Gaji, Upah dan Kesejahteraan Karyawan	597	56%	593	61%	3	1%

Beban Usaha	2025		2024		Pertumbuhan (Penurunan)	Persentase (%)
	Nominal	Kontribusi (%)	Nominal	Kontribusi (%)		
Cadangan Penurunan Nilai Kerugian atas Piutang Usaha	21	2%	7	1%	14	200%
Perjalanan Dinas dan Transportasi	45	4%	40	4%	4	11%
Beban Operasional Kantor	103	10%	54	5%	49	91%
Penyusutan	45	4%	41	4%	4	10%
Penyusutan dan Amortisasi Aset Hak Guna	2,6	0%	3,2	0%	(0,6)	-18%
Prasarana dan Telekomunikasi	16	2%	12	1%	4	34%
Biaya Profesional	33	3%	40	4%	(7)	-18%
Sewa Kantor	9	1%	8	1%	1	9%
Perbaikan dan Pemeliharaan	10	1%	9	1%	1	11%
Pajak dan Perizinan	26	2%	19	2%	7	38%
Biaya Bank dan Administrasi	2,0	0%	1,5	0%	0,5	33%
Asuransi	6	1%	5	0%	1	20%
Perlengkapan Kantor	2,8	0%	2,78	0%	0,02	1,3%
Lain-lain	44	4%	38	4%	6	16%
Sub Jumlah	**961**	**91%**	**873**	**89%**	**88**	**10%**
Beban Penjualan						
Transportasi	14	1%	18	2%	(5)	-25%
Perjamuan	4,0	0%	4,3	0%	(0,3)	-6,2%
Penyusutan	1	0%	1	0%	0	0%
Iklan dan Promosi	17	2%	18	6%	(1)	-6%
Lain-lain	63	6%	60	6%	(3)	5%
Sub Jumlah	**98**	**9%**	**101**	**11%**	**(3)**	**-3%**
Jumlah Beban Usaha	**1.059**	**100%**	**975**	**100%**	**85**	**9%**

Beban usaha pada tahun 2025 tercatat sebesar Rp1.059 miliar yang terdiri dari beban umum dan administrasi sebesar Rp961 miliar dan beban penjualan sebesar Rp98 miliar. Jumlah beban usaha mengalami peningkatan sebesar Rp85 miliar atau 9% dibandingkan tahun 2024 sebesar Rp975 miliar. Kenaikan beban usaha utamanya disebabkan oleh peningkatan beban umum dan administrasi yang bersumber dari beban operasional kantor serta cadangan penurunan nilai kerugian atas piutang usaha seiring dengan meningkatnya skala kegiatan operasional Perseroan.

Laba (Rugi) Selisih Kurs

Perseroan mencatat laba selisih kurs pada tahun 2025 sebesar Rp15 miliar, naik sebesar Rp1 miliar atau 7% dibandingkan tahun sebelumnya untung sebesar Rp14 miliar. Hal ini terutama disebabkan oleh volatilitas pergerakan nilai tukar Rupiah terhadap Dolar AS sepanjang tahun, yang berada dalam kisaran Rp16.200–Rp16.700 per USD dan berdampak pada penyesuaian nilai aset dan liabilitas moneter dalam mata uang asing. Perseroan tetap menerapkan kebijakan lindung nilai (hedging) untuk memitigasi risiko fluktuasi nilai tukar.

Laba Usaha

Perseroan mampu menjaga tingkat profitabilitas yang tercermin dari capaian laba usaha sebesar Rp3.084 miliar, naik sebesar Rp506 miliar atau 20% dibandingkan tahun 2024 yang mencapai Rp2.578 miliar. Hal ini terutama disebabkan oleh optimalisasi kinerja operasional di seluruh segmen usaha, serta disiplin pengelolaan biaya yang berkontribusi terhadap penguatan margin usaha.

Beban Keuangan

Pada tahun 2025, terdapat penurunan beban keuangan sebesar Rp11 miliar atau 13% dari jumlah tahun sebelumnya sebesar Rp85 miliar menjadi sebesar Rp74 miliar pada tahun 2025. Penurunan ini terutama disebabkan oleh optimalisasi penggunaan pinjaman serta penurunan beban bunga, seiring dengan posisi kas yang kuat dan pengelolaan utang yang lebih efisien.

Manfaat (Beban) Pajak

Beban pajak neto dan final pada tahun 2025 sebesar Rp484 miliar, mengalami kenaikan sebesar Rp45 miliar atau 10% dibandingkan tahun 2024 yang mencapai Rp439 miliar. Peningkatan ini terutama sejalan dengan pertumbuhan laba Perseroan, yang berdampak pada kenaikan beban pajak penghasilan serta pajak final.

Pendapatan Komprehensif Lain

dalam Miliar Rupiah

Pendapatan Komprehensif Lain	2025		2024		Pertumbuhan (Penurunan)	Persentase (%)
	Nominal	Kontribusi (%)	Nominal	Kontribusi (%)		
Selisih Kurs karena Penjabaran Laporan Keuangan	48	109%	50	94%	(2)	-4%
Keuntungan (Kerugian) Aktuarial atas Imbalan Pasca Kerja	(6)	-14%	4	8%	(10)	-250%
Pajak Tangguhan Terkait	2	5%	(1)	2%	3	300%
Penghasilan (Rugi) Komprehensif Lain Tahun Berjalan Setelah Pajak	**43**	**100%**	**53**	**100%**	**(10)**	**-19%**

Pada tahun 2025, Perseroan mencatatkan pendapatan komprehensif lain yang direklasifikasi untuk tahun mendatang sebesar Rp43 miliar, dibandingkan dengan tahun 2024 yang mencatat untung sebesar Rp53 miliar.

Laba Komprehensif Tahun Berjalan

dalam Miliar Rupiah

Laba Komprehensif Tahun Berjalan	2025		2024		Pertumbuhan (Penurunan)	Persentase (%)
	Nominal	Kontribusi (%)	Nominal	Kontribusi (%)		
Laba Neto Tahun Berjalan	2.823	98%	2.399	98%	424	18%
Penghasilan (Rugi) Komprehensif Lain Tahun Berjalan Setelah Pajak	43	2%	53	2%	(10)	-19%
Jumlah Laba Komprehensif Tahun Berjalan	**2.867**	**100%**	**2.452**	**100%**	**415**	**17%**

Secara konsolidasian, Perseroan mencatat laba komprehensif tahun berjalan sebesar Rp2.867 miliar, naik sebesar Rp415 miliar atau 17% dibandingkan tahun 2024 yang mencapai Rp2.452 miliar. Peningkatan ini terutama didorong oleh pertumbuhan laba tahun berjalan, meskipun sebagian teredam oleh penurunan penghasilan komprehensif lain, khususnya dari selisih kurs penjabaran laporan keuangan serta perubahan pada kerugian aktuarial atas imbalan kerja.

Laba Tahun Berjalan yang dapat Diatribusikan kepada Pemilik Entitas Induk

Per 31 Desember 2025, laba tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk adalah sebesar Rp2.473 miliar dengan marjin laba neto di angka 5,4%. Pertumbuhan ini didukung oleh meningkatnya aktivitas bisnis kawasan industri dan utilitas, serta kinerja yang stabil pada segmen perdagangan dan distribusi.

Laporan Arus Kas Konsolidasian

dalam Miliar Rupiah

Laporan Arus Kas	2025	2024	Pertumbuhan (Penurunan)	Persentase (%)
Kas Neto yang Diperoleh dari Aktivitas Operasi	3.941	1.347	2.594	193%
Kas Neto yang Digunakan Untuk Aktivitas Investasi	(1.309)	(1.173)	136	12%

Laporan Arus Kas	2025	2024	Pertumbuhan (Penurunan)	Persentase (%)
Kas Neto yang Digunakan Untuk Aktivitas Pendanaan	(1.689)	(1.470)	219	15%
Kenaikan / (Penurunan) Neto Kas dan Setara Kas	943	(1.296)	2.239	173%
Dampak Perubahan Selisih Kurs	96	127	(31)	-25%
Kas dan Setara Kas Awal Tahun	5.366	6.536	(1.170)	-18%
Kas dan Setara Kas Akhir Tahun	**6.404**	**5.366**	**1.038**	**19%**

Kas dan Setara Kas
Perseroan membukukan besaran kas dan setara kas pada akhir tahun 2025 sebesar Rp6.404 miliar, naik sebesar Rp1.038 miliar atau 19% dibandingkan tahun 2024 yang mencapai Rp5.366 miliar. Peningkatan ini terutama didorong oleh kuatnya arus kas dari aktivitas operasi yang berasal dari penerimaan kas pelanggan, dukungan arus kas pendanaan melalui penambahan utang bank jangka pendek, serta meningkatnya aktivitas investasi yang mencerminkan pengelolaan penempatan dana pada aset keuangan.

Arus Kas dari Aktivitas Operasi
Pada tahun 2025, arus kas bersih yang diperoleh dari aktivitas operasi tercatat sebesar Rp3.941 miliar, mengalami peningkatan sebesar Rp2.594 miliar atau 193% dibandingkan tahun 2024 sebesar Rp1.347 miliar. Peningkatan ini terutama didorong oleh kenaikan penerimaan kas dari pelanggan seiring dengan pertumbuhan penjualan, meskipun diimbangi oleh peningkatan pembayaran kepada pemasok, beban usaha, serta pembayaran pajak penghasilan. Secara keseluruhan, arus kas operasi yang kuat mencerminkan kemampuan Perseroan dalam menghasilkan kas dari kegiatan inti usaha dan mendukung pendanaan aktivitas investasi serta dividen.

Arus Kas dari Aktivitas Investasi
Perseroan mencatatkan kas bersih yang digunakan untuk aktivitas investasi pada tahun 2025 sebesar Rp1.309 miliar, naik sebesar Rp136 miliar atau 12% dibandingkan tahun 2024 yang mencapai Rp1.173 miliar. Arus kas keluar terutama berasal dari perolehan aset tetap untuk pengembangan infrastruktur operasional serta investasi pada aset keuangan. Di sisi lain, Perseroan mencatat arus kas masuk dari divestasi saham entitas asosiasi dan penerimaan dividen. Secara keseluruhan, aktivitas investasi mencerminkan fokus Perseroan pada penguatan kapasitas usaha jangka panjang yang dilakukan secara selektif dan disiplin.

Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan
Kas bersih yang digunakan dari aktivitas pendanaan pada tahun 2025 sebesar Rp1.689 miliar, naik sebesar Rp219 miliar atau 15% dibandingkan tahun 2024 sebesar Rp1.470 miliar, seiring dengan meningkatnya kebutuhan modal kerja, pengembangan usaha, serta pembayaran dividen tunai. Pendanaan dilakukan secara selektif melalui penambahan pinjaman bank jangka pendek dan jangka panjang, yang diimbangi dengan pembayaran kembali pinjaman serta kewajiban sewa.

Secara keseluruhan, kebijakan pendanaan Perseroan tetap menjaga keseimbangan antara pertumbuhan usaha, pengembalian kepada pemegang saham, dan posisi likuiditas yang kuat, tercermin dari posisi net cash Perseroan.

Kemampuan **Membayar Utang**

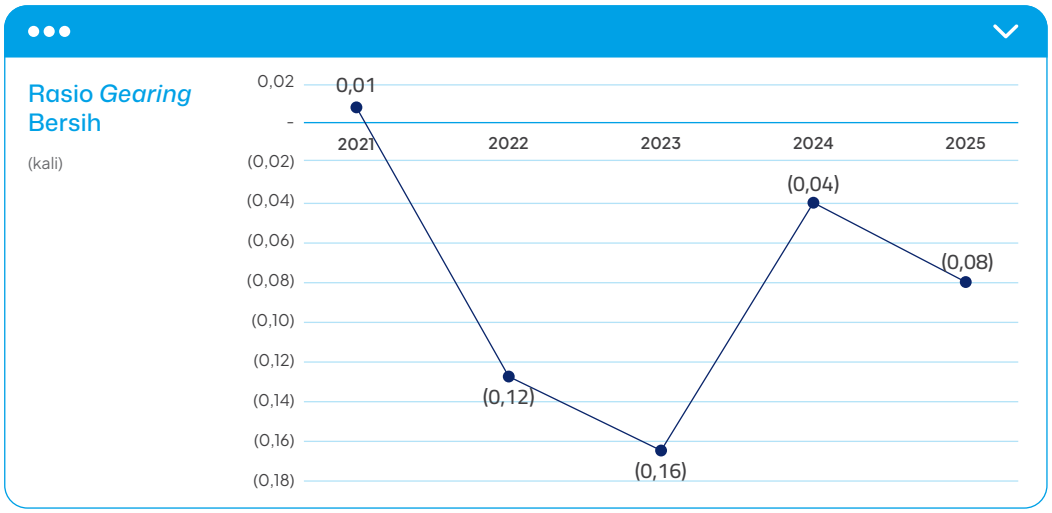
Kemampuan pemenuhan kewajiban utang dievaluasi melalui pemantauan sejumlah indikator keuangan utama, antara lain rasio *gearing* bersih, rasio liabilitas terhadap total aset, serta rasio EBITDA terhadap utang berbunga. Pendekatan ini memungkinkan pengelolaan struktur permodalan yang terukur guna menjaga stabilitas dan ketahanan keuangan.

Sebagai bagian dari upaya mitigasi risiko, diterapkan pengelolaan kas yang disiplin, peningkatan efisiensi biaya, serta diversifikasi sumber pendanaan. Langkah-langkah tersebut bertujuan untuk menjaga likuiditas yang memadai sekaligus mendukung kesinambungan dan pertumbuhan usaha dalam jangka panjang.

Rasio *Gearing* Bersih

Rasio *gearing* bersih Perseroan pada tahun 2025 tercatat negatif mencerminkan kuatnya posisi kas bersih dalam mendukung pemenuhan kewajiban keuangan dan modal kerja. Posisi kas bersih ini memberikan fleksibilitas keuangan yang memadai bagi Perseroan dalam menghadapi dinamika bisnis, sekaligus mendukung pendanaan operasional dan investasi tanpa ketergantungan berlebih pada sumber pendanaan eksternal.

Konsistensi rasio liabilitas dari tahun ke tahun mencerminkan stabilitas struktur permodalan dan kesehatan keuangan Perseroan. Struktur permodalan yang terjaga tersebut memungkinkan Perseroan untuk mengelola risiko likuiditas dan risiko pembiayaan secara *prudent*, serta mempertahankan kapasitas pendanaan yang kuat guna mendukung strategi pertumbuhan jangka panjang.



Rasio Liabilitas terhadap Jumlah Aset

Sepanjang tahun 2025, liabilitas membiayai sekitar 57,3% dari aset Perseroan atau mengalami peningkatan sebanyak 1,48% dibandingkan tahun 2024. Peningkatan tersebut sejalan dengan kenaikan aktivitas operasional dan kebutuhan pendanaan usaha yang masih berada dalam batas tingkat *leverage* yang terkelola. Konsistensi rasio liabilitas yang stabil mencerminkan disiplin dalam pengelolaan keuangan. Dengan dukungan basis aset yang kuat, Perseroan mampu memenuhi kewajiban secara berkelanjutan serta mempertahankan struktur keuangan yang sehat.

Rasio EBITDA terhadap Hutang Berbunga

Rasio EBITDA terhadap hutang berbunga pada tahun 2025 tercatat sebanyak 0,72 kali, lebih besar dibandingkan pada tahun 2024 sebesar 0,65 kali. Peningkatan rasio ini mencerminkan kapasitas Perseroan dalam menghasilkan arus kas operasional relatif terhadap tingkat utang berbunga. Kekuatan ekuitas, penerapan manajemen keuangan yang *prudent*, serta proyeksi pendapatan yang positif menjadi fondasi bagi Perseroan dalam menjaga kemampuan pemenuhan kewajiban keuangan dan stabilitas struktur permodalan.

Struktur Modal dan **Kebijakan Struktur Modal**

Rincian Struktur Modal

Perseroan mengelola struktur modal secara disiplin dan berkelanjutan untuk memastikan ketahanan keuangan serta fleksibilitas dalam mendukung strategi pertumbuhan jangka panjang. Komposisi liabilitas jangka panjang dan ekuitas yang membentuk struktur modal dioptimalkan dengan mempertimbangkan profil risiko, efisiensi biaya pendanaan, serta kemampuan menghasilkan arus kas yang stabil.

Pada tahun 2025, Perseroan mencatat jumlah kontribusi ekuitas terhadap struktur modal sebesar Rp15.610 miliar, naik sebesar 7%. Jumlah sumber dana jangka panjang tahun 2025 tercatat sebesar Rp20.725 miliar, mengalami peningkatan sebesar Rp1.071 miliar atau 5% dibandingkan tahun 2024 sebesar Rp19.654 miliar, yang mencerminkan penguatan kapasitas pendanaan jangka panjang Perseroan.

dalam Miliar Rupiah

Struktur Modal	2025		2024		Pertumbuhan (Penurunan)	Persentase (%)
	Nominal	Kontribusi (%)	Nominal	Kontribusi (%)		
Liabilitas Jangka Panjang	5.115	25%	5.030	26%	85	2%
Ekuitas	15.610	75%	14.624	74%	986	7%
Jumlah Sumber Dana Jangka Panjang	20.725	100%	19.654	100%	1.071	5%

Kebijakan Manajemen atas Struktur Modal

Perseroan secara berkesinambungan mengelola struktur permodalan guna memastikan keberlangsungan usaha serta mengoptimalkan penciptaan nilai bagi pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya. Kebijakan ini diarahkan untuk menjaga keseimbangan yang optimal antara tingkat profitabilitas dan risiko keuangan, sekaligus mengelola biaya modal secara efisien.

Untuk mendukung pendanaan belanja modal dan pengembangan proyek, Perseroan memprioritaskan pendanaan dari kas internal dengan tetap menjaga fleksibilitas pembiayaan melalui liabilitas jangka panjang atau instrumen pendanaan lainnya. Pengelolaan permodalan ini diarahkan untuk mempertahankan struktur permodalan yang sehat sekaligus menjaga tingkat pengembalian atas ekuitas (*Return on Equity*/ROE) yang berkelanjutan sebagai bagian dari penciptaan nilai jangka panjang bagi pemegang saham.

Dasar Pemilihan Kebijakan Manajemen atas Struktur Modal

Kebijakan struktur modal Perseroan ditetapkan berdasarkan evaluasi menyeluruh terhadap stabilitas keuangan, efisiensi biaya modal, dan profil risiko. Perseroan menjaga harmoni antara penggunaan ekuitas dan utang untuk memastikan likuiditas yang memadai, menjaga tingkat *leverage* yang optimal, serta mengurangi risiko keuangan jangka panjang. Faktor eksternal seperti kondisi ekonomi, volatilitas suku bunga, serta akses terhadap sumber pendanaan diperhitungkan secara cermat dalam pengelolaan struktur modal guna menjaga fleksibilitas keuangan dan ketahanan usaha.

Tujuan pengelolaan struktur modal adalah untuk menciptakan nilai tambah yang berkelanjutan bagi pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya. Komitmen Perseroan dalam mengelola struktur modal terus ditingkatkan agar dapat mempertahankan rasio keuangan yang sehat dan memastikan tingkat pengembalian yang kompetitif. Dengan pendekatan tersebut, Perseroan dapat mendorong pertumbuhan usaha, meningkatkan daya saing, serta menjaga kepercayaan pasar terhadap kinerja keuangan yang solid.

Ikatan Material untuk **Investasi Barang Modal**

Investasi barang modal (*capital expenditure*) merupakan pengeluaran dana untuk perolehan atau penambahan aset tetap yang diharapkan memberikan manfaat ekonomi di masa depan. Perseroan mengalokasikan investasi barang modal secara selektif dan strategis guna mendukung pertumbuhan usaha serta meningkatkan efisiensi operasional. Sepanjang tahun 2025, Perseroan dan Entitas Anak tidak memiliki komitmen investasi barang modal yang bersifat material, yaitu yang melebihi 20% dari total ekuitas.

Realisasi Investasi **Barang Modal**

Sepanjang tahun 2025, Perseroan merealisasikan investasi barang modal sejumlah Rp897 juta, turun sebesar Rp369 miliar atau 29% jika dibandingkan tahun 2024 sebesar Rp1.266 miliar, yang terutama ditujukan untuk mendukung operasional Perseroan. Detail besaran masing-masing realisasi investasi barang modal disajikan pada tabel berikut:

Jenis Investasi	Tujuan Investasi	Nilai Investasi (Rp Miliar)
Hak atas Tanah	Pendukung Operasional	14
Bangunan, Dermaga, Gudang dan Tangki Penyimpanan	Pendukung Operasional	44
Mesin dan Peralatan	Pendukung Kapasitas Infrastruktur	38
Peralatan Gudang dan Peralatan Pembongkaran di Pelabuhan	Pendukung Kapasitas Infrastruktur	1
Kendaraan	Peningkatan Kapasitas Armada	13
Pengembangan Gedung yang Disewa	Pendukung Operasional	1
Renovasi Gedung	Pendukung Operasional	2
Peralatan Kantor	Pendukung Operasional	5
Kapal	Peningkatan Kapasitas Armada	5
Aset dalam Penyelesaian	Konstruksi Fasilitas Kapal dan Tangki	774
Jumlah Investasi		**897**

Target dan **Realisasi 2025**

Tahun 2025 mencerminkan keberlanjutan pertumbuhan Perseroan yang berkesinambungan, seiring dengan penguatan keunggulan operasional di seluruh lini usaha. Perseroan menetapkan target pertumbuhan laba neto sebesar 8% - 15%, yang didorong oleh pemulihan kinerja di seluruh segmen usaha, ketahanan operasional, serta realisasi investasi strategis. Hingga akhir tahun 2025, laba neto Perseroan tercatat sebesar Rp2.473 miliar, mencerminkan kemampuan Perseroan dalam menjaga kinerja yang solid di tengah dinamika industri.

Pada segmen perdagangan dan distribusi, AKR menunjukkan ketahanan kinerja di tengah tekanan ekonomi dan volatilitas harga komoditas global. Perseroan menetapkan target pertumbuhan laba bruto segmen perdagangan dan distribusi sebesar 5% - 8%, didorong oleh meningkatnya permintaan bahan kimia dasar dan produk BBM, khususnya di wilayah Indonesia Timur.

Laba bruto segmen perdagangan dan distribusi pada tahun 2025 tercatat sebesar Rp3.004 miliar, mencerminkan disiplin Perseroan dalam mengeksekusi strategi bisnis yang ditopang oleh infrastruktur logistik yang kuat serta pengelolaan modal kerja yang efisien. Seiring dengan percepatan agenda hilirisasi nasional, sektor padat moda dan pertambangan tetap menjadi basis pelanggan utama dalam distribusi BBM Perseroan.

Sejalan dengan pertumbuhan kinerja tersebut, Perseroan terus memperkuat basis pelanggan melalui perluasan jaringan distribusi BBM hingga wilayah 3T. Hingga akhir tahun 2025, Perseroan telah mengoperasikan sebanyak 72 SPBU yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia, memperluas akses energi sekaligus memperkuat kehadiran AKR di segmen energi ritel. Strategi ekspansi ini mendukung ketahanan energi nasional, sekaligus mendorong pertumbuhan permintaan yang berkelanjutan bagi segmen perdagangan dan distribusi Perseroan.

Kinerja positif JIIPE pada tahun 2025 tercermin dari meningkatnya kontribusi pendapatan segmen kawasan industri yang berasal dari penjualan lahan serta penyediaan utilitas. Pendapatan segmen ini tercatat sebesar Rp2.742 miliar, didorong oleh lonjakan pada pendapatan utilitas yang meningkat hingga 129%, serta realisasi monetisasi lahan dan sewa yang tetap menunjukkan pertumbuhan sekitar 107%. Seiring dengan mulai beroperasinya *tenant* utama secara penuh dan meningkatnya kapasitas produksi di kawasan, pendapatan berulang dari bisnis utilitas semakin terbentuk dan memperkuat kualitas pendapatan JIIPE.

Proyeksi 2026

Tahun 2026, perekonomian Indonesia diperkirakan akan dihadapkan pada dinamika geopolitik global yang meningkat, termasuk eskalasi ketegangan di Timur Tengah. Kondisi tersebut berpotensi mendorong volatilitas harga energi global, khususnya minyak mentah, serta meningkatkan ketidakpastian rantai pasok energi dan tekanan inflasi di berbagai negara.

Dalam konteks ini, Indonesia diharapkan tetap mampu menjaga momentum pertumbuhan, yang ditopang oleh kuatnya konsumsi domestik, peningkatan investasi, serta keberlanjutan program hilirisasi industri dan transformasi struktural ekonomi. Stabilitas makroekonomi yang terjaga, inflasi yang tetap terkendali, serta bauran kebijakan moneter dan fiskal yang responsif menjadi faktor kunci dalam menopang kinerja ekonomi. Bank Indonesia memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia berada dalam kisaran 4,9% – 5,7% pada tahun 2026.

Dalam rangka menjaga stabilitas nilai tukar rupiah di tengah meningkatnya tekanan eksternal, Bank Indonesia terus memperkuat bauran kebijakan stabilisasi, termasuk melalui intervensi di pasar *Non-Deliverable Forward* (NDF) baik *offshore* maupun domestik (DNDF), serta di pasar spot. Langkah ini dinilai efektif dalam meredam volatilitas nilai tukar dan menjaga ekspektasi pasar, sekaligus mendukung pencapaian sasaran inflasi sebesar 2,5 ± 1% pada tahun 2026, meskipun terdapat tekanan *imported inflation* akibat kenaikan harga energi global.

Di sisi lain, iklim investasi nasional diharapkan tetap kondusif yang didukung oleh keberlanjutan program prioritas Pemerintah, termasuk hilirisasi sumber daya alam. Upaya ini menjadi semakin relevan di tengah meningkatnya kebutuhan global terhadap keamanan pasokan energi dan bahan baku industri. Sejalan dengan hal tersebut, kawasan industri *Java Integrated Industrial and Port Estate* (JIIPE) berada pada posisi strategis untuk menangkap peluang pertumbuhan, khususnya dari relokasi industri dan pengembangan industri berbasis nilai tambah. Pengembangan sektor logam, bahan kimia, dan energi di kawasan ini diharapkan dapat meningkatkan produktivitas, memperkuat daya saing ekspor, serta memperluas basis industri nasional.

Sejalan dengan arah kebijakan Pemerintah dalam memperkuat ketahanan energi nasional di tengah ketidakpastian pasokan global, AKR memiliki peran strategis dalam mendukung keandalan distribusi energi domestik. Perseroan berada pada posisi yang kuat untuk mendukung implementasi program biodiesel B50 pada tahun 2026 sebagai kelanjutan dari program B40. Dengan jaringan distribusi bahan bakar yang luas, infrastruktur logistik yang terintegrasi, serta pengalaman panjang dalam pengelolaan rantai pasok energi, Perseroan berperan penting dalam memastikan ketersediaan dan penyaluran energi yang efisien dan andal di berbagai wilayah, termasuk kawasan industri dan daerah terpencil.

Dalam konteks meningkatnya volatilitas harga energi global, implementasi program B50 diharapkan tidak hanya dapat mengurangi ketergantungan terhadap impor solar, tetapi juga meningkatkan pemanfaatan energi domestik yang lebih berkelanjutan. Kapabilitas operasional Perseroan dalam distribusi bahan bakar menjadi faktor kunci dalam menjaga kesinambungan pasokan energi nasional, sekaligus mendukung stabilitas sektor industri yang sangat bergantung pada kepastian pasokan energi. Dengan demikian, AKR turut berkontribusi dalam memperkuat ketahanan energi nasional dan menjaga keberlangsungan aktivitas ekonomi di tengah tantangan global yang semakin kompleks.

Proyeksi Perusahaan 2026

AKR terus menggerakkan sinergi dan upayanya untuk menjaga ketahanan ekonomi dan industri di Indonesia pada tahun 2026. Melalui dukungan infrastruktur logistik yang efisien dan memadai, Perseroan akan memperkuat keandalan distribusi energi dan bahan kimia dasar, sekaligus mengoptimalkan pemanfaatan aset strategis di seluruh lini usaha. Dengan mengedepankan efisiensi operasional, pengembangan pendapatan berulang, serta disiplin pengelolaan keuangan, Perseroan memproyeksikan pertumbuhan yang berkelanjutan seiring dengan meningkatnya aktivitas industri, penguatan ekosistem hilirisasi nasional, dan berlanjutnya investasi strategis di kawasan industri JIIPE.

Pada tahun 2026, Perseroan memproyeksikan laba neto tumbuh sebesar 7–10% yang mencerminkan kelanjutan pertumbuhan pendapatan utilitas dan penjualan lahan yang meningkat dari segmen kawasan industri, serta ditopang oleh performa segmen perdagangan dan distribusi yang stabil.

Laba bruto segmen perdagangan dan distribusi diperkirakan akan tumbuh sebesar 4–6% yang didorong oleh aktifitas industri umum yang stabil, peningkatan aktifitas *pre-stripping* di sektor tambang dan penambahan jumlah SPBU retail yang beroperasi. Dalam kondisi *supply-shock* yang disebabkan konflik yang terjadi di selat Hormuz, Perusahaan berupaya menjaga rantai pasok logistik bahan bakar dan kimia dalam negeri berjalan dengan lancar dan menjaga kondisi modal kerja yang stabil ditengah ketidakpastian yang melanda.

Sementara itu, penjualan lahan di kawasan industri JIIPE diproyeksikan tercatat sebesar 90–100 hektare. Melalui pemasaran strategis dan keunggulan sebagai KEK terintegrasi, JIIPE optimis untuk menarik aliran investasi asing dan domestik. Meningkatnya operasional *smelter* serta industri utama lainnya diharapkan akan menumbuhkan permintaan layanan pelabuhan dan utilitas, yang berdampak positif pada pertumbuhan pendapatan berkelanjutan.

Program Kepemilikan Saham oleh **Karyawan dan Manajemen (MESOP)**

Perseroan kembali melaksanakan pengalihan saham hasil *buy back* melalui Program Kepemilikan Saham Manajemen dan Karyawan (Program MESOP) yang dilaksanakan secara bertahap dalam kurun waktu tiga tahun pada periode 2024 - 2026. Pelaksanaan Rencana pengalihan saham *buy back* Perseroan yang disampaikan melalui surat No.027/LAKRCS/2024 pada tanggal 20 Maret 2024.

Pelaksanaan Program MESOP telah disetujui oleh pemegang saham melalui RUPS Tahunan pada tanggal 29 April 2024. Pemegang saham menyetujui rencana pengalihan sebagian saham treasuri sejumlah 156.500.000 lembar saham atau sebesar 0,78% dari modal ditempatkan dan disetor penuh.

Manajemen dan karyawan kunci Perseroan memiliki hak opsi untuk membeli saham AKRA melalui program MESOP tersebut. Ketentuan persyaratan yang berhak membeli opsi saham telah dijelaskan pada bab Governansi Perusahaan dalam Laporan Tahunan ini.

Harga pelaksanaan program MESOP adalah senilai Rp499 per saham. Pada saat pelaksanaan hak opsi, peserta wajib membeli saham treasuri sesuai dengan jumlah saham MESOP yang dialokasikan bagi masing-masing peserta (sebagaimana diatur dalam perjanjian pemberian hak opsi) dengan harga pembayaran per saham sesuai dengan harga pelaksanaan.

MESOP	Tahap	Jumlah Opsi	Jumlah Opsi Saham yang Diberikan	Jumlah Opsi Saham yang Dieksekusi	Jumlah Opsi Saham yang Hangus	Harga Pelaksanaan (Rp)
2024	I (2024)	156.500.000	15.650.000	15.650.000	-	20,00
	II (2025)	140.850.000[1]	46.950.000	62.600.000[2]	-	20,00

Keterangan:
(1) sisa saham yang dialihkan kembali, setelah dikurangi opsi saham yang diberikan pada tahap I
(2) akumulasi jumlah opsi saham yang diberikan pada tahap I & II

Dari seluruh opsi sebanyak 156.500.000 lembar saham, Perseroan telah melaksanakan program MESOP sebanyak 62.600.000 lembar saham yang dilaksanakan pada 2–31 Agustus 2024 (Tahap I) dan 1–31 Agustus 2025 (Tahap II). Atas pelaksanaan Program MESOP tersebut, sisa saham yang akan dialihkan kembali adalah sebanyak 93.900.000 lembar saham.

Informasi dan Fakta Material setelah **Tanggal Laporan Akuntan**

Ketegangan Geopolitik di Timur Tengah
Ketegangan meningkat baru-baru ini pada akhir Februari 2026 dengan adanya serangan udara oleh Amerika Serikat dan Israel ke berbagai lokasi di kota di Iran, dan Iran menanggapinya saat ini, dengan Iran merespons melalui serangan rudal dan *drone* terhadap Israel serta berbagai pangkalan militer Amerika Serikat dan negara-negara sekutu AS di kawasan tersebut. Serangan tersebut telah menimbulkan berbagai tantangan secara global, khususnya gangguan terhadap pasokan minyak dan gas ke seluruh dunia akibat penutupan Selat Hormuz. Harga minyak telah meningkat secara signifikan sejak saat itu, termasuk biaya logistik. Seiring dengan situasi yang terus berkembang, dunia menghadapi berbagai faktor yang tidak pasti, ketidakpastian, serta kelangkaan pasokan energi.

Manajemen memantau secara ketat dampak terhadap operasionalnya, dan akan mengambil tindakan/strategi yang paling tepat dalam menghadapi berbagai kondisi, termasuk bersikap *prudent* dalam analisis kredit dengan berfokus pada kinerja pelanggan, serta berhati-hati dalam pengeluaran dan investasi.

Kelompok Usaha telah dan dapat terus menilai dampak dari ketegangan di kawasan tersebut terhadap operasional Kelompok Usaha. Dampak signifikan lebih lanjut dari konflik yang berkelanjutan, apabila ada, akan tercermin dalam laporan keuangan konsolidasian Kelompok Usaha pada periode berikutnya.









Prospek **Usaha**

Prospek Perdagangan & Distribusi BBM

Perseroan menjalankan strategi distribusi BBM yang terukur dan berkelanjutan untuk memperkuat penciptaan nilai jangka panjang bagi seluruh pemangku kepentingan. Penerapan skema penetapan harga berbasis formula yang mengacu pada MOPS memungkinkan Perseroan menjaga konsistensi harga sekaligus meningkatkan efisiensi operasional. Melalui mekanisme *passthrough*, eksposur terhadap volatilitas harga minyak global dan pergerakan nilai tukar dapat dikelola secara efektif, sehingga mendukung stabilitas kinerja usaha.

Memasuki tahun 2026, kinerja distribusi BBM pada segmen industri dan bisnis diperkirakan terus berkembang seiring meningkatnya aktivitas ekonomi nasional. Pertumbuhan ini didukung oleh akselerasi proyek hilirisasi mineral serta berbagai proyek strategis nasional, khususnya di kawasan Indonesia Timur. Dengan dukungan infrastruktur dan jaringan distribusi yang luas, Perseroan berada pada posisi strategis untuk berkontribusi dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan pembangunan yang berkelanjutan.

1. **Pertambangan**
   Untuk tahun 2026, pemerintah memperkirakan produksi batu bara nasional akan menurun dibanding tahun sebelumnya sebagai bagian dari upaya stabilisasi harga, dengan target produksi diperkirakan di bawah 700 juta ton. Meskipun demikian, konsumsi domestik diproyeksikan tetap kuat, terutama untuk sektor ketenagalistrikan dan industri hilir, sehingga kebutuhan energi tetap terjaga.

   Dalam hal ini, kebutuhan BBM untuk aktivitas *prestripping* dan operasional tambang diperkirakan tetap signifikan, seiring dengan keberlanjutan kegiatan produksi dan optimalisasi tambang yang ada. Selain itu, program hilirisasi pemerintah serta meningkatnya permintaan global terhadap material pendukung energi hijau mendorong pertumbuhan produksi mineral seperti nikel, bauksit, dan tembaga, yang turut meningkatkan kebutuhan distribusi BBM dan dukungan logistik energi, sehingga membuka peluang bagi Perseroan untuk memperkuat perannya di sektor pertambangan, yang juga akan meningkatkan kebutuhan distribusi BBM dan logistik energi.
2. ***Smelter***
   Mengutip data Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), hingga 2025 Indonesia telah memiliki 54 *smelter* nikel yang beroperasi, 38 *smelter* dalam tahap konstruksi, dan 45 *smelter* dalam tahap perencanaan. Kondisi ini mencerminkan percepatan hilirisasi mineral nasional yang mendorong meningkatnya kebutuhan energi. Strategi Perseroan diarahkan untuk mendukung pengembangan sektor hilirisasi melalui penyediaan dan distribusi BBM yang efisien guna memperkuat rantai nilai industri. Selain itu, peningkatan kapasitas *smelter* tembaga dan bauksit, sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020, turut menciptakan kebutuhan energi yang lebih besar.
3. **Perkebunan**
   Perseroan mendukung kebijakan mandatori biodiesel melalui perannya dalam penyediaan dan distribusi BBM serta energi campuran biodiesel ke pasar domestik. Peningkatan permintaan CPO untuk biodiesel turut memperkuat kebutuhan distribusi dan logistik energi yang andal, sehingga membuka peluang bagi Perseroan untuk memperluas peran dalam mendukung ketahanan energi nasional sekaligus menangkap peluang pertumbuhan di segmen energi terpadu.

   Peningkatan konsumsi minyak kelapa sawit mentah (CPO) domestik diproyeksikan meningkat pada 2026 seiring dengan implementasi kebijakan biodiesel nasional. Menurut Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI), total produksi 2025 berada di kisaran 56–57 juta ton dan diproyeksikan meningkat 4 – 5% pada tahun 2026. Program mandatori biodiesel B40 yang berlaku sejak 2025 dan rencana peningkatan ke B50 pada 2026 memperkuat permintaan CPO untuk kebutuhan energi. Penerapan B40 secara nasional pada 2025 menyerap sekitar 15,6 juta kiloliter biodiesel, setara dengan kira-kira 14 juta ton CPO.
4. **Pelayanan *Bunker***
   Perseroan merancang strategi untuk menangkap peluang dari meningkatnya permintaan BBM kapal, seiring dengan pertumbuhan industri logistik laut yang semakin pesat. Peningkatan aktivitas pelayaran, distribusi antarpulau, serta ekspansi jaringan logistik maritim mendorong kebutuhan BBM kapal yang lebih tinggi dan berkelanjutan. Selain itu, permintaan dari sektor perikanan dan pertambangan tetap menjadi kontributor penting, sejalan dengan meningkatnya mobilitas armada operasional di kedua sektor tersebut.

   Dukungan kebijakan Pemerintah dalam memperkuat konektivitas maritim, meningkatkan efisiensi rantai pasok nasional, serta pengawasan aktivitas kelautan dan kemudahan operasional bagi pelaku usaha, termasuk nelayan, turut menjadi katalis positif bagi pertumbuhan konsumsi BBM kapal. Dalam konteks ini, Perseroan berada pada posisi strategis untuk memastikan ketersediaan pasokan BBM yang andal dan tepat waktu, guna mendukung kelancaran operasional sektor logistik laut dan industri terkait.
5. **Pasar Umum**
   Ekspansi di sektor manufaktur, perdagangan, konstruksi, dan transportasi terus mendorong permintaan BBM yang didistribusikan oleh Perseroan. Peningkatan kebutuhan energi tersebut sejalan dengan kegiatan ekonomi di berbagai wilayah Indonesia, terutama pada pusat-pusat industri dan logistik. Dengan jaringan distribusi yang luas dan keandalan operasional yang terjaga, Perseroan berada pada posisi yang baik untuk menangkap pertumbuhan permintaan BBM dari pasar umum, sekaligus mendukung keberlanjutan aktivitas ekonomi nasional secara efisien dan berkesinambungan.
6. **Ritel**
   Pemerintah melalui Kementerian ESDM terus mendorong penyempurnaan tata kelola pasokan BBM ritel, termasuk melalui permintaan kepada pelaku usaha untuk melakukan kajian kebutuhan impor sebagai dasar penetapan kebijakan tahun 2026. Langkah ini diharapkan dapat meningkatkan kepastian pasokan serta memperkuat keandalan distribusi BBM secara nasional. Seiring dengan dinamika tersebut, terdapat pula perubahan perilaku pelanggan yang semakin mengedepankan kualitas bahan bakar, tercermin dari meningkatnya preferensi terhadap BBM dengan standar oktan yang lebih tinggi dan performa yang lebih baik.

   Pengembangan jaringan ritel menjadi salah satu faktor kunci dalam memperkuat posisi kompetitif Perseroan di segmen BBM ritel. Melalui kerja sama bp AKR, Perseroan telah mengoperasikan 72 SPBU di berbagai wilayah strategis di Indonesia yang menyediakan produk BBM berkualitas dengan RON 92 dan RON 95. Ke depan, Perseroan akan terus berfokus pada penguatan kepastian rantai pasok, optimalisasi pengelolaan kuota impor, serta peningkatan keandalan operasional SPBU. Di saat yang sama, ekspansi jaringan ritel akan terus dilakukan secara selektif untuk menjangkau basis pelanggan yang lebih luas, sejalan dengan tren peningkatan permintaan terhadap BBM berkualitas tinggi, sehingga mendukung pertumbuhan kinerja segmen ritel secara berkelanjutan pada tahun 2026.
7. **Bahan Bakar Penerbangan**
   Tahun 2026 dipandang sebagai periode transisi, di mana penyesuaian rantai pasok, optimalisasi infrastruktur penyimpanan, serta penguatan distribusi domestik menjadi faktor penting untuk menjaga keandalan pasokan avtur ke bandara-bandara nasional. Melalui PT Dirgantara Petroindo Raya yang merupakan kerja sama strategis AKR & Air bp, memiliki peluang untuk berperan dalam mendukung penyaluran bahan bakar penerbangan dari sumber produksi dalam negeri melalui layanan distribusi dan logistik energi yang terintegrasi.

Prospek Perdagangan & Distribusi Bahan Kimia Dasar

Segmen perdagangan dan distribusi bahan kimia dasar Perseroan diproyeksikan tetap memiliki prospek yang positif pada tahun 2026, seiring dengan permintaan yang relatif stabil dari berbagai industri pengolahan di Indonesia. Kebutuhan bahan kimia dasar diperkirakan tetap terjaga, didukung oleh keberlanjutan pengembangan fasilitas *smelter* serta industri hilir mineral. Meskipun terdapat rencana kebijakan Pemerintah untuk mengendalikan kuota produksi nikel sebagai bagian dari upaya menjaga keseimbangan harga dan keberlanjutan sumber daya, aktivitas hilirisasi tetap menjadi prioritas nasional. Hal ini diharapkan tetap mendorong permintaan bahan kimia industri, khususnya di kawasan Indonesia Timur yang merupakan salah satu pusat pertumbuhan industri berbasis mineral.

Di sisi lain, permintaan metanol dan bahan kimia pendukung lainnya diproyeksikan meningkat sejalan dengan kebijakan Pemerintah dalam memperkuat ketahanan energi melalui program biodiesel. Implementasi mandatori B40 yang direncanakan meningkat menuju B50 pada tahun 2026 berpotensi mendorong kebutuhan bahan kimia yang digunakan dalam proses produksi biofuel serta sektor hilir terkait. Perkembangan ini mencerminkan semakin kuatnya peran industri kimia dalam mendukung transisi energi dan pengembangan energi terbarukan di Indonesia.

Didukung oleh infrastruktur logistik yang luas, jaringan distribusi yang terintegrasi, serta basis pelanggan yang terdiversifikasi, Perseroan berada pada posisi yang solid untuk memanfaatkan peluang pertumbuhan melalui peningkatan volume penjualan dan perluasan penetrasi pasar. Keunggulan operasional ini juga memungkinkan Perseroan untuk mendukung kelancaran pasokan bahan kimia bagi berbagai sektor industri strategis.

Namun demikian, tantangan tetap perlu diantisipasi, termasuk potensi dampak kebijakan pengendalian produksi komoditas terhadap aktivitas industri hilir, serta dinamika harga bahan kimia global yang dipengaruhi oleh pergerakan harga energi dan kondisi pasar internasional. Oleh karena itu, pengelolaan pasokan yang efektif, fleksibilitas operasional, serta kemampuan dalam merespons perubahan pasar secara tepat waktu akan menjadi faktor kunci dalam menjaga kinerja dan keberlanjutan segmen usaha ini.

Prospek Pabrikan

Melalui Entitas Anak Perseroan, PT Arjuna Utama Kimia (Aruki), segmen manufaktur memiliki prospek yang membaik seiring pemulihan bertahap sektor properti dan konstruksi ringan pasca penyesuaian perdagangan global. Pemulihan tersebut mendorong kembali permintaan produk berbasis kayu dan kertas, termasuk panel, furnitur, dan material interior, yang secara langsung meningkatkan kebutuhan bahan perekat industri.

Di sisi ekspor, permintaan furnitur Indonesia ke pasar utama diproyeksikan tumbuh moderat pada 2026 seiring normalisasi rantai pasok dan perbaikan permintaan sektor perumahan global. Dengan kapasitas produksi yang memadai serta fokus pada efisiensi dan kualitas, Aruki berada pada posisi yang baik untuk menangkap peluang pemulihan permintaan domestik dan ekspor secara selektif.

Prospek Logistik

Sebagai bagian dari komitmen jangka panjang terhadap keberlanjutan usaha, Perseroan secara konsisten melakukan investasi pada armada kapal, truk, serta fasilitas logistik guna mendukung pertumbuhan pasar khususnya di kawasan Indonesia Timur. Hingga akhir tahun 2025, dengan pengoperasian 19 pelabuhan serta rencana ekspansi ke depan, Perseroan terus memperkuat posisi dan perannya dalam mendukung aktivitas logistik nasional.

1. **Tangki Penyimpanan & Transportasi BBM**
   Sektor pertambangan, yang merupakan basis pelanggan utama distribusi BBM Perseroan, terus menunjukkan dinamika pertumbuhan yang berkelanjutan. Hal ini didorong oleh tetap kuatnya investasi dan aktivitas produksi pada subsektor tertentu, khususnya yang terkait dengan proyek hilirisasi serta meningkatnya permintaan global terhadap mineral strategis. Di tengah upaya Pemerintah dalam memperkuat ketahanan energi nasional dan pembangunan cadangan energi strategis, kebutuhan akan distribusi BBM yang andal, stabil, dan berkelanjutan menjadi semakin krusial, terutama untuk mendukung kelangsungan operasional sektor pertambangan yang bersifat intensif energi.

   Sejalan dengan arah kebijakan tersebut, Perseroan terus memperkuat ketahanan rantai pasok melalui peningkatan kapasitas penyimpanan, optimalisasi jaringan distribusi, serta pengelolaan logistik yang terintegrasi guna memastikan ketersediaan energi di berbagai wilayah operasional, termasuk lokasi tambang yang terpencil. Upaya ini juga berkontribusi dalam mendukung keandalan cadangan energi nasional, dengan memastikan distribusi BBM dapat berjalan secara efisien dan tepat waktu.

Didukung oleh pengoperasian dan pengelolaan armada distribusi yang memadai, Perseroan mengoperasikan 250 unit truk tangki BBM dan kimia, serta 14 unit kapal jenis *Self Propelled Oil Barges* (SPOB). Kapabilitas ini memberikan fleksibilitas operasional yang tinggi serta memperkuat peran Perseroan dalam menjaga kesinambungan pasokan energi, sekaligus mendukung stabilitas aktivitas industri pertambangan dan sektor strategis lainnya.

2. **Jakarta Tank Terminal (JTT)**
   Untuk menjaga keandalan pasokan serta mengantisipasi fluktuasi permintaan, Perseroan menjalankan peran strategis melalui JTT sebagai simpul utama penyimpanan dan penyaluran BBM. Peran ini menjadi semakin penting seiring dengan arah kebijakan Pemerintah dalam memperkuat ketahanan energi nasional serta pengembangan cadangan energi strategis guna menjamin stabilitas pasokan dalam jangka panjang.

   Prospek pertumbuhan konsumsi BBM nasional ke depan tetap positif, didorong oleh peningkatan aktivitas industri, logistik, dan pertambangan, serta implementasi agenda hilirisasi dan mulai beroperasinya fasilitas industri berskala besar. Di tengah meningkatnya kebutuhan energi tersebut, keberadaan infrastruktur penyimpanan yang andal menjadi faktor kunci dalam menjaga kesinambungan distribusi dan mengurangi risiko gangguan pasokan.

   Sejalan dengan hal tersebut, kapasitas JTT yang strategis akan terus ditingkatkan, baik melalui ekspansi fasilitas maupun optimalisasi operasional, guna mendukung distribusi BBM khususnya di Pulau Jawa serta meningkatkan efisiensi dan ketahanan rantai pasok energi secara berkelanjutan.
3. **Curah dan Kontainer**
   PT Berlian Manyar Sejahtera (BMS) menjalankan peran strategis dalam pengelolaan Terminal Manyar di Pelabuhan JIIPE sebagai infrastruktur kepelabuhanan yang terintegrasi dengan kawasan industri besar. Dengan konsesi kepelabuhanan jangka panjang, BMS mendukung kelancaran arus barang curah dan *general cargo* melalui fasilitas dermaga yang beroperasi secara aktif. Sejalan dengan dinamika permintaan industri dan peningkatan aktivitas kawasan JIIPE, pengoptimalan utilisasi fasilitas ini menjadi bagian dari prospek pertumbuhan logistik Perseroan.

Prospek Kawasan Industri

KEK JIIPE memiliki keunggulan operasional yang mampu menarik investasi strategis dan memperkuat agenda hilirisasi industri, sehingga berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi baik di tingkat daerah maupun nasional. Dengan luas kawasan sekitar 3.000 hektare, JIIPE dirancang sebagai ekosistem industri terintegrasi yang mendukung konektivitas bisnis jangka panjang. Melalui tiga pilar utama, meliputi penjualan lahan, penyediaan utilitas, dan layanan pelabuhan, JIIPE memposisikan diri sebagai salah satu pusat industri terkemuka di Indonesia.

Pada tahun 2026, pendapatan kawasan industri ini diproyeksikan terus meningkat, seiring dengan optimalisasi pendapatan utilitas yang mulai terealisasi sejak meningkatnya operasional tenant utama pada tahun 2025. Terbentuknya ekosistem industri yang saling terintegrasi, mencakup pemurnian tembaga, industri kimia, kaca, serta pengembangan energi terbarukan menjadi pendorong pertumbuhan berkelanjutan pendapatan utilitas di kawasan.

Peresmian JIIPE sebagai pusat hilirisasi logam mulia oleh Presiden Republik Indonesia pada tahun 2025 menjadi katalis penting yang membuka peluang pertumbuhan usaha ke depan, seiring dengan meningkatnya aktivitas industri bernilai tambah di kawasan. Kehadiran *Precious Metal Refinery* mengadopsi teknologi ramah lingkungan, mendukung transisi hijau, dan memperluas peluang investasi di sektor berbasis logam mulia. Kondisi ini memperkuat prospek pertumbuhan JIIPE dalam jangka panjang, khususnya melalui peningkatan permintaan utilitas, layanan logistik, serta pendapatan berulang yang berkelanjutan.

Sebagai bagian dari upaya penguatan layanan, JIIPE terus melakukan pengembangan melalui penyederhanaan perizinan, penerapan sistem logistik berbasis digital, serta penguatan sistem keamanan kawasan. Berbagai inisiatif tersebut diharapkan dapat mendorong masuknya investasi serta meningkatkan pertumbuhan ekonomi regional. Untuk mendukung kelancaran operasional *tenant*, JIIPE juga telah meresmikan penguatan pasokan listrik bersama PLN dengan kapasitas 40 MVA.

Selain itu, pada Oktober 2025 JIIPE meluncurkan uji coba (*piloting*) *Auto Gate System* Bea Cukai di kawasan pabean. Penerapan sistem ini merupakan bagian dari inisiatif strategis untuk menjadikan JIIPE sebagai kawasan ekonomi khusus percontohan di Indonesia, dengan tujuan memperlancar arus barang serta meningkatkan efisiensi dan kecepatan proses logistik.

Dalam rangka meningkatkan kemudahan berinvestasi di Indonesia, BKMS bersama Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Jawa Timur resmi meluncurkan Unit Layanan Izin Tinggal dan Informasi Keimigrasian (ULITIK) pada November 2025. Ini merupakan unit layanan imigrasi pertama di Indonesia. Perseroan berharap dengan diresmikannya layanan imigrasi di JIIPE dapat memberikan kemudahan investor, para *tenant*, serta tenaga kerja asing untuk beraktivitas.

Ke depan, kontribusi dari segmen penjualan lahan, utilitas, dan pelabuhan diperkirakan akan menjadi sumber utama pendapatan berulang yang stabil, sekaligus memberikan dampak positif terhadap peningkatan profitabilitas Perseroan. Pendekatan ini mencerminkan komitmen Perseroan dalam menciptakan pertumbuhan ekonomi yang inklusif, berdaya saing, dan berkelanjutan.

Dividen

Kebijakan Dividen

Perseroan memiliki kebijakan dividen yang berorientasi pada penciptaan nilai berkelanjutan bagi pemegang saham, dengan secara konsisten membagikan dividen tunai setidaknya satu kali dalam setahun. Penetapan besaran dividen mempertimbangkan kinerja keuangan, kebutuhan pendanaan untuk pengembangan usaha, kondisi arus kas, prospek pertumbuhan, tingkat kesehatan Perseroan, serta tanpa mengurangi hak dari RUPS guna mendukung strategi jangka panjang.

Melalui kebijakan dividen, Perseroan berkomitmen untuk menjaga keseimbangan antara pemberian imbal hasil yang menarik bagi pemegang saham dan penguatan struktur permodalan guna mendukung keberlanjutan dan ekspansi bisnis AKR. Berdasarkan prospektus Penawaran Umum Perdana pada tahun 1994, besaran dividen ditetapkan minimal 30% dari laba neto tahun sebelumnya (jika laba melebihi Rp50 miliar).

Kronologi Pembagian Dividen

Berdasarkan RUPS Tahunan 2025 yang diselenggarakan pada 28 April 2025, pemegang saham menyetujui dan menetapkan pembagian dividen sebesar 88,77% dari laba tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk yang sebesar Rp2.225 miliar. Dengan demikian, total dividen untuk Tahun Buku 2024 ditetapkan sebesar Rp1.975 miliar atau setara dengan Rp100 per saham.

Dari jumlah tersebut, Perseroan telah membagikan dividen interim sebesar Rp987 miliar atau Rp50 per saham, sebagaimana ditetapkan dalam keputusan Rapat Direksi pada tanggal 23 Juli 2024. Selanjutnya, dividen final sebesar Rp987 miliar atau Rp50 per saham dibayarkan kepada seluruh pemegang saham pada tanggal 22 Mei 2025. Pembagian dividen berdasarkan jumlah saham yang beredar sebanyak 19.752.819.600 saham, setelah dikurangi saham tresuri sebanyak 320.655.000 saham.

Jadwal pembagian dividen tunai AKR untuk Tahun Buku 2024 sebagai berikut:

1. *Cum* dividen di Pasar Reguler dan Pasar Negosiasi tanggal 7 Mei 2025
2. *Ex* Dividen di Pasar Reguler dan Pasar Negosiasi tanggal 8 Mei 2025
3. *Cum* Dividen di Pasar Tunai tanggal 9 Mei 2025
4. *Ex* Dividen di Pasar Tunai tanggal 14 Mei 2025
5. *Recording Date* yang berhak atas Dividen tanggal 9 Mei 2025
6. Pembayaran Dividen tanggal 22 Mei 2025

Kronologi pembagian dividen sepanjang 2 (dua) tahun terakhir adalah sebagai berikut:

Tahun Buku	Laba Neto	Dividen	Dividen per Saham	*Payout Ratio*	Tanggal Pengumuman	Tanggal Pembayaran
2024	Rp2.225 miliar	Rp1.975 miliar	Rp100	88,77%	28 April 2025	22 Mei 2025
2023	Rp2.780 miliar	Rp2.467 miliar	Rp125	88,73%	29 April 2024	14 Mei 2024



Aspek Pemasaran

AKR adalah perusahaan logistik dan rantai pasok terintegrasi yang mengedepankan keunggulan operasional, jaringan distribusi yang luas, dan pemenuhan kebutuhan pelanggan di berbagai sektor industri. Strategi pemasaran Perseroan difokuskan pada penguatan nilai tambah di segmen bisnis utama, penciptaan manfaat langsung bagi para pemangku kepentingan, serta pembangunan warisan keberlanjutan jangka panjang. Dengan pengalaman yang luas di sektor energi, logistik, dan industri, Perseroan memposisikan diri sebagai mitra strategis yang mendukung keberlanjutan operasional pelanggan di tengah dinamika pasar yang terus berkembang.

Sejalan dengan perkembangan teknologi dan perubahan pola konsumsi, Perseroan menerapkan strategi pemasaran berbasis hubungan jangka panjang yang diperkuat melalui pemanfaatan data, optimalisasi kanal komunikasi dan sinergi antar unit usaha. Melalui strategi ini, Perseroan memperluas jangkauan pasar, memperkuat loyalitas pelanggan, dan mendorong pertumbuhan bisnis yang berkelanjutan. Informasi lengkap mengenai strategi pemasaran AKR berdasarkan bisnis utama diuraikan sebagai berikut:

Bahan Bakar Minyak
1. Penguatan pangsa pasar di segmen industri melalui perluasan penetrasi berbasis pengembangan infrastruktur fisik dan digital. Pendekatan ini mendukung peningkatan efisiensi distribusi serta kualitas layanan, sehingga memastikan ketersediaan pasokan BBM yang andal dengan struktur biaya yang kompetitif bagi pelanggan industri.
2. Optimalisasi pengembangan peluang pasar baru dengan memfokuskan ekspansi di wilayah Indonesia Timur serta segmen ritel melalui kerja sama strategis dengan bp. Inisiatif ini menghadirkan BBM berkualitas tinggi, produk pelumas, dan bahan bakar penerbangan, sekaligus menciptakan nilai tambah yang berkelanjutan bagi pelanggan dan pemangku kepentingan.

Kimia Dasar
Sebagai distributor utama Asahimas Chemical Group, strategi bisnis Perseroan mencakup:
1. Perluasan basis konsumen baru secara berkelanjutan sembari menjaga dan memperkuat hubungan jangka panjang dengan pelanggan eksisting melalui layanan yang andal dan bernilai tambah.
2. Menyediakan produk kimia dasar yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan sektor *smelter* yang berkembang pesat di Indonesia, sekaligus berkontribusi pada agenda hilirisasi mineral dan transformasi industri nasional.
3. Perseroan memastikan penawaran harga yang kompetitif dengan didukung penerapan *Service Level Agreement* (SLA) yang terukur dan akurat, sebagai wujud komitmen terhadap kepuasan dan kepercayaan pelanggan.
4. Meningkatkan kapasitas penyimpanan melalui pengembangan fasilitas tangki untuk mengakomodasi pertumbuhan kebutuhan pasar, sekaligus menjamin keberlanjutan dan kelancaran pasokan dalam jangka panjang.

Pabrikan Perekat Kayu
1. Menawarkan harga yang kompetitif bagi pelanggan berskala besar dengan potensi pertumbuhan tinggi guna membangun kemitraan jangka panjang yang saling menguntungkan.
2. Menerapkan strategi pemasaran proaktif untuk menjangkau konsumen baru serta memperluas basis pelanggan secara berkelanjutan.
3. Memperluas jaringan distribusi ke pasar internasional sebagai upaya memperkuat daya saing global dan meningkatkan skala bisnis.

Logistik
1. Meningkatkan kapasitas layanan curah kering dan cair di seluruh Indonesia untuk mendukung rantai pasok yang andal.
2. Menyediakan layanan terpadu (*onestop service*) bagi pelanggan BBM dan kimia dasar, sehingga menciptakan nilai tambah melalui peningkatan efisiensi operasional dan kualitas layanan.

Kawasan Industri
1. Fokus pada industri berat dan berteknologi tinggi
   Perseroan mengoptimalkan JIIPE sebagai pusat ekosistem industri berat dan berteknologi tinggi, termasuk sektor peleburan tembaga untuk mendukung pengembangan industri bernilai tambah tinggi.
2. Pengembangan kawasan industri hijau
   Mengembangkan kawasan industri berkonsep hijau melalui integrasi energi terbarukan dan energi bersih guna memenuhi kebutuhan t*enant* yang mengedepankan prinsip keberlanjutan.
3. Penciptaan pendapatan berulang
   Mengembangkan infrastruktur dan utilitas berkapasitas besar yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan operasional *tenant*, sehingga mendorong pertumbuhan pendapatan yang berulang, stabil, dan berjangka panjang.

Pangsa Pasar yang Dilayani

AKR melayani pangsa pasar yang beragam dan strategis, mencakup pelanggan industri, komersial, dan ritel di berbagai sektor ekonomi. Di segmen energi dan BBM, Perseroan melayani kebutuhan pelanggan industri, pertambangan, manufaktur, serta sektor transportasi dan penerbangan melalui pasokan yang andal dan terintegrasi. Pada segmen kimia dasar, AKR menjangkau industri hilir seperti *smelter*, manufaktur, dan pabrikan bahan baku yang sejalan dengan pertumbuhan hilirisasi nasional.

Sementara itu, melalui bisnis logistik dan infrastruktur, AKR melayani pelaku usaha yang membutuhkan layanan distribusi curah kering dan cair, pergudangan, serta solusi rantai pasok terpadu di seluruh Indonesia. Perseroan juga melayani *tenant* kawasan industri melalui penyediaan lahan, utilitas, dan infrastruktur pendukung.

Melalui jaringan infrastruktur logistik terintegrasi yang mencakup 11 pelabuhan laut, 6 pelabuhan sungai, dan 20 lokasi tangki penyimpanan yang tersebar di seluruh Indonesia, AKR memastikan pemenuhan kebutuhan domestik dan kawasan industri secara efisien dan andal. Didukung jangkauan geografis yang luas serta portofolio layanan terintegrasi, Perseroan melayani pangsa pasar domestik maupun internasional sekaligus memperkuat posisinya sebagai mitra strategis dalam rantai nilai industri nasional.

Realisasi Penggunaan Dana **Hasil Penawaran Umum**

Sepanjang tahun 2025, Perseroan tidak menerbitkan saham baru maupun obligasi/sukuk/subordinasi. Dengan demikian, informasi mengenai realisasi penggunaan dana hasil penawaran umum tidak disajikan dalam Laporan Tahunan 2025.

Informasi Material mengenai Investasi, Ekspansi, Divestasi, Penggabungan/ **Peleburan Usaha, Akuisisi, dan Restrukturisasi Utang/Modal**

Hingga akhir tahun 2025, terdapat aktivitas investasi AKR dan Entitas Anak sebagai berikut:

1. Berdasarkan Akta Notaris Yulia, S.H., No. 3 tanggal 9 April 2025, ADH meningkatkan modal ditempatkan dan disetor dari Rp356.449.000 menjadi Rp366.449.000 dimana Perusahaan mengambil keseluruhan kenaikan saham tersebut sebesar Rp10.000.000. Perusahaan telah melakukan Keterbukaan Informasi melalui Surat No. 033/I-AKR-CS/2025 tanggal 9 April 2025 ke OJK dan BEI.
2. Berdasarkan Akta Notaris Yulia, S.H., No. 21 tanggal 7 Maret 2025, DPR meningkatkan modal ditempatkan dan disetor dari Rp158.309.600 menjadi Rp176.019.600 dimana AKRIDA mengambil bagian sebesar Rp8.872.710, sedangkan pemegang saham lainnya, BP Global Investment Limited, mengambil sisa saham sebesar Rp8.837.290.
3. Berdasarkan Akta Notaris Yulia, S.H., No. 74 tanggal 24 Oktober 2025, DPR meningkatkan modal ditempatkan dan disetor dari Rp176.019.600 menjadi Rp192.119.600 dimana AKRIDA mengambil bagian dari peningkatan modal disetor sebanyak Rp8.066.100, sedangkan pemegang saham lainnya, BP Global Investment Limited, mengambil sisa saham sebesar Rp8.033.900.
4. Berdasarkan Akta Notaris Yulia, S.H., No. 55 tanggal 21 Februari 2025, AKRIDA meningkatkan modal ditempatkan dan disetor dari Rp1.039.165.000 menjadi Rp1.048.165.000 dimana Perusahaan mengambil keseluruhan kenaikan saham tersebut sebesar Rp9.000.000. Perusahaan telah melakukan Keterbukaan Informasi melalui Surat No. 017/I-AKR-CS/2025 tanggal 24 Februari 2025 ke OJK dan BEI.
5. Berdasarkan Akta Notaris Yulia, S.H., No. 72 tanggal 24 Oktober 2025, AKRIDA meningkatkan modal ditempatkan dan disetor dari Rp1.048.165.000 menjadi Rp1.056.565.000 dimana Perusahaan mengambil keseluruhan kenaikan saham tersebut sebesar Rp8.400.000 Perusahaan telah melakukan Keterbukaan Informasi melalui Surat No. 079/L-AKR-CS/2025 tanggal 28 Oktober 2025 ke OJK dan BEI.

Informasi Transaksi Material yang **Mengandung Benturan Kepentingan dan/ atau Transaksi dengan Pihak Afiliasi**

Perseroan dan Entitas Anak melakukan transaksi dengan pihak berelasi sebagaimana yang didefinisikan dalam PSAK 224 tentang Pengungkapan Pihak-pihak Berelasi. AKR memastikan bahwa seluruh transaksi dengan pihak berelasi dilakukan berdasarkan persyaratan yang disepakati bersama dan dapat berbeda dengan transaksi dengan pihak yang tidak berelasi.

AKR mendefinisikan pihak berelasi sebagai orang atau entitas yang memiliki keterkaitan dengan Perseroan dalam konteks penyusunan laporan keuangan, yaitu:

1. Orang atau anggota keluarga terdekat mempunyai relasi dengan Perusahaan jika orang tersebut:
   a. Memiliki pengendalian atau pengendalian bersama atas Perusahaan;
   b. Memiliki pengaruh signifikan atas Perusahaan; atau
   c. Personil manajemen kunci Perusahaan atau entitas induk Perusahaan.
2. Suatu entitas berelasi dengan Perusahaan jika memenuhi salah satu hal berikut:
   a. Entitas adalah anggota dari Kelompok Usaha (artinya entitas induk, entitas anak, dan entitas anak berikutnya terkait dengan entitas lain);
   b. Satu entitas adalah entitas asosiasi atau ventura bersama dari entitas lain (atau entitas asosiasi atau ventura bersama yang merupakan anggota Kelompok Usaha, yang mana entitas lain tersebut adalah anggotanya);
   c. Entitas yang dikendalikan atau dikendalikan bersama oleh orang diidentifikasi dalam huruf (a);
   d. Orang yang diidentifikasi dalam huruf (a) (i) memiliki pengaruh signifikan atas entitas atau personil manajemen kunci entitas (atau entitas induk dari entitas);
   e. Entitas, atau anggota dari Kelompok Usaha dari kelompok yang mana entitas merupakan bagian dari Kelompok Usaha tersebut, menyediakan jasa personil manajemen kunci kepada Perusahaan atau kepada entitas induk dari Perusahaan.

Seluruh transaksi dengan pihak berelasi telah diungkapkan dalam catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian Tahun Buku 2025.

Kebijakan Mekanisme *Review* Kewajaran dan Pemenuhan Peraturan

Perseroan senantiasa memastikan bahwa transaksi material, transaksi afiliasi, dan transaksi yang mengandung benturan kepentingan dilaksanakan berdasarkan prinsip kehati-hatian. Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, termasuk penerapan prinsip kewajaran (*arm's length principle*) menjadi landasan utama Perseroan. Dengan menjunjung tinggi kepatuhan serta pelaksanaan transaksi sesuai ketentuan yang berlaku, Perseroan menerapkan prinsip transparansi dan akuntabilitas secara konsisten.

Pedoman peraturan dalam melaksanakan transaksi yaitu ketentuan PSAK No. 224 tentang Pengungkapan Pihak-pihak Berelasi, Peraturan Bapepam-LK No. KEP347/BL/2012 tanggal 25 Juni 2012 tentang Penyajian dan Pengungkapan Laporan Keuangan Emiten atau Perusahaan Publik, serta Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan (POJK 42/2020).

Seluruh transaksi afiliasi dilakukan melalui prosedur yang memadai dengan pengawasan Direksi, serta direviu oleh Dewan Komisaris dan Komite Audit untuk memastikan kesesuaiannya dengan praktik bisnis yang berlaku umum dan prinsip kewajaran (*Arm's Length Principle*).

Per 31 Desember 2025, Perseroan tidak mencatat adanya pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan terkait transaksi dengan pihak berelasi dan/atau transaksi yang mengandung benturan kepentingan. Seluruh transaksi tersebut dilaksanakan berdasarkan syarat dan kondisi yang memberikan manfaat ekonomis yang secara substansial setara dengan transaksi yang dilakukan dengan pihak ketiga.

Tujuan Transaksi dengan Pihak Afiliasi

Seluruh transaksi dilaksanakan untuk mendukung efisiensi operasional, menjaga keberlangsungan rantai pasok, serta mengoptimalkan sinergi dalam lingkup grup usaha. Transaksi dengan pihak afiliasi juga ditujukan untuk meningkatkan nilai tambah bagi pemegang saham dan pemangku kepentingan dengan tetap mengedepankan prinsip kewajaran (*arm's length principle*) dan penerapan Governansi Perusahaan.

Perseroan juga melakukan transaksi dengan pihak afiliasi untuk memperoleh layanan, barang, dan/atau pendanaan dengan persyaratan yang kompetitif serta mendukung pengembangan usaha yang berkelanjutan. Perseroan memastikan bahwa seluruh transaksi tersebut dilaksanakan secara transparan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta berada di bawah pengawasan Direksi, Dewan Komisaris, dan Komite Audit, sehingga tidak menimbulkan benturan kepentingan dan tetap memberikan manfaat optimal bagi Perseroan.

Sifat Hubungan Berelasi

Pihak-pihak berelasi merupakan entitas atau individu yang memiliki keterkaitan dengan Perseroan, baik melalui kepemilikan, kepengurusan, maupun hubungan signifikan lainnya, baik secara langsung maupun tidak langsung. Hubungan berelasi dapat mencakup induk perusahaan, entitas anak, perusahaan asosiasi, personil manajemen kunci, serta pihak lain yang memiliki pengaruh signifikan terhadap keputusan keuangan dan operasional Perseroan.

Sifat hubungan berelasi yang terjadi sepanjang tahun 2025 disajikan dalam tabel berikut ini:

Pihak Berelasi	Sifat dari Hubungan	Sifat dari Transaksi
PT Komersial Logistik Nusantara	Transaksi dengan entitas di bawah pengendalian yang sama	Sewa kantor
PT AKR Land Development dan Entitas Anak	Transaksi dengan entitas di bawah pengendalian yang sama	• *Service charge* kepada Perusahaan dan Entitas Anak • Penjualan BBM • Pendapatan transportasi • Jual beli tanah
PT Berlian Manyar Sejahtera	Transaksi dengan entitas asosiasi	• Penjualan BBM • *Management fee* kepada Perusahaan dan Entitas Anak • Sewa tanah

Realisasi Transaksi dengan Pihak Berelasi

Realisasi transaksi AKR dengan pihak berelasi untuk tahun 2025 dan tahun 2024 diuraikan dalam tabel berikut:

dalam Miliar Rupiah

Uraian	2025	2024
PT Komersial Logistik Nusantara		
Sewa Kantor	Rp24.000	Rp24.000
Persentase terhadap pendapatan	0,0%	0,0%
PT AKR Land Development dan Entitas Anak		
Service charge kepada Perusahaan dan Entitas Anak	Rp6.141.203	Rp6.097.978
Persentase terhadap beban usaha	0,6%	0,6%
Penjualan BBM	Rp278.240	Rp485.017
Persentase terhadap penjualan	0,0%	0,0%
Pendapatan transportasi	Rp4.200	Rp8.800
Persentase terhadap pendapatan	0,0%	0,0%
Jual beli tanah	Rp54.830	-
Persentase terhadap liabilitas	0,3%	0,5%
PT Berlian Manyar Sejahtera		
Penjualan bahan bakar minyak (BBM)	Rp433.924	Rp1.169.559
Persentase terhadap penjualan	0,0%	0,0%

Uraian	2025	2024
Management fee kepada Perusahaan dan Entitas Anak	Rp1.519.500	Rp3.578.736
Persentase terhadap laba neto tahun berjalan	0,0%	0,2%
Sewa tanah	Rp2.893.598	Rp2.844.703
Persentase terhadap aset	0,0%	0,0%

Pernyataan Manajemen atas Transaksi Afiliasi Tahun 2025

Seluruh pelaksanaan transaksi afiliasi selama tahun 2025 dilaksanakan secara transparan dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Direksi memastikan bahwa seluruh transaksi tersebut telah melalui prosedur yang memadai, dilaksanakan sesuai dengan praktik bisnis yang sehat, serta tidak mengandung benturan kepentingan sebagaimana dimaksud dalam POJK 42/2020.

Dalam melakukan transaksi afiliasi, Direksi dengan pengawasan Dewan Komisaris dan Komite Audit berkomitmen untuk menjaga integritas, akuntabilitas, dan prinsip GCG dalam seluruh kegiatan usaha guna mendukung keberlanjutan operasional AKR dan Entitas Anak.

Perubahan Peraturan **Perundang-Undangan**

Hingga akhir tahun 2025, terdapat perubahan regulasi di sektor pasar modal yang menjadi perhatian Perseroan, yaitu penerbitan SEOJK No. 10/SEOJK.04/2025 tentang penyampaian laporan kepemilikan atau setiap perubahan kepemilikan saham serta laporan aktivitas penjaminan saham Perusahaan Terbuka secara elektronik. SEOJK ini merupakan tindak lanjut dari POJK No. 4 Tahun 2024 yang mengatur kewajiban pelaporan kepemilikan saham dan perubahannya oleh pihak terkait. Peraturan ini memberikan penekanan pada mekanisme pelaporan elektronik yang lebih terstandarisasi dan transparan.

Selain itu, diterbitkan POJK No. 14 Tahun 2025 tentang pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Rapat Umum Pemegang Obligasi (RUPO), dan Rapat Umum Pemegang Sukuk (RUPSu) secara elektronik yang memperbarui serta memperluas kerangka e-RUPS. Regulasi ini mendorong digitalisasi tata kelola perusahaan dalam jangka panjang, sehingga Perseroan perlu menyesuaikan kesiapan sistem, infrastruktur, dan prosedur operasional guna memastikan kelancaran serta kepatuhan dalam pelaksanaannya.

Perubahan Kebijakan Akuntansi yang **Berdampak pada Perseroan**

Laporan Keuangan Konsolidasian AKR dan Entitas Anak disusun berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) yang diterbitkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia (DSAK-IAI). Standar dan kebijakan akuntansi tersebut diterapkan secara konsisten dalam penyusunan Laporan Keuangan Konsolidasian, sehingga mencerminkan prinsip transparansi serta kepatuhan terhadap regulasi akuntansi yang berlaku.

Perseroan menerapkan pertama kali seluruh standar baru dan/atau yang direvisi yang berlaku efektif untuk periode yang berlaku pada atau setelah 1 Januari 2025, termasuk standar yang direvisi berikut ini yang mempengaruhi laporan keuangan konsolidasian:

Amandemen PSAK 221: Kekurangan Ketertukaran
Amandemen tersebut mengharuskan pengungkapan informasi yang memungkinkan pengguna laporan keuangan memahami dampak mata uang yang tidak dapat dipertukarkan dengan mata uang lain yang mempengaruhi, atau diperkirakan akan mempengaruhi, kinerja keuangan, posisi keuangan, dan arus kas entitas. Amandemen berlaku untuk periode pelaporan tahunan yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2025. Penerapan dini diperkenankan dimana entitas diharuskan mengungkapkan fakta tersebut.

Amandemen tersebut tidak memiliki dampak terhadap laporan keuangan konsolidasian Perseroan.

Informasi **Kelangsungan Usaha**

AKR berada dalam posisi yang solid untuk menjaga keberlangsungan usaha di tengah dinamika dan ketidakpastian bisnis. Hal ini ditopang oleh strategi Perseroan yang berfokus pada penguatan infrastruktur, pemanfaatan teknologi digital, serta hubungan jangka panjang dengan pelanggan utama. Dengan model bisnis yang resilien dan kondisi keuangan yang sehat, Perseroan mampu mempertahankan kinerja yang stabil dan berkelanjutan.

Dalam mengelola berbagai potensi risiko, Perseroan secara proaktif memantau perkembangan industri dan menyesuaikan arah strategis sesuai dengan kondisi pasar. Langkah-langkah mitigasi dilakukan melalui peningkatan efisiensi operasional, diversifikasi portofolio usaha, serta penguatan governansi guna memastikan keberlangsungan usaha dalam jangka panjang.

Perseroan juga secara konsisten mengintegrasikan prinsip keberlanjutan ke dalam operasional bisnis, antara lain melalui penerapan praktik ramah lingkungan, efisiensi energi, serta kepatuhan terhadap ketentuan dan regulasi yang berlaku. Pendekatan ini tidak hanya memperkuat daya saing Perseroan, tetapi juga menciptakan nilai jangka panjang bagi seluruh pemangku kepentingan.

Secara keseluruhan, Perseroan telah menerapkan berbagai langkah strategis untuk mengantisipasi tantangan yang berpotensi memengaruhi pertumbuhan pada tahun 2025 dan seterusnya. Dengan melanjutkan strategi serta model bisnis yang telah terbukti efektif, AKR akan terus menjaga fleksibilitas dalam merespons perubahan pasar, mengoptimalkan peluang pertumbuhan baru, dan memperkuat fundamental usaha demi memastikan pertumbuhan yang berkesinambungan.

Assessment yang Dilakukan Manajemen

Sepanjang tahun 2025, hasil evaluasi yang dilakukan Manajemen bersama Dewan Komisaris dan Komite Audit menunjukkan bahwa AKR berada dalam kondisi yang kuat dengan prospek pertumbuhan yang menjanjikan ke depan. Fokus Perseroan pada segmen BBM dan bahan kimia dasar yang ditopang oleh kemitraan strategis serta keunggulan infrastruktur, terus membuka ruang ekspansi baik di pasar domestik maupun internasional.

Di sisi lain, pengembangan KEK JIIPE sebagai ekosistem industri hijau menjadi pendorong utama pertumbuhan jangka panjang melalui penyediaan utilitas berstandar internasional dan pemanfaatan sumber energi terbarukan. Dengan mengintegrasikan inovasi dan prinsip keberlanjutan dalam strategi bisnis, Perseroan dapat menjaga daya saing di tengah perubahan lanskap industri, sekaligus menciptakan nilai dan warisan usaha yang selaras dengan kebutuhan masa kini serta mendukung pembangunan yang lebih berkelanjutan dan inklusif.

Potensi Pengembangan Usaha

Sebagai pengelola dan pengembang kawasan, sekaligus pelaku utama dalam distribusi energi dan logistik, AKR berada pada posisi strategis untuk menangkap peluang pertumbuhan pada tahun 2025. Peningkatan aktivitas industri di JIIPE berpotensi mendorong kenaikan permintaan BBM, bahan kimia dasar, serta layanan logistik dan penyimpanan, yang secara terintegrasi memperkuat kinerja segmen perdagangan, distribusi, dan infrastruktur energi Perseroan. Sinergi antar lini usaha ini memungkinkan AKR mengoptimalkan pendapatan berulang, meningkatkan utilisasi aset, serta memperluas basis pelanggan industri, sehingga menciptakan fondasi pertumbuhan yang berkelanjutan.

Didukung oleh infrastruktur logistik yang terintegrasi dan jaringan distribusi yang menjangkau berbagai wilayah, Perseroan secara konsisten memperluas cakupan layanan untuk memastikan keandalan pasokan BBM bagi sektorsektor strategis serta memperkuat posisi AKR dalam rantai pasok energi nasional. Ruang pengembangan usaha semakin terbuka seiring dengan menguatnya ekosistem hilirisasi di Indonesia serta bertumbuhnya klaster industri pendukung lainnya. Keberadaan fasilitas tersebut berperan sebagai katalis bagi peningkatan aktivitas industri bernilai tambah, menciptakan peluang baru dalam rantai pasok nasional, dan memperkuat daya saing industri manufaktur dalam negeri.

Di sisi lain, dukungan utilitas industri berstandar internasional yang disediakan oleh PT Berkah Kawasan Manyar Sejahtera (BKMS), serta layanan pelabuhan laut dalam yang dikelola oleh PT Berlian Manyar Sejahtera (BMS), memberikan kemudahan operasional dan akses logistik strategis bagi para *tenant* di JIIPE. Infrastruktur terpadu ini mendorong efisiensi distribusi dan logistik, sekaligus meningkatkan daya tarik JIIPE sebagai kawasan industri terintegrasi yang mampu menopang pertumbuhan usaha secara berkelanjutan.

05

Fungsi Penunjang Bisnis

Memberikan kesempatan yang setara dalam proses rekrutmen memadai untuk menarik talenta-talenta unggul

Lihat strategi usaha pada **halaman 153**

Konsisten membangun hubungan yang harmonis dan dinamis sebagai bagian dari komitmen dalam menciptakan lingkungan kerja yang kondusif

Lihat program remunerasi pada **halaman 161**





Sumber Daya **Manusia**

> Talenta unggul adalah aset terbesar AKR. Dedikasi, kreativitas, dan semangat inovasi seluruh Insan Perseroan menjadi kunci membentuk masa depan yang berkelanjutan dan menghadirkan keunggulan kompetitif di industri logistik dan *supply chain*.

Strategi dan Kebijakan Umum Pengelolaan SDM

Sumber Daya Manusia (SDM) menjadi salah satu pilar pertumbuhan AKR dimana rantai pengelolaannya harus berjalan harmonis dan terintegrasi. Pengelolaan SDM diarahkan pada pengembangan talenta yang kompeten dan berintegritas, berkarakter didukung oleh budaya kerja yang tinggi sesuai dengan nilai-nilai Perseroan, sehingga *talent pool* sebagai fondasi keberhasilan suksesi terpenuhi di seluruh tingkatan organisasi.

Internalisasi nilai *Be Entrepreneurial, Collaboration, Be Agile, Reward for Performance, Empower Your Team*, dan *Zero Tolerance* diterapkan secara konsisten sebagai landasan perilaku kerja seluruh Insan AKR dalam mendukung pencapaian kinerja dan keberlanjutan usaha. Agar tetap relevan dan kompetitif di tenaga kerja, AKR senantiasa melakukan pembaruan kebijakan pengelolaan SDM sebagai respon atas perubahan tren kebutuhan karyawan dan kandidat dalam memilih tempat kerja.

Pengelola Pengembangan SDM

AKR memiliki Divisi Human Resources (HR) yang bertanggung jawab atas pengelolaan dan pengembangan SDM secara menyeluruh. Lingkup tanggung jawab Divisi HR mencakup perencanaan kebutuhan SDM, pelaksanaan program pengembangan kompetensi, hingga evaluasi kinerja dan efektivitas program. Divisi HR dipimpin oleh Felix Abednego, dengan profil lengkap disajikan pada Bab 3 Profil Perusahaan Laporan Tahunan 2025.

Perseroan memiliki *Talent Committee* yang diduduki oleh Presiden Direktur, perwakilan Direksi dan Kepala Divisi HR. Evaluasi talenta dilakukan setiap 6 (enam) bulan sekali dengan melakukan evaluasi dan pembuatan rencana pengembangan khususnya untuk mengisi posisi strategis di Perseroan. Talenta yang diidentifikasi akan diminta mengikuti kegiatan pengembangan atau diberikan proyek khusus untuk mengembangkan kemampuan. Tanggung jawab untuk pengembangan talenta ini adalah dari Direksi, Divisi HR, dan talenta tersebut.

Sebagai bagian dari penerapan tata kelola, Divisi HR secara rutin menyampaikan laporan, evaluasi, serta usulan kebijakan dan inisiatif dalam *Strategic Business Unit Meeting*. Selain itu, Direksi juga terlibat aktif dalam proses penetapan target kinerja serta penilaian kinerja tahunan karyawan. Masing-masing karyawan akan mendapatkan umpan balik positif terkait cara meningkatkan kinerja dari waktu ke waktu.

Tujuan Pengelolaan SDM

Divisi HR berperan dalam memastikan keselarasan strategi SDM dengan arah bisnis, serta mengembangkan program-program yang berkontribusi pada peningkatan kompetensi, produktivitas, dan kesejahteraan karyawan. Kebijakan pengelolaan SDM diterjemahkan ke dalam tujuan strategis yang mendukung pencapaian target jangka menengah dan jangka panjang. Tujuan pengelolaan SDM di AKR, meliputi:

1. Mempersiapkan karyawan dari semua level untuk dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang diberikan.
2. Mengutamakan *talent* internal untuk mengisi posisi yang ada di perusahaan, terutama untuk posisi-posisi yang memerlukan kemampuan khusus dan pengetahuan yang mendalam terkait dengan industri dan pasar.

3. Menyelaraskan *Key Performance Indicator* (KPI) divisi dan individu dengan strategi Perseroan, serta meningkatkan proses *review* kinerja secara konsisten.
4. Memastikan kecepatan proses rekrutmen SDM baru untuk mengisi posisi-posisi yang muncul akibat pertumbuhan perusahaan.
5. Memanfaatkan teknologi IT dalam otomasi dan analisa dalam pengambilan keputusan.
6. Memberikan pelatihan-pelatihan yang bersifat teknis.
7. Meningkatkan kesehatan dan keselamatan kerja.

Strategi dan Program Kerja Pengelolaan SDM

Divisi HR menyusun strategi, inisiatif, dan program kerja secara terstruktur dengan mempertimbangkan dinamika internal, eksternal, serta *roadmap* ke depan. Di tahun 2025, pengembangan SDM difokuskan pada peranan HR sebagai *partner* yang berkolaborasi dengan berbagai Divisi dan Anak Perusahaan untuk melakukan *improvement* baik dari sisi cara bekerja ataupun struktur organisasi sehingga mendorong cara bekerja yang lebih efektif dan efisien untuk mendukung pencapaian target Perseroan.

SDM adalah salah satu modal penting dalam upaya mencapai visi dan misi Perseroan dan keberlangsungan usaha. Secara umum, tujuan dari Divisi HR adalah untuk menyediakan talenta yang memiliki kompetensi dan nilai-nilai yang selaras dengan nilai-nilai Perseroan. Dalam mencapai tujuan ini, ada beberapa prinsip yang dijalankan oleh manajemen untuk mencapai perkembangan SDM ke depan:

1. Pengelolaan SDM harus mengikuti hukum dan peraturan perundangan yang berlaku di Indonesia dan lokasi operasional AKR.
2. Memberikan kesempatan yang sama untuk bekerja dan meniti karir dalam Perseroan, tanpa memandang perbedaan dari suku, agama, ras, golongan, dan jenis kelamin.
3. Memastikan pengembangan pengetahuan dan kompetensi karyawan, melalui berbagai media pelatihan, sosialisasi, kegiatan *coaching*, *mentoring* dan arahan manajemen.
4. Memastikan lingkungan kerja yang sehat, aman dan nyaman, serta tidak mentoleransi *harassment*, *bullying* atau perilaku yang mengancam keselamatan atau melanggar norma-norma yang berlaku di masyarakat.
5. Selalu memastikan investasi dalam kegiatan pengembangan kompetensi, memberikan nilai tambah bagi pengembangan Perseroan, dan pengetahuan yang didapatkan diaplikasikan dalam pekerjaan sehari-hari.
6. Membangun kultur kerja yang profesional dan produktif sesuai dengan nilai-nilai Perseroan.
7. Perseroan berupaya agar keberadaannya di masyarakat membawa nilai positif dalam segi pengembangan kesejahteraan.

Pencapaian Kinerja Divisi HR

Divisi HR mencatat sejumlah pencapaian yang mendukung pengelolaan SDM secara strategis dan berkelanjutan. Pencapaian tersebut mencerminkan komitmen AKR dalam meningkatkan kualitas SDM, memperkuat internalisasi budaya perusahaan, serta mendukung pencapaian target bisnis melalui program-program yang terukur. Adapun pencapaian kinerja Divisi HR tahun 2025 meliputi:

1. Penyelarasan target KPI dan struktur organisasi sesuai dengan perngembangan Perseroan.
2. Perencanaan suksesi yang lebih terintegrasi melalui program *talent management*.
3. Optimalisasi rekrutmen internal untuk mengisi posisi yang kosong.
4. Pelaksanaan *performance evaluation* 1 level *reviewer* untuk mendorong penguatan kepemimpinan Manajer.
5. Peningkatan dalam proses *on boarding* untuk memastikan karyawan baru dapat menguasai tugas dan tanggung jawabnya. Proses *on boarding* ini juga dilakukan kepada karyawan yang mengalami mutasi internal agar siap menjalankan peran di posisinya yang baru.



Komposisi Karyawan

Sepanjang tahun 2025, jumlah karyawan AKR dan Entitas Anak mencapai 2.474 orang, mengalami kenaikan sebesar 22 orang atau 0,9%, dibandingkan jumlah karyawan tahun sebelumnya sebanyak 2.452 orang. Informasi detail terkait jumlah karyawan dalam 2 (dua) tahun terakhir sebagai berikut:

Berdasarkan Level Jabatan

Level Jabatan	2025		2024	
	Jumlah	%	Jumlah	%
Dewan Komisaris	3	0,1%	3	0,1%
Direksi	7	0,3%	7	0,3%
Pejabat Selevel Komisaris	8	0,3%	5	0,2%
Pejabat Selevel Direktur	24	1,0%	23	0,9%
General Manager – Senior Manager	72	2,9%	72	2,9%
Manager	131	5,3%	130	5,3%
Asisten Manager	155	6,3%	158	6,4%
Supervisor dan Staf	827	33,4%	803	32,7%
Operator	1.247	50,4%	1.251	51,0%
Jumlah	**2.474**	**100%**	**2.452**	**100,0%**

Berdasarkan Jenis Kelamin

Jenis Kelamin	2025		2024	
	Jumlah	%	Jumlah	%
Perempuan	296	12,0%	299	12,2%
Laki-laki	2.178	88,0%	2.153	87,8%
Total	**2.474**	**100%**	**2.452**	**100,0%**

Berdasarkan Usia

Usia	2025		2024	
	Jumlah	%	Jumlah	%
>56 tahun	76	3,1%	64	2,6%
47–55 tahun	394	15,9%	397	16,2%
40–46 tahun	535	21,6%	515	21,0%
33–39 tahun	684	27,7%	708	28,9%
26–32 tahun	611	24,7%	608	24,8%
<25 tahun	174	7,0%	160	6,5%
Total	**2.474**	**100%**	**2.452**	**100,0%**

Berdasarkan Level Pendidikan

Level Pendidikan	2025		2024	
	Jumlah	%	Jumlah	%
Strata 3	3	0,1%	3	0,1%
Strata 2	111	4,5%	103	4,2%
Strata 1	998	40,4%	977	39,8%

Level Pendidikan	2025		2024	
	Jumlah	%	Jumlah	%
Diploma	225	9,1%	194	7,9%
Sekolah Menengah Atas	856	34,6%	874	35,6%
Sekolah Menengah Pertama	76	3,1%	83	3,4%
Sekolah Dasar	10	0,4%	11	0,4%
Profesi	195	7,9%	186	7,6%
Undetected	0	0%	21	0,9%
Total	**2.474**	**100%**	**2.452**	**100,0%**

Berdasarkan Status Kepegawaian

Status Kepegawaian	2025		2024	
	Jumlah	%	Jumlah	%
Karyawan Permanen	2.137	86,4%	2.100	85,6%
Karyawan Kontrak	337	13,6%	352	14,4%
Total	**2.474**	**100%**	**2.452**	**100,0%**



Strategi Pengelolaan SDM dalam Mempersiapkan Talenta Unggul

Perseroan secara konsisten mengembangkan sistem pengelolaan SDM yang berfokus pada peningkatan kompetensi, pembentukan karakter, dan kesiapan talenta untuk menjawab kebutuhan bisnis saat ini maupun masa depan. Upaya ini mencakup *Manpower Planning*, rekrutmen, pendidikan dan pelatihan, serta program remunerasi dan kesejahteraan karyawan, sehingga memastikan ketersediaan talenta unggul di setiap level organisasi guna mendukung keberlanjutan dan daya saing jangka panjang Perseroan.

Strategi Perencanaan Tenaga Kerja untuk Meningkatkan Produktivitas dan Efisiensi

Melalui pemetaan kebutuhan tenaga kerja berdasarkan kapasitas, kompetensi, dan proyeksi bisnis, AKR memastikan penempatan sumber daya manusia yang tepat pada fungsi dan waktu yang sesuai. Proses perencanaan tenaga kerja (*manpower planning*) disusun dengan pendekatan jangka pendek, menengah, dan panjang guna mengoptimalkan beban kerja, meningkatkan produktivitas, dan mendorong efisiensi biaya, sekaligus meminimalkan kesenjangan talenta serta menjaga keberlangsungan operasional yang efektif dan berkelanjutan.

Pada tahap awal, AKR mengidentifikasi kebutuhan tenaga kerja untuk periode satu tahun ke depan dengan mengacu pada proyeksi beban kerja, struktur organisasi, serta rencana pertumbuhan bisnis. Berdasarkan target usaha dan kebutuhan karyawan yang telah ditetapkan, Perseroan selanjutnya menyusun anggaran ketenagakerjaan yang diperlukan. Seluruh proses ini didukung oleh evaluasi terhadap tingkat produktivitas karyawan yang ada serta penetapan target kinerja yang ingin dicapai, sehingga alokasi tenaga kerja dapat dilakukan secara efisien dan selaras dengan upaya pencapaian tujuan Perseroan.

Tim Manajemen berperan aktif dalam proses perencanaan tenaga kerja, termasuk melakukan evaluasi atas kebutuhan penggantian karyawan yang mengundurkan diri guna menjaga sinergi dan efisiensi penempatan SDM. Dalam hal terjadi pengunduran diri, Divisi HR meminta pengajuan permintaan penggantian melalui formulir yang memuat uraian pekerjaan, kualifikasi yang dibutuhkan, indikator kinerja utama, serta analisis beban kerja. Formulir tersebut terlebih dahulu ditelaah dan disetujui oleh Divisi HR serta Kepala Divisi terkait, untuk memastikan organisasi tetap efisien dan efektif.

Menciptakan Talenta Unggul melalui Proses Rekrutmen

AKR senantiasa melaksanakan proses rekrutmen secara transparan dan adil guna menjaring talenta terbaik yang sesuai dengan kebutuhan Perseroan. Kebutuhan tenaga kerja ditetapkan dan divalidasi oleh *Top Management* dengan mempertimbangkan keterampilan teknis, non teknis, kompetensi, serta keselarasan dengan nilai-nilai Perseroan.

Perseroan memberikan kesempatan yang setara kepada seluruh kandidat tanpa membedakan gender, suku, ras, etnis, maupun agama, sepanjang memenuhi persyaratan yang ditetapkan. Seluruh tahapan rekrutmen diawasi secara ketat untuk menjamin objektivitas dan kualitas hasil seleksi, sehingga AKR dapat membangun tim yang kompeten dan mendukung pertumbuhan Perseroan secara berkelanjutan.

Proses rekrutmen dan seleksi karyawan baru di Perseroan dilaksanakan melalui tahapan sebagai berikut:

1. Melakukan proses *sourcing* dengan mencari kandidat yang sesuai dengan kualifikasinya melalui semua *channel* yang ada, termasuk *e-sourcing* melalui media sosial dan situs web AKR.
2. Pada tahapan seleksi kandidat melewati serangkaian *screening* CV berbasis kualifikasi, asesmen psikologis (aspek kecerdasan perilaku dan sikap kerja) dan wawancara dengan HR dan calon atasan langsung. Jenis dan tahapan asesmen, proses wawancara secara panel disesuaikan dengan level jabatan yang dibutuhkan.
3. Proses verifikasi dokumen cek referensi dan *medical check up* bagi karyawan yang telah lolos tahapan seleksi. Setelah verifikasi lengkap maka kandidat akan diberikan pengawasan kerja.

AKR menetapkan strategi yang tepat untuk menarik talenta terbaik meliputi:

1. Transparansi dalam berkomunikasi yaitu memberikan informasi yang jelas mengenai budaya kerja, gambaran pekerjaan dan tantangan dari pekerjaan yang ditawarkan.
2. Penggunaan teknologi dalam rekrutmen yaitu menggunakan platform *online* rekrutmen dalam melakukan tes dan *interview*.
3. Kerjasama dengan institusi pendidikan dalam mencari kandidat untuk program *Management Trainee*.
4. Memanfaatkan teknologi dan sosial media untuk promosi pekerjaan pada lokasi tertentu.
5. Menggunakan referensi terutama untuk *group* pekerjaan tertentu (*engineering*, *crew*, dan kapal).
6. Melakukan *internal job posting* untuk posisi tertentu.

Strategi Pengembangan Talenta Muda dan Kepemimpinan Masa Depan

Perseroan menyelenggarakan program *Management Trainee* (MT) sebagai salah satu *pipeline* utama dalam pemenuhan kebutuhan *middle management* di masa mendatang. Program ini ditujukan baik untuk merekrut *fresh graduate* berpotensi tinggi maupun untuk memenuhi kebutuhan posisi manajerial, khususnya pada fungsi teknikal dan keuangan, sejalan dengan rencana pengembangan bisnis Perseroan.

Peserta MT merupakan lulusan baru pilihan dari berbagai universitas negeri dan swasta yang mendapatkan pembekalan teknis dan non-teknis mencakup gambaran umum AKR, proses bisnis, pengetahuan produk, dan operasional bisnis. Melalui pelatihan intensif, *coaching* dari jajaran eksekutif, dan keterlibatan langsung dalam proyek bisnis, program ini menjadi fondasi pengembangan kepemimpinan masa depan Perseroan.

Program pelatihan MT dilaksanakan melalui kombinasi pelatihan di kelas (*classroom training*) dan pelatihan langsung di tempat kerja (*on the job training*) yang berada di bawah pengawasan Direktur atau Kepala Divisi guna memastikan kualitas pembelajaran sesuai dengan standar Perseroan. Selain itu, peserta MT diberikan penugasan proyek khusus yang dirancang untuk memperdalam pemahaman terhadap Standar Operasional Prosedur (SOP), proses bisnis, serta pencapaian target kinerja Perseroan.

AKR telah merekrut 62 MT sejak 2022. Tujuan program MT adalah untuk menciptakan pemimpin-pemimpin di masa mendatang. Dalam program MT ini langsung ditangani oleh Kepada Divisi/Direksi supaya terjadi akselerasi dalam transfer pengetahuan.



Kebijakan Pendidikan dan Pelatihan

AKR memandang bahwa program pendidikan dan pelatihan bagi karyawan sebagai aspek strategis untuk meningkatkan keterampilan dan pengetahuan agar dapat berkontribusi secara maksimal dalam mencapai tujuan Perseroan.

Sejalan dengan hal tersebut, Perseroan menyelenggarakan serangkaian program pelatihan yang komprehensif dan berkelanjutan guna memastikan setiap karyawan memiliki keahlian yang unggul dan relevan dengan kebutuhan bisnis dan dinamika industri yang berkembang. Komitmen ini diwujudkan melalui pengembangan kompetensi teknis, dan peningkatan kemampuan non teknis sesuai dengan kebutuhan organisasi.

Secara garis besar digambarkan bahwa program pelatihan yang ada di Perseroan terbagi menjadi beberapa kategori sebagai berikut :

1. ***Onboarding Program***
   Program ini merupakan program awal bagi setiap karyawan yang baru bergabung di Perseroan. Tujuan dari program ini adalah untuk memberikan pembekalan dan informasi menyeluruh mengenai *Company Profile* AKR, Visi dan Misi, konsep 5K di AKR, *Corporate Value* dan juga administrasi kepegawaian yang harus dipahami dan dipatuhi oleh karyawan agar tetap mematuhi aturan yang berlaku dan juga memiliki kemampuan untuk melakukan mitigasi terhadap risiko-risiko pekerjaan yang mungkin terjadi.

Selanjutnya, karyawan baru AKR juga mengikuti program *On the Job Training* yaitu rangkaian pembelajaran terstruktur selama 3 (tiga) bulan yang bertujuan untuk mempersiapkan karyawan dalam memahami peran dan tanggung jawabnya serta mencapai KPI dan target utama yang telah ditetapkan. Program *On the Job Training* difokuskan pada pembahasan materi-materi penting yang relevan dengan peran yang diemban, target pembelajaran selama masa *probation*, dan capaian kinerja yang diharapkan selama periode tersebut.

Target pembelajaran dalam program *onboarding* dirancang secara sistematis melalui pelatihan teknikal wajib yang mengacu pada *training matrix* masing-masing posisi. Pendekatan ini bertujuan memastikan karyawan baru memahami proses bisnis, alur kerja, SOP, dan *Working Instruction*, sehingga mampu memberikan kontribusi optimal dan mencapai target kinerja yang telah ditetapkan.

Selama masa *probation*, Departemen Rekrutmen dan *Learning and Development* akan melakukan *monthly review* untuk memantau perkembangan pembelajaran karyawan baru sesuai dengan target kerja yang sudah ditetapkan. Proses ini bertujuan untuk melakukan *cross-check* atas pencapaian target pembelajaran dan kinerja

berdasarkan *timeline* yang telah ditentukan. Apabila teridentifikasi adanya penyimpangan dalam pelaksanaan program, Perseroan akan segera mengambil langkah-langkah korektif guna memastikan kesesuaian dengan rencana yang telah ditetapkan.

Pada akhir masa *probation*, setiap karyawan diwajibkan menyusun *Probation Report* yang selanjutnya dievaluasi oleh atasan langsung dan manajemen. Bersama dengan penilaian dari Divisi Human Resources, Hasil evaluasi tersebut menjadi dasar dalam pengambilan keputusan pengangkatan karyawan sebagai karyawan tetap.

2. ***Technical Training Program***
   Program pelatihan ini merupakan program pelatihan teknikal yang wajib diikuti oleh karyawan yang bekerja di bagian operasional. Daftar program pelatihan ini tertuang dalam *Training Matrix* yang merupakan identifikasi kebutuhan *training* berdasarkan skill dan *knowledge* yang dibutuhkan oleh masing-masing *job role* yang berada di dalam Perseroan.

   Pelatihan teknikal yang bertujuan untuk membekali peserta dengan pengetahuan dan keterampilan teknikal spesifik di bidang operasional seperti *Tank Terminal, Warehouse, Maintenance*, *Land Transport*, SHE (*Safety, Health, and Environment*), *Distribution Planning*, dan *Retail Operations*. Untuk pelatihan teknikal ini, disampaikan oleh pengajar internal yang kompeten di bidangnya.

   Pelatihan teknikal yang termuat di dalam *training matrix* meliputi *Safety & Operational Tank Terminal, Safety & Operational Warehouse, Retail Operations, Permit to Work, Lock Out Tag Out, Hazard Identification Risk Assessment and Determining Control*, dan *Incident Investigation*. Selain itu, pelatihan yang berkaitan dengan *land transportation* seperti *Truck Knowledge*, *Material Safety Data Sheet*, *Loading Unloading*, dan *Defensive Driving Course* juga masuk ke dalam kurikulum pelatihan teknikal untuk personel *Land Transport* di Perseroan. Program pelatihan ini diperbarui secara berkala setiap satu hingga dua tahun dengan materi yang relevan dan terkini guna memastikan karyawan memperoleh pemahaman terbaru terkait SOP dan Instruksi Kerja (*Working Instruction*).

   Dalam program pelatihan teknikal, Perseroan juga bekerja sama dengan Lembaga Pelatihan serta Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) dalam pelaksanaan program pelatihan dan ujian sertifikasi. Sertifikat yang diperoleh dari pelatihan eksternal diterbitkan oleh lembaga berwenang, antara lain Kementerian Perhubungan Darat dan Laut serta Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP). Sertifikasi ini bertujuan untuk memastikan bahwa personel yang mengikutinya memiliki standar kompetensi yang diakui secara nasional.

3. ***Non-Technical Training Program***
   Pelatihan non teknis merupakan program pelatihan yang bertujuan untuk mendukung pemenuhan kompetensi dasar sesuai *job level* dari karyawan dan diperlukan untuk dapat bekerja dengan lebih optimal. Pelatihan non teknis ini terbagi menjadi dua kategori berikut :
   a. *Personal Development Training*
      Program pelatihan ini merupakan program pendukung pengembangan bagi individu secara spesifik di dalam tugas dan pekerjaannya. Target dari program ini merupakan karyawan yang berada pada level *Middle Management* dan *Lower Management*. Kategori pelatihan ini meliputi beberapa topik seperti *Leadership, Supervisory, Time Management, Problem Solving & Decision Making, Mentoring, Communication* dan *Building Effective Interpersonal Skill*.
   b. *Business Skills Training*
      Program pelatihan ini diperuntukkan untuk karyawan di level *Middle Management* dan bertujuan untuk membekali mereka dengan pengetahuan dan keterampilan untuk mendukung peran dan fungsinya di dalam pekerjaan. Kebutuhan untuk *business skills training* ini ditetapkan di dalam *People Development Committee meeting*.

      Beberapa *training specific* yang termasuk di dalam kategori ini *adalah Risk Management*, *Project Management*, dan *Data Analytics*.

Dengan serangkaian pelatihan yang komprehensif dan berkelanjutan, Perseroan memastikan setiap karyawan memiliki keahlian unggul dan relevansi dengan kebutuhan bisnis dan dinamika industri yang terus berkembang. Komitmen ini diwujudkan melalui pengembangan kompetensi teknis, peningkatan, kemampuan non teknis, serta penguatan kapabilitas kepemimpinan di seluruh jenjang organisasi.

Pelatihan Khusus untuk *Driver* Baru

AKR menyelenggarakan program pelatihan khusus bagi *driver* baru melalui program *onboarding* selama satu bulan yang dirancang untuk memberikan pembekalan dasar sebelum menjalankan tugas operasional secara mandiri. Program ini bertujuan untuk memastikan kesiapan *driver* baru melalui peningkatan pemahaman terhadap unit truk yang akan dioperasikan, karakteristik produk yang diangkut, teknik penanganan produk yang aman, serta penerapan teknik mengemudi defensif.

Efektivitas penerapan kompetensi tersebut dievaluasi melalui proses *in-cabin assessment*, yaitu penilaian langsung terhadap kinerja *driver* baru selama mengemudi dalam jarak dan kondisi tertentu. Apabila hasil *in-cabin assessment* telah memenuhi standar yang ditetapkan Perseroan, *driver* baru diberikan izin untuk melakukan *solo driving*, yaitu pengantaran produk kepada pelanggan secara mandiri. Proses penilaian mencakup sejumlah aspek utama, antara lain:

- Penerapan teknik mengemudi defensif
- Prinsip dasar mengemudi: Mengamati, Memahami, dan Mematuhi
- Rambu lalu lintas
- Pengetahuan berkendara yang baik dan benar

Pelaksanaan dan Biaya Program Pelatihan Tahun 2025

AKR mengalokasikan anggaran pelatihan secara tahunan berdasarkan kebutuhan pengembangan kompetensi karyawan dan tujuan strategis Perseroan. Sepanjang tahun 2025, Kantor Pusat AKR dan unit bisnis logistik melaksanakan program pelatihan sebesar Rp2.390.359.146, mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2024 sebesar Rp1.617.541.315.

Perseroan terus memperkuat komitmen dalam peningkatan kualitas SDM secara berkelanjutan guna mendukung pencapaian kinerja dan pertumbuhan jangka panjang. Sepanjang tahun, berbagai pelatihan dan pengembangan kompetensi dilaksanakan secara internal dan eksternal. Program pelatihan tersebut dirancang secara terstruktur sesuai dengan jenjang jabatan serta relevan bagi seluruh posisi dalam organisasi.

Kategori	Daftar Pelatihan & Pengembangan Karyawan yang dilaksanakan di tahun 2025
Onboarding	*New Employee Orientation Program*
Safety	Ahli K3 Umum
	Basic First Aid
	Behaviour Based Safety
	Fire Fighting
	Risk Assessment (HIRADC)
	Incident Investigation
	Material Safety Data Sheet (MSDS)
	Safety Operation (*Tank Terminal*, *Warehouse*, *Transport*)
	International Maritime Organization (IMO)
Operation	*Land Transport Training*
	Product Knowledge & Product Handling
	Retail Operations
	Security Training 3 Pilar
	Designated Person Ashore (DPA)
	PFSO ISPS *Code*
Leadership	*Leadership Training for Result*
	Mentoring
Specific Training	Perpajakan
	Kepabeanan
	Figma UI/UX *Design*
	Training for Trainers
	Pipe Stress Analysis
	Advancing to Double Materiality for Sustainability Reporting



Penilaian Kinerja Karyawan

Kinerja karyawan dinilai secara objektif, transparan, dan terstruktur untuk memastikan keselarasan antara kinerja individu dengan tujuan strategis Perseroan dan memberikan kejelasan atas target kerja bagi setiap karyawan. Penilaian kinerja dilakukan berdasarkan pencapaian KPI yang ditetapkan pada awal tahun dan disesuaikan dengan fungsi, tanggung jawab, serta tingkat jabatan masing-masing karyawan. *Monitoring* kinerja dilakukan oleh atasan langsung guna memastikan pencapaian target berjalan sesuai rencana.

Pada akhir tahun, pencapaian kinerja setiap karyawan diukur dan dievaluasi secara objektif. Hasil evaluasi tersebut menjadi dasar dalam pengambilan keputusan terkait pemberian *reward*, pengembangan karier, perencanaan pelatihan, serta strategi retensi, guna mendukung pertumbuhan, kesejahteraan karyawan, dan pencapaian tujuan Perseroan.

KPI

Seluruh karyawan wajib mengetahui perihal Target Kerja Individu yang meliputi *Performance* dan Kompetensi ataupun prioritas lain yang ditugaskan kepada karyawan bersangkutan.

***Performance Monitoring* (By Atasan)**

Atasan melakukan *monitoring* secara berkala terhadap seluruh pekerjaan bawahan, untuk mengukur pencapaian kinerja sesuai dengan KPI yang sudah ditentukan sebelumnya.

Performance Evaluation

Pencapaian atau hasil final kinerja karyawan akan dievaluasi pada tengah dan akhir tahun untuk mendapatkan penilaian atas hasil kerja setiap karyawan untuk diproses lebih lanjut oleh HR.

Internalisasi Nilai Perseroan

Perseroan secara berkelanjutan melakukan internalisasi nilai-nilai perusahaan sebagai landasan dalam membentuk budaya kerja yang profesional, berintegritas, dan berorientasi pada kinerja. Nilai-nilai tersebut menjadi pedoman bagi seluruh karyawan dalam bersikap, mengambil keputusan, serta menjalankan aktivitas operasional sehari-hari. Proses internalisasi dilakukan melalui berbagai inisiatif, antara lain melalui berbagai program pelatihan, komunikasi internal, dan aktivitas karyawan yang dirancang untuk memperkuat pemahaman nilai-nilai inti Perseroan dalam setiap tindakan dan keputusan. Adapun program internalisasi nilai-nilai inti Perseroan di tahun 2025, antara lain:

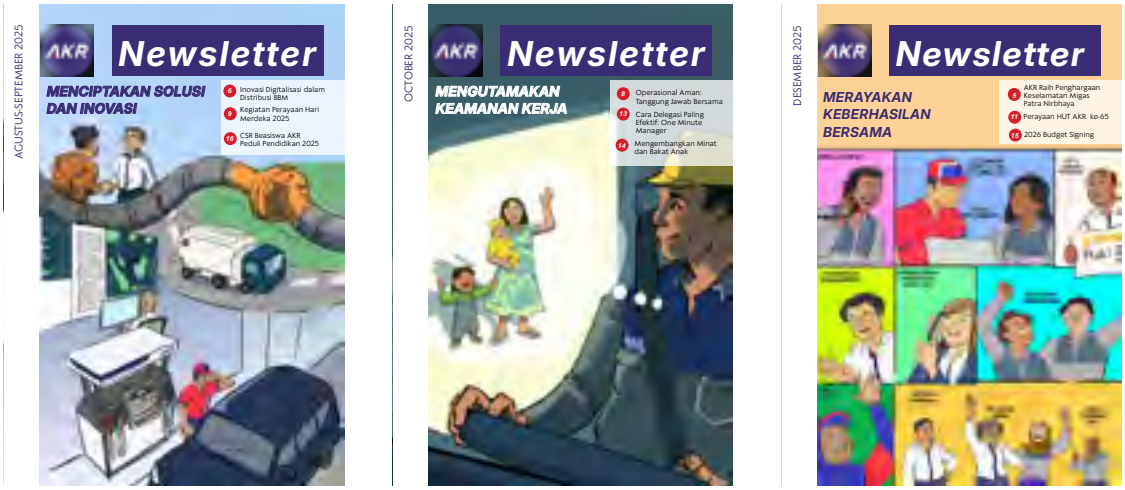
a. Newsletter

Perseroan menggunakan *newsletter* dalam menanamkan nilai-nilai Perseroan kepada karyawan. Dalam setiap edisinya, tim HR membahas hal-hal yang terjadi di lapangan yang relevan dengan penerapan 6 (enam) nilai-nilai Perseroan, yaitu *Be Entrepreneurial, Collaborate, Reward for Performance, Be Agile, Empower Your Team*, dan *Zero Tolerance*. Dalam berbagai kesempatan, tim HR juga berupaya mengkomunikasikan nilai-nilai tersebut dalam acara-acara internal Perseroan yang juga diliput dalam *Newsletter*.









b. Media Communication

Perseroan juga menaruh perhatian khusus untuk mendorong perilaku kerja karyawan yang positif dan sesuai nilai-nilai tersebut, dengan menggunakan media visual seperti video, komik, dan ilustrasi poster yang dipasang di lokasi kantor dan cabang. Media-media internal ini dibuat secara khusus, merespons kebutuhan riil di lapangan, guna membantu menggaungkan pesan dari Manajemen dan mengarahkan seluruh karyawan dari segala level, sampai ke level operatif.

Hubungan Industrial

Perseroan membangun dan memelihara hubungan industrial yang harmonis, dinamis, dan berkeadilan sebagai bagian dari komitmen dalam menciptakan lingkungan kerja yang kondusif dan berkelanjutan. Hubungan industrial dilandasi oleh prinsip saling menghormati, dialog terbuka antara manajemen dan karyawan, serta kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan yang berlaku.

Dalam pelaksanaannya, Perseroan menjalin komunikasi yang efektif dengan karyawan terkait kebijakan Perseroan melalui forum-forum komunikasi, seperti pertemuan reguler dengan perwakilan karyawan atau serikat pekerja. Perseroan juga mengimplementasikan kebijakan dan prosedur yang transparan dalam menyelesaikan permasalahan ketenagakerjaan guna memastikan kesejahteraan karyawan dan mendukung produktivitas kerja secara berkelanjutan.

AKR menyadari bahwa Perseroan dan karyawan adalah satu kesatuan. Hubungan kerja yang didasarkan pada saling percaya, saling menghormati, dan komitmen bersama untuk mencapai tujuan Perseroan. Untuk mendukung terciptanya hubungan industrial yang harmonis, Perseroan. Untuk mendukung terciptanya hubungan industrial yang harmonis, Perseroan menyediakan berbagai program kesejahteraan karyawan, antara lain program kesehatan dan keselamatan kerja, sistem remunerasi yang kompetitif, serta berbagai inisiatif lainnya yang dirancang untuk meningkatkan kesejahteraan dan keterlibatan karyawan.

Program Remunerasi dan Kesejahteraan Karyawan

AKR menjunjung tinggi pencapaian kinerja karyawan yang diimbangi dengan pemberian apresiasi yang adil, transparan, dan kompetitif guna meningkatkan kesejahteraan karyawan. Seluruh hak normatif karyawan dipenuhi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Skema remunerasi dan kesejahteraan karyawan mencakup gaji yang kompetitif, insentif berbasis kinerja, imbalan kerja, serta berbagai manfaat lainnya yang disesuaikan dengan kontribusi, kompetensi, pengalaman, dan tingkat tanggung jawab masing-masing karyawan. AKR menerapkan prinsip kesetaraan dengan rasio remunerasi 1:1 tanpa membedakan gender maupun memberikan hak istimewa tertentu.

Besaran remunerasi di lingkungan AKR dan Entitas Anak ditetapkan melalui proses yang terstruktur dan objektif dengan mempertimbangkan pencapaian kinerja, kompetensi, pengalaman, serta tanggung jawab jabatan.

AKR memandang bahwa penerapan program remunerasi dan kesejahteraan merupakan fondasi penting dalam mendorong peningkatan motivasi, keterlibatan, dan loyalitas karyawan. Untuk itu, langkah strategis yang dilakukan dalam hal remunerasi dan promosi meliputi:

Remunerasi yang kompetitif

1. Me*review* kompensasi yang sesuai dengan market dan mempertimbangkan inflasi serta pertumbuhan ekonomi.
2. Memberikan tunjangan tambahan seperti tunjangan kesehatan & tunjangan transportasi.
3. Memberikan bonus berbasis kinerja bagi karyawan yang berhak.

Promosi dan Pengembangan Karir

1. Melakukan evaluasi kinerja secara berkala dan memberikan kesempatan promosi.
2. Mengadakan pelatihan dan program pengembangan keterampilan untuk meningkatkan kompetensi karyawan.
3. Memberikan kesempatan untuk rotasi kerja atau ekspansi tanggung jawab guna meningkatkan pengalaman kerja.

Program Kesehatan dan Keselamatan Kerja

Dalam menjalankan bisnisnya, AKR memastikan penciptaan lingkungan kerja yang menjunjung kaidah dan prinsip Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3). Hal ini diimplementasikan melalui penyediaan fasilitas kesehatan yang memadai dan upaya Perseroan dalam menciptakan lingkungan yang aman, sehingga tercapainya angka kecelakaan kerja nihil (*zero accident*) dan tidak terdapat penyakit akibat kerja.

Selama tahun 2025, AKR melaksanakan MCU tahunan dengan pendekatan berbasis risiko, yang diprioritaskan bagi karyawan dengan tingkat paparan kerja tinggi. Hasil pemeriksaan digunakan sebagai dasar tindakan preventif dan pengelolaan kesehatan lanjutan. Bekerja sama dengan Palang Merah Indonesia, AKR melaksanakan kegiatan donor darah di Kantor Pusat Jakarta pada tanggal 13 Maret dan 18 September 2025.

Perseroan juga secara rutin melaksanakan kegiatan Pengecekan Mutu Udara di setiap *site*, sebagai bagian dari upaya pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan. Setiap *site* telah memiliki izin lingkungan yang mengacu pada Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UKL/UPL) masing-masing lokasi, dengan matriks pemantauan lingkungan yang telah ditetapkan sesuai regulasi yang berlaku. Pengecekan mutu udara dilakukan secara berkala dengan parameter pengujian yang mengacu pada Peraturan Pemerintah.



Proses pelaksanaan bisnis usaha dalam distribusi produk dan logistik, AKR memastikan kesiapan setiap *driver*nya. Dalam prosesnya, Perseroan mewajibkan seluruh *driver* menjalani pemeriksaan *fit to work* setiap hari sebelum mulai tugas. Ini memastikan para *driver* dalam keadaan fisik yang optimal, sehingga keselamatan karyawan, lingkungan, dan produk dapat terjaga. Kampanye kesiap-sediaan saat mengemudi, dan tips/trik untuk menghindari kondisi kerja yang tidak aman, dilaksanakan secara konsisten.

Untuk mendukung kesejahteraan dan produktivitas karyawan, Perseroan secara konsisten melaksanakan berbagai inisiatif edukasi kesehatan melalui beragam media komunikasi internal. Inisiatif tersebut antara lain penerbitan *newsletter* kesehatan secara berkala setiap triwulan serta penyediaan materi edukasi visual berupa poster kesehatan yang ditempatkan di berbagai area kerja. Upaya ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran karyawan akan pentingnya menjaga kesehatan, sekaligus membangun budaya kerja yang sehat.



06

Tata Kelola Perusahaan

Direksi bertanggung jawab atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Lihat pelaksanaan tugas Direksi **halaman 199**

Proaktif dalam mengelola risiko demi menjaga ketahanan di tengah dinamika usaha

Lihat manajemen risiko pada **halaman 235**





AKR memandang bahwa GCG perusahaan menjadi landasan dalam mendorong pengembangan industri logistik dan distribusi energi yang andal melalui inovasi yang terarah dan kemitraan strategis. Berdasarkan pembaruan regulasi dan keberlanjutan, inisiatif bisnis usaha dijalankan secara bertanggung jawab agar menciptakan nilai jangka panjang.

Pencapaian Tata Kelola **Perusahaan**

Sepanjang tahun 2025, AKR menerapkan praktik tata kelola perusahaan secara konsisten melalui kepatuan terhadap regulasi, keterbukaan informasi yang terukur, pengendalian risiko, serta kesiapan terhadap perkembangan regulasi yang didukung oleh pengakuan eksternal.

Konsistensi & Kualitas Kepatuhan (*Compliance Maturity*)



AKR menjalankan kewajiban tata kelola dan keterbukaan informasi secara konsisten dan tepat waktu sepanjang tahun 2025. Keterbukaan informasi dipenuhi sebagai kewajiban regulasi, sekaligus bagian dari upaya menjaga transparansi dan kepercayaan pasar.

Tata Kelola sebagai *Risk Buffer*



Praktik tata kelola diterapkan sebagai mekanisme pencegahan risiko, khususnya dalam menjaga stabilitas operasional, reputasi, dan kepercayaan pemangku kepentingan. Pengelolaan risiko dilakukan secara terukur, dengan memastikan tidak terdapat ekskalasi isu material yang tidak terkendali sepanjang tahun pelaporan.

Peningkatan Kualitas Keterbukaan Informasi



Keterbukaan informasi sepanjang tahun 2025 dijalankan secara substantif dan kontekstual, tidak terbatas pada pemenuhan formalitas. Komunikasi eksternal dikelola secara terkendali untuk memastikan informasi material disampaikan secara akurat, relevan, dan proporsional kepada publik.

Kesiapan terhadap Regulasi Baru



AKR membangun *early readiness* terhadap perubahan dan pengembangan regulasi, termasuk regulasi keberlanjutan dan pelaporan terkait PSPK 1 dan 2.

Validasi Eksternal atas Praktik GCG



Praktik tata kelola yang dijalankan AKR sepanjang tahun 2025 memperoleh validasi eksternal, termasuk pengakuan AKR sebagai ASEAN Asset Class Plc. Validasi ini mencerminkan konsistensi Perseroan dalam memperkuat praktik transparansi, akuntabilitas, dan tata kelola yang berkelanjutan.

Penghargaan:

01 **AKR – ASEAN Asset Class PLc**
ASEAN Corporate Governance Conference & Awards (ASEAN CGCA) 2025

02 **Best of The Best Execution Winner across All Industries**
SPEX2 Award 2025

03 **SPEx2® (Strategy and Performance Execution Excellence) Award 2025**

04 **The Best Execution Winner in Distribution Industry**
SPEX2 Award 2025

05 **Fortune 100 Indonesia's Biggest Companies 2025**
Fortune Magazine

06 **Top 50 Big Capitalization Public Listed Company 2025**
Indonesian Institute for Corporate Directorship (IICD)

07 **Corporate Secretary Champion Award 2025**
SWA Magazine

08 **The Best Indonesia GCG Award IX 2025**
Economic Review

09 **Triple Excellence Platinum Award**
SPEX2 Award 2025

10 **2025 Asia (ex Japan/ANZ) Equities Awards :**
- **Best CEO (3rd Rank)**
- **Best Investor Relations Professional & Team (2nd Rank)**
- **Best Company Board of Directors (2nd Rank)**

Extel Insight, Hong Kong





Peningkatan penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*/GCG) di AKR dilaksanakan secara berkelanjutan dan selaras dengan visi untuk menjadi pemain utama di bidang penyedia jasa logistik & solusi pengadaan untuk bahan kimia & energi di Indonesia. Dalam mendukung pencapaian visi tersebut, AKR berkomitmen untuk menciptakan manfaat dan nilai tambah bagi para pemangku kepentingan meliputi pemegang saham, karyawan, konsumen, *supplier*, mitra bisnis, regulator, dan masyarakat umum.

Implementasi GCG mengacu pada standar nasional dan internasional yaitu Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 21/POJK.04/2015 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan Terbuka, Pedoman Umum Governansi Korporat Indonesia (PUGKI) Tahun 2021 yang diterbitkan Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG), dan ASEAN Corporate Governance Scorecard *revised* October 2024. Dalam pelaksanaannya, Perseroan secara konsisten melakukan penguatan dan penyempurnaan terhadap struktur, proses, dan mekanisme GCG. Selain itu, evaluasi dan penerapan praktik terbaik dilakukan secara berkala guna memastikan efektivitas penerapan GCG.

Perseroan memastikan bahwa seluruh organ, termasuk Dewan Komisaris, Direksi, serta Komite menjalankan tugasnya berdasarkan prinsip GCG. Sebagai entitas yang menjunjung tinggi transparansi dan akuntabilitas, AKR memiliki seperangkat kebijakan internal, meliputi Pedoman dan Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris dan Direksi, Piagam Komite Penunjang Dewan Komisaris dan Direksi, Deklarasi Pakta Integritas, Pedoman Etika dan Perilaku, serta kebijakan lainnya.

AKR juga berkomitmen menerapkan keberlanjutan selaras dengan aspek Lingkungan Hidup, Ekonomi, dan Tata Kelola (ESG). Komitmen tersebut diwujudkan melalui pembentukan Komite ESG yang bertanggung jawab dalam menetapkan arah strategi, memberikan rekomendasi, mengoordinasikan pelaksanaan, serta memantau dan melaporkan inisiatif ESG di Perseroan. Ini semakin memperkuat integrasi aspek keberlanjutan dalam pengambilan keputusan dan operasional Perseroan.

Selama tahun 2025, Perseroan melaksanakan aktivitas GCG sebagai berikut:

1. **Rapat Umum Pemegang Saham**
   Melaksanakan RUPS tanggal 28 April 2025 yang menyetujui beberapa hal sebagai berikut:
   a. Persetujuan dan pengesahan atas Laporan Direksi mengenai jalannya usaha Perseroan dan tata usaha keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024.
   b. Persetujuan atas rencana penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024.
   c. Penunjukkan Kantor Akuntan Publik Independen yang akan melakukan audit atas pembukuan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025.
   d. Perubahan susunan pengurus Perseroan.
   e. Penetapan remunerasi bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk tahun buku 2025.
2. **Pembagian Dividen**
   Dividen dibagikan sebanyak 2 (dua) kali, yaitu pada tanggal 22 Mei 2025 untuk dividen final setelah dikurangi dividen interim yang dibayarkan pada tahun 2024 dan pada tanggal 19 Agustus 2025 untuk dividen interim tahun 2025, dengan rasio pembayaran >50%.
3. **Kepatuhan terhadap ketentuan Pasar Modal dan Keterbukaan Informasi**
   Perseroan secara konsisten memenuhi kewajiban kepatuhan dan keterbukaan informasi kepada regulator dan publik. Penyampaian informasi material dilakukan secara tepat waktu melalui saluran resmi sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bursa Efek Indonesia (BEI).
4. **Penyelenggaraan Rapat Organ Perseroan**
   Dewan Komisaris dan Direksi secara rutin menyelenggarakan rapat untuk menjalankan fungsi pengawasan dan pengelolaan Perseroan. Rapat-rapat tersebut membahas kinerja Perseroan, pemantauan risiko, serta kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. **Audit dan Pengawasan**
   Perseroan menunjuk Akuntan Publik untuk melakukan audit atas Laporan Keuangan Tahun Buku 2025. Pelaksanaan audit dilakukan sesuai dengan *standard* audit yang berlaku sebagai bagian dari upaya menjaga akuntabilitas dan keandalan informasi keuangan Perseroan.
6. **Pengelolaan Risiko dan Kepatuhan**
   Perseroan menerapkan prinsip GCG dalam pengelolaan risiko dan kepatuhan. Risiko-risiko utama dipantau secara berkelanjutan untuk menjaga stabilitas operasional dan reputasi Perseroan, serta mendukung keberlangsungan usaha.
7. **Kesiapan terhadap Perkembangan Regulasi**
   Meningkatkan pemahaman dan kesiapan terhadap perkembangan regulasi, termasuk regulasi yang berkaitan dengan keberlanjutan dan pelaporan.
8. **Komunikasi dengan Pemangku Kepentingan Pasar Modal**
   Melaksanakan kegiatan komunikasi dengan investor dan pemangku kepentingan termasuk paparan publik dan kegiatan keterlibatan investor lainnya untuk mendukung transparansi dan penyampaian informasi yang seimbang.

Komitmen Membangun **Tata Kelola Perusahaan**

Sebagai penyedia layanan logistik dan rantai pasok yang terintegrasi, Perseroan berkontribusi pada penguatan perekonomian nasional melalui distribusi dan pengadaan produk-produk esensial lintas sektor industri. Dengan berlandaskan prinsip GCG, AKR berfokus pada penciptaan nilai yang berkelanjutan bagi pelanggan, penguatan kemitraan strategis dengan pemasok, kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku, serta pemberian manfaat yang seimbang bagi pemegang saham dan seluruh pemangku kepentingan.

Perseroan memastikan pengelolaan keterbukaan informasi melalui peran Sekretaris Perusahaan. Sebagai penghubungan utama internal kepada pemangku kepentingan eksternal, Sekretaris Perusahaan bertanggung jawab mengkomunikasikan informasi terkait regulasi dan bisnis kepada organ GCG internal. Fungsi ini meliputi pemantauan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, penyampaian informasi yang akurat dan tepat waktu, serta dukungan terhadap efektivitas organ tata kelola.

Dalam membangun penguatan GCG, Perseroan mendorong penerapan praktik bisnis yang etis, berintegritas, dan akuntabel di seluruh tingkat organisasi. Setiap organ GCG senantiasa menjalankan fungsi dan tanggung jawabnya sesuai dengan kebijakan internal serta peraturan perundang-undangan yang berlaku. Melalui penerapan GCG secara konsisten, AKR melindungi hak dan kepentingan seluruh pemangku kepentingan, termasuk investor, sehingga terciptanya kepercayaan dan nilai jangka panjang yang berkelanjutan.

Landasan Penerapan Tata Kelola Perusahaan

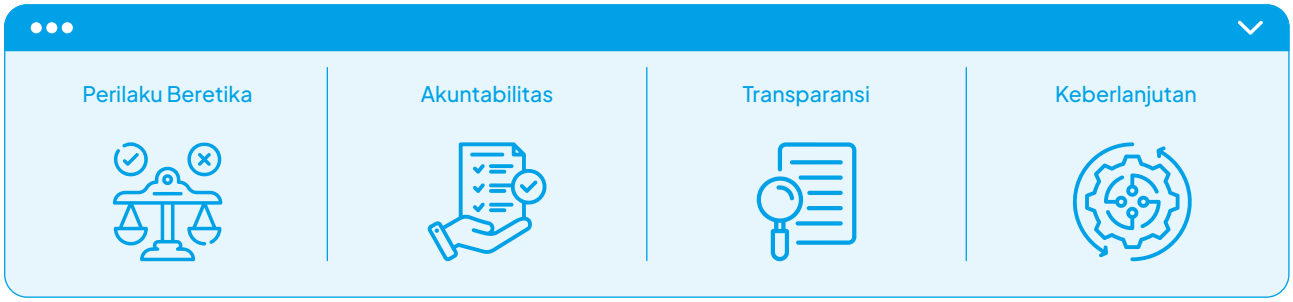
AKR memastikan penerapan GCG dilakukan secara konsisten dengan berlandaskan pada ketentuan hukum dan regulasi yang berlaku, antara lain:

1. Struktur Perseroan & Hak Pemegang Saham:
   a. Undang-Undang Republik Indonesia No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
   b. Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal; dan
   c. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (POJK 32/2014).
2. Tata Kelola & Pengawasan Dewan Komisaris dan Direksi:
   a. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 21/POJK.04/2015 tentang Penerapan Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka (POJK 21/2015); dan
   b. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten dan Perusahaan Publik (POJK 33/2014).
3. Praktik Terbaik Governansi & Standar Regional:
   a. Pedoman Umum Governansi Korporat Indonesia (PUGKI) Tahun 2021 yang diterbitkan Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG);
   b. ASEAN Corporate Governance Scorecard (ACGS) yang diterbitkan oleh ASEAN Capital Market Forum (ACMF); dan
   c. *Roadmap* Tata Kelola Perusahaan Indonesia yang diterbitkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

Prinsip Penerapan Tata Kelola Perusahaan

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, AKR menerapkan prinsip-prinsip GCG secara konsisten dan komprehensif dengan mengacu pada Pedoman Umum Governansi Korporat Indonesia (PUGKI) Tahun 2021. PUGKI 2021 adalah pemutakhiran dari PUGKI 2019 sebagai bentuk aktualisasi prinsip Transparansi, Akuntabilitas, Tanggung Jawab, Kemandirian, dan Kewajaran, serta menjadi pedoman dalam membangun budaya GCG di lingkungan Perseroan.

Perseroan secara berkelanjutan melakukan evaluasi atas perkembangan praktik GCG sebagai wujud komitmen untuk terus menyempurnakan penerapan GCG di seluruh lini organisasi. Prinsip-prinsip tersebut menjadi fondasi kerangka GCG dalam mendorong praktik bisnis yang etis dan bertanggung jawab. Adapun 4 (empat) pilar utama GCG, meliputi:



Prinsip Dasar dan Pedoman Implementasi Tata Kelola Perusahaan

Prinsip	Penjelasan Prinsip Dasar	Pedoman Pokok Pelaksanaan
Perilaku Beretika	Dalam melaksanakan kegiatannya, korporasi senantiasa mengedepankan kejujuran, memperlakukan semua pihak dengan hormat *(respect)*, memenuhi komitmen, membangun serta menjaga nilai-nilai moral dan kepercayaan secara konsisten. Korporasi memperhatikan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya berdasarkan asas kewajaran dan kesetaraan *(fairness)* dan dikelola secara independen sehingga masing-masing organ perusahaan tidak saling mendominasi dan tidak dapat diintervensi oleh pihak lain.	• Perseroan membuka akses terhadap informasi dan memberikan kesempatan kepada Pemangku Kepentingan untuk memberikan masukan dan menyampaikan pendapat bagi kepentingan Perseroan. • Perseroan memberikan perlakuan yang setara dan wajar kepada Pemangku Kepentingan sesuai dengan manfaat dan kontribusi yang diberikan kepada Perseroan. • Perseroan juga memberikan kesempatan yang sama dalam penerimaan karyawan dan karir tanpa membedakan suku, agama, jenis kelamin, dan kondisi fisik.
Akuntabilitas	Korporasi dapat mempertanggungjawabkan kinerjanya secara transparan dan wajar. Untuk itu Korporasi harus dikelola secara benar, terukur dan sesuai dengan kepentingan korporat dengan tetap memperhitungkan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan. Akuntabilitas merupakan prasyarat yang diperlukan untuk mencapai kinerja yang berkelanjutan.	Perseroan mempertanggungjawabkan kinerjanya secara transparan dan wajar sesuai dengan kepentingan Perseroan dengan tetap memperhitungkan kepentingan Pemegang Saham dan Pemangku Kepentingan lain.
Transparansi	Untuk menjaga objektivitas dalam menjalankan bisnis, korporasi menyediakan Informasi yang material dan relevan dengan cara yang mudah diakses dan dipahami oleh pemangku kepentingan. Korporasi mengambil inisiatif untuk mengungkapkan tidak hanya masalah yang disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan, tetapi juga hal yang penting untuk pengambilan keputusan oleh pemegang saham, kreditur dan pemangku kepentingan lainnya.	• Perseroan menyediakan informasi yang material dan relevan dengan cara yang mudah diakses dan dipahami oleh pemangku kepentingan. • Perseroan mengungkapkan hal-hal yang disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan dan hal penting bagi para pemegang saham dan pemangku kepentingan.
Keberlanjutan	Korporasi mematuhi peraturan perundang-undangan serta berkomitmen melaksanakan tanggung jawab terhadap masyarakat dan lingkungan agar berkontribusi pada pembangunan berkelanjutan melalui kerjasama dengan semua pemangku kepentingan terkait untuk meningkatkan kehidupan mereka dengan cara yang selaras dengan kepentingan bisnis dan agenda Pembangunan berkelanjutan.	Perseroan mematuhi perundang-undangan serta melaksanakan tanggung jawab terhadap masyarakat dan lingkungan sehingga kesinambungan usaha dalam jangka panjang dapat terpelihara dan mendapat pengakuan sebagai *good corporate citizen*.

Di samping pilar-pilar tersebut, Perseroan menerapkan 8 (delapan) prinsip GCG antara lain; peran dan tanggung jawab Direksi dan Dewan Komisaris; komposisi dan remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris; hubungan kerja antara Direksi dan Dewan Komisaris; perilaku etis; manajemen risiko, pengendalian intern, dan kepatuhan; pengungkapan dan transparansi; hak-hak pemegang saham; dan hak-hak pemangku kepentingan. Prinsip-prinsip tersebut terbagi menjadi 3 (tiga) kelompok:

1. Kelompok prinsip pertama, kedua, dan ketiga adalah prinsip yang mengatur fungsi pengurusan dan pengawasan korporasi, yaitu Direksi dan Dewan Komisaris;
2. Kelompok prinsip keempat, kelima, dan keenam adalah prinsip yang mengatur proses dan keluaran yang dihasilkan oleh Direksi dan Dewan Komisaris;
3. Kelompok prinsip ketujuh dan kedelapan adalah prinsip yang mengatur pemilik sumber daya, yang terutama akan menerima manfaat dari pelaksanaan governansi korporat.

Prinsip-prinsip GCG dijelaskan dalam tabel berikut:

Definisi	Pedoman Pokok Pelaksanaan
Peran dan Tanggung Jawab Direksi dan Dewan Komisaris	
Direksi dan Dewan Komisaris menjalankan peran dan tanggung jawabnya secara independen untuk menciptakan nilai yang berkelanjutan untuk kepentingan terbaik jangka panjang korporasi dan pemegang saham, dengan mempertimbangkan kepentingan para pemangku kepentingan.	Prinsip 1 berkaitan dengan peran dan tanggung jawab Direksi dalam melakukan pengelolaan korporasi serta peran dan tanggung jawab Dewan Komisaris dalam melakukan pengawasan atas pengelolaan korporasi oleh Direksi. Di samping itu Prinsip ini mengatur penilaian kinerja Direksi dan Dewan Komisaris dan anggotanya masing-masing, penanganan benturan kepentingan yang terjadi pada anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris serta peningkatan kompetensi anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris.

Definisi	Pedoman Pokok Pelaksanaan
Komposisi dan Remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris	
Anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris dipilih dan ditetapkan sedemikian rupa sehingga komposisi Direksi sebagai organ pengelolaan dan komposisi Dewan Komisaris sebagai organ pengawasan adalah beragam dan masing-masing terdiri dari para Direktur dan Komisaris yang memiliki komitmen, pengetahuan, kemampuan, pengalaman dan keahlian yang dibutuhkan untuk memenuhi secara tepat peran pengelolaan Direksi dan peran pengawasan Dewan Komisaris. Remunerasi dirancang untuk secara efektif menyelaraskan kepentingan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris dengan kepentingan jangka panjang korporasi dan penciptaan nilai yang berkelanjutan.	Prinsip 2 mengharuskan pemilihan dan penetapan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris dilakukan sedemikian rupa sehingga Direksi dan Dewan Komisaris masing-masing sebagai organ pengelolaan dan pengawasan memiliki komposisi anggota dengan pengetahuan, kemampuan, dan keahlian yang dibutuhkan sesuai dengan perannya masing-masing. Di samping itu, Prinsip ini menekankan pentingnya kebijakan remunerasi untuk mendorong anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris mengutamakan kepentingan jangka panjang korporasi berdasarkan prinsip keberlanjutan, serta mengharuskan pengungkapan kebijakan dan informasi remunerasi yang diterima oleh Direksi dan Dewan Komisaris secara transparan dan akuntabel.
Hubungan Kerja antara Direksi dan Dewan Komisaris	
Direksi dan Dewan Komisaris memiliki hubungan kerja yang erat, terbuka, konstruktif, profesional dan saling percaya untuk kepentingan terbaik korporasi.	Prinsip 3 menekankan pentingnya hubungan kerja yang erat, terbuka, konstruktif, profesional, saling percaya antara Direksi dan Dewan Komisaris dalam mencapai kepentingan terbaik korporasi. Prinsip 3 ini juga mengatur perlunya Dewan Komisaris mengakses informasi yang lengkap serta pentingnya anggota Direksi dan Dewan Komisaris memahami implikasi struktur kepemilikan korporasi terhadap pelaksanaan perannya.
Perilaku Etis	
Korporasi memiliki komitmen untuk bertindak secara etis dan bertanggung jawab, menegakkan nilai-nilai dan budaya organisasi.	Prinsip 4 mengharuskan korporasi untuk membuat pernyataan secara berkala tentang komitmen korporasi tidak hanya mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku, namun juga komitmen untuk bertindak etis dan bertanggung jawab.
Manajemen Risiko, Pengendalian Intern dan Kepatuhan	
Korporasi menjalankan praktik governansi korporat yang terintegrasi dengan penerapan sistem pengendalian internal dan manajemen risiko, serta sistem manajemen kepatuhan yang efektif dalam rangka mendukung pencapaian sasaran, visi, misi, tujuan, maupun target kinerja korporat dalam menjalankan bisnis secara berintegritas.	Prinsip 5 mengharuskan Direksi untuk mengimplementasikan GCG, sistem pengendalian internal dan manajemen risiko, dan sistem manajemen kepatuhan secara terintegrasi sebagai bagian dari strategi, perangkat manajemen, dan praktik yang dijalankan korporasi dalam berbisnis secara bertanggung jawab (*responsible business*) sebagai warga korporat yang baik (*good corporate citizen*). Dewan Komisaris memantau dan menyampaikan masukan terhadap efektivitas penerapan GCG, sistem pengendalian internal dan manajemen risiko, dan sistem manajemen kepatuhan korporat yang dilaksanakan secara terintegrasi oleh Direksi.
Pengungkapan dan Transparansi	
Korporasi membuat pengungkapan yang akurat dan tepat waktu mengenai semua hal yang material tentang korporasi.	Prinsip 6 mengharuskan korporasi untuk memiliki kerangka GCG yang mampu memberikan keyakinan yang dapat menghasilkan pengungkapan yang akurat dan tepat waktu mengenai semua hal yang material tentang korporasi, yang meliputi kondisi dan kinerja keuangan, kepemilikan atas korporasi, dan governansi korporat.
Hak-hak Pemegang Saham	
Korporasi melindungi dan memfasilitasi pelaksanaan hak pemegang saham dan memastikan perlakukan yang adil terhadap pemegang saham, termasuk pemegang saham minoritas. Semua pemegang saham memiliki kesempatan untuk mendapatkan ganti rugi yang efektif atas pelanggaran hak-hak mereka.	Prinsip 7 menjelaskan mengenai pemenuhan hak pemegang saham dan perlakuan adil bagi pemegang saham, bagaimana cara kerja sama aktif antara korporasi dengan pemegang sahamnya dilaksanakan serta pelaksanaan sebagian hak pemegang saham secara efektif melalui RUPS.
Hak-Hak Pemangku Kepentingan	
Korporasi mengakui hak-hak pemangku kepentingan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku atau suatu perjanjian yang disepakati oleh korporasi dan mendorong kerja sama aktif dengan pemangku kepentingan dalam menciptakan kekayaan, lapangan kerja, dan keberlanjutan usaha yang sehat secara finansial.	Prinsip 8 menjelaskan peran Direksi dan Dewan Komisaris mengintegrasikan aspek keberlanjutan dalam model bisnis korporasi, melaksanakan pelibatan pemangku kepentingan, serta memastikan perlindungan terhadap hak-hak para pemangku kepentingan. Dewan Komisaris memantau pengintegrasian semua aspek tersebut di atas yang dilakukan oleh Direksi.

Tujuan Tata Kelola Perusahaan

Penerapan GCG di lingkungan Perseroan bertujuan untuk:

1. Mengoptimalkan potensi dan nilai perusahaan serta Insan yang ada di dalamnya agar memiliki daya saing yang kuat serta mampu menjaga integritas serta kredibilitas di mata seluruh pemangku kepentingan.
2. Menjaga pengelolaan perusahaan yang profesional, efisien, dan efektif serta memberdayakan fungsi organ perusahaan.
3. Menjaga organ perusahaan agar dapat merumuskan keputusan yang independen dilandasi nilai moral serta asas kepatuhan yang tinggi terhadap peraturan perundang-undangan.
4. Mendorong kesadaran insan perusahaan terhadap tanggung jawab kepada pemangku kepentingan serta keamanan, kesehatan, dan kelestarian lingkungan di sekitar perusahaan.
5. Mendorong penciptaan benefit di setiap wilayah operasional perusahaan maupun di setiap bidang bisnis yang dikembangkan.

Kerangka Tata Kelola Perusahaan

Penerapan GCG dilakukan melalui 3 (tiga) kerangka kerja (*governance framework*) yaitu *governance structure*, *governance process*, dan *governance outcome* untuk meningkatkan *best practices*. Kerangka kerja yang menjadi landasan atas dasar semua tindakan Perseroan dalam mengimplementasikan prinsip-prinsip GCG antara lain:

Struktur Tata Kelola Perusahaan	Proses Tata Kelola Perusahaan	Hasil Tata Kelola Perusahaan
• Organ Utama • Organ Pendukung • Infrastruktur	• Pemenuhan hak Pemegang Saham dan perlakuan yang sama kepada seluruh Pemegang Saham. • Pemenuhan hak Pemangku Kepentingan. • Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab. • Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan Perseroan.	• Memaksimalkan nilai Perseroan. • Meningkatkan daya saing Perseroan. • Mendorong pengelolaan Perseroan secara transparan dan efisien. • Mendorong organ Perseroan agar menjalankan perusahaan dengan dilandasi nilai moral yang tinggi dan kepatuhan terhadap perundang-undangan. • Mengendalikan dan mengarahkan hubungan antar organ Perseroan. • Mendorong kesadaran akan tanggung jawab sosial perusahaan terhadap Pemangku Kepentingan. • Meningkatkan kepercayaan pasar untuk mendorong investasi dan pertumbuhan ekonomi nasional.

Struktur Tata Kelola Perusahaan

Perseroan memiliki organ GCG yang terdiri atas Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Dewan Komisaris, dan Direksi. Organ-organ tersebut menjadi fondasi AKR dalam menetapkan visi, misi, serta mendukung pencapaian kinerja dan target guna menjaga keberlangsungan usaha. Dengan berlandaskan hal tersebut, AKR menempatkan sinergi dan harmonisasi antar organ Perseroan sebagai aspek yang esensial untuk menciptakan efektivitas pengambilan keputusan serta memastikan penerapan GCG secara berkelanjutan.

Selain organ utama GCG, AKR juga memiliki organ pendukung dengan pembagian wewenang yang jelas. Tujuan pembentukan organ GCG adalah untuk mendukung penerapan prinsip-prinsip GCG yang terstruktur dan sistematis, di mana setiap organ diharapkan memahami fungsi dan tugasnya secara jelas sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dan Peraturan Perundang-Undangan.

1. **RUPS**
   RUPS adalah organ Perseroan yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris dalam batas yang ditentukan dalam Undang-Undang dan/atau Anggaran Dasar.

2. **Dewan Komisaris**
   Dewan Komisaris adalah organ Perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan Anggaran Dasar serta memberi nasihat kepada Direksi. Untuk mendukung pengawasan GCG, Dewan Komisaris didukung oleh komite-komite berikut:
   a. Komite Audit; dan
   b. Komite Nominasi dan Remunerasi.

3. **Direksi**
   Direksi adalah organ Perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan, sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar. Organ Pendukung antara lain:
   a. Sekretaris Perusahaan;
   b. Audit Internal; dan
   c. Hubungan Investor.

Struktur Tata Kelola



Governance Soft Structure

Guna tercapai tugas dan tanggung jawab yang jelas, organ GCG didukung oleh perangkat kebijakan atau *governance soft structure* agar penerapan GCG dapat berjalan efektif dan terarah. Perangkat Kebijakan dan Pedoman di AKR berfungsi sebagai panduan bagi setiap Insan Perseroan dalam menjalankan kegiatan operasionalnya. Perseroan telah menetapkan perangkat kebijakan yang telah disepakati bersama oleh Dewan Komisaris dan Direksi.

Perangkat kebijakan dan Pedoman mengatur pelaksanaan hubungan kerja seluruh organ di lingkungan Perseroan yang mengacu pada ketentuan Anggaran Dasar dan peraturan serta undang-undang yang berlaku. Perseroan telah menetapkan perangkat Kebijakan dan Pedoman meliputi:
1. Anggaran Dasar Perseroan;
2. Pedoman Direksi dan Dewan Komisaris;
3. Piagam Komite Audit;
4. Piagam Komite Nominasi dan Remunerasi;
5. Piagam Komite ESG;
6. Piagam Audit Internal;
7. Kebijakan Manajemen Risiko;
8. *Whistleblowing System* & Kebijakan Anti Korupsi;
9. Seleksi Pemasok dan Hak-hak Kreditur;
10. Kebijakan Periode *Blackout*; dan
11. Kode Etik.

Mekanisme Tata Kelola Perusahaan

Tujuan mekanisme GCG adalah untuk mengatur harmonisasi setiap organ Perseroan agar bertindak sesuai dengan tugas dan fungsinya. Dewan Komisaris menjalankan fungsi pengawasan yang didukung oleh Komite Audit serta Komite Nominasi dan Remunerasi. Sedangkan, Direksi menjalankan fungsi pengelolaan Perseroan didukung oleh Unit Audit Internal, Sekretaris Perusahaan, dan Hubungan Investor.

Sebagai upaya meningkatkan kualitas GCG, Perseroan juga melakukan internalisasi budaya GCG kepada seluruh Insan Perseroan. Hal tersebut menjadi dasar pelaksanaan penyempurnaan dan perbaikan GCG agar nilai jangka panjang dapat terus dirasakan oleh seluruh pemangku kepentingan secara luas. Perseroan memiliki 3 (tiga) fokus utama dalam melaksanakan proses internalisasi, antara lain:

Compliance	Confidence	Tranparency
Merupakan prinsip kepatuhan Perseroan terhadap Tata Kelola Perusahaan yang Baik di semua aspek, termasuk penerapan kebijakan Perseroan.	Merupakan penanaman sikap optimis dan percaya diri bahwa Perseroan senantiasa memberikan yang terbaik bagi seluruh Pemangku Kepentingan.	Menunjukkan bahwa Perseroan senantiasa mengedepankan prinsip keterbukaan dan senantiasa memberikan informasi yang dibutuhkan bagi investor.

Komitmen atas pelaksanaan implementasi prinsip-prinsip GCG melalui pendekatan utama yaitu internalisasi nilai-nilai GCG kepada seluruh karyawan di setiap proses bisnis dan penguatan keterbukaan informasi kepada pihak eksternal. Rincian pendekatan utama tersebut disajikan dalam tabel berikut:

Internalisasi Perseroan	Exposure Eksternal Perseroan
• Prosedur Pengadaan Barang • Prosedur Seleksi Pegawai • Prosedur Penerimaan • Prosedur Pelaporan • Prosedur Pemasaran	• Kegiatan hubungan investor (*briefing* laporan triwulanan, presentasi investor, konferensi, *roadshow*, pertemuan khusus yang dihadiri oleh investor dan analis). • Paparan publik tahunan. • Penyampaian keterbukaan informasi kepada OJK dan BEI. • *Update website* Perseroan secara berkala (www.akr.co.id). • Penyebaran informasi secara berkala berupa *news release* kepada para pemangku kepentingan.

Penilaian Penerapan **Tata Kelola Perusahaan**

Secara berkala, Perseroan melakukan penilaian GCG sebagai bagian dari mekanisme *check and balance* untuk mengukur kualitas penerapannya. Penilaian GCG memastikan bahwa Perseroan mematuhi peraturan yang berlaku serta standar etika bisnis. Selain itu, penilaian GCG juga berperan dalam membangun dan memelihara kepercayaan para pemangku kepentingan.

AKR melakukan 2 (dua) metode penilaian GCG yaitu *self-assessment* berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan oleh internal Perseroan dan penilaian yang mengadopsi Parameter ASEAN Corporate Governance Scorecard (ACGS). Metode tersebut menggunakan parameter yang diakui secara umum untuk memastikan penilaian yang objektif dan kredibel.

Self-Assessment

Penilaian penerapan GCG berbasis *self-assessment* berdasarkan pada ketentuan POJK 21/2015. Penilaian dilakukan dengan sistematis dan komprehensif melalui berbagai aspek yaitu struktur tata kelola (*governance structure*), tata kelola proses (*governance process*), dan hasil tata kelola (*governance outcome*). Penjelasan ketiga aspek tersebut, yakni:

1. **Struktur Tata Kelola**
   Perseroan menilai kecukupan struktur dan infrastruktur GCG yang dimiliki dalam menghasilkan *outcome* yang sesuai dengan harapan para pemangku kepentingan.
2. **Proses Tata Kelola**
   Perseroan menilai efektivitas proses penerapan prinsip GCG sebagaimana didukung dengan kecukupan struktur dan infrastruktur, agar menghasilkan hasil yang sesuai dengan harapan para pemangku kepentingan.
3. **Hasil Tata Kelola**
   Perseroan menilai kualitas hasil GCG untuk melihat struktur dan proses GCG telah dilakukan dengan baik dan sesuai harapan pemangku Kepentingan.

AKR menetapkan pelaksanaan *self-assessment* dilakukan oleh Sekretaris Perusahaan dan Hubungan Investor. Data dan informasi yang relevan dikumpulkan untuk keperluan *self-assessment* terkait kecukupan dan efektivitas penerapan GCG. Berbagai temuan yang ada akan menjadi *benchmark* bagi AKR untuk menindaklanjuti berbagai rekomendasi agar dapat meningkatkan kualitas GCG di lingkup Perseroan.

Temuan yang ada serta tindak lanjutnya bersumber dari pihak internal mencakup Dewan Komisaris, Direksi, Sekretaris Perusahaan, Human Resource, Internal Audit, dan Komite ESG. Perseroan juga menampung berbagai temuan dari pihak eksternal, termasuk dari pemegang saham, lembaga rating, masyarakat, media dll.

Rekomendasi dan tindak lanjut atas pelaksanaan *self-assessment* tahun 2025 terkait penerapan GCG di antaranya:

No	Area Fokus Tata Kelola	Rekomendasi	Tindak Lanjut
1.	Kebijakan Transaksi Afiliasi	Penyempurnaan Kebijakan dan mekanisme penelaahan transaksi afiliasi untuk memastikan independensi, kewajaran, dan kepatuhan terhadap regulasi.	Peninjauan berkala kebijakan transaksi afiliasi, penguatan proses *review* internal, serta peningkatan pelaporan dan *monitoring* transaksi material kepada manajemen dan organ pengawas.
2	Pengelolaan Risiko Perubahan Kebijakan	Peningkatan kesiapan Perseroan dalam mengantisipasi perubahan kebijakan dan regulasi yang berpotensi mempengaruhi kegiatan usaha.	Pemantauan perkembangan regulasi secara berkala, koordinasi lintas fungsi untuk analisis dampak, serta integrasi risiko kebijakan ke dalam kerangka manajemen risiko Perseroan.
3	Pengelolaan Transparansi Informasi	Penerapan keterbukaan informasi yang akurat, seimbang, dan terukur untuk menjaga kepatuhan serta kepentingan strategis Perseroan.	Penyelarasan proses *disclosure* dan komunikasi eksternal, penguatan koordinasi antar fungsi terkait, serta peningkatan konsistensi pesan kepada pemangku kepentingan.
4	Pengelolaan Ekspektrasi Pemangku Kepentingan	Penguatan komunikasi yang konstruktif dan berkelanjutan dengan pemangku kepentingan utama untuk menjaga kepercayaan dan stabilitas usaha.	Penyelarasan pesan strategis Perseroan serta peningkatan efektivitas *engagement* dengan investor, regulator, dan mitra usaha.
5	Evaluasi Kinerja Direksi	Penguatan proses evaluasi kinerja Direksi secara terstruktur dan selaras dengan strategi jangka panjang Perseroan.	Penyelarasan indikator kinerja utama (KPI) Direksi dengan strategi dan manajemen risiko Perseoran, Pelaksanaan evaluasi kinerja secara berkala melalui mekanisme yang ditetapkan, serta pemanfaatan hasil evaluasi sebagai dasar peningkatan efektivitas kepemimpinan dan pengambilan keputusan.

Penilaian Eksternal

Perseroan secara berkelanjutan memperkuat pemenuhan berbagai aspek penilaian dalam ASEAN Corporate Governance Scorecard (ACGS) yang mengadopsi standar penilaian praktik GCG berdasarkan prinsip Organization for Economic Cooperation and Development (OECD). ACGS adalah instrumen penilaian GCG yang dikembangkan oleh ASEAN Capital Market Forum (ACMF).

Berdasarkan penilaian ACGS 2024 yang dilakukan oleh PT RSM Indonesia Konsultan, Perseroan memperoleh total skor sebesar 101,06, meningkat signifikan dibandingkan skor ACGS 2021 sebesar 84,45. Terdapat 4 (empat) aspek penilaian berdasarkan pada ACGS versi 2 – Maret 2024 dengan detail sebagai berikut:

Parameter	Skor
Prinsip A : Hak-Hak & Perlakuan Setara Terhadap Pemegang Saham	92,31
Prinsip B : Keberlanjutan & Ketahanan	95,45
Prinsip C : Pengungkapan dan Transparansi	88,24
Prinsip D : Tanggung Jawab Dewan	82,54
Total Skor (Level 1 & 2)	**101,06**

Berdasarkan hasil penilaian tersebut, penerapan tata kelola AKR telah melampaui pemenuhan persyaratan minimum dan mencerminkan adopsi praktik tata kelola tingkat lanjut yang sejalan dengan standar internasional sebagaimana diisyaratkan dalam ACGS. Dengan skor 101,06, Perseroan diklasifikasikan sebagai ASEAN Asset Class Public Listed Company (PLC).

Penilaian standar tata kelola PLC didasarkan pada informasi yang tersedia dan dapat diakses publik dengan batas waktu pada 30 Juni 2024. Reviu atas informasi publik tersebut meliputi laporan tahunan, laporan berkelanjutan, situs web perusahaan, RUPS (pemanggilan, undangan, risalah, ringkasan risalah), Anggaran Dasar, piagam Dewan Komisaris/Direksi, pengumuman Perseroan pada bursa, dan media.

Rapat Umum **Pemegang Saham**

Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) merupakan organ tertinggi dalam struktur GCG yang berfungsi sebagai sarana bagi pemegang saham untuk melaksanakan hak dan wewenang yang tidak dimiliki oleh Dewan Komisaris dan Direksi dalam batasan ketentuan peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar Perseroan. RUPS sebagai forum untuk melaporkan pertanggungjawaban Dewan Komisaris terkait pengawasan dan Direksi terkait pengelolaan Perseroan.

Dalam RUPS juga dapat mengubah anggaran dasar, mengangkat dan memberhentikan Direksi dan/atau Dewan Komisaris, memutuskan pembagian tugas dan wewenang pengurusan di antara Direksi, dan lain-lain. Para pemegang saham dalam RUPS memiliki hak untuk memutuskan hal-hal material yang berkaitan dengan keberlanjutan Perseroan dan memberikan pendapat serta memperoleh Informasi terkait Perseroan. Pengambilan Keputusan dalam RUPS diambil secara wajar dan transparan melalui musyawarah atau mekanisme pemungutan suara dari pemegang saham yang hadir atau perwakilannya yang sah sesuai ketentuan.

AKR senantiasa menjaga kepentingan seluruh pemegang saham minoritas, baik dalam pengambilan keputusan maupun dalam menyampaikan gagasan dan ide yang membangun bagi Perseroan. Untuk mendukung hal tersebut, Perseroan memiliki mekanisme tertentu yang melibatkan Komisaris Independen dimana tidak mewakili kepentingan pemegang saham mayoritas tertentu.

Penyelenggaraan RUPS mengacu pada Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan terbatas, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (POJK 15/2020), dan Anggaran Dasar Perusahaan. Jenis RUPS di Perseroan, meliputi:

1. RUPS Tahunan yang diselenggarakan setiap tahun; dan
2. RUPS Luar Biasa yang diselenggarakan sesuai kebutuhan apabila diperlukan oleh Direksi atas permintaan tertulis dari Dewan Komisaris/pemegang saham.

Untuk meningkatkan keterlibatan pemegang saham dan memastikan penerapan transparansi, Departemen Hubungan Investor secara proaktif mengirimkan undangan guna mendorong partisipasi pemegang saham menghadiri RUPS. Selain itu, *Investor Relation* juga berkolaborasi dengan pihak ketiga, yaitu ISS Research untuk mendapatkan suara awal dari pemegang saham

Wewenang RUPS

RUPS adalah organ utama dalam GCG yang memiliki wewenang, meliputi:

1. Mengangkat, memberhentikan dan/atau mengganti anggota Direksi dengan memperhatikan rekomendasi dari Dewan Komisaris dan/atau Komite Nominasi dan Remunerasi.
2. Mengangkat, memberhentikan dan/atau mengganti anggota Dewan Komisaris dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi.
3. Memberikan persetujuan Laporan Tahunan termasuk pengesahan Laporan Keuangan serta tugas pengawasan Dewan Komisaris sesuai peraturan perundang-undangan dan/atau Anggaran Dasar Perusahaan.
4. Memberikan persetujuan penetapan penggunaan laba bersih Perseroan.
5. Memberikan pengesahan/keputusan yang diperlukan untuk menjaga kepentingan usaha Perseroan dalam jangka panjang dan jangka pendek sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan/atau Anggaran Dasar.
6. Memberikan persetujuan penetapan gaji dan tunjangan lainnya anggota Direksi Perseroan serta honorarium dan tunjangan lainnya anggota Dewan Komisaris Perseroan.
7. Menetapkan penunjukan Kantor Akuntan Publik Independen untuk melakukan audit keuangan Perseroan.
8. Menyetujui perubahan Anggaran Dasar Perseroan dengan mengacu kepada peraturan perundangan yang berlaku.
9. Mengambil keputusan melalui proses yang terbuka dan adil serta dapat dipertanggungjawabkan.
10. Melaksanakan Tata Kelola Perusahaan yang Baik sesuai dengan wewenang dan tanggung jawabnya.

Prosedur Penyelenggaraan RUPS

Prosedur pelaksanaan RUPS diatur dalam Pasal 11 Anggaran Dasar Perseroan dan berpedoman pada POJK 15/2020 meliputi:

1. Pemberitahuan mengenai rencana akan diselenggarakannya Rapat ke OJK melalui surat Perseroan.
2. Pengumuman dan Pemanggilan RUPS disampaikan oleh Perseroan melalui situs web Bursa Efek Indonesia, eASY. KSEI, dan situs web Perseroan.
3. Perseroan tidak mengirimkan surat undangan tersendiri kepada pemegang saham, sehingga iklan panggilan merupakan undangan resmi bagi pemegang saham Perseroan.
4. Pemegang Saham yang berhak hadir atau diwakili dalam RUPS adalah:
   a. Untuk saham-saham Perseroan yang tidak berada dalam Penitipan Kolektif Pemegang Saham Perseroan atau kuasa Pemegang Saham Perseroan yang nama-namanya tercatat secara sah dalam daftar Pemegang Saham Perseroan.

b. Untuk saham-saham Perseroan yang berada di dalam Penitipan Kolektif: Pemegang Saham Perseroan atau kuasa Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat pada pemegang rekening atau Bank Kustodian di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI). Bagi pemegang rekening efek KSEI dalam Penitipan Kolektif diwajibkan memberikan daftar Pemegang Saham Perseroan yang dikelolanya kepada KSEI untuk mendapatkan Konfirmasi Tertulis Untuk RUPS (KTUR).

5. Keikutsertaan Pemegang Saham dalam Rapat dapat dilakukan dengan mekanisme:
   a. hadir dalam rapat secara fisik atau
   b. hadir dalam rapat secara elektronik melalui aplikasi eASY.KSEI.
6. Perseroan akan memastikan para Pemegang Saham Perseroan ("Pemegang Saham") yang tidak dapat hadir atau memilih untuk tidak hadir dalam Rapat dapat menggunakan haknya dengan:
   a. Mengotorisasi *proxy* elektronik ("e-Proxy") melalui platform Elektronik Sistem Rapat Umum (eASY.KSEI) yang disediakan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI), yang dapat diakses melalui aplikasi eASY.KSEI dengan tautan https://easy.ksei.co.id ("Aplikasi eASY.KSEI"), sebagai mekanisme e-Proxy dalam proses penyelenggaraan Rapat dan tersedia sejak tanggal Panggilan Rapat sampai dengan pukul 12.00 WIB pada 1 (satu) hari kerja sebelum Rapat. Tata cara e-Proxy dapat diakses melalui Aplikasi eASY. KSEI; atau
   b. Memberikan kuasa kepada pihak independen yang ditunjuk oleh Perseroan atau pihak yang ditunjuk oleh Pemegang Saham dengan mengisi formulir Surat Kuasa yang telah diunggah di situs Perseroan dan dapat diunduh di situs Perseroan, memberikan kuasa kepada penerima kuasa (untuk hadir dan memberikan suara pada setiap Mata Acara Rapat) pada situs www.akr.co.id dengan ketentuan sebagaimana tercantum dalam Panggilan Rapat.
7. Sebelum memasuki ruang Rapat, pemegang saham atau kuasanya yang hadir dalam Rapat secara fisik diwajibkan untuk:
   a. Melakukan registrasi pada tanggal pelaksanaan Rapat sebelum dimulai rapat dengan menyerahkan fotokopi Surat Kolektif Saham dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau tanda pengenal lainnya.
8. Kuorum kehadiran dan mekanisme Pengambilan Keputusan terkait Mata Acara Rapat.
   a. Untuk Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan, dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Saham yang mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili. (Pasal 11 ayat 3 anggaran dasar Perseroan).
   b. Keputusan Rapat diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai maka keputusan diambil melalui pemungutan suara sebagaimana ditentukan dalam anggaran dasar Perseroan (Pasal 11 ayat 2 anggaran dasar Perseroan).
   c. Keputusan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan adalah sah apabila disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat (Pasal 11 ayat 3 anggaran dasar Perseroan).
   d. Dalam Rapat, tiap saham memberikan hak kepada pemiliknya untuk mengeluarkan 1 (satu) suara (Pasal 11 ayat 14 anggaran dasar Perseroan). Apabila seorang pemegang saham memiliki lebih dari 1 (satu) saham, maka ia hanya diminta untuk memberikan suara 1 (satu) kali dan suaranya itu mewakili seluruh saham yang dimilikinya atau diwakilinya.
   e. Pemegang saham dari saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam Rapat namun abstain (tidak memberikan suara) dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara (Pasal 11 ayat 18 anggaran dasar Perseroan).
9. Tata Cara Penggunaan Hak Pemegang Saham untuk Mengajukan Pertanyaan dan/atau Pendapat:
   a. Kepada Pemegang Saham atau Kuasanya yang hadir secara fisik yang akan mengajukan pertanyaan, diharapkan mengangkat tangan agar terlihat oleh petugas kami yang akan membagikan formulir pertanyaan.
   b. Pertanyaan diberikan secara tertulis dengan mencantumkan nama dan jumlah saham yang dimiliki.
   c. Pemegang Saham atau Kuasanya yang berpartisipasi via media *conferencing* dapat mengajukan pertanyaan melalui kolom *chat* pada kolom '*Electronic Opinions*' yang tersedia dalam layar *E-Meeting Hall* di aplikasi eASY.KSEI yang digunakan dengan menyebutkan nama, jumlah saham yang dimiliki/diwakili, mata acara yang relevan dan pertanyaannya.
   d. Pemegang saham atau penerima kuasanya yang menyaksikan pelaksanaan Rapat melalui Tayangan RUPS memiliki fitur *raise hand* yang dapat digunakan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat selama sesi diskusi per mata acara Rapat berlangsung.
   e. Pertanyaan wajib mengenai pokok Mata Acara Rapat, disampaikan secara singkat, padat dan langsung ke pokok permasalahan.
   f. Ketua Rapat akan memberikan jawaban atau tanggapannya satu per satu, dan dapat meminta bantuan anggota Direksi atau pihak lain untuk menjawab pertanyaan yang diajukan tersebut.
   g. Demi kelancaran jalannya Rapat dan untuk efisiensi waktu, Ketua Rapat berhak untuk membatasi waktu untuk mengajukan pertanyaan serta pemberian jawaban dan tanggapan pada setiap Mata Acara Rapat.
10. Tata Cara Pemungutan Suara adalah sebagai berikut:
   a. Untuk setiap mata acara Rapat akan dilakukan pemungutan suara untuk pengambilan keputusan.
   b. Pemungutan suara dilakukan setelah selesainya pembahasan setiap mata acara Rapat dan penyampaian usulan keputusan serta setelah Ketua Rapat mempersilahkan kepada Pemegang Saham atau Kuasanya untuk melakukan proses pemungutan suara yang akan dipandu oleh Notaris dan Biro Administrasi Efek selaku pihak independen.
   c. Proses pemungutan suara secara elektronik berlangsung di aplikasi eASY.KSEI pada menu *E-Meeting Hall*, *sub menu Live Broadcasting*.
   d. *Voting time* selama proses pemungutan suara secara elektronik Perseroan menetapkan kebijakan waktu pemungutan suara langsung secara elektronik per mata acara dalam Rapat (dengan waktu maksimum adalah 5 (lima) menit per mata acara Rapat).
   e. Pada akhir pemungutan suara, Notaris membaca hasil pemungutan suara untuk setiap mata acara Rapat.

Hak Pemegang Saham dalam RUPS

Perseroan telah mengatur hak-hak pemegang saham dalam RUPS sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebagai berikut:

1. Pemegang Saham berhak untuk hadir dalam RUPS baik sendiri maupun diwakili berdasarkan surat kuasa. Pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPS adalah pemegang saham yang namanya tercatat dalam daftar pemegang saham Perseroan 1 (satu) hari kerja sebelum pemanggilan RUPS.
2. Pemegang Saham berhak memperoleh informasi mata acara RUPS dan bahan terkait mata acara RUPS sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan Perseroan.
3. Pemegang Saham atau kuasa mereka berhak untuk mengajukan pertanyaan dan/atau menyatakan pendapat/tanggapan sehubungan dengan Mata Acara RUPS dan hal-hal lain yang berhubungan Mata Acara RUPS yang bersangkutan sebelum diadakan pengambilan keputusan.
4. Pemegang Saham berhak mengeluarkan suara dalam RUPS. Tiap saham memberi hak kepada pemegangnya untuk mengeluarkan 1 (satu) suara. Apabila seorang pemegang saham memiliki lebih dari 1 (satu) saham, maka ia hanya diminta untuk memberikan suara 1 (satu) kali dan suaranya itu mewakili seluruh saham yang dimilikinya atau diwakilinya.



Pelaksanaan RUPS **Tahun 2025**

RUPS Tahunan

Penyelenggaraan RUPS Tahunan AKR pada tanggal 28 April 2025 secara *hybrid* – fisik dan *online* yang dihadiri oleh Dewan Komisaris, Direksi, Pemegang Saham/Kuasa Pemegang Saham dan perwakilan dari lembaga/profesi penunjang pasar modal. Keputusan Rapat dituangkan dalam Akta No. 16 yang dibuat di hadapan Notaris Aryanti Artisari, S.H., M.Kn Notaris di Jakarta.

Proses Pelaksanaan RUPST

Hari/Tanggal	Senin, 28 April 2025
Waktu	10.16 s.d 11.36 WIB
Tempat	AKR Gallery West, *Meeting Room* Lantai P2, Jl. Panjang No.5, Kebon Jeruk, Jakarta Barat 11530, Indonesia.

Kehadiran		Dewan Komisaris 1. **Soegiarto Adikoesoemo*** Presiden Komisaris 2. **Sofyan A. Djalil** Komisaris 3. **Mohamad Fauzi Maulana Ichsan** Komisaris Independen Direksi 1. **Haryanto Adikoesoemo** Presiden Direktur 2. **Jimmy Tandyo** Direktur 3. **Bambang Soetiono Soedijanto** Direktur 4. **Mery Sofi** Direktur 5. **Suresh Vembu** Direktur 6. **Nery Polim** Direktur 7. **Termurti Tiban** Direktur *) Hadir melalui media telekonferensi pada *Electronic General Meeting System* ("eASY.KSEI").
	Pemegang Saham hadir secara langsung/ melalui kuasa	7.396.958.496 saham (88,07%) hadir di Rapat dari total 19.752.819.600 saham (total saham yang beredar dikurangi jumlah *treasury stock* sebesar 320.655.000 saham). Perhitungan ini berdasarkan Daftar Pemegang Saham Perseroan per tanggal 27 Maret 2025 sampai Pukul 16.00 WIB. Lembaga & Profesi Penunjang Pasar Modal: 1. Notaris Aryanti Artisari, S.H., M.Kn. (Notaris yang ditunjuk oleh Perseroan untuk membuat Berita Acara Rapat) dari Kantor Notaris Aryanti Artisari, S.H., M.Kn. 2. Ibu Nyoman Swastini dan Bapak Antonius Bambang Sigit Pratono dari PT Raya Saham Registra (Biro Administrasi Efek yang ditunjuk oleh Perseroan). 3. Bapak Benyanto Suherman, dari Kantor Akuntan Publik "Purwanto Susanti dan Surja" (a member firm of Ernst & Young Global Limited). 4. Konsultan Hukum, Bapak Iwan Setiawan S.H. dari Makes & Partners Law Firm.

Tahapan Pelaksanaan RUPST

Pemberitahuan RUPST kepada OJK	**14 Maret 2025** Perseroan telah melakukan pemberitahuan mata acara Rapat kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada tanggal 14 Maret 2025 melalui surat Nomor 019/L-AKR-CS/2025 perihal Pemberitahuan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT AKR Corporindo Tbk.
Pengumuman RUPST	**21 Maret 2025** • Dilakukan paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS. • Dipublikasikan pada situs *website* resmi Bursa Efek Indonesia, eASY.KSEI, dan *website* resmi Perseroan yaitu www.akr.co.id
Pemanggilan dan Informasi mengenai Mata Acara RUPST	**5 April 2025** Dilakukan 21 (dua puluh satu) hari sebelum pelaksanaan RUPS, dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan pelaksanaan RUPST.
Pelaksanaan RUPST	**28 April 2025** Sehubungan telah diterbitkannya surat PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) No. KSEI-4012/DIR/0521 tanggal 31 Mei 2021 perihal Penerapan Modul e-Proxy dan Modul e-Voting pada Aplikasi eASY.KSEI beserta Tayangan Rapat Umum Pemegang Saham, KSEI menyediakan platform E-RUPS untuk pelaksanaan RUPS secara elektronik. Rapat diselenggarakan secara elektronik menggunakan aplikasi eASY.KSEI, sehingga Pemegang Saham Perseroan dapat hadir dalam Rapat secara elektronik melalui aplikasi eASY.KSEI

Agenda ke-1

Mata Acara	Persetujuan dan pengesahan atas Laporan Direksi mengenai jalannya usaha Perseroan dan tata usaha keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 serta persetujuan dan pengesahan atas Laporan Keuangan Perseroan termasuk didalamnya Neraca dan Perhitungan Laba/Rugi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 yang telah diaudit oleh Akuntan Publik Independen, dan persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan, laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024, serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquit et de charge*) kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dilakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024.			
Hasil dari Pemungutan Suara	**Abstain**	**Setuju**	**Tidak setuju**	**Total setuju**
	228.366.448 (1,31%)	17.167.430.779 (98,68%)	1.161.269 (0,01%)	**17.395.797.227** **(99,99%)**
Keputusan RUPST	1. Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2024 yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 yang antara lain memuat Laporan Direksi mengenai jalannya usaha Perseroan dan tata usaha keuangan Perseroan serta laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024. 2. Mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan tahun buku 2024 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik "PURWANTONO, SUNGKORO & SURJA" (a member firm of Ernst & Young Global Limited) dengan pendapat "wajar dalam semua hal yang material" sebagaimana tertulis dari laporannya tertanggal 18 Maret 2025 Nomor 00233/2.1032/AU.1/05/0685-5/1//I/2025. 3. Memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya ("*volledig acquit et de charge*") kepada segenap anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah mereka jalankan selama tahun buku 2024, sepanjang tindakan-tindakan mereka tersebut termasuk tindakan-tindakan yang berkaitan dengan kegiatan usaha yang merupakan turunan dari kegiatan usaha utama Perseroan dan tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024.			
Realisasi	Telah direalisasikan pada tahun 2025.			

Agenda ke-2

Mata Acara	Persetujuan atas rencana penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024.			
Hasil dari Pemungutan Suara	**Abstain**	**Setuju**	**Tidak setuju**	**Total setuju**
	181.943.400 (1,05%)	17.215.015.096 (98,95%)	0 (0,00%)	**17.396.958.496** **(100,00%)**
Keputusan RUPST	1. Menyetujui penggunaan Laba Tahun Berjalan Yang Dapat Diatribusikan Kepada Pemilik Entitas Induk adalah sebesar Rp2.225.117.975.000,00, sebagai berikut: a. sebesar Rp200.000.000,00 untuk Dana Cadangan sesuai dengan Pasal 70 UUPT dan Pasal 23 Anggaran Dasar Perseroan; b. sebesar Rp1.975.281.960.000,00 dibagikan kepada seluruh pemegang saham Perseroan yang sah sebagai dividen tunai atau sebesar 88,77% dari Laba Tahun Berjalan Yang Dapat Diatribusikan Kepada Pemilik Entitas Induk, setelah dikurangi jumlah dividen interim yang telah dibagikan sebelumnya kepada pemegang saham berdasarkan: Keputusan Rapat Direksi pada tanggal 23 Juli 2024 sebesar Rp987.640.980.000,00 atau Rp50,00 per saham dengan Jumlah Saham yang Beredar saat itu. Sehingga dengan demikian dividen yang masih akan dibayarkan kepada pemegang saham adalah sejumlah Rp987.640.980.000,00 atau sebanyak-banyaknya sebesar Rp50,00 per saham dengan Jumlah Saham yang Beredar saat ini. Jumlah Saham yang Beredar adalah 19.752.819.600 saham, setelah dikurangi *treasury stock* sejumlah 320.655.000 saham. Selanjutnya pembayaran Dividen Tunai tersebut dilaksanakan dengan penetapan tanggal Daftar Pemegang Saham (*Recording Date*), yaitu tanggal 9 Mei 2025 sampai dengan pukul 16.00 WIB, dengan memperhatikan tanggal Cum dan Ex dividen sesuai dengan Peraturan Bursa Efek Indonesia, dan juga memberikan kuasa kepada Direksi untuk mengatur lebih lanjut mengenai tata cara pembagian dividen tersebut sesuai peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. c. sedangkan sisanya sejumlah Rp249.636.015.000,00 dibukukan sebagai Laba Yang Ditahan dan digunakan sebagai Modal Kerja Perseroan. 2. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan terkait dengan pelaksanaan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 tersebut.			
Realisasi	Telah direalisasikan pada tahun 2025.			

Agenda ke-3

Mata Acara	Penunjukkan Kantor Akuntan Publik Independen yang akan melakukan audit atas pembukuan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025.			
Hasil dari Pemungutan Suara	**Abstain**	**Setuju**	**Tidak setuju**	**Total setuju**
	181.936.800 (1,05%)	17.215.021.696 (98,95%)	0 (0,00%)	**17.396.958.496 (100,00%)**
Keputusan RUPST	1. Menunjuk Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro & Surja (a member firm of Ernst & Young Global Limited) untuk melakukan audit atas Laporan Keuangan konsolidasian Perusahaan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan memberikan kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan honorarium dan persyaratan lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku sehubungan dengan penunjukan kantor akuntan publik tersebut. 2. Memberi kewenangan dan kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik Pengganti guna melakukan audit Laporan Keuangan konsolidasian Perusahaan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025, termasuk untuk menetapkan honorarium dan persyaratan lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dalam hal Kantor Akuntan Publik yang ditunjuk berhalangan atau tidak dapat melaksanakan tugasnya karena sebab apapun.			
Realisasi	Telah direalisasikan pada tahun 2025.			

Agenda ke-4

Mata Acara	Perubahan susunan pengurus Perseroan.			
Hasil dari Pemungutan Suara	**Abstain**	**Setuju**	**Tidak setuju**	**Total setuju**
	181.943.400 (1,05%)	17.154.135.698 (98,60%)	60.879.398 (0,35%)	**17.336.079.098 (99,65%)**
Keputusan RUPST	a. Menetapkan berakhirnya masa jabatan Bapak Soegiarto Adikoesoemo sebagai Presiden Komisaris, dan Bapak Sofyan A. Djalil sebagai Komisaris, efektif sejak ditutupnya Rapat, dengan memberikan pembebasan dan pelunasan (*acquit et decharge*) selama masa jabatannya sejauh tindakan pengurusan dan pengawasan tersebut tercermin dalam laporan keuangan Perseroan dan bukan merupakan tindak pidana atau pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selanjutnya, mengangkat kembali Bapak Soegiarto Adikoesoemo sebagai Presiden Komisaris Perseroan dan Bapak Sofyan A. Djalil sebagai Komisaris untuk masa jabatan terhitung sejak ditutupnya Rapat sampai dengan penutupan RUPS Tahunan tahun 2030. b. Menetapkan berakhirnya masa jabatan Bapak Mohamad Fauzi Maulana Ichsan sebagai Komisaris Independen Perseroan, efektif sejak ditutupnya Rapat, dengan memberikan pembebasan dan pelunasan (*acquit et decharge*) selama masa jabatannya sejauh tindakan pengurusan dan pengawasan tersebut tercermin dalam laporan keuangan Perseroan dan bukan merupakan tindak pidana atau pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selanjutnya, mengangkat kembali Bapak Mohamad Fauzi Maulana Ichsan sebagai Komisaris Independen Perseroan untuk masa jabatan terhitung sejak ditutupnya Rapat sampai dengan penutupan RUPS Tahunan tahun 2030. c. Menetapkan berakhirnya masa jabatan seluruh anggota Direksi Perseroan, efektif sejak ditutupnya Rapat, dengan memberikan pembebasan dan pelunasan (*acquit et de charge*) selama masa jabatannya sejauh tindakan pengurusan dan pengawasan tersebut tercermin dalam laporan keuangan Perseroan dan bukan merupakan tindak pidana atau pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selanjutnya, mengangkat kembali Bapak Haryanto Adikoesoemo sebagai Presiden Direktur Perseroan, Bapak Jimmy Tandyo, Bapak Bambang Soetiono Soedijanto, Ibu Mery Sofi, Bapak Suresh Vembu, Ibu Nery Polim dan Ibu Termurti Tiban masing-masing sebagai Direktur Perseroan untuk masa jabatan terhitung sejak ditutupnya Rapat sampai dengan penutupan RUPS Tahunan tahun 2030. Sehingga dengan demikian susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat sampai dengan penutupan RUPS Tahunan yang akan diselenggarakan pada tahun 2030 adalah sebagai berikut: Dewan Komisaris: • Presiden Komisaris: Bapak Soegiarto Adikoesoemo • Komisaris: Bapak Sofyan A. Djalil • Komisaris Independen: Bapak Mohamad Fauzi Maulana Ichsan			

	Direksi: • Presiden Direktur: Bapak Haryanto Adikoesoemo • Direktur: Bapak Jimmy Tandyo • Direktur: Bapak Bambang Soetiono Soedijanto • Direktur: Ibu Mery Sofi • Direktur: Bapak Suresh Vembu • Direktur: Ibu Nery Polim • Direktur: Ibu Termurti Tiban
Realisasi	Telah direalisasikan pada tahun 2025.

Agenda ke-5

Mata Acara	Penetapan remunerasi bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk tahun buku 2025.			
Hasil dari Pemungutan Suara	**Abstain**	**Setuju**	**Tidak setuju**	**Total setuju**
	181.943.400 (1,05%)	17.177.923.596 (98,74%)	37.091.500 (0,21%)	**17.359.866.996** **(99,79%)**
Keputusan RUPST	1. Menetapkan untuk seluruh anggota Dewan Komisaris Perseroan, pemberian honorarium maksimum sejumlah Rp390.000.000,00 (tiga ratus sembilan puluh juta Rupiah) per bulan yang dibayarkan sebanyak 13× dalam satu tahun ditambah tunjangan lainnya dan mulai berlaku terhitung sejak 30 April 2025 serta memberikan wewenang kepada Presiden Komisaris untuk menetapkan pembagian jumlah honorarium tersebut di antara para anggota Dewan Komisaris Perseroan, dengan memperhatikan pendapat dari Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan. 2. Melimpahkan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan besarnya gaji dan tunjangan lainnya bagi setiap anggota Direksi Perseroan.			
Realisasi	Telah direalisasikan pada tahun 2025.			



Pelaksanaan RUPS **Tahun 2024**

RUPS Tahunan

AKR menyelenggarakan RUPS Tahunan pada tanggal 29 April 2024 secara *hybrid* – fisik dan *online* yang dihadiri oleh Dewan Komisaris, Direksi, Pemegang Saham/Kuasa Pemegang Saham dan perwakilan dari lembaga/profesi penunjang pasar modal. Keputusan Rapat dituangkan dalam Akta No. 17 yang dibuat di hadapan Notaris Aryanti Artisari, S.H., M.Kn Notaris di Jakarta.

Proses Pelaksanaan RUPST

Hari/Tanggal		Senin, 29 April 2024
Waktu		10.11 s.d 12.02 WIB
Tempat		AKR Gallery West, *Meeting Room* Lantai P2, Jl. Panjang No.5, Kebon Jeruk, Jakarta Barat 11530, Indonesia.
Kehadiran		Dewan Komisaris 1. **Soegiarto Adikoesoemo*** Presiden Komisaris 2. **Sofyan A. Djalil** Komisaris 3. **Mohamad Fauzi Maulana Ichsan** Komisaris Independen Direksi 1. **Haryanto Adikoesoemo** Presiden Direktur 2. **Jimmy Tandyo** Direktur 3. **Bambang Soetiono Soedijanto*** Direktur 4. **Mery Sofi*** Direktur 5. **Suresh Vembu** Direktur 6. **Nery Polim** Direktur 7. **Termurti Tiban** Direktur *) Hadir melalui media telekonferensi pada Electronic General Meeting System ("eASY.KSEI").
	Pemegang Saham hadir secara langsung/ melalui kuasa	17.264.646.770 saham (87,472759%) hadir di Rapat dari total 19.737.169.600 saham (total saham yang beredar dikurangi jumlah *treasury stock* sebesar 336.305.000 saham). Perhitungan ini berdasarkan Daftar Pemegang Saham Perseroan per tanggal 4 April 2024 sampai Pukul 16.00 WIB. Lembaga & Profesi Penunjang Pasar Modal: 1. Notaris Aryanti Artisari, S.H., M.Kn. (Notaris yang ditunjuk oleh Perseroan untuk membuat Berita Acara Rapat) dari Kantor Notaris Aryanti Artisari, S.H., M.Kn. 2. Bapak Harsoyo dan Ibu Lusiany Lugina dari PT Raya Saham Registra (Biro Administrasi Efek yang ditunjuk oleh Perseroan). 3. Bapak Benyanto Suherman, dari Kantor Akuntan Publik "PURWANTONO, SUNGKORO & SURJA" (a member firm of Ernst & Young Global Limited). 4. Konsultan Hukum, Bapak Iwan Setiawan S.H. dari Makes & Partners Law Firm.

Tahapan Pelaksanaan RUPST

Pemberitahuan RUPST kepada OJK	**13 Maret 2024** Perseroan telah melakukan pemberitahuan mata acara Rapat kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada tanggal 13 Maret 2023 melalui surat Nomor 022/L-AKR-CS/2024 perihal Pemberitahuan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT AKR Corporindo Tbk.
Pengumuman RUPST	**20 Maret 2024** • Dilakukan paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS. • Dipublikasikan pada situs *website* resmi Bursa Efek Indonesia, eASY.KSEI, dan *website* resmi Perseroan yaitu www.akr.co.id

Pemanggilan dan Informasi mengenai Mata Acara RUPST	**5 April 2024** Dilakukan 21 (dua puluh satu) hari sebelum pelaksanaan RUPS, dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan pelaksanaan RUPST.
Pelaksanaan RUPST	**29 April 2024** Sehubungan telah diterbitkannya surat PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) No. KSEI-4012/DIR/0521 tanggal 31 Mei 2021 perihal Penerapan Modul e-Proxy dan Modul e-Voting pada Aplikasi eASY.KSEI beserta Tayangan Rapat Umum Pemegang Saham, KSEI menyediakan *platform* E-RUPS untuk pelaksanaan RUPS secara elektronik. Rapat diselenggarakan secara elektronik menggunakan aplikasi eASY.KSEI, sehingga Pemegang Saham Perseroan dapat hadir dalam Rapat secara elektronik melalui aplikasi eASY.KSEI

Agenda ke-1

Mata Acara	Persetujuan dan pengesahan atas Laporan Direksi mengenai jalannya usaha Perseroan dan tata usaha keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 serta persetujuan dan pengesahan atas Laporan Keuangan Perseroan termasuk didalamnya Neraca dan Perhitungan Laba/Rugi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 yang telah diaudit oleh Akuntan Publik Independen, dan persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan, laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquit et de charge*) kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dilakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.			
Hasil dari Pemungutan Suara	**Abstain**	**Setuju**	**Tidak setuju**	**Total setuju**
	392.052.881 (2,270842%)	16.863.960.789 (97,679153%)	8.633.100 (0,050005%)	**17.256.013.670** **(99,949996%)**
Keputusan RUPST	1. Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 yang antara lain memuat Laporan Direksi mengenai jalannya usaha Perseroan dan tata usaha keuangan Perseroan serta laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023. 2. Mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan tahun buku 2023 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik "PURWANTONO, SUNGKORO & SURJA" (a member firm of Ernst & Young Global Limited) dengan pendapat "wajar dalam semua hal yang material" sebagaimana tertulis dari laporannya tertanggal 20 Maret 2024 Nomor 00252/2.1032/AU.1/05/0685-4/1/III/2024. 3. Memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya ("*volledig acquit et de charge*") kepada segenap anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah mereka jalankan selama tahun buku 2023, sepanjang tindakan-tindakan mereka tersebut termasuk tindakan-tindakan yang berkaitan dengan kegiatan usaha yang merupakan turunan dari kegiatan usaha utama Perseroan dan tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.			
Realisasi	Telah direalisasikan pada tahun 2024.			

Agenda ke-2

Mata Acara	Persetujuan atas rencana penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.			
Hasil dari Pemungutan Suara	**Abstain**	**Setuju**	**Tidak setuju**	**Total setuju**
	218.096.688 (1,263256%)	17.046.549.982 (98,736743%)	100 (0,000001%)	**17.264.646.670** **(99,999999%)**
Keputusan RUPST	1. Menyetujui penggunaan Laba Tahun Berjalan Yang Dapat Diatribusikan Kepada Pemilik Entitas Induk adalah sebesar Rp2.780.349.511.000,00, sebagai berikut: a. sebesar Rp200.000.000,00 untuk Dana Cadangan sesuai dengan Pasal 70 UUPT dan Pasal 23 Anggaran Dasar Perseroan; b. sebesar Rp2.467.146.200.000,00 dibagikan kepada seluruh pemegang saham Perseroan yang sah sebagai dividen tunai atau sebesar 88,73% dari Laba Tahun Berjalan Yang Dapat Diatribusikan Kepada Pemilik Entitas Induk, setelah dikurangi jumlah dividen interim yang telah dibagikan 2 (dua) kali sebelumnya kepada pemegang saham berdasarkan: Dividen Interim 1 • Keputusan Rapat Direksi pada tanggal 24 Juli 2023 sebesar Rp986.858.480.000,00 atau Rp50,00 per saham dengan Jumlah Saham yang Beredar saat itu. Dividen Interim 2 • Keputusan Rapat Direksi pada tanggal 23 Oktober 2023 sebesar Rp493.429.240.000,00 atau Rp25,00 per saham dengan Jumlah Saham yang Beredar saat itu.			

	Sehingga dengan demikian dividen yang masih akan dibayarkan kepada pemegang saham adalah sejumlah Rp986.858.480.000,00 atau sebanyak-banyaknya sebesar Rp50,00 per saham dengan Jumlah Saham yang Beredar saat ini. Jumlah Saham yang Beredar adalah 19.737.169.600 saham, setelah dikurangi *treasury stock* sejumlah 336.305.000 saham. Selanjutnya pembayaran Dividen Tunai tersebut dilaksanakan dengan penetapan tanggal Daftar Pemegang Saham (*Recording Date*), yaitu tanggal 14 Mei 2024 sampai dengan pukul 16.00 WIB, dengan memperhatikan tanggal Cum dan Ex dividen sesuai dengan Peraturan Bursa Efek Indonesia, dan juga memberikan kuasa kepada Direksi untuk mengatur lebih lanjut mengenai tata cara pembagian dividen tersebut sesuai peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. c. sedangkan sisanya sejumlah Rp313.003.311.000,00 dibukukan sebagai Laba Yang Ditahan dan digunakan sebagai Modal Kerja Perseroan. 2. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan terkait dengan pelaksanaan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 tersebut.
Realisasi	Telah direalisasikan pada tahun 2024.

Agenda ke-3

Mata Acara	Penunjukkan Kantor Akuntan Publik Independen yang akan melakukan audit atas buku-buku Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024.			
Hasil dari Pemungutan Suara	**Abstain**	**Setuju**	**Tidak setuju**	**Total setuju**
	218.096.688 (1,263256%)	15.555.907.360 (90,102668%)	1.490.642.722 (8,634076%)	**15.774.004.048** **(91,365924%)**
Keputusan RUPST	Menunjuk Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro & Surja (a member firm of Ernst & Young Global Limited) untuk melakukan audit atas Laporan Keuangan konsolidasian Perusahaan untuk tahun buku 2024 dan memberikan kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan honorarium dan persyaratan lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku sehubungan dengan penunjukan kantor akuntan publik tersebut. Memberi kewenangan dan kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik Pengganti guna melakukan audit Laporan Keuangan konsolidasian Perusahaan untuk tahun buku 2024, termasuk untuk menetapkan honorarium dan persyaratan lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dalam hal Kantor Akuntan Publik yang ditunjuk berhalangan atau tidak dapat melaksanakan tugasnya karena sebab apapun.			
Realisasi	Telah direalisasikan pada tahun 2024.			

Agenda ke-4

Mata Acara	Penetapan remunerasi bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan.			
Hasil dari Pemungutan Suara	**Abstain**	**Setuju**	**Tidak setuju**	**Total setuju**
	218.096.688 (1,263256%)	15.829.506.341 (91,687403%)	1.217.043.741 (7,049341%)	**16.047.603.029** **(92,950659%)**
Keputusan RUPST	1. Menetapkan untuk seluruh anggota Dewan Komisaris Perseroan, pemberian honorarium maksimum sejumlah Rp390.000.000,00 (tiga ratus sembilan puluh juta Rupiah) per bulan yang dibayarkan sebanyak 13x dalam satu tahun ditambah tunjangan lainnya dan mulai berlaku terhitung sejak 29 April 2023 serta memberikan wewenang kepada Presiden Komisaris untuk menetapkan pembagian jumlah honorarium tersebut di antara para anggota Dewan Komisaris Perseroan, dengan memperhatikan pendapat dari Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan. 2. Melimpahkan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan besarnya gaji dan tunjangan lainnya bagi setiap anggota Direksi Perseroan.			
Realisasi	Telah direalisasikan pada tahun 2024.			

Agenda ke-5

Mata Acara	Persetujuan atas rencana pengalihan sebagian saham hasil pembelian kembali Perseroan (saham treasuri) melalui pembentukan dan pelaksanaan Program Kepemilikan Saham Manajemen dan Karyawan (*Management and Employee Stock Option Program* atau MESOP) dengan jumlah sebanyak 156.500.000 saham atau sebesar 0,78% dari modal ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan.			
Hasil dari Pemungutan Suara	**Abstain**	**Setuju**	**Tidak setuju**	**Total setuju**
	290.171.688 (1,680728%)	13.669.479.360 (979,176131%)	3.304.995.722 (19,143141%)	**13.959.651.048** **(80,856859%)**

Keputusan RUPST	1. Menyetujui rencana pengalihan sebagian Saham Treasuri sejumlah 156.500.000 lembar saham atau sebesar 0,78% dari modal ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan, melalui program Kepemilikan Saham Manajemen dan Karyawan atau disebut sebagai Program MESOP, termasuk hal-hal lainnya sehubungan dengan pelaksanaan Program MESOP tersebut. 2. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi yang tergabung di dalam Komite MESOP Perseroan untuk menentukan kriteria, jumlah, harga, jadwal pelaksanaan dan syarat-syarat lainnya yang dianggap baik oleh Direksi dan/atau Dewan Komisaris Perseroan sehubungan dengan pelaksanaan Program MESOP Perseroan dan melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan hal tersebut.
Realisasi	Telah direalisasikan pada tahun 2024.

Dewan **Komisaris**

Dewan Komisaris adalah organ perusahaan yang menjalankan fungsi pengawasan dan pemberian nasehat secara kolektif kepada Direksi terkait pengelolaan Perseroan. Segala bentuk pengawasan dan pemberian keputusan harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan kepentingan terbaik Perseroan serta pemangku kepentingan. Hal ini diharapkan dapat menjaga keberlangsungan bisnis AKR dan mendorong efektivitas penciptaan nilai jangka panjang.

Selain melaksanakan fungsi pengawasan, Dewan Komisaris juga bertanggung jawab dalam memastikan kepatuhan Perseroan terhadap seluruh peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, termasuk penerapan prinsip-prinsip GCG secara efektif. Dewan Komisaris senantiasa berperan dalam mengarahkan strategi Perseroan agar selaras dengan visi, misi, dan tujuan yang telah ditetapkan.

Pedoman dan Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris (*Board Charter*)

Dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya, Dewan Komisaris memiliki Pedoman dan Tata Tertib (*Board Charter*) yang telah disahkan pada 30 November 2015. Pengesahan ini telah ditandatangani oleh Presiden Komisaris dan Direksi sebagai perwakilan dari anggota Dewan Komisaris dan Direksi lainnya. *Board Charter* berisi penjelasan komprehensif mengenai tata laksana kerja serta menjelaskan tahapan aktivitas secara terstruktur, sistematis, dan dapat dijalankan dengan konsisten.

Board Charter disusun sesuai dengan Anggaran Dasar serta peraturan perundang-undangan yang berlaku. Seiring dengan perkembangan usaha dan dinamika Perseroan, *Board Charter* akan ditinjau dan disempurnakan secara berkala untuk memastikan tetap relevan dan efektif sebagai pedoman kerja Dewan Komisaris. Evaluasi dan penyempurnaan tersebut dilakukan apabila dipandang perlu, dengan mempertimbangkan kebutuhan Dewan Komisaris serta ketentuan yang berlaku dan praktik GCG.

Adapun isi *Board Charter* Dewan Komisaris membahas perihal:
1. Landasan Hukum & Ketentuan Umum
2. Akuntabilitas
3. Komposisi dan Kriteria Dewan Komisaris
4. Pengangkatan dan Masa Jabatan Dewan Komisaris
5. Tugas, Tanggung Jawab dan Wewenang Dewan Komisaris
6. Nilai, Etika, dan Waktu Kerja
7. Benturan Kepentingan
8. Transparansi
9. Rapat Dewan Komisaris
10. Penilaian dan Pertanggungjawaban
11. Lain-lain

Komposisi Dewan Komisaris dan Masa Jabatan

Jumlah anggota Dewan Komisaris telah memenuhi ketentuan yang berlaku di Pasar Modal dan *Board Charter* Dewan Komisaris. Komposisi Dewan Komisaris ditetapkan oleh pemegang saham melalui keputusan RUPS dengan memperhatikan visi dan misi Perseroan sehingga memungkinkan pengambilan keputusan yang efektif, tepat, dan cepat. Dewan Komisaris dapat menjabat kembali untuk periode jabatan selama 5 (lima) tahun tanpa mengurangi hak RUPS untuk memberhentikannya sewaktu waktu.

Pada tahun 2025, RUPS telah mengangkat kembali anggota Dewan Komisaris yang terdiri dari Presiden Komisaris, Komisaris, dan Komisaris Independen. Keanggotaan Dewan Komisaris hingga batas waktu penyampaian Laporan Tahunan ini disajikan pada tabel berikut:

Nama	Jabatan	Warga Negara	Dasar Pengangkatan Pertama	Tanggal Pengangkatan Kembali	Akhir Masa Jabatan
Soegiarto Adikoesoemo	Presiden Komisaris	Indonesia	RUPS 21 November 1992	RUPS 28 April 2025	2030
Sofyan A. Djalil	Komisaris	Indonesia	RUPS 28 April 2023	RUPS 28 April 2025	2030
Fauzi Ichsan	Komisaris Independen	Indonesia	RUPS 30 April 2020	RUPS 28 April 2025	2030

Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris

Board Charter Dewan Komisaris menetapkan tugas dan tanggung jawab, antara lain:

1. Dewan Komisaris melakukan pengawasan atas kebijaksanaan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan, serta memberikan nasihat kepada Direksi. Dewan Komisaris wajib menjalankan tugas dan tanggung jawab dengan itikad baik, penuh tanggung jawab dan kehati-hatian.
2. Dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud di atas, Dewan Komisaris wajib mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis Perseroan sesuai regulasi.
3. Dalam menjalankan tugas Dewan Komisaris berhak memperoleh penjelasan dari Direksi atau setiap anggota Direksi tentang segala hal yang diperlukan oleh Dewan Komisaris.
4. Dewan Komisaris wajib memastikan terselenggaranya pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan yang baik dalam setiap kegiatan usaha di antaranya berdasarkan:
   a. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris dan Direksi;
   b. Kelengkapan dan pelaksanaan tugas Komite-komite di bawah Dewan Komisaris;
   c. Penerapan fungsi kepatuhan, auditor internal dan auditor eksternal;
   d. Penerapan manajemen risiko, termasuk sistem pengendalian internal;
   e. Rencana strategis Perseroan;
   f. Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan Perseroan; dan
   g. Menyetujui dan me*review* secara berkala visi, misi dan nilai-nilai utama Perseroan.
5. Dewan Komisaris memastikan keselarasan aspek lingkungan, ekonomi, sosial dan tata kelola dalam penyusunan strategi bisnis dan pelaksanaan kegiatan usaha oleh Direksi, sebagai bentuk penerapan bisnis berkelanjutan.
6. Dewan Komisaris menyetujui dan/atau melakukan pengawasan, baik secara langsung maupun melalui komite di bawah Dewan Komisaris, atas penerapan Strategi, Rencana Bisnis dan beberapa Kebijakan Perseroan yang diperlukan untuk mewujudkan Tata Kelola Perusahaan yang baik serta Keberlanjutan sesuai ketentuan yang berlaku.
7. Dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris, Dewan Komisaris membentuk:
   a. Komite Audit
   b. Komite Nominasi dan Remunerasi
   c. Komite lain yang diperlukan dalam mengawasi Tata Kelola Perusahaan

   Tugas dan tanggung jawab masing-masing Komite diatur dalam Piagam Komite masing-masing.
8. Dewan Komisaris wajib memastikan bahwa Direksi telah menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari Internal Audit Perseroan, Auditor Eksternal, hasil pengawasan OJK dan/atau hasil pengawasan otoritas lain.
9. Dewan Komisaris setiap waktu berhak memberhentikan untuk sementara seorang atau lebih anggota Direksi, apabila anggota Direksi tersebut bertindak bertentangan dengan Anggaran Dasar dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku atau merugikan maksud dan tujuan Perseroan atau melalaikan kewajibannya.
10. Pemberhentian sementara itu harus diberitahukan secara tertulis kepada yang bersangkutan disertai alasannya.
11. Dalam jangka waktu paling lambat 90 (sembilan puluh hari) setelah tanggal pemberhentian sementara, Dewan Komisaris harus menyelenggarakan RUPS untuk mencabut atau menguatkan keputusan pemberhentian sementara tersebut. Dalam RUPS sebagaimana dimaksud, anggota Direksi yang bersangkutan diberi kesempatan untuk hadir guna membela diri.
12. RUPS sebagaimana dimaksud diatas dipimpin oleh Presiden Komisaris dan apabila Presiden Komisaris tidak hadir, hal tersebut tidak perlu dibuktikan kepada pihak lain, maka RUPS dipimpin oleh salah seorang anggota Dewan Komisaris lainnya yang ditunjuk oleh RUPS tersebut dan pemanggilan harus dilakukan sesuai dengan ketentuan.
13. Apabila seluruh anggota Direksi diberhentikan sementara dan Perseroan tidak mempunyai seorangpun anggota Direksi maka untuk sementara Dewan Komisaris diwajibkan untuk mengurus Perseroan, dalam hal demikian rapat Dewan Komisaris berhak untuk memberikan kekuasaan sementara kepada seorang atau lebih di antara mereka atas tanggungan mereka bersama.
14. Dengan lampaunya jangka waktu penyelenggaraan RUPS atau RUPS tidak dapat mengambil keputusan, maka pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud diatas menjadi batal.
15. Anggota Dewan Komisaris baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri setiap waktu dalam jam kerja kantor Perseroan berhak memasuki bangunan dan halaman atau tempat lain yang dipergunakan atau yang dikuasai oleh Perseroan dan berhak memeriksa semua pembukuan, surat dan alat bukti lainnya, memeriksa dan mencocokkan keadaan uang kas dan lain-lain serta berhak untuk mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan oleh Direksi.
16. Anggota Dewan Komisaris wajib bersedia meningkatkan kompetensi secara terus menerus melalui pendidikan dan pelatihan.
17. Terkait tugas dan tanggung jawab serta wewenang masing-masing anggota Dewan Komisaris akan diatur tersendiri oleh Dewan Komisaris dalam suatu Keputusan Dewan Komisaris berikut perubahannya dari waktu ke waktu.

Nilai-Nilai

Dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya, Dewan Komisaris berpegang pada nilai-nilai yang telah ditetapkan dalam *Board Charter* meliputi:

1. Setiap anggota Dewan Komisaris wajib mematuhi nilai-nilai yang diberlakukan di Perseroan, yaitu:
   a. Memiliki Jiwa Kewirausahaan
   b. Berkolaborasi
   c. Menghargai Kinerja Tinggi
   d. Tangkas
   e. Memberdayakan Tim
   f. Tidak Berkompromi
2. Setiap anggota Dewan Komisaris juga wajib mengerahkan segenap kemampuannya untuk dapat mencapai visi Perseroan yaitu menjadi pemain utama di bidang penyedia jasa logistik dan solusi pengadaan untuk bahan kimia dan energi di Indonesia. Anggota Dewan Komisaris juga wajib mengerahkan segenap kemampuannya untuk dapat mencapai misi Perseroan yaitu mengoptimalkan potensi untuk meningkatkan nilai para pemegang saham dan pihak-pihak terkait secara berkesinambungan.
3. Anggota Dewan Komisaris wajib menjalankan tugasnya dengan itikad baik, penuh tanggung jawab dan kehati-hatian dengan selalu mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang di antaranya terkait dengan pelaksanaan GCG serta Anggaran Dasar Perusahaan.
4. Setiap anggota Dewan Komisaris wajib menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara optimal. Penyediaan waktu yang cukup dicerminkan antara lain oleh kehadiran yang bersangkutan dalam Rapat Dewan Komisaris, pelaksanaan tugas-tugas Dewan Komisaris dan lain-lain.
5. Anggota Dewan Komisaris dilarang memanfaatkan informasi yang diperoleh dari Perseroan untuk keuntungan dan kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak terafiliasi yang dapat merugikan dan/atau mengurangi keuntungan serta reputasi Perseroan maupun anak perusahaannya.
6. Anggota Dewan Komisaris yang terlibat dalam kejahatan keuangan dan/atau tindak pidana lainnya wajib mengundurkan diri dari Dewan Komisaris.
7. Anggota Dewan Komisaris dan keluarganya serta pihak lain yang terafiliasi dengannya dapat melakukan pinjaman kepada Perseroan, dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan yang berlaku.

Pembagian Tugas Dewan Komisaris

Dewan Komisaris menjalankan tugas dan tanggung jawabnya secara kolektif dengan pembagian peran yang jelas untuk memastikan efektivitas pengawasan terhadap kinerja Perseroan. Setiap anggota Dewan Komisaris memiliki tugas spesifik yang disesuaikan dengan keahlian dan pengalaman masing-masing, baik dalam mengawasi aspek keuangan, operasional, manajemen risiko, kepatuhan terhadap regulasi, maupun aspek strategis lainnya. Pembagian tugas ini dilakukan agar pengawasan berjalan optimal serta mampu memberikan rekomendasi yang tepat kepada Direksi dalam pengelolaan Perseroan.

Selain itu, Dewan Komisaris juga memastikan komite penunjang fungsi pengawasan yang telah dibentuk menjalankan tugasnya sejalan dengan rencana kerja Dewan Komisaris dan *Board Charter*. Komitmen tersebut diwujudkan dengan menempatkan anggota Dewan Komisaris sebagai ketua dan anggota pada komite penunjang Dewan Komisaris. Pendelegasian anggota Dewan Komisaris pada komite mempertimbangkan kompetensi dan kemampuan dalam melaksanakan tugas pada masing-masing komite tersebut. Adapun pembagian tugas anggota Dewan Komisaris sebagai berikut:

Nama	Jabatan	Uraian Tugas
Soegiarto Adikoesoemo	Presiden Komisaris	1. Melakukan pemanggilan Rapat Dewan Komisaris secara tertulis yang disampaikan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris dengan mencantumkan acara, tanggal, waktu dan tempat rapat. 2. Memimpin Rapat Dewan Komisaris. 3. Menelaah laporan-laporan dan usulan yang diterima dari anggota Dewan Komisaris lainnya maupun dari komite-komite di bawah Dewan Komisaris.
Sofyan A. Djalil	Komisaris	1. Menelaah dan melakukan pengawasan terkait rencana bisnis yang disampaikan oleh Direksi, baik jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang termasuk pengembangan usaha Perseroan. 2. Menelaah dan melakukan pengawasan terkait pengembangan usaha dan kegiatan operasional logistik yang dijalankan oleh Direksi Perseroan.
Fauzi Ichsan	Komisaris Independen	1. Menelaah dan melakukan pengawasan terhadap pengelolaan keuangan Perseroan dan anak-anak perusahaan. 2. Menelaah dan melakukan pengawasan terhadap penyusunan laporan keuangan perusahaan. 3. Menelaah hasil-hasil diskusi dari Komite Audit dengan Direksi, Internal Audit dan Auditor Independen yang selanjutnya dibahas dalam Rapat Dewan Komisaris.

Pengelolaan Benturan Kepentingan Dewan Komisaris

Fungsi pengawasan Dewan Komisaris harus bersifat objektif agar terhindar dari segala bentuk benturan kepentingan yang dapat mempengaruhi pengambilan keputusan yang adil dan transparan. Dalam menjalankan tugasnya, Dewan Komisaris harus memperhatikan kepentingan Perseroan diatas kepentingan pribadi. Benturan kepentingan terjadi ketika terdapat potensi kepentingan pribadi berlawanan dengan tujuan Perseroan dalam menghasilkan laba, mewujudkan visi misi Perseroan, dan melaksanakan keputusan yang ditetapkan dalam RUPS.

Dewan Komisaris AKR menjunjung tinggi komitmen agar terhindar dari kemungkinan terjadinya konflik kepentingan yang berpotensi terhadap keberlangsungan. Perseroan memastikan bahwa Dewan Komisaris menghindari terjadinya benturan kepentingan dengan mematuhi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan (POJK 42/2020).

Sebagai langkah mitigasi untuk menghindari potensi benturan kepentingan, Dewan Komisaris berpegang teguh pada prinsip-prinsip berikut:

1. Anggota Dewan Komisaris harus menghindari terjadinya potensi benturan kepentingan atau selalu menempatkan diri untuk tidak berada dalam potensi terjadinya benturan kepentingan dalam situasi apapun. Dalam hal terjadi benturan kepentingan, anggota Dewan Komisaris dilarang mengambil tindakan yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan Perseroan dan wajib mengungkapkan potensi benturan kepentingan dimaksud dalam setiap keputusan.
2. Anggota Dewan Komisaris harus tunduk pada ketentuan lainnya terkait benturan kepentingan yang mengacu kepada peraturan Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan.
3. Prosedur yang harus dilalui oleh anggota Dewan Komisaris apabila terjadi benturan kepentingan adalah sebagai berikut:
   a. Wajib untuk segera melaporkan secara tertulis kepada Dewan Komisaris mengenai semua hal yang berpotensi menciptakan dan/atau mengandung benturan kepentingan yang berdampak signifikan dalam segi finansial maupun reputasi untuk Perseroan, Dewan Komisaris, dan Direksi.
   b. Tidak diperbolehkan untuk turut serta dalam proses penilaian terhadap semua kegiatan yang mengandung benturan kepentingan tersebut.
   c. Dapat ikut serta dalam rapat, namun tidak diperkenankan untuk ikut serta dalam pengambilan keputusan.
   d. Memastikan Direksi memenuhi ketentuan yang berlaku, termasuk namun tidak terbatas pada melakukan keterbukaan informasi dan mendapat persetujuan Pemegang Saham Independen melalui RUPS, jika diperlukan.
4. Dalam hal anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris untuk memimpin RUPS mempunyai benturan kepentingan atas hal yang akan diputuskan dalam RUPS, maka RUPS dipimpin oleh anggota Dewan Komisaris lainnya yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris yang tidak mempunyai benturan kepentingan.
5. Apabila semua anggota Dewan Komisaris mempunyai benturan kepentingan atas hal yang akan diputuskan dalam RUPS, maka RUPS dipimpin oleh Presiden Direktur.
6. Apabila semua anggota Dewan Komisaris dan Direksi mempunyai benturan kepentingan, maka RUPS akan dipimpin oleh salah seorang pemegang saham independen, yaitu pemegang saham yang tidak mempunyai benturan kepentingan, yang dipilih dari dan oleh pemegang saham independen yang hadir dalam RUPS.

Mekanisme Pengunduran Diri Dewan Komisaris

1. Seorang anggota Dewan Komisaris berhak mengundurkan diri dari jabatannya dan wajib secara tertulis menyampaikan permohonan pengunduran diri kepada Perseroan paling kurang 90 (sembilan puluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya.
2. Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS untuk memutuskan permohonan pengunduran diri anggota Dewan Komisaris dalam jangka waktu paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah diterimanya surat permohonan pengunduran diri. Masa jabatan seseorang yang diangkat untuk mengisi lowongan tersebut adalah sisa masa jabatan dari anggota Dewan Komisaris yang jabatannya telah menjadi lowong tersebut.
3. Dalam hal Perseroan tidak menyelenggarakan RUPS, maka dengan lampaunya kurun waktu tersebut, pengunduran diri anggota Dewan Komisaris menjadi sah tanpa memerlukan persetujuan RUPS.
4. Dalam hal anggota Dewan Komisaris mengundurkan diri sehingga mengakibatkan jumlah anggota Dewan Komisaris masing-masing menjadi kurang dari 2 (dua) orang, maka pengunduran diri tersebut sah apabila telah ditetapkan oleh RUPS dan telah diangkat Dewan Komisaris yang baru sehingga memenuhi persyaratan minimal jumlah anggota Dewan Komisaris.
5. Jabatan anggota Dewan Komisaris berakhir apabila: a. Mengundurkan diri; b. Tidak lagi memenuhi persyaratan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lainnya; c. Meninggal dunia; d. Diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS.
6. Komisaris Independen yang telah menjabat selama 2 (dua) periode masa jabatan dapat diangkat kembali pada periode selanjutnya sepanjang Komisaris Independen tersebut menyatakan dirinya tetap independen kepada RUPS.

Keputusan yang Perlu Mendapatkan Persetujuan Dewan Komisaris

Selain melaksanakan fungsi pengawasan, Dewan Komisaris menjalankan tugas dengan memberikan persetujuan terhadap keputusan strategis yang dapat mempengaruhi keberlangsungan dan pertumbuhan Perseroan. Seluruh keputusan Direksi dalam mengelola Perseroan harus mendapatkan persetujuan dari Dewan Komisaris. Penetapan lingkup persetujuan yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar Perseroan, yakni:

1. Penunjukkan Pimpinan dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)
2. Pembagian Dividen Interim
3. Pendirian Perusahaan
4. Fasilitas Pinjaman

Pelaksanaan Tugas Dewan Komisaris

Sepanjang tahun 2025, Dewan Komisaris telah melaksanakan fungsi pengawasan terhadap Direksi dalam pengelolaan Perseroan agar berjalan sesuai dengan Anggaran Dasar, peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta prinsip GCG. Melalui rapat internal dan rapat gabungan bersama Direksi, Dewan Komisaris meninjau perihal manajemen Perseroan, mengevaluasi kinerja Perseroan, serta laporan dari Komite Audit dan Komite Nominasi dan Remunerasi. Adapun pelaksanaan tugas tahun pelaporan secara rinci adalah sebagai berikut:

1. **Pengawasan atas strategi dan ketahanan usaha Perseroan**
   Dewan Komisaris menelaah arah strategis, rencana kerja dan anggaran Perseroan, serta memantau kinerja operasional dan keuangan guna memastikan pengelolaan usaha berjalan selaras dengan penguatan fundamental Perseroan, ketahanan energi, serta pengembangan ekosistem industri yang berkelanjutan.
2. **Pengawasan atas pengembangan portofolio usaha dan optimalisasi aset strategis**
   Dewan Komisaris menelaah arah pengembangan portofolio usaha Perseroan, termasuk integrasi rantai pasok energi dan logistik serta pengembangan kawasan industri terintegrasi. Dewan Komisaris memastikan bahwa setiap inisiatif ekspansi, kemitraan strategis, dan pengembangan aset dilakukan secara selektif, terukur, serta selaras dengan penguatan fundamental usaha dan penciptaan nilai jangka panjang.
3. **Pengawasan atas penerapan tata kelola, manajemen risiko, dan kepatuhan**
   Dewan Komisaris memastikan Direksi menjalankan kegiatan usaha secara *prudent* melalui penguatan pengendalian internal, manajemen risiko terintegrasi, serta kepatuhan terhadap dinamika kebijakan dan peraturan yang relevan dengan sektor energi, logistik, dan kawasan industri.
4. **Pengawasan kualitas pelaporan keuangan dan efektivitas pengendalian internal**
   Melalui Komite Audit, Dewan Komisaris memantau kualitas pelaporan keuangan, efektivitas audit internal dan eksternal, serta kecukupan sistem pengendalian internal guna menjaga transparansi, akuntabilitas, dan integritas pengelolaan Perseroan.
5. **Evaluasi kinerja Direksi dan kesinambungan kepemimpinan**
   Dewan Komisaris melakukan evaluasi terhadap kinerja Direksi serta memantau implementasi kebijakan nominasi dan remunerasi guna memastikan kesinambungan kepemimpinan, efektivitas organisasi, serta keselarasan antara kinerja dan penciptaan nilai jangka panjang.
6. **Pengawasan struktur permodalan, kebijakan dividen, dan pengelolaan pendanaan**
   Dewan Komisaris memantau pengelolaan struktur permodalan, kebijakan dividen, serta pemanfaatan fasilitas pendanaan agar tetap selaras dengan strategi pertumbuhan usaha, kebutuhan investasi jangka panjang, dan kesehatan keuangan Perseroan.
7. **Pengawasan implementasi keberlanjutan dan integrasi ESG**
   Dewan Komisaris memantau integrasi aspek lingkungan, sosial, dan tata kelola dalam kegiatan usaha Perseroan, termasuk keselamatan operasional, pengelolaan dampak lingkungan, serta kontribusi terhadap pengembangan ekosistem industri dan masyarakat.
8. **Pengawasan atas hubungan dengan pemangku kepentingan strategis**
   Dewan Komisaris memantau Pengelolaan hubungan Perseroan dengan pemerintah, regulator, investor, pelanggan industri, *tenant* kawasan, serta masyarakat di sekitar wilayah operasional. Pengawasan ini dilakukan untuk memastikan komunikasi yang transparan, kepatuhan terhadap kebijakan yang berlaku, serta terjaganya reputasi dan kepercayaan terhadap Perseroan sebagai mitra strategis dalam mendukung ketahanan energi dan pengembangan industri nasional.

Keputusan dan Persetujuan Dewan Komisaris

Selama tahun 2025, Dewan Komisaris telah memberikan berbagai keputusan dan persetujuan dalam menjalankan fungsi pengawasan sebagai berikut:

No	Tanggal	Nomor Surat	Perihal
1	236/C-CL/2025	17 Maret 2025	Penunjukkan Pimpinan RUPS 2025
2	048/L.AKR.CS/2025	23 Mei 2025	Pengangkatan Komite Audit
3	001/L-AKR-SK-KOM/2025	25 Juli 2025	Persetujuan Pembagian Dividen Interim Tahun Buku 2025 AKR
2	600/HO/CL/2025	29 Agustus 2025	Persetujuan Perjanjian Fasilitas Kredit

No	Tanggal	Nomor Surat	Perihal
3	601/HO/CL/2025	29 Agustus 2025	Persetujuan Perjanjian Fasilitas Kredit
4	602/HO/CL/2025	29 Agustus 2025	Persetujuan Perjanjian Fasilitas Kredit
5	767/HO/CL/2025	10 Desember 2025	Persetujuan Perjanjian Fasilitas Kredit
6	768/HO/CL/2025	10 Desember 2025	Persetujuan Perjanjian Fasilitas Kredit
7	769/HO/CL/2025	10 Desember 2025	Persetujuan Perjanjian Fasilitas Kredit
8	791/HO/CL/2025	10 Desember 2025	Persetujuan Perjanjian Fasilitas Kredit
9	792/HO/CL/2025	10 Desember 2025	Persetujuan Perjanjian Fasilitas Kredit
10	793/HO/CL/2025	10 Desember 2025	Persetujuan Perjanjian Fasilitas Kredit
11	084/L.AKR.CS/2025	31 Desember 2025	Pengangkatan Komite Audit

Rekomendasi Dewan Komisaris

Dewan Komisaris secara berkelanjutan melakukan pengawasan dan memberikan input strategis kepada Direksi guna memastikan Perseroan tumbuh secara berkelanjutan, resilien, dan selaras dengan prinsip tata kelola perusahaan yang baik. Semua rekomendasi yang diberikan Dewan Komisaris berdasarkan pada hasil evaluasi terhadap laporan kinerja, kajian risiko, serta pemantauan terhadap pencapaian target Perseroan. Sehubungan dengan dinamika industri energi dan logistik nasional, Dewan Komisaris menyampaikan rekomendasi strategis sebagai berikut:

1. Penguatan GCG dan Ketahanan Usaha
   Dewan Komisaris merekomendasikan agar Direksi terus memperkuat implementasi GCG melalui penguatan pengendalian internal, manajemen risiko terintegrasi, dan budaya kepatuhan di seluruh lini usaha. Dalam menghadapi volatilitas harga energi, dinamika kebijakan pemerintah, serta perubahan lingkungan usaha, Perseroan diharapkan menjaga disiplin operasional dan kehati-hatian dalam pengambilan keputusan strategis.
2. Integrasi ESG dalam Strategi dan Operasional
   Dewan Komisaris mendorong Direksi untuk semakin mengintegrasikan prinsip ESG ke dalam strategi bisnis dan proses pengambilan keputusan. Hal ini mencakup:
   - Pengelolaan dampak lingkungan secara bertanggung jawab;
   - Peningkatan keselamatan kerja dan pengembangan sumber daya manusia;
   - Penguatan praktik tata kelola dan transparansi kepada pemangku kepentingan.

   Dewan Komisaris memandang bahwa penguatan ESG bukan hanya kewajiban kepatuhan, namun merupakan elemen strategis untuk menjaga daya saing dan keberlanjutan usaha Perseroan dalam jangka panjang.
3. Optimalisasi Peran Komite di Bawah Dewan Komisaris
   Dewan Komisaris merekomendasikan optimalisasi peran Komite Audit dan Komite Nominasi dan Remunerasi dalam memastikan kualitas pelaporan keuangan, efektivitas sistem pengendalian internal, serta kesinambungan kepemimpinan Perseroan.
   Direksi diharapkan terus mendukung penyediaan informasi yang transparan dan tepat waktu guna memastikan fungsi *oversight* berjalan efektif dan independen.
4. Kebijakan Dividen yang Seimbang dan Berorientasi Jangka Panjang
   Dewan Komisaris mendukung kebijakan dividen yang berimbang, dengan tetap memperhatikan kebutuhan pendanaan internal untuk mendukung penguatan infrastruktur distribusi energi, serta pengembangan kawasan industri.

   Kebijakan dividen diharapkan mencerminkan kinerja keuangan Perseroan, kebutuhan investasi strategis, serta komitmen Perseroan dalam menciptakan nilai jangka panjang bagi pemegang saham.
5. Pengelolaan Struktur Permodalan dan Fasilitas Kredit yang *Prudent*
   Dewan Komisaris merekomendasikan agar Direksi mengelola struktur permodalan dan fasilitas pendanaan secara disiplin dan terukur, dengan memperhatikan profil risiko, efisiensi biaya dana, serta keberlanjutan arus kas.

   Pemanfaatan fasilitas kredit diharapkan selaras dengan strategi pertumbuhan usaha Perseroan dan tetap menjaga rasio keuangan pada tingkat yang sehat dan konservatif.
6. Dukungan terhadap Ketahanan Energi dan Pembangunan Nasional
   Dewan Komisaris mendorong Direksi untuk terus memastikan bahwa strategi bisnis Perseroan selaras dengan agenda ketahanan energi nasional dan penguatan ekosistem industri dalam negeri.

   Sebagai pelaku usaha dengan rekam jejak panjang, Perseroan diharapkan menjaga perannya sebagai mitra strategis dalam mendukung pertumbuhan ekonomi nasional melalui operasional yang efisien, bertanggung jawab, dan berkelanjutan.

Program Orientasi Dewan Komisaris

AKR melaksanakan program orientasi sebagai upaya mempercepat pemahaman Dewan Komisaris terhadap visi, misi, strategi, serta operasional Perseroan. Program orientasi dapat memberikan wawasan komprehensif mengenai struktur organisasi, model bisnis, kinerja keuangan, aspek hukum dan regulasi, serta prinsip GCG yang diterapkan oleh Perseroan.

Melalui program orientasi ini, anggota Dewan Komisaris dapat lebih cepat beradaptasi dan menjalankan perannya secara efektif dalam fungsi pengawasan dan pemberian nasihat kepada Direksi.

Sepanjang tahun 2025, Perseroan tidak melaksanakan program orientasi karena tidak terdapat anggota Dewan Komisaris baru. Seluruh anggota Dewan Komisaris tetap menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan mandat yang telah ditetapkan.

Pengembangan Kompetensi Dewan Komisaris

Keikutsertaan Dewan Komisaris dalam pengembangan kompetensi menjadi landasan penting dalam memperkuat kualitas pengawasan serta meningkatkan efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya. Pengembangan kompetensi dilakukan melalui berbagai program pelatihan, seminar, dan *workshop* yang mencakup aspek GCG, manajemen risiko, kepatuhan terhadap regulasi, serta tren dan dinamika industri. Partisipasi dalam forum diskusi dan konferensi baik di tingkat nasional maupun internasional juga menjadi bagian dari upaya untuk memperluas wawasan serta memperdalam pemahaman terhadap isu-isu strategis yang relevan bagi Perseroan.

Selama tahun 2025, Dewan Komisaris mengikuti program pengembangan kompetensi yang disajikan dalam tabel berikut:

No	Nama dan Jabatan	Judul Pelatihan	Tanggal Pelatihan	Penyelenggara
1.	Fauzi Ichsan	*Workshop* Manajemen Risiko Perbankan Kualifikasi 4	26 - 27 November 2025	Jakarta
		Sertifikasi Manajemen Risiko Perbankan Kualifikasi 4	Desember 2025	Jakarta

Penilaian Kinerja Komite Penunjang Dewan Komisaris

Dalam menjalankan fungsi pengawasan, Dewan Komisaris Perseroan didukung oleh Komite Audit dan Komite Nominasi & Remunerasi. Pelaksanaan tugas masing-masing komite mengacu pada pedoman kerja yang telah ditetapkan yang berfokus pada pengawasan aspek keuangan, kepatuhan terhadap regulasi, manajemen risiko, serta pengelolaan suksesi dan imbal balik.

Penilaian dilakukan secara berkala mencakup kehadiran dalam rapat, kemampuan bekerjasama dan berkomunikasi secara aktif, komitmen dan integritas, kemampuan melakukan analisis terhadap aspek-aspek finansial dan operasional Perseroan, serta kualitas rekomendasi. Hasil penilaian digunakan sebagai dasar untuk penguatan peran komite, penyempurnaan mekanisme kerja, penentuan masa tugas, serta peningkatan kompetensi anggota komite. Dewan Komisaris melakukan evaluasi secara berkala terhadap kinerja Komite Audit serta Komite Nominasi dan Remunerasi guna memastikan efektivitas fungsi pengawasan dan pemberian rekomendasi strategis kepada Dewan Komisaris, dan agar pelaksanaan tugas berjalan secara optimal, akuntabel, dan berkelanjutan.

Berdasarkan hasil evaluasi tahun 2025, Dewan Komisaris menilai bahwa Komite Audit telah menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dengan secara efektif, khususnya dalam pengawasan atas kualitas pelaporan keuangan, efektivitas pengendalian internal, kepatuhan terhadap regulasi, serta implementasi manajemen risiko. Rekomendasi yang diberikan dinilai konstruktif dan mendukung penguatan GCG dan pemantauan pelaksanaan kebijakan keuangan dan operasional.

Komite Nominasi dan Remunerasi memiliki tugas dan tanggung jawab untuk menelaah dan mengusulkan perencanaan suksesi anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris. Dewan Komisaris menilai bahwa Komite Nominasi dan Remunerasi telah menjalankan perannya secara memadai dalam memberikan rekomendasi terkait struktur remunerasi yang kompetitif dan selaras dengan kinerja, serta dalam mendukung proses perencanaan suksesi guna memastikan kesinambungan kepemimpinan Perseroan.

Sehubungan dengan RUPS Tahunan 2025 yang menetapkan pembaharuan masa jabatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris, Perseroan telah melakukan penyesuaian komposisi komite penunjang Dewan Komisaris agar tetap selaras dengan ketentuan peraturan yang berlaku dan kebutuhan pengawasan Perseroan. Dewan Komisaris memastikan bahwa komposisi komite tetap memenuhi aspek independensi, komepetensi, dan GCG.



Komisaris **Independen**

Komisaris Independen adalah anggota Dewan Komisaris yang tidak memiliki hubungan afiliasi dengan Perseroan, baik secara langsung maupun tidak langsung, yang dapat mempengaruhi independensinya dalam menjalankan fungsi pengawasan. Tugas utama Komisaris Independen adalah memberikan perspektif yang objektif dan tidak bias dalam proses pengambilan keputusan oleh Dewan Komisaris dan Direksi.

Peran Komisaris Independen tidak terbatas pada pengawasan semata, tetapi juga menyajikan perspektif kritis dan seimbang yang memastikan setiap langkah strategis Perseroan selalu berlandaskan prinsip integritas, transparansi, dan akuntabilitas. Komisaris Independen memperkuat mekanisme GCG dan memberikan keyakinan bahwa keputusan yang diambil didasarkan pada pertimbangan yang matang dan menyeluruh.

Struktur Dewan Komisaris AKR telah disusun sesuai ketentuan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan POJK 33/2014. Perseroan memiliki 1 (satu) Komisaris Independen, memenuhi ketentuan minimal satu orang atau sekurang-kurangnya 30% dari jumlah anggota Dewan Komisaris, sehingga komposisi pengawasan tetap seimbang dan efektif.

Kriteria Komisaris Independen

Komisaris Independen harus memenuhi kriteria tertentu untuk memastikan independensinya dalam menjalankan fungsi pengawasan dan memberikan perspektif objektif dalam pengambilan keputusan. Kriteria atau persyaratan Komisaris Independen mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik. Perseroan menetapkan Komisaris Independen yang memiliki kriteria sebagai berikut:

1. Komisaris Independen bukan merupakan orang yang bekerja atau mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, mengendalikan atau mengawasi kegiatan Perseroan dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir, kecuali untuk pengangkatan kembali sebagai Komisaris Independen Perseroan untuk periode berikutnya.

2. Komisaris independen diangkat berdasarkan kriteria sebagai berikut:
   a. Tidak mempunyai saham baik langsung maupun tidak langsung pada Perseroan.
   b. Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan Perseroan, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, atau pemegang saham utama Perseroan.
   c. Komisaris Independen juga tidak memiliki hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha Perseroan.

Pernyataan Independensi Komisaris Independen Perseroan, antara lain:

Pernyataan Independensi	Fauzi Ichsan
Bukan merupakan orang yang bekerja atau mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, mengendalikan, atau mengawasi kegiatan Perseroan dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir, kecuali untuk pengangkatan kembali sebagai Komisaris Independen Perseroan pada periode berikutnya.	✓
Tidak mempunyai saham baik langsung maupun tidak langsung pada Perseroan.	✓
Tidak mempunyai hubungan Afiliasi dengan Perseroan, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, atau pemegang saham utama Perseroan.	✓
Tidak mempunyai hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha Perseroan.	✓

Direksi

Sebagai organ Perseroan, Direksi memegang tanggung jawab kolektif kepada RUPS atas pengurusan Perseroan guna mencapai maksud dan tujuan sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar. Dalam pelaksanaan fungsinya, Direksi senantiasa mengedepankan kepentingan Perseroan, memastikan setiap kebijakan dan tindakan sejalan dengan Anggaran Dasar, serta mengimplementasikan prinsip-prinsip GCG di seluruh tingkatan organisasi.

Pengelolaan Perseroan oleh Direksi dijalankan secara efektif melalui pengendalian operasional yang terukur, pengambilan keputusan strategis yang tepat, serta upaya berkelanjutan dalam meningkatkan efisiensi dan daya saing usaha. Dengan menerapkan manajemen yang terstruktur dan prinsip kehati-hatian, Direksi berkomitmen untuk menciptakan nilai tambah yang berkelanjutan sekaligus menjaga pertumbuhan dan keberlangsungan bisnis AKR di tengah dinamika industri dan tantangan pasar.

Pedoman dan Tata Tertib Direksi (*Board Charter*)

Pedoman dan tata tertib kerja Direksi merupakan bagian dari struktur kebijakan internal atau *governance soft structure* di AKR yang berfungsi sebagai panduan khusus bagi Direksi dalam menjalankan perannya sesuai dengan Anggaran Dasar serta peraturan perundang-undangan yang berlaku. *Board Charter* Direksi telah disahkan pada 30 November 2015 dan ditandatangani oleh Presiden Komisaris serta Direksi sebagai perwakilan seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi.

Board Charter menjabarkan tata laksana kerja Direksi secara terstruktur dan sistematis, termasuk tugas, wewenang, tanggung jawab, mekanisme pengambilan keputusan, serta prosedur kerja yang mendukung efektivitas pengelolaan operasional dan strategi Perseroan. Direksi melakukan peninjauan dan pemutakhiran secara berkala untuk menyesuaikan *Board Charter* dengan perkembangan Perseroan dan perubahan regulasi. Adapun *Board Charter* Direksi berisi tentang:

1. Landasan Hukum & Ketentuan Umum
2. Akuntabilitas
3. Komposisi dan Kriteria Direksi
4. Pengangkatan dan Masa Jabatan Direksi
5. Tugas, Tanggung Jawab dan Wewenang Direksi
6. Nilai, Etika, dan Waktu Kerja
7. Benturan Kepentingan
8. Transparansi
9. Rapat Direksi
10. Penilaian dan Pertanggungjawaban
11. Lain-lain

Komposisi Direksi dan Masa Jabatan

Komposisi dan jumlah anggota Direksi AKR telah disusun sesuai ketentuan pasar modal dan *Board Charter* Direksi. Penetapan anggota Direksi dilakukan melalui RUPS dengan mempertimbangkan visi dan misi Perseroan untuk memastikan efektivitas dalam pengelolaan dan pengambilan keputusan strategis. Anggota Direksi dapat menjabat kembali selama 5 (lima) tahun dengan tetap mempertahankan hak RUPS untuk melakukan pemberhentian sewaktu-waktu.

Direksi Perseroan terdiri dari minimal 3 (tiga) orang termasuk seorang Presiden Direktur dan beberapa anggota Direksi. Komposisi Direksi diatur agar mencerminkan keberagaman keahlian, pengalaman, pendidikan, kewarganegaraan, usia, jenis kelamin, dan independensi. Dengan demikian, setiap keputusan strategis didukung oleh perspektif yang komprehensif dan seimbang.

Pada tahun 2025, Direksi beranggotakan 7 (tujuh) orang di mana terdapat 1 (satu) Presiden Direktur, 6 (enam) Direksi. Pemegang saham dalam RUPS tanggal 28 April 2025 telah mengangkat kembali seluruh anggota Direksi dengan masa jabatan terhitung hingga penutupan RUPS Tahunan tahun 2030, sebagai berikut:

Nama	Jabatan	Warga Negara	Dasar Pengangkatan Pertama	Tanggal Pengangkatan Kembali	Akhir Masa Jabatan
Haryanto Adikoesoemo	Presiden Direktur	Indonesia	RUPS 21 November 1992	RUPS 28 April 2025	2030
Jimmy Tandyo	Direktur	Indonesia	RUPS 26 Januari 1985	RUPS 28 April 2025	2030
Bambang Soetiono Soedijanto	Direktur	Indonesia	RUPS tanggal 5 April 1994	RUPS 28 April 2025	2030
Mery Sofi	Direktur	Indonesia	RUPS tanggal 27 Juni 2006	RUPS 28 April 2025	2030
Suresh Vembu	Direktur	India	RUPS tanggal 18 Mei 2009	RUPS 28 April 2025	2030
Nery Polim	Direktur	Indonesia	RUPS tanggal 15 Mei 2012	RUPS 28 April 2025	2030
Termurti Tiban	Direktur	Indonesia	RUPS tanggal 5 Mei 2015	RUPS 28 April 2025	2030

Tugas dan Tanggung Jawab Direksi

Secara umum, Direksi memiliki tugas dan tanggung jawab dalam mengelola kegiatan operasional Perseroan dalam rangka mencapai tujuan Perseroan. Ruang lingkup tugas dan tanggung jawab diuraikan sebagai berikut:

1. Direksi bertugas menjalankan dan bertanggung jawab atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar. Setiap anggota Direksi wajib melaksanakan tugas dan tanggung jawab dengan itikad baik, penuh tanggung jawab dan kehati-hatian.
2. Dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab atas pengurusan, Direksi wajib menyampaikan pertanggungjawabannya kepada pemegang saham melalui RUPS tahunan dan RUPS lainnya sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar.
3. Direksi merumuskan strategi bisnis dan kebijakan sejalan dengan visi misi Perseroan dan mempertimbangkan risiko-risiko yang mungkin muncul dengan selalu memperhatikan keselarasan aspek lingkungan, ekonomi, sosial serta tata kelola dalam penyusunan dan pelaksanaannya, sebagai bentuk penerapan bisnis berkelanjutan.
4. Direksi melakukan pengawasan berkala terhadap kinerja Perseroan agar tetap dalam koridor rencana strategis dan keselarasan dengan bisnis lainnya maupun rencana anggaran, melalui rapat secara berkala dengan Manajemen Senior Perseroan.
5. Dalam rangka melaksanakan prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang baik dan Keberlanjutan, Direksi Perseroan membentuk:
   a. Internal Audit, *Quality Assurance, & Risk Management*;
   b. Satuan Kerja ESG dan Komite ESG.
6. Direksi berhak mewakili Perseroan di dalam dan di luar pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian, mengikat Perseroan dengan pihak lain dan pihak lain dengan Perseroan, serta menjalankan segala tindakan, baik yang mengenai kepengurusan maupun kepemilikan, akan tetapi dengan pembatasan bahwa untuk:
   a. Mendapatkan barang-barang tidak bergerak dengan harga pasar di atas Rp20.000.000.000 (dua puluh miliar Rupiah) atau yang setara dengan itu dalam mata uang lainnya;
   b. Melepaskan barang-barang tidak bergerak yang dimiliki oleh Perseroan yang jumlahnya di atas Rp10.000.000.000 (sepuluh miliar Rupiah) baik nilai pasar maupun nilai buku atau yang setara dengan itu dalam mata uang lainnya;
   c. Meminjam uang atas nama Perseroan;
   d. Menggadaikan atau mempertanggungkan harta;
   e. Mengikat Perseroan sebagai penjamin (*borg/avalist*);
   f. Mendirikan anak-anak perusahaan;
   g. Mengambil bagian atau ikut serta dalam Perseroan atau badan hukum lain atau menyelenggarakan perusahaan baru;
   h. Membuat perjanjian atas nama Perseroan yang berjangka waktu lebih dari 1 (satu) tahun serta bernilai melebihi 5% dari total nilai Pendapatan Perseroan.
7. Direksi menyampaikan rencana kerja yang memuat juga anggaran tahunan Perseroan kepada Dewan Komisaris untuk mendapat persetujuan, sebelum tahun buku dimulai.
8. Direksi wajib menyediakan data dan informasi yang akurat, relevan dan tepat waktu kepada Dewan Komisaris.
9. Direksi wajib meminta persetujuan RUPS untuk mengalihkan kekayaan Perseroan atau menjadikan jaminan utang kekayaan Perseroan yang merupakan lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih Perseroan dalam 1 (satu) transaksi atau lebih, baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak.
10. Direksi wajib mengumumkan dalam 2 (dua) surat kabar harian yang terbit atau beredar di tempat kedudukan atau tempat kegiatan usaha Perseroan mengenai rancangan penggabungan, peleburan, pengambilalihan atau pemisahan Perseroan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sebelum pemanggilan RUPS.

11. Presiden Direktur berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan.
12. Dalam hal Presiden Direktur tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka Direksi akan diwakili oleh salah seorang Direktur yang ditunjuk secara tertulis oleh Presiden Direktur dan di dalam hal Presiden Direktur tidak melakukan penunjukan tersebut, maka Direksi akan diwakili oleh 2 (dua) orang Direktur, yang berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan.
13. Tanpa mengurangi tanggung jawabnya Direksi untuk perbuatan tertentu berhak pula mengangkat seorang atau lebih sebagai wakil atau kuasanya dengan syarat yang ditentukan oleh Direksi dalam suatu surat kuasa khusus, wewenang yang demikian harus dilaksanakan sesuai dengan Anggaran Dasar.
14. Anggota Direksi wajib bersedia meningkatkan kompetensi secara terus menerus melalui pendidikan dan pelatihan.
15. Terkait tugas dan tanggung jawab serta wewenang masing-masing anggota Direksi akan diatur tersendiri oleh Direksi dalam suatu Keputusan Direksi berikut perubahannya dari waktu ke waktu.

Pembagian Tugas Direksi

Pembagian tugas di antara anggota Direksi dilakukan berdasarkan bidang tanggung jawab masing-masing dengan mempertimbangkan kompetensi dan keahlian yang dimiliki. Setiap anggota Direksi memegang tanggung jawab atas fungsi tertentu untuk memastikan efektivitas pengelolaan Perseroan dan pencapaian tujuan strategis.

Meskipun memiliki fokus tugas masing-masing, semua keputusan diambil secara kolegial dalam rapat Direksi untuk menjaga keselarasan kebijakan dan strategi pengelolaan. Dengan pembagian tugas yang jelas, Direksi mampu menjalankan fungsinya lebih efektif, memperkuat koordinasi internal, dan mengoptimalkan kinerja Perseroan dalam jangka panjang.

Nama	Jabatan	Uraian Tugas
Haryanto Adikoesoemo	Presiden Direktur	1. Menentukan visi dan misi Perseroan, dan memastikan agar visi dan misi Perseroan dilaksanakan oleh seluruh manajemen Perseroan termasuk anak-anak perusahaan. 2. Menyetujui Rencana Bisnis baik jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang termasuk pengembangan usaha, sebelum diajukan kepada Dewan Komisaris untuk persetujuan akhir. 3. Memastikan terlaksananya rencana-rencana strategis Perseroan melalui sistem pengendalian dan evaluasi rencana kerja dan anggaran. 4. Melakukan penyempurnaan dan penerapan manajemen risiko, dan memastikan agar jalannya Perseroan dilaksanakan sesuai dengan prinsip *Good Corporate Governance*. 5. Memastikan agar kegiatan Perusahaan mengadopsi ketentuan *Safety, Health & Environment*, termasuk mengadopsi langkah-langkah untuk perlindungan Lingkungan yang mencakup pengurangan penggunaan energi dan meningkatkan distribusi energi bersih/terbarukan.
Jimmy Tandyo	Direktur	1. Memastikan agar visi dan misi *Business Unit* dilaksanakan oleh seluruh manajemen Perseroan. 2. Menyetujui rencana Bisnis Perseroan baik jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang termasuk pengembangan usaha. 3. Memastikan terlaksananya rencana-rencana strategis Perseroan melalui sistem pengendalian dan evaluasi rencana kerja dan anggaran. 4. Memastikan agar Rencana Bisnis *Business Unit* yang telah ditetapkan dapat dicapai. 5. Memastikan agar jalannya *Business Unit* dilakukan sesuai dengan *Good Corporate Governance*. 6. Memastikan agar kegiatan *Business Unit* mengadopsi ketentuan *Safety, Health & Environment*. 7. Memastikan kegiatan Pengembangan Sumber Daya Manusia yang kompeten dan memiliki nilai-nilai yang selaras dengan nilai Perusahaan. 8. Selain itu, Beliau juga bertanggung jawab atas pengelolaan sejumlah entitas anak Perseroan.
Bambang Soetiono Soedijanto	Direktur	1. Bertanggung jawab atas proyek kawasan industri dan pelabuhan terintegrasi JIIPE, mencakup operasional, pemasaran, dan hubungan dengan pihak eksternal. 2. Bertanggung jawab atas pengelolaan *supply chain* dan logistik Perseroan, baik melalui transportasi darat dan laut. 3. Memastikan kegiatan operasi logistik mengadopsi ketentuan *Safety, Health & Environment* dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 4. Secara berkala melakukan *improvement* dan inovasi guna efisiensi dan meningkatkan kinerja operasi logistik. 5. Melakukan pengembangan fasilitas logistik untuk menunjang peningkatan kegiatan usaha Perusahaan.

Nama	Jabatan	Uraian Tugas
		6. Menyempurnakan SOP terkait dengan kegiatan operasi logistik dari waktu ke waktu. 7. Selain itu, Beliau juga bertanggung jawab atas pengelolaan sejumlah entitas anak Perseroan.
Mery Sofi	Direktur	Bertanggung jawab atas pengelolaan usaha distribusi Bahan Bakar Minyak (BBM) dan bahan kimia dasar antara lain: 1. Bertanggung jawab atas *trading* dan distribusi Bahan Bakar Minyak (BBM) dan bahan kimia dasar. 2. Melakukan pengembangan Produk dan usaha di bidang BBM dan kimia. 3. Menjalin hubungan jangka panjang dengan para pemasok dan para pelanggan. 4. Menjalankan manajemen risiko terkait kegiatan *trading* dan distribusi yang meliputi diantaranya pengendalian biaya, ketersediaan barang, dan prosedur pengiriman barang. 5. Bersama-sama dengan Direktur Keuangan melakukan pengendalian terhadap risiko akibat dari penentuan biaya, harga maupun perpajakan. 6. Memberikan arahan terkait kegiatan operasional pemasaran untuk meningkatkan kualitas layanan. 7. Meningkatkan kemampuan organisasi untuk melakukan analisa bisnis melalui peningkatan sistem IT dan digitalisasi. 8. Selain itu, Beliau juga bertanggung jawab atas pengelolaan sejumlah entitas anak Perseroan.
Suresh Vembu	Direktur	Bertanggung jawab atas *Corporate Finance*, hubungan investor, *joint venture*, serta divisi *Corporate Secretary* Perseroan, antara lain: 1. Mengembangkan dan menerapkan strategi komersial dan mengembangkan divisi bisnis perusahaan bersama-sama dengan mitra dan mengawasi pencapaian tujuan bisnis. 2. Berkolaborasi dengan mitra untuk membangun dan menjaga bisnis yang menguntungkan, menetapkan target keuangan, dan memantau kinerja. 3. Tanggung jawab keseluruhan untuk memantau Kepatuhan Perusahaan terhadap peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, memastikan bahwa pemegang saham, otoritas pasar modal, investor, analis, dan publik menerima informasi yang tepat waktu, lengkap dan akurat tentang semua hal yang material. 4. Mengembangkan tata kelola dan inisiatif yang terkait dengan keberlangsungan perusahaan (*sustainability*) 5. Selain itu, Beliau juga bertanggung jawab atas pengelolaan sejumlah entitas anak Perseroan.
Nery Polim	Direktur	1. Menyusun strategi penjualan bersama Kepala Kantor Cabang dan bagian komersial. 2. Mendorong pencapaian target penjualan di Kantor Cabang. 3. Memastikan manajemen operasional di seluruh wilayah mengikuti standar operasional prosedur dengan mengadopsi prinsip Safety, Health, and Environment. 4. Memastikan efektivitas penerapan manajemen risiko sehingga menjadi bagian integral dari kegiatan operasi divisi/wilayah masing-masing. 5. Memfasilitasi pengembangan sumber daya manusia yang kompeten dan lingkungan kerja yang kondusif di Region. 6. Selain itu, Beliau juga bertanggung jawab atas pengelolaan sejumlah entitas anak Perseroan.
Termurti Tiban	Direktur	1. Bertanggung jawab atas pengelolaan keuangan Perseroan. 2. Memastikan agar pengelolaan keuangan Perseroan dilakukan dengan kehati-hatian dengan meminimalisasi risiko keuangan. 3. Mengelola modal kerja Perseroan. 4. Mengelola dan mengoptimalkan struktur pendanaan Perseroan untuk memastikan biaya pendanaan yang kompetitif. 5. Melakukan pengelolaan terhadap Pajak Perseroan termasuk kepatuhan terhadap peraturan perpajakan. 6. Memastikan koordinasi penyusunan *budget* Perseroan dan melakukan kontrol atas penggunaan *budget* yang sudah ditetapkan. 7. Memastikan Laporan Keuangan disusun sesuai dengan ketentuan PSAK dan dilaporkan tepat waktu. 8. Selain itu, Beliau juga bertanggung jawab atas pengelolaan sejumlah entitas anak Perseroan.

Nilai-Nilai

Dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya, Direksi berpegang pada nilai-nilai yang telah ditetapkan Perseroan meliputi:

1. Etika kerja Direksi berpedoman kepada Pedoman Etika dan Perilaku PT AKR Corporindo Tbk.
2. Setiap anggota Direksi wajib mematuhi nilai-nilai yang berlaku di Perseroan, yaitu:
   a. Memiliki Jiwa Kewirausahaan
   b. Berkolaborasi
   c. Menghargai Kinerja Tinggi
   d. Tangkas
   e. Memberdayakan Tim
   f. Tidak Berkompromi
3. Setiap anggota Direksi juga wajib mengerahkan segenap kemampuannya untuk dapat mencapai visi Perseroan yaitu menjadi pemain utama di bidang penyedia jasa logistik dan solusi pengadaan untuk bahan kimia dan energi di Indonesia. Anggota Direksi juga wajib mengerahkan segenap kemampuannya untuk dapat mencapai misi Perseroan yaitu mengoptimalkan potensi untuk meningkatkan nilai para pemegang saham dan pihak-pihak terkait secara berkesinambungan.
4. Anggota Direksi wajib menjalankan tugasnya dengan itikad baik, penuh tanggung jawab dan kehati-hatian dengan selalu mengindahkan Peraturan perundang undangan yang berlaku, yang diantaranya terkait dengan pelaksanaan GCG serta Anggaran Dasar Perseroan.
5. Setiap anggota Direksi wajib menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara optimal.
6. Anggota Direksi dilarang memanfaatkan informasi yang diperoleh dari Perseroan untuk keuntungan dan kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak terafiliasi yang dapat merugikan dan/atau mengurangi keuntungan serta reputasi Perseroan maupun anak perusahaannya.
7. Anggota Direksi yang terlibat dalam kejahatan keuangan dan/atau tindak pidana lainnya wajib mengundurkan diri dari Direksi.

Pengelolaan Benturan Kepentingan Direksi

Direksi senantiasa menjalankan fungsi dan tanggung jawabnya dengan penuh integritas, serta mengupayakan agar setiap keputusan diambil secara independen tanpa adanya benturan kepentingan. Potensi konflik kepentingan dikelola melalui penerapan kebijakan GCG yang ketat dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan dan pedoman etika bisnis Perseroan.

Selain itu, Direksi selalu menjaga agar tidak terjadi konflik kepentingan antara kepentingan pribadi dan kepentingan Perseroan yang dapat berdampak pada keberlangsungan usaha. Perseroan memastikan bahwa Direksi mematuhi ketentuan POJK 42/2020 untuk menghindari terjadinya benturan kepentingan.

Adapun prinsip yang diterapkan Direksi sebagai upaya menghindari konflik kepentingan dan implikasi lanjutan yang mungkin ditimbulkan, sebagai berikut:

1. Anggota Direksi harus tunduk pada ketentuan lainnya terkait benturan kepentingan yang mengacu kepada peraturan Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan.
2. Dalam hal Perseroan mempunyai kepentingan ekonomis yang bertentangan dengan kepentingan ekonomis pribadi seorang anggota Direksi yang dapat merugikan Perseroan, maka yang berhak mewakili Perseroan adalah:
   a. Anggota Direksi lainnya yang tidak mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan;
   b. Dewan Komisaris, dalam hal seluruh anggota Direksi mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan; atau
   c. Pihak lain yang ditunjuk oleh RUPS, dalam hal seluruh anggota Direksi atau Dewan Komisaris mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan
3. Dalam hal terdapat potensi benturan kepentingan, Direksi wajib melaporkannya kepada Komite Audit, sehingga Komite Audit dapat memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris.

Mekanisme Pengunduran Diri Direksi

Menurut Pedoman Kerja, ketentuan pengunduran diri Direksi Perseroan sebagai berikut:

1. Anggota Direksi berhak mengundurkan diri dari jabatannya dan wajib secara tertulis menyampaikan permohonan pengunduran diri kepada Perseroan paling kurang 90 hari sebelum tanggal pengunduran dirinya. Kepada anggota Direksi yang mengundurkan diri, tetap dapat dimintakan pertanggung jawaban sebagai anggota Direksi hingga saat pengunduran dirinya dalam RUPS berikutnya.
2. Dalam hal anggota Direksi mengundurkan diri sehingga mengakibatkan jumlah anggota Direksi menjadi kurang dari 2 (dua) orang, maka pengunduran diri tersebut sah apabila telah ditetapkan oleh RUPS dan telah diangkat anggota Direksi yang baru sehingga memenuhi persyaratan minimal jumlah anggota Direksi.

3. Dalam hal terdapat anggota Direksi yang diberhentikan sementara oleh Dewan Komisaris, maka Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS dalam jangka waktu paling lambat 90 hari setelah tanggal pemberhentian sementara. Dalam hal RUPS tidak dapat mengambil keputusan atau setelah lewatnya jangka waktu dimaksud RUPS tidak diselenggarakan, maka pemberhentian sementara anggota Direksi menjadi batal.
4. Jabatan anggota Direksi berakhir, jika: a. Mengundurkan diri; b. Tidak lagi memenuhi persyaratan peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lainnya; c. Meninggal dunia; d. Diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS.

Pelaksanaan Tugas Direksi

Direksi bertanggung jawab atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Direksi menjalankan fungsi kepemimpinan dan pengelolaan Perseroan secara profesional, *prudent*, dan berorientasi pada keberlanjutan usaha dengan mengedepankan prinsip GCG.

Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab tersebut sepanjang tahun 2025, Direksi berfokus pada hal-hal berikut:

1. **Penguatan fundamental usaha dan ketahanan operasional**
   Direksi memastikan kegiatan usaha Perseroan berjalan secara efektif dan terintegrasi melalui penguatan infrastruktur energi dan logistik, optimalisasi jaringan distribusi, serta peningkatan keandalan operasional agar tetap dapat menjaga stabilitas pasokan dan keberlanjutan kinerja.
2. **Pengembangan portofolio usaha dan ekosistem industri**
   Direksi melanjutkan pengembangan kawasan industri dan ekosistem usaha terintegrasi guna meningkatkan utilisasi aset strategis, menarik investasi industri, serta memperkuat posisi Perseroan dalam mendukung pertumbuhan industri nasional dan ketahanan energi. Direksi juga melanjutkan pengembangan jaringan ritel energi melalui kemitraan strategis, termasuk pengembangan SPBU bp AKR, sebagai bagian dari upaya memperkuat portofolio bisnis hilir dan meningkatkan nilai tambah jangka Panjang Perseroan.
3. **Penguatan fundamental keuangan dan kehati-hatian pengelolaan modal**
   Direksi menjaga disiplin pengelolaan margin, arus kas, dan struktur permodalan guna memastikan fleksibilitas keuangan Perseroan tetap terjaga. Penggunaan fasilitas pendanaan dan belanja modal dilakukan secara selektif dan terukur dengan mempertimbangkan profil risiko serta keberlanjutan usaha.
4. **Penguatan tata kelola, manajemen risiko, dan kepatuhan**
   Direksi memastikan penerapan GCG melalui penguatan pengendalian internal, manajemen risiko terintegrasi, serta kepatuhan terhadap peraturan dan dinamika kebijakan yang relevan dengan kegiatan usaha Perseroan.
5. **Pengembangan organisasi dan kualitas sumber daya manusia**
   Direksi mendorong penguatan kapasitas organisasi dan pengembangan sumber daya manusia yang kompeten dan adaptif guna mendukung transformasi usaha dan kesinambungan kepemimpinan Perseroan dalam jangka panjang.
6. **Penguatan digitalisasi dan pemanfaatan teknologi berbasis data**
   Direksi mendorong pemanfaatan teknologi digital dan analitik data untuk meningkatkan efisiensi operasional, kualitas pengambilan keputusan, serta pengelolaan risiko secara lebih terukur. Pemanfaatan teknologi, termasuk pengembangan sistem berbasis data dan otomatisasi proses, dilakukan secara selektif untuk mendukung keandalan operasional dan peningkatan layanan kepada pelanggan.
7. **Integrasi prinsip keberlanjutan dan tanggung jawab sosial**
   Direksi mengintegrasikan aspek keselamatan operasional, tanggung jawab lingkungan, dan nilai sosial dalam kegiatan usaha Perseroan sebagai bagian dari komitmen terhadap keberlanjutan usaha dan peningkatan kepercayaan pemangku kepentingan.
8. **Memperkuat Hubungan dengan Pemangku Kepentingan Strategis, dan Mitra**
   Direksi terus memperkuat kemitraan jangka panjang dengan pemerintah, pelanggan industri, investor, dan mitra usaha lainnya guna menjaga stabilitas usaha serta mendukung kontribusi Perseroan terhadap pertumbuhan ekonomi dan ketahanan energi nasional.

Keputusan Direksi

Sepanjang tahun 2025, Direksi telah memberikan berbagai keputusan dalam menjalankan fungsi pengelolaan Perseroan sebagai berikut:

No	Tanggal	Perihal
1.	17 Maret 2025	Keputusan Direksi terkait Penyelenggaraan RUPS Tahunan pada tanggal 28 April 2025
2.	24 Juli 2025	Keputusan Pembagian Dividen Interim AKR 2025
3.	5 Desember 2025	Keputusan Anggaran Perseroan untuk Tahun 2026

Program Orientasi Direksi

AKR menetapkan program orientasi bagi Direksi baru untuk mempercepat pemahaman mereka terhadap struktur organisasi, model bisnis, strategi Perseroan, serta praktik GCG yang diimplementasikan. Program orientasi dirancang untuk memastikan bahwa setiap anggota Direksi dapat menjalankan fungsi dan tanggung jawabnya secara optimal, selaras dengan visi, misi, dan nilai-nilai Perseroan.

Program orientasi memungkinkan Direksi beradaptasi dengan cepat dan memberikan kontribusi yang maksimal dalam pengelolaan Perseroan. Karena tidak ada perubahan dalam susunan Direksi, program orientasi tidak diselenggarakan pada tahun 2025.

Pengembangan Kompetensi Direksi

Perseroan secara konsisten mendorong pengembangan kompetensi Direksi guna mendukung efektivitas pengelolaan AKR dan pengambilan keputusan strategis. Pengembangan kompetensi dilaksanakan melalui berbagai program pelatihan, *workshop*, dan seminar yang membahas aspek kepemimpinan, GCG, regulasi, manajemen risiko, keuangan, serta tren industri terkini.

Direksi juga diberikan kesempatan untuk mengikuti forum bisnis, konferensi nasional maupun internasional, serta memperoleh sertifikasi profesional untuk dapat memperluas wawasan dan memperkuat pemahaman atas tantangan bisnis. Sampai akhir tahun 2025, partisipasi Direksi dalam program pengembangan kompetensi tersebut meliputi:

No	Nama & Jabatan	Judul Pelatihan	Tanggal Pelatihan	Tempat Pelatihan	Penyelenggara
1.	Suresh Vembu **Direktur**	Menavigasi Tantangan ESG melalui Penguatan Kebijakan *Good Corporate Governance*	18 Maret 2025	Zoom	ICSA
		Peran Perusahaan Publik dalam Keuangan Berkelanjutan: Memahami TKBI Versi 2	13 Maret 2025	Zoom	ICSA
		Integrasi *Cybersecurity* dalam GCG: Peran Penting *Corporate Secretary*	29 Oktober 2025	Zoom	ICSA
		Dialog Akhir tahun OJK	5 Desember 2025	Jakarta	OJK
2.	Termurti Tiban **Direktur**	PPL - PSAK Update (IAI JAKARTA)	23–24 Januari 2025	Jakarta	IAI
		Webinar -Asia – Assessing the impact of US tariffs	10 April 2025	Jakarta	Standard Chartered
		Webinar IAI - Kupas Tuntas Pemerikssan Pajak Di Era Coretax Berdasarkan PMK No.15 tahun 2025	3 Juli 2025	Jakarta	IAI
		Seminar IDX-GRI-AEI : GRI 102 & GRI 103: Climate Change and Energy Topic Standards Confirmation	3 September 2025	Jakarta	IDX

Penilaian Kinerja Komite Penunjang Direksi

AKR memiliki komite yang menjalankan tugas dalam pelaksanaan strategi keberlanjutan, yakni Komite ESG. Pembentukan Komite ESG merupakan bentuk komitmen dan dukungan Perseroan terhadap pembangunan berkelanjutan, khususnya dalam aspek Sosial, Ekonomi, dan Tata Kelola. Selain itu, terdapat organ pendukung seperti Sekretaris Perusahaan, Audit Internal, dan Hubungan Investor yang berperan membantu Direksi dalam pengelolaan Perseroan.

Kinerja komite dan organ pendukung Direksi dievaluasi secara berkala untuk menjamin efektivitas dan kontribusi terhadap pengelolaan Perseroan. Penilaian dan evaluasi ini mencakup beberapa aspek, antara lain pelaksanaan tugas dan tanggung jawab, tingkat komitmen dan integritas, kemampuan analisis terhadap kinerja finansial dan operasional Perseroan, serta kualitas masukan dan rekomendasi yang diberikan.

Pelaksanaan tugas komite dan organ pendukung Direksi dilakukan sesuai pedoman kerja yang berlaku untuk memastikan pelaksanaan tugas yang terstruktur dan efisien. Direksi melakukan penilaian dan evaluasi kinerja komite dan organ pendukung secara individual maupun kolegial, yang kemudian menjadi dasar pertimbangan dalam menentukan perpanjangan masa tugas masing-masing anggota.

Pada tahun 2025, Direksi menilai Komite ESG, Sekretaris Perusahaan, Audit Internal, dan Hubungan Investor telah melaksanakan tanggung jawabnya dengan baik. Fungsi-fungsi ini memiliki peran strategis dalam mendukung keberlanjutan usaha, GCG, meningkatkan transparansi, serta memperkuat hubungan dan komunikasi Perseroan dengan pemangku kepentingan.

Komite ESG bertugas memastikan kelancaran pelaksanaan aspek keberlanjutan dalam setiap bisnis usaha AKR. Sekretaris Perusahaan memainkan peran penting dalam memastikan kepatuhan terhadap peraturan dan kelancaran komunikasi antara Perseroan dan pemegang saham. Audit Internal bertugas mengawasi dan menilai efektivitas sistem pengendalian internal serta kepatuhan terhadap kebijakan yang berlaku. Sementara itu, Hubungan Investor mendukung transparansi informasi dan membangun kepercayaan investor terhadap kinerja dan prospek bisnis Perseroan.

Independensi dan Transparansi Informasi **Dewan Komisaris dan Direksi**

Kepemilikan Saham Dewan Komisaris dan Direksi

Anggota Dewan Komisaris dan Direksi memiliki kewajiban untuk menyampaikan kepada Perseroan informasi terkait kepemilikan saham, termasuk setiap perubahan yang terjadi atas kepemilikan saham tersebut. Dalam pelaksanaannya, Perseroan mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 4 Tahun 2024 mengenai Laporan Kepemilikan atau Setiap Perubahan Kepemilikan Saham Perusahaan Terbuka serta Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/SEOJK.04/2025 Tahun 2025 tentang Penyampaian Laporan Kepemilikan Atau Setiap Perubahan Kepemilikan Saham Perusahaan Terbuka Dan Laporan Aktivitas Menjaminkan Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik.

Dalam rangka memastikan kepatuhan terhadap ketentuan tersebut, AKR telah memberlakukan kebijakan pelaporan kepemilikan saham yang diatur dalam Peraturan Nomor 001/R-AKR-CS/2024. Kebijakan ini dirancang untuk mengatur prosedur pelaporan secara terstruktur, transparan, dan akuntabel. Mekanisme penyampaian laporan sesuai kebijakan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Rencana transaksi jual beli saham AKRA oleh anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris wajib disampaikan kepada Sekretaris Perusahaan 7 (tujuh) hari sebelum pelaksanaan, dapat dilaporkan dalam bentuk *range* tanggal, melalui Formulir Rencana Transaksi Saham dilengkapi Pernyataan Perjanjian.
2. Anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris yang memiliki saham AKRA perlu mengisi dan menandatangani *Form* Pernyataan Perubahan Kepemilikan Saham dan menyampaikan kepemilikan saham tersebut kepada Perseroan yang dalam hal ini telah dikuasakan kepada Sekretaris Perusahaan.
3. Pelaporan tersebut dilakukan dengan menyerahkan bukti transaksi saham segera setelah terjadi transaksi (H-0) atau paling lambat 1 (satu) hari kalender setelah terjadinya transaksi.
4. Sekretaris Perusahaan akan memberikan *Form* Pernyataan Perubahan Kepemilikan Saham yang ditandatangani oleh yang bersangkutan atau yang dikuasakan secara pribadi. Kemudian laporan perubahan kepemilikan atau perubahannya tersebut ke OJK akan dibuat sesuai format Laporan Kepemilikan atau Setiap Perubahan Kepemilikan Saham Perusahaan Terbuka yang ditandatangani oleh yang bersangkutan untuk disampaikan melalui Sekretaris Perusahaan.
5. Sekretaris Perusahaan juga akan mengedarkan *Form* Pernyataan Kepemilikan Saham secara berkala setiap tahun untuk memantau pergerakan kepemilikan saham Direksi atau anggota Dewan Komisaris dan keluarganya. *Form* ini wajib dikembalikan kepada Sekretaris Perusahaan dalam kurun waktu 7 (tujuh) hari kalender setelah diedarkan.

Setiap anggota Dewan Komisaris dan Direksi diwajibkan untuk melaporkan kepada Sekretaris Perusahaan atas setiap perubahan kepemilikan saham Perseroan dengan ketentuan paling lambat 1 (satu) hari kalender sejak tanggal transaksi. Selain itu, laporan atas perubahan kepemilikan saham tersebut juga harus disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah transaksi dilakukan.

Berdasarkan ketentuan tersebut, kepemilikan saham anggota Dewan Komisaris dan Direksi di AKR per 31 Desember 2025 disajikan sebagai berikut:

Nama	Jabatan	Kepemilikan Saham di AKR
Dewan Komisaris		
Soegiarto Adikoesoemo	Presiden Komisaris	145.267.000
Sofyan A. Djalil	Komisaris	-
Fauzi Ichsan	Komisaris Independen	-

Nama	Jabatan	Kepemilikan Saham di AKR
Direksi		
Haryanto Adikoesoemo	Presiden Direktur	212.604.600
Jimmy Tandyo	Direktur	48.000.000
Bambang Soetiono Soedijanto	Direktur	7.780.000
Mery Sofi	Direktur	8.303.000
Suresh Vembu	Direktur	4.927.500
Nery Polim	Direktur	2.965.000
Termurti Tiban	Direktur	1.650.000

Hubungan Afiliasi Dewan Komisaris dan Direksi

Independensi Dewan Komisaris dan Direksi AKR senantiasa dijaga sebagai bagian dari penerapan GCG. Tidak terdapat benturan kepentingan yang dapat mempengaruhi kemampuan anggota Dewan Komisaris dan Direksi dalam melaksanakan tugas secara profesional dan objektif. Hubungan afiliasi yang ada tetap berada dalam batasan yang diperkenankan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tabel pengungkapan hubungan afilasi Dewan Komisaris dan Direksi sebagai berikut:

Nama	Dewan Komisaris			Direksi							Pemegang Saham Pengendali	
	GIK	SDJ	FIC	HAR	JTA	BSU	MES	SVE	NPO	TER	GIK	HAR
Dewan Komisaris												
Soegiarto Adikoesoemo	-	-	-	✓	-	-	-	-	-	-	-	✓
Sofyan A. Djalil	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fauzi Ichsan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Direksi												
Haryanto Adikoesoemo	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	✓	-
Jimmy Tandyo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bambang Soetiono Soedijanto	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Mery Sofi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Suresh Vembu	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Nery Polim	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Termurti Tiban	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Keterangan

✓	: Ya	HAR	: Haryanto Adikoesoemo
-	: Tidak	JTA	: Jimmy Tandyo
GIK	: Soegiarto Adikoesoemo	BSU	: Bambang Soetiono Soedijanto
SD	: Sofyan A. Djalil	MES	: Mery Sofi
FIC	: Fauzi Ichsan	SVE	: Suresh Vembu
		NPO	: Nery Polim
		TER	: Termurti Tiban

- Tidak ada hubungan afiliasi antara anggota Direksi dengan anggota Direksi lainnya.
- Hubungan afiliasi antara anggota Direksi dengan anggota Dewan Komisaris: Presiden Direktur Perseroan, Bapak Haryanto Adikoesoemo, adalah putera dari Bapak Soegiarto Adikoesoemo yang menjabat sebagai Presiden Komisaris Perseroan.
- Hubungan afiliasi antara anggota Direksi dengan pemegang saham pengendali: Presiden Direktur Perseroan, Bapak Haryanto Adikoesoemo, adalah Presiden Direktur dan salah satu pemegang saham di PT Arthakencana Rayatama yang merupakan pemegang saham pengendali Perseroan. Ayah beliau, Bapak Soegiarto Adikoesoemo, merupakan Presiden Komisaris dan salah satu pemegang saham di PT Arthakencana Rayatama.
- Tidak ada hubungan afiliasi antara anggota Dewan Komisaris dengan anggota Dewan Komisaris lainnya.
- Hubungan afiliasi antara anggota Dewan Komisaris dengan pemegang saham pengendali: Presiden Komisaris Perseroan, Bapak Soegiarto Adikoesoemo, adalah salah satu pemegang saham dan Presiden Komisaris di PT Arthakencana Rayatama yang merupakan pemegang saham pengendali Perseroan. Putera beliau, Bapak Haryanto Adikoesoemo, merupakan Presiden Direktur dan salah satu pemegang saham di PT Arthakencana Rayatama.

Rangkap Jabatan Dewan Komisaris dan Direksi

Perseroan menetapkan kebijakan mengenai rangkap jabatan bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik. Kebijakan rangkap jabatan bertujuan untuk memastikan setiap anggota Dewan Komisaris dan Direksi dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara optimal, independen, dan profesional, tanpa menimbulkan konflik kepentingan maupun menurunkan efektivitas kinerja.

Setiap anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang memiliki rangkap jabatan pada entitas lain wajib memastikan bahwa pelaksanaan jabatan tersebut tidak mengganggu fokus, komitmen, dan pencapaian kinerjanya di Perseroan. Seluruh rangkap jabatan wajib dilaporkan kepada Perseroan dan menjadi bagian dari proses evaluasi berkala oleh organ yang berwenang. Evaluasi dilakukan untuk memastikan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, menjaga transparansi, serta memastikan struktur kepemimpinan Perseroan tetap efektif dan akuntabel.

Ketentuan Rangkap Jabatan Dewan Komisaris

1. Anggota Dewan Komisaris dapat merangkap jabatan sebagai:
   a. Anggota Direksi paling banyak pada 2 (dua) Emiten atau Perusahaan Publik lain; dan
   b. Anggota Dewan Komisaris paling banyak pada 2 (dua) Emiten atau Perusahaan Publik lain.
2. Dalam hal anggota Dewan Komisaris tidak merangkap jabatan sebagai anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan dapat merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris paling banyak pada 4 (empat) Emiten atau Perusahaan Publik lain.
3. Anggota Dewan Komisaris dapat merangkap sebagai anggota komite paling banyak pada 5 (lima) komite di Emiten atau Perusahaan Publik dimana yang bersangkutan juga menjabat sebagai anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris.

Ketentuan Rangkap Jabatan Direksi

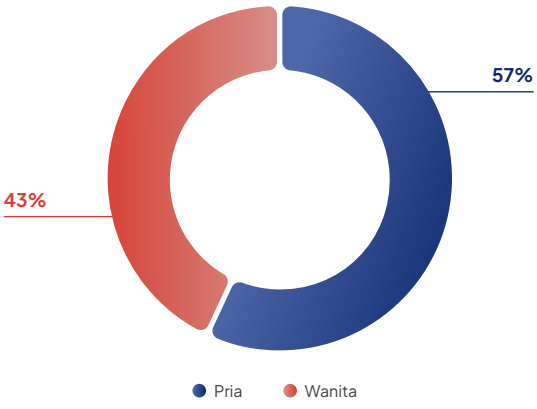
1. Anggota Direksi dapat merangkap jabatan sebagai:
   a. Anggota Direksi paling banyak pada 1 (satu) Emiten atau Perusahaan Publik lain;
   b. Anggota Dewan Komisaris paling banyak pada 3 (tiga) Emiten atau Perusahaan Publik lain; dan/atau
2. Anggota komite paling banyak pada 5 (lima) komite di Emiten atau Perusahaan Publik dimana yang bersangkutan juga menjabat sebagai anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris.

Kepatuhan terhadap ketentuan rangkap jabatan merupakan salah satu aspek yang diperhatikan dalam memperkuat penerapan GCG. Sehubungan dengan hal tersebut, seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi AKR telah memenuhi ketentuan rangkap jabatan sebagaimana diatur dalam peraturan Otoritas Jasa Keuangan. Pengungkapan rangkap jabatan anggota Dewan Komisaris dan Direksi AKR untuk tahun 2025 disampaikan pada bab 3 Profil Perusahaan dalam Laporan Tahunan ini.

Keberagaman Komposisi Dewan Komisaris dan Direksi

Perseroan berkomitmen menerapkan prinsip keberagaman dalam penyusunan komposisi Dewan Komisaris dan Direksi guna menghadirkan sudut pandang yang beragam dalam pengambilan keputusan strategis. Prinsip keberagaman ini meliputi jenis kelamin, pengalaman, latar belakang profesional, dan kompetensi yang relevan dengan arah dan kebutuhan bisnis Perseroan. Pada tahun 2025, Perempuan menempati 3 (tiga) dari 7 (tujuh) posisi anggota Direksi atau sebesar 42,8%.

Persentase Komposisi Dewan Komisaris dan Direksi Berdasarkan Jenis Kelamin



Penerapan keberagaman dalam kepemimpinan merupakan bagian dari upaya Perseroan untuk meningkatkan ketangguhan AKR dalam menghadapi dinamika industri. Kombinasi pengalaman dan keahlian yang beragam pada Dewan Komisaris dan Direksi memperkuat efektivitas pengawasan dan pengelolaan Perseroan. Struktur keberagaman mendukung penerapan GCG yang berkelanjutan dan berorientasi pada penciptaan nilai jangka panjang.

Aspek keberagaman Dewan Komisaris dan Direksi disajikan dalam tabel berikut ini:

Nama	Jabatan	Jenis Kelamin	Usia (tahun)	Pendidikan	Pengalaman
Dewan Komisaris					
Soegiarto Adikoesoemo	Presiden Komisaris	Pria	88	Sekolah Menengah Atas	Mendirikan PT AKR Corporindo Tbk di tahun 1960-an.
Sofyan A. Djalil	Komisaris	Pria	72	Ph.D di bidang Hukum dan Kebijakan Pasar Modal dari Fletcher School of Law and Diplomacy – Tufts University	Memiliki pengalaman lebih dari 13 tahun di sektor publik maupun swasta di pemerintahan dengan menjabat sebagai Menteri di berbagai bidang.
Fauzi Ichsan	Komisaris Independen	Pria	56	Master of Science, Development Studies, Massachusetts Institute of Technology (MIT), Massachusetts, USA	Memiliki pengalaman lebih dari 20 tahun di pemerintahan (baik sebagai pembuat maupun pengatur kebijakan), riset ekonomi dan pasar, serta di bidang perbankan dan keuangan.
Direksi					
Haryanto Adikoesoemo	Presiden Direktur	Pria	63	Executive Management Program dari Harvard Business School	Berpengalaman lebih dari 45 tahun di bidang perdagangan, manajemen, pengembangan bisnis dan keuangan.
Jimmy Tandyo	Direktur	Pria	74	Advanced Management Program dari Harvard Business School	Berpengalaman lebih dari 50 tahun di manajemen dan pengembangan bisnis.
Bambang Soetiono Soedijanto	Direktur	Pria	64	Sarjana Akuntansi STIE Surabaya	Berpengalaman lebih dari 30 tahun di manajemen, keuangan dan pengembangan bisnis.
Mery Sofi	Direktur	Wanita	59	Advanced Management Program, Northwestern University	Berpengalaman lebih dari 30 tahun di keuangan, manajemen dan pengembangan bisnis.
Suresh Vembu	Direktur	Pria	61	Bachelor of Commerce dari Bangalore University dan Chartered Accountant dari Indian Institute of Chartered Accountants	Berpengalaman lebih dari 35 tahun di keuangan, manajemen dan kepatuhan.
Nery Polim	Direktur	Wanita	61	Sarjana Ekonomi dari California State University of Bakersfield	Berpengalaman lebih dari 30 tahun di manajemen sumber daya manusia, manajemen dan pengembangan bisnis.
Termurti Tiban	Direktur	Wanita	54	Sarjana Ekonomi dari Universitas Trisakti	Berpengalaman lebih dari 20 tahun di bidang keuangan dan akuntansi.

Kebijakan dan Pelaksanaan Rapat Dewan Komisaris

Dalam pelaksanaan fungsi pengawasan, Dewan Komisaris menyelenggarakan rapat untuk membahas kinerja Perseroan serta memberikan arahan strategis sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya. Rapat Dewan Komisaris diselenggarakan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 2 (dua) bulan. Selain itu, Dewan Komisaris mengadakan rapat bersama Direksi secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan.

Tingkat kehadiran rapat Dewan Komisaris dalam setahun ditetapkan minimal 75% dan wajib dipenuhi oleh seluruh anggota Dewan Komisaris. Ketentuan tersebut mengacu pada Pedoman Kerja serta POJK 33/2014. Pengaturan lebih lanjut mengenai ketentuan dan tata tertib rapat Dewan Komisaris diatur secara lengkap dalam Pedoman Kerja Dewan Komisaris.

Untuk menjamin akuntabilitas dan transparansi, setiap rapat Dewan Komisaris didokumentasikan melalui risalah rapat yang mencatat agenda pembahasan, keputusan yang diambil, serta tindak lanjut. Risalah tersebut ditandatangani oleh pimpinan rapat dan anggota Dewan Komisaris yang hadir, serta salinannya disampaikan kepada seluruh anggota sebagai bentuk keterbukaan informasi. Bahan rapat juga didistribusikan kepada peserta sekurang-kurangnya 5 (lima) hari sebelum pelaksanaan rapat sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Pasal 19.

Pengambilan keputusan dalam Rapat Dewan Komisaris dilakukan dengan memenuhi ketentuan kuorum kehadiran sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota Dewan Komisaris. Hingga akhir tahun 2025, Dewan Komisaris telah menyelenggarakan rapat sebanyak 4 (empat) kali.

No	Tanggal	Agenda	Peserta Rapat		
			GIK	SDJ	FIC
1.	17 Maret 2025	Penunjukan Pemimpin RUPS Tahunan pada 28 April 2025	✓	✓	✓
2.	23 Mei 2025	Pengangkatan Komite Audit - Sartono	✓	✓	✓
3.	25 Juli 2025	Persetujuan Pembayaran Dividen Interim	✓	✓	✓
4	31 Desember 2025	Pengangkatan Komite Audit - Handoko Tripriyono	✓	✓	✓
Jumlah Rapat			4	4	4
Jumlah Kehadiran			4	4	4
% Kehadiran			100%	100%	100%

Keterangan
GIK : Soegiarto Adikoesoemo
SDJ : Sofyan A. Djalil
FIC : Fauzi Ichsan

Rapat Gabungan Dewan Komisaris dan Direksi

Pelaksanaan Rapat Gabungan Dewan Komisaris bersama Direksi sebanyak 4 (empat) kali dengan uraian agenda dan rekapitulasi kehadiran rapat sebagai berikut:

No	Tanggal	Agenda	Peserta Rapat									
			Kehadiran Dewan Komisaris			Kehadiran Direksi						
			GIK	SDJ	FIC	HAR	JTA	BSU	MES	SVE	NPO	TER
1.	17 Maret 2025	Laporan Keuangan Konsolidasian Tanggal 31 Desember 2024 dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal tersebut beserta Laporan Auditor Independen PT AKR Corporindo Tbk dan Entitas Anaknya	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
2.	23 April 2025	Pembahasan Laporan Keuangan Konsolidasian Tanggal 31 Maret 2025 dan untuk Periode Tiga Bulan yang Berakhir pada Tanggal tersebut (Tidak Diaudit) PT AKR Corporindo Tbk dan Entitas Anaknya	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
3.	24 Juli 2025	Pembahasan Laporan Keuangan Konsolidasian Tanggal 30 Juni 2025 dan untuk Periode Enam Bulan yang Berakhir pada Tanggal tersebut (Tidak Diaudit) PT AKR Corporindo Tbk dan Entitas Anaknya	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

No	Tanggal	Agenda	Peserta Rapat									
			Kehadiran Dewan Komisaris			Kehadiran Direksi						
			GIK	SDJ	FIC	HAR	JTA	BSU	MES	SVE	NPO	TER
4.	21 Oktober 2025	Pembahasan Laporan Keuangan Konsolidasian Tanggal 30 September 2025 dan untuk Periode Sembilan Bulan yang Berakhir pada Tanggal tersebut (Tidak Diaudit) PT AKR Corporindo Tbk dan Entitas Anaknya	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Jumlah Rapat			4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
Jumlah Kehadiran			4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
% Kehadiran			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Keterangan

✓ : Ya
- : Tidak

GIK : Soegiarto Adikoesoemo
SD : Sofyan A. Djalil
FIC : Fauzi Ichsan
HAR : Haryanto Adikoesoemo
JTA : Jimmy Tandyo
BSU : Bambang Soetiono Soedijanto
MES : Mery Sofi
SVE : Suresh Vembu
NPO : Nery Polim
TER : Termurti Tiban

Kebijakan dan Pelaksanaan Rapat Direksi

Sebagai bagian dari pengelolaan Perseroan yang efektif, Direksi secara konsisten menyelenggarakan rapat untuk mengevaluasi kinerja operasional, merumuskan arah strategi bisnis, serta mengambil keputusan strategis. Rapat Direksi dilaksanakan secara rutin paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan dan dapat diselenggarakan sewaktu-waktu apabila diperlukan oleh anggota Direksi atau atas permintaan Dewan Komisaris. Direksi juga mengadakan rapat bersama Dewan Komisaris secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan.

Tingkat kehadiran rapat Direksi dalam setahun ditetapkan minimal 75% dan wajib dihadiri oleh seluruh anggota Direksi. Setiap kebijakan dan keputusan strategis ditetapkan melalui rapat Direksi dengan memperhatikan ketentuan Anggaran Dasar serta peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pelaksanaan rapat Direksi mengacu pada Anggaran Dasar Perseroan dan POJK 33/2014. Ketentuan dan tata tertib rapat Direksi diatur lebih lanjut dalam Pedoman Kerja.

Rapat Direksi didokumentasikan melalui risalah rapat yang mencatat agenda, proses pembahasan, keputusan, serta tindak lanjut. Risalah rapat disiapkan oleh Sekretaris Perusahaan dan disahkan melalui penandatanganan oleh pimpinan rapat dan anggota Direksi yang hadir. Salinan risalah rapat diberikan kepada seluruh anggota Direksi sebagai bentuk keterbukaan informasi. Pengambilan keputusan dalam rapat Direksi dilakukan dengan memenuhi ketentuan kuorum kehadiran sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota Direksi.

Setiap bahan rapat disampaikan kepada peserta rapat sekurang-kurangnya 5 (lima) hari sebelum pelaksanaan rapat sesuai dengan Anggaran Dasar Pasal 16. Hingga akhir tahun 2025, Direksi telah melaksanakan rapat sebanyak 13 (tiga belas) kali dan rapat Bersama Dewan Komisaris sebanyak 4 (empat) kali. Adapun agenda dan rekapitulasi kehadiran rapat Direksi sebagai berikut:

No	Tanggal	Agenda	Peserta Rapat						
			HAR	JTA	BSU	MES	SVE	NPO	TER
1	20 Januari 2025	Tinjauan Kinerja Bulanan	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
2	21 Februari 2025	Tinjauan Kinerja Bulanan	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
3	19 Maret 2025	Tinjauan Kinerja Bulanan	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
4	21 April 2025	Tinjauan Kinerja Bulanan	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
5	23 Mei 2025	Tinjauan Kinerja Bulanan	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
6	25 Juni 2025	Tinjauan Kinerja Bulanan	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
7	28 Juli 2025	Tinjauan Kinerja Bulanan	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
8	29 Juli 2025	Tinjauan Kinerja Bulanan	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

No	Tanggal	Agenda	Peserta Rapat						
			HAR	JTA	BSU	MES	SVE	NPO	TER
9	19 Agustus 2025	Tinjauan Kinerja Bulanan	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
10	22 September 2025	Tinjauan Kinerja Bulanan	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
11	22 Oktober 2025	Tinjauan Kinerja Bulanan	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
12	25 November 2025	Tinjauan Kinerja Bulanan	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
13	16 Desember 2025	Tinjauan Kinerja Bulanan	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Jumlah Rapat			13	13	13	13	13	13	13
Jumlah Kehadiran			13	13	13	13	13	13	13
% Kehadiran			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Keterangan
HAR : Haryanto Adikoesoemo
JTA : Jimmy Tandyo
BSU : Bambang Soetiono Soedijanto
MES : Mery Sofi
SVE : Suresh Vembu
NPO : Nery Polim
TER : Termurti Tiban

Rencana Rapat Dewan Komisaris dan Rapat Direksi di Tahun Berikutnya

Rapat Direksi dan Rapat Dewan Komisaris untuk tahun buku berikutnya telah dijadwalkan sebelum dimulainya tahun berjalan. Rapat Direksi akan dilaksanakan 1 (satu) kali setiap bulan, sedangkan rapat Dewan Komisaris akan dilaksanakan 1 (satu) kali setiap 2 (dua) bulan. Rencana pelaksanaan rapat tersebut telah disesuaikan dengan ketentuan yang diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan. Agenda rapat Direksi yang akan dibahas mencakup pembahasan dan penetapan kebijakan strategis, evaluasi kinerja operasional dan keuangan, pembahasan arah dan strategi Perseroan, serta hal-hal lain yang relevan dengan tugas dan fungsi Direksi.



Penilaian Kinerja **Dewan Komisaris dan Direksi**

Perseroan melakukan penilaian kinerja Dewan Komisaris baik secara individu maupun kolektif sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam setahun. Penilaian dilaksanakan melalui metode *self-assessment* atau metode lain yang dilakukan oleh pihak internal maupun pihak ketiga. Indikator penilaian kinerja Dewan Komisaris meliputi antara lain:

1. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab sesuai Pedoman Kerja Dewan Komisaris.
2. Tingkat kehadiran dan keaktifan dalam rapat Dewan Komisaris.
3. Tingkat kehadiran dan keaktifan dalam rapat Komite (jika menjadi anggota Komite).
4. Saran dan masukan yang diberikan dalam proses pengawasan Perseroan.
5. Keterlibatan dalam penugasan-penugasan tertentu.
6. Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku serta kebijakan Perseroan.

Dalam rangka memastikan akuntabilitas dan efektivitas kepemimpinan, kinerja Direksi dievaluasi secara individu dan kolektif sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam setahun. Evaluasi dilakukan berdasarkan hasil pelaksanaan tugas Direksi sesuai dengan target yang telah ditetapkan oleh Perseroan dan target individu. Penilaian mencakup aspek keuangan dan non-keuangan, termasuk kewajaran laporan keuangan, pencapaian rasio keuangan dan pangsa pasar, serta pencapaian indikator lainnya sebagaimana tercantum dalam *Key Performance Indicators* (KPI) Direksi.

Adapun indikator penilaian kinerja Direksi yang telah ditetapkan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab sesuai Pedoman Kerja Direksi.
2. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab masing-masing anggota Direksi.
3. Pelaksanaan hasil keputusan RUPS.
4. Pencapaian kinerja Perseroan
   a. Aspek keuangan;
   b. Aspek operasional; dan
   c. Aspek administrasi.
5. Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku serta kebijakan Perseroan.

Parameter penilaian kinerja ditetapkan secara objektif dengan mempertimbangkan kontribusi individu dan kolektif, efektivitas pengawasan dan pengelolaan, serta pencapaian kinerja keuangan dan operasional. Hasil penilaian menjadi landasan bagi peningkatan kapasitas organisasi, penyesuaian strategi, dan penguatan praktik GCG. Pendekatan penilaian yang transparan dan sistematis memungkinkan Perseroan memastikan peran aktif Dewan Komisaris dan Direksi dalam mendorong pertumbuhan usaha yang berkelanjutan.

Dalam rangka menjunjung tinggi prinsip akuntabilitas, hasil penilaian dilaporkan kepada pemegang saham yang berwenang mengambil keputusan atas pemberhentian anggota Dewan Komisaris dan Direksi melalui RUPS apabila kinerja tidak memenuhi target.

Selama tahun 2025, seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi dinilai telah melaksanakan fungsinya secara efektif. Penilaian tersebut didukung oleh kepatuhan Perseroan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dan peningkatan penerapan praktik GCG. Kinerja keuangan dan operasional Perseroan juga tetap terjaga dengan pencapaian laba neto sebesar Rp2.473 miliar atau meningkat 11% pada tahun 2025.

Kebijakan Nominasi dan Remunerasi **Dewan Komisaris dan Direksi**

Kebijakan Nominasi

Prosedur Nominasi Dewan Komisaris dan Direksi

Penetapan calon anggota Dewan Komisaris dan Direksi dilakukan melalui proses nominasi yang memperhatikan kompetensi, pengalaman, serta integritas, selaras dengan kebutuhan strategis Perseroan. Seluruh tahapan nominasi dilaksanakan secara transparan dan objektif dengan mengacu pada Anggaran Dasar, peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta prinsip-prinsip GCG.

Dalam pelaksanaannya, Komite Nominasi dan Remunerasi bertugas menelaah calon anggota Dewan Komisaris dan Direksi serta menyusun rencana suksesi melalui evaluasi kualifikasi, rekam jejak, dan keselarasan dengan visi dan misi Perseroan. Penetapan akhir atas pengangkatan dan/atau penggantian anggota Dewan Komisaris dan Direksi dilakukan melalui RUPS guna memperoleh persetujuan pemegang saham.

Pengangkatan dan Kriteria Dewan Komisaris

RUPS memiliki kewenangan untuk mengangkat, memberhentikan, serta menetapkan remunerasi anggota Dewan Komisaris. Dalam proses tersebut, Komite Nominasi

dan Remunerasi menelaah profil dan kualifikasi setiap kandidat melalui rapat nominasi, serta memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada RUPS.

Penetapan anggota Dewan Komisaris dilakukan dengan mengacu pada POJK 33/2014. Kandidat Dewan Komisaris yang memenuhi kriteria dan persyaratan dapat diangkat dengan persetujuan RUPS. Adapun kriteria tersebut antara lain:

1. Dewan Komisaris paling kurang terdiri dari 2 (dua) orang anggota Dewan Komisaris termasuk Komisaris Independen yang jumlahnya disesuaikan dengan persyaratan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal. Satu orang dimana anggota Dewan Komisaris diangkat menjadi Presiden Komisaris atau Komisaris Utama.
2. Yang dapat diangkat sebagai anggota Dewan Komisaris adalah Warga Negara Indonesia dan/atau Warga Negara Asing yang telah memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Dewan Komisaris Perseroan berdasarkan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lainnya.
3. Komposisi Dewan Komisaris Perseroan diupayakan agar menunjukkan keberagaman keahlian/pengalaman/ pendidikan, kewarganegaraan, usia, jenis kelamin dan independensi.
4. Mempunyai akhlak dan moral yang baik
5. Memiliki integritas dan reputasi yang baik, yaitu tidak pernah secara langsung maupun tidak langsung terlibat dalam perbuatan rekayasa dan praktik-praktik menyimpang, cidera janji serta perbuatan lain yang merugikan Perseroan di mana yang bersangkutan bekerja atau pernah bekerja.
6. Dalam 5 (lima) tahun sebelum pengangkatan dan selama menjabat:
   a. Tidak pernah dinyatakan pailit.
   b. Tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit.
   c. Tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan.
   d. Tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang selama menjabat:
      - Pernah tidak menyelenggarakan RUPS tahunan.
      - Pertanggungjawabannya sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris pernah tidak diterima oleh RUPS atau pernah tidak memberikan pertanggungjawaban sebagai anggota Direksi dan/ atau anggota Dewan Komisaris kepada RUPS.
      - Pernah menyebabkan sebuah perusahaan yang memperoleh izin, persetujuan, atau pendaftaran dari otoritas Jasa Keuangan tidak memenuhi kewajiban menyampaikan laporan tahunan dan/atau laporan keuangan kepada otoritas Jasa Keuangan.
   e. Memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundang undangan yang berlaku.
   f. Memiliki kompetensi, yaitu kemampuan dan pengalaman dalam bidang-bidang yang menunjang pelaksanaan tugas dan kewajiban Dewan Komisaris.
   g. Memiliki pengetahuan dan pengalaman yang memadai dan relevan dengan jabatannya.

Pengangkatan dan Kriteria Direksi

RUPS memiliki kewenangan penuh dalam pengangkatan dan pemberhentian anggota Direksi, termasuk dalam menetapkan remunerasi bagi anggota Direksi. Pemegang saham pengendali dapat menyampaikan rekomendasi kandidat anggota Direksi. Komite Nominasi dan Remunerasi kemudian melakukan pembahasan atas profil dan kualifikasi masing-masing kandidat bersama Dewan Komisaris. Rekomendasi hasil pembahasan tersebut disampaikan untuk memperoleh persetujuan RUPS.

Penetapan anggota Direksi dilaksanakan berdasarkan pada POJK 33/2014. Kandidat Direksi yang memenuhi kriteria dan persyaratan yang ditetapkan diangkat setelah memperoleh persetujuan RUPS. Adapun kriteria tersebut antara lain:

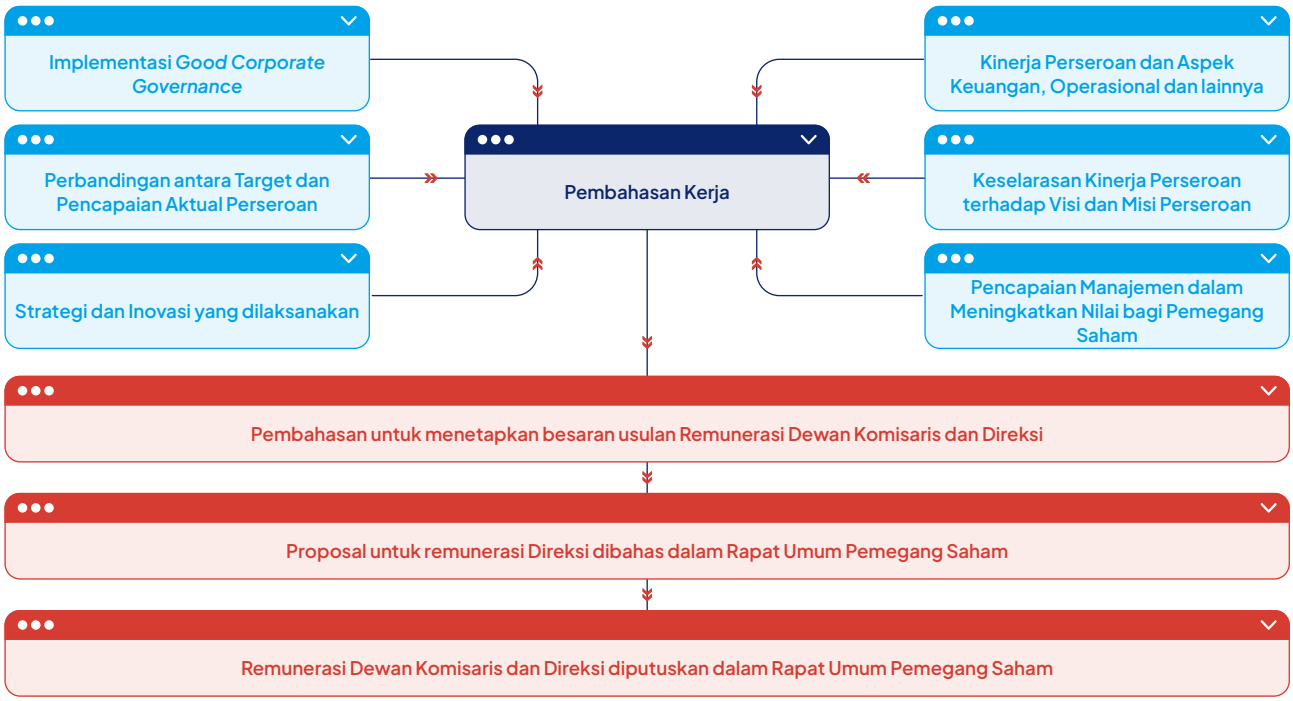
1. Direksi Perseroan paling kurang terdiri dari 3 (tiga) orang anggota Direksi dan 1 (satu) di antara anggota Direksi diangkat menjadi Presiden Direktur.
2. Yang dapat diangkat sebagai anggota Direksi adalah Warga Negara Indonesia dan/atau Warga Negara Asing yang telah memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Direksi Perseroan berdasarkan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang- undangan lainnya.
3. Komposisi Direksi Perseroan diupayakan agar menunjukkan keberagaman keahlian/pengalaman/ pendidikan, kewarganegaraan, usia, jenis kelamin dan independensi.
4. Mempunyai akhlak, moral, integritas dan reputasi yang baik, yaitu tidak pernah secara langsung maupun tidak langsung terlibat dalam perbuatan rekayasa dan praktikpraktik menyimpang, cidera janji serta perbuatan lain yang merugikan Perseroan dimana yang bersangkutan bekerja atau pernah bekerja.
5. Cakap melakukan perbuatan hukum.
6. Dalam 5 (lima) tahun sebelum pengangkatan dan selama menjabat:
   a. Tidak pernah dinyatakan pailit oleh Pengadilan.
   b. Tidak pernah menjadi dan/atau Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit.
   c. Tidak pernah dihukum karena melakukan perbuatan pidana yang merugikan keuangan negara dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan.
   d. Tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris yang selama menjabat:
      - Pernah tidak menyelenggarakan RUPS Tahunan.
      - Pertanggungjawabannya sebagai anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris pernah tidak diterima oleh RUPS atau pernah tidak diterima oleh RUPS atau pernah tidak memberikan pertanggungjawaban sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris kepada RUPS.
      - Pernah menyebabkan perusahaan yang memperoleh izin, persetujuan, atau pendaftaran dari Otoritas Jasa Keuangan tidak memenuhi kewajiban menyampaikan laporan tahunan dan/atau laporan keuangan kepada Otoritas Jasa Keuangan.
7. Memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundang undangan yang berlaku.
8. Memiliki kompetensi, yaitu kemampuan dan pengalaman dalam bidang-bidang yang menunjang pelaksanaan tugas dan kewajiban Direksi.
9. Berwatak baik dan mempunyai kemampuan untuk mengembangkan usaha guna kemajuan Perseroan.
10. Memiliki pengetahuan dan pengalaman yang memadai dan relevan dengan jabatannya.
11. Anggota Direksi dapat merangkap jabatan sebagai:
    a. Anggota Direksi paling banyak pada 1 (satu) Emiten atau Perusahaan Publik lain.
    b. Anggota Dewan Komisaris paling banyak pada 3 (tiga) Emiten atau Perusahaan Publik lain. dan/atau
    c. Anggota komite paling banyak pada 5 (lima) komite di Emiten atau Perusahaan Publik dimana yang bersangkutan juga menjabat sebagai anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris.

Kebijakan Remunerasi

Prosedur Penetapan Remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi

Perseroan menetapkan remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi secara transparan dan objektif dengan mempertimbangkan kinerja, tanggung jawab, serta kontribusi masing-masing anggota dalam pengelolaan dan pengawasan Perseroan. Proses penetapan remunerasi dilaksanakan dengan mengacu pada Anggaran Dasar, ketentuan peraturan perundang-undangan, serta prinsip GCG.

Komite Nominasi dan Remunerasi melaksanakan kajian dan menyampaikan rekomendasi terkait struktur, kebijakan, dan besaran remunerasi kepada Dewan Komisaris. Berdasarkan rekomendasi tersebut, Dewan Komisaris mengajukan usulan remunerasi kepada RUPS untuk memperoleh persetujuan pemegang saham. Perseroan memastikan bahwa kebijakan remunerasi tetap kompetitif dan selaras dengan kinerja Perseroan, serta mendukung keberlanjutan kepemimpinan melalui pengelolaan talenta yang efektif. Prosedur remunerasi anggota Dewan Komisaris dan Direksi dijabarkan sebagai berikut:



Jumlah Remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi

Jumlah remunerasi pada tahun 2025 yang dikelompokkan berdasarkan imbalan jasa kerja dan imbalan pasca kerja sebagai berikut:

dalam Ribuan Rupiah

Deskripsi	2025		2024	
	Imbalan Jangka Pendek	Imbalan Pasca Kerja	Imbalan Jangka Pendek	Imbalan Pasca Kerja
Dewan Komisaris	19.736.629	-	24.366.897	-
Direksi	86.150.001	2.348.551	107.379.782	2.326.944

Komite Penunjang **Dewan Komisaris**

Dewan Komisaris menjalankan fungsi pengawasan terhadap pengelolaan Perseroan dengan dukungan Komite Audit dan Komite Nominasi dan Remunerasi yang menjalankan tugas sesuai dengan Piagam yang telah disahkan. Komite-komite tersebut terdiri dari individu yang memiliki kapabilitas, pengalaman, dan keahlian yang relevan dengan ruang lingkup pengawasan Perseroan.

Komite Audit

Dalam rangka memperkuat fungsi pengawasan Dewan Komisaris, Perseroan membentuk Komite Audit yang berperan dalam memantau penerapan GCG serta memberikan rekomendasi terkait penggunaan jasa akuntan publik, dengan mempertimbangkan aspek independensi, cakupan pekerjaan, dan besaran imbalan jasa.

Keberadaan Komite Audit merupakan pemenuhan terhadap ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 55/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 9 Tahun 2023 tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik.

Komite Audit Perseroan mendukung Dewan Komisaris melalui penelaahan atas informasi keuangan, evaluasi manajemen risiko, pengawasan terhadap efektivitas audit internal dan eksternal, serta pemantauan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan. Komite Audit juga berperan dalam memberikan rekomendasi atas penunjukan maupun pemberhentian auditor eksternal.

Piagam Komite Audit

Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Komite Audit berpedoman pada Piagam yang ditetapkan dan disahkan oleh Dewan Komisaris pada 31 Januari 2024. Piagam tersebut telah mengalami sejumlah penyempurnaan dan pembaruan yang sebelumnya ditetapkan pada 19 Juni 2017. Piagam Komite Audit ditinjau dan diperbarui secara berkala untuk memastikan kesesuaiannya dengan ketentuan yang berlaku. Piagam Komite Audit disusun berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berisi mengenai:

1. Pendahuluan
2. Maksud dan Tujuan
3. Tanggung Jawab
4. Sasaran Tugas
5. Wewenang
6. Program Kerja
7. Struktur dan Keanggotaan
8. Rapat-Rapat
9. Pelaporan
10. Penutup

Struktur Keanggotaan dan Masa Jabatan

Berdasarkan Piagam, Komite Audit diangkat dan diberhentikan Dewan Komisaris yang terdiri atas setidaknya 1 (satu) Komisaris Independen yang bertindak sebagai ketua dan 2 (dua) orang anggota pihak eksternal yang independen. Ketua Komite tidak diperkenankan merangkap jabatan sebagai Presiden Komisaris. Masa jabatan Komite adalah sama dengan masa tugas Dewan Komisaris, yaitu 5 (lima) tahun dan penunjukkan kembali hanya diperbolehkan untuk masa tugas yang kedua.

Selain itu, anggota Komite bukan orang dalam Akuntan Publik, kantor Konsultan Hukum, Jasa Penilai Publik dan/atau jasa konsultasi lain dalam kurun waktu 6 (enam) bulan terakhir. Anggota Komite wajib memenuhi persyaratan independensi, di antaranya tidak menjadi karyawan Perseroan dalam satu tahun terakhir dan tidak merangkap jabatan di komite lain dalam periode yang sama, dengan latar belakang pemahaman dan pengetahuan bisnis Perseroan.

Komposisi Komite Audit

Sepanjang tahun 2025, terdapat perubahan komposisi Komite Audit dengan mengangkat anggota baru yaitu Bapak Sartono menggantikan anggota yang telah memenuhi batasan masa jabatan yaitu Bapak Sahat Pardede. Kronologi perubahan Komite Audit sebagai berikut:

Jabatan	31 Desember 2024 – 22 Mei 2025	23 Mei – 31 Desember 2025
Ketua	Fauzi Ichsan	Fauzi Ichsan
Anggota	Sahat Pardede	Sartono *Diangkat berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris Perseroan tanggal No. 048/L.AKR.CS/2025 tanggal 23 Mei 2025.
Anggota	Djisman Simandjuntak	Djisman Simandjuntak

Susunan keanggotaan Komite Audit per 31 Desember 2025 disajikan pada tabel berikut ini:

Nama	Jabatan	Dasar Penetapan	Masa Jabatan
Fauzi Ichsan	Ketua/Komisaris Independen	Surat Keputusan Dewan Komisaris Perseroan tanggal No. 048/L.AKR.CS/2025 tanggal 23 Mei 2025.	2025–2030
Sartono	Anggota	Surat Keputusan Dewan Komisaris Perseroan tanggal No. 048/L.AKR.CS/2025 tanggal 23 Mei 2025.	2025 - 2030*
Djisman Simandjuntak	Anggota	Surat Keputusan Dewan Komisaris Perseroan tanggal No. 048/L.AKR.CS/2025 tanggal 23 Mei 2025.	2025–2030

*) Sartono telah mengundurkan diri per 31 Desember 2025 melalui Surat tanggal 15 Desember 2025 dan telah ditindaklanjuti Manajemen AKR dengan melaporkan ke OJK melalui Surat No. 001/L.AKR.CS/2026 tanggal 5 Januari 2026

Profil Anggota Komite Audit

Fauzi Ichsan

Ketua Komite Audit

Dasar Hukum Pengangkatan
Surat Keputusan Dewan Komisaris Perseroan tanggal No. 048/L.AKR.CS/2025 tanggal 23 Mei 2025

Periode Masa Jabatan
Periode ke-2, Tahun 2025–2030

Keterangan
Profil lengkap dapat dilihat pada bab Profil Perusahaan dalam buku Laporan Tahunan ini.



Sartono*

Anggota Komite Audit

Masa Jabatan
Periode ke-1,
Tahun 2025-2030

Usia
48 Tahun

Domisili
Jakarta Timur, DKI Jakarta

Kewarganegaraan
Indonesia

Dasar Hukum Pengangkatan
Surat Keputusan Dewan Komisaris Perseroan tanggal No. 048/L.AKR.CS/2025 tanggal 23 Mei 2025.

Riwayat Pendidikan
- MSc in Banking & Finance, Brunei University, London, United Kingdom (2018 – 2019)
- Magister Akuntansi, Universitas Padjajaran, Bandung (2008 – 2010)
- Sarjana Akuntansi, Universitas Mercu Buana, Jakarta (2000 – 2001)
- Diploma Perpajakan, PKN STAN, Jakarta (1996 – 1999)

Riwayat Jabatan
- Chief Financial Officer, PT Indra Angkola (2024 – 2025)
- General Manager, PT Mitra Caraka Raya (2023 – 2025)
- Head of Assurance Unit – Internal Audit, MIND ID (2023)
- Chief Audit Executive, PT Asuransi Jiwa IFG (2022 – 2023)
- Kepala Divisi, Lembaga Penjamin Simpanan (2013 – 2021)
- Senior Auditor, BPK Republik Indonesia (1999 – 2013)

Rangkap Jabatan
- Advisor on Tranformation, PT Yodya Karya (Persero) (2025 – sekarang)
- Anggota Komite Audit, Indonesia Financial Group (2025 – sekarang)

Hubungan Afiliasi
Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan anggota Dewan Komisaris, Direksi dan Pemegang Saham Pengendali.

*) Bapak Sartono menjabat mulai dari 23 Mei 2025 – 31 Desember 2025, lalu digantikan oleh Bapak Handoko Tripriyono efektif pada 1 Januari 2026. Profil Bapak Handoko Tripriyono akan disajikan pada Laporan Tahunan 2026.



Djisman Simandjuntak

Anggota Komite Audit

Masa Jabatan
Periode ke-2,
Tahun 2025-2030

Usia
79 Tahun

Tempat Tanggal Lahir
Sipahutar - Tapanuli Utara, 1 Januari 1947

Domisili
Jakarta Timur, DKI Jakarta

Kewarganegaraan
Indonesia

Dasar Hukum Pengangkatan
Surat Keputusan Dewan Komisaris Perseroan tanggal No. 048/L. AKR.CS/2025 tanggal 23 Mei 2025.

Riwayat Pendidikan
- Ph.D Ekonomi, Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial, University of Cologne, Jerman (1983);
- Diploma Monetary Economic and Public Finance, Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial, University of Cologne, Jerman (1979);
- Sarjana Ekonomi Manajemen, Fakultas Ekonomi, Universitas Katolik Parahyangan, Bandung (1973).

Riwayat Jabatan
- Co-Founder, Chairman, Advisory Board, The Indonesian Institute For Corporate Directorship (IICD) (1999 – 2011);
- Research Consultant, Asian Development Bank (1980 – 1990);
- Auditor, Sgv-Utomo, Jakarta (1973 – 1974).

Rangkap Jabatan
- Presiden dan Independen Komisaris PT Indo Tambangraya Megah Tbk (2018–sekarang);
- Professor of Business Economic dan Rektor Universitas Prasetiya Mulya (2016–sekarang);
- Presiden Komisaris PT Indoritel Makmur Internasional Tbk (2015–sekarang);
- Komisaris Independen PT Asuransi MSIG Indonesia (2012–sekarang);
- Chairman, Board of Directors, Centre For Strategic And International Studies (CSIS) Foundation (2005 – sekarang);
- Presiden Komisaris PT Indomarco Prismatama Tbk (2000–sekarang).

Hubungan Afiliasi
Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan anggota Dewan Komisaris, Direksi dan Pemegang Saham Pengendali.

Independensi Komite Audit

Setiap anggota Komite Audit telah memenuhi standar independensi yang ditetapkan dan melaksanakan tugas serta tanggung jawabnya secara profesional sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 55/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit. Tabel berikut menunjukkan tingkat independensi masing-masing anggota Komite Audit.

Aspek Independensi	Fauzi Ichsan	Sartono	Djisman Simandjuntak
Tidak memiliki hubungan keuangan dengan Dewan Komisaris dan Direksi	✓	✓	✓
Tidak memiliki hubungan kepengurusan pada AKR, anak perusahaan, maupun perusahaan afiliasi	✓	✓	✓
Tidak memiliki hubungan kepemilikan saham pada AKR	✓	✓	✓
Tidak memiliki hubungan keluarga dengan Dewan Komisaris, Direksi, dan/atau sesama anggota Komite Audit	✓	✓	✓
Tidak menjabat sebagai pengurus partai politik, pejabat dan pemerintah	✓	✓	✓

Tugas, Tanggung Jawab, dan Wewenang Komite Audit

Piagam Komite Audit memuat rincian mengenai tugas dan tanggung jawab yang diemban oleh Komite Audit, yakni sebagai berikut:

1. Melakukan penelaahan atas informasi keuangan yang akan dikeluarkan antara lain laporan keuangan, proyeksi, dan laporan lainnya terkait dengan informasi keuangan.
2. Melakukan penelaahan atas ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.
3. Memberikan pendapat independen kepada Dewan Komisaris tentang perbedaan pendapat antara manajemen dan akuntan.
4. Memberikan informasi kepada Dewan Komisaris mengenai penunjukan akuntan yang didasarkan kepada independensi, ruang lingkup penugasan dan imbalan jasa.
5. Melakukan penelaahan atas pemeriksaan yang dilaksanakan oleh auditor internal dan mengawasi tindak lanjutnya atas temuan auditor internal.
6. Melakukan penelaahan terhadap aktivitas pelaksanaan manajemen risiko yang dilaksanakan oleh manajemen.
7. Menelaah pengaduan yang berkaitan dengan proses akuntansi dan pelaporan keuangan.
8. Menelaah dan memberikan saran kepada Dewan Komisaris terkait dengan adanya potensi benturan kepentingan.
9. Menjaga kerahasiaan dokumen, data dan informasi.

10. Melakukan evaluasi atas pelaksanaan pemberian jasa audit atas informasi keuangan historis tahunan oleh AP dan KAP.

Komite Audit memiliki wewenang antara lain:
1. Mengakses data, dokumen, dan informasi lainnya tentang karyawan, dana, aset, dan sumber daya Perseroan yang diperlukan.
2. Berkomunikasi langsung dengan karyawan termasuk Direksi dan audit internal dan akuntan terkait dengan tugas dan tanggung jawabnya.
3. Bila diperlukan dapat melibatkan pihak independen di luar anggota Komite Audit yang diperlukan untuk membantu pelaksanaan tugasnya atas tanggungan Perseroan. Kewenangan ini atas izin Dewan Komisaris.
4. Melakukan kewenangan lain yang diberikan oleh Dewan Komisaris.

Fungsi Komite Audit

Komite Audit memiliki fungsi utama antara lain:
1. Melaporkan hasil evaluasi pengelolaan risiko kepada Dewan Komisaris untuk menanggulangi potensi terjadinya risiko yang dapat mengganggu berjalannya usaha.
2. Mengevaluasi kinerja Perseroan dan anak perusahaannya secara rutin (triwulan, semester, dan tahunan) mengenai pencapaian target usaha, kondisi pasar dan tren, prediksi kinerja di masa mendatang, juga melaporkan temuan serta memberi saran demi terjadinya peningkatan kinerja Komisaris.
3. Menyampaikan laporan yang telah dilakukan Direksi secara profesional dan independen.
4. Bersama Audit Internal, memberikan penilaian prosedur dokumentasi dan pelaksanaan pengelolaan yang disarankan oleh bagian operasional untuk meningkatkan kinerja transaksi keuangan dan sistem pelaporan.
5. Membahas pengembangan lingkungan usaha dengan mengidentifikasi potensi pengembangan kinerja Perseroan.
6. Memastikan laporan keuangan Perseroan sesuai dengan prinsip akuntansi yang ditetapkan.
7. Memastikan berjalannya sistem kontrol internal, proses pelaporan keuangan, dan pelaksanaan GCG yang baik di Perseroan.

Rapat Komite Audit

Piagam Komite Audit mengatur bahwa rapat dilaksanakan setidaknya 1 (satu) kali setiap 3 (tiga) bulan. Keputusan dalam rapat diambil berdasarkan musyawarah mufakat dan dituangkan dalam risalah rapat. Komite Audit dapat juga mengundang Direktur Utama dan Direktur Keuangan AKR, Kepala Internal Audit, dan Unit lainnya didalam Manajemen serta perwakilan auditor eksternal untuk menghadiri rapat.

Hingga akhir tahun 2025, Komite Audit telah mengadakan 10 (sepuluh) rapat dengan agenda dan rekapitulasi rapat sebagai berikut:

Tanggal	Pembahasan Rapat	Kehadiran Komite Audit			
		FIC	SP	STN	DS
26 Februari 2025	AC – Rapat Pembaruan Progres Audit KAP EY – PT AKR Corporindo Tbk	✓	✓	x	✓
05 Maret 2025	Kinerja Audit Internal – Q4 2024	✓	✓	x	✓
17 Maret 2025	AC Pre-Meeting untuk Laporan Keuangan Tahun Buku 2024	✓	✓	x	✓
23 April 2025	AC Pre-Meeting untuk Laporan Keuangan Q1 2025	✓	✓	x	✓
22 Mei 2025	Kinerja Audit Internal – Q1 2025	✓	x	✓	✓
24 Juli 2024	AC Pre-Meeting untuk Laporan Keuangan Q2 2025	✓	x	✓	✓
14 Agustus 2025	Kinerja Audit Internal – Q2 2025	✓	x	✓	✓
21 Oktober 2025	AC Pre-Meeting untuk Laporan Keuangan Q3 2025	✓	x	✓	✓
24 Oktober 2025	Kinerja Audit Internal – Q3 2025	✓	x	✓	✓
8 Desember 2025	AC – Rapat Perencanaan KAP EY untuk Audit Tahun Buku PT AKR Corporindo Tbk per 31 December 2025	✓	x	✓	✓
Jumlah Rapat		10	4	6	10
Jumlah Kehadiran		10	4	6	10
Persentase Kehadiran		100%	100%	100%	100%

Keterangan
FIC : Fauzi Ichsan
SP : Sahat Pardede (telah memenuhi batasan masa jabatan pada 22 Mei 2025)
STN : Sartono (efektif menjabat sejak Mei 2025 dan berakhir pada Desember 2025)
DS : Djisman Simandjuntak

Pelaksanaan Tugas Komite Audit Tahun 2025

Sepanjang tahun pelaporan hingga 31 Desember 2025, Komite Audit telah menjalankan peran dan tanggung jawabnya secara optimal dalam mendukung fungsi pengawasan Dewan Komisaris sesuai dengan Piagam Komite Audit yang telah disahkan. Pelaksanaan tugas tersebut tercermin dari pencapaian berbagai target dan sasaran sebagai berikut:

1. Pengawasan atas proses pelaporan keuangan. Komite Audit telah melakukan penelaahan atas laporan keuangan triwulanan, semesteran, dan tahunan perusahaan sebelum dipublikasikan untuk memastikan laporan keuangan disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.
2. Pengawasan atas kepatuhan terhadap regulasi dan kebijakan Perseroan. Komite Audit memastikan bahwa AKR mematuhi semua peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, termasuk regulasi dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bursa Efek Indonesia (BEI) termasuk kebijakan internal yang berlaku di Perseroan.
3. Pengawasan terhadap proses audit oleh Auditor Independen (Kantor Akuntan Publik – KAP). Komite Audit telah melakukan *oversight* atas proses audit yang dilakukan KAP dalam audit atas laporan keuangan tahunan, termasuk lingkup dan metodologi audit yang digunakan untuk menjaga kualitas audit serta membahas temuan audit untuk memastikan laporan keuangan disusun secara wajar. Selain itu, Komite Audit melakukan evaluasi atas KAP yang melakukan audit atas Laporan Keuangan tahun buku sebelumnya serta memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai penunjukan Akuntan Publik dan/atau KAP pengganti, dalam hal Akuntan Publik dan/atau KAP yang telah diputuskan oleh RUPS.
4. Penelaahan atas manajemen risiko dan efektivitas pengendalian internal. Komite Audit melakukan pemantauan dan evaluasi risiko yang dihadapi perusahaan serta efektivitas strategi mitigasi risiko yang diterapkan serta evaluasi terhadap efektivitas pengendalian internal.
5. AKR menyediakan sarana bagi pengaduan (*whistleblower*). Sarana pengaduan ini mencakup Perusahaan, Entitas Anak dan afiliasi. Komite Audit menelaah pengaduan pihak ketiga dan tindak lanjut yang dilaksanakan terutama oleh Internal Audit mengenai dugaan pelanggaran kode etik dalam kegiatan operasional Perusahaan.
6. Evaluasi terhadap kinerja Audit Internal. Komite Audit telah menelaah dan menyetujui rencana kerja Audit Internal, menelaah hasil audit, serta memberikan masukan terkait peningkatan efektivitas fungsi Audit Internal dalam mendukung tata kelola perusahaan yang baik.

Komite Audit melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dengan mengadakan pertemuan secara berkala bersama auditor independen, Audit Internal, dan Manajemen Perseroan. Agenda pertemuan mencakup pembahasan proses bisnis, tata kelola, manajemen risiko, pengendalian internal, pelaporan keuangan dan evaluasi independensi auditor independen, serta pemberian pendapat objektif apabila terjadi perbedaan pandangan antara manajemen dan auditor independen terkait pelaksanaan jasa audit.

Rekomendasi Komite Audit

Sebagai bagian dari fungsi pengawasan, Komite Audit juga memberikan masukan dan rekomendasi kepada Dewan Komisaris atas area-area yang menjadi lingkup pengawasannya. Hingga akhir tahun 2025, rekomendasi yang disampaikan antara lain sebagai berikut:

No	Nomor Surat	Tanggal	Perihal
1.	001–L-AUKOM-2025	22 April 2025	Perihal usulan penunjukan KAP yang akan melakukan audit Laporan Keuangan Perusahaan Tahun Buku 2025
2.	002–L-AUKOM-2025	24 Juni 2025	Laporan hasil evaluasi Komite Audit PT AKR Corporindo Tbk atas pelaksanaan audit atas Laporan Keuangan Konsolidasian Perusahaan untuk Tahun Buku 2024

Selain hal tersebut diatas, selama tahun 2025 Komite Audit juga turut aktif menghadiri dan berdiskusi dengan manajemen dalam forum Rapat Gabungan Dewan Komisaris dan Direksi perihal kinerja keuangan AKR triwulanan, semesteran dan tahunan serta memberikan masukan/rekomendasi terkait aspek kinerja operasional, manajemen risiko dan tata kelola.

Pengembangan Kompetensi Komite Audit

Sebagai bagian dari upaya penguatan kapasitas dan kompetensi, AKR secara konsisten mendorong partisipasi Komite Audit dalam program pelatihan dan pengembangan, baik yang bersifat formal maupun informal. Hingga akhir tahun 2025, Komite Audit telah mengikuti program-program pengembangan kompetensi berikut:

No	Nama & Jabatan	Judul Pelatihan	Tanggal Pelatihan	Tempat Pelatihan	Penyelenggara
1	Fauzi Ichsan **Ketua Komite Audit**	*Workshop* Manajemen Risiko Perbankan Kualifikasi 4	26 - 27 November 2025	Jakarta	LPPI
		Sertifikasi Manajemen Risiko Perbankan Kualifikasi 4	Desember 2025	Jakarta	LPPI
2	Sartono **Anggota Komite Audit**	Konferensi Auditor Internal (SNIA) 2025	2 - 3 Juli 2025	Yogyakarta	YPIA
		Indonesia National Conference IIA 2025	27 - 28 Agustus 2025	Medan	IAI
		Wokshop Standar Akuntansi S1 dan S2 – Standar Pengungkapan berkelanjutan	11 Agustus 2025	Jakarta	IAI dan IKAI

No	Nama & Jabatan	Judul Pelatihan	Tanggal Pelatihan	Tempat Pelatihan	Penyelenggara
		Workshop Manajemen Risiko Perbankan Kualifikasi 4	26 - 27 November 2025	Jakarta	LPPI
		Sertifikasi Manajemen Risiko Perbankan Kualifikasi 4	Desember 2025	Jakarta	LPPI
3	Djisman Simandjuntak **Anggota Komite Audit**	Konferensi Business Economics 2025 "Revolutionizing FDI Policy towards an Equitable Growth in Indonesia"	10 April 2025	Jakarta	Universitas Prasetiya Mulya
		International Doctoral Colloquium and Conference "Application of AI in Management and Entrepreneurship Research to Foster Sustainable Economic Development"	26 April 2025	Jakarta	Universitas Prasetiya Mulya
		Hadi Soesastro Lecture in Hadi Soesastro Policy Forum	13 Agustus 2025	Jakarta	CSIS
		Strategic Forum Perluasan Pasar Ekspor ke Kanada dan Uni Eropa: Potensi, Peluang dan Tantangan Indonesia	29 September 2025	Jakarta	Kementerian Perdagangan Republik Indonesia

Komite Nominasi dan Remunerasi

Komite Nominasi dan Remunerasi bertanggung jawab menyusun, mengevaluasi dan memberikan rekomendasi tentang kebijakan nominasi dan remunerasi kepada dewan komisaris untuk dapat digunakan untuk mengambil keputusan. Lingkup penugasan Komite Nominasi dan Remunerasi meliputi proses seleksi kandidat, evaluasi kinerja, serta penetapan remunerasi yang dilaksanakan secara objektif, transparan, dan selaras dengan prinsip GCG.

Pembentukan Komite Nominasi dan Remunerasi AKR mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 34/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi bagi Emiten atau Perusahaan Publik.

Piagam Komite Nominasi dan Remunerasi

Komite Nominasi dan Remunerasi berpedoman pada Piagam yang mengatur tugas, tanggung jawab, kewenangan, serta tata kerja Komite dalam mendukung pelaksanaan fungsi pengawasan Dewan Komisaris. Piagam Komite disahkan oleh Dewan Komisaris pada 31 Maret 2015 dan menjadi rujukan utama dalam pelaksanaan tugas Komite.
Sejalan dengan perkembangan regulasi, Piagam Komite Nominasi dan Remunerasi ditelaah dan disempurnakan secara berkala dengan persetujuan Dewan Komisaris. Ketentuan dalam Piagam tersebut mencakup berbagai aspek terkait tugas dan kewajiban Komite Nominasi dan Remunerasi, antara lain:
1. Pendahuluan
2. Struktur Organisasi
3. Persyaratan Anggota Komite
4. Tanggung Jawab
5. Tugas Komite Nominasi dan Remunerasi
6. Wewenang, Hak dan Kewajiban
7. Rapat Komite Nominasi dan Remunerasi
8. Masa Tugas Komite Nominasi dan Remunerasi
9. Penutup

Kriteria Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi

Komite Nominasi dan Remunerasi berperan dalam memastikan proses pencalonan anggota Dewan Komisaris dan Direksi berjalan sesuai dengan prinsip GCG, melalui penetapan kriteria dan pelaksanaan uji kepatutan dan kelayakan (*fit and proper test*). Hasil proses tersebut disampaikan kepada Dewan Komisaris.
Selain itu, Komite Nominasi dan Remunerasi melakukan evaluasi atas kinerja Dewan Komisaris dan Direksi sebagai dasar penetapan remunerasi, yang diajukan kepada Dewan Komisaris dan memperoleh persetujuan RUPS. Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
1. Memahami dengan baik visi, misi dan budaya kerja PT AKR Corporindo Tbk.
2. Memiliki integritas yang tinggi, kemampuan, pengetahuan dan pengalaman kerja yang memadai.
3. Tidak memiliki kepentingan pribadi yang dapat menimbulkan dampak negatif dan benturan kepentingan terhadap perusahaan.
4. Mempunyai waktu yang cukup untuk menyelesaikan tugasnya.
5. Mampu berkomunikasi dan bekerja sama dengan baik dan efektif.

6. Khusus untuk ketua komite yang juga sebagai Komisaris Independen, berlaku ketentuan umum bahwa yang bersangkutan tidak mempunyai hubungan dengan perusahaan; anggota Direksi; anggota Dewan komisaris atau pemegang saham utama serta tidak mempunyai saham di Perseroan.

Struktur Keanggotaan dan Masa Jabatan

Berdasarkan Piagam, Komite Nominasi dan Remunerasi dibentuk oleh Dewan Komisaris setidaknya terdiri atas 3 (tiga) orang yaitu Komisaris Independen yang bertindak sebagai ketua, Komisaris, dan pejabat setingkat manager. Ketua Komite hanya diperkenankan merangkap jabatan sebagai ketua komite pada 1 (satu) komite lainnya serta anggota Komite dilarang berasal dari anggota Direksi Perseroan.
Adapun ketentuan masa jabatan Komite Nominasi dan Remunerasi, meliputi:
1. Masa jabatan anggota Komite yang juga merupakan anggota Dewan Komisaris, tidak lebih lama dari masa jabatan Dewan Komisaris seperti yang diatur dalam anggaran dasar.
2. Anggota Komite yang merupakan anggota Dewan Komisaris berhenti dengan sendirinya aptabila masa jabatannya sebagai anggota Dewan Komisaris berakhir.
3. Anggota Komite yang juga merupakan anggota Dewan Komisaris berhenti sebelum masa tugasnya selesai maka anggota komisaris lainnya dapat diangkat sebagai penggantinya.
4. Apabila anggota Dewan Komisaris yang menjabat sebagai Ketua Komite Nominasi dan Remunerasi berhenti dari jabatannya sebagai anggota Dewan Komisaris, maka Ketua Komite Nominasi dan Remunerasi wajib diganti oleh anggota Dewan Komisaris lainnya yang juga menjabat Komisaris Independen dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari. Ketua Komite harus dijabat oleh Komisaris Independen.
5. Anggota Komite Nomisasi dan Remunerasi diangkat untuk masa jabatan tertentu dan dapat diangkat kembali.

Komposisi Komite Nominasi dan Remunerasi

Hingga 31 Desember 2025, AKR telah mengangkat kembali anggota Komite Nominasi dan Remunerasi periode 2025–2030 dengan detail komposisi sebagai berikut:

Nama	Jabatan	Dasar Penetapan	Masa Jabatan
Fauzi Ichsan	**Ketua** (yang merupakan Komisaris Independen)	Surat Keputusan Dewan Komisaris PT AKR Corporindo Tbk Tentang Perubahan Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik No. 049/L.AKR.CS/2025 Tanggal 23 Mei 2025.	2025–2030
Soegiarto Adikoesoemo	**Anggota** (yang merupakan Presiden Komisaris)	Surat Keputusan Dewan Komisaris PT AKR Corporindo Tbk Tentang Perubahan Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik No. 049/L.AKR.CS/2025 Tanggal 23 Mei 2025.	2025–2030
Felix Abednego	**Anggota** (yang merupakan Pihak yang menduduki jabatan manajerial di bawah Direksi yang membidangi sumber daya manusia)	Surat Keputusan Dewan Komisaris PT AKR Corporindo Tbk Tentang Perubahan Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik No. 049/L.AKR.CS/2025 Tanggal 23 Mei 2025.	2025–2030

Profil Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi

Fauzi Ichsan

Ketua Komite Nominasi dan Remunerasi

Dasar Hukum Pengangkatan
Surat Keputusan Dewan Komisaris PT AKR Corporindo Tbk Tentang Perubahan Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik No. 049/L.AKR.CS/2025 Tanggal 23 Mei 2025.

Periode Masa Jabatan
Periode ke-2, Tahun 2025–2030

Keterangan
Profil lengkap dapat dilihat pada bab Profil Perusahaan dalam buku Laporan Tahunan ini.

Soegiarto Adikoesoemo

Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi

Dasar Hukum Pengangkatan
Surat Keputusan Dewan Komisaris PT AKR Corporindo Tbk Tentang Perubahan Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik No. 049/L.AKR.CS/2025 Tanggal 23 Mei 2025.

Periode Masa Jabatan
Periode ke-2, Tahun 2025–2030

Keterangan
Profil lengkap dapat dilihat pada bab Profil Perusahaan dalam buku Laporan Tahunan ini.

Felix Abednego

Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi

Dasar Hukum Pengangkatan
Surat Keputusan Dewan Komisaris PT AKR Corporindo Tbk Tentang Perubahan Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik No. 049/L.AKR.CS/2025 Tanggal 23 Mei 2025.

Periode Masa Jabatan
Periode ke-2, Tahun 2025–2030

Keterangan
Profil lengkap dapat dilihat pada bab Profil Perusahaan dalam buku Laporan Tahunan ini.

Independensi Komite Nominasi dan Remunerasi

Dalam menjalankan fungsinya, Komite Nominasi dan Remunerasi menjunjung tinggi prinsip independensi, objektivitas, dan transparansi guna memastikan pengambilan keputusan yang adil. Pelaksanaan tugas Komite dilakukan secara profesional tanpa campur tangan pihak lain dengan kepemimpinan Ketua Komite yang berasal dari Komisaris Independen. Dalam pernyataan independensi, Ketua Komite yang juga sebagai komisaris independen, tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan Perseroan; anggota Direksi; anggota Dewan Komisaris atau pemegang saham utama serta tidak mempunyai saham di Perseroan.

Tugas dan Tanggung Jawab Komite Nominasi dan Remunerasi

Piagam Komite Nominasi dan Remunerasi memuat rincian mengenai tugas dan tanggung jawab Komite Nominasi dan Remunerasi, dengan uraian sebagai berikut:

Terkait dengan Nominasi

1. Mengkaji dan mengevaluasi setiap kinerja anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris yang berkaitan dengan budaya kerja yang diterapkan di perusahaan; pelaksanaan *good corporate governance*; pelaksanaan operasional perusahaan secara menyeluruh; yang berkaitan dengan pencapaian aktual perusahaan; keselarasan kerja antara visi dan misi perusahaan; kesesuaian dengan strategi dan inovasi yang dilaksanakan serta pencapaian dalam meningkatkan nilai bagi pemegang saham.
2. Berdasarkan hal tersebut di atas, dilaksanakan pembahasan untuk menetapkan usulan anggota Direksi dan atau anggota Dewan Komisaris baru kepada Dewan Komisaris yang selanjutnya digunakan sebagai materi bahasan dalam RUPS.
3. Melaksanakan tugas-tugas lainnya yang berhubungan dengan nominasi, yang diberikan oleh Dewan Komisaris.

Terkait dengan Remunerasi

1. Mengkaji dan mengevaluasi pelaksanaan setiap kinerja anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris yang berkaitan dengan pelaksanaan *good corporate governance*; pelaksanaan operasional Perseroan secara menyeluruh, berkaitan dengan pencapaian aktual Perseroan; keselarasan kerja antara visi dan misi Perseroan; kesesuaian antara strategi dan inovasi serta pencapaian dalam meningkatkan nilai bagi pemegang saham.
2. Berdasarkan hal di atas, kemudian melaksanakan pembahasan untuk menetapkan besaran remunerasi bagi anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris kepada Dewan Komisaris yang selanjutnya digunakan sebagai materi bahasan dalam RUPS.
3. Melaksanakan tugas-tugas lainnya yang berhubungan dengan remunerasi yang diberikan oleh Dewan Komisaris.

Wewenang, Hak, dan Kewajiban

Komite Nominasi dan Remunerasi memiliki hak dan kewajiban sebagai berikut:

1. Komite Nominasi dan Remunerasi dapat mengakses catatan ataupun informasi tentang karyawan, dana, aset dan sumber daya lainnya milik perusahaan yang berkaitan dengan pelaksanaan tugasnya.
2. Dalam pelaksanaan tugasnya Komite Nominasi dan Remunerasi dapat bekerja sama dengan bagian personalia, keuangan dan bagian yang terkait dengan bidang tugasnya.
3. Komite Nominasi dan Remunerasi dapat bekerja sama dengan pihak ketiga atas persetujuan dari Dewan Komisaris.
4. Setiap anggota Komite Nominasi dan Remunerasi wajib menjalankan tugas dengan baik dan menjaga kerahasiaan seluruh dokumen, data dan informasi perusahaan. Setiap dokumen, data maupun informasi tersebut hanya digunakan untuk kepentingan pelaksanaan tugas Komite.
5. Komite Nominasi dan Remunerasi dalam menjalankan tugasnya wajib memperhatikan hal-hal seperti kinerja keuangan perusahaan; prestasi kerja individual; kewajaran; dan pertimbangan sasaran dan strategi jangka panjang perusahaan dan pertimbanganpertimbangan lainnya.
6. Komite nominasi dan remunerasi membuat rencana kerja yang disampaikan kepada Dewan Komisaris.
7. Komite nominasi dan remunerasi wajib membuat laporan pelaksanaan tugasnya kepada Dewan Komisaris

Rapat Komite Nominasi dan Remunerasi

Piagam Komite Nominasi dan Remunerasi mengatur bahwa rapat harus dilaksanakan setidaknya 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan. Rapat dipimpin oleh Ketua Komite dan dihadiri sekurangnya 51% jumlah anggota komite termasuk Komite Independen. Hasil rapat dituangkan dalam risalah rapat dengan pengambilan keputusan berdasarkan musyawarah mufakat.

Hingga akhir tahun 2025, Komite Nominasi dan Remunerasi telah menyelenggarakan rapat sebanyak 3 (tiga) kali, dengan agenda dan rekapitulasi rapat sebagai berikut:

Tanggal	Pembahasan Rapat	Kehadiran Komite Nominasi dan Remunerasi		
		FIC	SA	FA
10 Februari 2025	• Pembahasan evaluasi kinerja anggota Direksi dan Dewan Komisaris • Pembahasan struktur remunerasi dan besaran remunerasi anggota Dewan Komisaris dan Direksi tahun 2025	✓	✓	✓
14 Maret 2025	Rekomendasi pengangkatan Dewan Komisaris dan Direksi periode 2026–2030	✓	✓	✓
24 Juli 2025	Pembahasan evaluasi kinerja anggota Direksi Semester 1 – 2025 dan pelaksanaan talent management Perseroan	✓	✓	✓
Jumlah Rapat		3	3	3
Jumlah Kehadiran		3	3	3
Persentase Kehadiran		100%	100%	100%

Keterangan
FIC : Fauzi Ichsan
GIK : Soegiarto Adikoesoemo
FA : Felix Abednego

Pelaksanaan Tugas Komite Nominasi dan Remunerasi Tahun 2025

Dalam rangka mendukung fungsi pengawasan Dewan Komisaris, Komite Nominasi dan Remunerasi menjalankan peran dan tanggung jawabnya sesuai dengan Piagam Komite. Ruang lingkup tugas Komite mencakup evaluasi atas kinerja Direksi dan kinerja Perseroan, pengawasan atas hubungan antara Dewan Komisaris dan Direksi, serta penilaian terhadap struktur dan kebijakan remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris.

Sepanjang tahun 2025, pencapaian pelaksanaan tugas oleh Komite Nominasi dan Remunerasi adalah sebagai berikut:

1. **Pelaksanaan evaluasi kinerja Dewan Komisaris dan Direksi**
   Komite melakukan penelaahan atas kinerja anggota Dewan Komisaris dan Direksi secara menyeluruh dengan mempertimbangkan pencapaian kinerja, kontribusi strategis, serta keselarasan dengan arah pengembangan Perseroan. Hasil evaluasi tersebut menjadi dasar dalam memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris terkait peningkatan efektivitas peran dan fungsi organ Perseroan.
2. **Penelaahan struktur dan kebijakan remunerasi**
   Komite menelaah struktur remunerasi serta besaran remunerasi bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi tahun 2025 guna memastikan bahwa kebijakan remunerasi yang diterapkan tetap kompetitif, sejalan dengan kinerja Perseroan, serta memperhatikan prinsip kewajaran dan kehati-hatian.
3. **Pemberian rekomendasi terkait komposisi Dewan Komisaris dan Direksi periode berikutnya**
   Komite telah memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai komposisi Dewan Komisaris dan Direksi untuk periode 2026–2030 dengan mempertimbangkan kesinambungan kepemimpinan, kebutuhan kompetensi, serta dinamika industri dan strategi jangka panjang Perseroan.
4. **Rekomendasi pengembangan talenta**
   Pemberian rekomendasi untuk proses pengembangan talenta terutama untuk mengisi posisi-posisi strategis di Perseroan.

Peran Komite dalam Program Pengembangan Talenta

Untuk memastikan keberlanjutan kepemimpinan, Perseroan telah menetapkan kebijakan suksesi Direksi yang mendukung strategi jangka panjang dan penguatan organisasi. Kebijakan suksesi mencakup mekanisme identifikasi dan pengembangan calon pemimpin yang memiliki kapabilitas dan nilai kepemimpinan sesuai dengan arah strategis Perseroan.

Komite Nominasi dan Remunerasi bertanggung jawab dalam melakukan penilaian dan memberikan rekomendasi terkait perencanaan suksesi Direksi dan/atau Dewan Komisaris. Seluruh proses nominasi dilaksanakan secara objektif dan transparan dengan mengacu pada kebutuhan Perseroan serta peraturan yang berlaku.

Program suksesi Direksi yang dimiliki Perseroan sebagai berikut:

1. Program pendidikan dan pelatihan, baik yang dilakukan di internal Perseroan atau yang diselenggarakan oleh pihak eksternal.
2. Pendelegasian wewenang.
3. Pelaksanaan *fit and proper test* terhadap kandidat baru yang akan menggantikan salah satu anggota Direksi.
4. Pengesahan keputusan pengangkatan anggota Direksi baru oleh Pemegang Saham.

Pengembangan Kompetensi Komite Nominasi dan Remunerasi

Perseroan memandang pengembangan kompetensi anggota Komite Nominasi dan Remunerasi sebagai bagian penting dalam mendukung efektivitas pelaksanaan fungsi komite. Oleh karena itu, Perseroan memfasilitasi partisipasi anggota Komite dalam program pelatihan formal dan informal.

Hingga 31 Desember 2025, berbagai program pengembangan kompetensi telah diikuti oleh Komite Nominasi dan Remunerasi, antara lain:

No	Nama	Judul Pelatihan	Tanggal Pelatihan	Penyelenggara
1	Fauzi Ichsan	*Workshop* Manajemen Risiko Perbankan Kualifikasi 4	26 - 27 November 2025	Jakarta
		Sertifikasi Manajemen Risiko Perbankan Kualifikasi 4	Desember 2025	Jakarta

Komite Lain Penunjang **Dewan Komisaris**

Hingga 31 Desember 2025, Perseroan tidak memiliki komite tambahan di bawah Dewan Komisaris selain Komite Audit dan Komite Nominasi dan Remunerasi. Oleh karena itu, tidak tersedia informasi terkait komite lainnya, seperti identitas anggota, independensi, tugas dan tanggung jawab, pelaksanaan kegiatan, serta frekuensi pertemuan.



Komite Penunjang **Direksi**

Komite ESG

Sebagai wujud komitmen terhadap prinsip pembangunan berkelanjutan, Perseroan membentuk Komite ESG yang berperan dalam mengawal implementasi strategi keberlanjutan pada kegiatan usaha. Keberadaan Komite ESG mencerminkan komitmen Perseroan dalam mendukung pembangunan berkelanjutan dengan memperhatikan aspek Lingkungan, Sosial, dan Tata Kelola. Dalam pelaksanaannya, Komite ESG bertanggung jawab merumuskan kebijakan keberlanjutan, memantau kepatuhan terhadap standar ESG, serta menilai efektivitas dan kinerja berbagai inisiatif keberlanjutan Perseroan.

Piagam Komite ESG

Perseroan memiliki Piagam pembentukan Komite ESG yang telah ditandatangani oleh seluruh anggota Komite pada tanggal 20 Januari 2023 sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya. Penyusunan piagam tersebut mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 51/POJK.03/2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan Bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten dan Perusahaan Publik; Global Reporting Initiative 2021 Pengungkapan Umum: Pengungkapan 3-3 Topik Material Manajemen; POJK 21/2015; dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No.32/SEOJK.04/2015 tentang Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka (SEOJK 32/2015).

Piagam pembentukan Komite ESG Perseroan berisi tentang Pendahuluan; Referensi; Maksud dan Tujuan; Tanggung Jawab; Wewenang; Struktur Keanggotaan; Prosedur Rapat; Pelaporan; Pengembangan Kompetensi Berkelanjutan; dan Pengkajian Piagam.

Kedudukan Komite ESG

Komite ESG dibentuk oleh Direksi Perseroan untuk membantu Dewan Komisaris dan Direksi dalam perumusan strategi, target, kebijakan, serta pengawasan implementasi keberlanjutan AKR. Selain itu, Komite ESG akan bekerja sama dengan ESG *Task Force* (Gugus Tugas ESG) dalam melakukan penelaahan dampak dan risiko dari penerapan strategi berdasarkan standar yang diberlakukan paada perundangan, peraturan, dan kebijakan yang berlaku.



Komposisi Komite ESG

Untuk memastikan implementasi keberlanjutan yang terkoordinasi dan efektif, Ketua Komite ESG menyampaikan laporan secara langsung kepada Direktur Utama dan berada di bawah pengawasan Komisaris Independen. Perseroan memberikan mandat kepada Komite ESG untuk mengoordinasikan inisiatif keberlanjutan di seluruh unit bisnis, disertai dengan pengawasan berkelanjutan guna memastikan pelaksanaannya berjalan sesuai dengan rencana dan prinsip yang ditetapkan.

Komite ESG memimpin ESG Task Force yang terdiri dari karyawan senior dari berbagai fungsi. ESG Task Force berperan mendukung implementasi kebijakan dan inisiatif keberlanjutan pada tingkat operasional. Informasi mengenai komposisi dan profil anggota Komite ESG disajikan dalam Bab Profil Perusahaan pada Laporan Tahunan ini. Komposisi keanggotaan Komite ESG antara lain:

Nama	Jabatan
Fauzi Ichsan	Komisaris Independen
Haryanto Adikoesoemo	Ketua Komite ESG dan Presiden Direktur
Anggota	
Jimmy Tandyo	CEO AKR Business Unit
Mery Sofi	Deputi CEO AKR Business Unit
Bambang Soetiono Soedijanto	CEO Segmen Kawasan Industri
Suresh Vembu	Group Director & Corporate Secretary
Felix Abednego	Head of Human Resource Division

Tugas dan Tanggung Jawab

Komite ESG berfungsi sebagai organ pendukung bagi Direksi dan Dewan Komisaris dalam mengawasi dan mengevaluasi berbagai aspek ESG, seperti dampak perubahan iklim, pengelolaan energi, pelestarian sumber daya alam, lingkungan, rantai pasokan, hak asasi manusia, serta keragaman dan inklusi. Komite ESG juga berperan memberikan panduan serta memastikan penyusunan strategi ESG Perseroan berjalan selaras dengan tujuan jangka panjang.

Untuk mendukung fungsi pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan keberlanjutan, Komite ESG berkolaborasi dengan ESG *Task Force* dalam menetapkan arah strategi keberlanjutan, menyusun target, serta melakukan kajian atas dampak dan risiko dari implementasi strategi tersebut. Penerapan keberlanjutan AKR mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang berlaku.

Pengembangan strategi keberlanjutan dilakukan melalui mekanisme komunikasi 2 (dua) arah antara Komite ESG dan ESG *Task Force*. Komite ESG menyampaikan arahan dan rekomendasi strategis, sementara ESG *Task Force* melaporkan kondisi aktual dan pelaksanaan di tingkat operasional. Adapun tugas dan tanggung jawab Komite ESG meliputi:

1. Mengkaji proses bisnis dan mengidentifikasi serta mengelola dampak operasi AKR terhadap lingkungan, sosial, dan tata kelola.
2. Mengamati dan mencermati peraturan dan perkembangan standar keberlanjutan Indonesia dan internasional, serta menentukan material yang relevan bagi AKR dan memberikan rekomendasi kepada level tertinggi gugus tugas ESG untuk merumuskan strategi, kebijakan, target dan pedoman keberlanjutan yang sesuai bagi AKR.
3. Mengkaji strategi, kebijakan, target dan pedoman keberlanjutan AKR secara berkala.
4. Mengkaji kinerja keberlanjutan AKR pada seluruh aspek Komitmen Keberlanjutan AKR secara berkala.
5. Mengkaji efektivitas komunikasi dalam mensosialisasikan kebijakan keberlanjutan AKR kepada pihak internal dan eksternal AKR.
6. Turut berpartisipasi dalam pengembangan kebijakan publik terkait dampak perubahan iklim dan lingkungan.

Pelaksanaan Tugas Komite ESG

Sebagai wujud komitmen terhadap masa depan yang berkelanjutan, Komite ESG bersama ESG *Task Force* mengembangkan kerangka AKR *Sustainability House: Progressing with Purpose* yang terdiri atas 4 (empat) pilar utama. Pilar-pilar tersebut berperan sebagai landasan dan arah dalam mengintegrasikan prinsip keberlanjutan ke dalam strategi dan aktivitas operasional Perseroan di seluruh unit bisnis, yaitu:

1. *Our Business Portfolio*: Membangun portofolio bisnis yang kuat, tangguh, dan solid untuk mendukung kebutuhan yang terus berkembang dari pelanggan dan pemangku kepentingan.
2. *Our People*: Memelihara, mengembangkan, dan melindungi sumber daya manusia sebagai aset yang paling berharga.
3. *Our Communities*: Memberikan kembali kepada komunitas di mana pun beroperasi.
4. *Our Conduct*: Beroperasi secara bertanggung jawab dan menjunjung tinggi perilaku etis dan kepatuhan hukum dalam segala hal yang dilakukan.

Sepanjang tahun 2025, Komite ESG menjalankan fungsi pengawasan dan pemberian arahan terhadap implementasi keberlanjutan Perseroan dengan dukungan Sekretaris Perusahaan selaku sekretariat Komite ESG. Koordinasi dilakukan secara berkala melalui penyampaian pembaruan dan materi kepada Ketua dan anggota Komite sesuai kebutuhan. Fokus pelaksanaan tugas Komite ESG selama tahun 2025 meliputi:

1. **Pengawasan implementasi inisiatif ESG Perseroan:** Pemantauan penyusunan Laporan Keberlanjutan, penguatan kualitas pengungkapan, serta keselarasan dengan arah strategis Perseroan.
2. **Pemberian arahan terhadap penguatan tata kelola keberlanjutan:** Kesiapan terhadap perkembangan regulasi dan standar pelaporan keberlanjutan yang relevan.
3. **Penelaahan perkembangan pelaporan dan *disclosure* ESG:** Memastikan transparansi dan konsistensi informasi kepada pemangku kepentingan.
4. **Pemantauan penilaian dan pengakuan ESG eksternal:** Perkembangan peringkat ESG dan pengakuan atas kualitas laporan Perseroan.

Sepanjang tahun pelaporan, Komite ESG tidak menyelenggarakan rapat formal, namun tetap melaksanakan fungsi pengawasan melalui mekanisme pembaruan berkala yang disampaikan oleh Sekretaris Perusahaan melalui komunikasi tertulis. Materi pembaruan yang disampaikan kepada Komite ESG antara lain meliputi:

1. **Perkembangan implementasi ESG Perseroan**
   - Koordinasi penyusunan Laporan Keberlanjutan dan penguatan kualitas pengungkapan ESG
   - Pengembangan narasi keberlanjutan yang selaras dengan strategi Perseroan
   - Pemantauan alignment praktik ESG dengan AKR Horizon 2030
2. **Kesiapan terhadap perkembangan regulasi dan standar pelaporan keberlanjutan**
   - Pembaruan terkait perkembangan regulasi ESG dan standar pelaporan yang relevan
   - Penyampaian hasil partisipasi Perseroan dalam forum dan seminar ESG eksternal
   - Sosialisasi awal implementasi standar pelaporan keberlanjutan (termasuk PSPK/IFRS Sustainability)
3. **Koordinasi internal ESG lintas fungsi**
   - Pembentukan dan koordinasi ESG *Task Force* lintas unit
   - Pelaksanaan awareness session dan diskusi internal terkait ESG
   - Pembahasan awal risiko keberlanjutan dan pengumpulan data ESG
4. **Pemantauan pengakuan dan penilaian ESG eksternal**
   - Pemantauan posisi Perseroan dalam indeks dan penilaian ESG
   - Penyampaian hasil evaluasi eksternal atas kualitas Laporan Tahunan dan Laporan Keberlanjutan
   - Penguatan kredibilitas pengungkapan keberlanjutan Perseroan

Melalui mekanisme tersebut, Komite ESG tetap memperoleh pembaruan yang memadai untuk menjalankan fungsi pengawasan dan pemberian arahan terhadap implementasi keberlanjutan Perseroan secara berkelanjutan.

Sekretaris Perusahaan

Dalam menjalankan tugasnya, Sekretaris Perusahaan bertugas memastikan terpeliharanya reputasi serta hubungan komunikasi yang efektif dengan para pemangku kepentingan. Peran ini dijalankan dengan mendukung Direksi dalam menjalin hubungan yang konstruktif antara AKR sebagai Emiten dengan pemegang saham, regulator, lembaga pasar modal, investor, masyarakat luas, dan pemangku kepentingan secara umum. Selain itu, Sekretaris Perusahaan memastikan pemenuhan penerapan prinsip GCG.

Sekretaris Perusahaan juga bertanggung jawab untuk memastikan pemenuhan kewajiban keterbukaan informasi, termasuk penyampaian laporan dan informasi material kepada regulator dan publik secara akurat dan transparan. Dalam menjalankan tugas terksebut, Sekretaris Perusahaan mengoordinasikan komunikasi internal dan eksternal Perseroan, mendukung penyelenggaraan RUPS, serta memastikan seluruh aktivitas Perseroan sebagai Emiten berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penunjukan Sekretaris Perusahaan AKR dilakukan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 35/POJK.04/2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik.

Mekanisme Pengangkatan Sekretaris Perusahaan

Direksi mengangkat dan memberhentikan Sekretaris Perusahaan atas persetujuan Dewan Komisaris yang proses pengangkatannya dilaporkan kepada OJK. Adapun mekanisme pengangkatan Sekretaris Perusahaan di AKR, meliputi:

1. Identifikasi kebutuhan Sekretaris Perusahaan yang baru dari Perseroan.
2. Evaluasi kandidat dari karyawan Perseroan.
3. Seleksi kandidat melalui mekanisme *fit and proper test* dengan melibatkan Direksi AKR.
4. Hasil *fit and proper test* diproses oleh tim terkait untuk memulai rencana penerbitan mutasi jabatan.
5. Pengukuhan Sekretaris Perusahaan disertai dengan penyerahan Surat Keputusan Direksi.
6. Menyampaikan laporan mengenai pengangkatan/pemberhentian Sekretaris Perusahaan kepada OJK.

Profil Sekretaris Perusahaan

Bapak Suresh Vembu menjabat sebagai Sekretaris Perusahaan berdasarkan Surat Keputusan Direksi Nomor 1/L-HR/11/2019 tanggal 1 November 2019. Beliau berdomisili di Jakarta, Indonesia dan masih menjabat sebagai Sekretaris Perusahaan di AKR hingga saat ini. Profil lengkap Bapak Suresh Vembu dapat ditemukan pada bagian Profil Perusahaan dalam Laporan Tahunan ini.

Tugas dan Tanggung Jawab Sekretaris Perusahaan

Sekretaris Perusahaan memegang peran penting dalam penerapan GCG. Fungsi utama yang dijalankan oleh Sekretaris Perusahaan antara lain:

1. Mengikuti perkembangan Pasar Modal khususnya peraturan perundang undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal.
2. Memberikan masukan kepada Direksi dan Dewan Komisaris untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.
3. Membantu Direksi dan Dewan Komisaris dalam pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan yang meliputi:
   a. Keterbukaan informasi kepada masyarakat, termasuk ketersediaan informasi pada *Website* Perseroan;
   b. Penyampaian laporan kepada otoritas Jasa Keuangan tepat waktu;
   c. Penyelenggaraan dan dokumentasi rapat Umum Pemegang Saham.
   d. Penyelenggaraan dan dokumentasi rapat Direksi dan/atau Dewan Komisaris;
4. Sebagai penghubung antara Perusahaan dengan pemegang saham, otoritas Jasa Keuangan dan pemangku kepentingan lainnya.

Pelaksanaan Tugas Sekretaris Perusahaan

Sepanjang tahun 2025, fungsi Sekretaris Perusahaan menjalankan tugas dan tanggung jawabnya secara strategis dalam memastikan kepatuhan terhadap regulasi pasar modal, penguatan GCG, serta peningkatan transparansi dan komunikasi dengan pemangku kepentingan.

1. **Kepatuhan Regulasi & Keterbukaan Informasi**
   Perseroan senantiasa memastikan kepatuhan penuh terhadap ketentuan OJK dan BEI sepanjang tahun 2025, meliputi:
   - Tidak terdapat sanksi maupun surat peringatan dari regulator
   - Seluruh keterbukaan informasi dan pelaporan berkala disampaikan tepat waktu
   - Pengelolaan transaksi afiliasi dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku
   - RUPS Tahunan diselenggarakan sesuai peraturan perundangan dan prinsip transparansi

   Sekretaris Perusahaan juga memastikan penyusunan materi keterbukaan informasi dilakukan secara terstruktur dan konsisten guna menjaga kredibilitas informasi publik serta meningkatkan kualitas komunikasi dengan investor dan media.
2. **Penguatan Praktik Tata Kelola**
   Perseroan terus memperkuat kerangka tata kelola yang selaras dengan ketentuan POJK dan praktik terbaik regional, termasuk ACGS. Sepanjang 2025, inisiatif yang dilakukan meliputi:
   - Peningkatan efektivitas koordinasi Direksi dan Dewan Komisaris
   - Tingkat kehadiran dan persetujuan pemegang saham yang tinggi dalam RUPS
   - Pelaksanaan pembagian dividen secara transparan dan tepat waktu
   - Implementasi hak-hak pemegang saham secara adil dan setara

   Upaya tersebut mencerminkan komitmen Perseroan dalam menjaga akuntabilitas serta meningkatkan kepercayaan pemegang saham dan investor.
3. **Dukungan terhadap Implementasi ESG & Keberlanjutan**
   Sekretaris Perusahaan berperan sebagai koordinator dalam meningkatkan kesiapan internal terhadap implementasi standar keberlanjutan dan pelaporan ESG. Sepanjang tahun 2025, kegiatan yang dilaksanakan antara lain:
   - Koordinasi penyusunan Laporan Tahunan dan Laporan Keberlanjutan secara tepat waktu
   - Sosialisasi perkembangan regulasi ESG dan pelaporan keberlanjutan kepada manajemen dan fungsi terkait
   - Pelaksanaan pelatihan dan diskusi internal terkait implementasi standar pelaporan keberlanjutan (termasuk PSPK 1 & 2)
   - Penguatan koordinasi ESG lintas fungsi melalui ESG *Task Force*

   Langkah ini mendukung peningkatan kualitas pengungkapan keberlanjutan dan kesiapan Perseroan terhadap perkembangan standar pelaporan global.
4. **Peningkatan Kepercayaan Pemangku Kepentingan**
   Konsistensi penerapan tata kelola yang baik dan transparansi informasi berkontribusi terhadap peningkatan reputasi dan kepercayaan pemangku kepentingan. Hal ini tercermin dari:
   - Tidak adanya sanksi regulator
   - Pencapaian berbagai penghargaan atas kualitas Laporan Tahunan dan Laporan Keberlanjutan
   - Pengakuan eksternal atas praktik tata kelola dan keberlanjutan Perseroan
   - Pemeliharaan posisi Perseroan dalam berbagai indeks saham bursa dan penilaian ESG

   Sekretaris Perusahaan akan terus memperkuat fungsi *governance*, *compliance*, dan keterbukaan informasi guna mendukung pertumbuhan Perseroan yang berkelanjutan serta menjaga kepercayaan investor dan pemangku kepentingan.

Pelatihan Sekretaris Perusahaan

Untuk mendukung pelaksanaan tugas Sekretaris Perusahaan, AKR mendorong partisipasi dalam program pelatihan yang diselenggarakan secara formal maupun informal. Sepanjang tahun 2025, Sekretaris Perusahaan telah mengikuti pengembangan kompetensi sebagai berikut:

No	Pendidikan/Pelatihan/Seminar	Tanggal Pelatihan	Tempat Pelatihan	Penyelenggara
1	Sosialisasi POJK No.45 Tahun 2024	6 Februari 2025	Zoom	OJK & BEI
2	Corporate Reputation in The Digital Era: Strategies to Build Investor Trust	28 Februari 2025	Zoom	ICSA
3	Kebijakan Keuangan Berkelanjutan OJK	13 Maret 2025	Zoom	ICSA
4	Menavigasi Tantangan ESG melalui Penguatan Kebijakan Good Corporate Governance	18 Maret 2025	Zoom	ICSA
5	POJK 9 Tahun 2023 dan SEOJK 18/ SEOJK.03/2023	21 Maret 2025	Zoom	Bursa Efek Indonesia
6	POJK Nomor 29 Tahun 2023tentang Pembelian Kembali Saham	15 Mei 2025	Zoom	ICSA
7	Synergizing Corporate Communication	30 Mei 2025	Zoom	ICSA
8	to Navigate Global Volatility	26 & 30 Juni 2025	Bursa Efek Indonesia	Bursa Efek Indonesia
9	Navigating ESG in Global Economy Uncertainty	2 Juli 2025	Bursa Efek Indonesia	Bursa Efek Indonesia

No	Pendidikan/Pelatihan/Seminar	Tanggal Pelatihan	Tempat Pelatihan	Penyelenggara
10	Sosialisasi Standard Pengungkapan Keberlanjutan IFRS S1 - S2	16 Juli & 21 Agustus 2025	Hybrid	Himpunan Kawasan Industri
11	Laporan Keberlanjutan untuk Kawasan Industri	1 September 2025	Zoom	Bursa Efek Indonesia
12	POJK No.17 Tahun 2020	29 Oktober 2025	Zoom	ICSA
13	Advancing to Double Materiality: Navigating GRI and ISSB for Meaningful, Aligned Disclosures for Public Listed Companies	10 – 11 November 2025	Bursa Efek Indonesia	AEI Kolaborasi dengan GRI
14	Peran Corsec dalam Era AI & Reputasi Digital	20 November 2025	Zoom	ICSA
15	Digital Trust Insight 2026 PwC	25 November 2025	Jakarta	PwC
16	Dialog Akhir Tahun OJK	5 Desember 2025	Jakarta	OJK
17	Sosialisasi Regulasi & Sistem Pelaporan Perubahan Kepemilikan Saham	19 Desember 2025	Zoom	OJK & KSEI

Unit Audit Internal

Unit Audit Internal berperan sebagai fungsi independen yang mendukung Presiden Direktur dalam mencapai tujuan Perseroan melalui penilaian atas kecukupan dan efektivitas penerapan pengendalian internal, manajemen risiko, serta GCG. Pembentukan Unit Audit Internal dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 56/POJK.04/2015 (POJK 56/2015) mengenai Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal.

Fungsi strategis Unit Audit Internal diwujudkan melalui penyediaan layanan *assurance* dan konsultasi secara objektif dan independen untuk mendukung peningkatan nilai dan kinerja operasional. Dengan metodologi yang sistematis dan terukur, Unit Audit Internal berperan membantu manajemen Perseroan dalam audit, penilaian, penyajian, evaluasi, saran perbaikan sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan AKR.

Pedoman Pelaksanaan Unit Audit Internal

Piagam Unit Audit Internal berfungsi sebagai landasan kerja yang mengarahkan pelaksanaan tugas, wewenang, dan tanggung jawab Unit Audit Internal. Dokumen Piagam telah disahkan oleh Presiden Direktur dengan pembaruan terakhir pada 13 Agustus 2015. Perseroan pertama kali menyusun Piagam pada 30 Desember 2009. Untuk menjaga kesesuaian dan memastikan keberlanjutan relevansinya, Piagam Unit Audit Internal ditinjau secara berkala. Setiap perubahan dan penyempurnaan dilakukan dengan mengacu pada ketentuan yang berlaku.

Piagam Unit Audit Internal memuat pengaturan atas berbagai aspek penting, antara lain:
1. Visi dan Misi Unit Audit Internal
2. Fungsi dan Struktur Organisasi Unit Audit Internal
3. Persyaratan dan Pengembangan Unit Audit Internal
4. Wewenang, Tugas, dan Tanggung Jawab Unit Audit Internal
5. Pelaksanaan dan Pelaporan Audit dan etika Unit Audit Internal
6. Pembatasan Unit Internal Audit serta Penetapan dan Persetujuan dari Presiden Direktur dan Dewan Komisaris

Visi dan Misi Unit Audit Internal

Visi

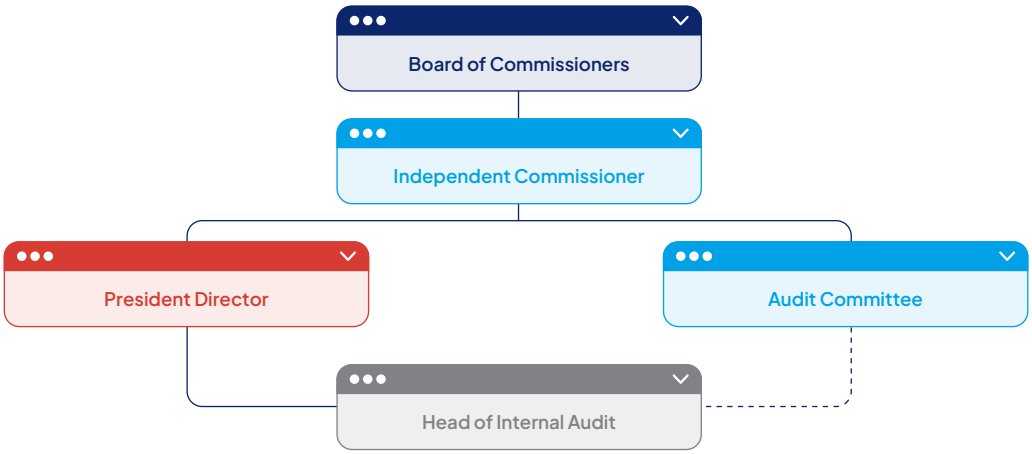
Menjadi unit yang independen, objektif, profesional dan memberikan nilai tambah guna mendukung Manajemen Perseroan dalam mencapai sasaran usaha, visi dan misinya.

Misi

- Membantu Manajemen Perseroan dalam mencapai kinerja Perseroan dengan melakukan aktivitas konsultasi sehingga terjadi peningkatan efisiensi dan efektivitas kegiatan Perseroan.
- Menjalankan fungsi *assurance* sehingga tercapai Tata Kelola Perusahaan yang Baik dan *Operational Excellence*.

Struktur Organisasi Internal Audit

Unit Audit Internal berada dalam pengawasan Direksi dan memiliki mandat untuk melaksanakan fungsi audit secara independen atas aspek operasional, keuangan, serta kepatuhan Perseroan. Kepala Unit Audit Internal bertanggung jawab secara penuh dan langsung kepada Presiden Direktur. Unit Audit Internal merupakan bagian integral dari struktur organisasi Perseroan dan memiliki kedudukan sebagai berikut:



Pihak yang Mengelola dan Memberhentikan Kepala Unit Audit Internal

Penetapan dan pemberhentian Kepala Unit Audit Internal merupakan kewenangan Presiden Direktur yang dilaksanakan dengan memperoleh persetujuan Dewan Komisaris berdasarkan rekomendasi Komite Audit. Proses tersebut dilakukan sesuai dengan ketentuan dan tata cara yang berlaku di AKR. Tahapan pengangkatan Kepala Unit Audit Internal sebagai berikut:

1. Identifikasi kebutuhan Kepala Unit Audit Internal yang baru dari Perseroan.
2. Evaluasi kandidat dari karyawan Perseroan maupun kandidat eksternal.
3. Seleksi kandidat melalui mekanisme fit and proper test dengan melibatkan Direksi AKR dan pertimbangan khususnya dari Dewan Komisaris yang dibantu Komite Audit.
4. Hasil fit and proper test diproses oleh tim terkait untuk memulai rencana penerbitan mutasi jabatan.
5. Pengukuhan Kepala Unit Audit Internal disertai dengan penyerahan SK Pengangkatan.

Profil Kepala Unit Audit Internal



Antonius Setiawan

Ketua Unit Audit Internal

Bergabung sejak
4 Februari 2019

Usia
43 Tahun

Domisili
Tangerang Selatan, Banten

Kewarganegaraan
Indonesia

Dasar Hukum Pengangkatan
Surat Keputusan Direksi No. 35/L-HR/XI/2019 Tanggal 8 November 2019.

Riwayat Pendidikan
Sarjana Ekonomi pada bidang Akuntansi dari Universitas Atmajaya Jakarta (2004).

Sertifikasi
ISO 9001 Auditor

Riwayat Jabatan
- Internal Audit Group – Senior Manager, PT Central Cipta Murdaya (2016–2019)
- Internal Audit Group – Senior Manager, PT Tiphone Mobile Indonesia (2016)
- Internal Audit Group – Manager, PT Djarum (2010–2015)
- Accounting – Section Head, PT Asuransi Adira Dinamika (2004–2009)

Rangkap Jabatan
Tidak ada.

Hubungan Afiliasi
Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan anggota Dewan Komisaris, Direksi dan Pemegang Saham Pengendali.

Fungsi dan Kedudukan Unit Audit Internal

Fungsi Unit Audit Internal:

1. Melakukan kegiatan pemberian keyakinan (*assurance*) dan konsultasi yang bersifat independen dan objektif, dengan tujuan untuk meningkatkan nilai dan memperbaiki operasional Perseroan, melalui pendekatan yang sistematis, dengan cara mengevaluasi dan meningkatkan efektivitas manajemen risiko, pengendalian, dan proses tata kelola Perseroan.
2. Membantu Manajemen Perseroan dalam penerapan Tata Kelola Perusahaan yang baik yang meliputi pemeriksaan/audit, penilaian, penyajian, evaluasi, saran perbaikan serta mengadakan kegiatan *assurance* dan konsultasi kepada unit kerja, sehingga unit kerja dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara efektif, efisien dan sesuai dengan kebijakan yang ditentukan oleh Perseroan.

Kedudukan Unit Audit Internal:

1. Unit Audit Internal secara struktural dikepalai oleh Kepala Unit Audit Internal.
2. Kepala Unit Audit Internal ditunjuk dan diberhentikan secara langsung oleh Presiden Direktur setelah disetujui oleh Dewan Komisaris.
3. Presiden Direktur dapat memberhentikan Kepala Unit Audit Internal, setelah mendapat persetujuan Dewan Komisaris, jika Kepala Unit Audit Internal tidak memenuhi persyaratan sebagai Auditor Internal sebagaimana diatur dalam POJK 56/2015 dan/atau gagal atau tidak cakap menjalankan tugas.
4. Kepala Unit Audit Internal bertanggung jawab secara penuh dan langsung kepada Presiden Direktur.
5. Anggota Unit Audit Internal bertanggung jawab secara langsung kepada Kepala Unit Audit Internal.

Tugas dan Tanggung Jawab Unit Audit Internal

1. Menyusun strategi dan rencana kerja audit tahunan serta rencana pengembangan kemampuan dan keterampilan auditor sehingga selalu *update* dan *inline* dengan perkembangan Perseroan sesuai masukan dari Presiden Direktur dan Dewan Komisaris.
2. Mempersiapkan dan melaksanakan audit atas efektivitas sistem pengendalian internal dan manajemen risiko sesuai dengan kebijakan Perseroan.
3. Mempersiapkan dan melaksanakan audit kepatuhan terhadap jalannya pengelolaan Perseroan untuk memastikan bahwa seluruh kegiatan Perseroan telah sesuai ketentuan/kebijakan peraturan perusahaan yang berlaku serta terhadap berbagai peraturan hukum negara yang berlaku.
4. Mempersiapkan dan melaksanakan audit operasional untuk mengukur tingkat efisiensi dan efektifitas semua kegiatan Perseroan.
5. Mempersiapkan dan melaksanakan audit khusus (*investigative audit*) atas permintaan dari Manajemen.
6. Berdasarkan hasil audit, memberikan bantuan masukan/rekomendasi terhadap penyempurnaan sistem dan prosedur serta kebijakan Perseroan sehingga tercapainya efisiensi dan efektifitas yang selaras dengan visi dan misi Perseroan.
7. Membuat dan menyampaikan laporan audit, rekomendasi dan tindak lanjut yang belum, sedang dan telah dilaksanakan kepada Presiden Direktur.
8. Menyusun program untuk mengevaluasi mutu kegiatan audit internal yang dilakukannya.

Wewenang Unit Audit Internal

1. Menentukan strategi, ruang lingkup, metode dan frekuensi audit secara independen atas persetujuan Presiden Direktur.
2. Mempunyai akses terhadap seluruh dokumen, pencatatan, sistem, fisik aset dan informasi milik Perseroan terkait objek audit yang dilaksanakannya.
3. Melakukan komunikasi secara langsung dengan Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau Komite Audit Perseroan.
4. Menyampaikan hambatan dan tindak lanjutnya kepada Presiden Direktur secara langsung.
5. Melakukan pertemuan secara rutin dan tidak rutin dengan Presiden Direktur, Dewan Komisaris, dan/atau Komite Audit.
6. Melakukan koordinasi kegiatannya dengan kegiatan Audit Eksternal.
7. Melakukan kerja sama dan koordinasi dengan Komite Audit.

Jumlah Pegawai dan Sertifikasi

Komposisi Unit Audit Internal AKR dirancang secara proporsional sesuai dengan kebutuhan Perseroan, dengan didukung oleh sumber daya manusia yang memiliki kompetensi teknis di bidang audit serta kemampuan pendukung lainnya untuk menjalankan fungsi pengawasan secara optimal. Per 31 Desember 2025, jumlah anggota Unit Audit Internal adalah sebanyak 7 (tujuh) orang, yang terdiri dari 1 (satu) Kepala Unit Audit Internal, 3 (tiga) *manager*, 1 (satu) asisten *manager* dan 2 (dua) supervisor.

Adapun rincian jumlah pegawai beserta sertifikasi yang dimiliki oleh personel Unit Audit Internal disajikan sebagai berikut:

No.	Nama	Pendidikan	Pengalaman	Sertifikasi
1.	Agung Cahyono	Sarjana Ekonomi jurusan Akuntansi dari Universitas Katolik Widya Mandala, Surabaya	Auditor Senior di Kantor Akuntan Publik Drs. Hanny, Wolfrey & Rekan	ISO 9001 Auditor
2.	Eko Romero	Sarjana Teknik Sipil dari Universitas Bung Hatta	• Section Head PT Nipress Energy Otomotif (member of Johnson Controls Inc.) • Internal Audit PT PGN Gagas, Entitas Anak PT PGN Tbk (Persero) • Quality Assurance and Quality Control PT Sucofindo • Staf Teknik PT Benefita	• Certified Forensic Auditor (CFrA) • Lie Detector Workshop • ISO 9001 Auditor • Special Soft Skill for Investigator • Welding Inspector • Non-Destructive Test Level 2 • Boiler and Pressure Vessel

No.	Nama	Pendidikan	Pengalaman	Sertifikasi
3.	William Teguh Karya Putra	Sarjana Ekonomi Jurusan Akuntansi (konsentrasi Audit) dari Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie d/h Institute Bisnis dan Informatika Indonesia	• Specialist, Financial Fraud Investigation – Profit Protection and Fraud Risk – Corporate Risk and Integrity, PT Indah Kiat Pulp and Paper Tbk • Asisten Manajer, Operation Controller, PT Sinarmas Distribusi Nusantara • Asisten Manajer, Special Investigation and Forensic Audit, PT Sinar Mas Agro Resources and Technology Tbk • Staff Senior Internal Audit, PT Permata Andalan Abadi (Distributor Tunggal Semen Tiga Roda) • Staf Operation Compliance Executive, PT Soho Global Heath Tbk • Staf Akuntansi, CV Permata Sejati (Jakarta) • Staf Asset Management, PT Bentara Sinergies Multifinance	• Brevet A dan B (IAI) • Fraud Risk Management Workshop (AFCE)
4.	Rambo Tornando Silaban	Sarjana Teknik Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS)	• Claims And Demurrage Analyst Tanker, Waruna Shipping Group • Claim Adjuster, Charles Taylor Adjusting PLC • PT Surveyor Indonesia (Persero): - Marine Surveyor (2014 - 2019) - Inspector Import Technical Verification (VPTI) (2016 -2019) - Inspector - OHS Specialist for Chemicals (2017 -2018) - Diesel & Hydro Power Plant Inspector (2016 -2019) - Pressure Vessel & Boiler Inspector (2018 – 2019)	• Internal auditor ISPS Code • Inspector Occupational health and safety expert of boiler and pressure vessel safety expert (AK3 PUBT) • Inspector OHS expert of chemicals (AK3 Kimia) • Inspector Import Technical Verification (VPTI) • Inspector electrical generators & excitation systems • Inspector diesel powerplant level 2 • Inspector electrical generators & excitation systems • Inspector hydro power level 2
5	Edi Setiawan	Sarjana Ekonomi jurusan Akuntansi dari Universitas Muhammadiyah, Jakarta	• Senior Supervisor Auditor, PT Modernland Realty Tbk • Supervisor Audit, PT Nusindo (Rajawali Nusantara Indonesia Grup) • Staf Audit, PT Koperasi Nusantara	• Analisis Audit Report (PPM Management) • Fraud Management & Prevention (Pelindo)
6	Irvan Dwiantono Kartomiharjo	Sarjana Sistem Informasi Universitas Brawijaya	• IT Governance di PT Berlian Sistem Informasi (part of Mitsubishi Automotive Group Indonesia) • Internal Auditor PT Satria Antara Prima Tbk (SAP Express)	• Certified ITIL 4 Foundation (IT Service Management Practice)

Pelaksanaan Tugas Unit Audit Internal Tahun 2025

Pelaksanaan kegiatan audit mengacu pada rencana audit tahunan yang telah memperoleh persetujuan dari Presiden Direktur Perseroan. Ruang lingkup audit meliputi audit rutin maupun audit khusus yang dilaksanakan pada seluruh cabang serta Entitas Anak Perseroan yang beroperasi di berbagai wilayah Indonesia. Melalui pelaksanaan audit tersebut, Perseroan berupaya memastikan kepatuhan terhadap kebijakan internal, efektivitas pengendalian, serta peningkatan kualitas GCG secara berkelanjutan.

Unit Audit Internal berperan dalam melakukan evaluasi atas proses bisnis dengan menilai berbagai risiko serta menelusuri akar permasalahan yang muncul guna memastikan bahwa seluruh aktivitas Perseroan telah mematuhi kebijakan internal, ketentuan hukum, dan peraturan yang berlaku. Ruang lingkup evaluasi mencakup perlindungan dan optimalisasi aset, pengukuran efektivitas serta efisiensi pemanfaatan sumber daya, hingga pendeteksian potensi kerugian dan inefisiensi dalam proses penciptaan nilai. Melalui peran tersebut, Unit Audit Internal turut memastikan bahwa operasional Perseroan dijalankan secara konsisten sesuai dengan standar dan prosedur yang telah ditetapkan.

Seluruh pelaksanaan Audit Internal mengacu pada standar profesional yang berlaku dengan penekanan pada efektivitas pengelolaan risiko, kecukupan pengendalian internal, serta pencegahan potensi terjadinya kecurangan. Setiap hasil audit dirangkum dalam bentuk rekomendasi yang disampaikan kepada Manajemen dan Komite Audit untuk ditindaklanjuti, disertai dengan proses pemantauan atas implementasinya.

Di samping itu, laporan hasil audit juga disampaikan kepada Dewan Komisaris, Direksi, dan Komite Audit sebagai berikut:
1. Laporan Hasil Audit
2. Rangkuman Laporan Tindak Lanjut atas Hasil Audit
3. Laporan Realisasi Kegiatan Audit

Realisasi Audit 2025

Sepanjang tahun 2025, Unit Audit Internal menyusun sejumlah 417 rekomendasi hasil audit, di mana sebanyak 45 rekomendasi masih berada dalam masa tindak lanjut dan belum melewati batas waktu penyelesaian hingga 31 Desember 2025. Seluruh rekomendasi yang telah mencapai jatuh tempo telah ditindaklanjuti secara tepat waktu sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan.

Ringkasan pelaksanaan tindak lanjut atas hasil audit Unit Audit Internal disajikan dalam tabel berikut:

Tahun	Rekomendasi	*Closed*	*In Progress*	Persentase Penyelesaian
2023	342	318	24	93%
2024	580	507	73	87%
2025	417	372	45	89%

Pelaksanaan audit dilakukan oleh tim yang terdiri dari 6 (enam) auditor di bawah koordinasi Kepala Unit Audit Internal, dengan ruang lingkup pemeriksaan meliputi kegiatan operasional, perdagangan dan distribusi, logistik, manufaktur, serta fungsi keuangan. Hingga 31 Desember 2025, Unit Audit Internal juga telah menyelenggarakan rapat internal bersama Direksi dan Dewan Komisaris/Komite Audit sebanyak 8 (delapan) kali.

Rincian agenda dan rekapitulasi rapat sepanjang tahun 2025 adalah sebagai berikut:

No.	Tanggal	Topik Rapat
1	05 Maret 2025	Laporan Audit Internal untuk periode Oktober - Desember 2024
2	22 Mei 2025	Laporan Audit Internal untuk periode Januari - Maret 2025
3	03 Juni 2025	*Sharing Session* Audit Internal & Manajemen Risiko
4	07 Juli 2025	Pemantauan Tindakan Tindak Lanjut atas Rekomendasi Audit Internal untuk Semester 1 tahun 2025
5	14 Agustus 2025	Laporan Audit Internal untuk periode April - Juni 2025
6	24 Oktober 2025	Laporan Audit Internal untuk periode Juli - September 2025
7	28 Oktober 2025	*Sharing Session* Audit Internal & Manajemen Risiko
8	01 Desember 2025	Pemantauan Tindakan Tindak Lanjut atas Rekomendasi Audit Internal untuk Semester 2 tahun 2025

Temuan dan Tindak Lanjut

Unit Audit Internal melaksanakan audit operasional serta audit khusus yang mencakup berbagai proses bisnis utama, antara lain penjualan, pengelolaan pergudangan, akuntansi, operasional terminal tangki dan gudang, serta kegiatan operasional armada truk dan kapal yang berada dalam ruang lingkup pengawasannya.

Sepanjang tahun 2025, hasil temuan dan rekomendasi audit dibahas secara langsung dengan penanggung jawab masing-masing unit dan disampaikan kepada Manajemen Perseroan. Selanjutnya, Unit Audit Internal melakukan pemantauan atas pelaksanaan langkah perbaikan yang telah disepakati bersama unit terkait guna memperkuat sistem pengendalian internal serta mengurangi potensi risiko yang dapat timbul.

Adapun inisiatif utama yang dijalankan oleh Unit Audit Internal sepanjang tahun 2025 dalam menindaklanjuti temuan dan rekomendasi audit adalah sebagai berikut:

1. Melakukan audit menggunakan pendekatan berbasis risiko, dengan fokus pada area, proses, atau produk tertentu.
2. Secara konsisten menindaklanjuti rekomendasi dan temuan audit untuk memastikan implementasinya oleh pihak yang diaudit dalam batas waktu yang ditentukan.
3. Berkoordinasi dengan departemen di Kantor Pusat untuk rekomendasi yang memerlukan tindakan dari kantor pusat.

Sistem **Pengendalian Internal**

Perseroan menerapkan Sistem Pengendalian Internal (SPI) sebagai instrumen pengawasan yang dirancang untuk menjaga efektivitas dan efisiensi operasional, sekaligus memastikan kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku. SPI diimplementasikan secara menyeluruh di seluruh lini bisnis melalui mekanisme pengendalian berlapis, mulai dari proses awal hingga tahap penyusunan dan pelaporan.

Pengendalian internal memberikan keyakinan bagi Perseroan atas keandalan pelaporan keuangan serta berjalannya mekanisme *checks and balances* secara efektif. Melalui proses pengendalian yang terstruktur, Perseroan berupaya menjaga perlindungan aset, memastikan akurasi informasi keuangan, serta meningkatkan efektivitas pengelolaan dan kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku. Pengendalian internal juga berperan dalam menekan potensi risiko, kerugian, dan pelanggaran yang dapat berdampak negatif terhadap Perseroan.

Sebagai bagian dari penguatan pengendalian internal, Perseroan secara berkelanjutan mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya yang dimiliki untuk mengenali dan menilai risiko-risiko inheren yang dapat memengaruhi pencapaian tujuan. Proses ini memungkinkan Perseroan mengelola risiko secara lebih terarah, sekaligus memastikan bahwa potensi hambatan dalam pelaksanaan strategi dan kegiatan operasional dapat diantisipasi dan dikendalikan secara efektif. Penerapan SPI berada dalam pengawasan Dewan Komisaris dan dikelola oleh Direksi, dengan keterlibatan aktif manajemen serta seluruh karyawan untuk memastikan pengendalian dijalankan secara konsisten dan berkesinambungan.

Sistem Pengendalian Keuangan dan Operasional

Sebagai bagian dari penguatan GCG, Perseroan membangun SPI yang berfokus pada pengendalian keuangan dan operasional. Pendekatan ini memungkinkan tersedianya informasi keuangan yang transparan dan andal bagi manajemen, pemegang saham, serta pemangku kepentingan lainnya, sehingga mendukung proses pengambilan keputusan yang tepat dan strategis. AKR melakukan pengendalian keuangan meliputi:

1. Mengamankan Aset Perseroan
   Sebagai entitas usaha, Perseroan memastikan pengamanan yang ketat terhadap penggunaan anggaran dan aset lainnya, mulai dari perencanaan, pengotorisasian, pencatatan, penyaluran, pencairan, pelaporan, hingga pertanggungjawaban.
2. Menguji Keandalan Laporan Keuangan
   Pertanggungjawaban pengelolaan usaha tercermin dalam laporan keuangan. Perseroan memastikan adanya sistem dan prosedur yang meningkatkan kualitas penyusunan serta penyajian laporan keuangan, seperti pemisahan fungsi penyelenggara keuangan.
3. Mendorong Efektivitas Penggunaan Anggaran
   Melalui pengendalian internal, Perseroan memantau dan mendorong penggunaan anggaran secara efektif agar tidak menyimpang dari tujuan yang telah ditetapkan.

Pengendalian operasional diterapkan melalui serangkaian kebijakan dan prosedur yang dirancang untuk mendukung pencapaian tujuan dan target Perseroan, sekaligus memastikan penyusunan laporan keuangan yang akurat dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dalam pelaksanaannya, AKR menjalankan pengendalian operasional melalui langkah-langkah berikut:

1. Perseroan menetapkan kebijakan dan prosedur yang berperan sebagai pedoman atau panduan kegiatan operasional, sistem, teknologi, pelaporan keuangan, serta kepatuhan.
2. Perseroan menerapkan sistem informasi terintegrasi untuk mendukung kegiatan operasional, pelaporan keuangan, pelaporan manajemen, dan pelaporan eksternal.
3. Perseroan melalui Unit Audit Internal melakukan pengujian atau efektivitas sistem pengendalian internal dan memantau tindakan perbaikan atas kelemahan sistem pengendalian yang teridentifikasi.

Kerangka Sistem Pengendalian Internal

Dalam merancang pengendalian internal, Perseroan mengadopsi kerangka kerja pengendalian internal yang berlaku secara internasional, yakni *Internal Control Integrated Framework* yang diterbitkan oleh Committee of the Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO). Kerangka ini memandang pengendalian internal sebagai proses terpadu yang dijalankan secara kolektif oleh Dewan Komisaris, Direksi, dan seluruh tingkatan organisasi. Penerapan SPI selaras dengan pendekatan tersebut, di mana penguatan sistem pengendalian dilakukan secara berkelanjutan dengan melibatkan seluruh insan Perseroan sebagai bagian dari budaya pengendalian yang menyeluruh.

Melalui penerapan SPI, Perseroan berupaya memperoleh tingkat keyakinan yang memadai dalam mencapai 3 (tiga) tujuan utama sebagai berikut:
1. Efektifitas dan efisiensi operasi;
2. Keandalan pelaporan keuangan; dan
3. Kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku.

Pengendalian internal merupakan mekanisme yang melekat pada seluruh rangkaian proses operasional Perseroan. Sistem ini diimplementasikan secara terpadu dalam fungsi manajemen utama, mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, hingga pemantauan. Dalam penerapannya, SPI Perseroan terdiri atas beberapa komponen utama sebagai berikut:
1. Lingkungan pengendalian (*control environment*) yang meliputi integritas, nilai etik, dan kompetensi dari orang dan entitas, filosofi manajemen dan gaya operasi, cara manajemen memberikan otoritas dan tanggung jawab serta mengorganisasikan dan mengembangkan bisnis sesuai dengan arahan manajemen.
2. Penaksiran risiko (*risk assessment*) yang bertujuan untuk mengidentifikasi, menganalisis, dan mengelola risiko-risiko yang berkaitan dengan berbagai aktivitas bisnis Perseroan.
3. Aktivitas pengendalian (*control activities*) yang senantiasa dilakukan dalam menentukan kebijakan-kebijakan dan prosedur-prosedur yang ditetapkan oleh manajemen untuk membantu memastikan bahwa tujuan bisnis Perseroan tercapai.
4. Informasi dan komunikasi (*information and communication*) yang memungkinkan orang atau entitas, memperoleh dan bertukar informasi yang diperlukan untuk melaksanakan, mengelola, dan mengendalikan operasional Perseroan.
5. Pemantauan (*monitoring*) dengan tujuan untuk menilai mutu kinerja Perseroan. Hal ini dijalankan melalui aktivitas pemantauan yang terus-menerus, evaluasi yang terpisah atau kombinasi dari keduanya.

Kesesuaian Dengan Standar COSO

Kerangka kerja pengendalian internal yakni Internal *Control Integrated Framework* yang dikembangkan oleh Committee of the Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO) memiliki 5 (lima) komponen utama yang saling terintegrasi dan menjadi dasar bagi terciptanya SPI yang efektif dan efisien. Penerapan prinsip-prinsip COSO di AKR dijabarkan sebagai berikut:

No	Prinsip COSO	Penerapan di AKR
1.	***Control Environment*** Lingkungan pengendalian adalah rangkaian standar, proses dan struktur yang menjadi dasar dalam pelaksanaan *Internal Control* di seluruh organisasi. Terdapat 5 (lima) prinsip yang terkait dengan komponen ini yaitu: a. Organisasi menunjukkan komitmen terhadap integritas dan nilai-nilai etika. b. Direksi menunjukkan independensi dari manajemen dan melaksanakan pengawasan terhadap pengembangan dan pelaksanaan *Internal Control*. c. Komisaris dan Manajemen menetapkan struktur, bentuk pelaporan, tanggung jawab dan otoritas yang diperlukan dalam rangka pencapaian tujuan. d. Organisasi menetapkan komitmen dalam menarik, mengembangkan, dan mempertahankan individu yang kompeten dalam rangka pencapaian tujuan. e. Organisasi memegang individu yang bertanggungjawab terhadap *Internal Control* dalam rangka pencapaian tujuan.	Perseroan memiliki pengendalian internal yang mencerminkan secara keseluruhan sikap, kesadaran dan tindakan oleh Direksi serta tentang pentingnya pengendalian internal di Perseroan. Elemen lingkungan pengendalian dijalankan dalam bentuk pengawasan di seluruh tingkatan yaitu, pengendalian di tingkat entitas maupun pengendalian di tingkat aktivitas serta didukung dengan prinsip-prinsip sebagai berikut: a. Dalam pelaksanaan tugas sehari-hari, seluruh karyawan termasuk Direksi harus menghayati nilai-nilai Perseroan. Karyawan juga diharuskan untuk menandatangani pakta integritas sebagai komitmen terhadap integritas dan nilai-nilai etika. b. Dewan Komisaris secara konsisten melaksanakan pengawasan terhadap kegiatan Direksi dan senantiasa memberikan masukan atas isu-isu yang dihadapi Perseroan terutama yang berkaitan dengan pengendalian internal. c. Struktur organisasi, pelaporan tanggung jawab dan otoritas yang diperlukan untuk mencapai strategi bisnis telah didefinisikan dengan jelas. Walaupun demikian, Perseroan secara terus menerus melakukan perubahan yang diperlukan untuk menghadapi perubahan agar struktur organisasi lebih responsif dan efisien.

No	Prinsip COSO	Penerapan di AKR
		d. Sebagai bagian dari pengembangan sumber daya manusia, seluruh karyawan menjalani *Performance Evaluation* setiap 6 bulan untuk mengetahui kinerja mereka selama periode tersebut dan bagaimana memperbaiki kinerja mereka ke depan. Pelatihan yang relevan dengan tugas dan tanggung jawab diberikan secara berkesinambungan. Selanjutnya, penerimaan karyawan baru selalu didasari dengan mencari kandidat yang terbaik dan dapat menjadi *High Performer* ketika sudah masuk sebagai karyawan Perseroan. e. Secara organisasi, Audit Internal bertanggung jawab atas kepatuhan terhadap pengendalian internal. Tim Audit Internal melakukan audit terhadap semua aspek usaha dan proses bisnis Perseroan dan hasil audit tersebut dilaporkan kepada Presiden Direktur, Direksi dan Komite Audit. Tim Audit Internal juga bertanggung jawab untuk menindak lanjuti temuan dan perbaikan yang diperlukan.
2.	***Risk Assessment*** Penilaian risiko melibatkan proses yang dinamis dan berulang untuk mengidentifikasi dan menganalisis risiko agar mencapai tujuan, serta membentuk dasar mengenai bagaimana risiko harus dikelola. Terdapat 4 (empat) prinsip yang berkaitan dengan komponen ini yaitu: a. Organisasi menentukan tujuan yang spesifik sehingga memungkinkan untuk dilakukan identifikasi dan penilaian risiko yang terkait dengan tujuan. b. Organisasi mengidentifikasi risiko yang terkait dengan pencapaian tujuan di seluruh entitas dan menganalisis risiko untuk menjadi dasar bagaimana risiko akan diperlakukan. c. Organisasi mempertimbangkan potensi *fraud* dalam penilaian risiko. d. Organisasi mengidentifikasi dan menilai perubahan yang akan memengaruhi sistem pengendalian internal secara signifikan.	a. Pengelolaan risiko dilakukan melalui pendekatan *top-down* yang melibatkan Direksi dalam melakukan identifikasi dan evaluasi atas risiko-risiko utama secara keseluruhan agar sejalan dengan visi, misi dan tujuan strategis Perseroan dan juga *bottom-up* dalam proses operasional sehingga mendapatkan profil risiko terkini dari sudut pandang Unit/ Divisi/Departemen. b. Tim ERM berkoordinasi dengan pemilik risiko untuk melakukan penilaian kembali dan konsolidasi atas risiko-risiko utama yang teridentifikasi dan memantau kemajuan rencana mitigasi risiko serta menyampaikan laporan kepada Direksi dan Komite Audit. c. Dalam proses identifikasi risiko, dilakukan dengan melihat risiko dari 4 (empat) kategori yaitu strategis, operasional, kepatuhan dan keuangan. Kemudian atas risiko yang telah teridentifikasi, dilakukan penilaian risiko terhadap tingkat risiko inheren (*risk impact x likelihood*), tingkat efektivitas kontrol dan tingkat risiko residu. d. Setelah mengidentifikasi dan menetapkan tingkat risiko, akan diperoleh risiko prioritas yang menjadi perhatian utama dan ditentukan rencana mitigasi risiko yang diperlukan untuk menurunkan tingkat risiko residu atas suatu risiko yang mana untuk status perkembangannya akan dimonitor secara regular.
3.	***Control Activities*** Aktivitas Pengendalian merupakan tindakan yang ditetapkan dengan prosedur dan kebijakan untuk meyakinkan bahwa manajemen telah mengarah untuk memitigasi risiko dalam rangka pencapaian tujuan. Terdapat 3 (tiga) prinsip dalam komponen ini yaitu: a. Organisasi memilih dan mengembangkan aktivitas pengendalian yang berkontribusi terhadap mitigasi risiko sampai pada tingkat yang dapat diterima dalam rangka pencapaian tujuan. b. Organisasi memilih dan mengembangkan aktivitas pengendalian secara umum terkait teknologi dalam rangka pencapaian tujuan. c. Organisasi menyebarkan aktivitas pengendalian melalui kebijakan dan prosedur dalam pengimplementasiannya.	a. Perseroan mempunyai kebijakan dan prosedur yang jelas sebagai panduan seluruh karyawan untuk mencapai objektif strategis yang telah ditentukan. Perseroan menerapkan manajemen risiko untuk mengidentifikasi dan menilai risiko yang dapat menjadi hambatan pencapaian kinerja Perseroan. Direksi dan pihak terkait bertanggung jawab untuk membuat rencana mitigasi risiko yang telah diidentifikasi. Tim ERM berkoordinasi dengan Audit Internal untuk melakukan pengujian atas pengendalian internal terhadap risiko yang signifikan. Sarana pengendalian intern yang diterapkan antara lain kepatuhan terhadap Sistem dan Prosedur, *authorization limit*, dan pemisahan tanggung jawab yang memadai. b. Perseroan memiliki informasi teknologi untuk keseluruhan bisnis proses, sehingga dapat meminimalisasi proses manual. Arsitektur dan *Framework IT* mengikuti prinsip matriks kontrol. c. Perseroan menerapkan dan terus menyempurnakan SOP dan Kebijakan sesuai dengan perkembangan bisnis dan perubahan internal maupun eksternal. Melalui komitmen pimpinan Perseroan beserta jajaran manager setiap departemen, segala kebijakan disosialisasikan dan diimplementasikan ke setiap level proses bisnis.

No	Prinsip COSO	Penerapan di AKR
4.	***Information and Communication*** Informasi diperlukan dalam rangka pelaksanaan tanggung jawab *Internal Control* dalam rangka pencapaian tujuan. Sedangkan komunikasi terjadi baik secara internal maupun eksternal dengan menyediakan informasi yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan *Internal Control* sehari-hari. Terdapat 3 (tiga) prinsip dalam komponen ini yaitu: a. Organisasi memperoleh dan menggunakan informasi yang berkualitas dan relevan dalam rangka mendukung fungsi dari komponen lain dalam *Internal Control*. b. Organisasi secara internal mengkomunikasikan informasi, termasuk tujuan dan tanggung jawab IC dalam rangka mendukung fungsi dari komponen lain dari *Internal Control*. c. Organisasi berkomunikasi dengan pihak eksternal terkait hal yang mempengaruhi fungsi dari komponen lain dalam *Internal Control*.	a. Perseroan telah mengimplementasikan sistem akuntansi, informasi dan komunikasi yang memadai dan digunakan sebagai sarana dalam pelaksanaan tugas seluruh karyawan sesuai dengan tanggung jawab masing-masing. Sistem akuntansi yang dianut Perseroan merupakan metode pencatatan dan pelaporan keuangan yang telah sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku. b. Untuk pengumpulan data yang diperlukan, Perseroan memiliki informasi teknologi yang memadai untuk menghasilkan, antara lain, laporan kegiatan usaha, laporan keuangan dan laporan lainnya yang diperlukan oleh Direksi dan Dewan Komisaris dalam rangka menjalani tugas mereka di Perseroan. Perseroan telah mengendalikan risiko-risiko yang berhubungan dengan penggunaan teknologi informasi seperti, data *backup and recovery*, *physical/logical access*, serta pengendalian terhadap aplikasi termasuk kesesuaian dan keakuratan data yang diproses, prosedur validasi, prosedur pengendalian dan akses serta pengamanan yang menyimpang. Dengan demikian, Perseroan memastikan bahwa isi dari informasi yang dilaporkan adalah benar, tepat waktu, relevan dan tersedia kepada pihak yang berkepentingan. c. Perseroan telah memiliki saluran komunikasi yang baik dan mendorong semua karyawan untuk menyampaikan aspirasi mereka melalui berbagai forum. Direksi mengidentifikasi informasi penting yang diperlukan Perseroan, merangkum, dan mengkomunikasikannya dalam bentuk dan waktu yang tepat sehingga seluruh karyawan dapat menjalankan tugas dan tanggung jawabnya. Selain itu, Direksi juga berkomunikasi dengan pihak eksternal yang sejalan dengan prinsip keterbukaan supaya pihak eksternal mengetahui keadaan Perseroan.
5.	***Monitoring Activity*** Evaluasi berkelanjutan, terpisah, atau kombinasi keduanya untuk memastikan seluruh komponen *Internal Control* tersedia dan berfungsi. Terdapat 2 (dua) prinsip dalam komponen ini yaitu: a. Organisasi memilih, mengembangkan, dan melaksanakan evaluasi berkelanjutan dan/atau terpisah untuk memastikan seluruh komponen *Internal Control* tersedia dan berfungsi. b. Organisasi mengevaluasi dan mengkomunikasikan defisiensi *Internal Control* pada pihak yang bertanggung jawab agar diambil tindakan korektif.	Dengan kesadaran bahwa sistem dan prosedur berubah sewaktu waktu akibat perubahan eksternal maupun internal, perubahan proses bisnis, perubahan personil, aplikasi IT dan teknologi yang baru dan faktor-faktor lainnya, Direksi dan pimpinan unit bisnis mengevaluasi secara berkesinambungan dan memastikan bahwa pengendalian internal Perseroan masih relevan dan berfungsi sebagaimana mestinya. Aktivitas pemantauan terhadap kecukupan Sistem Pengendalian Internal dilakukan oleh Tim Audit Internal secara berkala dan hasil pemantauan tersebut dilaporkan kepada Presiden Direktur, Direksi dan Komite Audit. Tim Audit Internal juga berkoordinasi dengan pihak terkait untuk menindaklanjuti *corrective action* yang dilakukan terhadap kelemahan pengendalian internal yang ditemukan.

Evaluasi atas Efektivitas Sistem Pengendalian Internal

Perseroan telah menerapkan SPI selaras dengan prinsip-prinsip pengendalian yang berlaku. Hasil evaluasi tersebut menunjukkan bahwa pengendalian internal telah berjalan secara efektif, yang tercermin melalui 2 (dua) proses utama berikut:

1. **Proses level Entitas**
   Terealisasinya peningkatan hasil pengawasan internal pada level entitas. Unit Audit Internal Perseroan semakin meningkatkan mutu pengawasan dan pemeriksaan audit terhadap kinerja pada setiap departemen, cabang dan proyek. Perseroan juga akan langsung menindaklanjuti setiap kritik dan saran yang ditujukan kepada Perseroan, sehingga semua pegawai pada setiap tingkat dapat berkontribusi dengan ikut mengawasi dan melaporkan terjadinya ketidakjujuran pada tiap-tiap wilayah kerja dalam Perseroan. Untuk menjaga komitmen penerapan tata kelola perusahaan, Perseroan telah menerapkan prinsip-prinsip kode etik secara berkesinambungan pada setiap tingkat pekerja.

2. **Proses level Bisnis**
   Adanya peningkatan cakupan pengawasan internal dalam proses level bisnis telah berdampak pada laporan keuangan, terutama dari segi pengenalan risiko yang kini dapat dipertanggungjawabkan dengan lebih akurat dan *accountable*. Hal ini terlihat jelas dari adanya pengawasan internal pada proses persediaan, pelaporan keuangan, penjualan dan piutang.

Perseroan secara rutin melakukan penilaian atas efektivitas pengendalian internal untuk memastikan kesesuaian antara penerapan sistem dengan tujuan yang telah ditetapkan serta manfaat yang dihasilkan. Evaluasi ini dilakukan guna menilai kemampuan SPI dalam mengidentifikasi dan memitigasi risiko secara tepat waktu, sekaligus memastikan kepatuhan terhadap kebijakan internal dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pada tahun 2025, hasil evaluasi atas penerapan SPI menunjukkan bahwa pengendalian internal tetap sejalan dengan prinsip-prinsip pengendalian yang berlaku. Secara umum, sistem yang diterapkan telah berfungsi dengan baik dan efektif dalam mendukung kelancaran operasional Perseroan.

Pernyataan Direksi dan/atau Dewan Komisaris atas Kecukupan Sistem Pengendalian Internal

Peran aktif Dewan Komisaris dan Direksi dalam pengawasan sangat penting untuk memastikan pengendalian internal berjalan dengan baik dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Direksi bertanggung jawab dalam memantau kecukupan dan efektivitas pengendalian internal dengan memastikan seluruh karyawan telah melaksanakan fungsi internal. Sementara itu, Dewan Komisaris memastikan bahwa Direksi telah memantau efektivitas pelaksanaan sistem pengendalian internal dengan mengadakan pertemuan rutin bersama Direksi dan Pejabat Eksekutif untuk membahas efektivitas SPI.

Sepanjang tahun 2025, penerapan pengendalian internal dinilai telah berjalan secara memadai dan efektif dalam mendukung fungsi pengawasan serta pengelolaan risiko Perseroan. Hasil evaluasi yang dilakukan, baik melalui penilaian internal maupun audit eksternal, menunjukkan bahwa SPI tetap konsisten dengan prinsip-prinsip pengendalian yang berlaku dan mampu memastikan pelaksanaan operasional Perseroan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan.

Dalam pelaksanaannya, Dewan Komisaris dengan dukungan Komite Audit menjalankan fungsi pengawasan untuk memastikan efektivitas pengendalian internal secara menyeluruh, termasuk atas kebijakan yang ditetapkan oleh Direksi. Sistem yang diterapkan mampu menjaga keamanan aset, menjamin keandalan pelaporan keuangan, serta memastikan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Atas dasar tersebut, SPI diyakini telah berperan penting dalam mendukung pencapaian tujuan Perseroan, mengendalikan risiko, dan menjaga keberlangsungan usaha dalam jangka panjang.

Manajemen **Risiko**

Manajemen risiko berperan krusial dalam mendukung kelancaran kegiatan operasional Perseroan serta memastikan tercapainya target kinerja dan pelaksanaan rencana bisnis. Untuk meminimalkan potensi gangguan yang dapat memengaruhi operasional, Perseroan menerapkan sistem manajemen risiko yang dirancang secara efektif dan memadai sebagai bagian dari pengendalian usaha secara menyeluruh.

Perseroan mengelola risiko dengan memperhatikan berbagai faktor internal dan eksternal yang berpotensi memengaruhi keberlanjutan usaha. Proses pengelolaan risiko dilaksanakan secara terstruktur, sistematis, dan menyeluruh dengan mengedepankan prinsip kehati-hatian. Selain berfungsi sebagai alat mitigasi, pengelolaan risiko juga menjadi bagian penting dalam memperkuat penerapan prinsip GCG, guna memastikan praktik usaha yang sehat serta penciptaan nilai tambah yang berkelanjutan bagi para pemangku kepentingan.

Perseroan terus menyempurnakan prosedur dan metodologi manajemen risiko untuk mengidentifikasi, menganalisis, mengevaluasi, dan memitigasi berbagai potensi risiko. Upaya ini dilakukan guna mendukung pencapaian tujuan Perseroan secara efektif dan efisien serta memberikan keyakinan kepada para pemangku kepentingan.

Pengelola Risiko Korporat

Pengelolaan risiko di Perseroan melibatkan partisipasi aktif seluruh insan Perseroan di setiap tingkatan organisasi. Pendekatan *top-down* diterapkan melalui keterlibatan Direksi dalam penilaian risiko strategis secara menyeluruh, sementara pendekatan *bottom-up* dilakukan dengan melibatkan

Pemimpin Departemen, Cabang, dan Entitas Anak dalam mengidentifikasi serta mengevaluasi risiko spesifik pada masing-masing unit usaha.

Tanggung jawab koordinasi dan pelaksanaan manajemen risiko secara terpusat diemban oleh Departemen *Enterprise Risk Management* (ERM) di Kantor Pusat, dengan berpedoman pada kerangka kerja, kebijakan, dan prosedur manajemen risiko yang berlaku.

Departemen ERM

Departemen ERM memiliki peran sentral dalam mengoordinasikan pengelolaan risiko usaha yang telah diidentifikasi oleh seluruh unit kerja di Perseroan. Dalam menjalankan fungsinya, Departemen ERM mengemban tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

1. Mengembangkan serta mengusulkan konsep dan kerangka kerja manajemen risiko, *appetite* risiko, filosofi risiko, toleransi risiko, kebijakan & prosedur, struktur manajemen risiko yang akan diimplementasikan kepada Presiden Direktur yang sejalan dengan visi dan misi Perusahaan.
2. Mengimplementasi dan mengkomunikasikan kebijakan & prosedur manajemen risiko secara berkelanjutan dan konsisten.
3. Memastikan bahwa seluruh risiko-risiko utama/signifikan Perusahaan telah diidentifikasi, diukur, dan mitigasi secara tepat.
4. Mengajukan risiko prioritas yang perlu mendapat perhatian segera dari Manajemen atas profil risiko yang ada, dengan mempertimbangkan dampak dan tingkat kemungkinan terjadinya (*likelihood*) risiko setelah dilakukan penilaian atas efektivitas pengendalian internal yang ada.
5. Memastikan dan memantau secara terus menerus implementasi dari rencana mitigasi risiko yang telah ditetapkan sesuai dengan target waktu yang ada.
6. Mengkaji dan memberikan masukan kepada para pemimpin Cabang/Divisi/Departemen/Entitas Anak terkait rencana mitigasi risiko termasuk bilamana timbul isu baru dalam proses implementasi rencana mitigasi yang telah ditetapkan.
7. Melakukan validasi dan verifikasi (terutama atas risiko utama) terkait kontrol risiko yang ada serta perkembangan implementasi rencana mitigasi/*action plan* risiko melalui kunjungan langsung lapangan ke Cabang/Divisi/Departemen/Entitas Anak.
8. Melakukan sosialisasi berkelanjutan untuk mengembangkan budaya peduli, memiliki dan kesadaran risiko dengan menekankan bahwa risiko adalah tanggung jawab seluruh insan di AKR.
9. Membuat dan melaporkan Laporan Manajemen Risiko Konsolidasi kepada Presiden Direktur dan Direktur terkait secara periodik.

Risiko yang dihadapi Perseroan dan Upaya Pengelolaan Risiko

Dalam menghadapi dinamika usaha sepanjang tahun 2025, AKR secara proaktif mengidentifikasi berbagai potensi risiko dan menyusun strategi mitigasi untuk mengelola risiko-risiko tersebut, sebagai berikut:

No	Jenis Risiko dan Penjelasan	Upaya Pengelolaan Risiko
1.	**Risiko Negara** Kondisi makro ekonomi Indonesia, kondisi politik, dan peraturan pemerintah mempengaruhi Perseroan dan perusahaan-perusahaan lain yang beroperasi di Indonesia. Kegiatan usaha Perseroan dipengaruhi oleh kondisi makroekonomi, stabilitas politik, serta kebijakan pemerintah di Indonesia. Perubahan kondisi global dan domestik, termasuk dinamika geopolitik dan ekonomi, dapat berdampak langsung maupun tidak langsung terhadap kinerja dan kelangsungan usaha Perseroan. a. Risiko Ekonomi dan Geopolitik Krisis di Timur Tengah berdampak pada perekonomian global, yang menyebabkan kenaikan harga komoditas, khususnya minyak dan bahan kimia dasar, serta memengaruhi rantai pasok. Hal ini menimbulkan risiko signifikan bagi Perseroan apabila tidak dimitigasi dengan tepat. Selain itu, faktor-faktor seperti tingkat inflasi, pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB), perpajakan, serta berbagai perkembangan politik dan ekonomi di Indonesia juga menghadirkan risiko yang perlu dipertimbangkan secara cermat.	Perseroan secara aktif memantau perkembangan ekonomi makro, dinamika geopolitik, serta perubahan kebijakan pemerintah yang relevan dengan kegiatan usaha guna mengidentifikasi potensi dampak terhadap operasional dan kinerja keuangan sejak dini. Perseroan menjaga komunikasi yang intensif dan konstruktif dengan regulator, asosiasi industri, serta mitra strategis untuk memperoleh informasi terkini sekaligus mengantisipasi perubahan kebijakan yang dapat memengaruhi kegiatan usaha. Selain itu, Perseroan menerapkan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaan biaya dan penetapan harga, serta bersikap *prudent* dalam analisis kredit dengan berfokus pada kinerja pelanggan. Kehati-hatian juga diterapkan dalam pengeluaran dan keputusan investasi, yang didukung oleh evaluasi berkala terhadap strategi bisnis guna memastikan kemampuan adaptasi terhadap perubahan kondisi eksternal serta menjaga keberlanjutan usaha.

No	Jenis Risiko dan Penjelasan	Upaya Pengelolaan Risiko
	b. Risiko Perubahan Kebijakan Pemerintah Perseroan menghadapi risiko yang berkaitan dengan perubahan kebijakan pemerintah yang dapat menghambat maupun menciptakan peluang bagi kegiatan usahanya di Indonesia. Perubahan kebijakan di bidang perpajakan, pengendalian mata uang, suku bunga, pembatasan impor-ekspor, formulasi subsidi bahan bakar, regulasi ketenagakerjaan, perizinan, serta kebijakan investasi dapat memengaruhi kinerja Perseroan. Sebagian besar produk petroleum dan bahan kimia dasar yang diperdagangkan dan didistribusikan oleh Perseroan merupakan produk impor. Setiap perubahan regulasi, larangan impor, pembatasan kuota impor, bea masuk, atau tarif impor yang menghambat kegiatan impor atau meningkatkan biaya impor dapat memengaruhi kinerja Perseroan. Pemberian kontrak distribusi bahan bakar untuk tahun-tahun berikutnya tidak hanya bergantung pada proses tender pemerintah dan kebijakan deregulasi yang berlaku, tetapi juga pada kemampuan Perseroan dalam memenuhi kriteria yang dipersyaratkan.	
2.	**Risiko Industri** Pasokan dan permintaan dari industri tempat Perseroan beroperasi juga mempengaruhi kinerja Perseroan. Segmen perdagangan dan distribusi dipengaruhi oleh permintaan terhadap bahan kimia dasar dan produk petroleum. Permintaan atas produk-produk tersebut sangat berkaitan dengan kondisi perekonomian Indonesia, baik secara nasional maupun regional. Segmen jasa logistik juga menghadapi risiko yang berkaitan dengan ketergantungan terhadap tingkat permintaan. Perseroan menyediakan jasa logistik dan fasilitas infrastruktur distribusi kepada pihak ketiga di Indonesia. Perlambatan ekonomi di Indonesia maupun secara global dapat memengaruhi perdagangan internasional, yang pada akhirnya berpotensi menurunkan aktivitas pengiriman dan permintaan terhadap jasa logistik. Selain risiko pasokan dan permintaan, Perseroan juga menghadapi risiko industri yang terkait dengan perubahan struktur pasar energi dan bahan kimia, termasuk transisi menuju energi yang lebih ramah lingkungan, perubahan preferensi pelanggan, serta ketergantungan pada sektor industri dan pelanggan tertentu.	Untuk memitigasi risiko tersebut, Perseroan terus meningkatkan infrastruktur logistik untuk distribusi energi dan bahan baku industri, menjaga hubungan yang kuat dengan para pemasok, serta meningkatkan kualitas layanan kepada pelanggan. Perseroan juga melakukan diversifikasi portofolio bisnis dan pelanggan, meningkatkan efisiensi operasional melalui pemanfaatan teknologi, serta secara aktif memantau tren industri untuk memastikan keberlanjutan dan daya saing usaha jangka panjang. Perseroan secara bertahap mengembangkan dan memperkuat sistem teknologi informasi dan digitalisasi proses operasional untuk meningkatkan efisiensi, akurasi, dan keandalan layanan, serta memitigasi risiko disrupsi teknologi di industri.

No	Jenis Risiko dan Penjelasan	Upaya Pengelolaan Risiko
	Disrupsi rantai pasok global serta perkembangan teknologi dan digitalisasi dalam industri logistik dan distribusi juga berpotensi mempengaruhi daya saing Perseroan. Risiko disrupsi teknologi juga mencakup potensi ketertinggalan Perseroan dalam adopsi teknologi informasi, otomatisasi operasional, dan sistem digital rantai pasok, yang dapat mempengaruhi efisiensi, keandalan layanan, serta daya saing Perseroan dibandingkan pelaku usaha lain di industri.	
3.	**Risiko Operasional** Risiko Operasional timbul apabila Perseroan tidak berhasil memenuhi prosedur operasi standar, gagalnya manajemen pegawai, gangguan pada sistem, dan faktor atau kejadian eksternal seperti perubahan cuaca, bencana alam, putusnya rantai pasokan. Risiko-risiko ini terkait dengan operasional harian Perseroan.	Perseroan menetapkan standar prosedur operasional yang senantiasa diperbarui dan disempurnakan untuk meminimalkan risiko serta memastikan keselarasan dengan kebutuhan bisnis dan perkembangan teknologi. Selain itu, Perseroan telah mengembangkan sistem teknologi dan operasional cadangan untuk menjaga keberlangsungan fungsi operasional apabila terjadi kegagalan pada sistem utama. Sistem TI terpusat mendukung pemantauan dalam kegiatan penyimpanan dan distribusi produk. Karyawan yang bertanggung jawab atas sistem tersebut memperoleh pelatihan secara berkala guna meningkatkan kompetensi dan kesiapan dalam mengelola sistem serta peralatan operasional. Untuk memastikan pengelolaan risiko operasional yang efektif dan berkelanjutan, Perseroan menerapkan pendekatan *Three Lines of Defence*, yaitu: a) unit bisnis mengelola risiko operasional harian sebagai pengendalian preventif, b) fungsi Manajemen Risiko berperan sebagai pengendalian detektif, dan c) *Quality Assurance*/Audit Internal berfungsi sebagai pengendalian korektif.
4.	**Risiko Keselamatan, Kesehatan dan Lingkungan** Perseroan mungkin menemui risiko Keselamatan, Kesehatan, dan Lingkungan (*Safety, Health and Environment*/SHE) mengingat Perseroan bergerak di bidang usaha bahan kimia dasar dan bahan bakar minyak, pabrikan, dan logistik. Risiko-risiko ini mencakup kebakaran, tumpahan produk, kesalahan dalam penanganan limbah, peralatan yang tidak berfungsi, kegagalan sistem, dan sebagainya. Risiko SHE tidak hanya mempengaruhi Perseroan namun juga mempengaruhi masyarakat di sekitar daerah operasional.	Untuk memitigasi risiko berbahaya tersebut, Perseroan menerapkan peraturan keselamatan kerja yang ketat dan terperinci serta memberikan pelatihan kepada karyawan untuk menangani situasi yang tidak terduga. Prosedur SHE (*Safety, Health, and Environment*) senantiasa diperbarui sesuai dengan peraturan pemerintah, standar industri, serta sertifikasi yang berlaku di wilayah tertentu.
5.	**Risiko Keuangan** Risiko utama yang dihadapi Perseroan dalam instrumen keuangan adalah risiko kredit, risiko pasar (termasuk risiko tingkat bunga, risiko nilai tukar mata uang asing, risiko harga komoditas), dan risiko likuiditas.	Terkait risiko kredit, Perseroan menerapkan pengawasan yang ketat dalam pemberian kredit kepada pelanggan. Untuk mengelola risiko fluktuasi harga komoditas dan volatilitas nilai tukar mata uang asing, Perseroan mengadopsi model bisnis yang stabil dengan formula berbasis harga serta memitigasi risiko valuta asing melalui lindung nilai (*hedging*). Pengelolaan risiko keuangan Perseroan dijabarkan secara rinci dalam laporan keuangan konsolidasian yang telah diaudit oleh Purwanto Susanti dan Surja (anggota dari Ernst & Young).

No	Risiko	Key Initiatives
1.	Risiko kepatuhan dan perubahan peraturan/kebijakan pemerintah	• AKR secara proaktif berpartisipasi dalam pertemuan, forum, dan diskusi dengan pemerintah serta asosiasi industri terkait untuk mengantisipasi kebijakan yang berdampak pada industri yang digeluti Perseroan • *Monitoring* & analisa perubahan hukum dan regulasi yang berdampak pada bisnis AKR. • Melakukan sosialisasi ke pihak internal yang terkait terhadap adanya perubahan regulasi pemerintah dengan tepat waktu dan terkoordinasi. • Penggunaan sistem dalam melakukan *monitoring renewal*/pembaharuan izin & lisensi usaha Perseroan.
2.	Risiko SHE	• Menjalankan Prosedur Operasi Standar (SOP) Keselamatan, Kesehatan dan Lingkungan secara konsisten di seluruh area operasional. • Melaksanakan training & sosialisasi untuk mengingatkan akan pentingnya penerapan SHE. • Pelaksanaan *safety observation* (SOR) serta audit kepatuhan terhadap SOP dan *Working Instruction* (WI). • Pembaharuan kebijakan maupun SOP sesuai dengan perkembangan regulasi dan *standard* industri. • Melakukan *checklist* peralatan dan fasilitas keselamatan secara periodik guna memastikan kesiapan operasional.
3.	Risiko perubahan lingkungan bisnis, kondisi pasar dan pengembangan bisnis untuk mendukung pertumbuhan (*growth*).	• Proaktif dalam konferensi yang membahas tentang perubahan di lingkungan bisnis. • Memperluas jaringan dan membina hubungan dengan pelaku industri serta mitra strategis. • *Monitoring* aktivitas dan perkembangan kompetitor bisnis AKR. • Pengembangan sistem internal guna mempercepat proses analisa dan pengambilan keputusan. • Keberadaan fungsi *business development* untuk mendukung pengembangan produk dan peluang bisnis baru. • Monitor *sales pipeline* secara berkala. • Koordinasi dan pembinaan hubungan yang berkelanjutan dengan Perusahaan *principal*. • Pemantauan tren industri, perubahan struktur pasar energi dan bahan kimia, serta dampak transisi energi terhadap permintaan produk dan jasa Perseroan.
4.	Risiko Operasional	• Penerapan dan pembaruan Prosedur Operasi Standar (SOP) operasional sesuai kebutuhan bisnis dan perkembangan teknologi. • Pelatihan berkala bagi karyawan operasional untuk meningkatkan kompetensi dan kesiapsiagaan terhadap gangguan operasional. • Penggunaan sistem teknologi informasi terpusat untuk mendukung pemantauan penyimpanan, distribusi, dan logistik. • Penyediaan sistem cadangan (*backup system*) guna menjaga kelangsungan operasional. • Penerapan pendekatan *Three Lines of Defence* dalam pengelolaan risiko operasional.
5.	Risiko finansial	1. Risiko Kredit • Batasan-Batasan kredit (*credit limit*) ditentukan untuk semua pelanggan berdasarkan kriteria penilaian secara internal (analisa 5C). • Penerapan kebijakan *Cash before delivery* untuk pelanggan tertentu • Pengetatan dna peninjauan kembali pemberian kredit pada kondisi ekonomi global yang mempengaruhi kondisi keuangan pelanggan. • *Monitoring* target dan realisasi *collection* setiap bulan. • Monitor dan *update* terhadap kondisi industri pelanggan. 2. Risiko Likuiditas • Evaluasi dan pengawasan yang ketat atas arus kas masuk (*cash-in*) dan kas keluar (*cash-out*). • Monitor rasio likuiditas secara periodik. 3. Risiko Pasar • *Monitoring* secara ketat fluktuasi suku bunga pasar dan ekspektasi pasar. • Penentuan harga BBM dengan formula. • Pengelolaan risiko fluktuasi mata uang asing melalui *hedging*.

No	Risiko	Key Initiatives
6.	Risiko Teknologi, *cyber* & keamanan informasi	• Penerapan kebijakan keamanan informasi di lingkungan Perseroan. • Penggunaan sistem anti-virus dan perlindungan terhadap spam. • Pembatasan akses dokumen dan sistem, termasuk pembatasan penggunaan *external media* (USB, *external hard disk*), serta pengaturan akses internet sesuai kebutuhan/ kepentingan pihak yang terkait. • Pelaksanaan kampanye IT *security awareness* secara regular. • Penguatan dan pengembangan sistem teknologi informasi untuk meningkatkan efisiensi operasional dan memitigasi risiko disrupsi teknologi.
7.	Risiko pengembangan *human capital*	• Kampanye dan sosialisasi untuk meningkatkan pemahaman & implementasi nilai-nilai Perseroan melalui media internal. • Evaluasi kinerja secara berkala melalui bagian *People Development*. • Pelaksanaan program pengembangan dan pelatihan karyawan secara berkelanjutan. • Pengembangan perencanaan suksesi & *road maps* pengembangan talenta khususnya untuk fungsi-fungsi kritikal.

Evaluasi atas Efektivitas Sistem Manajemen Risiko

Penguatan kerangka kerja pengelolaan risiko dan pengendalian internal yang terintegrasi terus dilakukan Perseroan secara berkesinambungan. Hal ini memungkinkan Perseroan mendeteksi potensi risiko sejak awal serta mengambil langkah pengendalian yang efektif guna menjaga stabilitas dan kinerja usaha.

Penerapan Manajemen Risiko yang efektif memberikan kontribusi nyata terhadap kualitas perencanaan dan pengambilan keputusan Perseroan. Pendekatan yang sistematis memungkinkan Perseroan mengendalikan risiko secara lebih optimal, baik dari sisi dampak maupun kemungkinan terjadinya. Keberhasilan pengelolaan ini tercermin pada capaian mitigasi risiko yang semakin berkualitas dan tepat waktu. Informasi risiko yang tersaji secara jelas turut mendukung manajemen dalam merumuskan keputusan strategis bagi operasional Perseroan dan Entitas Anak.

Peran Aktif Dewan Komisaris dan Direksi

Dewan Komisaris berperan dalam memastikan efektivitas penerapan manajemen risiko Perseroan, yang meliputi:
1. Memberikan arahan dan rekomendasi kepada Direktur dalam mengawasi praktik dan implementasi manajemen risiko di Perseroan.
2. Mengkaji dan memastikan bahwa Perseroan dan entitas anak memiliki kerangka kerja dan proses manajemen risiko yang tepat sesuai dengan kebutuhan bisnis yang ada.

Direksi berperan dalam memastikan efektivitas penerapan manajemen risiko Perseroan, yang meliputi:
1. Mengembangkan budaya manajemen risiko pada seluruh jenjang organisasi dengan pendekatan *tone from the top* dimana pengembangan budaya risiko dimulai dari *Top Management*.
2. Memastikan efektivitas implementasi manajemen risiko seperti memastikannya untuk menjadi bagian tak terpisahkan dari kegiatan operasional Perseroan.
3. Mengkaji profil dan laporan risiko Perseroan, hal ini termasuk memastikan & memberikan pandangan terkait risiko-risiko utama yang harus mendapatkan prioritas dalam mitigasi risiko.
4. Mengkaji kontrol mitigasi yang telah ditetapkan guna memastikan realisasi implementasi mencukupi dan tepat waktu.
5. Memastikan kecukupan sumber daya manusia dalam mengelola risiko stratejik termasuk penetapan tingkatan toleransi dan perlakuan risiko untuk masing-masing strategi.

Penguatan *Governance, Risk, and Compliance* dalam Menyikapi Rezim Hukum Pidana Baru

Perseroan secara aktif memantau perkembangan regulasi, termasuk pemberlakuan rezim hukum pidana nasional yang baru melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHAP. Dalam menanggapi perubahan tersebut, Perseroan melakukan penyesuaian kebijakan dan prosedur internal, serta memperkuat fungsi kepatuhan guna memastikan seluruh kegiatan usaha tetap sejalan dengan ketentuan yang berlaku.

Upaya Peningkatan Budaya Sadar Risiko

AKR senantiasa meningkatkan kualitas implementasi manajemen risiko sebagai upaya untuk memastikan akurasi identifikasi dan efektivitas pengelolaan risiko. Perseroan juga menegaskan komitmennya dalam mengintegrasikan praktik manajemen risiko ke seluruh tingkat manajemen sebagai bagian dari proses bisnis sehari-hari.

Sejalan dengan upaya tersebut, sepanjang tahun 2025 Perseroan telah melaksanakan berbagai inisiatif untuk menumbuhkan budaya kesadaran risiko, antara lain:

1. Melakukan resosialisasi/*refreshment* mengenai manajemen risiko dan praktiknya kepada *risk owner* di cabang.
2. Melakukan sosialisasi mengenai manajemen risiko dan praktiknya kepada karyawan baru yang bergabung di Perseroan.
3. Melakukan survey untuk mengetahui pemahaman karyawan terhadap budaya sadar risiko.

Pernyataan Direksi, Dewan Komisaris dan/atau Komite Audit atas Kecukupan Sistem Manajemen Risiko

Manajemen risiko diposisikan sebagai lini pertahanan utama dalam menjaga keberlangsungan operasional Perseroan. Direksi secara konsisten melakukan evaluasi atas efektivitas penerapan manajemen risiko, mencakup keandalan kebijakan, prosedur, mekanisme, serta infrastruktur pendukung. Dalam pelaksanaannya, Dewan Komisaris bersama Komite Audit menjalankan fungsi pengawasan dan evaluasi atas implementasi manajemen risiko oleh Direksi.

Direksi memberikan fokus pada manajemen risiko keamanan digital mencakup perlindungan data dan privasi. Keandalan teknologi informasi merupakan faktor penting dalam menjaga keberlangsungan bisnis AKR yang didukung oleh jaringan konektivitas di seluruh Indonesia. Untuk itu, Perseroan menerapkan kebijakan dan prosedur keamanan siber yang komprehensif guna melindungi kerahasiaan, integritas, ketersediaan informasi, serta mencegah potensi kebocoran data. Selain itu, langkah seperti enkripsi data, *Multi-Factor Authentication* (MFA), data *masking*, dan tokenisasi dilakukan agar memastikan bahwa akses terhadap informasi strategis hanya diberikan kepada pihak yang memiliki wewenang.

Pada tahun 2025, Direksi telah mengindentifikasi risiko internal dan eksternal yang mempengaruhi operasional Perseroan dengan prosedur mitigasi yang cukup untuk mengelola risiko tersebut. Berdasarkan hasil evaluasi, sistem manajemen risiko Perseroan telah diterapkan secara efektif dan memadai, dengan semua prosedur, mekanisme, dan infrastruktur yang ada. Sampai saat ini, Direksi menilai bahwa tidak ada kebutuhan untuk melakukan perubahan pada kebijakan manajemen risiko. Sehingga pada tahun 2025, kebijakan manajemen risiko yang ada dinilai masih relevan dan belum memerlukan penyesuaian.

Permasalahan **Hukum**

Sepanjang tahun 2025, tidak terdapat perkara hukum baik perdata maupun pidana yang bersifat material yang dihadapi Perseroan, anak Perusahaan, Dewan Komisaris, maupun Direksi.

Permasalahan hukum yang dihadapi entitas anak secara tidak langsung dalam bentuk ikatan perjanjian telah diungkapkan dalam Laporan Keuangan Konsolidasian yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 (*audited*) pada Catatan 33 huruf C. Tidak terdapat permasalahan hukum yang secara material berpengaruh terhadap status, kedudukan dan kelangsungan kegiatan usaha Perseroan.

Sanksi **Administratif**

Hingga akhir tahun 2025, tidak terdapat sanksi administratif yang dikenakan otoritas pasar modal atau otoritas lainnya kepada AKR, anggota Dewan Komisaris, dan Direksi.



Akses Informasi dan **Data Perusahaan**

Bagi AKR, keterbukaan informasi menjadi bagian penting dari penerapan prinsip-prinsip GCG. Perseroan memastikan bahwa seluruh pemangku kepentingan, termasuk pemegang saham, investor, mitra bisnis, serta masyarakat umum mendapatkan informasi yang akurat dan andal. Data dan informasi yang disampaikan mengenai kinerja, kebijakan, serta pengambilan keputusan strategis Perseroan.

Ketersediaan dan pengelolaan informasi yang transparan berperan dalam memperkuat kepercayaan publik dan pemangku kepentingan terhadap. Untuk itu, Perseroan secara berkelanjutan menyampaikan informasi yang aktual dan bermanfaat dengan tetap berpedoman pada ketentuan peraturan yang berlaku, guna memenuhi kebutuhan pemangku kepentingan atas informasi terkait kegiatan dan perkembangan Perseroan.

Perseroan memfasilitasi komunikasi dengan pemangku kepentingan melalui Sekretaris Perusahaan dan Divisi Investor Relation guna memastikan setiap permintaan informasi yang sah ditangani sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Melalui sarana tersebut, publik dapat memperoleh akses terhadap laporan keuangan, informasi perusahaan, publikasi resmi, informasi produk, serta aksi korporasi Perseroan.

Situs web resmi AKR adalah sarana utama penyampaian informasi kepada publik. Informasi yang disajikan tersedia dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris guna menjangkau seluruh pemangku kepentingan. Perseroan juga menyediakan saluran komunikasi melalui surat elektronik di ir@akr.co.id dan layanan telepon di +62215311110. Selanjutnya, Perseroan secara konsisten menyampaikan informasi dan fakta material melalui sistem pelaporan elektronik kepada Otoritas Jasa Keuangan dan Bursa Efek Indonesia. Akses informasi yang dimiliki oleh Perseroan adalah sebagai berikut:

1. ***Online***
   Situs web Perseroan yang beralamat di www.akr.co.id yang tersedia dalam 2 (dua) bahasa yaitu Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris memuat informasi mengenai:
   a. Profil Perseroan
   b. Visi dan Misi
   c. Model Bisnis
   d. Informasi Keuangan
   e. Berita Terbaru
   f. Presentasi Perusahaan
   g. Tata Kelola Perusahaan
   h. Kinerja Lingkungan, Sosial, dan GCG
   i. Keterbukaan Informasi, dan lain-lain
2. **Media Sosial**
   a. Youtube
   b. Instagram
   c. Facebook
   d. Twitter
   e. Linkedin
3. **Surat menyurat/Surel**
   Alamat surat-menyurat Perseroan:
   AKR Tower Lantai 26
   Jl. Panjang No.5, Kebon Jeruk, Jakarta Barat 11530.
   Email yang ditujukan ke *Corporate Secretary* dengan alamat *email*: corporate.secretary@akr.co.id
4. **Keterbukaan Informasi**
   Surat resmi melalui Electronic Reporting kepada OJK dan Bursa Efek Indonesia (www.idx.co.id)

Jalinan Keterikatan dan **Komunikasi Investor**

Melalui pendekatan komunikasi yang terbuka dan informatif, Perseroan memastikan investor memperoleh akses yang memadai terhadap informasi penting, mencakup kinerja keuangan, strategi bisnis, dan penerapan GCG. Divisi Investor Relations menjalankan perannya dengan menjaga hubungan yang efektif antara Manajemen dan pemangku kepentingan eksternal, melalui pemanfaatan berbagai saluran komunikasi dan penyelenggaraan kegiatan interaksi langsung.

Secara berkala, Perseroan mengadakan kegiatan yang sifatnya memberikan informasi kepada pihak eksternal mengenai kinerja operasional dan keuangan Perseroan melalui:

1. Kegiatan hubungan investor (*analyst meeting* dan *roadshow* ke berbagai lembaga investasi);
2. Paparan publik tahunan;
3. *Update website* Perseroan secara berkala (www.akr.co.id);
4. Penyebaran informasi secara berkala berupa news release kepada para pemangku kepentingan; dan
5. Keterbukaan informasi yang disampaikan kepada Bursa Efek Indonesia.

Dengan mengedepankan keterbukaan informasi, Perseroan memastikan investor memiliki akses terhadap informasi yang akurat dan terkini sebagai dasar pengambilan keputusan. Penyampaian informasi publik dilakukan secara rutin melalui blast email dan berbagai kanal media sosial. Perseroan berkomitmen untuk menjaga kualitas, kelengkapan, dan kesetaraan penyampaian informasi kepada seluruh pemangku kepentingan.

Profil Kepala Bagian Investor Relation



Ignatius Teguh Prayoga

Ketua Investor Relation

Bergabung sejak
28 September 2022

Usia
34 Tahun

Riwayat Pendidikan
- Master of Business Administration, IE Business School, Madrid and Singapore Management University (2018); dan
- Sarjana Akuntansi, Universitas Gadjah Mada (2009).

Riwayat Jabatan
- Senior Equity Analyst, PT BRI Danareksa Sekuritas (2018–2022);
- Research Assistant, PT BRI Danareksa Sekuritas (2017–2018);
- Foreign Exchange Trading Officer, PT Danareksa Persero (2016–2017);
- Treasury Sales Officer, PT Danareksa Persero (2016); dan
- Analis Intern, Deparment Kebijakan Ekonomi dan Moneter, Bank Indonesia (2014– 2015)

Jabatan Asosiasi
Wakil Ketua, Association of Indonesian Investor Relations (2025–sekarang)

Pelaksanaan Tugas Investor Relation Tahun 2025

Investor Relation melaksanakan berbagai program utama untuk memastikan terselenggaranya komunikasi yang transparan, konsisten dan kredibel dengan para pemangku kepentingan, khususnya investor dengan analisis pasar modal. Pelaksanaan tugas tersebut sepanjang tahun 2025 sebagai berikut:

1. Partisipasi dalam paparan publik yang diadakan secara mandiri oleh Perseroan maupun yang difasilitasi oleh bursa:
   - Penyusunan materi presentasi yang mencakup kinerja keuangan, perkembangan operasional, strategi bisnis, serta prospek perusahaan.

- Koordinasi dengan manajemen senior sebagai narasumber.
- Menjawab pertanyaan investor serta memastikan seluruh informasi yang disampaikan sesuai dengan prinsip keterbukaan informasi.

2. Menghadiri konferensi, *non-deal roadshow*, dan pertemuan dengan broker untuk memperluas eksposur AKR:
   - Partisipasi dalam *investment conferences* baik di dalam maupun di luar negeri.
   - Melakukan *non-deal roadshow* untuk memperkuat hubungan dengan investor institusi dan memperluas basis investor baru.
   - Pertemuan rutin dengan broker dan analis untuk memberikan informasi terkini mengenai performa dan strategi perusahaan.
3. Mengadakan *briefing* capaian kinerja kuartalan:
   - Menyampaikan laporan kinerja kuartal yang telah dipublikasikan.
   - Memberikan penjelasan mengenai faktor pendorong kinerja, tantangan, dan prospek ke depan.
   - Menjaga konsistensi narasi perusahaan sehingga persepsi pasar tetap selaras dengan strategi korporasi.
4. Pertemuan tatap muka *one-on-one* maupun *group* dengan pemegang saham *existing* dan calon pemegang saham:
   - Pemegang saham eksisting untuk memastikan mereka memperoleh informasi yang memadai terkait perkembangan AKR.
   - Calon pemegang saham potensial untuk membuka peluang investasi baru. Kegiatan ini bertujuan membangun hubungan jangka panjang serta meningkatkan kepercayaan investor terhadap kinerja dan GCG.
5. Kunjungan ke fasilitas operasional:
   - Menunjukkan proses bisnis dan kapasitas operasional secara langsung.
   - Memberikan kesempatan bagi investor untuk berdialog dengan tim operasional.
   - Meningkatkan kredibilitas AKR melalui transparansi kondisi lapangan.
6. Berpartisipasi dalam kegiatan Asosiasi Investor Relations Indonesia (AIIR):
   - Berpartisipasi dalam seminar, lokakarya, dan program pelatihan AIRI.
   - Mengadopsi praktik terbaik (*best practices*) yang direkomendasikan asosiasi.
   - Membangun jejaring dengan para praktisi lintas industri.

Partisipasi dan Aktivitas Investor Relations Tahun 2025

Tanggal	Aktivitas	Pelaksanaan
13–15 Januari 2025	Nomura ASEAN Conference, Kuala Lumpur	Verdhana Sekuritas
10–14 Februari 2025	Mandiri Investment Forum, Jakarta	Mandiri Securities
20 Februari 2025	JIIPE Site Visit	Self Arranged
3–4 Maret 2025	UBS One ASEAN Conference, Singapore	UBS Securities
10–12 Maret 2025	21st CLSA CITIC ASEAN Conference, Bangkok	CLSA Securities
20 Maret 2025	FY2024 Analyst Call	CLSA Securities
25 April 2025	1Q2025 Result Call	Verdhana Securities
2–6 Juni 2025	UK and Europe Non-Dealing Roadshow	CGS International Securities
28 Juli 2025	1H2025 Result Call	
27 Agustus 2025	CITI C-Suite Conference, Singapore	Citi Securities
28 Agustus 2025	Self Arranged Deal Roadshow, Singapore	Self Arranged
29 Agustus 2025	JIIPE Site Visit	Self Arranged
3–4 September 2025	JP Morgan Indonesia Conference, Jakarta	JP Morgan
8 September 2025	JIIPE Site Visit	Self Arranged
9 September 2025	Public Expose 2025	Indonesia Stock Exchange
10–11 September 2025	32nd CLSA Citic Investors Forum, Hongkong	CLSA Securities
13–14 Oktober 2025	JP Morgan Malaysia+ Forum, Kuala Lumpur	JP Morgan Securities
23 Oktober 2025	9M2025 Result Call	CLSA Securities
21 November 2025	JIIPE Site Visit	Self Arranged

Pedoman Etika **dan Perilaku**

Untuk memperkuat penerapan GCG secara berkelanjutan, Perseroan telah menetapkan dan menerapkan Pedoman Etika dan Perilaku (*Code of Conduct*) sebagai acuan utama perilaku seluruh insan Perseroan. Pedoman ini terakhir diperbarui pada 31 Desember 2023 guna menyesuaikan dengan perkembangan regulasi, dinamika bisnis, serta memastikan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kode Etik menjadi acuan utama bagi seluruh insan Perseroan dalam menjalankan hubungan kerja, baik dengan rekan kerja maupun dengan pihak eksternal. Setiap insan Perseroan diharapkan senantiasa menjunjung tinggi nilai-nilai Perseroan serta menerapkan prinsip etika dalam setiap aktivitas dan proses pengambilan keputusan. Seluruh tindakan yang dilakukan wajib mencerminkan profesionalisme dan integritas.

Kode Etik diterapkan dan disosialisasikan secara menyeluruh kepada seluruh insan Perseroan serta menjadi bagian yang melekat dalam kontrak kerja. Setiap karyawan wajib memahami dan menyetujui pedoman etika tersebut yang diwujudkan melalui penandatanganan Pakta Integritas. Komitmen yang diberikan melalui Pakta Integritas tersebut mencerminkan kesediaan Insan AKR untuk menerapkan etika usaha dan etika kerja secara konsisten dan bertanggung jawab.

Pokok-Pokok Kode Etik

Pendahuluan
1. Latar Belakang
2. Tujuan
3. Ruang Lingkup
4. Istilah dan definisi
5. Referensi

Dasar dan Pedoman Etika Usaha
1. Visi dan Misi Perusahaan
2. Budaya Perusahaan
3. Prinsip Tata Kelola Perusahaan Yang Baik
4. Pedoman Etika (*Code of Ethic*)

Pedoman Perilaku Antar Insan Grup PT AKR Corporindo Tbk
1. Hubungan antar Insan AKR
2. Hubungan dengan Anak Perusahaan dan/atau Perusahaan Patungan

Pedoman Perilaku Hubungan dengan Pemangku Kepentingan
1. Hubungan dengan Penyedia Barang dan Jasa, Mitra Kerja, Kreditur dan Pelanggan
2. Hubungan dengan Pemerintah
3. Persaingan Usaha yang Sehat
4. Hubungan dengan Pemegang Saham
5. Hubungan dengan Masyarakat sekitar Wilayah Operasional
6. Kesetaraan Kesempatan Kerja

Pedoman Perilaku Keselamatan dan Kesehatan Kerja Serta Pengelolaan Lingkungan

Pedoman Perilaku dalam Bekerja
1. Kepatuhan terhadap Hukum dan Peraturan
2. Kerjasama Antar Insan AKR

Pedoman Perilaku Perlindungan Aset Perusahaan
1. Pengawasan dan Penggunaan Aset Perusahaan
2. Kerahasiaan Data dan Informasi Perseroan
3. Hak atas Kekayaan Intelektual Penggunaan Media Sosial dengan Bijaksana

Pedoman Perilaku atas Benturan Kepentingan, Anti Suap dan Gratifikasi
1. Benturan Kepentingan
2. Anti Suap dan Gratifikasi
3. Aktivitas Politik dan Donasi Politik

Prinsip Kode Etik

Prinsip-prinsip kode etik Perseroan adalah sebagai berikut:
1. Ketaatan terhadap Peraturan Perseroan Peraturan Perseroan harus dijunjung tinggi dan dipatuhi oleh seluruh pegawai. Pelanggaran terhadap peraturan atau tata tertib dapat berakibat pada peringatan hingga pemutusan hubungan kerja.
2. Ketaatan untuk menghindari benturan kepentingan Keputusan yang diambil oleh pegawai haruslah dibuat dengan mengutamakan kepentingan Perseroan.
3. Kewajiban untuk menjaga kerahasiaan Perseroan Semua pegawai tidak diperkenankan untuk mengungkapkan informasi yang dapat merugikan Perseroan.

Semua Insan Perseroan tanpa terkecuali diwajibkan untuk:
1. Patuh terhadap peraturan Perusahaan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan memperhatikan keamanan, keselamatan, Kesehatan, dan lingkungan.
2. Mengambil Keputusan yang sesuai dengan visi misi, budaya Perusahaan, pedoman etika Perusahaan, pedoman perilaku, peraturan Perusahaan, prinsip GCG, ketentuan dalam anggaran dasar Perseroan, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3. Bertindak profesional dan menjunjung tinggi integritas dalam melakukan Tindakan yang mengatasnamakan AKR dan/atau Grup AKR, di antaranya dengan tidak menyalahgunakan pengetahuan, jabatan atau wewenang, di antaranya dengan tidak terlibat dalam tindak pidana yang bersifat perorangan maupun Korporasi serta tidak melakukan kecurangan dalam bentuk apapun yang merugikan Grup AKR.
4. Mencegah dan menghindari terjadinya benturan kepentingan (*conflict of interest*), atau potensi timbulnya benturan kepentingan dengan AKR dan/atau Grup AKR serta para pemangku kepentingan Perseroan.
5. Saling menghormati dan membina hubungan yang baik, menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan antar sesama rekan kerja, bawahan, atasan, pemegang saham dan pemangku kepentingan.
6. Segera melaporkan pelanggaran yang terjadi dan/atau akan mungkin terjadi terhadap kode etik, pedoman, perilaku, peraturan Perusahaan, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan kebijakan serta prosedur yang ditetapkan oleh AKR kepada atasan maupun melalui mekanisme *whistleblowing system*.
7. Siap bertanggung jawab atas pelanggaran kode etik yang berakibat sanksi hukuman termasuk pada pemutusan hubungan kerja dan penyelesaian melalui jalur hukum sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pemberlakuan Kode Etik Bagi Seluruh Level Organisasi

Kode Etik diberlakukan oleh Perseroan sebagai pedoman perilaku yang harus dipahami dan dipatuhi oleh seluruh insan Perseroan, mulai dari jajaran Dewan Komisaris dan Direksi hingga karyawan. Pedoman ini menjadi dasar dalam pelaksanaan tugas dan pengambilan keputusan agar senantiasa dilakukan dengan menjunjung tinggi integritas, profesionalisme, serta prinsip GCG. Untuk memastikan efektivitas penerapannya, Direksi dan Komite Audit menjalankan fungsi pengawasan secara berkesinambungan.

Pelaksanaan Kode Etik diperkuat melalui sosialisasi dan program pelatihan yang dilakukan secara rutin, disertai mekanisme pengawasan kepatuhan dalam kegiatan operasional sehari-hari. Setiap bentuk pelanggaran terhadap Kode Etik akan ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan yang berlaku, sebagai bagian dari upaya Perseroan dalam menjaga lingkungan kerja yang etis, transparan, dan bertanggung jawab.

Penyebarluasan Kode Etik

Kode Etik dikomunikasikan kepada seluruh Insan AKR melalui sejumlah sarana, meliputi:
1. *Website* Perseroan www.akr.co.id
2. Laporan Tahunan
3. *Newsletter*
4. Buku saku
5. Materi orientasi pegawai baru; dan lain-lain

Upaya Penegakan dan Sanksi Pelanggaran Kode Etik

Setiap insan Perseroan menyatakan komitmennya terhadap Kode Etik sejak awal masa kerja melalui penandatanganan dokumen kepatuhan. Komitmen tersebut diharapkan tercermin dalam perilaku dan pengambilan keputusan sehari-hari di lingkungan kerja. Perseroan secara berkala melaksanakan kegiatan sosialisasi, pembinaan, dan penguatan budaya etika di seluruh tingkatan organisasi untuk menjaga konsistensi penerapan Kode Etik.

Perseroan menerapkan mekanisme penegakan disiplin atas setiap pelanggaran Kode Etik secara tegas dan berjenjang, dengan mempertimbangkan tingkat pelanggaran serta dampak yang ditimbulkan. Sanksi dikenakan sesuai ketentuan yang berlaku, mulai dari peringatan tertulis hingga pemutusan hubungan kerja bagi pelanggaran berat. Seluruh proses penanganan pelanggaran dilaksanakan secara adil, transparan, dan akuntabel guna menjaga integritas Perseroan serta menciptakan lingkungan kerja yang menjunjung tinggi etika dan profesionalisme.

Sanksi untuk Masing-Masing Jenis Pelanggaran yang Diatur dalam Kode Etik

Setiap karyawan yang terbukti melanggar Kode Etik Perseroan akan dikenakan sanksi sesuai dengan tingkat pelanggaran, antara lain:

No	Jenis Pelanggaran	Jenis Sanksi
1.	Pelanggaran kewajiban tanpa menimbulkan kerugian	Teguran lisan
2.	Pengulangan kesalahan pertama maksimum 2 (dua) kali	Teguran tertulis
3.	Pelanggaran atas kehadiran, kebersihan, dsb.	Surat Peringatan Pertama (SP 1)
4.	Pengulangan kesalahan yang tercantum pada SP I, pada taraf batas yang tercantum pada SP I	Surat Peringatan Kedua (SP II)
5.	Pengulangan kesalahan yang tercantum pada SP II, pada taraf batas yang tercantum pada SP II yang menimbulkan kerugian	Surat Peringatan Kedua (SP III)
6.	Pelanggaran yang menimbulkan kerugian pada Perusahaan pada taraf berat	Pemutusan Hubungan Kerja (PHK)

Sepanjang tahun 2025, Perseroan tidak mencatat adanya pelanggaran terhadap Kode Etik. Kondisi ini mencerminkan tingkat kepatuhan yang tinggi dari seluruh insan Perseroan terhadap prinsip-prinsip etika yang berlaku, sekaligus menunjukkan efektivitas sistem pengawasan dan mekanisme penegakan Kode Etik yang diterapkan secara konsisten oleh Perseroan.

Kebijakan Pemberian Kompensasi Jangka **Panjang Berbasis Kinerja Kepada Manajemen dan/atau Karyawan**

Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan tanggal 29 April 2024 menyetujui pelaksanaan Program Kepemilikan Saham Manajemen dan Karyawan (*Management Employee Stock Option Plan*/MESOP). Pelaksanaan program MESOP oleh AKR mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 29 Tahun 2023 tentang Pembelian Kembali Saham yang Dikeluarkan oleh Perusahaan Terbuka serta Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13 Tahun 2023 tentang Kebijakan dalam Menjaga Kinerja dan Stabilitas Pasar Modal pada Kondisi Pasar yang Berfluktuasi Secara Signifikan.

Program ini memberikan hak opsi kepada manajemen dan karyawan kunci untuk memiliki saham Perseroan. Total saham yang dialokasikan dalam program MESOP mencapai 156.500.000 saham dengan nilai nominal Rp20 per saham, yang merepresentasikan 0,78% dari modal ditempatkan dan disetor penuh. Seluruh saham yang digunakan dalam program ini berasal dari saham treasuri Perseroan.

Pencapaian kinerja dan profitabilitas Perseroan yang terus meningkat merupakan hasil dari komitmen dan kontribusi manajemen serta karyawan. Atas dasar tersebut, Perseroan menetapkan program MESOP sebagai salah satu bentuk pengalihan saham treasuri yang sekaligus dimanfaatkan sebagai insentif dan program retensi bagi insan Perseroan. Tujuan program MESOP antara lain:

1. Meningkatkan rasa memiliki atas Perseroan sehingga akan meningkatkan kinerja masing-masing peserta program MESOP yang pada akhirnya akan meningkatkan kinerja Perseroan.
2. Tercapainya harmonisasi kepentingan Perseroan dengan kepentingan peserta program MESOP.
3. Memberikan penghargaan dan insentif terhadap kontribusi peserta program MESOP sehingga dapat memacu kinerja manajemen dan karyawan Perseroan.
4. Meningkatkan loyalitas peserta program MESOP serta meningkatkan kinerja dan profitabilitas Perseroan di kemudian hari.
5. Menarik dan mempertahankan manajemen dan karyawan yang berprestasi dalam Perseroan.

Persyaratan Karyawan, Direksi dan/atau Dewan Komisaris

Perseroan menetapkan sejumlah persyaratan bagi Karyawan, Direksi, dan/atau Dewan Komisaris yang dapat ditetapkan sebagai Peserta, sebagai berikut:

1. Seorang "Peserta" adalah pihak yang berhak mengikuti program MESOP menurut penetapan Komite. Untuk menghindari keragu-raguan, yang menjadi Peserta hanya seorang individu yang dapat ditunjuk sebagai seorang Peserta dan bukan pasangan, anak atau saudaranya atau pihak lainnya manapun yang menjadi Afiliasi dari Peserta tersebut.
2. Pihak yang berhak dan dapat menjadi Peserta adalah (i) para Direktur Perseroan; (ii) para Komisaris Perseroan (kecuali Komisaris Independen); atau (ii) para pejabat dan karyawan kunci dari Perseroan, sebagaimana ditentukan oleh Komite dari waktu ke waktu dan telah menandatangani suatu Perjanjian Pemberian Hak Opsi atau kesepakatan lainnya dengan Perseroan.
3. Komite akan menentukan dari waktu ke waktu kriteria Pihak yang berhak menjadi Peserta.

Rencana Periode Pelaksanaan MESOP

Seluruh Peserta akan melaksanakan Program MESOP sesuai dengan periode pelaksanaan Hak Opsi berikut:

1. Tahap I: Hak Opsi akan dapat dilaksanakan oleh Peserta pada tanggal 1 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2024.
2. Tahap II: Hak Opsi akan dapat dilaksanakan oleh Peserta pada tanggal 1 Agustus 2025 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2025.
3. Tahap III.A: Hak Opsi akan dapat dilaksanakan oleh Peserta pada tanggal 1 Mei 2026 sampai dengan tanggal 20 Mei 2026.
4. Tahap III.B: Hak Opsi akan dapat dilaksanakan oleh Peserta pada tanggal 1 Mei 2026 sampai dengan tanggal 20 Mei 2026, dengan catatan bahwa porsi saham MESOP yang telah dilaksanakan berdasarkan Tahap III.B ini akan dikenakan larangan untuk dijual oleh Peserta (Larangan Untuk Menjual Saham MESOP) selama satu tahun sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Dokumen Program ini dan Perjanjian Pemberian Hak Opsi.

Kebijakan Anti Korupsi **dan Gratifikasi**

Perseroan menegaskan komitmennya dalam menerapkan kebijakan anti korupsi dan gratifikasi secara konsisten di seluruh lini operasional dan bisnis. Kebijakan ini bertujuan untuk mencegah terjadinya konflik kepentingan serta praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN), dengan memastikan bahwa seluruh keputusan dan tindakan senantiasa mengedepankan kepentingan Perseroan di atas kepentingan pribadi, keluarga, kelompok maupun pihak lainnya.

Kebijakan anti korupsi AKR disusun dengan mengacu pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 yang mengubah Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Ketentuan terkait anti korupsi juga dituangkan dalam Kode Etik dan Pedoman *Whistleblowing System*. Sebagai bagian dari penerapan GCG, Perseroan melaksanakan berbagai program pencegahan praktik korupsi dan gratifikasi melalui penerapan pedoman perilaku, antara lain:

1. Insan AKR dilarang untuk memberikan atau menjanjikan hadiah atau sejenisnya kepada para pihak yang berhubungan dengan Perseroan, dimana pemberian tersebut diketahui atau patut diduga dapat mempengaruhi atau menggerakkan para pihak melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya.
2. Insan AKR dilarang untuk menerima atau meminta segala bentuk komisi dan/atau bentuk imbalan lainnya baik secara langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan pekerjaannya.
3. Apabila Insan AKR mendapatkan Gratifikasi dari mitra kerja dan atau pihak yang berkaitan dengan Perseroan, maka yang bersangkutan wajib untuk segera melaporkannya kepada Direksi.
4. Seluruh Insan AKR diwajibkan mendukung segala upaya untuk mencegah terjadinya tindak pidana korupsi dan pencucian uang.

Sosialisasi Anti Korupsi

Perseroan secara berkelanjutan menginternalisasikan kebijakan anti korupsi dan gratifikasi kepada seluruh karyawan guna memperkuat komitmen terhadap integritas, tanggung jawab, dan kepatuhan. Upaya ini didukung dengan peningkatan kesadaran karyawan untuk menjaga lingkungan kerja yang bersih dari praktik kecurangan melalui penyediaan mekanisme *Whistleblowing System*.

Dalam implementasi kebijakan anti korupsi dan gratifikasi, Perseroan menegaskan larangan atas segala bentuk pemberian atau penerimaan gratifikasi yang berkaitan dengan aktivitas bisnis, kecuali yang telah diatur secara jelas dalam peraturan internal. Penerapan kebijakan ini diperkuat melalui program pelatihan yang dilaksanakan secara berkala, pengawasan yang ketat, serta penyediaan sarana pelaporan. Sosialisasi atau pelatihan tersebut dilakukan agar seluruh Insan Perseroan memahami dan menerapkan prinsip GCG sesuai yang telah ditetapkan.

Whistleblowing **System**

Sebagai bagian dari penerapan prinsip GCG, Perseroan mengimplementasikan Sistem Pengaduan Pelanggaran (*Whistleblowing System*/WBS) sebagai saluran resmi untuk pelaporan dugaan pelanggaran di lingkungan Perseroan. Sistem ini mencakup proses penerimaan, evaluasi, penanganan, hingga pelaporan atas setiap informasi yang diterima guna mendukung operasional Perseroan yang transparan dan bertanggung jawab. Kebijakan WBS berdasarkan pada Surat Keputusan Direksi No. 090–A/L-AKR-CS/2021 yang telah disahkan pada 6 Oktober 2021.

Perseroan meyakini bahwa pencegahan *fraud* memerlukan peran aktif seluruh insan Perseroan. Oleh karena itu, setiap laporan yang disampaikan melalui WBS harus dilandasi itikad baik dan tidak bersifat pengaduan pribadi maupun fitnah. Perseroan menjamin bahwa seluruh laporan akan ditindaklanjuti secara profesional dan bertanggung jawab guna menjaga integritas lingkungan kerja. Implementasi WBS secara konsisten memberikan nilai tambah bagi Perseroan, meliputi:

1. Tersedianya cara penyampaian informasi penting dan kritis bagi perusahaan kepada pihak yang harus segera menanganinya secara aman.
2. Timbulnya keengganan untuk melakukan pelanggaran, dengan semakin meningkatnya kesediaan untuk melaporkan terjadinya pelanggaran, karena kepercayaan terhadap sistem pelaporan yang efektif.
3. Tersedianya mekanisme deteksi dini (*early warning system*) atas kemungkinan terjadinya masalah akibat suatu pelanggaran.
4. Tersedianya kesempatan untuk menangani masalah pelanggaran secara internal terlebih dahulu, sebelum meluas menjadi masalah pelanggaran yang bersifat publik.
5. Mengurangi risiko yang dihadapi organisasi, akibat dari pelanggaran baik dari segi keuangan, operasi, hukum, keselamatan kerja, dan reputasi.
6. Mengurangi biaya dalam menangani akibat dari terjadinya pelanggaran.
7. Meningkatnya reputasi perusahaan di mata pemegang saham, pemangku kepentingan, regulator, dan masyarakat umum.
8. Memberikan masukan kepada organisasi untuk melihat lebih jauh area kritikal dan proses kerja yang memiliki kelemahan pengendalian internal, serta untuk merancang tindakan perbaikan yang diperlukan.

WBS diterapkan untuk memperkuat mekanisme *check and balance* di seluruh tingkatan organisasi serta menumbuhkan kesadaran bersama dalam mencegah terjadinya kecurangan, pelanggaran, dan penyalahgunaan kewenangan. Konsistensi pelaksanaan sistem ini menjadi landasan Perseroan dalam menjaga integritas, transparansi, dan kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku serta standar etika bisnis.

Penyampaian Laporan Pelanggaran

Perseroan menyediakan mekanisme pelaporan bagi karyawan dan pihak eksternal untuk menyampaikan dugaan pelanggaran yang dapat merugikan Perseroan dan pemangku kepentingan. Pelanggaran yang dapat dilaporkan meliputi tindakan *fraud* (kecurangan, penipuan, penggelapan aset, pembocoran informasi rahasia, penggelembungan harga, dan penerimaan komisi/hadiah/jasa), pelanggaran kode etik, pelanggaran benturan kepentingan, pelanggaran hukum, serta perlakuan diskriminasi. Setiap laporan akan ditindaklanjuti secara profesional oleh pihak yang berwenang. Saluran pelaporan Perseroan sebagai berikut:

1. Sistem pelaporan yang berbasis *website/online form* pada https://wbs.akr.co.id.
2. *Email* (lapor.haryanto.adikoesoemo@akr.co.id)
3. Aplikasi Whatsapp (0811–1321–911)

Setiap laporan yang masuk melalui seluruh saluran pelaporan akan diterima langsung oleh Presiden Direktur. Dengan saluran pelaporan yang tersedia, Perseroan berupaya mengoptimalkan efektivitas pelaksanaan WBS. Kebijakan terkait pelaporan pelanggaran telah diperbarui dan disahkan pada 6 Oktober 2021. Pelapor diwajibkan menyertakan indikasi awal yang dapat dipertanggungjawabkan atas dugaan pelanggaran atau fraud, serta data pendukung yang tersedia, antara lain:

- Tindakan/perbuatan yang dilaporkan (*What*)
- Pihak yang terlibat (*Who*)
- Waktu kejadian (*When*)
- Tempat/lokasi kejadian (*Where*)
- Bagaimana kejadiannya (*How*)

Pihak yang dapat Melaporkan Pelanggaran

Perseroan menyediakan mekanisme pelaporan pelanggaran bagi seluruh pihak yang terkait dengan aktivitas Perseroan, baik dari internal maupun eksternal. Pihak internal mencakup Dewan Komisaris, Direksi, dan karyawan. Sementara itu, pihak eksternal meliputi para pemangku kepentingan lainnya, antara lain pemasok, konsultan, vendor, penyedia jasa alih daya, pelanggan, kreditur, masyarakat, serta pihak-pihak terkait lainnya.

Perlindungan bagi *Whistleblower*

Perseroan menjunjung tinggi perlindungan terhadap pelapor sebagai bagian dari komitmen penerapan WBS yang efektif. Perlindungan diberikan kepada setiap *whistleblower* yang bertindak dengan itikad baik, dengan tetap mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan praktik terbaik. Perlindungan ini bertujuan untuk mendorong pelaporan pelanggaran secara bertanggung jawab serta memastikan keamanan pelapor, meliputi:

1. Jaminan atas kerahasiaan identitas pelapor dan isi laporan yang disampaikan, kecuali atas permintaan penegak hukum.
2. Jaminan perlindungan terhadap perlakuan yang merugikan pelapor, seperti:
   a. Pemecatan yang tidak adil;
   b. Penurunan jabatan atau pangkat;
   c. Pelecehan atau diskriminasi dalam segala bentuknya;
3. Catatan yang merugikan dalam *file* data pribadinya (*personal file record*).
4. Jaminan perlindungan kemungkinan adanya tindakan ancaman, intimidasi, hukuman (pidana atau perdata) ataupun tindakan tidak menyenangkan dari pihak terlapor.
5. Perlindungan terhadap pelapor juga berlaku bagi para pihak yang melaksanakan investigasi maupun pihak-pihak yang memberikan informasi terkait dengan pengaduan tersebut.
6. Pelapor dapat mengadukan bila mendapatkan balasan berupa tekanan atau ancaman atau tindakan pembalasan lain yang dialaminya kepada Presiden Direktur. Dalam hal masalah ini tidak dapat dipecahkan secara internal, pelapor dijamin haknya untuk membawa ke lembaga independen di luar Perseroan.

Penanganan dan Pihak Pengelola Pengaduan

Setiap laporan yang disampaikan melalui WBS diterima langsung oleh Presiden Direktur Perseroan dan ditindaklanjuti secara seksama oleh Unit Pengelola WBS yang ditunjuk Manajemen. Proses penanganan laporan dilaksanakan sesuai dengan pedoman Perseroan dan ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia. Kerahasiaan komunikasi dengan pelapor dijaga oleh Petugas Perlindungan Pelapor dan hanya dilakukan apabila diperlukan untuk mendukung proses klarifikasi dan investigasi lanjutan.

Jumlah Laporan dan Tindak Lanjut

Sepanjang tahun 2025, AKR menerima sebanyak 1 (satu) laporan pengaduan melalui WBS. Seluruh laporan yang diterima telah ditindaklanjuti dan diselesaikan sesuai dengan ketentuan serta prosedur yang berlaku di lingkungan Perseroan.

Upaya Peningkatan Kualitas Penerapan **Tata Kelola Perusahaan**

Penerapan GCG secara berkelanjutan merupakan fokus utama AKR. Komitmen dan konsistensi Perseroan dalam menjalankan prinsip-prinsip GCG tercermin dari kinerja yang telah dicapai hingga saat ini. Kepercayaan investor yang tetap terjaga menjadi indikator atas efektivitas penerapan GCG secara berkesinambungan.

Perseroan memastikan pemahaman dan penerapan komitmen GCG terintegrasi dalam seluruh aktivitas bisnis dan operasional. Untuk mendukung hal tersebut, Perseroan menetapkan 3 (tiga) fokus utama sebagai landasan pelaksanaan GCG, yaitu:

1. *Compliance*: prinsip kepatuhan Perseroan terhadap tata kelola perusahaan yang baik di semua aspek, termasuk penerapan kebijakan Perseroan.
2. *Confidence*: penanaman sikap optimis dan percaya diri bahwa Perseroan senantiasa memberikan yang terbaik bagi seluruh pemangku kepentingan.
3. *Transparency*: Perseroan senantiasa mengedepankan prinsip keterbukaan dan senantiasa memberikan informasi yang dibutuhkan bagi investor.

Ke depan, Perseroan akan terus menyempurnakan penerapan GCG. Sejalan dengan hal tersebut, AKR telah memiliki sejumlah inisiatif yang dilaksanakan pada tahun 2025 untuk memperkuat kualitas GCG, antara lain:

1. Memonitor dan mengawasi pelaksanaan kebijakan-kebijakan yang ditujukan untuk menjaga GCG.
2. Mendistribusikan informasi sebagai bentuk sosialisasi peraturan maupun pedoman baru yang berkaitan dengan GCG dan prinsip-prinsip keberlanjutan.
3. Menjaga alur komunikasi kepada pihak eksternal dan pihak internal Perseroan dalam rangka menjaga transparansi.
4. Mengikuti seminar dan sosialisasi peraturan dan pedoman baru terkait GCG.

Kebijakan *Insider Trading*

Untuk menjunjung tinggi prinsip keadilan dan menjaga kepercayaan investor, AKR menerapkan kebijakan yang mengatur larangan dan tata cara pengelolaan informasi material non-publik agar tidak disalahgunakan dalam transaksi efek Perseroan. Hal ini sejalan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan 78/POJK.04/2017 tentang Transaksi Efek yang Tidak Dilarang bagi Orang Dalam. Kebijakan ini menjadi dasar Perseroan dalam memastikan transaksi saham oleh Orang Dalam dan Afiliasinya dilakukan sesuai dengan prinsip GCG dan ketentuan yang berlaku.

Perseroan dengan tegas melarang praktik *insider trading* bagi seluruh Insan Perseroan, mencakup aktivitas pembelian atau penjualan saham Perseroan maupun transaksi atas sekuritas lainnya yang dilakukan berdasarkan informasi material yang belum dipublikasikan dan berpotensi memengaruhi harga saham atau nilai pasar. Kebijakan ini bertujuan untuk mencegah penyalahgunaan informasi non-publik serta menjaga integritas, transparansi, dan keadilan di pasar modal.

Setiap pihak yang memiliki akses terhadap informasi material non-publik diwajibkan menjaga kerahasiaan informasi tersebut dan dilarang memanfaatkannya untuk kepentingan pribadi. Dalam rangka melindungi hak pemegang saham, Perseroan menerapkan kebijakan *Blackout Period* atas transaksi saham AKRA, yang membatasi Orang Dalam untuk melakukan transaksi selama memiliki akses terhadap Informasi Material yang belum dipublikasikan.

Orang Dalam Perseroan meliputi (a) Komisaris, Direktur, atau pegawai Perusahaan (b) Pemegang saham utama Perusahaan (c) Orang perseorangan yang karena kedudukan atau profesinya atau karena hubungan usahanya dengan Perusahaan memungkinkan orang tersebut memperoleh informasi orang dalam (d) Pihak yang dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir tidak lagi menjadi pihak sebagaimana dimaksud dalam huruf a,b,c. Kebijakan *Blackout Period* yang ditetapkan pada 14 Juli 2022 menjelaskan tentang:

1. Selama Periode *Blackout*, Orang Dalam Perseroan yang memiliki informasi material dilarang melakukan transaksi saham, termasuk namun tidak terbatas pada:
   - Memberikan perintah/instruksi untuk melakukan transaksi jual ataupun beli Saham AKRA.
   - Mempengaruhi pihak lain untuk melakukan transaksi saham dengan cara memberikan informasi material sebagai Orang Dalam yang dimiliki untuk keuntungan pribadinya.
2. Pada saat pengumuman Periode *Blackout*, Orang Dalam yang masih memiliki perintah transaksi saham yang belum dilaksanakan wajib membatalkan perintah tersebut. *Corporate Secretary Office* wajib memastikan pembatalan transaksi saham sudah dilaksanakan.

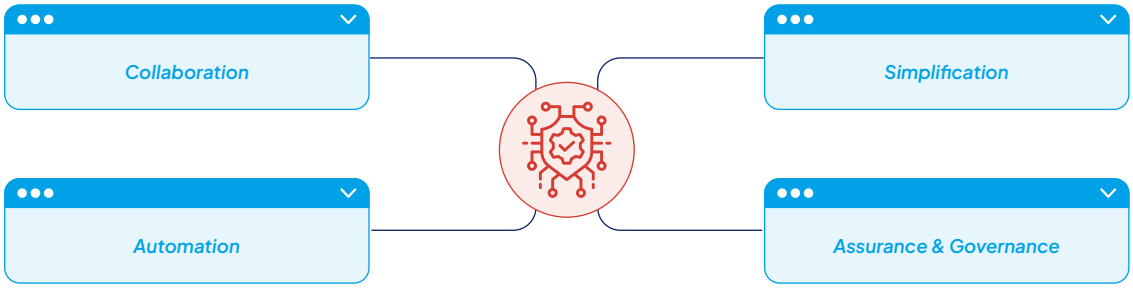
Perseroan menetapkan Periode Blackout umum yang berlaku 10 (sepuluh) hari kalender sebelum pengumuman Laporan Keuangan Perseroan kepada publik melalui Bursa dan berakhir pada tanggal pengumuman tersebut. Selain itu, Periode *Blackout* insidental diberlakukan sejak adanya akses Orang Dalam terhadap informasi material terkait aksi korporasi hingga informasi tersebut dipublikasikan secara resmi.



Tata Kelola **Teknologi Informasi**

Penerapan tata kelola Teknologi Informasi (TI) di Perseroan diarahkan untuk memastikan bahwa pemanfaatan TI selaras dengan strategi dan tujuan usaha, sekaligus mendukung peningkatan kinerja operasional serta pengelolaan risiko yang efektif. Kerangka tata kelola TI mencakup perencanaan, pengendalian, dan pengawasan secara menyeluruh terhadap infrastruktur teknologi, perlindungan data, serta kepatuhan terhadap ketentuan dan regulasi yang berlaku.

Pemanfaatan TI secara optimal dalam proses bisnis AKR berkontribusi terhadap pencapaian *cost leadership* serta memperkuat keberlanjutan bisnis melalui operasional yang lebih efektif dan efisien. Melalui penerapan sistem TI yang terintegrasi dan otomatisasi proses, Perseroan mampu menekan biaya operasional, meningkatkan produktivitas, serta mempercepat pengambilan keputusan berbasis data. Optimalisasi TI juga turut mendorong inovasi dan pengembangan layanan, meningkatkan kepuasan pelanggan, serta memperkuat daya saing Perseroan di tengah dinamika pasar yang semakin kompetitif.

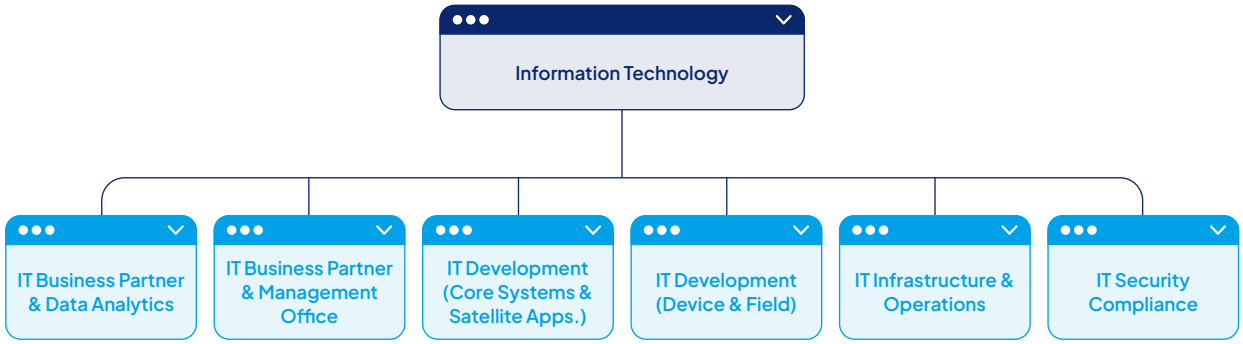


Landasan nilai dalam pengembangan sistem TI di Perseroan dibagi menjadi 4 (empat) meliputi:

1. ***Collaboration:*** Mengembangkan produktivitas lintas proses bisnis. Aspek utama: Mobilitas
2. ***Automation:*** Menyederhanakan alur kerja dan mempersingkat periode pengerjaan.
3. ***Simplification:*** Penyederhanaan proses untuk menghilangkan tugas yang tidak bernilai tambah dan tugas yang tidak perlu atau berlebihan.
4. ***Assurance & Governance:*** Jaminan untuk ketersediaan, keterlacakan dan keamanan serta keselarasan dengan bisnis dan tujuan bisnis secara keseluruhan.

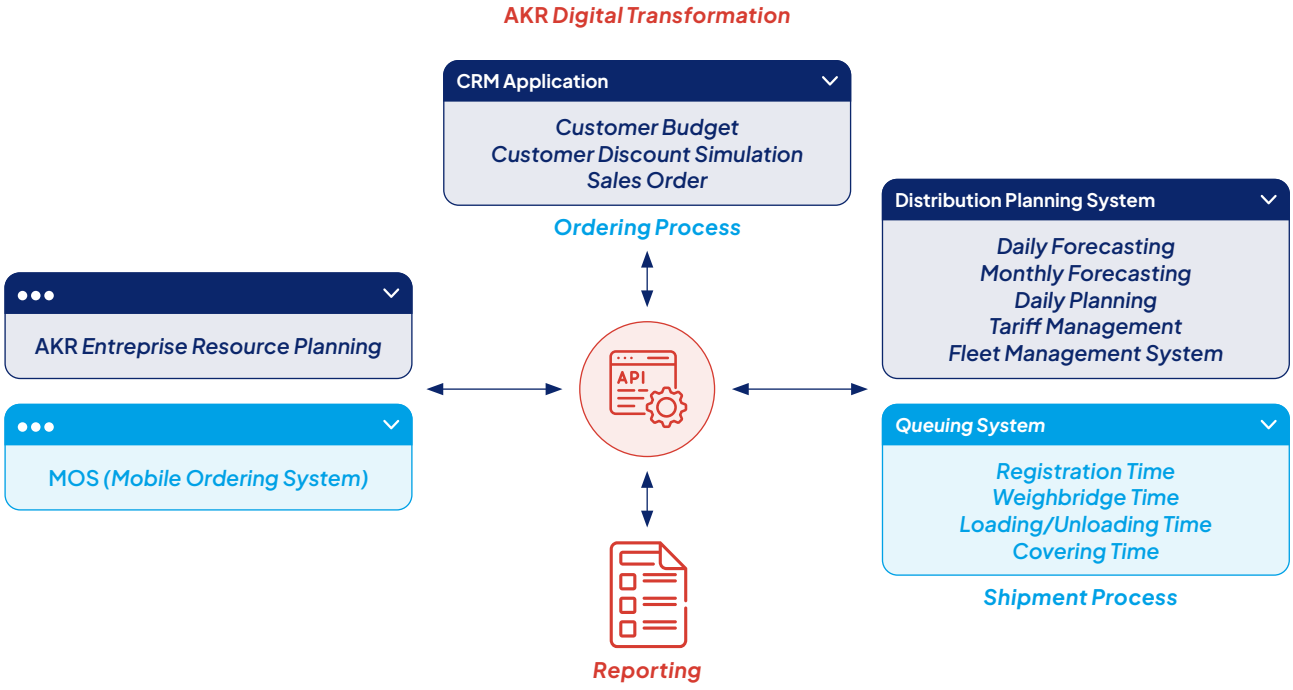
Pengelola TI

Struktur penanggung jawab pengelolaan dan pengembangan TI di AKR berada di bawah Departemen Information Technology (IT). Secara berkala, Divisi IT diaudit oleh Internal Auditor dan Eksternal Auditor dari KAP Purwanto Susanti dan Surja (member of Ernst & Young Global Limited) untuk memenuhi unsur kepatuhan dan implementasi prinsip GCG. Adapun bagan Divisi IT sebagai berikut:



Investasi dan Sosialisasi TI

Sebagai bagian dari strategi transformasi digital, Perseroan secara konsisten mengalokasikan investasi pada pengembangan TI guna mendorong peningkatan efisiensi operasional. Fokus investasi tersebut meliputi modernisasi perangkat keras dan perangkat lunak, penguatan infrastruktur jaringan, serta penerapan sistem teknologi yang lebih andal dan terintegrasi untuk mendukung proses bisnis. Melalui upaya ini, Perseroan memastikan pemanfaatan teknologi yang senantiasa relevan, aman, dan selaras dengan dinamika kebutuhan usaha yang terus berkembang.



Selain penguatan infrastruktur dan sistem, Perseroan juga memfokuskan investasi pada peningkatan kompetensi sumber daya manusia di bidang TI. Melalui penyelenggaraan pelatihan dan *workshop* secara berkala, Perseroan memastikan bahwa karyawan yang mengelola TI memiliki pemahaman yang memadai terhadap sistem dan teknologi yang digunakan. Program pengembangan kompetensi tersebut mencakup peningkatan kesadaran mengenai keamanan data, perlindungan privasi informasi, serta kepatuhan terhadap kebijakan dan prosedur TI, sehingga penerapan teknologi dapat mendukung pencapaian tujuan Perseroan secara aman, efektif, dan berkelanjutan.

Sebagai unit yang bertanggung jawab atas pengelolaan dan pengembangan teknologi informasi, Departemen *Information Technology* AKR secara aktif menyelenggarakan pelatihan teknis serta kegiatan sosialisasi bagi seluruh karyawan. Pada tahun 2025, Perseroan melaksanakan pelatihan keamanan data dan peningkatan *awareness* yang diselenggarakan melalui webinar menggunakan Microsoft Teams secara berkala, yaitu setiap dua bulan sejak April 2025.

Selain itu, diterapkan mekanisme kuis sebagai bagian dari evaluasi, di mana peserta yang belum memenuhi standar kelulusan diwajibkan mengikuti sesi berikutnya. Untuk memastikan efektivitas program, Perseroan juga melakukan simulasi serangan internal (*internal attack simulation*) guna menguji kesiapan pengguna dalam menghadapi potensi serangan yang sebenarnya.

Program Strategis dalam Pengembangan TI

Sepanjang tahun 2025, Perseroan terus memperkuat pengembangan TI melalui implementasi program strategis yang selaras dengan kebutuhan bisnis dan arah transformasi digital. Inisiatif ini difokuskan pada peningkatan efisiensi operasional, penguatan keamanan sistem, serta pengembangan kapabilitas teknologi yang adaptif terhadap dinamika industri.

Digitalisasi & Efisiensi Operasional

Program Strategis	Deskripsi	Nilai Bisnis
AI Distribution Optimization	Pemanfaatan AI untuk optimalisasi perencanaan distribusi dan armada secara *end-to-end*	Peningkatan utilisasi aset, penurunan *idle time*, dan efisiensi biaya logistik
Mobile KnowFlow dengan *fleet card management*	Digitalisasi proses operasional lapangan terintegrasi dengan sistem inti	Transparansi operasional, pengurangan proses manual, dan akurasi data

Keamanan Siber, Perlindungan Data, dan Tata Kelola

Program Strategis	Deskripsi	Nilai Bisnis
Passwordless Authentication & MFA	Penguatan keamanan identitas digital melalui autentikasi modern	Penurunan risiko kebocoran data, peningkatan kepercayaan *stakeholder*
Endpoint Protection	Modernisasi perlindungan *endpoint* dan *monitoring* terpusat	Resiliensi operasional, respons insiden lebih cepat
Cybersecurity Awareness Program	Program edukasi berkelanjutan untuk meningkatkan kesadaran keamanan karyawan	Pengurangan risiko *human error* dan *fraud digital*
Backup & Disaster Recovery Modernization	Penguatan kesiapan pemulihan sistem dan data kritikal	Keberlangsungan bisnis (*business continuity*) dan mitigasi risiko operasional

Infrastruktur & Digital Foundation

Program Strategis	Deskripsi	Nilai Bisnis
Bandwidth Upgrade all sites	Peningkatan kapasitas jaringan nasional untuk mendukung operasional digital	Kinerja sistem lebih stabil, mendukung ekspansi bisnis
IT Asset Audit – Nationwide	Inventarisasi dan standardisasi aset IT secara nasional	Optimalisasi aset dan penguatan tata kelola TI

Pencapaian Kinerja dalam Penerapan TI

Sepanjang tahun 2025, fungsi TI difokuskan pada penguatan resiliensi, peningkatan keamanan, serta optimalisasi efektivitas operasional melalui penerapan tata kelola yang lebih terstruktur, pelaksanaan audit kepatuhan secara berkelanjutan, dan penguatan perlindungan data di seluruh lini sistem. Pendekatan ini memastikan kesiapan infrastruktur TI dalam mendukung kebutuhan bisnis yang terus berkembang.
Fokus pengembangan TI pada tahun 2025 diarahkan pada pembangunan fondasi digital yang aman dan andal; optimalisasi efisiensi operasional melalui pemanfaatan AI dan otomasi; serta penguatan tata kelola, keamanan data, dan kepatuhan terhadap regulasi.

Sejalan dengan fokus tersebut, Perseroan berhasil merealisasikan sejumlah capaian utama, antara lain implementasi AI dalam proses distribusi dan perencanaan operasional; penguatan aspek *cybersecurity* yang mencakup pengelolaan identitas, perlindungan *endpoint*, dan peningkatan *awareness*; serta standardisasi sistem yang didukung dengan peningkatan kualitas analisis data.

Privasi Data dan Keamanan *Cyber*

Seiring dengan percepatan perkembangan teknologi, Perseroan menyadari munculnya berbagai tantangan baru, khususnya yang berkaitan dengan perlindungan data dan keamanan siber. Menyikapi hal tersebut, AKR secara konsisten memperkuat penerapan langkah-langkah pengamanan data dan sistem informasi di seluruh aktivitas operasional. Upaya ini diwujudkan melalui penerapan kebijakan keamanan siber yang menyeluruh guna mengelola risiko terhadap kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan informasi dalam lingkungan Perseroan.

Dalam mendukung penerapan tersebut, AKR telah menetapkan kebijakan, struktur tata kelola, serta standar dan prosedur operasional terkait privasi data dan keamanan siber yang dituangkan dalam:
- ITE-SCO-SCO-POL-001 - IT Security Policy
- ITE-SCO-SCO-PRO-001 - Cyber Security Incident Response

Dalam menghadapi meningkatnya risiko kejahatan siber, Perseroan menempatkan perlindungan data sebagai salah satu prioritas utama. Untuk menjaga keamanan dan kerahasiaan data pribadi maupun data pelanggan, AKR mengimplementasikan berbagai teknologi pengamanan, antara lain:
1. Klasifikasi data (Publik/Internal/*Confidential*) dan rencana penerapan *labelling* pada aplikasi Microsoft Office serta penyesuaian aplikasi internal mengikuti kebijakan tersebut.
2. Penguatan kontrol akses melalui *Multi-Factor Authentication* (MFA) dan inisiatif *passwordless* untuk menurunkan risiko pencurian kredensial.
3. Operasi *monitoring* keamanan *email* (*quarantine/spam filtering*) sebagai bagian dari pengendalian ancaman berbasis *email*.

Penerapan tata kelola TI di AKR didukung oleh struktur organisasi yang disusun berdasarkan pembagian fungsi yang jelas, dengan tujuan menjaga efektivitas, efisiensi, serta keamanan operasional digital Perseroan. Setiap fungsi menjalankan peran strategis yang mencakup pengelolaan pusat data dan jaringan, pengembangan serta pemeliharaan aplikasi, layanan dukungan teknis, hingga pengawasan keamanan siber. Di samping itu, Perseroan menyediakan layanan TI di tingkat cabang guna memastikan tersedianya dukungan yang komprehensif bagi seluruh aktivitas operasional.

Hingga 31 Desember 2025, Perseroan tidak mencatat adanya insiden kebocoran data pribadi pelanggan. Perseroan secara berkelanjutan memperkuat perlindungan terhadap keamanan dan kerahasiaan data melalui penerapan sistem, kebijakan, serta mekanisme pengawasan yang konsisten sebagai upaya menjaga kepercayaan seluruh pemangku kepentingan.

Tantangan dan Mitigasi terkait Perlindungan Data Keamanan Siber

Sepanjang tahun 2025, Perseroan menunjukkan komitmen yang kuat dalam menjaga perlindungan data dan keamanan siber melalui penguatan kebijakan, peningkatan sistem pengamanan, serta pengembangan kapabilitas sumber daya manusia. Dalam implementasinya, tantangan utama yang dihadapi mencakup risiko *human factor* (*phishing* dan *social engineering*), kebutuhan untuk memperkuat *security hardening*, mengimplementasikan akses biometrik, dan menstandarkan kebijakan klasifikasi data di seluruh organisasi. Hasil internal *phishing test* menunjukkan bahwa tingkat kesadaran pengguna masih perlu ditingkatkan, sehingga ditindaklanjuti dengan rencana pelatihan *cyber security awareness* secara berkala.

Di sisi *security monitoring* dan perimeter *security*, meningkatnya intensitas serangan berhasil direspons dengan baik melalui langkah mitigasi yang efektif oleh tim internal, mencerminkan kesiapan dan keandalan sistem pengamanan yang terus diperkuat. Adapun langkah mitigasi yang dilakukan dalam merespons berbagai tantangan tersebut meliputi:
- Pelaksanaan *security awareness training* secara terjadwal dan berkelanjutan, yang dilengkapi dengan mekanisme evaluasi melalui kuis untuk memastikan pemahaman karyawan serta mendorong peningkatan tingkat kesadaran terhadap risiko keamanan siber.

- Implementasi teknologi *passwordless* dan MFA guna memperkuat mekanisme autentikasi serta secara signifikan menurunkan risiko *credential compromise* akibat *phishing* maupun kebocoran kredensial.
- Penguatan aspek *governance* dan audit internal untuk memastikan efektivitas pengendalian akses, keandalan sistem pencadangan (*backup*), serta konsistensi penerapan kebijakan dan prosedur operasional standar (SOP) di seluruh lingkungan Perseroan.

Penguatan Tata Kelola TI

Dalam rangka memperkuat penerapan tata kelola TI, Perseroan telah melaksanakan sejumlah inisiatif dan langkah strategis. Adapun aspek-aspek utama dalam penguatan tata kelola TI tersebut meliputi:

1. ***Digital Twin***
   Perseroan mengadopsi teknologi *digital twin* dengan membangun replika virtual atas lingkungan fisik dan infrastruktur TI. Pendekatan ini memungkinkan pemantauan dan pengelolaan aset TI secara lebih terintegrasi dan akurat. Melalui pemetaan *system landscape*, Perseroan memperoleh visibilitas yang lebih baik terhadap potensi risiko dan permasalahan, sehingga langkah mitigasi dapat dilakukan secara proaktif.
2. **Manajemen Akses Terpusat**
   Perseroan menerapkan sistem manajemen akses terpusat untuk meningkatkan efektivitas dan keamanan pengelolaan akses terhadap sumber daya TI. Sistem ini memastikan bahwa akses terhadap data dan sistem kritikal hanya diberikan kepada personel yang berwenang, sekaligus meminimalkan risiko akses tidak sah serta potensi terjadinya pelanggaran keamanan data.
3. **Penyederhanaan dan Penyetaraan Arsitektur**
   Perseroan melakukan penataan dan penyederhanaan arsitektur TI guna meningkatkan efisiensi operasional serta menekan tingkat kompleksitas sistem. Upaya ini mencakup integrasi sistem ERP dengan aplikasi satelit lainnya melalui penerapan manajemen API, sehingga tercipta alur proses bisnis yang terhubung secara *end-to-end* tanpa memerlukan intervensi manual. Perseroan juga mengembangkan sistem pelaporan dan informasi manajemen yang lebih andal untuk mendukung ketersediaan data yang akurat dan relevan dalam proses pengambilan keputusan.
4. **Rekonsiliasi Otomatis**
   Dalam rangka menjaga konsistensi dan keandalan data, Perseroan mengimplementasikan mekanisme rekonsiliasi otomatis lintas sistem. Penerapan otomatisasi ini memungkinkan identifikasi dan penanganan ketidaksesuaian data secara lebih cepat dan tepat, sehingga meminimalkan risiko kesalahan serta memperkuat integritas data secara menyeluruh.

Melalui penerapan tata kelola TI yang terintegrasi, AKR secara konsisten melakukan penyempurnaan dan mengadopsi teknologi terkini guna memperkuat keandalan sistem TI. Pendekatan ini dirancang untuk memastikan terjaganya privasi data, meningkatkan perlindungan keamanan siber, serta mendukung ketahanan operasional Perseroan dalam menghadapi berbagai risiko gangguan maupun bencana.

Rencana Pengembangan TI ke Depan

Perkembangan teknologi digital yang pesat menjadikan kecerdasan buatan (*Artificial Intelligence*/AI) sebagai salah satu *enabler* utama dalam peningkatan daya saing dan efektivitas operasional Perseroan. Penerapan AI memungkinkan Perseroan untuk meningkatkan ketepatan pengambilan keputusan, memperkuat sistem keamanan, serta menghadirkan layanan yang lebih bernilai bagi pelanggan. Atas dasar tersebut, Perseroan menetapkan peta jalan teknologi informasi yang berorientasi pada pemanfaatan AI sebagai fondasi transformasi digital yang berkesinambungan.

Kerangka peta jalan TI yang digunakan secara konsisten mencakup empat pilar utama, yaitu Collaboration, Automation, Simplification, dan Assurance. Pemanfaatan AI akan terus dikembangkan dan diperluas untuk mengoptimalkan proses bisnis secara lebih efisien dan terintegrasi. Peta jalan TI dibagi menjadi 3 (tiga) bagian yaitu jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang, dengan rincian sebagai berikut:

1. **Jangka Pendek:** Membangun fondasi digital yang kuat, termasuk standarisasi TI dan peningkatan aplikasi serta infrastruktur. Inisiatif utama meliputi implementasi *digital twin*, peremajaan pusat data, peningkatan server, penambahan jaringan, penguatan keamanan siber serta perencanaan untuk melakukan *Business Continuity Plan* dan *Disaster Recovery Test*.
2. **Jangka Menengah:** Mengembangkan ruang kerja digital yang komprehensif, dengan fokus pada otomatisasi dan efisiensi, serta memanfaatkan AI untuk alat operasional harian. Rencana ini mencakup perluasan agen AI untuk berbagai tugas (misalnya, penjualan, manajemen stok), perombakan aplikasi bisnis, dan mengadopsi pendekatan *mobile-first* untuk semua alat bisnis.
3. **Jangka Panjang:** Mencapai transformasi digital melalui inisiatif seperti ONE Ops (*One Operation*), konsolidasi alat bisnis *end-to-end*, AI Ops - *AI Operation* termasuk didalamnya penggunaan *agentic AI* dan integrasi *computer vision technology* serta IIoT untuk meminimalkan kesalahan manusia.

Pengadaan **Barang dan Jasa**

Dalam menjalankan kegiatan usahanya di bidang logistik dan rantai pasok, Perseroan memiliki kebijakan seleksi pemasok yang menjadi acuan utama dalam seluruh aktivitas pengadaan barang dan jasa. Kebijakan tersebut mencakup proses pendaftaran pemasok, seleksi pemasok, kontrak pembelian hingga proses penerbitan *purchase order*. Seluruh aktivitas pengadaan dilaksanakan dengan mempertimbangkan kualitas, harga yang kompetitif, serta ketepatan waktu pengiriman, melalui proses perencanaan yang mematuhi ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

AKR senantiasa memenuhi hak-hak kreditur, sekaligus mendorong peningkatan kapabilitas dan pemahaman pemasok melalui penyampaian kebijakan pengadaan, khususnya bagi calon pemasok baru. Standar keselamatan dan kesehatan kerja (K3) dijunjung tinggi sebagai wujud komitmen Perseroan dalam memenuhi standar dan regulasi yang berlaku. Selain Prosedur Pengadaan Barang, upaya penguatan internalisasi nilai-nilai GCG tercermin dalam Prosedur Seleksi Pegawai, Prosedur Penerimaan, Prosedur Pelaporan, serta Prosedur Pemasaran.

Pedoman Penerapan Prinsip **Tata Kelola Perusahaan**

Perseroan secara berkelanjutan memperkuat implementasi prinsip GCG sebagai wujud kesadaran atas pentingnya penerapan GCG dalam mendukung pencapaian visi dan misi Perseroan. Dalam implementasi GCG, AKR mengacu pada POJK 21/2015 dan SEOJK 32/2015.

Sejalan dengan ketentuan tersebut, terdapat 5 aspek, 8 prinsip dan 25 rekomendasi penerapan aspek dan prinsip GCG yang menjadi standar penerapan bagi Perseroan.

Standar tersebut diterapkan dengan pendekatan "*comply or explain*", yaitu Perseroan wajib menerapkan rekomendasi yang ada atau memberikan penjelasan apabila terdapat rekomendasi yang belum dapat diterapkan sepenuhnya. Uraian penerapan prinsip GCG disajikan dalam tabel berikut:

No.	Prinsip	Rekomendasi	Penjelasan Penerapan di AKR	Keterangan
I.	**Aspek 1 : Hubungan Perusahaan Terbuka dengan Pemegang Saham dalam menjamin hak-hak Pemegang Saham.**			
	Prinsip 1 Meningkatkan Nilai Penyelenggaraan RUPS	Perusahaan Terbuka memiliki cara atau prosedur teknis pengumpulan suara (*voting*) baik secara terbuka maupun tertutup yang mengedepankan independensi, dan kepentingan pemegang saham.	Pada RUPS Tahunan yang diselenggarakan pada tanggal 28 April 2025, ketentuan mekanisme pengambilan keputusan terkait mata acara rapat dan tata cara penggunaan hak dari pemegang saham yang hadir untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat adalah sebagaimana tercantum dalam Tata Tertib Rapat yang telah diunggah pada *website* Perseroan dan telah pula dibagikan kepada para pemegang saham sebelum memasuki ruang Rapat serta pokok-pokoknya yang telah dibacakan oleh pembawa acara sebelum Rapat dimulai. Perseroan telah menunjuk pihak independen yaitu Biro Administrasi Efek PT Raya Saham Registra serta Notaris Aryanti Artisari, S.H., M.Kn dalam melakukan proses penghitungan suara dan/atau melakukan validasi.	Terpenuhi

No.	Prinsip	Rekomendasi	Penjelasan Penerapan di AKR	Keterangan
		Seluruh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perusahaan Terbuka hadir dalam RUPS Tahunan.	Dengan memperhatikan Surat OJK Nomor S-92/D.04/2020 tanggal 18 Maret 2020, RUPS Tahunan dilakukan seefisien mungkin secara *hybrid* difasilitasi oleh aplikasi eASY KSEI tanpa mengurangi keabsahannya dengan tetap memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku: • Anggota Dewan Komisaris mengikuti jalannya RUPS yaitu Sofyan A. Djalil (Komisaris) dan Mohamad Fauzi Maulana Ichsan (Komisaris Independen). Soegiarto Adikoesoemo (Presiden Komisaris) mengikuti jalannya RUPS melalui *video conference* via eASY KSEI. • Semua anggota Direksi mengikuti RUPS yaitu Haryanto Adikoesoemo (Presiden Direktur), Jimmy Tandyo (Direktur), Suresh Vembu (Direktur), Nery Polim (Direktur), Termurti Tiban (Direktur), Bambang Soetiono Soedijanto (Direktur), dan Mery Sofi (Direktur).	Terpenuhi
		Ringkasan risalah RUPS tersedia dalam Situs Web Perusahaan Terbuka paling sedikit selama 1 (satu) tahun.	Ringkasan risalah RUPS telah tersedia dalam situs web Perseroan.	Terpenuhi
	Prinsip 2 Meningkatkan Kualitas Komunikasi Perusahaan Terbuka dengan Pemegang Saham atau Investor.	Perusahaan Terbuka memiliki suatu kebijakan komunikasi dengan pemegang saham atau investor.	Perseroan memiliki kebijakan komunikasi dengan pemegang saham atau investor. Perseroan selalu meng*update* informasi bagi pemegang saham atau investor melalui situs web Perseroan. Para pemegang saham dapat berkomunikasi langsung untuk mendapatkan informasi yang diperlukan dengan menghubungi nomor kontak maupun *email Investor Relation* dan/atau *Corporate Secretary* yang terdapat di situs web Perseroan.	Terpenuhi
		Perusahaan Terbuka mengungkapkan kebijakan komunikasi Perusahaan Terbuka dengan pemegang saham atau investor dalam situs web.	Perseroan mengungkapkan kebijakan komunikasi dengan para pemegang saham atau investor dalam situs web Perseroan. Perseroan juga telah menyiapkan *form Request Information* untuk memudahkan pemegang saham atau investor berkomunikasi dengan Perseroan. https://www.akr.co.id/request	Terpenuhi
II.	**Aspek 2: Fungsi dan Peran Dewan Komisaris**			
	Prinsip 3 Memperkuat Keanggotaan dan Komposisi Dewan Komisaris	Penentuan jumlah anggota Dewan Komisaris mempertimbangkan kondisi Perusahaan Terbuka.	Penentuan jumlah anggota Dewan Komisaris Perseroan telah dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi perusahaan dan juga sesuai dengan ketentuan POJK No.33/ POJK.04/2014 Tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik.	Terpenuhi
		Penentuan komposisi anggota Dewan Komisaris memperhatikan keberagaman keahlian, pengetahuan, dan pengalaman yang dibutuhkan.	Penentuan komposisi anggota Dewan Komisaris dilakukan dengan memperhatikan keberagaman keahlian, pengetahuan, dan pengalaman masing-masing anggota Dewan Komisaris sehingga mampu melaksanakan fungsi pengawasan Perseroan dengan baik. Jumlah Dewan Komisaris per 31 Desember 2025 adalah 3 (tiga) orang.	Terpenuhi

No.	Prinsip	Rekomendasi	Penjelasan Penerapan di AKR	Keterangan
	Prinsip 4 Meningkatkan Kualitas Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris.	Dewan Komisaris mempunyai kebijakan penilaian sendiri (*Self Assessment*) untuk menilai kinerja Dewan Komisaris.	Dewan Komisaris Perseroan telah mempunyai kebijakan penilaian sendiri (*Self-Assessment*) untuk menilai kinerja Dewan Komisaris.	Terpenuhi
		Kebijakan penilaian sendiri (*Self Assessment*) untuk menilai kinerja Dewan Komisaris, diungkapkan melalui Laporan Tahunan Perusahaan Terbuka.	Kebijakan penilaian sendiri (*Self Assessment*) untuk menilai kinerja Dewan Komisaris telah diungkapkan melalui Laporan Tahunan Perseroan.	Terpenuhi
		Dewan Komisaris mempunyai kebijakan terkait pengunduran diri anggota Dewan Komisaris apabila terlibat dalam kejahatan keuangan.	Dewan Komisaris mempunyai kebijakan terkait pengunduran diri anggota Anggota Dewan Komisaris apabila terlibat dalam kejahatan keuangan sesuai dengan Pedoman Kerja Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan serta peraturan perundang-undangan terkait.	Terpenuhi
		Dewan Komisaris atau Komite yang menjalankan fungsi Nominasi dan Remunerasi menyusun kebijakan suksesi dalam proses Nominasi anggota Direksi.	Komite Nominasi dan Remunerasi telah menerapkan prinsip-prinsip kebijakan suksesi dalam proses nominasi anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan sesuai Piagam Komite Nominasi dan Remunerasi.	Terpenuhi
III.	**Aspek 3: Fungsi dan Peran Direksi**			
	Prinsip 5 Memperkuat Keanggotaan dan Komposisi Direksi.	Penentuan jumlah anggota Direksi mempertimbangkan kondisi Perusahaan Terbuka serta efektifitas dalam pengambilan keputusan.	Penentuan jumlah anggota Direksi Perseroan diambil dengan mempertimbangkan kondisi Perseroan serta efektifitas dalam pengambilan keputusan, sesuai Anggaran Dasar dan Pedoman Kerja Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.	Terpenuhi
		Penentuan komposisi anggota Direksi memperhatikan, keberagaman keahlian, pengetahuan, dan pengalaman yang dibutuhkan.	Penentuan komposisi anggota Direksi telah dilakukan dengan memperhatikan, keberagaman keahlian, pengetahuan, dan pengalaman yang dibutuhkan agar dapat menjalankan fungsi dan tanggung jawab pengurusan Perseroan dengan baik.	Terpenuhi
		Anggota Direksi yang membawahi bidang akuntansi atau keuangan memiliki keahlian dan/atau pengetahuan di bidang akuntansi.	Ibu Termurti Tiban, Anggota Direksi yang membawahi bidang akuntansi atau keuangan memiliki pengalaman, keahlian dan/atau pengetahuan di bidang akuntansi. Beliau telah melewati proses nominasi yang dilakukan oleh Komite Nominasi dan Remunerasi dan selanjutnya diangkat kembali melalui keputusan RUPS Tahunan pada tanggal 28 April 2025.	Terpenuhi
	Prinsip 6 Meningkatkan Kualitas Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi.	Direksi mempunyai kebijakan penilaian sendiri (*Self Assessment*) untuk menilai kinerja Direksi.	Direksi Perseroan telah mempunyai kebijakan penilaian sendiri (*Self Assessment*) untuk menilai kinerja Direksi.	Terpenuhi
		Kebijakan penilaian sendiri (*Self Assessment*) untuk menilai kinerja Direksi diungkapkan melalui laporan tahunan Perusahaan Terbuka.	Kebijakan penilaian sendiri (*Self Assessment*) untuk menilai kinerja Direksi telah diungkapkan melalui Laporan Tahunan Perseroan.	Terpenuhi
		Direksi mempunyai kebijakan terkait pengunduran diri anggota Direksi apabila terlibat dalam kejahatan keuangan.	Direksi mempunyai kebijakan terkait pengunduran diri anggota Direksi apabila terlibat dalam kejahatan keuangan sesuai dengan Pedoman Kerja Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan serta peraturan perundang-undangan terkait.	Terpenuhi

No.	Prinsip	Rekomendasi	Penjelasan Penerapan di AKR	Keterangan
IV.	**Aspek 4: Partisipasi Pemangku Kepentingan**			
	Prinsip 7 Meningkatkan Aspek Tata Kelola Perusahaan melalui Partisipasi Pemangku Kepentingan.	Perusahaan Terbuka memiliki kebijakan untuk mencegah terjadinya *insider trading*.	Perseroan telah memiliki kebijakan untuk mencegah terjadinya *insider trading*, salah satunya dengan menetapkan kebijakan periode *Blackout* 10 hari sebelum tanggal rilis laporan keuangan, dan mewajibkan lapor ke *corporate secretary* perihal transaksi saham manajemen sebagai orang dalam.	Terpenuhi
		Perusahaan Terbuka memiliki kebijakan anti korupsi dan anti *fraud*.	Perusahaan telah memiliki kebijakan anti korupsi dan anti *fraud* yang tertuang dalam Kode Etik Perusahaan.	Terpenuhi
		Perusahaan Terbuka memiliki kebijakan tentang seleksi dan peningkatan kemampuan pemasok atau vendor.	Perseroan telah memiliki kebijakan tentang seleksi dan peningkatan kemampuan pemasok atau vendor.	
		Perusahaan Terbuka memiliki kebijakan tentang pemenuhan hak-hak kreditur.	Perseroan telah memiliki kebijakan tentang pemenuhan hak-hak kreditur.	
		Perusahaan Terbuka memiliki kebijakan *whistleblowing system*.	Perseroan telah memiliki kebijakan sistem *whistleblowing*. Pada tahun 2021, Perseroan melakukan *improvement whistleblowing System* dengan menambah *channel* pelaporan yang sebelumnya hanya sistem pelaporan berbasis *website/online form*, kini juga dilengkapi melalui *email* dan Whatsapp. Dengan sistem ini, diharapkan dapat mengoptimalkan proses pelaporan *Whistleblowing System* di perusahaan. https://wbs.akr.co.id/	
		Perusahaan Terbuka memiliki kebijakan pemberian insentif jangka panjang kepada Direksi dan karyawan.	Perseroan memiliki program MSOP yang diberikan kepada Direksi, Dewan Komisaris (kecuali Komisaris Independen dan Karyawan tertentu). Program MSOP dilaksanakan kembali pada tahun 2024 dalam 4 tahap dengan menawarkan 156.500.000 saham yang berasal dari saham treasuri.	
V.	**Aspek 5: Keterbukaan Informasi**			
	Prinsip 8 Meningkatkan Pelaksanaan Keterbukaan Informasi.	Perusahaan Terbuka memanfaatkan penggunaan teknologi informasi secara lebih luas selain situs web sebagai media keterbukaan informasi.	Keterbukaan informasi Perseroan telah dilakukan melalui web Bursa Efek Indonesia dan juga Perseroan.	Terpenuhi
		Laporan Tahunan Perusahaan Terbuka mengungkapkan pemilik manfaat akhir dalam kepemilikan saham Perusahaan Terbuka paling sedikit 5% (lima persen), selain pengungkapan pemilik manfaat akhir dalam kepemilikan saham Perusahaan Terbuka melalui pemegang saham utama dan pengendali.	Laporan Tahunan 2025 telah mengungkapkan pemilik manfaat akhir, Daftar Pemegang Saham Perseroan dengan kepemilikan >5% dan juga 20 pemegang saham terbesar Perseroan.	Terpenuhi

Kesesuaian Penerapan Pedoman Tata Kelola Perusahaan

No	Uraian	*Apply*	Penerapan di AKR
1	**Peran dan Tanggung Jawab Direksi dan Dewan Komisaris**		
1.1	**Peran dan Tanggung Jawab Direksi**		
Rekomendasi			
	Untuk mencapai penciptaan nilai yang berkelanjutan, Direksi menjalankan peran kepemimpinannya dan berupaya mencapai hasil GCG sebagai berikut: • Berdaya saing dan berfokus ke kinerja jangka panjang; • Beretika dan bertanggung jawab dalam menjalankan bisnis; • Berkontribusi positif terhadap masyarakat dan lingkungan; serta • Berkemampuan dalam bertahan dan bertumbuh (*corporate resilience*).	Terpenuhi	Dalam pedoman kerja Direksi dan Dewan Komisaris AKR, disebutkan nilai-nilai yang WAJIB dipatuhi Direksi dan Dewan Komisaris antara lain: • Integritas • Komitmen • Kerja sama Tim • Komunikasi yang jujur dan terbuka • Mempercayai dan menghargai • Menciptakan nilai • Perbaikan yang berkesinambungan Setiap Direksi dan Dewan Komisaris wajib mengoptimalkan kemampuannya untuk mencapai visi dan misinya dalam meningkatkan nilai para pemegang saham dan pihak terkait secara berkesinambungan, dengan mengindahkan peraturan yang berlaku Ref: https://www.akr.co.id/gcg/charter-policies/guideline-for-bod-boc
1.1.2	Direksi harus memastikan bahwa misi, visi, tujuan, sasaran, strategi, dan rencana tahunan dan jangka menengah korporasi konsisten dengan tujuan jangka panjang, dengan memanfaatkan inovasi dan teknologi secara efektif.	Terpenuhi	Dalam pedoman kerja Direksi dan Dewan Komisaris AKR, disebutkan nilai-nilai yang WAJIB dipatuhi Direksi dan Dewan Komisaris, salah satunya adalah Setiap Direksi dan Dewan Komisaris wajib mengoptimalkan kemampuannya untuk mencapai visi dan misinya dalam meningkatkan nilai para pemegang saham dan pihak terkait secara berkesinambungan. AKR terus berkembang menyesuaikan kebutuhan para pemangku kepentingan untuk dapat bertumbuh secara *sustainable*, salah satunya dengan mengoptimalkan sistem IT dalam memonitor pergerakan dan status produk, serta merencanakan distribusi yang efisien. AKR telah membuktikan bahwa Perseroan dapat memberikan performa yang konsisten di berbagai fase krisis dan fase ekonomi, yang juga merupakan bukti kesuksesan AKR dalam menyesuaikan diri serta bertransformasi agar selalu relevan dengan perubahan. Ref: https://www.akr.co.id/gcg/charter-policies/guideline-for-bod-boc
1.1.3	Direksi memastikan bahwa korporasi menerapkan manajemen risiko dan sistem pengendalian internal yang tepat dan efektif yang selaras dengan visi, misi, tujuan, sasaran, dan strategi korporasi serta mematuhi peraturan perundang-undangan dan standar yang berlaku.	Terpenuhi	Direksi AKR memastikan budaya manajemen risiko pada seluruh jenjang organisasi dengan pendekatan *tone from the top* yang dimulai dari *Top Management*. Direksi AKR memastikan efektivitas implementasi manajemen risiko menjadi bagian tak terpisahkan dari kegiatan bisnis Perseroan dengan rutin, mengkaji profil dan laporan risiko Perseroan termasuk memastikan & memberikan pandangan terkait risiko yang menjadi prioritas dalam mitigasi, mengkaji kontrol mitigasi untuk memastikan realisasi implementasi, dan memastikan kecukupan sumber daya manusia dalam mengelola risiko stratejik.
1.1.4	Direksi memastikan integritas akuntansi dan sistem pelaporan keuangan korporasi dan pengungkapan yang tepat waktu dan akurat atas semua informasi material mengenai korporasi.	Terpenuhi	
1.1.5	Direksi memastikan pelaporan keberlanjutan telah disusun sebagaimana mestinya.	Terpenuhi	Laporan keberlanjutan telah disusun berdasarkan POJK 51 dan GRI 2021 dengan referensi.

No	Uraian	*Apply*	Penerapan di AKR
1.1.6	Direksi membangun kerangka kerja untuk GCG teknologi informasi (TI) korporasi yang selaras dengan kebutuhan dan prioritas bisnis korporasi, mendorong peluang dan kinerja bisnis, memperkuat manajemen risiko, serta mendukung tujuan dan strategi korporasi.	Terpenuhi	Sistem Teknologi AKR dirancang untuk dapat menjamin kualitas dan kuantitas produk hingga ke tangan konsumen dan menghindari kecurangan yang terjadi dalam proses pendistribusian. Sistem teknologi dalam hal kemudahan bekerja juga diterapkan dengan platform media daring *teams*, *outlook*, dan CRM dengan tetap memberikan jaminan keamanan siber.
1.1.7	Bagi korporasi yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip Syariah, Direksi perlu memastikan kewenangan dan ketersediaan perangkat pendukung yang memadai agar Dewan Pengawas Syariah dapat menjalankan perannya dengan efektif.	N.A	
1.1.8	Piagam Direksi secara periodik ditinjau. Piagam mencakup antara lain pembagian peran Direktur secara individual dapat diatur di Piagam Direksi atau dengan surat keputusan Direksi.	Terpenuhi	Piagam Direksi dalam bentuk Pedoman Kerja Direksi dan Dewan Komisaris ditandatangani pada tahun 2015 dan dinilai masih relevan untuk dijadikan pedoman kerja Direksi & Komisaris. Ref: https://www.akr.co.id/gcg/charter-policies/guideline-for-bod-boc
1.1.9	Direksi mempunyai kebijakan terkait pengunduran diri anggota Direksi apabila terlibat dalam kejahatan keuangan dan terbukti melakukan kesalahan.	Terpenuhi	Anggota direksi berhak mengundurkan diri dari jabatannya dan wajib secara tertulis menyampaikan permohonan pengunduran diri kepada Perseroan paling kurang 90 hari sebelum tanggal pengunduran dirinya. Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS untuk memutuskan permohonan pengunduran diri anggota Direksi dalam jangka waktu paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah diterimanya surat permohonan pengunduran diri. Dalam hal Perseroan tidak menyelenggarakan RUPS dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud, maka dengan lampaunya kurun waktu tersebut, pengunduran diri anggota Direksi menjadi sah tanpa memerlukan persetujuan RUPS. Kepada anggota Direksi yang mengundurkan diri, tetap dapat dimintakan pertanggungjawaban sebagai anggota Direksi hingga saat pengunduran dirinya dalam RUPS berikutnya. Ref: https://www.akr.co.id/gcg/charter-policies/guideline-for-bod-boc
1.2	**Penilaian Kinerja – Direksi dan Anggotanya**		
Rekomendasi			
1.2.1	Dewan Komisaris melakukan evaluasi formal tahunan secara obyektif dan independen untuk menentukan efektivitas Direksi dan setiap individu direktur.	Terpenuhi	Dewan Komisaris AKR mengevaluasi kinerja Direksi berdasarkan indikator kesesuaian Pedoman Kerja Direksi, Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab masing-masing anggota Direksi; Pelaksanaan hasil keputusan RUPS; Pencapaian kinerja Perseroan dari aspek keuangan,operasional, dan administrasi; serta kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku serta kebijakan Perseroan. Ref: https://www.akr.co.id/gcg/charter-policies/guideline-for-bod-boc

No	Uraian	*Apply*	Penerapan di AKR
1.2.2	Dewan Komisaris dengan pertimbangan Komite Nominasi dan Remunerasi, bertanggung jawab menentukan kriteria evaluasi kinerja dan menilai kinerja Direktur Utama dan anggota Direksi lainnya.	Terpenuhi	• Dewan Komisaris bertanggungjawab melakukan pengawasan atas kebijaksanaan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan, serta memberikan nasihat kepada Direksi. Dewan Komisaris wajib menjalankan tugas dan tanggung jawab dengan itikad balk, penuh tanggung jawab dan kehati-hatian. • Dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris, Dewan Komisaris dapat membentuk komite salah satunya komite nominasi & remunerasi. • Tugas komite ini salah satunya adalah mengkaji dan mengevaluasi setiap kinerja anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris yang berkaitan dengan budaya kerja yang diterapkan di perusahaan; pelaksanaan *good corporate governance*; pelaksanaan operasional perusahaan secara menyeluruh; yang berkaitan dengan pencapaian aktual perusahaan; keselarasan kerja antara visi dan misi.
1.3	**Peran dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris**		
Rekomendasi			
1.3.1	Dewan Komisaris mereviu strategi korporasi paling tidak setiap tahun dan menyetujui misi, visi dan strategi korporasi yang dirumuskan oleh Direksi. Dewan Komisaris juga mereviu, memberikan saran dan menyetujui rencana bisnis dan rencana keuangan jangka panjang dan rencana keuangan jangka pendek korporasi. Dewan Komisaris memberikan advis dan melakukan pemantauan kepada Direksi atas pengelolaan implementasinya. Direksi dan Dewan Komisaris terlibat dalam keputusan yang sangat penting bagi korporasi, diatur dalam anggaran dasar korporasi.	Terpenuhi	• Setiap anggota Dewan Komisaris wajib mengerahkan segenap kemampuannya untuk dapat mencapai visi misi Perseroan. • Dewan Komisaris bertanggungjawab melakukan pengawasan atas kebijaksanaan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan, serta memberikan nasihat kepada Direksi. Dewan Komisaris wajib menjalankan tugas dan tanggung jawab dengan itikad balk, penuh tanggung jawab dan kehati-hatian. Ref: https://www.akr.co.id/gcg/charter-policies/guideline-for-bod-boc
1.3.2	Jenis keputusan yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris harus diungkapkan dalam laporan tahunan.	Terpenuhi	Tercantum dalam bab Tata Kelola Perusahaan bagian Dewan Komisaris.
1.3.3	Dengan memperhatikan rekomendasi Komite Nominasi dan Remunerasi, Dewan Komisaris mengusulkan kepada, dan untuk diputuskan oleh, RUPS pengangkatan dan/atau pemberhentian anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris. Dalam mengusulkan hal di atas, Dewan Komisaris memperhatikan keberagaman, unsur non diskriminatif dan memberikan kesempatan yang sama tanpa membedakan suku, agama, ras, antar golongan dan gender. Dewan Komisaris memastikan proses pencalonan dan pemilihan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris adalah formal dan transparan.	Terpenuhi	Di dalam piagam komite nominasi dan remunerasi dicantumkan bahwa: dalam rangkaian pelaksanaan tugas komite nominasi, dilaksanakan pembahasan untuk menetapkan usulan anggota Direksi dan atau anggota Dewan Komisaris baru kepada Dewan Komisaris yang selanjutnya digunakan sebagai materi bahasan dalam RUPS. Ref: https://www.akr.co.id/gcg/charter-policies/nomination-remuneration-charter
1.3.4	Dewan Komisaris atau Komite yang menjalankan fungsi nominasi menyusun kebijakan suksesi dalam proses nominasi anggota Direksi. Setiap tahun Dewan Komisaris meninjau pelaporan pelaksanaan rencana pengembangan dan suksesi yang disampaikan Direktur Utama.	N.A	

No	Uraian	*Apply*	Penerapan di AKR
1.3.5	Dewan Komisaris • Mengajukan kepada RUPS, yang dapat didahului oleh usulan dari Komite yang menjalankan fungsi remunerasi, besaran remunerasi anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris yang selaras dengan pengembangan korporasi yang berkelanjutan dan kepentingan jangka panjang korporasi dan pemegang saham; • Secara berkala mereviu sistem remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris.	Terpenuhi	Tugas komite terkait remunerasi antara lain: • Mengkaji dan mengevaluasi pelaksanaan setiap kinerja anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris yang berkaitan dengan pelaksanaan *good corporate governance*; pelaksanaan operasional perusahaan secara menyeluruh, berkaitan dengan pencapaian aktual perusahaan; keselarasan kerja antara visi dan misi perusahaan; kesesuaian antara strategi dan inovasi serta pencapaian dalam meningkatkan nilai bagi pemegang saham. • Berdasarkan hal diatas, kemudian melaksanakan pembahasan untuk menetapkan besaran remunerasi bagi anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris kepada Dewan Komisaris yang selanjutnya digunakan sebagai materi bahasan dalam RUPS. • Melaksanakan tugas-tugas lainnya yang berhubungan dengan remunerasi yang diberikan oleh Dewan Komisaris. Ref: https://www.akr.co.id/storage/files/v2RoTJxNDwvSEdqScKNBGHvnG0gggJYhVFUmbF57.pdf
1.3.6	Dewan Komisaris mengawasi efektivitas kebijakan governansi korporat dan implementasinya serta mengusulkan perubahan jika diperlukan.	Terpenuhi	Anggota Dewan Komisaris wajib menjalankankan tugasnya dengan itikad baik, penuh tanggung jawab clan kehati-hatian dengan selalu mengindahkan Peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang diantaranya terkait dengan pelaksanaan *Good Corporate Governance* serta Anggaran Dasar Perseroan. Ref: https://www.akr.co.id/gcg/charter-policies/guideline-for-bod-boc
1.3.7	Dewan Komisaris memantau dan mengarahkan agar korporasi menerapkan manajemen risiko dan sistem pengendalian internal yang tepat dan efektif yang selaras dengan tujuan, sasaran, dan strategi korporasi serta mematuhi peraturan perundang-undangan, kode perilaku dan standar yang berlaku.	Terpenuhi	Sebagai bentuk pertanggungjawaban, dewan komisaris wajib memastikan bahwa Direksi telah merancang sistem manajemen risiko yang tepat dalam mengelola risiko utama Perseroan, dan melaksanakan pengawasan melalui komite-komite yang dibentuk, untuk memastikan terselenggaranya sistem pengendalian internal yang efektif, serta memastikan proses clan sistem manajemen risiko yang terintegrasi. Dalam hal ini, internal audit AKR secara berkala melaporkan pelaksanaan tugasnya ke Direksi dan Komite Audit Komisaris. Ref: https://www.akr.co.id/gcg/charter-policies/guideline-for-bod-boc
1.3.8	Dewan Komisaris mengawasi dan mengarahkan agar tercapai integrasi akuntansi dan sistem pelaporan keuangan korporat, serta independensi fungsi audit internal dan eksternal.	Terpenuhi	Sebagai bentuk pertanggungjawaban, dewan komisaris wajib memastikan terselenggaranya sistem pengendalian internal yang efektif, sistem akuntansi dan pelaporan keuangan yang terintegrasi dan memiliki transparansi pengungkapan yang dapat dipertanggungjawabkan.
1.3.9	Dewan Komisaris memantau, mereviu dan menyetujui laporan tahunan dan laporan keberlanjutan Korporasi serta memastikan integritasnya, serta mengawasi proses pengungkapan dan pengkomunikasian korporasi.	Terpenuhi	Sebagai bentuk pertanggungjawaban, dewan komisaris wajib meneliti dan menelaah serta memberikan tanggapan atas laporan berkala dan Laporan Tahunan yang disiapkan Direksi serta menandatangani Laporan Tahunan, memberikan penjelasan, pendapat dan saran kepada RUPS mengenai Laporan Tahunan apabila diminta, dan kemudian mempertanggungjawabkannya kepada pemegang saham melalui RUPS.
1.3.10	Piagam Dewan Komisaris secara periodik ditinjau.	Terpenuhi	Piagam Dewan Komisaris dalam bentuk Pedoman Kerja Direksi dan Dewan Komisaris ditandatangani pada tahun 2015 dan dinilai masih relevan untuk dijadikan pedoman kerja Direksi & Komisaris.

No	Uraian	*Apply*	Penerapan di AKR
1.3.11	Dewan Komisaris mempunyai kebijakan terkait pengunduran diri anggota Dewan Komisaris apabila terlibat dalam kejahatan keuangan dan terbukti melakukan kesalahan.	Terpenuhi	Kriteria Dewan Komisaris AKR antara lain adalah tidak memiliki integritas dan reputasi yang buruk, yaitu tidak pernah secara langsung maupun tidak langsung terlibat dalam perbuatan rekayasa dan praktik-praktik menyimpang, cidera janji serta perbuatan lain yang merugikan Perseroan di mana yang bersangkutan bekerja atau pernah bekerja. Seluruh manajemen termasuk organ Perseroan wajib menandatangani Pakta Integritas, yang di dalamnya menyebutkan bahwa bila saya terbukti melanggar Pakta Integritas tersebut, maka yang bersangkutan bersedia untuk mengundurkan diri tanpa menerima kompensasi apapun dari perusahaan serta bersedia dikenakan sanksi dalam bentuk apapun, termasuk namun tidak terbatas pada sanksi administrasi sampai dengan tuntutan ganti rugi baik perdata dan/atau pidana -sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
1.3.12	Komisaris independen sangat diharapkan untuk dapat berkontribusi dalam diskusi yang jujur, obyektif, aktif dan konstruktif pada rapat Dewan Komisaris.	Terpenuhi	Bapak Fauzi Ichsan selaku komisaris Independen selalu mengikuti rapat komite, komisaris, dan rapat gabungan. Beliau aktif memberikan pendapat dan masukkan yang objektif dan terdokumentasi dalam dokumen berita acara rapat internal.
1.3.13	Komisaris Utama berperan sebagai koordinator Dewan Komisaris dan memastikan efektivitasnya. Komisaris Utama mendorong budaya keterbukaan dan dialog konstruktif yang memungkinkan berbagai pandangan diungkapkan, termasuk mengkoordinasi penetapan agenda rapat dewan yang tepat dan memastikan waktu yang cukup tersedia untuk mendiskusikan semua agenda. Selain itu, juga harus ada kesempatan bagi Dewan Komisaris untuk bertemu dengan jajaran Direksi dan manajemen senior.	Terpenuhi	Bapak Soegiarto Adikoesoemo selaku Presiden Komisaris selalu memberikan kesempatan kepada anggota komisaris dan direktur untuk memberikan pendapatnya di dalam rapat. Beliau juga aktif memberikan pendapat dan masukan yang objektif dan terdokumentasi dalam dokumen berita acara rapat internal.
1.4	**Pembentukan Komite**		
Rekomendasi			
1.4.1	Korporasi memiliki komite-komite di bawah Dewan Komisaris sekurang-kurangnya terdiri dari: Komite Audit, Komite Nominasi dan Remunerasi dan Komite Pemantau Manajemen Risiko.	Terpenuhi	Perseroan memiliki Komite Audit, Komite Nominasi & Remunerasi, dan Internal Audit yang terintegrasi dengan *Risk Management*, yang bekerja di bawah Dewan Komisaris. Kini kami juga memiliki Komite ESG, yang dibentuk untuk membantu Direksi dan Komisaris dalam merumuskan strategi keberlanjutan beserta pelaksanaannya.

No	Uraian	*Apply*	Penerapan di AKR
1.4.2	Dewan Komisaris memastikan bahwa anggota Komite Audit seluruhnya independen dan komite lain yang dibentuk Dewan Komisaris adalah mayoritas dari pihak independen, serta semua anggota komite memiliki kompetensi, berkomitmen, serta memiliki wewenang yang memadai untuk menjalankan perannya secara efektif dan independen.	Terpenuhi	Komite Audit Perseroan dibantu oleh Departemen Internal audit yang memiliki visi menjadi unit yang independen, objektif, profesional dan memberikan nilai tambah guna mendukung Manajemen Perseroan dalam mencapai sasaran usaha, visi dan misinya. Anggota Komite Audit harus independen, dengan latar belakang pemahaman dan pengetahuan bisnis; Dalam tugasnya, Komite Audit memberikan pendapat independen kepada Dewan Komisaris tentang perbedaan pendapat antara manajemen dan akuntan; rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai penunjukan Akuntan yang didasarkan pada independensi, ruang lingkup penugasan, dan imbalan jasa; dan Melakukan penelaahan alas pemeriksaan yang dilaksanakan oleh auditor internal dan mengawasi tindak lanjutnya alas temuan auditor internal. Komite Audit Perseroan memiliki *background Finance & Accounting* serta pengetahuan bisnis AKR yang kuat, sehingga dapat memberikan pendapat yang objektif atas aspek keuangan dan bisnis AKR. Ref: https://www.akr.co.id/ gcg/gcg-organs/audit-committee
1.4.3	Untuk memastikan pemantauan atas pelaksanaan tugas Komite Audit berjalan objektif dan independen, Komisaris Utama tidak boleh menjadi ketua Komite Audit, kecuali dalam keadaan luar biasa yang harus dijelaskan dalam laporan tahunan.	Terpenuhi	Komite Audit AKR diketuai oleh Bapak Fauzi Ichsan selaku Komisaris Independen. Ref: https://www.akr.co.id/audit-committee
1.5	**Penilaian Kinerja – Dewan Komisaris dan Anggotanya**		
Rekomendasi			
1.5.1	Dewan Komisaris melakukan evaluasi formal tahunan secara objektif untuk menentukan efektivitas Dewan, komitenya, dan setiap individu komisaris.	Terpenuhi	Dewan komisaris melakukan evaluasi secara tahunan atas efektivitas anggotanya, dengan masukkan-masukkan dari komite di bawahnya.
1.6.1	Anggota Direksi yang mempunyai rangkap jabatan di luar korporasi, harus mendapatkan persetujuan dari Dewan Komisaris. Seorang Komisaris memberi tahu Dewan Komisaris dan ketua komite yang menjalankan fungsi nominasi, sebelum menerima penunjukan baru sebagai direktur atau komisaris dari korporasi terbuka, jabatan direktur lainnya atau posisi lain dengan komitmen waktu yang signifikan.	Terpenuhi	Anggota Direksi AKR tidak memiliki rangkap jabatan di luar Perseroan. Jika ada penawaran jabatan di luar Perseroan, Direktur wajib meminta pertimbangan Komisaris melalui Komite Nominasi & Remunerasi.
1.6.2	Dewan Komisaris memantau dan mengelola potensi benturan kepentingan manajemen, anggota Direksi, Dewan Komisaris dan pemegang saham, termasuk penyalahgunaan aset korporasi dan penyalahgunaan dalam transaksi pihak berelasi. Komisaris yang memiliki benturan kepentingan tidak turut serta dalam pemantauan dan pengambilan keputusan atas potensi benturan kepentingan yang melibatkan Komisaris atau afiliasi Komisaris yang bersangkutan.	Terpenuhi	Dalam hal anggota Direksi mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan, maka yang berhak mewakili Perseroan adalah: • Anggota Direksi lainnya yang tidak mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan; • Dewan Komisaris, dalam hal seluruh anggota Direksi mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan; atau • Pihak lain yang ditunjuk oleh RUPS, dalam hal seluruh anggota Direksi atau Dewan Komisaris mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan.

No	Uraian	*Apply*	Penerapan di AKR
1.7	**Peningkatan Kompetensi Anggota Direksi dan Dewan Komisaris**		
Rekomendasi			
1.7.1	Dewan Komisaris memastikan bahwa anggota Direksi dan Dewan Komisaris memahami peran dan tanggung jawab mereka, karakteristik dan opera si korporasi, peraturan perundang-undangan dan standar yang relevan serta kewajiban lain yang berlaku. Direksi melalui sekretaris korporasi mendukung semua anggota Direksi dan Dewan Komisaris dalam memperbarui dan menyegarkan keterampilan dan pengetahuan mereka yang diperlukan untuk menjalankan peran mereka di Dewan.	Terpenuhi	Sekretaris perusahaan aktif memberikan *update* peraturan terbaru dan seminar-seminar yang dapat diikuti Direksi dan Dewan Komisaris dalam rangka menyegarkan pengetahuan dan keterampilan, terutama dalam hal tata kelola, isu-isu ESG dan ekonomi.
2	**Komposisi dan Remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris**		
2.1	**Komposisi Direksi**		
Rekomendasi			
2.1.1	Dalam menentukan kandidat calon direktur, Dewan Komisaris melalui Komite Nominasi dan Remunerasi tidak hanya mengandalkan rekomendasi dari Dewan Komisaris, manajemen atau pemegang saham mayoritas. Dewan Komisaris melalui Komite Nominasi dan Remunerasi dapat menggunakan sumber independen untuk menentukan kandidat yang memenuhi syarat.	N.A	
2.1.2	Dewan Komisaris memastikan bahwa kriteria dalam menyeleksi anggota Direksi mencakup paling tidak pengetahuan, kemampuan, dan keahlian yang dibutuhkan untuk memenuhi secara tepat peran Direksi serta memperhatikan terpenuhinya keberagaman Direksi.	Terpenuhi	Kriteria Direksi dan Komisaris masuk ke dalam *point* pedoman kerja Direksi Komisaris yang telah mengadopsi POJK 33/2014 yang fokus pada kemampuan, kapasitas, dan integritas calon kandidat. AKR juga telah memberikan pernyataan dan komitmen terkait perlindungan kebijakan Hak Asasi Manusia, yang berlaku untuk seluruh manajemen dan organ Perseroan.
2.1.3	Kebijakan korporasi tentang keberagaman pada, Direksi dan Dewan Komisaris diungkapkan dalam Laporan Tahunan.	Terpenuhi	AKR telah memberikan pernyataan dan komitmen terkait perlindungan kebijakan Hak Asasi Manusia, yang berlaku untuk seluruh manajemen dan organ Perseroan.
2.1.4	Dewan Komisaris memastikan bahwa kebijakan dan prosedur untuk seleksi dan nominasi Komisaris adalah jelas dan transparan sehingga dapat menghasilkan komposisi Dewan yang diinginkan. Dewan Komisaris menggunakan sumber independen untuk menentukan kandidat yang memenuhi syarat.	Terpenuhi	Dalam hal seleksi dan nominasi komisaris, sepenuhnya dilakukan secara internal: • Komite Nominasi dan Remunerasi memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai komposisi jabatan anggota Komisaris sena usulan nama calon yang memenuhi syarat sebagai anggota Komisaris umuk disampaikan dalam RUPS. • Dewan Komisaris menyampaikan nama-nama calon anggota Komisaris yang memenuhi syarat kepada RUPS untuk disetujui. • Anggota Dewan Komisaris diangkat oleh RUPS untuk jangka waktu terhitung sejak pengangkatannya sampai penutupan RUPS tahunan kelima berikutnya dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan sewaktu-waktu. Ref: https://www.akr.co.id/gcg/charter-policies/guideline-for-bod-boc

No	Uraian	*Apply*	Penerapan di AKR
2.1.5	Dewan Komisaris/Komite yang menjalankan fungsi nominasi menetapkan prosedur dan kriteria nominasi yang konsisten dengan matriks keahlian Dewan Komisaris yang telah disetujui Dewan Komisaris dan memastikan bahwa profil kandidat memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam matriks keahlian dan kriteria nominasi.	Terpenuhi	Kriteria Direksi dan Komisaris masuk ke dalam *point* pedoman kerja Direksi Komisaris yang telah mengadopsi POJK 33/2014 yang fokus pada kemampuan, kapasitas, dan integritas calon kandidat.
2.1.6	Komposisi Dewan Komisaris harus dibentuk sedemikian rupa sehingga anggota-anggotanya secara kelompok mencerminkan keberagaman dalam hal kemampuan, keahlian, pengetahuan, pengalaman, usia, latar belakang budaya, dan gender yang dibutuhkan untuk memenuhi secara tepat peran Dewan Komisaris.	Terpenuhi	Komposisi Dewan Komisaris untuk tahun buku 2025: • Soegiarto Adikoesoemo – Presiden Komisaris: Founder AKR yang memiliki pengalaman bisnis panjang di industri kimia dan logistik • Sofyan A. Djalil – Komisaris: Memiliki pengalaman lebih dari 13 tahun di sektor publik maupun swasta di pemerintahan dengan menjabat sebagai Menteri di berbagai bidang. • Fauzi Ichsan – Komisaris Independen: memiliki pengalaman di bidang Pemerintahan dan Perekonomian. Ref: https://www.akr.co.id/board-of-commissioners-directors
2.1.7	Untuk memampukan Dewan Komisaris dalam memberikan saran dan supervisi secara independen kepada Direksi dan untuk peran-peran yang terdapat potensi benturan kepentingan, Dewan Komisaris terdiri dari Komisaris Independen yang cukup jumlahnya, dengan masa jabatan yang dibatasi dan terdapat pengungkapan Jangka waktu keanggotaan Dewan Komisaris serta independensi mereka dari sudut pandang korporasi.	Terpenuhi	1/3 Dewan Komisaris adalah Komisaris Independen: Bapak Fauzi Ichsan. Bapak Fauzi Ichsan selaku komisaris Independen selalu mengikuti rapat komite, komisaris, dan rapat gabungan. Beliau aktif memberikan pendapat dan masukkan yang objektif dan terdokumentasi dalam dokumen berita acara rapat internal. Ref: https://www.akr.co.id/board-of-commissioners-directors
2.1.8	Untuk memfasilitasi fungsi Direksi dan Dewan Komisaris yang efektif dan guna meningkatkan kepercayaan investor dan pemangku kepentingan, Komite Nominasi dan Remunerasi memastikan bahwa terdapat proses yang formal, ketat dan transparan untuk penunjukan dan pengangkatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris.	Terpenuhi	Dalam hal seleksi dan nominasi komisaris, sepenuhnya dilakukan secara internal: • Komite Nominasi dan Remunerasi memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai komposisi jabatan anggota Komisaris sena usulan nama calon yang memenuhi syarat sebagai anggota Komisaris umuk disampaikan dalam RUPS. • Dewan Komisaris menyampaikan nama-nama calon anggota Komisaris yang memenuhi syarat kepada RUPS untuk disetujui • Anggota Dewan Komisaris diangkat oleh RUPS untuk jangka waktu terhitung sejak pengangkatannya sampai penutupan RUPS tahunan kelima berikutnya dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan sewaktu-waktu. Ref: https://www.akr.co.id/gcg/gcg-organs/nomination-and-remuneration-committee

No	Uraian	*Apply*	Penerapan di AKR
2.2	**Remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris**		
Rekomendasi			
2.2.1	Kebijakan remunerasi anggota Direksi terdiri atas struktur remunerasi yang berorientasi pada pengembangan korporasi yang berkelanjutan dan mendorong pencapaian tujuan jangka panjang. Remunerasi Direksi harus diusulkan, dapat dengan melalui Komite Nominasi dan Remunerasi, oleh Dewan Komisaris untuk diputuskan oleh RUPS. Jumlah remunerasi yang diusulkan kepada RUPS tersebut ditetapkan dengan mempertimbangkan peran setiap anggota Direksi dan situasi ekonomi serta kinerja korporasi.	Terpenuhi	Prosedur penetapan remunerasi kepada Dewan Komisaris dan Direksi diawali dari pengajuan usulan dan besaran remunerasi oleh Dewan Komisaris. Pengajuan usulan tersebut telah mempertimbangkan hasil kajian dari Komite Nominasi dan Remunerasi, yang salah satunya memperhatikan pencapaian kinerja, yang kemudian disampaikan dalam RUPS hingga akhirnya akan ditetapkan dan disetujui oleh Pemegang Saham dalam RUPS.
2.2.2	Kebijakan remunerasi anggota Dewan Komisaris terdiri atas struktur remunerasi yang berorientasi pada pengembangan korporasi yang berkelanjutan dan mendorong pencapaian tujuan jangka panjang. Jumlah remunerasi yang diusulkan Dewan Komisaris kepada RUPS tersebut ditetapkan dengan mempertimbangkan peran setiap anggota Dewan Komisaris dan situasi ekonomi serta kinerja korporasi. Disamping itu juga harus dipertimbangkan posisinya sebagai Komisaris Utama dan ketua serta keanggotaannya dalam komite-komite.	Terpenuhi	Prosedur penetapan remunerasi kepada Dewan Komisaris dan Direksi diawali dari pengajuan usulan dan besaran remunerasi oleh Dewan Komisaris. Pengajuan usulan tersebut telah mempertimbangkan hasil kajian dari Komite Nominasi dan Remunerasi, yang salah satunya memperhatikan pencapaian kinerja, yang kemudian disampaikan dalam RUPS hingga akhirnya akan ditetapkan dan disetujui oleh Pemegang Saham dalam RUPS.
2.2.3	Untuk memastikan bahwa paket remunerasi ditentukan berdasarkan prestasi, kualifikasi dan kompetensi direktur dan komisaris dengan memperhatikan kinerja operasi korporasi, kinerja individu dan kondisi pasar, Komite Nominasi dan Remunerasi memastikan bahwa terdapat prosedur yang adil dan transparan untuk menetapkan kebijakan remunerasi anggota Direksi dan Dewan Komisaris.	Terpenuhi	Prosedur penetapan remunerasi kepada Dewan Komisaris dan Direksi diawali dari pengajuan usulan dan besaran remunerasi oleh Dewan Komisaris. Pengajuan usulan tersebut telah mempertimbangkan hasil kajian dari Komite Nominasi dan Remunerasi, yang salah satunya memperhatikan pencapaian kinerja, yang kemudian disampaikan dalam RUPS hingga akhirnya akan ditetapkan dan disetujui oleh Pemegang Saham dalam RUPS.
3.	**Hubungan Kerja Antara Direksi dengan Dewan Komisaris**		
3.1	**Sifat Hubungan Kerja**		
Rekomendasi			
3.1.1	Terdapat diskusi yang terbuka antara Direksi dengan Dewan Komisaris serta di antara para anggota Direksi dan para anggota Direksi dan para anggota Dewan Komisaris. Namun, tetap penting menjaga kerahasiaan informasi agar tidak terjadi kebocoran informasi rahasia.	Terpenuhi	Direksi dan Dewan Komisaris rutin mengadakan Rapat Gabungan bersama Komite Audit, sebelum rilis laporan keuangan

No	Uraian	*Apply*	Penerapan di AKR
3.1.2	Sesuai dengan tugas dan perannya masing-masing, Direksi bekerja sama dengan Dewan Komisaris dalam merumuskan misi, visi dan strategi korporasi dan secara reguler membahas pengimplementasiannya.	Terpenuhi	Setiap anggota Direksi dan Komisaris wajib mematuhi nilai-nilai yang berlaku di Perseroan, yaitu: • Integritas; • Komitmen; • Kerjasama Tim; • Komunikasi yang jujur dan terbuka; • Mempercayai dan menghargai; • Menciptakan nilai; • Perbaikan yang berkesinambungan. Ref: https://www.akr.co.id/gcg/charter-policies/guideline-for-bod-boc
3.1.3	Sekretaris Korporasi memiliki peran penting dalam mendukung efektivitas hubungan kerja antara Direksi dengan Dewan Komisaris, mendorong implementasi praktik governansi korporat yang baik, termasuk komunikasi yang efektif dengan pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya.	Terpenuhi	Sekretaris Korporasi mengambil peran penting dalam memberikan informasi yang terjadi di lingkungan bisnis maupun regulasi yang berlaku, dan mengkomunikasikannya ke organ Perseroan, kemudian mengawal Tindakan perubahan yang diambil untuk kemudian dikomunikasikan kembali ke pemangku kepentingan di luar Perseroan. Perseroan melalui departemen *Corporate Secretary* melakukan *self assessment* atas pelaksanaan tata kelola Perusahaan berdasarkan *Asean Corporate Governance Scorecard* dan Pedoman Umum Governansi Korporat Indonesia (PUGKI) 2021.
3.2	**Akses Informasi Dewan Komisaris**		
Rekomendasi			
3.2.1	Direksi bertanggung jawab untuk memastikan Dewan Komisaris mendapatkan akses informasi yang akurat, relevan dan tepat waktu. Dewan Komisaris sendiri memastikan bahwa ia memperoleh informasi yang memadai. Direksi menyediakan informasi kepada Dewan Komisaris secara teratur, tanpa penundaan dan secara komprehensif tentang semua masalah yang relevan dengan korporasi. Dewan Komisaris sewaktu-waktu dapat meminta Direksi untuk memberikan informasi tambahan.	Terpenuhi	Direksi AKR selalu memberikan informasi yang dibutuhkan komisaris dengan segera. Sebelum rapat gabungan dilaksanakan, departemen *Corporate Secretary* wajib membagikan bahan rapat kepada Direksi dan Dewan Komisaris.
3.3	**Tanggung Jawab Direksi dan Dewan Komisaris atas Dampak Struktur Kepemilikan terhadap Korporasi**		
Rekomendasi			
3.3.1	Dampak struktur kepemilikan terhadap korporasi. Direksi dan Dewan Komisaris mempertimbangkan tanggung jawabnya dalam konteks struktur kepemilikan saham dan hubungan antar-pemegang saham korporasi yang mungkin berdampak terhadap pengelolaan dan operasi korporasi.	Terpenuhi	Dalam hal anggota Direksi mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan, maka yang berhak mewakili Perseroan adalah: • Anggota Direksi lainnya yang tidak mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan; • Dewan Komisaris, dalam hal seluruh anggota Direksi mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan; atau • Pihak lain yang ditunjuk oleh RUPS, dalam hal seluruh anggota Direksi atau Dewan Komisaris mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan. Struktur Direksi dan Dewan Komisaris AKR diisi oleh profesional yang ahli dalam bidangnya, sehingga dapat objektif dalam pengambilan keputusan di departemennya. Ref: https://www.akr.co.id/gcg/charter-policies/guideline-for-bod-boc

No	Uraian	*Apply*	Penerapan di AKR
4.	**Perilaku Etis dan Bertanggung Jawab**		
4.1.1	**Pernyataan ini dituangkan dalam:**		
Rekomendasi			
4.1.1	Pernyataan ini dituangkan dalam Pedoman Perilaku dan Etika Usaha yang harus secara jelas mengungkapkan harapan korporasi bahwa setiap anggota Direksi dan Dewan Komisaris serta karyawan akan: • Bertindak untuk kepentingan terbaik korporasi; • Bertindak dengan jujur dan dengan integritas berstandar tinggi; • Bersikap independen dan bertindak berdasarkan informasi yang lengkap, dengan itikad baik, dengan uji tuntas dan kehati-hatian. • Mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi korporasi dan operasinya; • Menghindari tindakan yang melanggar peraturan perundang-undangan atau tindakan yang tidak etis berdasarkan pedoman etika korporasi; • Tidak terlibat atau berpartisipasi dalam kegiatan apapun yang akan menimbulkan benturan kepentingan dengan kepentingan terbaik korporasi atau yang akan berdampak negatif terhadap reputasi korporasi; • Tidak mengambil manfaat atas properti atau informasi yang dimiliki korporasi, kepemilikan aset lainnya atau pelanggannya untuk kepentingan pribadi atau yang menyebabkan kerugian bagi korporasi dan pelanggannya. • Tidak memanfaatkan jabatannya atau peluang yang dihasilkan oleh jabatannya untuk kepentingan pribadi. • Menghindari perbuatan meminta atau menerima dari pihak ketiga pembayaran, gratifikasi atau keuntungan lain untuk dirinya sendiri atau untuk orang lain yang menimbulkan benturan kepentingan/memberikan keuntungan kepada pihak ketiga secara melanggar peraturan perundang-undangan. • Menghormati perbedaan pendapat dan hak-hak setiap anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan karyawan.	Terpenuhi	Setiap anggota Direksi wajib mematuhi nilai-nilai yang berlaku di Perseroan, yaitu: • Integritas; • Komitmen; • Kerjasama Tim; • Komunikasi yang jujur dan terbuka; • Mempercayai dan menghargai; • Menciptakan nilai; • Perbaikan yang berkesinambungan Setiap anggota Direksi juga wajib mengerahkan segenap kemampuannya untuk dapat mencapai visi misi Perseroan Anggota Direksi wajib menjalankan tugasnya dengan itikad baik, penuh tanggung jawab dan kehati-hatian dengan selalu mengindahkan Peraturan perundang undangan yang berlaku, yang diantaranya terkait dengan pelaksanaan *Good Corporate Governance* serta Anggaran Dasar Perseroan.
	• Memastikan pengungkapan yang lengkap, adil, akurat, tepat waktu, dan dapat dipahami dalam laporan dan dokumen yang disampaikan korporasi kepada regulator dan dalam komunikasi publik lainnya.		

No	Uraian	*Apply*	Penerapan di AKR
4.1.2	Direksi menetapkan kebijakan dan praktik anti pencucian uang dan pendanaan terorisme, anti suap, anti korupsi, anti kecurangan (anti *fraud*), keterlibatan dalam politik dengan mengacu pada standar nasional atau internasional mengenai anti pencucian uang, anti suap, anti korupsi, anti kecurangan atau standar terkait lainnya.	Terpenuhi	Seluruh manajemen termasuk organ Perseroan wajib menandatangani Pakta Integritas, yang di dalamnya menyebutkan bahwa bila saya terbukti melanggar Pakta Integritas tersebut, maka yang bersangkutan bersedia untuk mengundurkan diri tanpa menerima kompensasi apapun dari perusahaan serta bersedia dikenakan sanksi dalam bentuk apapun, termasuk namun tidak terbatas pada sanksi administrasi sampai dengan tuntutan ganti rugi baik perdata dan/atau pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4.2	**Nilai-Nilai dan Budaya Organisasi**		
Rekomendasi			
4.2.1	Korporasi mengartikulasikan, menumbuhkan dan mengungkapkan budaya dan nilai-nilai korporat	Terpenuhi	Nilai perusahaan yang secara berkala disosialisasikan menjadi budaya kerja: • Memiliki Jiwa Kewirausahaan • Berkolaborasi • Menghargai Kinerja Tinggi • Tangkas • Memberdayakan Tim • Tidak Berkompromi
4.3	**Komunikasi dan Penegakan Pedoman Etika, Nilai-Nilai dan Budaya**		
Rekomendasi			
4.3.1	Pedoman perilaku dan kode etik korporasi dikomunikasikan secara efektif kepada Direksi, Dewan Komisaris, serta seluruh karyawan, diintegrasikan ke dalam strategi dan operasi korporasi termasuk sistem manajemen risiko dan struktur remunerasi, serta ditegakkan.	Terpenuhi	Kode Etik Korporasi diterjemahkan ke dalam berbagai kebijakan dan peraturan, di antaranya Peraturan Perusahaan. Nilai-nilai yang terkandung di dalam kode etik disosialisasikan secara berkelanjutan agar terus menjadi bagian dari budaya kerja. Dan secara berkala, setiap karyawan diminta menandatangani pakta integritas sebagai bentuk kepatuhan atas kode etik karyawan. Mitra yang bekerja sama dengan AKR juga diminta menandatangani pakta integritas sebagai bentuk kepatuhan atas kode etik supplier. Ref: https://www.akr.co.id/gcg/charter-policies/code-of-conduct-2
5.	**Manajemen Risiko, Pengendalian Internal dan Kepatuhan**		
5.1	**Pengendalian Internal dan Kepatuhan**		
Rekomendasi			
5.1.1	Direksi melakukan *review* secara berkala atas ketepatan desain dan efektivitas operasional sistem GCG, pengelolaan risiko, pengendalian internal dan kepatuhan korporasi dan melaporkan pelaksanaan dan hasil reviu kepada para pemegang saham melalui laporan tahunan Korporasi.	Terpenuhi	Salah satu peran Direksi dalam manajemen risiko adalah memastikan efektivitas implementasi manajemen risiko untuk menjadi bagian tak terpisahkan dari kegiatan operasional Perseroan. Internal Audit secara berkala memberikan laporan terkait berbagai aspek risiko bisnis beserta mitigasinya kepada Direksi. Dan Direksi me*review* serta memberikan masukan perbaikan. Laporan pelaksanaan manajemen risiko dan internal audit dilaporkan ke pemegang saham melalui laporan tahunan.
5.2	**Manajemen Risiko**		
Rekomendasi			
5.2.1	Strategi dan risiko merupakan satu kesatuan, diungkapkan secara transparan, masuk ke dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi dan Dewan Komisaris, serta dalam diskusi di rapat Dewan Komisaris dan Direksi.	Terpenuhi	Direksi bertanggung jawab memastikan telah merancang sistem manajemen risiko yang tepat dalam mengelola risiko utama Perseroan. Melalui komite-komite yang dibentuk, Direktur melakukan pengawasan untuk memastikan terselenggaranya sistem pengendalian intern yang efektif, sistem akuntansi clan pelaporan keuangan yang terintegrasi dan memiliki transparansi pengungkapan yang dapat dipertanggungjawabkan, serta memastikan proses dan sistem manajemen risiko yang terintegrasi.

No	Uraian	*Apply*	Penerapan di AKR
5.2.2	Komite Pemantau Manajemen Risiko membantu pelaksanaan tugas Dewan Komisaris dengan menciptakan mekanisme yang transparan, fokus, dan independen dalam pengawasan manajemen risiko korporasi.	Terpenuhi	Pengelolaan risiko Perseroan dipantau oleh internal audit, yang melapor langsung ke Direksi dan Komisaris melalui Komite Audit. Perseroan memandang bahwa pengendalian intern merupakan rangkaian tindakan yang mencakup keseluruhan proses dalam bisnis Perseroan. Komponen sistem pengendalian intern di lingkungan Perseroan antara lain terdiri dari: • Lingkungan pengendalian (*control environment*) • Penaksiran risiko (*risk assessment*) • Aktivitas pengendalian (*control activities*) • Informasi dan komunikasi (*information and communication*) • Pemantauan (*monitoring*)
5.3	**Integrasi GCG, Manajemen Risiko, dan Kepatuhan**		
Rekomendasi			
5.3.1	Direksi membangun sistem GCG, manajemen risiko, dan kepatuhan (GRC) yang terintegrasi, dengan menangani berbagai ketidakpastian secara terpadu dan dengan integritas yang tinggi, untuk meyakinkan bahwa korporasi dapat mencapai tujuannya.	Terpenuhi	Pengelolaan risiko Perseroan dipantau oleh internal audit secara independen, yang melapor langsung ke Direksi dan Komisaris melalui Komite Audit. Perseroan memandang bahwa pengendalian intern merupakan rangkaian tindakan yang mencakup keseluruhan proses dalam bisnis Perseroan.
5.3.2	Direksi memastikan bahwa bagian yang membawahi fungsi kepatuhan tidak merangkap melaksanakan fungsi yang berpotensi menimbulkan benturan kepentingan.	Terpenuhi	Beberapa bagian terkait kepatuhan di Perseroan bekerja secara independen, Direktur Utama dan Komisaris Utama tidak merangkap bagian ini: • *Corporate Secretary* • *Corporate Legal*
5.4.1	Dewan Komisaris melalui Komite Audit memantau dan memastikan bahwa fungsi audit internal membantu korporasi untuk mencapai tujuannya dengan membawa pendekatan yang objektif dan disiplin untuk mengevaluasi dan meningkatkan efektivitas manajemen risiko, pengendalian internal, dan governansi korporat.	Terpenuhi	Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan secara berkala melakukan *review* atas efektivitas penerapan sistem pengendalian di lingkungan Perseroan. *Review* yang dilakukan Direksi dan Dewan Komisaris terkait mekanisme, struktur dan kecukupan infrastruktur pengendalian internal.
6.	**Pengungkapan dan Transparansi**		
6.1	**Kebijakan Pengangkatan**		
Rekomendasi			
6.1.1	Korporasi memiliki kebijakan dan prosedur pengungkapan dan transparansi yang memastikan pengungkapan informasi material dan menjaga informasi sensitif serta rahasia korporasi	Terpenuhi	Perseroan melalui Divisi Investor Relation dan Sekretaris Perusahaan secara aktif memberikan informasi kepada para pemangku kepentingan dan senantiasa memberikan kemudahan bagi pemangku kepentingan untuk mengakses Informasi.
			Sarana utama untuk menyebarkan informasi adalah melalui situs web Perseroan (www.akr.co.id). Informasi dalam situs web AKR tersedia dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris. Selain situs web, Perseroan juga memberikan jalur komunikasi melalui *email* ke ir@akr.co.id atau telepon ke +622215311110 dan senantiasa melakukan pelaporan informasi dan fakta material melalui *Electronic Reporting* kepada OJK dan Bursa Efek Indonesia (www.idx.co.id). Larangan pengungkapan informasi sensitif yang menguntungkan pihak luar Perseroan diatur dalam kode etik Perseroan.

No	Uraian	*Apply*	Penerapan di AKR
6.1.2	Hak pemegang saham untuk memperoleh secara teratur dan tepat waktu informasi material yang relevan tentang korporasi harus dipenuhi.	Terpenuhi	AKR berkomitmen untuk menjaga prinsip Transparansi, diantaranya melalui keterbukaan informasi baik secara internal maupun eksternal Pengelolaan dan Keterbukaan akan informasi tentang Perseroan sangat penting dalam membangun citra Perseroan di mata publik khususnya para *stakeholder*. Oleh karenanya, Perseroan berupaya untuk memberikan informasi yang aktual dan bermanfaat dengan memperhatikan ketentuan terkait untuk menjawab kebutuhan masyarakat akan informasi kegiatan Perseroan.
6.2.1	Korporasi mengungkapkan sistem dan prosedur untuk memastikan bahwa laporan keuangan interim yang tidak diaudit atau direviu oleh auditor eksternal secara material adalah akurat, lengkap, dan memberikan investor informasi yang tepat untuk membuat keputusan investasi yang tepat.	Terpenuhi	Manajemen bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan konsolidasian sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, dan atas pengendalian internal yang dianggap perlu oleh manajemen untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan konsolidasian yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan. Dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasian, manajemen bertanggung jawab untuk menilai kemampuan Kelompok Usaha dalam mempertahankan kelangsungan usahanya, mengungkapkan, sesuai dengan kondisinya, hal-hal yang berkaitan dengan kelangsungan usaha, dan menggunakan basis akuntansi kelangsungan usaha, kecuali manajemen memiliki intensi untuk melikuidasi Kelompok Usaha atau menghentikan operasi, atau tidak memiliki alternatif yang realistis selain melaksanakannya. Ref: https://www.akr.co.id/quarterly-financial-report
6.2.2	Komite Audit memastikan kualitas audit laporan keuangan yang dilaksanakan oleh auditor eksternal. Kegiatan ini termasuk merekomendasikan penunjukan, penunjukan kembali dan, jika perlu, pemberhentian dan remunerasi auditor eksternal.	Terpenuhi	Perseroan melaporkan ke Bursa dan OJK laporan Komite Audit atas pekerjaan yang dilaksanakan oleh eksternal auditor dan rekomendasinya.
6.2.3	Laporan keberlanjutan harus disiapkan dan diungkapkan dengan akurat dan disusun sesuai kerangka pelaporan keberlanjutan nasional atau internasional.	Terpenuhi	AKR menyusun Laporan Berkelanjutan berdasarkan standar POJK 51 dan GRI 2021 sebagai *references*.
6.2.4	Perusahaan telah menerbitkan Laporan Keberlanjutan yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Laporan Tahunan. Laporan Keberlanjutan Perseroan telah memaparkan tentang kinerja keberlanjutan Perseroan yang mencakup aspek ekonomi, sosial, lingkungan dan tata kelola, yang disajikan dalam perbandingan selama 3 tahun, sehingga diharapkan membantu pemegang saham dan pemangku kepentingan memahami tujuan strategis korporasi dan kemajuannya dalam menciptakan nilai yang berkelanjutan.	Terpenuhi	AKR telah menerbitkan laporan keberlanjutan sejak tahun 2013. Dan selama pelaporan 3 tahun terakhir (2023–2025), AKR merilis Laporan Keberlanjutan bersamaan dengan rilis Laporan Tahunan sebagai materi RUPS bagi pemegang saham. AKR menyajikan data 3 tahun terakhir pada Laporan Keberlanjutan AKR.

No	Uraian	*Apply*	Penerapan di AKR
6.3	**Diseminasi Informasi**		
Rekomendasi			
6.3.1	Saluran penyebaran informasi harus menyediakan akses yang setara, tepat waktu, dan relatif murah untuk informasi yang relevan bagi pengguna.	Terpenuhi	Sarana utama untuk menyebarkan informasi adalah melalui situs web Perseroan (www.akr.co.id). Informasi dalam situs web AKR tersedia dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris. Selain situs web, Perseroan juga memberikan jalur komunikasi melalui *email* ke ir@akr.co.id atau telepon ke +622153111110 dan senantiasa melakukan pelaporan informasi dan fakta material melalui *Electronic Reporting* kepada OJK dan Bursa Efek Indonesia (www.idx.co.id). AKR kini juga aktif menyebarkan informasi menarik melalui media sosial, mencakup: Youtube, Instagram, Facebook, Twitter, dan Linkedin.
6.3.2	Korporasi memastikan bahwa pernyataan tahunan terhadap penerapan Pedoman Umum Governansi Korporat Indonesia, termasuk penjelasan atas penerapan atas masing-masing Rekomendasi dan Panduan tersedia di situs web selama jangka waktu minimal lima tahun.		AKR melakukan asesmen tata kelola berkala melalui Asean Corporate Governance Scorecard dan SEOJK 32. Penilaian berdasarkan PUGKI baru disajikan di laporan tahunan 2023.
6.3.3	Untuk korporasi yang terdaftar di pasar modal di yurisdiksi selain yurisdiksi asas, peraturan perundang-undangan atas governansi korporat yang berlaku harus diungkapkan dengan jelas. Dalam hal *cross listing*, kriteria dan prosedur *cross listing*, kriteria dan prosedur untuk mengakui persyaratan *listing* untuk *listing* utama harus transparan dan didokumentasikan.	N.A	
7.	**Perlindungan terhadap Hak-Hak Pemegang Saham**		
Rekomendasi			
7.1.1	Korporasi memiliki suatu kebijakan komunikasi yang memfasilitasi dan mendorong partisipasi pemegang saham atau investor	Terpenuhi	AKR melalui Divisi Hubungan Investor berupaya untuk memenuhi fungsi utamanya yakni menjaga komunikasi dua arah antara pemangku kepentingan eksternal dan Manajemen. Hal ini ditempuh dengan menggunakan berbagai saluran dan acara interaksi langsung melalui: • Partisipasi dalam paparan publik, • Menghadiri konferensi, *non-deal roadshow*, dan pertemuan dengan broker, • Mengadakan *briefing* capaian kinerja kuartalan, • Pertemuan tatap muka diatur dengan pemegang saham *existing* dan calon pemegang saham, serta • Kunjungan ke lokasi operasional
7.1.2	Korporasi yang merupakan entitas induk memastikan bahwa kebijakan governansi korporatnya berlaku bagi entitas anak dan entitas sepengendali yang di dalamnya investasi korporasi adalah signifikan.	Terpenuhi	Kebijakan Tata Kelola PT AKR Corporindo Tbk. Mencakup AKR induk dan anak-anak perusahaannya
7.1.3	Korporasi memiliki aturan dan prosedur yang mengatur akuisisi, pengambilalihan, dan transaksi luar biasa seperti merger dan penjualan aset korporasi yang substansial untuk memastikan transaksi terjadi secara transparan dan dalam kondisi yang wajar dan melindungi hak-hak semua pemegang saham sesuai dengan kelasnya.	Terpenuhi	AKR mengikuti peraturan yang berlaku, termasuk dalam hal akuisisi pengambilalihan, dan transaksi luar biasa.

No	Uraian	*Apply*	Penerapan di AKR
7.2.1	**Perlakukan Adil Terhadap Pemegang Saham**		
Rekomendasi			
7.2.1	Korporasi memiliki aturan dan prosedur yang memastikan: • Semua pemegang saham dari seri yang sama dalam satu kelas saham harus diperlakukan setara. • Pengungkapan aturan dan prosedur tersebut serta pengungkapan struktur modal dan pengaturan yang memungkinkan pemegang saham tertentu memperoleh pengaruh atau kendali yang tidak proporsional dengan kepemilikan sahamnya.	Terpenuhi	Dalam kode etik Perseroan tercantum kode etik Perseroan dengan pemegang saham, di antaranya adalah memberikan perlakuan yang adil kepada pemegang saham dan investor sesuai dengan jumlah dan jenis saham yang dimiliki untuk dapat menggunakan hak-haknya sesuai anggaran dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ref: https://www.akr.co.id/gcg/charter-policies/code-of-conduct-2
7.2.2	Korporasi memiliki aturan dan prosedur yang memastikan transaksi pihak berelasi disetujui dan dilaksanakan sedemikian rupa yang dapat meyakinkan bahwa benturan kepentingan telah dikelola dengan tepat, dan melindungi kepentingan korporasi dan pemegang saham.	Terpenuhi	Transaksi afiliasi dilaksanakan bila disetujui di dalam RUPS, dan wajib dilaporkan 2 hari kerja setelah ditetapkan di dalam akta notaris.
7.2.3	Korporasi memiliki dan mengungkapkan kebijakan untuk mencegah terjadinya *insider trading*. Korporasi memiliki aturan yang jelas mengenai perdagangan apa pun dalam saham korporasi yang dilakukan oleh direktur, komisaris dan orang dalam untuk memastikan bahwa siapapun tidak boleh mendapatkan keuntungan secara langsung atau tidak langsung dari informasi yang tidak/belum tersedia di pasar.	Terpenuhi	AKR memiliki kebijakan *Blackout Period* yang menegaskan larangan transaksi saham dari orang dalam Perseroan selama 10 hari sebelum rilis laporan keuangan hingga laporan keuangan diterbitkan ke publik.
7.3	**Rapat Umum Pemegang Saham**		
Rekomendasi			
7.3.1	Korporasi melakukan panggilan RUPS dengan agenda dan materi RUPS selengkap dan sedini mungkin (paling lambat 28 hari sebelum RUPS) untuk memberikan waktu dan materi yang cukup bagi pemegang saham untuk mempelajari dengan baik agenda rapat. Undangan rapat dan seluruh informasi RUPS diungkapkan melalui sarana elektronik seperti melalui situs web korporasi	Terpenuhi	AKR mengikuti POJK 15/2020 dalam penyelenggaraan RUPS. Dalam hal panggilan RUPS, AKR menggunakan acuan paling lambat 21 hari sebelum RUPS.
7.3.2	Korporasi memiliki dan mengungkapkan aturan dan prosedur yang memfasilitasi pemegang saham dalam berpartisipasi dan memberikan suara secara efektif di RUPS.	Terpenuhi	Dalam Tata Tertib yang diedarkan sebelum RUPS disebutkan tata cara pemungutan suara dalam RUPS: • Untuk setiap mata acara Rapat akan dilakukan pemungutan suara untuk pengambilan keputusan. • Pemungutan suara dilakukan setelah selesainya pembahasan setiap mata acara Rapat dan penyampaian usulan keputusan serta setelah ketua Rapat mempersilahkan kepada Pemegang Saham atau Kuasanya untuk melakukan proses pemungutan suara yang akan dipandu oleh Notaris dan Biro Administrasi Efek selaku pihak independen. • Proses pemungutan suara secara elektronik berlangsung di aplikasi eASY. KSEI pada menu *E-Meeting Hall*, sub menu *Live Broadcasting*. • *Voting time* selama proses pemungutan suara secara elektronik Perseroan menetapkan kebijakan waktu pemungutan suara langsung secara elektronik per mata acara dalam Rapat (dengan waktu maksimum adalah 3 (tiga) menit per mata acara Rapat).

No	Uraian	*Apply*	Penerapan di AKR
7.3.3	Pemegang saham berpartisipasi efektif dalam menetapkan penunjukan anggota Direksi dan Dewan Komisaris.	Terpenuhi	Penunjukkan anggota Direksi dan Dewan Komisaris AKR wajib mendapatkan persetujuan dari RUPS.
7.3.4	Korporasi memastikan transparansi dan akuntabilitas auditor eksternal di RUPS.	Terpenuhi	Auditor Eksternal yang ditunjuk dalam RUPS dipilih berdasarkan pertimbangan penilaian komite audit. Diantaranya menilai terkait independensi, transparansi, dan akuntabilitas auditor.
7.3.5	Penyampaian hasil pemungutan suara dan ringkasan risalah RUPS secara lengkap diumumkan ke publik pada hari kerja berikutnya.	Terpenuhi	Hasil RUPS dari notaris dirilis 1 hari setelah RUPS, dan menyusul ringkasan risalah RUPS di hari berikutnya.
8.	**Pemangku Kepentingan Lainnya**		
8.1	**Keterlibatan dan Pemangku kepentingan**		
Rekomendasi			
8.3.1	Direksi memastikan dan mengungkapkan bahwa operasi korporasi mencerminkan penerapan standar etika, tanggung jawab sosial dan lingkungan yang tinggi di seluruh korporasi dan memastikan bahwa kebijakan dan prosedur yang tepat diterapkan untuk menghormati serta mematuhi hak-hak pemangku kepentingan. *The Board of Directors ensures and discloses*	Terpenuhi	Melalui Komite ESG dan ESG Task Force, AKR menetapkan makna keberlanjutan yang mencerminkan identitas Perseroan: "Sebagai Perusahaan holding yang strategis, PT AKR Corporindo Tbk menetapkan tujuan untuk tumbuh dan berkembang secara berkelanjutan. Portofolio bisnis kami mulai dari logistik dan distribusi, kawasan industri, hingga pengembangan dan pengelolaan kawasan ekonomi khusus, dikelola agar dapat menjangkau jutaan orang dan para pemangku kepentingan. AKR harus memberikan manfaat bagi ekonomi, lingkungan, manusia dan masyarakat dalam menjalankan bisnis. Perseroan berkomitmen menyeimbangkan ambisi dengan kebijaksanaan, dan kesuksesan bisnis dengan kesadaran lingkungan, serta kemajuan sosial. Bagi AKR, inilah arti keberlanjutan – Berporoses dengan Tujuan" Komitmen ini ditopang oleh 4 pilar utama yang menjadi pedoman dan panduan bagi AKR dalam mengimplementasikan strategi keberlanjutan di seluruh lini bisnis Perseroan, yaitu: • *Our Business Portfolio* • *Our People* • *Our Communities* • *Our Conduct Through the ESG Committee and ESG Taskforce*
8.3.2	Direksi mendorong karyawan bekerja untuk kepentingan jangka panjang korporasi dan mengedepankan keberlanjutan.	Terpenuhi	Sumber Daya Manusia (*Human Capital*) adalah aspek yang sangat penting dalam pertumbuhan yang berkelanjutan. Bisnis AKR yang berada di industri esensial dan kritikal bergantung kepada kemampuan karyawannya untuk mengambil keputusan dan mengimplementasikan strategi yang telah dibuat oleh pimpinan perusahaan. Sasaran pengembangan SDM adalah untuk mendapatkan sumber daya manusia yang kompeten dan memiliki nilai-nilai yang selaras dengan *corporate value*. Manajemen mendorong kemampuan SDM perseroan agar *agile* dan adaptif menghadapi perubahan yang terjadi, dan memotivasi mereka untuk dapat berkolaborasi. Perseroan melakukan pelatihan dan *sharing session* agar karyawan kami memahami *point-point* adaptif dan berkolaborasi di area pekerjaannya. Perseroan secara berkelanjutan mewujudkan nilai-nilai *zero tolerance* untuk meminimalkan risiko. Salah satunya adalah meningkatkan pelatihan yang dibutuhkan dan mensosialisasikan kesadaran akan pengelolaan risiko di area kerja. Perseroan terus melakukan *empowerment* sehingga dapat memenuhi kebutuhan *leaders* secara internal. Kami aktif mencari calon pemimpin muda yang berpotensi baik dari dalam maupun luar.

Keterbukaan Praktik *Bad Governance*

Sepanjang tahun 2025, AKR tidak melakukan tindakan maupun menerapkan kebijakan yang mengindikasikan praktik *Bad Corporate Governance*. Hal ini sejalan dengan komitmen Perseroan dalam menerapkan GCG, sebagaimana tercermin pada tabel berikut.

No	Uraian	Praktik
1.	Aktivitas perdagangan orang dalam (*insider trading*) yang melibatkan Direksi/Komisaris, manajemen dan karyawan.	Nihil
2.	Ketidakpatuhan dalam pengungkapan pemenuhan kewajiban perpajakan termasuk putusan bersalah dari pengadilan pajak tertinggi terkait masalah perpajakan apapun.	Nihil
3.	Ketidaksesuaian penyajian Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan dengan peraturan yang berlaku dan SAK.	Nihil
4.	Kasus ketidakpatuhan terhadap hukum, aturan dan peraturan yang berkaitan dengan transaksi pihak berelasi yang signifikan atau material.	Nihil
5.	Tidak terdapat pengungkapan segmen operasi pada Laporan Keuangan.	Nihil
6.	Pelanggaran hukum apa pun yang berkaitan dengan masalah perburuhan/ketenagakerjaan/ konsumen/kepailitan/komersial/ persaingan atau lingkungan.	Nihil
7.	Sanksi dari regulator karena tidak membuat pengumuman dalam jangka waktu yang ditentukan untuk peristiwa penting.	Nihil
8.	Bukti bahwa perusahaan tidak mematuhi aturan dan peraturan pencatatan apapun selama setahun terakhir selain dari aturan pengungkapan.	Nihil



07

Tanggung Jawab Sosial Perusahaan





Komitmen Keberlanjutan untuk **Masa Depan Bernilai**

AKR berkomitmen untuk berperan aktif dalam mendorong kemajuan Indonesia melalui pelaksanaan usaha yang selaras dengan arah pembangunan nasional. Komitmen tersebut diwujudkan melalui penguatan kinerja operasional Perseroan, sekaligus melalui pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (*Corporate Social Responsibility*/CSR) yang dirancang sebagai bagian dari kontribusi jangka panjang Perseroan terhadap masyarakat dan lingkungan.

Program CSR difokuskan pada penguatan kapasitas sumber daya manusia, peningkatan akses terhadap energi dan infrastruktur dasar, pemberdayaan ekonomi masyarakat, serta dukungan terhadap pengembangan wilayah di sekitar area operasional. Dalam menjalankan bisnisnya, Perseroan mengoptimalkan kinerja operasional sekaligus menciptakan manfaat jangka panjang bagi pemangku kepentingan, dengan mengedepankan prinsip keberlanjutan dan mendukung pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB/SDGs).

Dalam pelaksanaan kegiatan CSR, Perseroan memfokuskan program pada 3 (tiga) pilar utama, yaitu pendidikan, kesehatan, dan pengembangan masyarakat. Selain itu, Perseroan juga melaksanakan berbagai inisiatif CSR lainnya yang mencakup bidang sosial dan keagamaan, serta pengembangan sarana dan prasarana umum untuk mendukung kesejahteraan masyarakat. AKR menyampaikan informasi pelaksanaan CSR dalam Laporan Keberlanjutan yang dimuat terpisah dari Laporan Tahunan ini.

Implementasi Konsep Keberlanjutan **dan Prosedur Penyusunan Laporan Keberlanjutan**

Perseroan memastikan bahwa setiap kegiatan bisnis dapat membawa dampak positif bagi pemangku kepentingan. Komitmen ini mencakup semua lini bisnis, mulai dari logistik dan distribusi energi, hingga pengembangan kawasan JIIPE. Melalui operasional bisnis Perseroan, AKR berupaya mewujudkan komitmen dalam penciptaan nilai dan *multiplier effect*, seperti:

1. Peningkatan ekonomi daerah dan nasional, dimana segmen kawasan industri berhasil mencatatkan investasi sebesar Rp111,5 triliun kumulatif hingga tahun 2025. Hal ini memperkuat posisi Jawa Timur sebagai salah satu poros ekonomi Indonesia.
2. Penyerapan tenaga kerja terutama dari *tenant-tenant* di JIIPE yang diperkirakan mencapai 400.000.
3. Adanya *anchor tenant* yang saat ini membentuk ekosistem hilirisasi dan industri berteknologi tinggi, seperti industri berbasis produk tembaga, kaca, energi terbarukan, dan kimia.
4. Kawasan industri terpadu yang akan mengurangi biaya logistik dan peningkatan daya saing industri di kancah global.

Untuk memastikan kebijakan dan strategi keberlanjutan disusun dengan cermat, Perseroan membentuk ESG *Committee* dan ESG *Task Force*. ESG *Committee* berperan dalam melakukan pengawasan dan arahan strategis atas implementasi keberlanjutan, sementara ESG *Task Force* berfokus pada pelaksanaan, koordinasi, dan pengelolaan operasional program keberlanjutan di seluruh lini bisnis Perseroan.

Perseroan juga memiliki kerangka keberlanjutan atau AKR *Sustainability House*: *PROGRESSING WITH PURPOSE* yang mencakup 4 (empat) pilar utama yaitu *our business portfolio*, *our people*, *our communities*, dan *our conduct*. Kerangka keberlanjutan ini diterjemahkan ke dalam AKR Horizon 2030 yang memuat prioritas strategis keberlanjutan beserta target dan capaian tahunannya. Melalui kerangka tersebut, Perseroan memantau secara konsisten implementasi program keberlanjutan, termasuk inisiatif yang telah terealisasi serta program yang berada dalam jalur pencapaian.

Penyusunan Laporan Keberlanjutan AKR mengacu pada regulasi yang berlaku yaitu Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 51/POJK.03/2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan serta Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 16/SEOJK.04/2021 tentang bentuk dan isi laporan tahunan emiten atau perusahaan publik. Selain itu, Perseroan mengadopsi panduan *Global Reporting Initiative* (GRI) dengan mengacu pada SDGs sebagaimana tercantum dalam *Roadmap* RPJMN 2020 - 2024 serta Peraturan Presiden No. 59 Tahun 2017 tentang Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB/SDGs).

Laporan Keberlanjutan Perseroan diterbitkan secara terpisah dari Laporan Tahunan, namun tetap menjadi bagian integral dari laporan kinerja Perseroan.




Kenali Diri, Gali Potensi








Hari
Lingkungan
Hidup SEDUNIA









Laporan Keuangan





PT AKR Corporindo Tbk
dan entitas anaknya/and its subsidiaries

Laporan keuangan konsolidasian tanggal 31 Desember 2025
dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut
beserta laporan auditor independen/
Consolidated financial statements as of December 31, 2025
and for year then ended with independent auditor's report

PT AKR Corporindo Tbk

SURAT PERNYATAAN DIREKSI TENTANG TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN TANGGAL 31 DESEMBER 2025 DAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT BESERTA LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN PT AKR CORPORINDO TBK DAN ENTITAS ANAKNYA

DIRECTOR'S STATEMENT LETTER RELATING TO THE RESPONSIBILITY ON THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS AS OF DECEMBER 31, 2025 AND FOR THE YEAR THEN ENDED WITH INDEPENDENT AUDITOR'S REPORT OF PT AKR CORPORINDO TBK AND ITS SUBSIDIARIES

Kami yang bertanda tangan dibawah ini / *We, the undersigned*:

1.	Nama / *Name*	:	Haryanto Adikoesoemo
	Alamat Kantor / *Office Address*	:	Jl. Panjang No. 5, Kebon Jeruk, Jakarta Barat – 11530
	Alamat Domisili sesuai KTP / *Domicile as Stated in ID Card*	:	Jl. Simprug Kav. H-7, RT.005 RW.008, Grogol Selatan, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan
	Nomor Telepon / *Phone Number*	:	021-5311110
	Jabatan / *Position*	:	Presiden Direktur / *President Director*
2.	Nama / *Name*	:	Termurti Tiban
	Alamat Kantor / *Office Address*	:	Jl. Panjang No. 5, Kebon Jeruk, Jakarta Barat – 11530
	Alamat Domisili sesuai KTP / *Domicile as Stated in ID Card*	:	Jl Gading Indah IV, Blok NF-1/51, RT.011 RW.012, Pegangsaan Dua, Kelapa Gading, Jakarta Utara
	Nomor Telepon / *Phone Number*	:	021-5311110
	Jabatan / *Position*	:	Direktur Keuangan / *Director of Finance*

Menyatakan bahwa: / *state that:*

1. Bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan konsolidasi Perseroan dan entitas anak, / *We are responsible for the preparation and presentation of the consolidated financial statements of the Company and subsidiaries;*
2. Laporan keuangan konsolidasi telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Indonesia, / *The consolidated financial statements have been prepared and presented in accordance with the Indonesian Financial Accounting Standards;*
3. a. Semua informasi dalam laporan keuangan konsolidasi telah dimuat secara lengkap dan benar, / *All information contained in the consolidated financial statements is complete and correct;*
   b. Laporan keuangan konsolidasi tidak mengandung informasi atau fakta material yang tidak benar, dan tidak menghilangkan informasi atau fakta material, / *The consolidated financial statements do not contain misleading material information or facts, and do not omit material information and facts;*
4. Kami bertanggung jawab atas sistem pengendalian intern dalam Perseroan dan entitas anak. / *We are responsible for the Company and its subsidiaries's internal control system.*

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya. / *This statement letter is made truthfully.*

Jakarta, 18 Maret 2026

Presiden Direktur / *President Director*	Direktur/ *Director*
Haryanto Adikoesoemo	Termurti Tiban

**PT AKR CORPORINDO TBK
DAN ENTITAS ANAKNYA
LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
TANGGAL 31 DESEMBER 2025
DAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
PADA TANGGAL TERSEBUT
BESERTA LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN**

***PT AKR CORPORINDO TBK
AND ITS SUBSIDIARIES
CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
AS OF DECEMBER 31, 2025 AND
FOR THE YEAR THEN ENDED
WITH INDEPENDENT AUDITOR'S REPORT***

Daftar Isi | ***Table of Contents***

	Halaman/ *Page*	
Surat Pernyataan Dewan Direksi		*Board of Directors' Statement*
Laporan Auditor Independen		*Independent Auditor's Report*
Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian	1-3	*Consolidated Statement of Financial Position*
Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian	4-5	*Consolidated Statement of Profit or Loss and Other Comprehensive Income*
Laporan Perubahan Ekuitas Konsolidasian	6-7	*Consolidated Statement of Changes in Equity*
Laporan Arus Kas Konsolidasian	8-9	*Consolidated Statement of Cash Flows*
Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian	10-140	*Notes to the Consolidated Financial Statements*

****

Shape the future with confidence

KAP Purwanto Susanti dan Surja

Indonesia Stock Exchange Building
Tower 2, 7th Floor
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53
Jakarta 12190, Indonesia

Tel : +62 21 5289 5000
Fax: +62 21 5289 4100
ey.com/id

The original report included herein is in the Indonesian language.

Laporan Auditor Independen

Laporan No. 00218/2.1505/AU.1/05/0694-4/1/III/2026

Pemegang Saham, Dewan Komisaris, dan Direksi
PT AKR Corporindo Tbk

Opini

Kami telah mengaudit laporan keuangan konsolidasian PT AKR Corporindo Tbk ("Perusahaan") dan entitas anaknya (secara kolektif disebut sebagai "Kelompok Usaha") terlampir, yang terdiri dari laporan posisi keuangan konsolidasian tanggal 31 Desember 2025, serta laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian, laporan perubahan ekuitas konsolidasian, dan laporan arus kas konsolidasian untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, serta catatan atas laporan keuangan konsolidasian, termasuk informasi kebijakan akuntansi material.

Menurut opini kami, laporan keuangan konsolidasian terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan konsolidasian Kelompok Usaha tanggal 31 Desember 2025, serta kinerja keuangan dan arus kas konsolidasiannya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

Independent Auditor's Report

Report No. No. 00218/2.1505/AU.1/05/0694-4/1/III/2026

The Shareholders and the Boards of Commissioners and Directors
PT AKR Corporindo Tbk

Opinion

We have audited the accompanying consolidated financial statements of PT AKR Corporindo Tbk (the "Company") and its subsidiaries (collectively referred to as the "Group"), which comprise the consolidated statement of financial position as of December 31, 2025, and the consolidated statement of profit or loss and other comprehensive income, consolidated statement of changes in equity, and consolidated statement of cash flows for the year then ended, and notes to the consolidated financial statements, including material accounting policy information.

In our opinion, the accompanying consolidated financial statements present fairly, in all material respects, the consolidated financial position of the Group as of December 31, 2025, and its consolidated financial performance and cash flows for the year then ended, in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards.

Shape the future with confidence

The original report included herein is in the Indonesian language.

Laporan Auditor Independen (lanjutan)

Laporan No. 00218/2.1505/AU.1/05/0694-4/1/III/2026 (lanjutan)

Basis opini

Kami melaksanakan audit kami berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia ("IAPI"). Tanggung jawab kami menurut standar tersebut diuraikan lebih lanjut dalam paragraf Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan Konsolidasian pada laporan kami. Kami independen terhadap Kelompok Usaha berdasarkan ketentuan etika yang relevan dalam audit kami atas laporan keuangan konsolidasian di Indonesia, dan kami telah memenuhi tanggung jawab etika lainnya berdasarkan ketentuan tersebut. Kami yakin bahwa bukti audit yang telah kami peroleh adalah cukup dan tepat untuk menyediakan suatu basis bagi opini kami.

Hal audit utama

Hal audit utama adalah hal-hal yang, menurut pertimbangan profesional kami, merupakan hal yang paling signifikan dalam audit kami atas laporan keuangan konsolidasian periode kini. Hal audit utama tersebut disampaikan dalam konteks audit kami atas laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan, dan dalam merumuskan opini kami atas laporan keuangan konsolidasian terkait, dan kami tidak menyatakan suatu opini terpisah atas hal audit utama tersebut. Untuk hal audit utama di bawah ini, penjelasan kami tentang bagaimana audit kami merespons hal tersebut disampaikan dalam konteks tersebut.

Independent Auditor's Report (continued)

Report No. 00218/2.1505/AU.1/05/0694-4/1/III/2026 (continued)

Basis for opinion

We conducted our audit in accordance with Standards on Auditing established by the Indonesian Institute of Certified Public Accountants ("IICPA"). Our responsibilities under those standards are further described in the Auditor's Responsibilities for the Audit of the Consolidated Financial Statements paragraph of our report. We are independent of the Group in accordance with the ethical requirements relevant to our audit of the consolidated financial statements in Indonesia, and we have fulfilled our other ethical responsibilities in accordance with such requirements. We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion.

Key audit matters

Key audit matters are those matters that, in our professional judgment, were of most significance in our audit of the consolidated financial statements of the current period. Such key audit matters were addressed in the context of our audit of the consolidated financial statements taken as a whole, and in forming our opinion thereon, and we do not provide a separate opinion on such key audit matters. For the key audit matter below, our description of how our audit addressed such key audit matter is provided in such context.

A member firm of Ernst & Young Global Limited

Shape the future with confidence

The original report included herein is in the Indonesian language.

Laporan Auditor Independen (lanjutan)

Laporan No. 00218/2.1505/AU.1/05/0694-4/1/III/2026 (lanjutan)

Hal audit utama (lanjutan)

Kami telah memenuhi tanggung jawab yang diuraikan dalam paragraf Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan Konsolidasian pada laporan kami, termasuk sehubungan dengan hal audit utama yang dikomunikasikan di bawah ini. Oleh karena itu, audit kami mencakup pelaksanaan prosedur yang didesain untuk merespons penilaian kami atas risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan konsolidasian terlampir. Hasil prosedur audit kami, termasuk prosedur yang dilakukan untuk merespons hal audit utama di bawah ini, menyediakan basis bagi opini kami atas laporan keuangan konsolidasian terlampir.

Kecukupan penyisihan atas kerugian kredit ekpektasian atas nilai piutang usaha

Penjelasan atas hal audit utama:

Pada tanggal 31 Desember 2025, saldo piutang usaha Perusahaan sebesar Rp7.118.753 juta, mencerminkan 19,5%dari total aset konsolidasian Kelompok Usaha. Piutang usaha diakui sebagai aset keuangan pada biaya perolehan diamortisasi dikurangi akumulasi penurunan nilai. Perusahaan telah mengakui penyisihan kerugian kredit ekspektasian ("KKE") sebesar Rp89.305 juta pada tanggal 31 Desember 2025. Penyisihan kerugian kredit ekspektasian, terutama mencerminkan penilaian penurunan nilai secara individu untuk sejumlah pelanggan pada tanggal pelaporan. Kami mempertimbangkan penyisihan KKE sebagai hal audit utama karena tingkat pertimbangan yang tinggi yang diterapkan oleh manajemen. Secara umum, dalam menentukan penurunan nilai secara individu atas piutang usaha, manajemen menggunakan pertimbangan untuk mengevaluasi kolektibilitas dari pelanggan secara individual dengan mempertimbangkan kelayakan kredit pelanggan dan analisis umur jatuh tempo. Pertimbangan ini juga melibatkan informasi peristiwa masa lalu, keadaan masa kini, dan perkiraan masa depan, serta nilai waktu uang.

Independent Auditor's Report (continued)

Report No. 00218/2.1505/AU.1/05/0694-4/1/III/2026 (continued)

Key audit matters (continued)

We have fulfilled the responsibilities described in the Auditor's Responsibilities for the Audit of the Consolidated Financial Statements paragraph of our report, including in relation to the key audit matter communicated below. Accordingly, our audit included the performance of procedures designed to respond to our assessment of the risks of material misstatement of the accompanying consolidated financial statements. The results of our audit procedures, including the procedures performed to address the key audit matter below, provide the basis for our opinion on the accompanying consolidated financial statements.

Adequacy in allowance for expected credit loss on trade receivables

Description of the key audit matter:

As of December 31, 2025, the Company's trade receivables amounted to Rp7,118,753 million, which represents 19.5% of the Group's consolidated total assets. The trade receivables are recognized as financial assets at amortized cost less accumulated impairment. The Company recognized allowance for expected credit losses ("ECL") amounting to Rp89,305 million as of December 31, 2025. The allowance for ECL is mainly the results of individual impairment assessments of various customers at the reporting date. We considered the allowance for ECL as a key audit matter due to the high degree of judgments applied by management. In general, in assessing the impairment on individual basis of trade receivables, management exercised significant judgments to evaluate the collectability of individual customers after taking into account their creditworthiness and aging analysis. The assessment also involves the information about past events, current conditions and forecasts of future conditions, as well as the time value of money.

A member firm of Ernst & Young Global Limited

Shape the future with confidence

The original report included herein is in the Indonesian language.

Laporan Auditor Independen (lanjutan)

Laporan No. 00218/2.1505/AU.1/05/0694-4/1/III/2026 (lanjutan)

Hal audit utama (lanjutan)

Kecukupan penyisihan atas kerugian kredit ekpektasian atas nilai piutang usaha (lanjutan)

Penjelasan atas hal audit utama: (lanjutan)

Pengungkapan terkait piutang usaha dan penyisihan atas KKE disajikan dalam Catatan 2 dan 5a atas laporan keuangan konsolidasian terlampir.

Respons audit:

Kami memeroleh pemahaman atas proses perkiraan penyisihan KKE piutang usaha Perusahaan. Kami menguji dengan menggunakan basis sampel untuk umur jatuh tempo piutang usaha pada akhir tahun. Kami mengevaluasi asumsi yang digunakan oleh manajemen dan pertimbangan atas penilaian kolektibilitas dari setiap individu pelanggan dengan membandingkan tren penerimaan historis dari setiap individu pelanggan. Kami mempertimbangkan fasilitas kredit yang diberikan kepada pelanggan dan/atau pelunasan setelah tanggal pelaporan ketika melakukan analisis terhadap golongan umur piutang. Kami juga memeriksa akurasi matematis dari perhitungan nilai waktu uang, dan menilai tingkat suku bunga efektif yang digunakan dalam mendiskontokan perkiraan penerimaan di masa depan. Selain itu, kami mengevaluasi kewajaran pada penyisihan KKE Perusahaan melalui perhitungan ulang secara independen.

Kami juga melakukan evaluasi atas kecukupan pengungkapan terkait penyisihan KKE atas piutang usaha pada catatan atas laporan keuangan konsolidasian terlampir.

Independent Auditor's Report (continued)

Report No. 00218/2.1505/AU.1/05/0694-4/1/III/2026 (continued)

Key audit matters (continued)

Adequacy in allowance for expected credit loss on trade receivables (continued)

Description of the key audit matter: (continued)

The disclosure of trade receivables and allowance for ECL are presented in Notes 2 and 5a to the accompanying consolidated financial statements.

Audit response:

We obtained an understanding of the Company's process in estimating the allowance for ECL on trade receivables. We tested on a sample basis the aging of trade receivables at year end. We evaluated the management's assumptions used and judgment on their assessments of collectability from individual customers by comparing them to the historical collection trends of respective individual customers. We considered the credits granted to the customers and/or their subsequent settlements when performing analysis of receivables' aging brackets. We also checked the mathematical accuracy of the time value of money calculation, and assessed the effective interest rate used in discounting the forecast of future collections. In addition, we evaluated the reasonableness of the Company's allowance for ECL through independent recalculation.

We also assessed the adequacy of the disclosures related to allowance for ECL on trade receivables in the notes to the accompanying consolidated financial statements.

A member firm of Ernst & Young Global Limited

Shape the future with confidence

The original report included herein is in the Indonesian language.

Laporan Auditor Independen (lanjutan)

Laporan No. 00218/2.1505/AU.1/05/0694-4/1/III/2026 (lanjutan)

Informasi lain

Manajemen bertanggung jawab atas informasi lain. Informasi lain terdiri dari informasi yang tercantum dalam Laporan Tahunan 2025 ("Laporan Tahunan") selain laporan keuangan konsolidasian terlampir dan laporan auditor independen kami. Laporan Tahunan diharapkan akan tersedia bagi kami setelah tanggal laporan auditor independen ini.

Opini kami atas laporan keuangan konsolidasian terlampir tidak mencakup Laporan Tahunan, dan oleh karena itu, kami tidak menyatakan bentuk keyakinan apapun atas Laporan Tahunan tersebut.

Sehubungan dengan audit kami atas laporan keuangan konsolidasian terlampir, tanggung jawab kami adalah untuk membaca Laporan Tahunan ketika tersedia dan, dalam melaksanakannya, mempertimbangkan apakah Laporan Tahunan mengandung ketidakkonsistensian material dengan laporan keuangan konsolidasian terlampir atau pemahaman yang kami peroleh selama audit, atau mengandung kesalahan penyajian material.

Ketika kami membaca Laporan Tahunan, jika kami menyimpulkan bahwa terdapat suatu kesalahan penyajian material di dalamnya, kami diharuskan untuk mengomunikasikan hal tersebut kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola dan melakukan tindakan yang tepat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Independent Auditor's Report (continued)

Report No. 00218/2.1505/AU.1/05/0694-4/1/III/2026 (continued)

Other information

Management is responsible for the other information. Other information comprises the information included in the 2025 Annual Report (the "Annual Report") other than the accompanying consolidated financial statements and our independent auditor's report thereon. The Annual Report is expected to be made available to us after the date of this independent auditor's report.

Our opinion on the accompanying consolidated financial statements does not cover the Annual Report, and accordingly, we do not express any form of assurance on the Annual Report.

In connection with our audit of the accompanying consolidated financial statements, our responsibility is to read the Annual Report when it becomes available and, in doing so, consider whether the Annual Report is materially inconsistent with the accompanying consolidated financial statements or our knowledge obtained in the audit, or otherwise appears to be materially misstated.

When we read the Annual Report, if we conclude that there is a material misstatement therein, we are required to communicate the matter to those charged with governance and take appropriate actions based on the applicable laws and regulations.

A member firm of Ernst & Young Global Limited

Shape the future with confidence

The original report included herein is in the Indonesian language.

Laporan Auditor Independen (lanjutan)

Laporan No. 00218/2.1505/AU.1/05/0694-4/1/III/2026 (lanjutan)

Tanggung jawab manajemen dan pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola terhadap laporan keuangan konsolidasian

Manajemen bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan konsolidasian tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, dan atas pengendalian internal yang dianggap perlu oleh manajemen untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan konsolidasian yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasian, manajemen bertanggung jawab untuk menilai kemampuan Kelompok Usaha dalam mempertahankan kelangsungan usahanya, mengungkapkan, sesuai dengan kondisinya, hal-hal yang berkaitan dengan kelangsungan usaha, dan menggunakan basis akuntansi kelangsungan usaha, kecuali manajemen memiliki intensi untuk melikuidasi Kelompok Usaha atau menghentikan operasi, atau tidak memiliki alternatif yang realistis selain melaksanakannya.

Pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola bertanggung jawab untuk mengawasi proses pelaporan keuangan Kelompok Usaha.

Independent Auditor's Report (continued)

Report No. 00218/2.1505/AU.1/05/0694-4/1/III/2026 (continued)

Responsibilities of management and those charged with governance for the consolidated financial statements

Management is responsible for the preparation and fair presentation of the consolidated financial statements in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards, and for such internal control as management determines is necessary to enable the preparation of consolidated financial statements that are free from material misstatement, whether due to fraud or error.

In preparing the consolidated financial statements, management is responsible for assessing the Group's ability to continue as a going concern, disclosing, as applicable, matters related to going concern, and using the going concern basis of accounting, unless management either intends to liquidate the Group or to cease its operations, or has no realistic alternative but to do so.

Those charged with governance are responsible for overseeing the Group's financial reporting process.

A member firm of Ernst & Young Global Limited

Shape the future with confidence

The original report included herein is in the Indonesian language.

Laporan Auditor Independen (lanjutan)

Laporan No. 00218/2.1505/AU.1/05/0694-4/1/III/2026 (lanjutan)

Tanggung jawab auditor terhadap audit atas laporan keuangan konsolidasian

Tujuan kami adalah untuk memeroleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, dan untuk menerbitkan laporan auditor independen yang mencakup opini kami. Keyakinan memadai merupakan suatu tingkat keyakinan tinggi, namun bukan merupakan suatu jaminan bahwa audit yang dilaksanakan berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh IAPI akan selalu mendeteksi kesalahan penyajian material ketika hal tersebut ada. Kesalahan penyajian dapat disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan dan dianggap material jika, baik secara individual maupun agregat, dapat diekspektasikan secara wajar akan memengaruhi keputusan ekonomi yang diambil oleh pengguna berdasarkan laporan keuangan konsolidasian tersebut.

Sebagai bagian dari suatu audit berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh IAPI, kami menerapkan pertimbangan profesional dan mempertahankan skeptisisme profesional selama audit. Kami juga:

- Mengidentifikasi dan menilai risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan konsolidasian, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, mendesain dan melaksanakan prosedur audit yang responsif terhadap risiko tersebut, serta memeroleh bukti audit yang cukup dan tepat untuk menyediakan basis bagi opini kami. Risiko tidak terdeteksinya suatu kesalahan penyajian material yang disebabkan oleh kecurangan lebih tinggi dari yang disebabkan oleh kesalahan, karena kecurangan dapat melibatkan kolusi, pemalsuan, penghilangan secara sengaja, pernyataan salah, atau pengabaian atas pengendalian internal.

Independent Auditor's Report (continued)

Report No. 00218/2.1505/AU.1/05/0694-4/1/III/2026 (continued)

Auditor's responsibilities for the audit of the consolidated financial statements

Our objectives are to obtain reasonable assurance about whether the consolidated financial statements taken as a whole are free from material misstatement, whether due to fraud or error, and to issue an independent auditor's report that includes our opinion. Reasonable assurance is a high level of assurance, but is not a guarantee that an audit conducted in accordance with Standards on Auditing established by the IICPA will always detect a material misstatement when it exists. Misstatements can arise from fraud or error and are considered material if, individually or in the aggregate, they could reasonably be expected to influence the economic decisions of users taken on the basis of these consolidated financial statements.

As part of an audit in accordance with Standards on Auditing established by the IICPA, we exercise professional judgment and maintain professional skepticism throughout the audit. We also:

- Identify and assess the risks of material misstatement of the consolidated financial statements, whether due to fraud or error, design and perform audit procedures responsive to such risks, and obtain audit evidence that is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion. The risk of not detecting a material misstatement resulting from fraud is higher than for one resulting from error, as fraud may involve collusion, forgery, intentional omissions, misrepresentations, or override of internal control.

A member firm of Ernst & Young Global Limited

Shape the future with confidence

The original report included herein is in the Indonesian language.

Laporan Auditor Independen (lanjutan)

Laporan No. 00218/2.1505/AU.1/05/0694-4/1/III/2026 (lanjutan)

Tanggung jawab auditor terhadap audit atas laporan keuangan konsolidasian (lanjutan)

Sebagai bagian dari suatu audit berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh IAPI, kami menerapkan pertimbangan profesional dan mempertahankan skeptisisme profesional selama audit. Kami juga: (lanjutan)

- Memeroleh suatu pemahaman tentang pengendalian internal yang relevan dengan audit untuk mendesain prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas keefektivitasan pengendalian internal Kelompok Usaha.

- Mengevaluasi ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan serta kewajaran estimasi akuntansi dan pengungkapan terkait yang dibuat oleh manajemen.

- Menyimpulkan ketepatan penggunaan basis akuntansi kelangsungan usaha oleh manajemen dan, berdasarkan bukti audit yang diperoleh, apakah terdapat suatu ketidakpastian material yang terkait dengan peristiwa atau kondisi yang dapat menyebabkan keraguan signifikan atas kemampuan Kelompok Usaha untuk mempertahankan kelangsungan usahanya. Ketika kami menyimpulkan bahwa terdapat suatu ketidakpastian material, kami diharuskan untuk menarik perhatian dalam laporan auditor independen kami ke pengungkapan terkait dalam laporan keuangan konsolidasian atau, jika pengungkapan tersebut tidak memadai, memodifikasi opini kami. Kesimpulan kami didasarkan pada bukti audit yang diperoleh hingga tanggal laporan auditor independen kami. Namun, peristiwa atau kondisi masa depan dapat menyebabkan Kelompok Usaha tidak dapat mempertahankan kelangsungan usaha.

Independent Auditor's Report (continued)

Report No. 00218/2.1505/AU.1/05/0694-4/1/III/2026 (continued)

Auditor's responsibilities for the audit of the consolidated financial statements (continued)

As part of an audit in accordance with Standards on Auditing established by the IICPA, we exercise professional judgment and maintain professional skepticism throughout the audit. We also: (continued)

- Obtain an understanding of internal control relevant to the audit in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on the effectiveness of the Group's internal control.

- Evaluate the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates and related disclosures made by management.

- Conclude on the appropriateness of management's use of the going concern basis of accounting and, based on the audit evidence obtained, whether a material uncertainty exists related to events or conditions that may cast significant doubt on the Group's ability to continue as a going concern. If we conclude that a material uncertainty exists, we are required to draw attention in our independent auditor's report to the related disclosures in the consolidated financial statements or, if such disclosures are inadequate, to modify our opinion. Our conclusion is based on the audit evidence obtained up to the date of our independent auditor's report. However, future events or conditions may cause the Group to cease to continue as a going concern.

A member firm of Ernst & Young Global Limited

Shape the future with confidence

The original report included herein is in the Indonesian language.

Laporan Auditor Independen (lanjutan)

Laporan No. 00218/2.1505/AU.1/05/0694-4/1/III/2026 (lanjutan)

Tanggung jawab auditor terhadap audit atas laporan keuangan konsolidasian (lanjutan)

Sebagai bagian dari suatu audit berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh IAPI, kami menerapkan pertimbangan profesional dan mempertahankan skeptisisme profesional selama audit. Kami juga: (lanjutan)

- Mengevaluasi penyajian, struktur, dan isi laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan, termasuk pengungkapannya, dan apakah laporan keuangan konsolidasian mencerminkan transaksi dan peristiwa yang mendasarinya dengan suatu cara yang mencapai penyajian wajar.

- Memeroleh bukti audit yang cukup dan tepat terkait informasi keuangan entitas atau aktivitas bisnis dalam Kelompok Usaha untuk menyatakan opini atas laporan keuangan konsolidasian. Kami bertanggung jawab atas arahan, supervisi, dan pelaksanaan audit grup. Kami tetap bertanggung jawab sepenuhnya atas opini audit kami.

Kami mengomunikasikan kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola mengenai, antara lain, ruang lingkup dan saat yang direncanakan atas audit serta temuan audit signifikan, termasuk setiap defisiensi signifikan dalam pengendalian internal yang teridentifikasi oleh kami selama audit.

Kami juga memberikan suatu pernyataan kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola bahwa kami telah mematuhi ketentuan etika yang relevan mengenai independensi, dan mengomunikasikan kepada pihak tersebut seluruh hubungan, serta hal-hal lain yang dianggap secara wajar berpengaruh terhadap independensi kami, dan, jika relevan, pengamanan terkait.

Independent Auditor's Report (continued)

Report No. 00218/2.1505/AU.1/05/0694-4/1/III/2026 (continued)

Auditor's responsibilities for the audit of the consolidated financial statements (continued)

As part of an audit in accordance with Standards on Auditing established by the IICPA, we exercise professional judgment and maintain professional skepticism throughout the audit. We also: (continued)

- Evaluate the overall presentation, structure, and content of the consolidated financial statements, including the disclosures, and whether the consolidated financial statements represent the underlying transactions and events in a manner that achieves fair presentation.

- Obtain sufficient appropriate audit evidence regarding the financial information of the entities or business activities within the Group to express an opinion on the consolidated financial statements. We are responsible for the direction, supervision, and performance of the group audit. We remain solely responsible for our audit opinion.

We communicate with those charged with governance regarding, among other matters, the planned scope and timing of the audit and significant audit findings, including any significant deficiencies in internal control that we identify during our audit.

We also provide those charged with governance with a statement that we have complied with relevant ethical requirements regarding independence, and to communicate with them all relationships and other matters that may reasonably be thought to bear on our independence, and where applicable, related safeguards.

A member firm of Ernst & Young Global Limited

Shape the future with confidence

The original report included herein is in the Indonesian language.

Laporan Auditor Independen (lanjutan)

Laporan No. 00218/2.1505/AU.1/05/0694-4/1/III/2026 (lanjutan)

Tanggung jawab auditor terhadap audit atas laporan keuangan konsolidasian (lanjutan)

Dari hal-hal yang dikomunikasikan kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola, kami menentukan hal-hal tersebut yang paling signifikan dalam audit atas laporan keuangan konsolidasian periode kini dan oleh karenanya menjadi hal audit utama. Kami menguraikan hal audit utama tersebut dalam laporan auditor independen kami kecuali peraturan perundang-undangan melarang pengungkapan publik tentang hal audit utama tersebut atau ketika, dalam kondisi yang sangat jarang terjadi, kami menentukan bahwa suatu hal audit utama tidak boleh dikomunikasikan dalam laporan auditor independen kami karena konsekuensi yang merugikan dari mengomunikasikan hal tersebut akan diharapkan secara wajar melebihi manfaat kepentingan publik atas komunikasi tersebut.

Independent Auditor's Report (continued)

Report No. 00218/2.1505/AU.1/05/0694-4/1/III/2026 (continued)

Auditor's responsibilities for the audit of the consolidated financial statements (continued)

From the matters communicated with those charged with governance, we determine those matters that were of most significance in the audit of the consolidated financial statements of the current period and are therefore the key audit matters. We describe such key audit matters in our independent auditor's report unless laws or regulations preclude public disclosure about such key audit matters or when, in extremely rare circumstances, we determine that a key audit matter should not be communicated in our independent auditor's report because the adverse consequences of doing so would reasonably be expected to outweigh the public interest benefits of such communication.

KAP Purwanto Susanti dan Surja

Teniwati Chendana

Registrasi Akuntan Publik No. AP. 0694/*Public Accountant Registration No. AP.0694*

18 Maret 2026/*March 18, 2026*

00218

The original consolidated financial statements included herein are in Indonesian language.

PT AKR CORPORINDO TBK
DAN ENTITAS ANAKNYA
LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2025
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

PT AKR CORPORINDO TBK
AND ITS SUBSIDIARIES
CONSOLIDATED STATEMENT OF FINANCIAL POSITION
As of December 31, 2025
(Expressed in Thousands of Rupiah, unless Otherwise Stated)

	2025	Catatan/ *Notes*	2024	
Aset				***Assets***
Aset Lancar				***Current Assets***
Kas dan setara kas	6.404.299.375	3,4	5.365.991.608	*Cash and cash equivalents*
Piutang usaha		3,5a		*Trade receivables*
Pihak berelasi	148.422	31	943.477	*Related parties*
Pihak ketiga - neto	9.544.509.087		7.562.546.795	*Third parties - net*
Piutang lain-lain		3,5b		*Other receivables*
Pihak berelasi	2.315.888	31	5.357.930	*Related parties*
Pihak ketiga	43.387.027		38.910.981	*Third parties*
Persediaan - neto	2.601.111.632	6	3.462.763.531	*Inventories - net*
Persediaan tanah kawasan industri	4.013.228.173	13	3.756.816.356	*Industrial estate land inventory*
Pajak dibayar di muka	135.665.526	26a	147.198.948	*Prepaid taxes*
Uang muka	59.980.112		147.409.624	*Advance payments*
Biaya dibayar di muka	88.080.384	7	81.762.138	*Prepaid expenses*
Aset lancar lainnya	430.990.526	3,8,26c	428.410.352	*Other current assets*
Total Aset Lancar	**23.323.716.152**		**20.998.111.740**	***Total Current Assets***
Aset Tidak Lancar				***Non-Current Assets***
Piutang usaha jangka panjang dari pihak ketiga - neto	1.224.582.641	3,5a	304.429.436	*Long-term trade receivables from third parties - net*
Investasi pada entitas asosiasi	535.825.092	9	492.359.823	*Investments in associates*
Aset pajak tangguhan - neto	181.237.136	26d	188.343.792	*Deferred tax assets - net*
Properti investasi	1.816.567.520	12	1.816.567.520	*Investment property*
Aset tetap - neto	6.810.814.885	10,18,33	6.365.009.877	*Property, plant and equipment - net*
Aset keuangan pada nilai wajar melalui laba rugi	250.000.000	3,18	-	*Financial assets at fair value through profit or loss*
Aset hak-guna - neto	839.161.376	11,31	793.367.518	*Right-of-use assets - net*
Estimasi tagihan pajak penghasilan jangka panjang	70.449.440	26c	15.571.175	*Estimated claims for tax refund - long-term*
Persediaan tanah kawasan industri untuk pengembangan	1.421.440.536	13	1.983.264.085	*Industrial estate land inventory for development*
Uang muka	-	33	27.211.667	*Advance payments*
Aset keuangan tidak lancar lainnya - neto	37.856.217	3,33	74.742.610	*Other non-current financial assets - net*
Aset tidak lancar lainnya - neto	50.630.262		49.705.125	*Other non-current assets - net*
Total Aset Tidak Lancar	**13.238.565.105**		**12.110.572.628**	***Total Non-Current Assets***
Total Aset	**36.562.281.257**		**33.108.684.368**	***Total Assets***

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan.

The accompanying notes to the consolidated financial statements form an integral part of these consolidated financial statements.

**PT AKR CORPORINDO TBK
DAN ENTITAS ANAKNYA
LAPORAN POSISI KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (lanjutan)
Tanggal 31 Desember 2025
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
kecuali Dinyatakan Lain)**

***PT AKR CORPORINDO TBK
AND ITS SUBSIDIARIES
CONSOLIDATED STATEMENT OF
FINANCIAL POSITION (continued)
As of December 31, 2025
(Expressed in Thousands of Rupiah,
unless Otherwise Stated)***

	2025	Catatan/ *Notes*	2024	
Liabilitas dan Ekuitas				***Liabilities and Equity***
Liabilitas				***Liabilities***
Liabilitas Jangka Pendek				***Current Liabilities***
Hutang bank jangka pendek	237.365.000	3,17	7.000.000	*Short-term bank loan*
Hutang usaha		3		*Trade payables*
Pihak berelasi	55.015.398	31	54.828.597	*Related party*
Pihak ketiga	12.278.873.627	14a	10.336.753.865	*Third parties*
Hutang lain-lain - pihak ketiga	209.351.573	3,14b	464.043.998	*Other payables - third parties*
Hutang pajak	653.587.230	26b	402.699.824	*Taxes payable*
Biaya masih harus dibayar	663.234.721	3,15	585.685.122	*Accrued expenses*
Liabilitas imbalan kerja jangka pendek	118.052.612	28	144.298.160	*Short-term employee benefits liabilities*
Liabilitas sewa jangka pendek	71.402.299	3,16	45.084.227	*Current lease liabilities*
Liabilitas kontrak jangka pendek	311.093.601	12	272.002.142	*Current contract liabilities*
Hutang bank jangka panjang yang jatuh tempo dalam satu tahun	1.182.438.653	3,18	1.140.851.204	*Current maturities of long-term bank loans*
Hutang dividen	56.785.476	3	1.000.288	*Dividend payable*
Total Liabilitas Jangka Pendek	**15.837.200.190**		**13.454.247.427**	***Total Current Liabilities***
Liabilitas Jangka Panjang				***Non-Current Liabilities***
Liabilitas pajak tangguhan - neto	40.939.690	26d	25.699.726	*Deferred tax liabilities - net*
Hutang bank jangka panjang setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun	3.703.087.919	3,18	3.645.033.749	*Long-term bank loans net of current maturities*
Liabilitas imbalan pasca kerja	210.005.038	28	179.043.946	*Post-employment benefits liabilities*
Liabilitas kontrak jangka panjang	631.125.850	12	631.405.255	*Non-current contract liabilities*
Liabilitas sewa jangka panjang	518.488.414	3,16	479.142.813	*Non-current lease liabilities*
Hutang dividen	-	3,19	54.107.938	*Dividend payable*
Liabilitas jangka panjang lainnya	11.484.687		16.011.040	*Other non-current liabilities*
Total Liabilitas Jangka Panjang	**5.115.131.598**		**5.030.444.467**	***Total Non-Current Liabilities***
Total Liabilitas	**20.952.331.788**		**18.484.691.894**	***Total Liabilities***

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan.

The accompanying notes to the consolidated financial statements form an integral part of these consolidated financial statements.

The original consolidated financial statements included herein are in Indonesian language.

**PT AKR CORPORINDO TBK
DAN ENTITAS ANAKNYA
LAPORAN POSISI KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (lanjutan)
Tanggal 31 Desember 2025
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
kecuali Dinyatakan Lain)**

***PT AKR CORPORINDO TBK
AND ITS SUBSIDIARIES
CONSOLIDATED STATEMENT OF
FINANCIAL POSITION (continued)
As of December 31, 2025
(Expressed in Thousands of Rupiah,
unless Otherwise Stated)***

	2025	Catatan/ *Notes*	2024	
Ekuitas				***Equity***
Ekuitas yang Dapat Diatribusikan Kepada Pemilik Entitas Induk				***Equity Attributable to the Owners of the Parent Entity***
Modal saham - nilai nominal Rp20 per saham (angka penuh) Modal dasar - 37.500.000.000 saham Modal ditempatkan dan disetor penuh - 20.073.474.600 saham	401.469.492	20	401.469.492	*Share capital – Rp20 par value per share (full amount) Authorized - 37,500,000,000 shares Issued and fully paid - 20,073,474,600 shares*
Tambahan modal disetor	1.365.578.353	21	1.301.477.917	*Additional paid-in capital*
Saham treasuri - 273.705.000 saham pada tanggal 31 Des. 2025 (2024: 320.655.000 saham)	(96.093.902)	20	(112.577.374)	*Treasury stock - 273,705,000 shares as of Dec. 31, 2025 (2024: 320,655,000 shares)*
Selisih kurs karena penjabaran laporan keuangan	275.160.157		251.982.560	*Exchange difference due to translation of financial statements*
Komponen ekuitas lainnya Bagian atas perubahan lainnya dari ekuitas entitas anak	68.994.086	22	68.994.782	*Other component of equity Share of other changes in equity of subsidiaries*
Saldo laba				*Retained earnings*
- Ditentukan penggunaannya	4.118.000	27	3.918.000	*Appropriated -*
- Tidak ditentukan penggunaannya	10.136.709.446		9.647.271.262	*Unappropriated -*
	12.155.935.632		11.562.536.639	
Kepentingan nonpengendali	3.454.013.837	19	3.061.455.835	*Non-controlling interests*
Total Ekuitas	**15.609.949.469**		**14.623.992.474**	***Total Equity***
Total Liabilitas dan Ekuitas	**36.562.281.257**		**33.108.684.368**	***Total Liabilities and Equity***

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan.

The accompanying notes to the consolidated financial statements form an integral part of these consolidated financial statements.

The original consolidated financial statements included herein are in Indonesian language.

**PT AKR CORPORINDO TBK
DAN ENTITAS ANAKNYA
LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN KONSOLIDASIAN
Untuk Tahun yang Berakhir
pada Tanggal 31 Desember 2025
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
kecuali Dinyatakan Lain)**

***PT AKR CORPORINDO TBK
AND ITS SUBSIDIARIES
CONSOLIDATED STATEMENT OF
PROFIT OR LOSS AND OTHER
COMPREHENSIVE INCOME
For the Year Ended
December 31, 2025
(Expressed in Thousands of Rupiah,
unless Otherwise Stated)***

	2025	Catatan/ *Notes*	2024	
Pendapatan dari kontrak dengan pelanggan	45.732.540.855	23,31	38.457.126.044	*Revenue from contract with customers*
Pendapatan sewa	285.927.217		272.367.254	*Rental income*
Total Pendapatan	**46.018.468.072**		**38.729.493.298**	***Total Revenues***
Beban Pokok Penjualan dan Pendapatan	(41.920.479.417)	24	(35.220.457.367)	***Cost of Sales and Revenues***
Laba bruto	**4.097.988.655**		**3.509.035.931**	***Gross profit***
Beban Usaha		25,31		***Operating Expenses***
Beban umum dan administrasi	(961.169.832)		(873.443.923)	*General and administrative expenses*
Beban penjualan	(98.127.836)		(101.147.934)	*Selling expenses*
Pendapatan (Beban) Usaha Lainnya				***Other Operating Income (Expenses)***
Laba atas penjualan/pengalihan aset tetap - neto	2.679.292	10	3.733.007	*Gain on sale/transfer of property, plant and equipment - net*
Laba selisih kurs - neto	14.824.560		13.689.654	*Foreign exchange gain - net*
Pendapatan usaha lainnya	39.712.781		38.790.304	*Other operating income*
Beban usaha lainnya	(12.106.041)		(12.191.957)	*Other operating expenses*
Laba usaha	**3.083.801.579**		**2.578.465.082**	***Operating profit***
Penghasilan keuangan	290.778.124		352.599.086	*Finance income*
Pajak final terkait penghasilan keuangan	(45.491.265)		(53.714.989)	*Final tax related to finance income*
Beban keuangan	(73.767.925)	16,17,18	(84.909.111)	*Finance costs*
Bagian atas laba entitas asosiasi	52.199.723	9	46.467.083	*Share in profit of associates*
Laba Sebelum Pajak Final dan Pajak Penghasilan	**3.307.520.236**		**2.838.907.151**	***Profit Before Final and Income Tax***
Pajak final	(25.458.432)		(26.556.061)	*Final tax*
Laba Sebelum Pajak Penghasilan	**3.282.061.804**		**2.812.351.090**	***Profit Before Income Tax***
Pajak penghasilan - neto:				*Income tax - net:*
Pajak kini	(434.396.510)	26c	(393.765.710)	*Current tax*
Pajak tangguhan	(24.249.287)	26d	(19.117.868)	*Deferred tax*
Pajak penghasilan - neto	(458.645.797)		(412.883.578)	*Income tax - net*
Laba Neto Tahun Berjalan	**2.823.416.007**		**2.399.467.512**	***Net Profit for the Year***

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan.

The accompanying notes to the consolidated financial statements form an integral part of these consolidated financial statements.

The original consolidated financial statements included herein are in Indonesian language.

**PT AKR CORPORINDO TBK
DAN ENTITAS ANAKNYA
LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN KONSOLIDASIAN (lanjutan)
Untuk Tahun yang Berakhir
pada Tanggal 31 Desember 2025
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
kecuali Dinyatakan Lain)**

***PT AKR CORPORINDO TBK
AND ITS SUBSIDIARIES
CONSOLIDATED STATEMENT OF
PROFIT OR LOSS AND OTHER
COMPREHENSIVE INCOME (continued)
For the Year Ended
December 31, 2025
(Expressed in Thousands of Rupiah,
unless Otherwise Stated)***

	2025	Catatan/ *Notes*	2024	
Penghasilan Komprehensif Lain				***Other Comprehensive Income***
Pos yang Direklasifikasi ke Laba Rugi pada Periode Mendatang				***Item to be Reclassified to Profit or Loss in Subsequent Period***
Selisih kurs karena penjabaran laporan keuangan	48.063.782		49.726.617	*Exchange difference due to translation of financial statements*
Pos yang Tidak Direklasifikasi ke Laba Rugi pada Periode Mendatang				***Item Not to be Reclassified to Profit or Loss in Subsequent Period***
Keuntungan (kerugian) aktuarial atas imbalan pasca kerja	(6.468.599)	28	4.324.503	*Actuarial gain (loss) of post-employment benefits*
Pajak tangguhan terkait	1.902.667		(1.151.785)	*Related deferred tax*
Laba Komprehensif Lain Tahun Berjalan Setelah Pajak	**43.497.850**		**52.899.335**	***Other Comprehensive Income for the Year, Net of Tax***
Total Penghasilan Komprehensif Tahun Berjalan	**2.866.913.857**		**2.452.366.847**	***Total Comprehensive Income for the Year***
Laba Tahun Berjalan yang Dapat Diatribusikan kepada:				***Profit for the Year Attributable to:***
Pemilik entitas induk	2.472.616.076		2.225.117.975	*Equity holders of parent entity*
Kepentingan nonpengendali	350.799.931	19	174.349.537	*Non-controlling interests*
Laba Neto Tahun Berjalan	**2.823.416.007**		**2.399.467.512**	***Net Profit for the Year***
Total Penghasilan Komprehensif Tahun Berjalan yang Dapat Diatribusikan kepada:				***Total Comprehensive Income for the Year Attributable to:***
Pemilik entitas induk	2.491.227.741		2.253.821.459	*Equity holders of parent entity*
Kepentingan nonpengendali	375.686.116	19	198.545.388	*Non-controlling interests*
Total Penghasilan Komprehensif Tahun Berjalan	**2.866.913.857**		**2.452.366.847**	***Total Comprehensive Income for the Year***
LABA PER SAHAM		30		***EARNINGS PER SHARE***
(dalam Rupiah penuh)				*(in full Rupiah)*
Yang diatribusikan kepada pemilik entitas induk				*Attributable to equity holders of the parent entity*
Dasar	125,24		112,73	*Basic*

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan.

The accompanying notes to the consolidated financial statements form an integral part of these consolidated financial statements.

PT AKR CORPORINDO TBK
DAN ENTITAS ANAKNYA
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS KONSOLIDASIAN
Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2025
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

PT AKR CORPORINDO TBK
AND ITS SUBSIDIARIES
CONSOLIDATED STATEMENT OF CHANGES IN EQUITY
For the Year Ended December 31, 2025
(Expressed in Thousands of Rupiah, unless Otherwise Stated)

	Catatan/ *Notes*	Ekuitas yang Dapat Diatribusikan kepada Pemilik Entitas Induk/*Equity Attributable to the Equity Holders of the Parent Entity*								Kepentingan Nonpengendali/ *Non-controlling Interest*	Total Ekuitas/ *Total Equity*	
		Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh/ *Paid-up Capital Stock*	Tambahan Modal Disetor/ *Additional Paid-in Capital*	Saham Treasuri/ *Treasury Stock*	Saldo Laba/ *Retained Earnings*		Selisih Kurs Karena Penjabaran Laporan Keuangan/ *Exchange Difference Due to Translation of Financial Statements*	Bagian Atas Perubahan Lainnya Dari Ekuitas Entitas Anak/ *Share of Other Changes in Equity of Subsidiaries*	Total/ *Total*			
					Ditentukan Penggunaannya/ *Appropriated*	Tidak Ditentukan Penggunaannya/ *Unappropriated*						
Saldo per 1 Januari 2025		**401.469.492**	**1.301.477.917**	**(112.577.374)**	**3.918.000**	**9.647.271.262**	**251.982.560**	**68.994.782**	**11.562.536.639**	**3.061.455.835**	**14.623.992.474**	***Balance as of January 1, 2025***
Laba tahun berjalan 2025		-	-	-	-	2.472.616.076	-	-	2.472.616.076	350.799.931	2.823.416.007	*Profit for the year 2025*
Penghasilan komprehensif lain		-	-	-	-	(4.565.932)	23.177.597	-	18.611.665	24.886.185	43.497.850	*Other comprehensive income*
Total penghasilan komprehensif tahun berjalan		-	-	-	-	2.468.050.144	23.177.597	-	2.491.227.741	375.686.116	2.866.913.857	*Total comprehensive income for the year*
Pencadangan umum	27	-	-	-	200.000	(200.000)	-	-	-	-	-	*Appropriation of general reserve*
Pembagian dividen kepada pemilik entitas induk	27	-	-	-	-	(1.978.411.960)	-	-	(1.978.411.960)	-	(1.978.411.960)	*Distribution of dividends to equity holders of parent entity*
Penerbitan kembali saham treasuri	21	-	6.944.578	16.483.472	-	-	-	-	23.428.050	-	23.428.050	*Reissuance of treasury stock*
Pelaksanaan MESOP	21	-	57.155.858	-	-	-	-	-	57.155.858	-	57.155.858	*Exercise of MESOP*
Bagian atas perubahan lainnya dari ekuitas entitas anak	22	-	-	-	-	-	-	(696)	(696)	696	-	*Share of other changes in equity of subsidiary*
Penambahan investasi oleh kepentingan nonpengendali	19	-	-	-	-	-	-	-	-	16.871.190	16.871.190	*Additional investment by non-controlling interests*
Saldo per 31 Desember 2025		**401.469.492**	**1.365.578.353**	**(96.093.902)**	**4.118.000**	**10.136.709.446**	**275.160.157**	**68.994.086**	**12.155.935.632**	**3.454.013.837**	**15.609.949.469**	***Balance as of December 31, 2025***

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan.

The accompanying notes to the consolidated financial statements orom an integral part of these consolidated financial statements.

The original consolidated financial statements included herein are in the Indonesian language.

PT AKR CORPORINDO TBK
DAN ENTITAS ANAKNYA
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS KONSOLIDASIAN *(lanjutan)*
Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2025
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

PT AKR CORPORINDO TBK
AND ITS SUBSIDIARIES
CONSOLIDATED STATEMENT OF CHANGES IN EQUITY (continued)
For the Year Ended December 31, 2025
(Expressed in Thousands of Rupiah, unless Otherwise Stated)

	Catatan/ *Notes*	Ekuitas yang Dapat Diatribusikan kepada Pemilik Entitas Induk/*Equity Attributable to the Equity Holders of the Parent Entity*										
		Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh/ *Paid-up Capital Stock*	Tambahan Modal Disetor/ *Additional Paid-in Capital*	Saham Treasuri/ *Treasury Stock*	Saldo Laba/ *Retained Earnings*		Selisih Kurs Karena Penjabaran Laporan Keuangan/ *Exchange Difference Due to Translation of Financial Statements*	Bagian Atas Perubahan Lainnya Dari Ekuitas Entitas Anak/ *Share of Other Changes in Equity of Subsidiaries*	Total/ *Total*	Kepentingan Nonpengendali/ *Non-controlling Interest*	Total Ekuitas/ *Total Equity*	
					Ditentukan Penggunaannya/ *Appropriated*	Tidak Ditentukan Penggunaannya/ *Unappropriated*						
Saldo per 1 Januari 2024		**401.469.492**	**1.287.163.057**	**(118.071.864)**	**3.718.000**	**9.392.897.529**	**226.451.794**	**68.996.200**	**11.262.624.208**	**2.780.333.305**	**14.042.957.513**	***Balance as of January 1, 2024***
Laba tahun berjalan 2024		-	-	-	-	2.225.117.975	-	-	2.225.117.975	174.349.537	2.399.467.512	*Profit for the year 2024*
Penghasilan komprehensif lain		-	-	-	-	3.172.718	25.530.766	-	28.703.484	24.195.851	52.899.335	*Other comprehensive income*
Total penghasilan komprehensif tahun berjalan		-	-	-	-	2.228.290.693	25.530.766	-	2.253.821.459	198.545.388	2.452.366.847	*Total comprehensive income for the year*
Pencadangan umum	27	-	-	-	200.000	(200.000)	-	-	-	-	-	*Appropriation of general reserve*
Pembagian dividen kepada pemilik entitas induk	27	-	-	-	-	(1.973.716.960)	-	-	(1.973.716.960)	-	(1.973.716.960)	*Distribution of dividends to equity holders of parent entity*
Bagian atas perubahan lainnya dari ekuitas entitas anak	23	-	-	-	-	-	-	(1.418)	(1.418)	1.418	-	*Share of other changes in equity of subsidiaries*
Penerbitan kembali saham treasuri	21	-	2.314.860	5.494.490	-	-	-	-	7.809.350	-	7.809.350	*Reissuance of treasury stock*
Pelaksanaan MESOP	21	-	12.000.000	-	-	-	-	-	12.000.000	-	12.000.000	*Exercise of MESOP*
Penambahan investasi oleh kepentingan nonpengendali	20	-	-	-	-	-	-	-	-	82.575.724	82.575.724	*Additional investment by non-controlling interests*
Saldo per 31 Desember 2024		**401.469.492**	**1.301.477.917**	**(112.577.374)**	**3.918.000**	**9.647.271.262**	**251.982.560**	**68.994.782**	**11.562.536.639**	**3.061.455.835**	**14.623.992.474**	***Balance as of December 31, 2024***

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan.

The accompanying notes to the consolidated financial statements orom an integral part of these consolidated financial statements.

**PT AKR CORPORINDO TBK
DAN ENTITAS ANAKNYA
LAPORAN ARUS KAS KONSOLIDASIAN
Untuk Tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2025
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
kecuali Dinyatakan Lain)**

***PT AKR CORPORINDO TBK
AND ITS SUBSIDIARIES
CONSOLIDATED STATEMENT OF CASH FLOWS
For the Year Ended
December 31, 2025
(Expressed in Thousands of Rupiah,
unless Otherwise Stated)***

	2025	Catatan/ *Notes*	2024	
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI				***CASH FLOWS FROM OPERATING ACTIVITIES***
Kas yang diterima dari pelanggan	48.391.108.869		42.610.375.219	*Cash received from customers*
Pembayaran kas kepada pemasok dan untuk beban usaha	(41.432.532.127)		(38.272.118.301)	*Cash payments to suppliers and for operating expenses*
Kas yang diperoleh dari aktivitas operasi	6.958.576.742		4.338.256.918	*Cash provided by operating activities*
Penerimaan dari (pembayaran untuk):				*Cash received from (payments for):*
Penghasilan keuangan	188.704.147		215.740.530	*Finance income*
Beban keuangan	(24.082.337)		(52.398.505)	*Finance costs*
Akuisisi persediaan tanah kawasan industri, termasuk uang muka ke kontraktor dan kapitalisasi bunga	(1.116.305.087)	13	(1.232.041.471)	*Acquisitions of industrial estate land inventory, including advanced payments to contractors and interest capitalization*
Pengembalian pajak penghasilan dan pajak lainnya	620.638.603		324.761.348	*Refund of income tax and other taxes*
Pembayaran pajak penghasilan dan pajak lainnya	(2.686.557.758)		(2.247.687.582)	*Payment of income tax and other taxes*
Kas Neto yang Diperoleh dari Aktivitas Operasi	**3.940.974.310**		**1.346.631.238**	***Net Cash Provided by Operating Activities***
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI				***CASH FLOWS FROM INVESTING ACTIVITIES***
Hasil penjualan/pengalihan aset tetap	5.877.959	10	10.077.582	*Proceeds from sale/transfer of property, plant and equipment*
Penerimaan dividen dari entitas asosiasi	-	9	4.403.386	*Receipt of cash dividend from associate entity*
Penerimaan atas divestasi saham pada entitas asosiasi	486.343	9	-	*Proceed from cash divestment of shares in associate*
Perolehan aset tetap	(1.065.414.188)	10,36	(1.187.078.235)	*Acquisitions of property, plant and equipment*
Investasi pada aset keuangan pada nilai wajar melalui laba rugi	(250.000.000)		-	*Investment in financial assets at fair value through profit or loss*
Uang muka pembelian aset tetap	-		(315.505)	*Advance for purchase of property, plant, and equipment*
Kas Neto yang Digunakan untuk Aktivitas Investasi	**(1.309.049.886)**		**(1.172.912.772)**	***Net Cash Used in Investing Activities***

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan.

The accompanying notes to the consolidated financial statements form an integral part of these consolidated financial statements.

**PT AKR CORPORINDO TBK
DAN ENTITAS ANAKNYA
LAPORAN ARUS KAS KONSOLIDASIAN
(lanjutan)
Untuk Tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2025
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
kecuali Dinyatakan Lain)**

***PT AKR CORPORINDO TBK
AND ITS SUBSIDIARIES
CONSOLIDATED STATEMENT OF CASH FLOWS
(continued)
For the Year Ended
December 31, 2025
(Expressed in Thousands of Rupiah,
unless Otherwise Stated)***

	2025	Catatan/ *Notes*	2024	
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN				***CASH FLOWS FROM FINANCING ACTIVITIES***
Penambahan hutang bank jangka pendek	315.615.000	17	300.500.000	*Proceeds of short-term bank loans*
Pembayaran hutang bank jangka pendek	(85.250.000)	17	(298.500.000)	*Repayments of short-term bank loans*
Penambahan hutang bank jangka panjang	1.488.745.613	18	2.700.000.000	*Proceeds of long-term bank loans*
Pembayaran hutang bank jangka panjang	(1.391.156.266)	18	(2.120.433.892)	*Repayments of long-term bank loans*
Pembayaran liabilitas sewa	(79.841.595)	16	(131.265.846)	*Payment of lease liabilities*
Pembayaran dividen tunai kepada pemilik entitas induk	(1.977.629.460)	27	(1.973.716.960)	*Payments of cash dividends to equity holders of the parent entity*
Penerbitan kembali saham treasuri	23.428.050	21	7.809.350	*Reissuance of treasury stock*
Pembayaran hutang obligasi	-		(37.000.000)	*Payment of bonds payable*
Penerimaan setoran modal dari kepentingan nonpengendali entitas anak	16.871.190	19	82.575.724	*Capital contribution from non-controlling interest of subsidiaries*
Kas Neto yang Digunakan untuk Aktivitas Pendanaan	**(1.689.217.468)**		**(1.470.031.624)**	***Net Cash Used in Financing Activities***
KENAIKAN (PENURUNAN) NETO KAS DAN SETARA KAS	**942.706.956**		**(1.296.313.158)**	***NET INCREASE (DECREASE) IN CASH AND CASH EQUIVALENTS***
Dampak perubahan selisih kurs	95.600.811		126.679.085	*Effect of foreign exchange rate changes*
KAS DAN SETARA KAS AWAL TAHUN	**5.365.991.608**	4	**6.535.625.681**	***CASH AND CASH EQUIVALENTS AT BEGINNING OF YEAR***
KAS DAN SETARA KAS AKHIR TAHUN	**6.404.299.375**	4	**5.365.991.608**	***CASH AND CASH EQUIVALENTS AT END OF YEAR***

Pengungkapan tambahan informasi arus kas disajikan dalam Catatan 36.

Supplemental cash flow information is presented in Note 36.

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan.

The accompanying notes to the consolidated financial statements form an integral part of these consolidated financial statements.

**PT AKR CORPORINDO TBK
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2025 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
kecuali Dinyatakan Lain)**

***PT AKR CORPORINDO TBK
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2025 and
for the Year Then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
unless Otherwise Stated)***

1. UMUM

a. Pendirian dan Informasi Umum

PT AKR Corporindo Tbk ("Perusahaan") didirikan di Surabaya berdasarkan Akta Notaris Sastra Kosasih, S.H., No. 46 tanggal 28 November 1977 yang diubah dengan Akta Notaris No. 26 oleh notaris yang sama tanggal 12 April 1978. Akta pendirian dan perubahannya telah disahkan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia dalam Surat Keputusan No. Y.A.5/151/7 tanggal 14 Juni 1978, didaftarkan pada Pengadilan Negeri Surabaya dalam Surat No. 277/1978 dan No. 278/1978 tanggal 20 Juli 1978 serta diumumkan dalam lembaran Berita Negara No. 101 Tambahan No. 741 tanggal 19 Desember 1978. Pada tahun 1985, Perusahaan memindahkan kantor pusatnya ke lokasinya pada saat ini di Jakarta. Pada tahun 2004, Perusahaan mengganti namanya dari PT Aneka Kimia Raya Tbk. menjadi PT AKR Corporindo Tbk. Anggaran Dasar Perusahaan telah mengalami perubahan dari waktu ke waktu yang mana perubahan terakhir dicakup dalam Akta Notaris Aryanti Artisari, S.H., M.KN., No. 17 tanggal 28 April 2025, mengenai pengangkatan kembali Dewan Komisaris dan Dewan Direksi Perusahaan.

Sesuai dengan Pasal 3 Anggaran Dasar Perusahaan, ruang lingkup kegiatan usaha utama Perusahaan antara lain meliputi bidang industri barang kimia dan bahan bakar minyak; perdagangan besar dan kecil dan distribusi terutama bahan kimia dan bahan bakar minyak ("BBM") dan gas; pengangkutan dan pergudangan (aktivitas penyewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi, ketenagakerjaan, agen perjalanan dan penunjang usaha lainnya); aktivitas profesional, ilmiah dan teknis (jasa); serta kegiatan usaha penunjang yang meliputi pengangkutan dan pergudangan; konstruksi; pengadaan listrik, gas, uap, air panas dan udara dingin.

Perusahaan saat ini bergerak dalam bidang distribusi produk BBM ke pasar industri, distribusi dan perdagangan bahan kimia (seperti *caustic soda*, sodium sulfat, PVC resin dan *soda ash*) yang digunakan oleh berbagai industri di Indonesia sesuai dengan perjanjian distribusi dengan produsen asing dan lokal, penyewaan gudang, kendaraan angkutan, tangki dan jasa logistik lainnya.

1. GENERAL

a. Establishment and General Information

PT AKR Corporindo Tbk (the "Company") was established in Surabaya on November 28, 1977, based on the Notarial Deed No. 46 of Sastra Kosasih, S.H., which was amended by Notarial Deed No. 26 of the same notary dated April 12, 1978. The deed of establishment and its amendment were approved by the Ministry of Justice of the Republic of Indonesia in its Decision Letter No. Y.A.5/151/7 dated June 14, 1978, registered at the District Court of Surabaya in its Letters No. 277/1978 and No. 278/1978 on July 20, 1978, and published in Supplement No. 741 of the State Gazette No. 101 dated December 19, 1978. In 1985, the Company moved its head office to its current location in Jakarta. In 2004, the Company changed its name from PT Aneka Kimia Raya Tbk. to PT AKR Corporindo Tbk. The Articles of Association of the Company have been amended from time to time, the latest of which is covered in Notarial Deed of Aryanti Artisari, S.H., M.KN., No. 17 dated April 28, 2025, regarding the reappointment of Board of Commissioners and Board of Directors of the Company.

As stated in Article 3 of the Company's Articles of Association, the scope of its main business activities comprises of chemical and petroleum industry; wholesale and retail sale trading and distribution of primarily chemical products and petroleum products and gas; transportation and warehousing (activities of lease and finance lease without option rights, employment, travel agent and other business support); professional, scientific and technical (services) activities; and supporting business activities comprises of transportation and warehousing; construction; procurement of electricity, gas, steam, hot water and cool air.

The Company is currently engaged in the distribution of petroleum products to industrial customers, distribution and trading of chemical products (such as caustic soda, sodium sulphate, PVC resin and soda ash) used by various industries in Indonesia in accordance with distributorship agreements with foreign and local manufacturers, rental of warehouses, transportation vehicles, tanks and other logistic services.

**PT AKR CORPORINDO TBK
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2025 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
kecuali Dinyatakan Lain)**

***PT AKR CORPORINDO TBK
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2025 and
for the Year Then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
unless Otherwise Stated)***

1. UMUM (lanjutan)

a. Pendirian dan Informasi Umum (lanjutan)

Perusahaan memulai kegiatan usaha komersialnya pada bulan Juni 1978.

Perusahaan berdomisili di AKR Tower, Lantai 26, Jl. Panjang No. 5, Kebon Jeruk, Jakarta. Kantor cabang utama Perusahaan berlokasi di Jl. Sumatra No. 51-53, Surabaya. Kantor penjualan lainnya sekaligus terminal tangki berlokasi di Medan, Palembang, Lampung, Ciwandan (Banten), Bandung, Semarang, Pontianak, Balikpapan, Banjarmasin, Stagen (Kalimantan Selatan), Muara Teweh (Kalimantan Tengah), Manado, Morowali (Sulawesi Tengah) dan Bali.

Anggota Dewan Komisaris, Direksi dan Komite Audit Perusahaan pada 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut:

		31 Desember 2025/ *December 31, 2025*	31 Desember 2024/ *December 31,2024*		
Dewan Komisaris					*Board of Commissioners (BOC)*
Presiden Komisaris	:	Soegiarto Adikoesoemo	Soegiarto Adikoesoemo	:	*President Commissioner*
Komisaris Independen	:	Moh. Fauzi M. Ichsan	Moh. Fauzi M. Ichsan	:	*Independent Commissioner*
Komisaris	:	Sofyan A. Djalil	Sofyan A. Djalil	:	*Commissioner*
Dewan Direksi					*Board of Directors (BOD)*
Presiden Direktur	:	Haryanto Adikoesoemo	Haryanto Adikoesoemo	:	*President Director*
Direktur	:	Jimmy Tandyo	Jimmy Tandyo	:	*Directors*
		Bambang Soetiono	Bambang Soetiono		
		Mery Sofi	Mery Sofi		
		Suresh Vembu	Suresh Vembu		
		Nery Polim	Nery Polim		
		Termurti Tiban	Termurti Tiban		
Komite Audit					*Audit Committee*
Ketua	:	Moh. Fauzi M. Ichsan	Moh. Fauzi M. Ichsan	:	*Chairman*
Anggota	:	Sartono*	Sahat Pardede	:	*Members*
		Djisman Simandjuntak	Djisman Simandjuntak		

Susunan Dewan Komisaris dan Direksi diangkat berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan 2025 tanggal 28 April 2025 dengan hasil yang dilaporkan melalui Surat No. 039/L.AKR.CS/2025. Kemudian Susunan Komite Audit diangkat berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris No. 048/L.AKR.CS/2025 yang berlaku efektif sejak tanggal 23 Mei 2025.

Pada tanggal 31 Desember 2025, Perusahaan dan Entitas Anak mempunyai 2.140 karyawan tetap (2024: 2.074) (tidak diaudit).

*) Efektif tanggal 1 Januari 2026, Bapak Sartono digantikan oleh Bapak Handoko Tripriyono.

1. GENERAL (continued)

a. Establishment and General Information (continued)

The Company started its commercial operations in June 1978.

The Company is domiciled at AKR Tower, 26th Floor, Jl. Panjang No. 5, Kebon Jeruk, Jakarta. Its major branch office is located at Jl. Sumatra No. 51-53, Surabaya. Other sales office also is located in Medan, Palembang, Lampung, Ciwandan (Banten), Bandung, Semarang, Pontianak, Balikpapan, Banjarmasin, Stagen (South Kalimantan), Muara Teweh (Central Kalimantan), Manado, Morowali (Central Sulawesi) and Bali.

The members of the Company's Boards of Commissioners ("BOC") and Directors ("BOD") and Audit Committee on December 31, 2025 and 2024 are as follows:

The composition of BOD and BOC appointed on the 2025 Annual General Meeting of Shareholders on April 28, 2025, with the results reported through its letter No. 039/L.AKR.CS/2025. Then, the composition of the Audit Committee was appointed based on the Decree of the Board of Commissioners No. 048/L.AKR. CS/2025, which takes effect as of May 23, 2025.

The Company and its Subsidiaries have total permanent employees of 2,140 as of December 31, 2025 (2024: 2,074) (unaudited).

*) *Effective on January 1, 2026, Mr. Sartono is changed to Mr. Handoko Tripriyono.*

**PT AKR CORPORINDO TBK
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2025 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
kecuali Dinyatakan Lain)**

***PT AKR CORPORINDO TBK
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2025 and
for the Year Then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
unless Otherwise Stated)***

1. UMUM (lanjutan)

b. Entitas Anak yang Dikonsolidasi

Entitas Induk dan Entitas Induk Terakhir dari Perusahaan dan Entitas Anak (bersama-sama disebut sebagai "Kelompok Usaha AKR" atau "Kelompok Usaha") adalah PT Arthakencana Rayatama yang merupakan bagian dari kelompok Usaha yang dimiliki oleh keluarga Soegiarto dan Haryanto Adikoesoemo yang berbasis di Indonesia.

1. GENERAL (continued)

b. Consolidated Subsidiaries

The Parent and Ultimate Parent Company of the Company and its Subsidiaries (together referred to as "AKR Group" or the "Group") is PT Arthakencana Rayatama which is part of the business group owned by Soegiarto's and Haryanto Adikoesoemo's family based in Indonesia.

Entitas Anak/ *Subsidiaries*	Domisili/ *Domicile*	Kegiatan Pokok/ *Principal Activity*	Persentase Pemilikan/ *Percentage of Ownership*		Mulai Beroperasi/ *Start of Commercial Operations*	Total Aset Sebelum Eliminasi (Dalam Jutaan Rupiah)/ *Total Assets Before Elimination (In Millions of Rupiah)*	
			31 Dec. 2025/ *Dec. 31, 2025*	31 Des. 2024/ *Dec. 31, 2024*		31 Dec. 2025/ *Dec. 31, 2025*	31 Des. 2024/ *Dec. 31, 2024*
PT Usaha Era Pratama Nusantara ("UEPN") dan Entitas Anak/ *and Subsidiary*	Surabaya	Jasa logistik/ *Logistic services*	99,99	99,99	2000	13.077.498	12.171.806
PT Anugerah Krida Retailindo ("AKRIDA") dan Entitas Anak/*and Subsidiaries*	Jakarta	Perdagangan, perusahaan *holding*/ *Trading, holding company*	99,99	99,99	2018	2.212.100	2.107.729
PT Jakarta Tank Terminal ("JTT")	Jakarta	Terminal tangki penyimpanan/ *Tank storage terminal*	51,00	51,00	2010	1.349.634	1.179.575
PT AKR Sea Transport ("AST")	Jakarta	Pelayaran domestik/ *Domestic shipping*	99,99	99,99	2013	938.602	867.263
PT Andahanesa Abadi ("Andahanesa") dan Entitas Anak/*and Subsidiaries*	Jakarta	Jasa logistik/ *Logistic services*	99,99	99,99	1982	558.650	612.297
PT Arjuna Utama Kimia ("Aruki")	Surabaya	Pabrikan bahan perekat/ *Manufacturing of adhesive materials*	99,96	99,96	1976	335.507	377.797
PT AKR Transportasi Indonesia ("ATI")	Jakarta	Jasa logistik/ *Logistic services*	99,90	99,90	2013	325.244	255.182
PT AKR Niaga Indonesia ("ANI") dan Entitas Anak/*and Subsidiary*	Jakarta	Perdagangan kimia dasar/ *Basic chemical trading*	99,99	99,99	2013	106.315	79.595
PT Berkah Buana Energi ("BBE")	Gresik	Distribusi dan pengangkutan/ *Distribution and transportation*	65,00	65,00	2025	102.427	54.898
Chemical Petroleum International Trading Pte. Ltd. ("CPIT")	Singapura	Perdagangan/ *Trading*	100,00	100,00	2024	186.808	84.000
PT Berkah Renewable Energi Nusantara ("BREN")	Gresik	Pembangkitan, pengoperasian, konstruksi dan instalasi tenaga listrik/ *Electrical power generation, operation, construction and installation*	99,97	99,97	-	32.090	30.914
PT Terminal Energi Primer (TEP)	Gresik	Jasa logistik/, *Logistic services*	99,99	99,99	-	26.095	25.083
PT Anugrah Karya Raya (Anugrah)	Jakarta	Perdagangan dan pertambangan batubara/ *Coal trading and mining*	99,99	99,99	2011	701	756

**PT AKR CORPORINDO TBK
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2025 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
kecuali Dinyatakan Lain)**

***PT AKR CORPORINDO TBK
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2025 and
for the Year Then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
unless Otherwise Stated)***

1. UMUM (lanjutan)

b. Entitas Anak yang Dikonsolidasi (lanjutan)

Rincian mengenai entitas anak dari UEPN adalah sebagai berikut:

1. GENERAL (continued)

b. Consolidated Subsidiaries (continued)

The details of the subsidiary of UEPN are as follows:

Entitas Anak/ *Subsidiary*	Domisili/ *Domicile*	Kegiatan Pokok/ *Principal Activity*	Persentase Kepemilikan/ *Percentage of Ownership*		Mulai Beroperasi/ *Start of Commercial Operations*	Total Aset Sebelum Eliminasi (Dalam Jutaan Rupiah)/ *Total Assets Before Elimination (In Millions of Rupiah)*	
			31 Dec. 2025/ *Dec. 31, 2025*	31 Des. 2024/ *Dec. 31, 2024*		31 Dec. 2025/ *Dec. 31, 2025*	31 Des. 2024/ *Dec. 31, 2024*
PT Berkah Kawasan Manyar Sejahtera ("BKMS")	Surabaya	Pengoperasian kawasan industri dan fasilitas pendukung/ *Industrial estate operations and supporting facilities*	60,00	60,00	2015	12.556.694	11.671.519

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2021 tanggal 28 Juni 2021 (PP No. 71/2021), Pemerintah Indonesia telah menetapkan lokasi usaha BKMS di Gresik, Jawa Timur sebagai Kawasan Ekonomi Khusus ("KEK") dalam area batas delineasi dalam PP tersebut. Penetapan ini diharapkan akan membawa nilai tambah untuk BKMS sebagai *developer* dan operator dari Kawasan Industri dan Pelabuhan Jawa Terpadu ("JIIPE") serta para pelaku usaha di dalam Kawasan tersebut.

Based on the Government Regulation Number 71 Year 2021 dated June 28, 2021 (PP No. 71/2021), the Government of Indonesia has designated BKMS commercial location at Gresik, East Java, as a Special Economic Zone ("SEZ") within the area as defined in the PP. This designation is expected to bring value added to both BKMS as the developer and operator of Java Integrated Industrial and Ports Estate ("JIIPE") and the tenants of the said Estate.

Rincian mengenai entitas anak dari Andahanesa adalah sebagai berikut:

The details of the subsidiaries of Andahanesa are as follows:

Entitas Anak/ *Subsidiaries*	Domisili/ *Domicile*	Kegiatan Pokok/ *Principal Activity*	Persentase Kepemilikan/ *Percentage of Ownership*		Mulai Beroperasi/ *Start of Commercial Operations*	Total Aset Sebelum Eliminasi (Dalam Jutaan Rupiah)/ *Total Assets Before Elimination (In Millions of Rupiah)*	
			31 Dec. 2025/ *Dec. 31, 2025*	31 Des. 2024/ *Dec. 31, 2024*		31 Dec. 2025/ *Dec. 31, 2025*	31 Des. 2024/ *Dec. 31, 2024*
PT Terminal Nilam Utara ("TNU")	Surabaya	Jasa logistik/ *Logistic services*	60,00	60,00	2018	337.717	373.079
PT Anugerah Kreasi Pratama Indonesia ("AKPI")	Surabaya	Jasa logistik/ *Logistic services*	99,99	99,99	2025	208.954	232.826
PT Krida Jasa Utama ("KJU")	Jakarta	Jasa logistik/ *Logistic services*	99,80	99,80	-	434	459

**PT AKR CORPORINDO TBK
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2025 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
kecuali Dinyatakan Lain)**

***PT AKR CORPORINDO TBK
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2025 and
for the Year Then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
unless Otherwise Stated)***

1. UMUM (lanjutan)

b. Entitas Anak yang Dikonsolidasi (lanjutan)

Rincian mengenai entitas anak dari AKRIDA adalah sebagai berikut:

1. GENERAL (continued)

b. Consolidated Subsidiaries (continued)

The details of the subsidiaries of AKRIDA are as follows:

Entitas Anak/ *Subsidiaries*	Domisili/ *Domicile*	Kegiatan Pokok/ *Principal Activity*	Persentase Kepemilikan/ *Percentage of Ownership*		Mulai Beroperasi/ *Start of Commercial Operations*	Total Aset Sebelum Eliminasi (Dalam Jutaan Rupiah)/ *Total Assets Before Elimination (In Millions of Rupiah)*	
			31 Dec. 2025/ *Dec. 31, 2025*	31 Des. 2024/ *Dec. 31, 2024*		31 Dec. 2025/ *Dec. 31, 2025*	31 Des. 2024/ *Dec. 31, 2024*
PT Aneka Petroindo Raya ("APR")	Jakarta	Perdagangan/ *Trading*	50,10	50,10	2018	1.984.248	1.912.311
PT Dirgantara Petroindo Raya ("DPR")	Jakarta	Perdagangan/ *Trading*	50,10	50,10	2019	98.937	75.481
PT Anugerah Lubrindo Raya ("ALR") dan Entitas Anak/*and Subsidiaries*	Jakarta	Perdagangan/ *Trading*	80,00	80,00	2019	108.404	98.335
PT Berkah Bunker Service ("BBS")	Surabaya	Jasa logistik/ *Logistic services*	99,99	99,99	-	18.996	20.060

Rincian mengenai entitas anak dari ALR adalah sebagai berikut:

The details of the subsidiaries of ALR are as follows:

Entitas Anak/ *Subsidiaries*	Domisili/ *Domicile*	Kegiatan Pokok/ *Principal Activity*	Persentase Kepemilikan/ *Percentage of Ownership*		Mulai Beroperasi/ *Start of Commercial Operations*	Total Aset Sebelum Eliminasi (Dalam Jutaan Rupiah)/ *Total Assets Before Elimination (In Millions of Rupiah)*	
			31 Dec. 2025/ *Dec. 31, 2025*	31 Des. 2024/ *Dec. 31, 2024*		31 Dec. 2025/ *Dec. 31, 2025*	31 Des. 2024/ *Dec. 31, 2024*
PT Anugerah Lubrindo Batam ("ALB")	Jakarta	Perdagangan/ *Trading*	99,90	99,90	2019	5.172	4.313
Lubrindo Shipping Services Pte.Ltd ("LSS")	Singapura/ *Singapore*	Perdagangan umum (pemasaran minyak pelumas)/ *General trading (marketing of lubricants)*	100	100	2019	1.143	7.915

Rincian mengenai entitas anak dari ANI adalah sebagai berikut:

The details of the subsidiary of ANI are as follows:

Entitas Anak/ *Subsidiary*	Domisili/ *Domicile*	Kegiatan Pokok/ *Principal Activity*	Persentase Kepemilikan/ *Percentage of Ownership*		Mulai Beroperasi/ *Start of Commercial Operations*	Total Aset Sebelum Eliminasi (Dalam Jutaan Rupiah)/ *Total Assets Before Elimination (In Millions of Rupiah)*	
			31 Dec. 2025/ *Dec. 31, 2025*	31 Des. 2024/ *Dec. 31, 2024*		31 Dec. 2025/ *Dec. 31, 2025*	31 Des. 2024/ *Dec. 31, 2024*
PT Anugerah Kimia Indonesia ("AKI")	Jakarta	Perdagangan/ *Trading*	51,00	51,00	2021	105.277	78.527

**PT AKR CORPORINDO TBK
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2025 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
kecuali Dinyatakan Lain)**

***PT AKR CORPORINDO TBK
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2025 and
for the Year Then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
unless Otherwise Stated)***

1. UMUM (lanjutan)

b. Entitas Anak yang Dikonsolidasi (lanjutan)

Aktivitas investasi di tahun 2025

Berdasarkan Akta Notaris Yulia, S.H., No. 3 tanggal 9 April 2025, ADH meningkatkan modal ditempatkan dan disetor dari Rp356.449.000 menjadi Rp366.449.000 dimana Perusahaan mengambil keseluruhan kenaikan saham tersebut sebesar Rp10.000.000. Perusahaan telah melakukan Keterbukaan Informasi melalui Surat No. 033/L-AKR-CS/2025 tanggal 9 April 2025 ke OJK dan BEI.

Berdasarkan Akta Notaris Yulia, S.H., No. 21 tanggal 7 Maret 2025, DPR meningkatkan modal ditempatkan dan disetor dari Rp158.309.600 menjadi Rp176.019.600 dimana AKRIDA mengambil bagian dari peningkatan modal disetor sebanyak Rp8.872.710, sedangkan pemegang saham lainnya, BP Global Investment Limited, mengambil sisa saham sebesar Rp8.837.290.

Selanjutnya, berdasarkan Akta Notaris Yulia, S.H., No. 74 tanggal 24 Oktober 2025, DPR meningkatkan modal ditempatkan dan disetor dari Rp176.019.600 menjadi Rp192.119.600 dimana AKRIDA mengambil bagian dari peningkatan modal disetor sebanyak Rp8.066.100, sedangkan pemegang saham lainnya, BP Global Investment Limited, mengambil sisa saham sebesar Rp8.033.900.

Berdasarkan Akta Notaris Yulia, S.H., No. 55 tanggal 21 Februari 2025, AKRIDA meningkatkan modal ditempatkan dan disetor dari Rp1.039.165.000 menjadi Rp1.048.165.000 dimana Perusahaan mengambil keseluruhan kenaikan saham tersebut sebesar Rp9.000.000. Perusahaan telah melakukan Keterbukaan Informasi melalui Surat No. 017/L-AKR-CS/2025 tanggal 24 Februari 2025 ke OJK dan BEI.

Selanjutnya, berdasarkan Akta Notaris Yulia, S.H., No. 72 tanggal 24 Oktober 2025, AKRIDA meningkatkan modal ditempatkan dan disetor dari Rp1.048.165.000 menjadi Rp1.056.565.000 dimana Perusahaan mengambil keseluruhan kenaikan saham tersebut sebesar Rp8.400.000. Perusahaan telah melakukan Keterbukaan Informasi melalui Surat No. 079/L-AKR-CS/2025 tanggal 28 Oktober 2025 ke Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”) dan Bursa Efek Indonesia (“BEI”).

1. GENERAL (continued)

b. Consolidated Subsidiaries (continued)

Investment activities in 2025

Based on the Notarial Deed of Yulia, S.H., No. 3 dated April 9, 2025, ADH increased its issued and paid-up capital from Rp356,449,000 to Rp366,449,000 whereby the Company subscribed the entire capital increase of Rp10,000,000. The Company has made the Disclosure of Information in its Letter No. 033/L-AKR-CS/2025 dated April 9, 2025 to OJK and IDX.

Based on Notarial Deed of Yulia, S.H., No. 21 dated March 7, 2025, DPR increased its issued and paid-up capital from Rp158,309,600 to Rp176,019,600 whereby AKRIDA subscribed the capital increase of Rp8,872,710, while the other shareholder, BP Global Investment Limited, subscribed the remaining amount of Rp8,837,290.

Further, based on Notarial Deed of Yulia, S.H., No. 74 dated October 24, 2025, DPR increased its issued and paid-up capital from Rp176,019,600 to Rp192,119,600 whereby AKRIDA subscribed the capital increase of Rp8,066,100, while the other shareholder, BP Global Investment Limited, subscribed the remaining amount of Rp8,033,900.

Based on the Notarial Deed of Yulia, S.H., No. 55 dated February 21, 2025, AKRIDA increased its issued and paid-up capital from Rp1,039,165,000 to Rp1,048,165,000 whereby the Company subscribed the entire capital increase of Rp9,000,000. The Company has made the Disclosure of Information in its Letter No. 017/L-AKR-CS/2025 dated February 24, 2025 to OJK and IDX.

Further, based on the Notarial Deed of Yulia, S.H., No. 72 dated October 24, 2025, AKRIDA increased its issued and paid-up capital from Rp1,048,165,000 to Rp1,056,565,000 whereby the Company subscribed the entire capital increase of Rp8,400,000. The Company has made the Disclosure of Information in its Letter No. 079/L-AKR-CS/2025 dated October 28, 2025 to Financial Service Authority (“OJK”) and Indonesia Stock Exchange (“IDX”).

**PT AKR CORPORINDO TBK
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2025 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
kecuali Dinyatakan Lain)**

***PT AKR CORPORINDO TBK
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2025 and
for the Year Then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
unless Otherwise Stated)***

1. UMUM (lanjutan)

b. Entitas Anak yang Dikonsolidasi (lanjutan)

Aktivitas investasi di tahun 2024

Berdasarkan Akta Notaris Yulia, S.H., No. 13 tanggal 8 Januari 2024, AKRIDA meningkatkan modal ditempatkan dan disetor dari Rp821.165.000 menjadi Rp949.165.000 dimana Perusahaan mengambil keseluruhan kenaikan saham tersebut sebesar Rp128.000.000. Perusahaan telah melakukan Keterbukaan Informasi melalui Surat No. 005/L-AKR-CS/2024 tanggal 10 Januari 2024 ke OJK dan BEI.

Selanjutnya, Akta Notaris Yulia, S.H., No. 167 tanggal 25 September 2024, AKRIDA meningkatkan modal ditempatkan dan disetor dari Rp949.165.000 menjadi Rp967.165.000 dimana Perusahaan mengambil keseluruhan kenaikan saham tersebut sebesar Rp18.000.000. Perusahaan telah melakukan Keterbukaan Informasi melalui Surat No. 108/L-AKR-CS/2024 tanggal 26 September 2024 ke ke OJK dan BEI.

Selanjutnya, Akta Notaris Yulia, S.H., No. 126 tanggal 26 November 2024, AKRIDA meningkatkan modal dasar dari Rp1.000.000.000 menjadi Rp1.500.000.000 dan meningkatkan modal ditempatkan dan disetor dari Rp967.165.000 menjadi Rp1.039.165.000 dimana Perusahaan mengambil keseluruhan kenaikan saham tersebut sebesar Rp72.000.000. Perusahaan telah melakukan Keterbukaan Informasi melalui Surat No. 120/L-AKR-CS/2024 tanggal 11 Desember 2024 ke OJK dan BEI.

Berdasarkan Akta Notaris Yulia, S.H., No. 151 tanggal 29 Oktober 2024, APR meningkatkan modal ditempatkan dan disetor dari Rp1.683.713.448 menjadi Rp1.833.790.860 dimana AKRIDA mengambil bagian dari peningkatan modal disetor sebanyak Rp75.188.783, sedangkan pemegang saham lainnya, BP Global Investment Limited, mengambil sisa saham sebesar Rp74.888.629.

1. GENERAL (continued)

b. Consolidated Subsidiaries (continued)

Investment activities in 2024

Based on the Notarial Deed of Yulia, S.H., No. 13 dated January 8, 2024, AKRIDA increased its issued and paid-up capital from Rp821,165,000 to Rp949,165,000 whereby the Company subscribed the entire capital increase of Rp128,000,000. The Company has made the Disclosure of Information in its Letter No. 005/L-AKR-CS/2024 dated January 10, 2024 to OJK and IDX.

Further, on the Notarial Deed of Yulia, S.H., No. 167 dated September 25, 2024, AKRIDA increased its issued and paid-up capital from Rp949,165,000 to Rp967,165,000 whereby the Company subscribed the entire capital increase of Rp18,000,000. The Company has made the Disclosure of Information in its Letter No. 108/L-AKR-CS/2024 dated September 26, 2024 to OJK and IDX.

Moreover, on the Notarial Deed of Yulia, S.H., No. 126 dated November 26, 2024, AKRIDA increased its authorized capital from Rp1,000,000,000 to Rp1,500,000,0000 and increased its issued and paid-up capital from Rp967,165,000 to Rp1,039,165,000 whereby the Company subscribed the entire capital increase of Rp72,000,000. The Company has made the Disclosure of Information in its Letter No. 120/L-AKR-CS/2024 dated December 11, 2024 to OJK and IDX.

Based on Notarial Deed of Yulia, S.H., No. 151 dated October 29, 2024, APR increased its issued and paid-up capital from Rp1,683,713,448 to Rp1,833,790,860 whereby AKRIDA subscribed the capital increase of Rp75,188,783, while the other shareholder, BP Global Investment Limited, subscribed the remaining amount of Rp74,888,629.

**PT AKR CORPORINDO TBK
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2025 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
kecuali Dinyatakan Lain)**

***PT AKR CORPORINDO TBK
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2025 and
for the Year Then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
unless Otherwise Stated)***

1. UMUM (lanjutan)

b. Entitas Anak yang Dikonsolidasi (lanjutan)

Aktivitas investasi di tahun 2024 (lanjutan)

Berdasarkan Akta Notaris Yulia, S.H., No. 32 tanggal 7 Oktober 2024, Perusahaan dan UEPN mendirikan satu entitas baru, PT Terminal Energi Primer ("TEP"). Perusahaan memiliki 99,99% kepemilikan di TEP dan sisanya dimiliki oleh UEPN dengan modal dasar TEP sebesar Rp100.000.000. Modal dasar tersebut telah ditempatkan dan disetor sebesar Rp25.000.000, dimana Perusahaan mengambil bagian dari modal yang disetor Rp24.990.000, sedangkan pemegang saham lainnya, UEPN, mengambil sisa saham sebesar Rp10.000. TEP akan bergerak dalam bidang pergudangan dan penyimpanan, penyimpanan minyak dan gas bumi, dan aktivitas penunjang lainya.

Berdasarkan Akta Notaris Yulia, S.H., No. 16 tanggal 3 Oktober 2024, BBS meningkatkan modal ditempatkan dan disetor dari Rp10.000.000 menjadi Rp20.000.000 dimana AKRIDA mengambil keseluruhan kenaikan saham tersebut sebesar Rp10.000.000.

Berdasarkan Akta Notaris Yulia, S.H., No. 188 tanggal 2 Oktober 2024, DPR meningkatkan modal ditempatkan dan disetor dari Rp142.904.600 menjadi Rp158.309.600 dimana AKRIDA mengambil bagian dari peningkatan modal disetor sebanyak Rp7.717.905, sedangkan pemegang saham lainnya, BP Global Investment Limited, mengambil sisa saham sebesar Rp7.687.095.

Berdasarkan Akta Notaris Yulia, S.H., No. 11 tanggal 8 Januari 2024, ADH meningkatkan modal ditempatkan dan disetor dari Rp205.950.000 menjadi Rp355.950.000 dimana Perusahaan mengambil keseluruhan kenaikan saham tersebut sebesar Rp150.000.000. Perusahaan telah melakukan Keterbukaan Informasi melalui Surat No. 006/L-AKR-CS/2024 tanggal 10 Januari 2024 ke OJK dan BEI.

Selanjutnya, Akta Notaris Yulia, S.H., No. 33 tanggal 12 Juli 2024, ADH meningkatkan modal ditempatkan dan disetor dari Rp355.950.000 menjadi Rp356.449.000 dimana Perusahaan mengambil keseluruhan kenaikan saham tersebut sebesar Rp499.000. Perusahaan telah melakukan Keterbukaan Informasi melalui Surat No. 073/L-AKR-CS/2024 tanggal 18 Juli 2024 ke OJK dan BEI.

1. GENERAL (continued)

b. Consolidated Subsidiaries (continued)

Investment activities in 2024 (continued)

Based on the Notarial Deed of Yulia, S.H., No. 32 dated October 7, 2024, the Company and UEPN established a new entity, PT Terminal Energi Primer ("TEP"). The Company holds a 99.99% ownership in TEP and the remaining is held by UEPN, with a total authorized capital amount of Rp100,000,000. The authorized capital has been issued and paid-up amounting to Rp25,000,000, whereby the Company subscribed the paid-up capital of Rp24,990,000, while the other shareholder, UEPN, subscribed the remaining amount of Rp10,000. TEP will engage in warehousing and storage, oil and gas storage, and other supporting activities.

Based on the Notarial Deed of Yulia, S.H., No. 16 dated October 3, 2024, BBS increased its issued and paid-up capital from Rp10,000,000 to Rp20,000,000 whereby AKRIDA subscribed the entire capital increase of Rp10,000,000.

Based on Notarial Deed of Yulia, S.H., No. 188 dated October 2, 2024, DPR increased its issued and paid-up capital from Rp142,904,600 to Rp158,309,600 whereby AKRIDA subscribed the capital increase of Rp7,717,905, while the other shareholder, BP Global Investment Limited, subscribed the remaining amount of Rp7,687,095.

Based on the Notarial Deed of Yulia, S.H., No. 11 dated January 8, 2024, ADH increased its issued and paid-up capital from Rp205,950,000 to Rp355,950,000 whereby the Company subscribed the entire capital increase of Rp150,000,000. The Company has made the Disclosure of Information in its Letter No. 006/L-AKR-CS/2024 dated January 10, 2024 to OJK and IDX.

Further, on the Notarial Deed of Yulia, S.H., No. 33 dated July 12, 2024, ADH increased its issued and paid-up capital from Rp355.950,000 to Rp356,449,000 whereby the Company subscribed to the entire capital increase of Rp499,000. The Company has made the Disclosure of Information in its Letter No. 073/L-AKR-CS/2024 dated July 18, 2024 to OJK and IDX.

**PT AKR CORPORINDO TBK
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2025 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
kecuali Dinyatakan Lain)**

***PT AKR CORPORINDO TBK
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2025 and
for the Year Then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
unless Otherwise Stated)***

1. UMUM (lanjutan)

b. Entitas Anak yang Dikonsolidasi (lanjutan)

Aktivitas investasi di tahun 2024 (lanjutan)

Pada tanggal 12 April 2024, AKR mendirikan satu entitas baru, Chemical Petroleum International Trading Pte. Ltd. (“CPIT”) di Singapura. AKR memiliki 100% kepemilikan di CPIT. CPIT akan bergerak dalam bidang perdagangan dan distribusi produk kimia dan bahan bakar minyak. Total modal disetor dan ditempatkan CPIT sebesar US$5.000.134,72. Perusahaan telah melakukan Keterbukaan Informasi melalui Surat No. 040/L-AKR-CS/2024 tanggal 17 April 2024 dan No. 055/L-AKR-CS/2024 tanggal 4 Juni 2024 ke OJK dan BEI.

Berdasarkan Akta Notaris Yulia, S.H., No. 63 tanggal 23 Februari 2024, AST meningkatkan modal dasar dari Rp300.000.000 menjadi Rp500.000.000 dan meningkatkan modal ditempatkan dan disetor dari Rp274.900.000 menjadi Rp404.900.000 dimana Perusahaan mengambil keseluruhan kenaikan saham tersebut sebesar Rp130.000.000. Perusahaan telah melakukan Keterbukaan Informasi melalui Surat No. 017/L-AKR-CS/2024 tanggal 27 Februari 2024 ke OJK dan BEI.

Berdasarkan Akta Notaris Yulia, S.H., No. 12 tanggal 8 Januari 2024, AKPI meningkatkan modal dasar dari Rp100.000.000 menjadi Rp500.000.000 dan meningkatkan modal ditempatkan dan disetor dari Rp30.000.000 menjadi Rp180.000.000 dimana Andahanesa mengambil keseluruhan kenaikan saham tersebut sebesar Rp150.000.000.

Berdasarkan Akta Notaris Yulia, S.H., No. 8 tanggal 5 Januari 2024, AKR dan UEPN mendirikan satu entitas baru, PT Berkah Renewable Energi Nusantara (“BREN”). AKR memiliki 99,97% kepemilikan di BREN dan sisanya dimiliki oleh UEPN, dengan jumlah modal disetor sebesar Rp30.000.000. BREN akan bergerak dalam bidang pembangkitan, pengoperasian, konstruksi dan instalasi tenaga listrik. Perusahaan telah melakukan Keterbukaan Informasi melalui Surat No. 004/L-AKR-CS/2024 tanggal 9 Januari 2024 ke OJK dan BEI.

1. GENERAL (continued)

b. Consolidated Subsidiaries (continued)

Investment activities in 2024 (continued)

On April 12, 2024, AKR established a new entity, Chemical Petroleum International Trading Pte. Ltd. (“CPIT”) in Singapore. AKR holds a 100% ownership in CPIT. CPIT will engage mainly in trading and distribution of chemicals and petroleums products. The total paid up capital is amounting to US$5,000,134.72. The Company has made the Disclosure of Information in its Letter No. 040/L-AKR-CS/2024 dated April 17, 2024 and No. 055/L-AKR-CS/2024 dated June 4, 2024 to OJK and IDX.

Based on the Notarial Deed of Yulia, S.H., No. 63 dated February 23, 2024, AST increased its authorized capital from Rp300,000,000 to Rp500,000,000 and increased its issued and paid-up capital from Rp274,900,000 to Rp404,900,000 whereby the Company subscribed the entire capital increase of Rp130,000,000. The Company has made the Disclosure of Information in its Letter No. 017/L-AKR-CS/2024 dated February 27, 2024 to OJK and IDX.

Based on the Notarial Deed of Yulia, S.H., No. 12 dated January 8, 2024, AKPI increased its authorized capital from Rp100,000,000 to Rp500,000,000 and increased its issued and paid-up capital from Rp30,000,000 to Rp180,000,000 whereby Andahanesa subscribed the entire capital increase of Rp150,000,000.

Based on the Notarial Deed of Yulia, S.H., No. 8 dated January 5, 2024, AKR and UEPN established a new entity, PT Berkah Renewable Energi Nusantara (“BREN”). AKR holds a 99.97% ownership in BREN and the remaining is held by UEPN, with a total subscribed capital amount of Rp30,000,000. BREN will engage in electrical power generation, operation, construction and installation activities. The Company has made the Disclosure of Information in its Letter No. 004/L-AKR-CS/2024 dated January 9, 2024 to OJK and IDX.

**PT AKR CORPORINDO TBK
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2025 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
kecuali Dinyatakan Lain)**

***PT AKR CORPORINDO TBK
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2025 and
for the Year Then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
unless Otherwise Stated)***

1. UMUM (lanjutan)

c. Penawaran Umum dan Aktivitas Pencatatan Perusahaan

Pada bulan September 1994, Perusahaan telah melakukan penawaran umum perdana sebanyak 15.000.000 lembar saham dengan harga penawaran sebesar Rp4.000 (dalam Rupiah penuh) per saham. Selanjutnya, pada bulan yang sama, seluruh saham Perusahaan sebanyak 65.000.000 lembar saham dengan nilai nominal Rp1.000 (dalam Rupiah penuh) per saham telah dicatatkan pada BEI.

Pada tahun 1996, para pemegang saham menyetujui pemecahan saham (*stock split*) yang menurunkan nilai nominal saham dari Rp1.000 (dalam Rupiah penuh) menjadi Rp500 (dalam Rupiah penuh) per saham, dan pembagian saham bonus dengan perbandingan 6:10. Pemecahan saham dan pembagian saham bonus tersebut meningkatkan jumlah saham beredar dari 65.000.000 lembar saham menjadi 208.000.000 lembar saham. Sesuai dengan Surat No. 217/BEJ-1.2/1996 tanggal 27 September 1996 dari BEI, seluruh saham Perusahaan yang beredar sebanyak 208.000.000 lembar saham dengan nilai nominal Rp500 (dalam Rupiah penuh) per saham telah dicatatkan pada BEI.

Pada tanggal 24 Agustus 2004, Perusahaan telah mengajukan Pernyataan Pendaftaran dalam Rangka Penawaran Umum Terbatas I (*Rights Issue*) atas 416.000.000 lembar saham dengan harga penawaran Rp500 (dalam Rupiah penuh) per lembar saham kepada Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan ("BAPEPAM-LK"). Pernyataan Pendaftaran tersebut telah efektif pada tanggal 23 September 2004 setelah disetujui oleh para pemegang saham melalui Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa pada tanggal yang sama. Dalam penawaran tersebut, setiap pemegang saham yang memiliki satu lembar saham berhak membeli dua lembar saham yang ditawarkan.

Efektif tanggal 8 November 2004, seluruh saham Perusahaan telah dipindahkan pencatatannya dari Papan Pengembangan ke Papan Utama di BEI berdasarkan Surat dari Bursa Efek tertanggal 5 November 2004.

1. GENERAL (continued)

c. Public Offering of Shares and Corporate Activities of the Company

In September 1994, the Company completed the initial public offer of 15,000,000 shares at an offering price of Rp4,000 (in full Rupiah) per share. Further, in the same month, all of the Company's shares totaling 65,000,000 shares at a par value of Rp1,000 (in full Rupiah) per share were listed on the IDX.

In 1996, the shareholders approved the stock split which resulted in the par value of the shares being reduced from Rp1,000 (in full Rupiah) to Rp500 (in full Rupiah) per share, and the distribution of 6:10 bonus shares. As a result of the stock split and distribution of bonus shares, the number of outstanding shares increased from 65,000,000 to 208,000,000 shares. In accordance with the Letter No. 217/BEJ-1.2/1996 dated September 27, 1996 from the IDX, all of the Company's outstanding shares totaling 208,000,000 shares at a par value of Rp500 (in full Rupiah) per share were listed on the IDX.

On August 24, 2004, the Company submitted the Registration Statement for Limited Public Offering I (Rights Issue) of 416,000,000 shares at an offering price of Rp500 (in full Rupiah) per share to the Indonesia Capital Market and Financial Institution Supervisory Agency ("BAPEPAM-LK"). The Registration Statement became effective on September 23, 2004 after the approval by the shareholders through their Extraordinary Shareholders' Meeting held on the same date. In the offering, every shareholder holding one share was entitled to buy two new shares.

Effective on November 8, 2004, all of the Company's shares were transferred from the listing at the Development Board to Primary Board in the IDX based on the Letter from the Stock Exchange dated November 5, 2004.

**PT AKR CORPORINDO TBK
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2025 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
kecuali Dinyatakan Lain)**

***PT AKR CORPORINDO TBK
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2025 and
for the Year Then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
unless Otherwise Stated)***

1. UMUM (lanjutan)

c. Penawaran Umum dan Aktivitas Pencatatan Perusahaan (lanjutan)

Pada Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tanggal 31 Mei 2007, para pemegang saham menyetujui hal-hal berikut:

- Pemecahan saham (*stock split*) yang menurunkan nilai nominal saham dari Rp500 (dalam Rupiah penuh) menjadi Rp100 (dalam Rupiah penuh) per saham. Pemecahan saham tersebut meningkatkan jumlah saham beredar dari 624.000.000 lembar saham menjadi 3.120.000.000 lembar saham. Pemecahan saham ini menjadi efektif pada tanggal 27 Juli 2007 sebagaimana dinyatakan dalam Surat BEI tanggal 24 Juli 2007 No. PENG-638/BEJ.PSJ/P/07-2007.

- Peningkatan modal dasar Perusahaan yang semula Rp416.000.000 menjadi Rp750.000.000 yang terbagi dalam 7.500.000.000 lembar saham dengan nilai nominal Rp100 (dalam Rupiah penuh) per saham.

- Peningkatan modal disetor melalui mekanisme penambahan modal tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu, melalui program pemberian opsi saham kepada Dewan Direksi, Komisaris selain Komisaris Independen, dan karyawan kunci Perusahaan melalui *Management and Employees Stock Option Plan* ("MESOP") yang pertama kali diperkenalkan pada tahun 2007 dan selesai pada tahun 2020.

1. GENERAL (continued)

c. Public Offering of Shares and Corporate Activities of the Company (continued)

In the Extraordinary General Shareholders' Meeting, held on May 31, 2007, the shareholders approved the following:

- *Stock split which resulted in the par value of the shares being reduced from Rp500 (in full Rupiah) to Rp100 (in full Rupiah) per share. As a result of the stock split, the number of outstanding shares increased from 624,000,000 shares to 3,120,000,000 shares. The stock split was effective on July 27, 2007 as noted IDX's Letter No. PENG-638/BEJ.PSJ/P/07-2007 dated July 24, 2007.*

- *Increase in the authorized capital from Rp416,000,000 to Rp750,000,000 divided into 7,500,000,000 shares at par value of Rp100 (in full Rupiah) per share.*

- *Increase in the subscribed capital through the mechanism of increase of capital without rights issue, by granting share options to the Board of Directors, Commissioners other than Independent Commissioner and key employees of the Company via Management and Employees Stock Option Plan ("MESOP") introduced initially in 2007 and concluded in 2020.*

**PT AKR CORPORINDO TBK
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2025 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
kecuali Dinyatakan Lain)**

***PT AKR CORPORINDO TBK
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2025 and
for the Year Then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
unless Otherwise Stated)***

1. UMUM (lanjutan)

c. Penawaran Umum dan Aktivitas Pencatatan Perusahaan (lanjutan)

Pada tanggal 22 Desember 2009, Perusahaan mengajukan Pernyataan Pendaftaran Penawaran Umum Terbatas II (*Rights Issue II*) kepada BAPEPAM-LK atas 627.658.500 lembar saham dengan nilai nominal saham Rp100 (dalam Rupiah penuh) per lembar dengan harga penawaran sebesar Rp860 per lembar saham (dalam Rupiah penuh). Dalam penawaran tersebut, setiap pemegang saham yang memiliki lima lembar saham berhak membeli satu saham yang ditawarkan. Perusahaan telah memperoleh pernyataan efektif dari Ketua BAPEPAM-LK melalui suratnya No. S-489/BL/2010 tertanggal 20 Januari 2010. Pernyataan tersebut dinyatakan efektif setelah persetujuan dari para pemegang saham melalui Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa pada tanggal 21 Januari 2010. Saham tersebut telah didaftarkan di BEI sejak bulan Februari 2010.

Penerimaan neto dari *Rights Issue II* terhadap biaya-biaya sehubungan dengan pengeluaran saham, sebesar Rp531.529.220 digunakan untuk pembangunan tambahan fasilitas terminal tangki dan dermaga di berbagai lokasi dan untuk keperluan modal kerja umum sehubungan dengan peningkatan kebutuhan persediaan Perusahaan sejalan dengan peningkatan kegiatan operasional sesuai dengan Prospektus yang diterbitkan pada saat *Rights Issue*.

Pada tanggal 20 Desember 2021, para pemegang saham menyetujui pemecahan saham *(stock split)* yang menurunkan nilai nominal saham dari Rp100 (dalam Rupiah penuh) menjadi Rp20 (dalam Rupiah penuh) per saham. Pemecahan saham tersebut meningkatkan jumlah saham dasar semula dari 7.500.000.000 saham menjadi 37.500.000.000 saham dan jumlah saham ditempatkan dan disetor penuh dari semula 4.014.694.920 saham menjadi 20.073.474.600 saham. Sesuai dengan Surat No. S-10033/BEI.PP2/12-2021 tanggal 28 Desember 2021 dari BEI, terhitung mulai tanggal 12 Januari 2022, seluruh saham Perusahaan yang beredar sebanyak 20.073.474.600 lembar saham dengan nilai nominal Rp20 (dalam Rupiah penuh) per saham telah dicatatkan pada BEI.

1. GENERAL (continued)

c. Public Offering of Shares and Corporate Activities of the Company (continued)

On December 22, 2009, the Company submitted the Registration Statement for Limited Public Offering II (Rights Issue II) to BAPEPAM-LK of 627,658,500 shares at par value of Rp100 (in full Rupiah) per share with offering price of Rp860 per share (in full Rupiah). In the offering, every shareholder holding five shares was entitled to buy one new share. The Company has obtained the notice of effectivity from the Chairman of BAPEPAM-LK in his Letter No. S-489/BL/2010 dated January 20, 2010. The notice is effective after the approval from the shareholders through their Extraordinary General Meeting held on January 21, 2010. These shares have been listed on the IDX since February 2010.

The net proceeds from the Rights Issue II, after netting off with related share issuance costs, amounting to Rp531,529,220 were used for the construction of additional tank terminal facilities and jetty in various locations and general working capital requirements in relation to the increase of the Company's inventories in line with the increase of operational activities in accordance with the Prospectus issued during the Rights Issue.

On December 20, 2021, the shareholders approved the stock split which resulted in the par value of the shares being reduced from Rp100 (in full Rupiah) to Rp20 (in full Rupiah) per share. As a result of the stock split, the authorized share capital increased from initial 7,500,000,000 shares to 37,500,000,000 shares and issued and fully paid shares increased from 4,014,694,920 shares to 20,073,474,600 shares. In accordance with the Letter No. S-10033/BEI.PP2/12-2021 dated December 28, 2021 from the IDX, effective on January 12, 2022, all of the Company's outstanding shares totaling 20,073,474,600 shares at a par value of Rp20 (in full Rupiah) per share were listed on the IDX.

**PT AKR CORPORINDO TBK
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2025 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
kecuali Dinyatakan Lain)**

***PT AKR CORPORINDO TBK
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2025 and
for the Year Then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
unless Otherwise Stated)***

1. UMUM (lanjutan)

d. Tanggal Penyelesaian Laporan Keuangan Konsolidasian

Manajemen Perusahaan bertanggung jawab atas penyusunan laporan keuangan konsolidasian yang diotorisasi untuk diterbitkan pada tanggal 18 Maret 2026.

1. GENERAL (continued)

d. Completion Date of the Consolidated Financial Statements

The management of the Company is responsible for the preparation of the consolidated financial statements which were authorized for issue on March 18, 2026.

2. IKHTISAR INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL

a. Dasar Penyajian Laporan Keuangan Konsolidasian

Laporan keuangan konsolidasian telah disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia ("SAK"), yang mencakup Pernyataan dan Interpretasi yang dikeluarkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia ("DSAK IAI") dan Peraturan-Peraturan serta Pedoman Penyajian dan Pengungkapan Laporan Keuangan yang diterbitkan oleh Otoritas Jasa Keuangan ("OJK").

Dasar penyusunan laporan keuangan konsolidasian, kecuali untuk laporan arus kas konsolidasian, adalah dasar akrual. Laporan keuangan konsolidasian tersebut disusun berdasarkan biaya historis, kecuali beberapa akun tertentu disusun berdasarkan pengukuran lain sebagaimana diuraikan dalam kebijakan akuntansi masing-masing akun tersebut.

Laporan arus kas konsolidasian disusun dengan menggunakan metode langsung dengan mengelompokkan arus kas dalam aktivitas operasi, investasi dan pendanaan.

Kebijakan akuntansi yang diterapkan oleh Kelompok Usaha adalah selaras bagi tahun yang dicakup oleh laporan keuangan konsolidasian, kecuali untuk standar akuntansi baru dan revisi seperti diungkapkan pada Catatan 2z dibawah ini.

Kelompok Usaha telah menyusun laporan keuangan konsolidasian dengan dasar bahwa Kelompok Usaha akan terus beroperasi secara berkesinambungan.

2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES INFORMATION

a. Basis of Presentation of the Consolidated Financial Statements

The consolidated financial statements have been prepared in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards ("SAK"), which comprise the Statements and Interpretations issued by the Financial Accounting Standards Board of the Institute of Indonesia Chartered Accountants (Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia or "DSAK IAI") and the Regulations and Guidelines on Financial Statement Presentation and Disclosures issued by Financial Services Authority (Otoritas Jasa Keuangan or " OJK").

The consolidated financial statements, except for the consolidated statements of cash flows, are prepared under the accrual basis of accounting. The measurement basis used is the historical cost, except for certain accounts which are measured on the bases described in the related accounting policies.

The consolidated statements of cash flows are prepared using the direct method with classifications of cash flows into operating, investing and financing activities.

The accounting policies adopted by the Group are consistently applied for the years covered by the consolidated financial statements, except for new and revised accounting standards as disclosed in the following Note 2z.

The Group has prepared the consolidated financial statements on the basis that it will continue to operate as a going concern.

**PT AKR CORPORINDO TBK
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2025 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
kecuali Dinyatakan Lain)**

***PT AKR CORPORINDO TBK
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2025 and
for the Year Then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
unless Otherwise Stated)***

2. IKHTISAR INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

b. Prinsip-prinsip Konsolidasian

Laporan keuangan konsolidasian meliputi laporan keuangan Perusahaan dan entitas-entitas anak. Kendali diperoleh bila Kelompok Usaha terekspos atau memiliki hak atas imbal hasil variabel dari keterlibatannya dengan *investee* dan memiliki kemampuan untuk mempengaruhi imbal hasil tersebut melalui kekuasaannya atas *investee*. Dengan demikian, Kelompok Usaha mengendalikan *investee* jika dan hanya jika Kelompok Usaha memiliki seluruh hal berikut ini:

i) Kekuasaan atas *investee*, yaitu hak yang ada saat ini yang memberi Kelompok Usaha kemampuan kini untuk mengarahkan aktivitas relevan dari *investee*,
ii) Eksposur atau hak atas imbal hasil variabel dari keterlibatannya dengan *investee*, dan
iii) Kemampuan untuk menggunakan kekuasaannya atas *investee* untuk mempengaruhi jumlah imbal hasil.

Bila Kelompok Usaha tidak memiliki hak suara atau hak serupa secara mayoritas atas suatu *investee*, Kelompok Usaha mempertimbangkan semua fakta dan keadaan yang relevan dalam mengevaluasi apakah mereka memiliki kekuasaan atas *investee*, termasuk:

i) Pengaturan kontraktual dengan pemilik hak suara lainnya dari *investee*,
ii) Hak yang timbul atas pengaturan kontraktual lain, dan
iii) Hak suara dan hak suara potensial yang dimiliki Kelompok Usaha.

Kelompok Usaha menilai kembali apakah mereka mengendalikan *investee* bila fakta dan keadaan mengindikasikan adanya perubahan terhadap satu atau lebih dari ketiga elemen dari pengendalian. Konsolidasi atas entitas-entitas anak dimulai sejak Kelompok Usaha memperoleh pengendalian atas entitas anak dan berakhir pada saat Kelompok Usaha kehilangan pengendalian atas entitas anak. Aset, liabilitas, penghasilan dan beban dari entitas anak yang diakuisisi pada tahun tertentu disertakan dalam laporan keuangan konsolidasian sejak tanggal Kelompok Usaha memperoleh kendali sampai tanggal Kelompok Usaha tidak lagi mengendalikan entitas anak tersebut.

2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES INFORMATION (continued)

b. Principles of Consolidation

The consolidated financial statements comprise the financial statements of the Company and its subsidiaries. Control is achieved when the Group is exposed, or has rights, to variable returns from its involvement with the investee and has the ability to affect those returns through its power over the investee. Thus, the Group controls an investee if and only if the Group has all of the following:

i) Power over the investee, that is existing rights that give the Group current ability to direct the relevant activities of the investee,
ii) Exposure, or rights, to variable returns from its involvement with the investee, and
iii) The ability to use its power over the investee to affect its returns.

When the Group has less than a majority of the voting or similar rights of an investee, the Group considers all relevant facts and circumstances in assessing whether it has power over an investee, including:

i) The contractual arrangement with the other vote holders of the investee,
ii) Rights arising from other contractual arrangements, and
iii) The Group's voting rights and potential voting rights.

The Group re-assesses whether or not it controls an investee if facts and circumstances indicate that there are changes to one or more of the three elements of control. Consolidation of subsidiaries begins when the Group obtains control over the subsidiary and ceases when the Group loses control of the subsidiary. Assets, liabilities, income and expenses of a subsidiary acquired during the year are included in the consolidated financial statements from the date the Group gains control until the date the Group ceases to control the subsidiary.

**PT AKR CORPORINDO TBK
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2025 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
kecuali Dinyatakan Lain)**

***PT AKR CORPORINDO TBK
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2025 and
for the Year Then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
unless Otherwise Stated)***

2. IKHTISAR INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

b. Prinsip-prinsip Konsolidasian (lanjutan)

Seluruh laba rugi dan setiap komponen penghasilan komprehensif lain ("PKL") diatribusikan pada pemilik entitas induk dan pada kepentingan nonpengendali ("KNP"), walaupun hal ini akan menyebabkan saldo KNP yang defisit. Bila dipandang perlu, penyesuaian dilakukan terhadap laporan keuangan entitas anak untuk diselaraskan dengan kebijakan akuntansi Kelompok Usaha.

Seluruh aset dan liabilitas, ekuitas, penghasilan dan beban dan arus kas atas transaksi antar anggota Kelompok Usaha dieliminasi sepenuhnya pada saat konsolidasi.

Perubahan dalam bagian kepemilikan entitas induk pada entitas anak yang tidak mengakibatkan hilangnya pengendalian, dicatat sebagai transaksi ekuitas. Bila kehilangan pengendalian atas suatu entitas anak, maka Kelompok Usaha menghentikan pengakuan atas aset (termasuk *goodwill*), liabilitas dan komponen lain dari ekuitas terkait, dan selisihnya diakui pada laba rugi. Bagian dari investasi yang tersisa diakui pada nilai wajar.

c. Transaksi dan Penjabaran Laporan Keuangan dalam Mata Uang Asing

Mata uang pelaporan yang digunakan pada laporan keuangan konsolidasian adalah Rupiah, yang juga merupakan mata uang fungsional setiap entitas dalam Kelompok Usaha, kecuali entitas anak tertentu, yaitu JTT dan CPIT yang memiliki mata uang fungsional Dolar Amerika Serikat ("Dolar AS"). Tiap entitas dalam Kelompok Usaha menentukan mata uang fungsionalnya masing-masing dan laporan keuangannya masing-masing diukur menggunakan mata uang fungsional tersebut.

2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES INFORMATION (continued)

b. Principles of Consolidation (continued)

Profit or loss and each component of other comprehensive income ("OCI") are attributed to the equity holders of the parent of the Group and to the non-controlling interests ("NCI"), even if this results in the NCI having a deficit balance. When necessary, adjustments are made to the financial statements of subsidiaries to bring their accounting policies into line with the Group's accounting policies.

All intra-group assets and liabilities, equity, income, expenses and cash flows relation to transactions between members of the Group are eliminated in full on consolidation.

A change in the parent's ownership interest in a subsidiary, without a loss of control, is accounted for as an equity transaction. If the Group loses control over a subsidiary, it derecognizes the related assets (including goodwill), liabilities, NCI, and other components of equity, while the difference is recognized in the profit or loss. Any investment retained is recognized at fair value.

c. Foreign Currency Transactions and Translation

The reporting currency used in the consolidated financial statements is Indonesian Rupiah, which is also each entity's in the Group functional currency, except for certain subsidiaries, namely JTT and CPIT whose functional currency is United States Dollar ("US Dollar"). Each entity in the Group determines its own functional currency and their financial statements are measured using that functional currency.

**PT AKR CORPORINDO TBK
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2025 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
kecuali Dinyatakan Lain)**

***PT AKR CORPORINDO TBK
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2025 and
for the Year Then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
unless Otherwise Stated)***

2. IKHTISAR INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

c. Transaksi dan Penjabaran Laporan Keuangan dalam Mata Uang Asing (lanjutan)

Untuk tujuan penyajian laporan keuangan konsolidasian, akun-akun Entitas Anak tersebut dijabarkan ke dalam Rupiah dengan menggunakan mekanisme berikut:

- aset dan liabilitas dijabarkan dengan menggunakan kurs pada tanggal pelaporan;
- pendapatan dan beban dijabarkan dengan menggunakan kurs rata-rata periode berjalan;
- akun ekuitas dijabarkan dengan menggunakan kurs historis; dan
- selisih kurs yang terjadi disajikan pada akun "Selisih Kurs karena Penjabaran Laporan Keuangan" di ekuitas.

Transaksi dalam mata uang asing dicatat dalam Rupiah berdasarkan kurs yang berlaku pada saat transaksi dilakukan. Pada tanggal pelaporan, aset dan liabilitas moneter dalam mata uang asing dijabarkan sesuai dengan rata-rata kurs jual dan beli yang diterbitkan oleh Bank Indonesia pada tanggal transaksi perbankan terakhir untuk periode yang bersangkutan, dan laba atau rugi kurs yang timbul, dikreditkan atau dibebankan pada operasi periode yang bersangkutan.

Pada tanggal 31 Desember 2025, nilai tukar yang digunakan untuk Dolar Amerika Serikat ("US$"), mengacu pada *Jakarta Interbank Spot Dollar Rate* ("JISDOR") 1 US$ adalah sebesar Rp16.782 (2024: Rp16.162).

Transaksi dalam mata uang asing selain Dolar AS adalah tidak signifikan.

d. Transaksi Pihak Berelasi

Kelompok Usaha memiliki transaksi dengan pihak berelasi sebagaimana yang didefinisikan dalam PSAK 224, "Pengungkapan Pihak-pihak Berelasi".

Transaksi ini dilakukan berdasarkan persyaratan yang disetujui oleh kedua belah pihak, yang mungkin tidak sama dengan transaksi lain yang dilakukan dengan pihak-pihak yang tidak berelasi.

Transaksi yang signifikan dengan pihak-pihak berelasi telah diungkapkan dalam Catatan 31.

2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES INFORMATION (continued)

c. Foreign Currency Transactions and Translation (continued)

For consolidation purposes, the accounts of those Subsidiaries are translated into Rupiah using the following mechanism:

- *assets and liabilities are translated using exchange rate at reporting date;*
- *revenues and expenses are translated at the average rates of exchange for the period;*
- *equity accounts are translated at historical rates; and*
- *any resulting foreign exchange is presented as "Exchange Difference Due to Translation of Financial Statements" in the equity.*

Transactions involving foreign currencies are recorded in Indonesian Rupiah at the rates of exchange prevailing at the time the transactions are made. At the reporting date, monetary assets and liabilities denominated in foreign currencies are adjusted to reflect the average of the selling and buying rates of exchange prevailing at the last banking transaction date of the period, as published by Bank Indonesia, and any resulting gains or losses are credited or charged to operations of the current period.

At December 31, 2025, the rate of exchange used for United States Dollar ("US$"), refer to Jakarta Interbank Spot Dollar Rate ("JISDOR"), 1 US$ was Rp16,782 (2024: Rp16,162).

Transactions in foreign currencies other than US Dollar are not significant.

d. Transactions with Related Parties

The Group has transactions with related parties as defined under PSAK 224, "Related Party Disclosures".

The transactions are made based on terms agreed by the parties, which may not be the same as those made with unrelated parties.

Significant transactions with related parties are disclosed in Note 31.

**PT AKR CORPORINDO TBK
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2025 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
kecuali Dinyatakan Lain)**

***PT AKR CORPORINDO TBK
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2025 and
for the Year Then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
unless Otherwise Stated)***

2. IKHTISAR INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

d. Transaksi Pihak Berelasi (lanjutan)

Kecuali diungkapkan khusus sebagai pihak berelasi, maka pihak-pihak lain yang disebutkan dalam Catatan atas laporan keuangan konsolidasian merupakan pihak tidak berelasi.

e. Kas dan Setara Kas

Kas dan setara kas dalam laporan posisi keuangan konsolidasian terdiri dari kas, bank dan deposito jangka pendek dengan jangka waktu jatuh tempo antara 3 (tiga) bulan atau kurang pada saat penempatan dan tidak dibatasi penggunaannya, yang dapat segera dikonversikan menjadi kas dalam jumlah yang dapat ditentukan dan mana yang memiliki risiko tidak signifikan dari perubahan nilai.

f. Persediaan

Persediaan dinyatakan sebesar nilai terendah antara biaya perolehan atau nilai realisasi neto. Biaya perolehan ditentukan dengan metode *first-in first-out* ("FIFO"), kecuali untuk persediaan produk kimia tertentu yang menggunakan metode rata-rata tertimbang (*weighted-average method*). Penyisihan atas persediaan usang dan penurunan nilai persediaan, jika ada, dibentuk untuk mengurangi nilai tercatat persediaan menjadi nilai realisasi neto.

Nilai realisasi neto adalah estimasi nilai jual dalam transaksi usaha normal dikurangi dengan estimasi biaya untuk penyelesaian dan biaya untuk menjual produk yang bersangkutan.

Nilai persediaan terdiri dari seluruh nilai pembelian dan biaya terkait untuk memproses sampai dengan persediaan berada dalam kondisi dan tempat yang siap digunakan atau dijual.

g. Biaya Dibayar di Muka

Biaya dibayar di muka diamortisasi selama manfaat masing-masing biaya dengan menggunakan metode garis lurus.

2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES INFORMATION (continued)

d. Transactions with Related Parties (continued)

Unless specifically identified as related parties, the parties disclosed in the Notes to the consolidated financial statements are unrelated parties.

e. Cash and Cash Equivalents

Cash and cash equivalents in the consolidated statement of financial position comprise cash on hand and in banks and short-term deposits with an original maturity of 3 (three) months or less at the time of placements and not restricted to use, that are readily convertible to a known amount of cash and which are subject to an insignificant risk of changes in value.

f. Inventories

Inventories are stated at the lower of cost or net realizable value. Cost is determined using first-in first-out ("FIFO") method, except for certain chemical product inventory which uses the weighted-average method. Allowance for inventory obsolescence and decline in the value of inventories, if any, is provided to reduce the carrying value of inventories to their net realizable value.

Net realizable value is the estimated selling price in the ordinary course of business, less estimated costs of completion and costs necessary to make the sale.

Cost of inventories comprises purchase costs and the related processing costs incurred in bringing the inventories to their present location and condition.

g. Prepaid Expenses

Prepaid expenses are amortized over their beneficial periods using the straight-line method.

**PT AKR CORPORINDO TBK
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2025 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
kecuali Dinyatakan Lain)**

***PT AKR CORPORINDO TBK
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2025 and
for the Year Then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
unless Otherwise Stated)***

2. IKHTISAR INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

h. Investasi pada Entitas Asosiasi

Entitas asosiasi adalah entitas yang terhadapnya Kelompok Usaha memiliki pengaruh signifikan. Pengaruh signifikan adalah kekuasaan untuk berpartisipasi dalam keputusan kebijakan keuangan dan operasional investee, tetapi tidak mengendalikan atau mengendalikan bersama atas kebijakan tersebut.

Pertimbangan yang dibuat dalam menentukan pengaruh signifikan adalah serupa dengan hal-hal yang diperlukan dalam menentukan kendali atas entitas anak.

Investasi Kelompok Usaha pada entitas asosiasi dicatat dengan menggunakan metode ekuitas. Dalam metode ekuitas, investasi awalnya diakui pada harga perolehan. Nilai tercatat investasi disesuaikan untuk mengakui perubahan bagian Kelompok Usaha atas aset neto entitas asosiasi sejak tanggal perolehan.

Laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian mencerminkan bagian Kelompok Usaha atas hasil operasi dari entitas asosiasi. Bila terdapat perubahan yang diakui langsung pada ekuitas dari entitas asosiasi, Kelompok Usaha mengakui bagiannya atas perubahan tersebut dan mengungkapkan hal ini, jika relevan dalam laporan perubahan ekuitas. Laba atau rugi yang belum direalisasi sebagai hasil dari transaksi-transaksi antara Kelompok Usaha dengan entitas asosiasi dieliminasi pada jumlah sesuai dengan kepentingan Kelompok Usaha dalam entitas asosiasi.

Gabungan bagian Kelompok Usaha atas laba rugi entitas asosiasi disajikan pada muka laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian (sebagai laba atau rugi) di luar laba usaha dan mencerminkan laba atau rugi setelah pajak dan kepentingan nonpengendali pada entitas anak dari entitas asosiasi.

Laporan keuangan entitas asosiasi disusun atas periode pelaporan yang sama dengan Kelompok Usaha.

2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES INFORMATION (continued)

h. Investments in Associates

An associate is an entity over which the Group has significant influence. Significant influence is the power to participate in the financial and policy decisions of the investee, but is not control or joint control over those policies.

The considerations made in determining significant influence are similar to those necessary to determine control over subsidiaries.

The Group's investment in its associate is accounted for using the equity method. Under the equity method, the investment in an associate is initially recognized at cost. The carrying amount of the investment is adjusted to recognize changes in the Group's share of net assets of the associate since the acquisition date.

The consolidated statements of profit or loss and other comprehensive income reflect the Group's share of the results of operations of the associates. Where there has been a change recognized directly in the equity of the associates, the Group recognizes its share of any such changes and discloses this, when applicable, in the statement of changes in equity. Unrealized gains and losses resulting from transactions between the Group and the associate are eliminated to the extent of the Group's interest in those associates.

The aggregate of the Group's share of profit or loss of an associate is shown on the face of the consolidated statement of profit or loss and other comprehensive income (as profit or loss) outside operating profit and represents profit or loss after tax and NCI in the subsidiaries of the associate.

The financial statements of the associates are prepared for the same reporting period as the Group.

2. IKHTISAR INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

h. Investasi pada Entitas Asosiasi (lanjutan)

Kelompok Usaha menentukan apakah diperlukan untuk mengakui tambahan rugi penurunan nilai atas investasi Kelompok Usaha dalam entitas asosiasi. Kelompok Usaha menentukan pada setiap tanggal pelaporan apakah terdapat bukti yang obyektif yang mengindikasikan bahwa investasi dalam entitas asosiasi mengalami penurunan nilai. Dalam hal ini, Kelompok Usaha menghitung jumlah penurunan nilai berdasarkan selisih antara jumlah terpulihkan atas investasi dalam entitas asosiasi dan nilai tercatatnya dan mengakuinya dalam laba rugi.

Pada saat kehilangan pengaruh signifikan atas entitas asosiasi, Kelompok Usaha mengukur dan mengakui bagian investasi tersisa pada nilai wajar. Selisih antara nilai tercatat entitas asosiasi dan nilai wajar investasi yang tersisa dan penerimaan dari pelepasan investasi diakui pada laba rugi.

i. Aset Tetap

Aset tetap dinyatakan sebesar biaya perolehan dikurangi akumulasi penyusutan dan rugi penurunan nilai. Biaya perolehan termasuk biaya penggantian bagian aset tetap saat biaya tersebut terjadi, jika memenuhi kriteria pengakuan. Selanjutnya, pada saat inspeksi yang signifikan dilakukan, biaya inspeksi itu diakui ke dalam jumlah tercatat *("carrying amount")* aset tetap sebagai suatu penggantian jika memenuhi kriteria pengakuan. Semua biaya perbaikan dan pemeliharaan yang tidak memenuhi kriteria pengakuan diakui dalam laba rugi pada saat terjadinya.

Penyusutan dihitung dengan menggunakan metode garis lurus berdasarkan estimasi masa manfaat ekonomis aset tetap sebagai berikut:

2. *SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES INFORMATION (continued)*

h. Investments in Associates (continued)

The Group determines whether it is necessary to recognize an additional impairment loss on the Group's investments in its associates. The Group determines at each reporting date whether there is any objective evidence that the investments in the associates are impaired. If this is the case, the Group calculates the amount of impairment as the difference between the recoverable amounts of the investments in associates and their carrying values and recognizes the amount in profit or loss.

Upon loss of significant influence over the associate, the Group measures and recognizes any retained investment at its fair value. Any difference between the carrying amount of the associate and the fair value of the retained investment and proceeds from disposal is recognized in profit or loss.

i. Property, Plant and Equipment

Property, plant and equipment are stated at cost less accumulated depreciation and impairment losses. Such costs include the cost of replacing part of the property, plant and equipment when that cost is incurred, if the recognition criteria are met. Likewise, when a major inspection is performed, its cost is recognized in the carrying amount of the property, plant and equipment as a replacement if the recognition criteria are satisfied. All other repairs and maintenance costs that do not meet the recognition criteria are recognized in profit or loss as incurred.

Depreciation is computed using the straight-line method based on the estimated useful lives of the property, plant and equipment as follows:

	Tahun/ *Years*	Persentase/ *Percentage*	
Bangunan, dermaga, gudang dan tangki penyimpanan	5-24	4,2%-20,0%	*Buildings, jetty, warehouses and storage tanks*
Mesin dan peralatan	3-20	5,0%-33,3%	*Machineries and equipment*
Peralatan gudang dan peralatan pembongkaran di pelabuhan	5-20	5,0%-20,0%	*Warehouse and port handling equipment*
Kendaraan	2-10	10,0%-50,0%	*Vehicles*
Pengembangan gedung yang disewa dan renovasi gedung	5-20	5,0%-20,0%	*Leasehold and building improvements*
Peralatan kantor	3-10	10,0%-33,3%	*Office equipment*
Kapal	20-30	3,3%-5,0%	*Vessels*

2. IKHTISAR INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

i. Aset Tetap (lanjutan)

Beban pemeliharaan dan perbaikan dibebankan pada laba rugi pada saat terjadinya. Beban pemugaran dan penambahan dalam jumlah besar dikapitalisasi kepada jumlah tercatat aset terkait bila besar kemungkinan bagi Kelompok Usaha manfaat ekonomi masa depan menjadi lebih besar dari standar kinerja awal yang ditetapkan sebelumnya dan disusutkan sepanjang sisa masa manfaat aset terkait.

Tanah termasuk biaya pengurusan legal hak atas tanah dalam bentuk Hak Guna Usaha ("HGU"), Hak Guna Bangunan ("HGB") dan Hak Pakai ("HP") ketika tanah diperoleh pertama kali dinyatakan sebesar biaya perolehan dan tidak diamortisasi karena manajemen berpendapat bahwa kemungkinan besar hak atas tanah tersebut dapat diperbaharui/diperpanjang pada saat masa berlakunya selesai.

Biaya pengurusan atas perpanjangan atau pembaruan legal hak atas tanah dalam bentuk HGU, HGB dan HP ditangguhkan dan diamortisasi yang lebih pendek antara umur hukum hak atas tanah dan umur ekonomi tanah, dan disajikan sebagai bagian dari akun "Aset Tidak Lancar Lainnya" pada laporan posisi keuangan konsolidasian.

Bila nilai tercatat suatu aset melebihi taksiran jumlah yang dapat diperoleh kembali (*estimated recoverable amount*) maka nilai tersebut diturunkan ke jumlah yang dapat diperoleh kembali tersebut, yang ditentukan sebagai nilai tertinggi antara harga jual neto atau nilai pakai (Catatan 2u).

Jumlah tercatat aset tetap dihentikan pengakuannya pada saat dilepaskan atau saat tidak ada manfaat ekonomis masa depan yang diharapkan dari penggunaan atau pelepasannya. Laba atau rugi yang timbul dari penghentian pengakuan aset (dihitung sebagai perbedaan antara jumlah neto hasil pelepasan dan jumlah tercatat dari aset) dimasukkan dalam laba rugi pada tahun aset tersebut dihentikan pengakuannya.

Pada setiap akhir tahun buku, nilai residu, umur manfaat dan metode penyusutan di-reviu, dan jika sesuai dengan keadaan, disesuaikan secara prospektif.

2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES INFORMATION (continued)

i. Property, Plant and Equipment (continued)

Repairs and maintenance expenses are taken to the profit or loss when they are incurred. The cost of major renovation and restoration is included in the carrying amount of the related asset when it is probable that future economic benefits in excess of the originally assessed standard of performance of the existing asset will flow to the Group and is depreciated over the remaining useful life of the related asset.

Land, including legal cost of land rights in the form of Right to Cultivate ("Hak Guna Usaha" or "HGU"), Right to Build ("Hak Guna Bangunan" or "HGB") and Right to Use ("Hak Pakai" or "HP") when the land rights were acquired initially, is stated at cost and not amortized as the management is of the opinion that it is probable the titles of land rights can be renewed/extended upon expiration.

The extension or the legal renewal costs of land rights in the form of HGU, HGB and HP are deferred and amortized over the shorter between the land rights' legal life and the economic life of the land, and presented as part of "Other Non-current Assets" account in the consolidated statement of financial position.

When the carrying amount of an asset exceeds its estimated recoverable amount, the asset is written down to its estimated recoverable amount, which is determined as the higher of net selling price or value in use (Note 2u).

An item of property, plant and equipment is derecognized upon disposal or when no future economic benefits are expected from its use or disposal. Any gain or loss arising on derecognition of the asset (calculated as the difference between the net disposal proceeds and the carrying amount of the asset) is included in profit or loss in the year the asset is derecognized.

The assets' residual values, useful lives and methods of depreciation are reviewed, and adjusted prospectively if appropriate, at each financial year end.

2. IKHTISAR INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

i. Aset Tetap (lanjutan)

Aset tetap dalam penyelesaian dicatat sebesar biaya perolehan, yang mencakup kapitalisasi beban pinjaman dan biaya-biaya lainnya yang terjadi sehubungan dengan pendanaan aset tetap dalam penyelesaian tersebut. Akumulasi biaya perolehan akan direklasifikasi ke akun "Aset Tetap" yang bersangkutan pada saat aset tetap tersebut telah selesai dikerjakan dan siap untuk digunakan. Aset tetap dalam penyelesaian tidak disusutkan sampai memenuhi syarat pengakuan sebagai aset tetap seperti diungkapkan di atas.

Kapitalisasi Biaya Pinjaman

Biaya pinjaman terdiri dari beban bunga dan biaya lain yang ditanggung Kelompok Usaha sehubungan dengan peminjaman dana. Biaya pinjaman yang dapat diatribusikan langsung dengan perolehan, pembangunan atau pembuatan aset kualifikasian dikapitalisasi sebagai bagian biaya perolehan aset tersebut. Biaya pinjaman lainnya diakui sebagai beban pada saat terjadi.

Kapitalisasi biaya pinjaman dimulai pada saat aktivitas yang diperlukan untuk mempersiapkan aset agar dapat digunakan sesuai dengan maksudnya, dan pengeluaran untuk aset kualifikasian dan biaya pinjamannya telah terjadi. Kapitalisasi biaya pinjaman dihentikan pada saat selesainya secara substansi seluruh aktivitas yang diperlukan untuk mempersiapkan aset kualifikasian agar dapat digunakan sesuai dengan maksudnya.

j. Sewa

Pada tanggal permulaan kontrak, Kelompok Usaha menilai apakah kontrak merupakan, atau mengandung, sewa. Suatu kontrak merupakan atau mengandung sewa jika kontrak tersebut memberikan hak untuk mengendalikan penggunaan aset identifikasian selama suatu jangka waktu untuk dipertukarkan dengan imbalan.

2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES INFORMATION (continued)

i. Property, Plant and Equipment (continued)

Constructions in-progress are stated at cost, including capitalized borrowing costs and other charges incurred in connection with the financing of the said asset constructions. The accumulated costs will be reclassified to the appropriate "Property, Plant and Equipment" account when the construction is completed. Assets under construction are not depreciated until they fulfill criteria for recognition as property, plant and equipment as disclosed above.

Capitalization of Borrowing Costs

Borrowing costs consist of interest expenses and other financing charges that the Group incurs in connection with the borrowing funds. Borrowing costs that are directly attributable to the acquisition, construction or production of a qualifying asset are capitalized as part of the cost of the related asset. All other borrowing costs are recognized as expenses when incurred.

Capitalization of borrowing costs commences when the activities to prepare the qualifying asset for its intended use are in progress and the expenditures for the qualifying asset and the borrowing costs have been incurred. Capitalization of borrowing costs ceases when substantially all the activities necessary to prepare the qualifying assets are completed for their intended use.

j. Leases

At the inception of a contract, the Group assesses whether the contract is, or contains, a lease. A contract is or contains a lease if the contract conveys the right to control the use of an identified assets for a period of time in exchange for consideration.

**PT AKR CORPORINDO TBK
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2025 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
kecuali Dinyatakan Lain)**

***PT AKR CORPORINDO TBK
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2025 and
for the Year Then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
unless Otherwise Stated)***

2. IKHTISAR INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

j. Sewa (lanjutan)

Kelompok Usaha sebagai Penyewa

Kelompok Usaha menerapkan pendekatan pengakuan dan pengukuran tunggal untuk semua sewa, kecuali untuk sewa jangka pendek dan sewa aset bernilai rendah. Kelompok Usaha mengakui liabilitas sewa untuk melakukan pembayaran sewa dan aset hak-guna yang mewakili hak untuk menggunakan aset pendasar.

Aset hak-guna

Pada tanggal permulaan sewa, Kelompok Usaha mengakui aset hak-guna dan liabilitas sewa. Aset hak-guna diukur pada biaya perolehan, dimana meliputi jumlah pengukuran awal liabilitas sewa yang disesuaikan dengan pembayaran sewa yang dilakukan pada atau sebelum tanggal permulaan, ditambah dengan biaya langsung awal yang dikeluarkan dan estimasi biaya yang akan dikeluarkan untuk membongkar dan memindahkan aset pendasar atau untuk merestorasi aset pendasar sesuai kondisi yang disyaratkan dan ketentuan sewa, dikurangi dengan insentif sewa yang diterima.

Aset hak-guna kemudian disusutkan menggunakan metode garis lurus dari tanggal permulaan hingga tanggal yang lebih awal antara akhir umur manfaat aset hak-guna atau akhir masa sewa.

	Tahun/ *Years*
Tanah	5-30
Bangunan dan tangki	2-5
Kendaraan	2

Jika sewa mengalihkan kepemilikan aset pendasar kepada Kelompok Usaha pada akhir masa sewa atau jika biaya perolehan aset hak-guna merefleksikan Kelompok Usaha akan mengeksekusi opsi beli, maka Kelompok Usaha menyusutkan aset hak-guna dari tanggal permulaan hingga akhir umur manfaat aset pendasar. Jika tidak, maka Kelompok Usaha menyusutkan aset hak-guna dari tanggal permulaan hingga tanggal yang lebih awal antara akhir umur manfaat aset hak-guna atau akhir masa sewa. Aset hak-guna juga dievaluasi untuk penurunan nilai (Catatan 2u).

2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES INFORMATION (continued)

j. Leases (continued)

The Group as Lessee

The Group applies a single recognition and measurement approach for all leases, except for short-term leases and leases of low-value assets. The Group recognizes lease liabilities to make lease payments and right-of-use assets representing the right to use the underlying assets.

Right-of-use assets

The Group recognizes a right-of-use asset and a lease liability at the lease commencement date. The right-of-use asset is initially measured at cost, which comprises the initial amount of the lease liability adjusted for any lease payment made at or before the commencement date, plus any initial direct cost incurred and an estimate of costs to dismantle and remove the underlying asset or to restore the underlying asset to the condition required by the terms and conditions of the lease, less any lease incentives received.

The right-of-use asset is subsequently depreciated using the straight-line method from the commencement date to the earlier of the end of the useful life of the right-of-use asset or the end of the lease term.

Land	
Building and tanks	
Vehicles	

If the lease transfers the ownership of the underlying asset to the Group by the end of the lease term or if the cost of the right-of-use asset reflects that the Group will exercise a purchase option, the Group depreciates the right-of-use asset from the commencement date to the end of the useful life of the underlying asset. Otherwise, the Group depreciates the right-of-use asset from the commencement date to the earlier of the end of the useful life of the right-of-use asset or the end of the lease term. The right-of-use assets are also assessed for impairment (Note 2u).

2. IKHTISAR INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

j. Sewa (lanjutan)

Kelompok Usaha sebagai Penyewa (lanjutan)

Liabilitas sewa

Pada tanggal permulaan sewa, Kelompok Usaha mengakui liabilitas sewa yang diukur pada nilai kini pembayaran sewa yang harus dilakukan selama masa sewa.

Pembayaran sewa juga mencakup harga pelaksanaan dari opsi beli yang secara wajar pasti dilaksanakan oleh Kelompok Usaha dan pembayaran pinalti untuk mengakhiri sewa, jika masa sewa merefleksikan adanya opsi dapat mengakhiri sewa. Pembayaran sewa variabel yang tidak bergantung pada indeks atau tarif diakui sebagai beban pada periode terjadinya peristiwa atau kondisi yang memicu terjadinya pembayaran tersebut.

Dalam menghitung nilai kini pembayaran sewa, Kelompok Usaha menggunakan Suku Bunga Pinjaman Inkremental ("SBPI") pada tanggal permulaan sewa karena suku bunga implisit dalam sewa tidak dapat langsung ditentukan. Setelah tanggal permulaan, jumlah kewajiban sewa ditingkatkan untuk mencerminkan akresi bunga (atas efek diskonto) dan dikurangi untuk pembayaran sewa yang dilakukan. Selain itu, nilai tercatat liabilitas sewa diukur kembali jika terdapat modifikasi, perubahan masa sewa, perubahan pembayaran sewa, atau perubahan penilaian atas opsi untuk membeli aset pendasar.

Sewa jangka-pendek dan sewa dengan aset bernilai rendah

Kelompok Usaha menerapkan pengecualian pengakuan sewa jangka pendek yang memiliki jangka waktu sewa 12 bulan atau kurang, dari tanggal permulaan dan tidak mengandung opsi beli. Kelompok Usaha juga menerapkan pengecualian pengakuan sewa dengan aset bernilai rendah untuk sewa yang aset pendasarnya dianggap bernilai rendah. Kelompok Usaha mengakui pembayaran sewa atas sewa jangka pendek tersebut sebagai beban dengan metode garis lurus selama masa sewa.

2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES INFORMATION (continued)

j. Leases (continued)

The Group as Lessee (continued)

Lease liabilities

At the commencement date of the lease, the Group recognizes lease liabilities measured at the present value of lease payments to be made over the lease term.

The lease payments also include the exercise price of a purchase option reasonably certain to be exercised by the Group and payments of penalties for terminating the lease, if the lease term reflects exercising the option to terminate. Variable lease payments that do not depend on an index or a rate are recognized as expenses in the period in which the event or condition that triggers the payment occurs.

In calculating the present value of lease payments, the Group uses its Incremental Borrowing Rate ("IBR") at the lease commencement date because the interest rate implicit in the lease is not readily determinable. After the commencement date, the amount of lease liabilities is increased to reflect the accretion of interest and reduced for the lease payments made. In addition, the carrying amount of lease liabilities is remeasured if there is a modification, a change in the lease term, a change in the lease payments or a change in the assessment of an option to purchase the underlying asset.

Short-term leases and leases of low-value assets

The Group applies the short-term lease recognition exemption to its leases that have a lease term of 12 months or less from the commencement date and do not contain a purchase option. The Group also applies the lease of low-value assets recognition exemption to leases that are considered to be low value. The Group recognizes the leases payments associated with these short-term leases as an expense on a straight-line basis over the lease term.

**PT AKR CORPORINDO TBK
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2025 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
kecuali Dinyatakan Lain)**

***PT AKR CORPORINDO TBK
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2025 and
for the Year Then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
unless Otherwise Stated)***

2. IKHTISAR INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

j. Sewa (lanjutan)

Kelompok Usaha sebagai Pesewa

Sewa di mana Kelompok Usaha tidak mengalihkan secara substansial seluruh risiko dan manfaat yang terkait dengan kepemilikan suatu aset diklasifikasikan sebagai sewa operasi. Pendapatan sewa yang timbul dicatat dengan metode garis lurus selama masa sewa dan dimasukkan dalam pendapatan dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian karena sifat operasinya. Biaya perolehan langsung awal yang timbul dalam negosiasi dan pengaturan sewa operasi ditambahkan ke nilai tercatat aset sewaan dan diakui selama masa sewa atas dasar yang sama dengan pendapatan sewa. Sewa kontinjensi diakui sebagai pendapatan pada periode perolehannya.

k. Persediaan Tanah Kawasan Industri

Persediaan tanah kawasan industri terdiri dari tanah yang siap untuk dijual, sedang dalam tahap pengembangan dan yang akan dikembangkan menjadi kawasan industri yang menjadi bagian dari Kawasan Industri dan Pelabuhan Jawa Terpadu (proyek "JIIPE") (Catatan 13) yang akan tersedia untuk dijual pada saat selesai pengembangan. Biaya-biaya akuisisi tanah dinyatakan sebesar nilai yang lebih rendah antara biaya perolehan dan nilai realisasi neto.

Biaya perolehan tanah yang sedang dikembangkan meliputi biaya perolehan tanah pengembangan (termasuk biaya praakuisisi tanah yang relevan), biaya pengembangan langsung, kapitalisasi biaya pinjaman dan biaya tidak langsung lainnya yang dapat diatribusikan pada pengembangan tanah persediaan tersebut. Akumulasi biaya-biaya tersebut akan dipindahkan ke tanah yang tersedia untuk dijual atau ke akun aset tetap terkait pada saat dianggap perlu untuk operasi secara internal pada saat pengembangan tanah telah selesai.

2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES INFORMATION (continued)

j. Leases (continued)

The Group as Lessor

Leases in which the Group does not transfer substantially all the risks and rewards incidental to ownership of an asset are classified as operating leases. Lease income arising is accounted for on a straight-line basis over the lease terms and is included in revenue in the consolidated statement of profit or loss and other comprehensive income due to its operating nature. Initial direct costs incurred in negotiating and arranging an operating lease are added to the carrying amount of the leased asset and recognized over the lease term on the same basis as lease income. Contingent rents are recognized as revenue in the period in which they are earned.

k. Industrial Estate Land Inventory

The industrial estate land consists of inventory of land available for sale, under development and land to be developed into industrial estate as part of the Java Integrated Industrial and Ports Estate ("JIIPE" project) (Note 13) which will be available for sale upon completion. The land acquisition costs are stated at the lower of cost or net realizable value.

The costs of land under development consist of the costs of land for development (including relevant preacquisition costs), direct development costs, capitalized borrowing costs and other indirect costs that are attributable to the development of such land inventory. The accumulated costs shall be transferred to land inventory available for sale or to relevant property, plant, and equipment account when they are deemed to be need for operating internaly when the development of such land has been completed.

2. IKHTISAR INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

k. Persediaan Tanah Kawasan Industri (lanjutan)

Biaya pinjaman, termasuk biaya pinjaman yang timbul dari pinjaman Kelompok Usaha yang memenuhi ketentuan dalam PSAK 223 untuk kondisi tersebut, yang dikapitalisasi sebagai bagian dari nilai tercatat tanah dalam pengembangan adalah biaya pinjaman sehubungan dengan pinjaman yang diperoleh untuk membiayai perolehan dan pengembangan tanah selama tahap pengembangan. Kapitalisasi dihentikan pada saat pengembangan proyek ditangguhkan atau ditunda pelaksanaannya atau pada saat proses pengembangan tanah tersebut sesuai dengan tujuannya secara substansial telah selesai.

Persediaan tanah kawasan industri yang siap untuk dijual dan sedang dalam tahap pengembangan diklasifikasikan sebagai aset lancar karena dimaksudkan untuk dijual dalam siklus operasi normal, sedangkan tanah yang akan dikembangkan diklasifikasikan sebagai aset tidak lancar.

l. Properti Investasi

Properti investasi diukur pada biaya perolehan, termasuk biaya transaksi.

Properti investasi dihentikan pengakuannya baik saat dilepas (yaitu, pada tanggal penerima memperoleh kendali) atau ketika tidak digunakan lagi secara permanen dan tidak memiliki manfaat ekonomis masa depan yang diharapkan dari pelepasannya. Selisih antara hasil neto pelepasan dan nilai tercatat aset diakui dalam laba rugi pada periode terjadinya penghentian pengakuan. Dalam menentukan jumlah imbalan dari penghentian pengakuan properti investasi, Kelompok Usaha mempertimbangkan dampak dari imbalan variabel, keberadaan komponen pembiayaan yang signifikan, imbalan non-kas, dan imbalan yang harus dibayar kepada pembeli (jika ada).

2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES INFORMATION (continued)

k. Industrial Estate Land Inventory (continued)

Borrowing costs, including those arising from Group's borrowings which met the provision in PSAK 223 for such circumstances, capitalized as part of the carrying amount of land under development are those relating to debts obtained to finance the acquisition and development of the land during the development stage. Capitalization ceases when the development of the land is deferred or postponed or when activities to develop the land for its intended use are substantially completed.

The industrial estate land inventory available for sale and under development are classified as current asset as it is intended for sale in a normal operation cycle while land inventory for future development is classified as part of non-current asset.

l. Investment Property

Investment properties are measured at cost, including transaction costs.

Investment properties are derecognized either when they have been disposed of (i.e., at the date the recipient obtains control) or when they are permanently withdrawn from use and no future economic benefit is expected from their disposal. The difference between the net disposal proceeds and the carrying amount of the asset is recognized in profit or loss in the period of derecognition. In determining the amount of consideration from the derecognition of investment property, the Group considers the effects of variable consideration, existence of a significant financing component, non-cash consideration, and consideration payable to the buyer (if any).

**PT AKR CORPORINDO TBK
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2025 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
kecuali Dinyatakan Lain)**

***PT AKR CORPORINDO TBK
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2025 and
for the Year Then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
unless Otherwise Stated)***

2. IKHTISAR INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

l. Properti Investasi (lanjutan)

Pengalihan dilakukan ke (atau dari) properti investasi hanya jika terdapat perubahan penggunaan. Untuk pengalihan dari properti investasi ke properti yang digunakan sendiri, biaya yang dianggap untuk akuntansi selanjutnya adalah nilai wajar pada tanggal perubahan penggunaan. Jika properti yang digunakan sendiri menjadi properti investasi, Kelompok Usaha memperhitungkan properti tersebut sesuai dengan kebijakan yang tercantum dalam aset tetap sampai dengan tanggal perubahan yang digunakan.

m. Biaya Emisi Saham

Biaya emisi saham disajikan sebagai bagian dari tambahan modal disetor dan tidak disusutkan.

n. Imbalan Pasca Kerja

Perusahaan dan Entitas Anaknya di Indonesia memberikan imbalan pasca kerja imbalan pasti untuk karyawan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta, peraturan Perusahaan (Catatan 28). Tidak terdapat pendanaan yang disisihkan sehubungan dengan imbalan pasca kerja ini.

Kelompok Usaha menerapkan PSAK 219, "Imbalan Pasca Kerja" dan perhitungan imbalan pasca kerja menggunakan metode *Projected Unit Credit*. Keuntungan atau kerugian aktuarial yang timbul diakui sebagai Penghasilan Komprehensif Lain dan disajikan pada bagian ekuitas. Biaya jasa lalu dibebankan langsung pada laba rugi.

Jumlah yang diakui sebagai kewajiban imbalan pasti di laporan posisi keuangan konsolidasian merupakan nilai kini kewajiban imbalan pasti.

2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES INFORMATION (continued)

l. Investment Property (continued)

Transfers are made to (or from) investment property only when there is a change in use. For a transfer from investment property to owner-occupied property, the deemed cost for subsequent accounting is the fair value at the date of change in use. If owner-occupied property becomes an investment property, the Group accounts for such property in accordance with the policy stated under property, plant and equipment up to the date of change in use.

m. Share Issuance Costs

Share issuance costs are presented as part of additional paid-in capital and are not amortized.

n. Post-Employment Benefits

The Company and its Subsidiaries in Indonesia provide defined post-employment benefits to their employees in accordance with the prevailing Laws and Regulation and the Company's regulation (Note 28). No funding has been made to this defined benefit plan.

The Group adopted PSAK 219, "Post-Employment Benefits" and the cost of providing post-employment benefits is determined using the Projected Unit Credit method. The actuarial gains or lossess incurred are recognized in Other Comprehensive Income and is presented in the equity section. Past service cost is recognized immediately to profit or loss.

The benefit obligation recognized in the consolidated statements of financial position represents the present value of the defined benefit obligation.

2. IKHTISAR INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

n. Imbalan Pasca Kerja (lanjutan)

Mulai 1 Januari 2022, berdasarkan siaran pers atas persyaratan pengatribusian imbalan pada periode jasa sesuai PSAK 219: Imbalan Kerja, Kelompok Usaha telah mengatribusikan imbalan tanggal ketika jasa pekerja pertama kali menghasilkan imbalan dalam program sampai dengan tanggal ketika jasa pekerja selanjutnya tidak akan menghasilkan jumlah imbalan yang material dibawah program tersebut.

o. Pembayaran berbasis saham

Karyawan yang berhak (termasuk eksekutif senior) Kelompok Usaha menerima remunerasi dalam bentuk pembayaran berbasis saham, di mana karyawan memberikan jasa sebagai imbalan dalam bentuk instrumen ekuitas (transaksi yang diselesaikan dengan ekuitas).

Biaya transaksi yang diselesaikan dengan ekuitas ditentukan oleh nilai wajar pada tanggal pemberian diberikan dengan menggunakan model penilaian yang sesuai, rincian lebih lanjut diberikan dalam Catatan 20.

Biaya tersebut diakui dalam beban umum dan administrasi, bersama-sama dengan peningkatan ekuitas (tambahan modal disetor), selama periode jasa dan, jika berlaku, kondisi kinerja terpenuhi (periode *vesting*). Beban kumulatif yang diakui untuk transaksi yang diselesaikan dengan ekuitas pada setiap tanggal pelaporan hingga tanggal *vesting* mencerminkan sejauh mana periode *vesting* telah berakhir dan estimasi terbaik Kelompok Usaha atas jumlah instrumen ekuitas yang pada akhirnya akan menjadi *vest*. Beban atau kredit dalam laporan laba rugi suatu periode merupakan pergerakan beban kumulatif yang diakui pada awal dan akhir periode tersebut.

Kondisi layanan dan kinerja non-pasar tidak diperhitungkan saat menentukan nilai wajar tanggal pemberian penghargaan, tetapi kemungkinan kondisi terpenuhi dinilai sebagai bagian dari estimasi terbaik Kelompok Usaha atas jumlah instrumen ekuitas yang pada akhirnya akan menjadi hak.

2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES INFORMATION (continued)

n. Post-Employment Benefits (continued)

Starting from January 1, 2022, based on the press release regarding attribution of benefits to periods of service in accordance with PSAK 219: Employee Benefits, the Group attributes benefits when employee service first leads to benefits under the plan until the date when further employee service will lead to no material amount of further benefits under the plan.

o. Share-based payments

Eligible employees (including senior executives) of the Group receive remuneration in the form of share-based payments, whereby employees render services as consideration for equity instruments (equity-settled transactions).

The cost of equity-settled transactions is determined by the fair value at the date when the grant is made using an appropriate valuation model, further details of which are given in Note 20.

That cost is recognized in general and administrative expenses, together with a corresponding increase in equity (additional paid-in capital), over the period in which the service and, where applicable, the performance conditions are fulfilled (the vesting period). The cumulative expense recognized for equity-settled transactions at each reporting date until the vesting date reflects the extent to which the vesting period has expired and the Group's best estimate of the number of equity instruments that will ultimately vest. The expense or credit in the statement of profit or loss for a period represents the movement in cumulative expense recognized as at the beginning and end of that period.

Service and non-market performance conditions are not taken into account when determining the grant date fair value of awards, but the likelihood of the conditions being met is assessed as part of the Group's best estimate of the number of equity instruments that will ultimately vest.

**PT AKR CORPORINDO TBK
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2025 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
kecuali Dinyatakan Lain)**

***PT AKR CORPORINDO TBK
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2025 and
for the Year Then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
unless Otherwise Stated)***

2. IKHTISAR INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

o. Pembayaran berbasis saham (lanjutan)

Kondisi kinerja pasar tercermin dalam nilai wajar tanggal pemberian. Setiap kondisi lain yang melekat pada penghargaan, tetapi tanpa persyaratan layanan terkait, dianggap sebagai kondisi *non-vesting*. Kondisi *non-vesting* tercermin dalam nilai wajar penghargaan dan mengarah pada pengeluaran langsung penghargaan kecuali ada juga layanan dan/atau kondisi kinerja.

Tidak ada beban yang diakui untuk penghargaan yang pada akhirnya tidak menjadi hak karena kinerja non-pasar dan/atau kondisi layanan belum terpenuhi.

p. Provisi

Provisi diakui jika Kelompok Usaha memiliki liabilitas kini (baik bersifat hukum maupun bersifat konstruktif) yang akibat peristiwa masa lalu, besar kemungkinannya penyelesaian liabilitas tersebut mengakibatkan arus keluar sumber daya yang mengandung manfaat ekonomi dan estimasi yang andal mengenai jumlah liabilitas tersebut dapat dibuat.

Provisi ditelaah pada setiap tanggal pelaporan dan disesuaikan untuk mencerminkan estimasi terbaik yang paling kini. Jika arus keluar sumber daya untuk menyelesaikan liabilitas kemungkinan besar tidak terjadi, maka provisi dibatalkan.

Provisi untuk biaya pembongkaran aset diestimasi berdasarkan beberapa asumsi dan disajikan pada nilai wajar sesuai dengan tingkat diskonto yang berlaku.

q. Saham Treasuri

Instrumen ekuitas sendiri yang diperoleh kembali (saham treasuri) diakui pada harga perolehan kembali dan dikurangi dari ekuitas. Tidak ada laba rugi yang diakui pada laba rugi atas perolehan, penjualan kembali, penerbitan atau pembatalan dari instrumen ekuitas Kelompok Usaha. Selisih antara jumlah tercatat dan penerimaan, bila diterbitkan kembali, diakui sebagai bagian dari tambahan modal disetor pada ekuitas.

2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES INFORMATION (continued)

o. Share-based payments (continued)

Market performance conditions are reflected within the grant date fair value. Any other conditions attached to an award, but without an associated service requirement, are considered to be non-vesting conditions. Non-vesting conditions are reflected in the fair value of an award and lead to an immediate expensing of an award unless there are also service and/or performance conditions.

No expense is recognized for awards that do not ultimately vest because non-market performance and/or service conditions have not been met.

p. Provision

Provisions are recognized when the Group has a present obligation (legal or constructive) as a result of a past event, it is probable that an outflow of resources embodying economic benefits will be required to settle the obligation and a reliable estimate can be made of the amount of the obligation.

Provisions are reviewed at each reporting date and adjusted to reflect the current best estimate. If it is no longer probable that an outflow of resources embodying economic benefits will be required to settle the obligation, the provision is reversed.

Provision for asset dismantling costs is estimated based on certain assumptions and carried at fair value based on applicable discount rates.

q. Treasury Shares

Own equity instruments that are reacquired (treasury shares) are recognized at cost and deducted from equity. No gain or loss is recognized in profit or loss on the purchase, sale, issue or cancellation of the Group's own equity instruments. Any difference between the carrying amount and the consideration, if reissued, is recognized as part of additional paid-in capital in the equity.

2. IKHTISAR INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

r. Pendapatan dari Kontrak dengan Pelanggan dan Pengakuan Beban

Pendapatan dari kontrak dengan pelanggan

Penjualan diakui ketika Kelompok Usaha memenuhi kewajiban pelaksanaan (*performance obligation*) dengan mentransfer barang atau jasa yang dijanjikan kepada pelanggan, yaitu ketika pelanggan memperoleh pengendalian atas barang atau jasa tersebut. Kewajiban pelaksanaan (*performance obligation*) dapat dipenuhi pada suatu waktu tertentu atau dari waktu ke waktu. Jumlah pendapatan yang diakui adalah jumlah yang dialokasikan untuk kewajiban pelaksanaan (*performance obligation*) yang dipenuhi. Kelompok Usaha secara umum menyimpulkan bahwa mereka adalah prinsipal dalam pengaturan pendapatannya.

(a) Penjualan barang

Pendapatan dari penjualan barang diakui pada saat pengendalian aset dialihkan ke pelanggan. Umumnya, penjualan lokal pada saat pengiriman barang, sedangkan penjualan ekspor ketika barang dikapalkan (*FOB Shipping Point*), karena kewajiban pelaksanaan (*performance obligation*) dinilai telah terpenuhi dan oleh karena itu pendapatan diakui.

Pendapatan diukur berdasarkan pada janji entitas dalam kontrak dengan pelanggan, dikurangi diskon dan potongan harga, jika ada.

(b) Penjualan jasa

Pendapatan dari jasa yang diberikan diakui dalam periode akuntansi di mana jasa diberikan.

Kelompok Usaha menawarkan imbalan variabel berupa hak pengembalian dan penyesuaian harga sehubungan klaim kualitas, dengan menggunakan metode nilai ekspektasian yang dikembangkan berdasarkan pengalaman historis, atau metode jumlah yang paling mungkin yang dikembangkan berdasarkan pengalaman historis dengan mempertimbangkan pola pembelian saat ini.

2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES INFORMATION (continued)

r. Revenue from Contracts with Customers and Recognition of Expenses

Revenue from contracts with customers

Sales are recognized when the Group satisfies a performance obligation by transferring a promised good or service to the customer, which is when the customer obtains control of the good or service. A performance obligation may be satisfied at a point or over time. The amount of the revenue recognized is the amount allocated to the satisfied performance obligation. The Group has generally concluded that it is the principal in its revenue arrangements.

(a) Sale of goods

Revenue from the sale of goods is recognized at the point in time when control of the asset is transferred to the customer. Generally, local sales on delivery of goods, while export sales when the goods are shipped (FOB Shipping Point), as performance obligation is judged have been satisfied and revenue is therefore recognized.

Revenue is measured at the consideration promised of the entity in the contract with a customer, less discounts and rebates, if any.

(b) Sale of services

Revenue from services rendered is recognized in the accounting period in which services are rendered.

The Group estimates the variable considerations such as right of return and price adjustments arising from quality claim, using expected value developed based on historical experience or using most likely amount developed based on historical experience taking into account also current purchasing patterns.

**PT AKR CORPORINDO TBK
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2025 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
kecuali Dinyatakan Lain)**

***PT AKR CORPORINDO TBK
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2025 and
for the Year Then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
unless Otherwise Stated)***

2. IKHTISAR INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

r. Pendapatan dari Kontrak dengan Pelanggan dan Pengakuan Beban (lanjutan)

Pendapatan dari kontrak dengan pelanggan (lanjutan)

Manajemen menetapkan metode estimasi untuk memastikan dimasukkannya imbalan variabel tersebut hanya sedemikian agar tidak terjadi pembalikan yang signifikan atas pendapatan kumulatif yang diakui ketika ketidakpastian terkait dengan pertimbangan variabel tersebut diselesaikan kedepannya. Sedangkan pengakuan dilakukan ketika dokumen pendukung telah diterima dari pelanggan atau saat kemungkinan besar penyesuaian harga akan diberikan.

Piutang usaha merupakan hak Kelompok Usaha atas sejumlah imbalan yang tidak bersyarat (yaitu, hanya berlalunya waktu yang diperlukan sebelum pembayaran imbalan jatuh tempo). Lihat kebijakan akuntansi aset keuangan pada Catatan 2t Instrumen Keuangan mengenai pengakuan awal dan pengukuran selanjutnya.

Liabilitas kontrak

Liabilitas kontrak adalah kewajiban untuk mentransfer barang atau jasa kepada pelanggan dimana Kelompok Usaha telah menerima imbalan (atau jumlah imbalan yang jatuh tempo) dari pelanggan.

Jika pelanggan membayar imbalan sebelum Kelompok Usaha mengalihkan barang atau jasa kepada pelanggan, liabilitas kontrak diakui pada saat pembayaran dilakukan atau pembayaran jatuh tempo (mana yang lebih awal). Liabilitas kontrak diakui sebagai pendapatan pada saat Kelompok Usaha memenuhi pelaksanaan kontrak.

Penghasilan/beban bunga

Untuk semua instrumen keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi penghasilan atau beban bunga dicatat dengan menggunakan metode suku bunga efektif, yaitu suku bunga yang secara tepat mendiskontokan estimasi pembayaran atau penerimaan kas di masa yang akan datang selama perkiraan umur dari instrument keuangan, atau jika lebih tepat, selama periode yang lebih singkat, untuk nilai tercatat neto dari aset atau liabilitas keuangan.

2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES INFORMATION (continued)

r. Revenue from Contracts with Customers and Recognition of Expenses (continued)

Revenue from contracts with customers (continued)

The management established estimation method that ensure inclusion of these variable consideration only to the extent that it is highly probable that a significant reversal in the amount of cumulative revenue recognized will not occur when the uncertainty associated with the variable consideration is subsequently resolved. Meanwhile, the recognition is made when supporting documents have been received from customers or when it is probable price adjustments will be given.

Trade receivables represent the Group's right to an amount of consideration that is unconditional (i.e., only the passage of time is required before payment of the consideration is due). Refer to accounting policies of financial assets in Note 2t in Financial instruments section regarding initial recognition and subsequent measurement.

Contract liabilities

A contract liability is the obligation to transfer goods or services to a customer for which the Group has received consideration (or an amount of consideration is due) from the customer.

If a customer pays consideration before the Group transfers goods or services to the customer, a contract liability is recognized when the payment is made or the payment is due (whichever is earlier). Contract liabilities are recognized as revenue when the Group performs under the contract.

Interest income/expense

For all financial instruments measured at amortized cost, interest income or expense is recorded using the effective interest rate, which is the rate that exactly discounts the estimated future cash payments or receipts over the expected life of the financial instrument or a shorter period, where appropriate, to the net carrying amount of the financial asset or liability.

**PT AKR CORPORINDO TBK
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2025 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
kecuali Dinyatakan Lain)**

***PT AKR CORPORINDO TBK
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2025 and
for the Year Then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
unless Otherwise Stated)***

2. IKHTISAR INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

r. Pendapatan dari Kontrak dengan Pelanggan dan Pengakuan Beban (lanjutan)

Pendapatan sewa

Pendapatan sewa diakui dengan dasar garis lurus selama masa sewa.

Pengakuan beban

Beban diakui pada saat terjadinya atau sesuai dengan masa manfaatnya.

s. Perpajakan

Kelompok Usaha menerapkan ISAK No. 123 - Ketidakpastian dalam Perlakuan Pajak Penghasilan. ISAK ini membahas akuntansi untuk pajak penghasilan ketika perlakuan pajak melibatkan ketidakpastian yang mempengaruhi penerapan PSAK 212: Pajak Penghasilan. ISAK ini tidak berlaku untuk pajak atau retribusi di luar ruang lingkup PSAK 212, juga tidak secara khusus mencakup persyaratan yang berkaitan dengan bunga dan denda yang terkait dengan perlakuan pajak yang tidak pasti. Penafsiran secara khusus membahas hal-hal berikut:

- Apakah suatu entitas mempertimbangkan perlakuan pajak yang tidak pasti secara terpisah;
- Asumsi yang dibuat entitas tentang pemeriksaan perlakuan pajak oleh otoritas perpajakan; dan
- Bagaimana entitas menentukan laba kena pajak (rugi pajak), dasar pengenaan pajak, rugi pajak yang belum digunakan, kredit pajak yang belum digunakan dan tarif pajak.

Kelompok Usaha menentukan apakah akan mempertimbangkan masing-masing perlakuan pajak yang tidak pasti secara terpisah atau bersama-sama dengan satu atau lebih perlakuan pajak tidak pasti lainnya dan menggunakan pendekatan yang lebih baik dalam memprediksi penyelesaian ketidakpastian tersebut. Kelompok Usaha menerapkan penilaian signifikan dalam mengidentifikasi ketidakpastian atas perlakuan pajak penghasilan. Setelah adopsi Interpretasi, Kelompok Usaha mempertimbangkan apakah Kelompok Usaha memiliki posisi pajak yang tidak pasti.

2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES INFORMATION (continued)

r. Revenue from Contracts with Customers and Recognition of Expenses (continued)

Rental income

Rental income is recognized on a straight-line basis over the lease terms.

Recognition of expenses

Expenses are recognized when incurred or based on their beneficial periods.

s. Taxation

The Group adopted ISAK No. 123 - Uncertainty over Income Tax Treatments. This ISAK addresses the accounting for income taxes when tax treatments involve uncertainty that affects the application of PSAK 212: Income Taxes. This ISAK does not apply to taxes or levies outside the scope of PSAK 212, nor does it specifically include requirements relating to interest and penalties associated with uncertain tax treatments. The interpretation specifically addresses the following:

- *Whether an entity considers uncertain tax treatments separately;*
- *The assumptions an entity makes about the examination of tax treatments by the taxation authorities; and*
- *How an entity determines taxable profit (tax loss), tax bases, unused tax losses, unused tax credits and tax rate.*

The Group determines whether to consider each uncertain tax treatment separately or together with one or more other uncertain tax treatments and uses the approach that better predicts the resolution of the uncertainty. The Group applies significant judgment in identifying uncertainties over income tax treatments. Upon adoption of the Interpretation, the Group considered whether it has any uncertain tax positions.

**PT AKR CORPORINDO TBK
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2025 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
kecuali Dinyatakan Lain)**

***PT AKR CORPORINDO TBK
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2025 and
for the Year Then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
unless Otherwise Stated)***

2. IKHTISAR INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

s. Perpajakan (lanjutan)

Pengajuan pajak Perusahaan dan entitas anak di berbagai yurisdiksi termasuk otoritas perpajakan dapat menentang perlakuan pajak tersebut. Kelompok Usaha menentukan, berdasarkan pada kepatuhan perpajakannya bahwa besar kemungkinan perlakuan pajaknya (termasuk yang untuk entitas anak) akan diterima oleh otoritas perpajakan.

Pajak Final

Berdasarkan peraturan pajak yang berlaku, pajak penghasilan Kelompok Usaha dari aktivitas penyewaan tangki dan gudang dihitung secara final sebesar 10% sedangkan pendapatan pengangkutan untuk pelayaran dalam negeri dikenakan pajak final sebesar 1,2%.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 71/2008 tanggal 4 November 2008, efektif tanggal 1 Januari 2009, penghasilan dari penjualan atau pengalihan tanah dan bangunan dikenakan pajak final sebesar 5% dari nilai penjualan atau pengalihan. Pada tanggal 8 Agustus 2016, sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 34/2016 dan Peraturan Menteri Keuangan No. 261/PMK.03/2016, pajak penghasilan dari pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan dikenakan pajak bersifat final sebesar 2,5%.

Perbedaan nilai tercatat aset atau liabilitas yang berhubungan dengan pajak penghasilan final dengan dasar pengenaan pajaknya tidak diakui sebagai aset atau liabilitas pajak tangguhan.

2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES INFORMATION (continued)

s. Taxation (continued)

The Company's and the subsidiaries' tax filings in different jurisdictions include the taxation authorities may challenge those tax treatments. The Group determined, based on its tax compliance that it is probable that its tax treatments (including those for the subsidiaries) will be accepted by the taxation authorities.

Final Tax

In accordance with prevailing tax regulation, the Group's income from rental of tanks and warehouses are subject to 10% final tax while domestic shipping transportation income is subject to final tax at rate of 1.2%.

Based on Government Regulation No. 71/2008 dated November 4, 2008, effective January 1, 2009, the income from sale or transfer of land and building is subject to a final tax of 5% from the sale or transfer value. On August 8, 2016, based on the Government Regulation No. 34/2016 and Ministry of Finance Regulation No. 261/PMK.03/2016, income from sale of land and/or buildings subject to final tax of 2.5%.

The difference between the financial statement carrying amounts of existing assets and liabilities and their respective final tax bases is not recognized as deferred tax assets or liabilities.

2. IKHTISAR INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

s. Perpajakan (lanjutan)

Pajak Penghasilan - Pajak Kini

Aset dan liabilitas pajak kini untuk tahun berjalan dan tahun-tahun sebelumnya diukur pada jumlah yang diharapkan akan terpulihkan atau yang akan dibayarkan kepada otoritas pajak. Tarif pajak dan peraturan perpajakan yang digunakan untuk menghitung jumlah pajak adalah tarif pajak yang berlaku atau secara substansial telah berlaku pada tanggal pelaporan, di negara dimana Kelompok Usaha beroperasi dan menghasilkan laba kena pajaknya.

Pajak kini yang terkait dengan komponen yang diakui langsung ke ekuitas diakui di ekuitas dan tidak ke laporan laba rugi. Manajemen secara periodik mengevaluasi posisi yang diambil sehubungan dengan pelaporan pajak untuk situasi dimana relevan pajak terkait memerlukan interpretasi dan melakukan pencadangan jika diperlukan.

Syarat yang harus dipenuhi adalah sebagai berikut:

- Paling sedikit 40% saham yang beredar dipegang oleh pemegang saham publik yang terdiri dari paling sedikit oleh 300 pemegang saham;
- Masing-masing pemegang saham memiliki saham kurang dari 5% dari keseluruhan saham yang beredar; dan
- Dua kondisi di atas harus dipenuhi paling singkat dalam kurun waktu 183 hari dalam waktu satu tahun pajak.

Pajak Penghasilan Pilar Dua

Sebagai tanggapan terhadap penerapan kerangka Pilar 2 Organisasi untuk Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (*Organisation for Economic Co-operation and Development* atau "OECD"), pada tanggal 31 Desember 2024, Pemerintah Indonesia menetapkan aturan kerangka Pilar 2 ("Pillar 2") melalui Peraturan Menteri Keuangan No. 136/2024 (PMK 136/2024). Pilar 2 sesuai PMK 136/2024 akan berlaku untuk tahun fiskal yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari 2025.

2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES INFORMATION (continued)

s. Taxation (continued)

Income Tax - Current Tax

Current income tax assets and liabilities for the current and prior years are measured at the amount expected to be recovered from or paid to the taxation authorities. The tax rates and tax laws used to compute the amount are those that are enacted or substantively enacted, at the reporting date, in the countries where the Group operates and generates taxable income.

Current income tax relating to items recognized directly in equity is recognized in equity and not in the profit or loss. Management periodically evaluates positions taken in the tax returns with respect to situations in which applicable tax regulations are subject to interpretation and establishes provisions where appropriate.

The conditions to be fulfilled are as follows:

- *At least 40% of the outstanding shares are held by public comprising of at least 300 shareholders;*
- *Each shareholder holding less than 5% of the outstanding shares; and*
- *The two conditions above must be maintained for 183 days within one fiscal year.*

Pillar Two Income Taxes

In response to the implementation of the Organisation for Economic Co-operation and Development ("OECD") Pillar 2 framework rule ("Pillar 2"), on December 31, 2024, Indonesian Government implemented Pillar 2 framework through Ministry of Finance Regulation No. 136/2024 (PMK 136/2024). The Pillar 2 model rules as implemented under PMK 136/2024 will take effect for fiscal years beginning on or after January 1, 2025.

2. IKHTISAR INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

s. Perpajakan (lanjutan)

Pajak Penghasilan Pilar Dua

Untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2025, Kelompok Usaha telah menerapkan amandemen PSAK 212: *Pajak Penghasilan*, yang memberikan pengecualian wajib sementara dari pengakuan atau pengungkapan pajak tangguhan terkait Pilar 2. PMK 136/2024 menerapkan mekanisme perpajakan baru yang mensyaratkan Perusahaan Multinasional ("PMN") untuk membayar pajak tambahan padayurisdiksi tertentu ketika tarif pajak efektif yang ditentukan per yurisdiksi menurut Pilar 2 lebih rendah dari tarif minimum 15%.

Pajak Penghasilan - Pajak Tangguhan

Pajak tangguhan diukur dengan metode liabilitas atas beda waktu pada tanggal pelaporan antara dasar pengenaan pajak untuk aset dan liabilitas dengan nilai tercatatnya untuk tujuan pelaporan keuangan. Liabilitas pajak tangguhan diakui untuk semua perbedaan temporer kena pajak dengan beberapa pengecualian. Aset pajak tangguhan diakui untuk perbedaan temporer yang boleh dikurangkan dan rugi fiskal apabila terdapat kemungkinan besar bahwa jumlah laba kena pajak pada masa mendatang akan memadai untuk mengkompensasi perbedaan temporer dan rugi fiskal.

Pajak tangguhan diukur dengan menggunakan tarif pajak yang berlaku atau secara substansial telah berlaku pada tanggal pelaporan. Perubahan nilai tercatat aset dan liabilitas pajak tangguhan yang disebabkan oleh perubahan tarif pajak dibebankan pada tahun berjalan, kecuali untuk transaksi-transaksi yang sebelumnya telah langsung dibebankan atau dikreditkan ke ekuitas. Efek pajak tangguhan yang timbul dari akuisisi disajikan sebagai bagian dari akun “Aset atau Liabilitas Pajak Tangguhan”.

Aset dan liabilitas pajak tangguhan disajikan secara saling hapus di laporan posisi keuangan konsolidasian, kecuali aset dan liabilitas pajak tangguhan untuk entitas yang berbeda sesuai dengan penyajian aset dan liabilitas pajak kini.

2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES INFORMATION (continued)

s. Taxation (continued)

Pillar Two Income Taxes

For the year ended December 31, 2025, the Group has applied amendments to PSAK 212: Income Taxes, which provide mandatory temporary exception from recognizing or disclosing deferred taxes related to Pillar 2. PMK 136/2024 applies new taxing mechanisms under which a Multinational Enterprises (“MNE”) should pay a top-up tax in a jurisdiction whenever their efective tax rate, determined on a jurisdictional basis under the Pillar2, is below a 15% minimum rate.

Income Tax - Deferred Tax

Deferred tax is provided using the liability method on temporary differences at the reporting date between the tax bases of assets and liabilities and their carrying amounts for financial reporting purposes. Deferred tax liabilities are recognized for all taxable temporary differences with certain exceptions. Deferred tax assets are recognized for deductible temporary differences and tax losses carry forwards to the extent that it is probable that taxable income will be available in future years against which the deductible temporary differences and tax losses carry forwards can be utilized.

Deferred tax is calculated at the tax rates that have been enacted or substantively enacted at the reporting date. Changes in the carrying amount of deferred tax assets and liabilities due to a change in tax rate are charged to the current year, except to the extent that it relates to items previously charged or credited to equity. The deferred tax effect arising from acquisition is recognized as part of the “Deferred Tax Asset or Liability” account.

Deferred tax assets and liabilities are offset in the consolidated statements of financial position, except if these are for different legal entities, in the same manner the current tax assets and liabilities are presented.

**PT AKR CORPORINDO TBK
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2025 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
kecuali Dinyatakan Lain)**

***PT AKR CORPORINDO TBK
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2025 and
for the Year Then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
unless Otherwise Stated)***

2. IKHTISAR INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

s. Perpajakan (lanjutan)

Pajak Penjualan

Penjualan, beban dan aset diakui neto terhadap nilai pajak penjualan (yaitu pajak pertambahan nilai dan pajak terkait lainnya, jika ada) kecuali:

- Situasi dimana pajak penjualan yang timbul dari pembelian aset atau jasa tidak terpulihkan dari otoritas pajak, dalam situasi tersebut pajak penjualan terkait diakui sebagai bagian dari nilai perolehan aset atau bagian dari beban.

- Piutang dan hutang yang diakui termasuk pajak penjualan terkait.

Nilai dari pajak penjualan neto yang dipulihkan atau terhutang ke otoritas pajak dicatat sebagai bagian dari piutang atau hutang dalam laporan posisi keuangan konsolidasian.

t. Instrumen Keuangan

Instrumen keuangan adalah setiap kontrak yang memberikan aset keuangan bagi satu entitas dan liabilitas keuangan atau ekuitas bagi entitas lain.

Aset keuangan diklasifikasikan, pada pengakuan awal, yang selanjutnya diukur pada biaya perolehan diamortisasi, nilai wajar melalui Pendapatan Komprehensif Lain ("PKL"), dan nilai wajar melalui laba rugi.

Piutang usaha yang tidak mengandung komponen pembiayaan yang signifikan atau yang mana Kelompok Usaha telah menerapkan kebijaksanaan praktis diukur pada harga transaksi yang ditentukan berdasarkan PSAK 115. Lihat kebijakan akuntansi pada Catatan 2r untuk kebijakan terkait pendapatan dari kontrak dengan pelanggan.

2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES INFORMATION (continued)

s. Taxation (continued)

Sales Tax

Revenues, expenses and assets are recognized net of the amount of sales tax (i.e. value-added tax and other relevant taxes, if any) except:

- *Where the sales tax incurred on a purchase of assets or services is not recoverable from the taxation authority, in which case the sales tax is recognized as part of the cost of acquisition of the asset or as part of the expense item as applicable.*
- *Receivables and payables that are stated with the amount of sales tax included.*

The net amount of sales tax recoverable from, or payable to, the taxation authority is included as part of receivables or payables in the consolidated statements of financial position.

t. Financial Instruments

A financial instrument is any contract that gives rise to a financial asset of one entity and a financial liability or equity instrument of another entity.

Financial assets are classified, at initial recognition, as subsequently measured at amortized cost, fair value through Other Comprehensive Income ("OCI"), and fair value through profit or loss.

Trade receivables that do not contain a significant financing component or for which the Group has applied the practical expedient are measured at the transaction price determined under PSAK 115. Refer to Note 2r for the accounting policy in relation to revenue from contracts with customers.

2. IKHTISAR INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

t. Instrumen Keuangan (lanjutan)

i. Aset Keuangan

Pengakuan dan pengukuran awal

Agar aset keuangan diklasifikasikan dan diukur pada biaya perolehan diamortisasi atau nilai wajar melalui PKL, aset keuangan harus menghasilkan arus kas yang Semata-mata Pembayaran Pokok dan Bunga ("SPPI") dari jumlah pokok terhutang. Penilaian ini disebut sebagai tes SPPI dan dilakukan pada tingkat instrumen.

Model bisnis Kelompok Usaha untuk mengelola aset keuangan mengacu pada bagaimana Kelompok Usaha mengelola aset keuangannya untuk menghasilkan arus kas. Model bisnis menentukan apakah arus kas akan dihasilkan dari pengumpulan arus kas kontraktual, penjualan aset keuangan, atau keduanya.

Pembelian atau penjualan aset keuangan yang memerlukan penyerahan aset dalam jangka waktu yang ditetapkan oleh regulasi atau konvensi di pasar (perdagangan reguler) diakui pada tanggal perdagangan, yaitu tanggal Kelompok Usaha berkomitmen untuk membeli atau menjual aset.

Kelompok Usaha memiliki kas dan setara kas, piutang usaha, piutang lain-lain, investasi, dan aset lancar lainnya yang seluruhnya diklasifikasikan sebagai aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi. Kelompok Usaha tidak memiliki aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui PKL atau nilai wajar melalui laba rugi.

Kelompok Usaha mengukur aset keuangan pada biaya perolehan diamortisasi jika kedua kondisi berikut ini terpenuhi:

i) Aset keuangan tersebut dikelola dalam model bisnis yang bertujuan untuk memiliki aset keuangan dalam rangka memperoleh arus kas kontraktual, dan

ii) Persyaratan kontraktual dari aset keuangan yang pada tanggal tertentu meningkatkan arus kas yang SPPI dari jumlah pokok terhutang.

2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES INFORMATION (continued)

t. Financial Instruments (continued)

i. Financial Assets

Initial recognition and measurement

In order for a financial asset to be classified and measured at amortised cost or fair value through OCI, it needs to give rise to cash flows that are Solely Payments of Principal and Interest ("SPPI") on the principal amount outstanding. This assessment is referred to as the SPPI test and is performed at an instrument level.

The Group's business model for managing financial assets refers to how it manages its financial assets in order to generate cash flows. The business model determines whether cash flows will result from collecting contractual cash flows, selling the financial assets, or both.

Purchases or sales of financial assets that require delivery of assets within a time frame established by regulation or convention in the marketplace (regular way trades) are recognized on the trade date, i.e., the date that the Group commits to purchase or sell the assets.

The Group has cash and cash equivalents, trade and other receivables, investment, and other current assets which are all classified as financial assets measured at amortized cost. The Group has no financial assets measured at fair value through OCI or fair value through profit or loss.

The Group measures financial assets at amortized cost if both of the following conditions are met:

i) The financial asset is held within a business model with the objective to hold financial assets in order to collect contractual cash flows, and

ii) The contractual terms of the financial asset give rise on specified dates to cash flows that are SPPI on the principal amount outstanding.

**PT AKR CORPORINDO TBK
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2025 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
kecuali Dinyatakan Lain)**

***PT AKR CORPORINDO TBK
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2025 and
for the Year Then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
unless Otherwise Stated)***

2. IKHTISAR INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

t. Instrumen Keuangan (lanjutan)

i. Aset Keuangan (lanjutan)

Pengukuran setelah pengakuan awal

Aset keuangan pada biaya perolehan diamortisasi selanjutnya diukur dengan menggunakan suku bunga efektif ("SBE") dan diuji penurunan nilainya. Keuntungan dan kerugian diakui dalam laba rugi pada saat aset keuangan dihentikan pengakuannya, dimodifikasi atau mengalami penurunan nilai.

Selisih antara harga transaksi dan nilai wajar aset keuangan pada pengakuan awal ditangguhkan bila nilai wajarnya diestimasi menggunakan input yang tidak dapat diobservasi. Bila, selain waktu, tidak terdapat faktor lain yang diidentifikasi oleh pelaku pasar dalam pertimbangan untuk menentukan harga aset keuangan tersebut, kerugian yang ditangguhkan tersebut diamortisasi dengan menggunakan metode garis lurus. Setiap jumlah yang masih tersisa segera diakui dalam laba rugi pada saat aset keuangan tersebut dihentikan pengakuannya atau ketika input tersebut menjadi dapat diobservasi.

Penghentian pengakuan

Penghentian pengakuan atas suatu aset keuangan, atau, bila dapat diterapkan untuk bagian dari aset keuangan atau bagian dari kelompok aset keuangan serupa (yaitu, dihapuskan dari laporan posisi keuangan konsolidasian Kelompok Usaha), terjadi apabila:

i) Hak kontraktual atas arus kas yang berasal dari aset keuangan tersebut berakhir; atau

ii) Kelompok Usaha telah mengalihkan hak untuk menerima arus kas yang berasal dari aset keuangan tersebut atau menanggung kewajiban untuk membayar arus kas yang diterima tersebut tanpa penundaan yang signifikan terhadap pihak ketiga melalui suatu kesepakatan "penyerahan" dan (a) Kelompok Usaha secara substansial memindahkan seluruh risiko dan manfaat atas kepemilikan aset keuangan tersebut, atau (b) Kelompok Usaha secara substansial tidak memindahkan dan tidak memiliki seluruh risiko dan manfaat atas kepemilikan aset keuangan tersebut, namun telah memindahkan pengendalian atas aset keuangan.

2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES INFORMATION (continued)

t. Financial Instruments (continued)

i. Financial Assets (continued)

Subsequent measurement

Financial assets at amortized cost are subsequently measured using the effective interest rate ("EIR") method and are subject to impairment. Gains and losses are recognized in profit or loss when the financial asset is derecognized, modified or impaired.

The difference between the transaction price and fair value of financial assets upon initial recognition is deferred, if the fair value is estimated using unobservable inputs. The deferred loss is amortized using the straight-line method if, other than time, there are no factors identified that market participants would take into account when pricing the financial asset. Any outstanding amount is immediately recognized in profit or loss when the financial asset is derecognized or when the inputs becomes observable.

Derecognition

A financial asset, or where applicable, a part of a financial asset or part of a group of similar financial assets, is derecognized (i.e., removed from the Group's consolidated statement of financial position) when:

i) The contractual rights to receive the cash flows from these assets have expired; or

ii) The Group has transferred its rights to receive cash flows from the asset or has assumed an obligation to pay the received cash flows in full without material delay to a third party under a "pass-through" arrangement, and either (a) the Group has transferred substantially all the risk and rewards of the financial assets, or (b) the Group has neither transferred nor retained substantially all the risk and rewards of the assets, but has transferred control of the asset.

**PT AKR CORPORINDO TBK
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2025 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
kecuali Dinyatakan Lain)**

***PT AKR CORPORINDO TBK
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2025 and
for the Year Then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
unless Otherwise Stated)***

2. IKHTISAR INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

t. Instrumen Keuangan (lanjutan)

i. Aset Keuangan (lanjutan)

Penghentian pengakuan (lanjutan)

Apabila Kelompok Usaha telah mengalihkan hak untuk menerima arus kas yang berasal dari aset keuangan atau mengadakan kesepakatan penyerahan dan tidak mengalihkan maupun memiliki secara substansial seluruh risiko dan manfaat atas aset keuangan tersebut dan juga tidak mengalihkan pengendalian atas aset keuangan tersebut, maka suatu aset keuangan baru diakui oleh Kelompok Usaha sebesar keterlibatannya yang berkelanjutan dengan aset keuangan tersebut. Dalam hal itu, Kelompok Usaha juga mengakui liabilitas terkait. Aset alihan beserta liabilitas terkait diukur dengan dasar yang merefleksikan hak dan kewajiban yang dimiliki Kelompok Usaha.

Keterlibatan berkelanjutan yang berbentuk pemberian jaminan atas aset alihan diukur sebesar jumlah yang lebih rendah antara jumlah aset alihan dan jumlah maksimal imbalan yang mungkin harus dibayar kembali oleh Kelompok Usaha.

Penurunan nilai aset keuangan

Kelompok Usaha mengakui penyisihan untuk Kerugian Kredit Ekspektasian ("KKE") untuk seluruh instrumen utang yang tidak dimiliki pada nilai wajar melalui laba rugi. KKE didasarkan pada selisih antara arus kas kontraktual yang jatuh tempo sesuai dengan kontrak dan seluruh arus kas yang diperkirakan akan diterima Kelompok Usaha, didiskontokan dengan SBE awal. Arus kas ekspektasian akan mencakup arus kas dari penjualan agunan atau perbaikan risiko-kredit lain yang merupakan bagian dari persyaratan kontraktual.

2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES INFORMATION (continued)

t. Financial Instruments (continued)

i. Financial Assets (continued)

Derecognition (continued)

When the Group has transferred its right to receive cash flows from an asset or has entered in to "pass-through" arrangement, has neither transferred nor retained substantially all risk and rewards of the asset nor transferred control of the asset, the asset is recognized to the extent of the Group's continuing involvement in the asset. In that case, the Group also recognizes an associated liability. The transferred asset and the associated liability are measured on a basis that reflects the rights and obligations that the Group has retained.

Continuing involvement that takes the form of a guarantee over the transferred asset is measured at the lower of the original carrying amount of the asset and the maximum amount of consideration received that the Group could be required to repay.

Impairment of financial asset

The Group recognizes an allowance for Expected Credit Losses ("ECL") for all debt instruments not held at fair value through profit or loss. ECL are based on the difference between the contractual cash flows due in accordance with the contract and all the cash flows that the Group expects to receive, discounted at an approximation of the original EIR. The expected cash flows will include cash flows from the sale of collateral held or other credit enhancements that are integral to the contractual terms.

2. IKHTISAR INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

t. Instrumen Keuangan (lanjutan)

i. Aset Keuangan (lanjutan)

Penurunan nilai aset keuangan (lanjutan)

KKE diakui dalam dua tahap. Untuk eksposur kredit yang belum ada peningkatan risiko kredit yang signifikan sejak pengakuan awal, KKE dilakukan untuk kerugian kredit yang diakibatkan oleh peristiwa gagal bayar yang mungkin terjadi dalam 12 bulan ke depan (KKE 12 bulan). Untuk eksposur kredit yang telah terjadi peningkatan risiko kredit yang signifikan sejak pengakuan awal, penyisihan kerugian dilakukan untuk kerugian kredit yang diperkirakan selama sisa umur eksposur, terlepas dari waktu gagal bayar (KKE sepanjang umur).

Untuk piutang usaha, Kelompok Usaha menerapkan pendekatan yang disederhanakan dalam menghitung KKE. Oleh karena itu, Kelompok Usaha tidak menelusuri perubahan dalam risiko kredit, tetapi mengakui penyisihan kerugian berdasarkan KKE sepanjang umur pada setiap tanggal pelaporan. Kelompok Usaha telah menyusun matriks provisi berdasarkan pengalaman kerugian kredit historisnya, disesuaikan dengan faktor-faktor perkiraan masa depan yang spesifik bagi debitur dan lingkungan ekonomi.

Kelompok Usaha menganggap aset keuangan gagal bayar ketika pembayaran kontraktual telah lewat 90 hari. Namun, dalam kasus tertentu, Kelompok Usaha juga dapat mempertimbangkan aset keuangan mengalami gagal bayar ketika informasi internal atau eksternal menunjukkan bahwa Kelompok Usaha tidak mungkin menerima jumlah kontraktual yang terutang secara penuh sebelum memperhitungkan setiap perbaikan risiko-kredit yang dimiliki oleh Kelompok Usaha. Aset keuangan dihapuskan jika tidak ada ekspektasi yang wajar untuk memulihkan arus kas kontraktual.

2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES INFORMATION (continued)

t. Financial Instruments (continued)

i. Financial Assets (continued)

Impairment of financial asset (continued)

ECLs are recognized in two stages. For credit exposures for which there has not been a significant increase in credit risk since initial recognition, ECL are provided for credit losses that result from default events that are possible within the next 12-months (a 12-month ECL). For those credit exposures for which there has been a significant increase in credit risk since initial recognition, a loss allowance is required for credit losses expected over the remaining life of the exposure, irrespective of the timing of the default (a lifetime ECL).

For trade receivables, the Group applies a simplified approach in calculating ECL. Therefore, the Group does not track changes in credit risk, but instead recognizes a loss allowance based on lifetime ECLs at each reporting date. The Group has established a provision matrix that is based on its historical credit loss experience, adjusted for forward-looking factors specific to the debtors and the economic environment.

The Group considers a financial asset in default when contractual payments are 90 days past due. However, in certain cases, the Group may also consider a financial asset to be in default when internal or external information indicates that the Group is unlikely to receive the outstanding contractual amounts in full before taking into account any credit enhancements held by the Group. A financial asset is written off when there is no reasonable expectation of recovering the contractual cash flows.

**PT AKR CORPORINDO TBK
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2025 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
kecuali Dinyatakan Lain)**

***PT AKR CORPORINDO TBK
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2025 and
for the Year Then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
unless Otherwise Stated)***

2. IKHTISAR INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

t. Instrumen Keuangan (lanjutan)

ii. Liabilitas keuangan

Pengakuan dan pengukuran awal

Liabilitas keuangan diklasifikasikan sebagai liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi dan liabilitas keuangan lainnya. Kelompok Usaha menetapkan klasifikasi atas liabilitas keuangan pada saat pengakuan awal.

Liabilitas keuangan pada awalnya diukur pada nilai wajar dan, dalam hal pinjaman dan hutang, ditambah biaya transaksi yang dapat diatribusikan secara langsung.

Liabilitas keuangan Kelompok Usaha meliputi hutang bank jangka pendek, hutang bank jangka panjang, hutang usaha dan hutang lain-lain, biaya masih harus dibayar, liabilitas sewa dan hutang dividen.

Pengukuran setelah pengakuan awal

Pengukuran liabilitas keuangan tergantung pada klasifikasinya. Semua liabilitas keuangan Kelompok Usaha diklasifikasikan sebagai pinjaman dan hutang.

Setelah pengakuan awal, pinjaman dan utang yang dikenakan bunga selanjutnya diukur pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode SBE.

Keuntungan atau kerugian diakui dalam laba rugi ketika liabilitas keuangan dihentikan pengakuannya serta melalui proses amortisasi menggunakan metode SBE.

Biaya perolehan diamortisasi dihitung dengan mempertimbangkan diskonto atau premi atas akuisisi dan biaya atau biaya yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari SBE. Amortisasi SBE dicatat sebagai biaya keuangan dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian.

2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES INFORMATION (continued)

t. Financial Instruments (continued)

ii. Financial liabilities

Initial recognition and measurement

Financial liabilities are classified as financial liabilities at fair value through profit or loss and other financial liabilities. The Group determines the classification of its financial liabilities at intial recognition.

Financial liabilities are recognized initially at fair value and, in the case of loans and borrowings, inclusive of directly attributable transaction costs.

The Group's financial liabilities include short-term bank loan, long-term bank loans, trade and other payables, accrued expenses, lease liabilities, and dividend payables.

Subsequent measurement

The measurement of a financial liability depends on its classification. All of the Group's financial liabilities are classified as loans and borrowings.

After initial recognition, interest-bearing loans and borrowings are subsequently measured at amortized cost using the EIR method.

Gains or losses are recognized in profit or loss when the financial liabilities are derecognized as well as through the amortization process using the EIR method.

Amortized cost is calculated by taking into account any discount or premium on acquisition and fees or costs that are an integral part of the EIR. The EIR amortization is included as finance costs in the consolidated statement of profit or loss and other comprehensive income.

**PT AKR CORPORINDO TBK
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2025 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
kecuali Dinyatakan Lain)**

***PT AKR CORPORINDO TBK
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2025 and
for the Year Then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
unless Otherwise Stated)***

2. IKHTISAR INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

t. Instrumen Keuangan (lanjutan)

ii. Liabilitas keuangan (lanjutan)

Penghentian pengakuan

Liabilitas keuangan dihentikan pengakuannya ketika liabilitas yang ditetapkan dalam kontrak dihentikan atau dibatalkan atau kedaluwarsa.

iii. Saling hapus instrumen keuangan

Aset keuangan dan liabilitas keuangan disalinghapuskan dan jumlah netonya dilaporkan pada laporan posisi keuangan ketika terdapat hak yang berkekuatan hukum untuk melakukan saling hapus atas jumlah yang telah diakui tersebut dan adanya niat untuk menyelesaikan secara neto, atau untuk merealisasikan aset dan menyelesaikan liabilitas secara bersamaan.

u. Penurunan Nilai Aset Non-Keuangan

Pada setiap akhir periode pelaporan, Kelompok Usaha menilai apakah terdapat indikasi suatu aset mengalami penurunan nilai. Jika terdapat indikasi tersebut atau pada saat pengujian secara tahunan penurunan nilai aset (yaitu aset tidak berwujud dengan umur manfaat tidak terbatas, aset tidak berwujud yang belum dapat digunakan atau *goodwill* yang diperoleh dalam suatu kombinasi bisnis) diperlukan, maka Kelompok Usaha membuat estimasi jumlah terpulihkan aset tersebut.

Jumlah terpulihkan yang ditentukan untuk aset individual adalah jumlah yang lebih tinggi antara nilai wajar aset atau UPK dikurangi biaya untuk menjual dengan nilai pakainya, kecuali aset tersebut tidak menghasilkan arus kas masuk yang sebagian besar independen dari aset atau kelompok aset lain. Jika nilai tercatat aset atau UPK lebih besar daripada jumlah terpulihkannya, maka aset tersebut dipertimbangkan mengalami penurunan nilai dan nilai tercatat aset diturunkan menjadi sebesar jumlah terpulihkannya.

Kelompok Usaha mendasarkan perhitungan penurunan nilai pada rincian perhitungan anggaran atau prakiraan yang disusun secara terpisah untuk masing-masing UPK Kelompok Usaha atas aset individual yang dialokasikan.

2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES INFORMATION (continued)

t. Financial Instruments (continued)

ii. Financial liabilities (continued)

Derecognition

A financial liability is derecognized when the obligation under the liability is discharged or cancelled or has expired.

iii. Offsetting financial instruments

Financial assets and liabilities are offset and the net amount is reported in the statement of financial position when there is a legally enforceable right to offset the recognized amounts and there is an intention to settle on a net basis, or realise the asset and settle the liability simultaneously.

u. Impairment of Non-Financial Assets

The Group assesses at each annual reporting period whether there is an indication that an asset may be impaired. If any such indication exists, or when annual impairment testing for an asset (i.e. an intangible asset with an indefinite useful life, an intangible asset not yet available for use or goodwill acquired in a business combination) is required, the Group makes an estimate of the asset's recoverable amount.

An asset's recoverable amount is the higher of an asset's or CGU's fair value less costs to sell and its value in use, and is determined for an individual asset, unless the asset does not generate cash inflows that are largely independent of those from other assets or groups of assets. Where the carrying amount of an asset or CGU exceeds its recoverable amount, the asset is considered impaired and is written down to its recoverable amount.

The Group bases its impairment calculation on detailed budgets and forecast calculations which are prepared separately for each of the Group's CGUs to which the individual assets are allocated.

2. IKHTISAR INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

u. Penurunan Nilai Aset Non-Keuangan (lanjutan)

Dalam menghitung nilai pakai, estimasi arus kas masa depan neto didiskontokan ke nilai kini dengan menggunakan tingkat diskonto sebelum pajak yang menggambarkan penilaian pasar kini dari nilai waktu uang dan risiko spesifik atas aset. Dalam menentukan nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual, digunakan harga penawaran pasar terakhir, jika tersedia. Jika tidak terdapat transaksi tersebut, digunakan model penilaian yang sesuai untuk menentukan nilai wajar aset. Perhitungan-perhitungan ini dikuatkan oleh penilaian berganda atau indikator nilai wajar yang tersedia.

Kerugian penurunan nilai dari operasi yang berkelanjutan, jika ada, diakui sebagai laba rugi sesuai dengan kategori biaya yang konsisten dengan fungsi dari aset yang diturunkan nilainya.

Untuk aset selain *goodwill,* penilaian dilakukan pada akhir setiap tanggal pelaporan apakah terdapat indikasi bahwa rugi penurunan nilai yang telah diakui dalam tahun sebelumnya mungkin tidak ada lagi atau mungkin telah menurun. Jika indikasi dimaksud ditemukan, maka entitas mengestimasi jumlah terpulihkan aset atau UPK tersebut. Kerugian penurunan nilai yang telah diakui dalam periode sebelumnya untuk aset dibalik hanya jika terdapat perubahan asumsi-asumsi yang digunakan untuk menentukan jumlah terpulihkan aset tersebut sejak rugi penurunan nilai terakhir diakui. Dalam hal ini, jumlah tercatat aset dinaikkan ke jumlah terpulihkannya. Pembalikan tersebut dibatasi sehingga jumlah tercatat aset tidak melebihi jumlah terpulihkannya maupun jumlah tercatat, neto setelah penyusutan, seandainya tidak ada rugi penurunan nilai yang telah diakui untuk aset tersebut pada tahun sebelumnya. Pembalikan rugi penurunan nilai diakui dalam laba rugi.

Setelah pembalikan tersebut, penyusutan aset tersebut disesuaikan di periode mendatang untuk mengalokasikan jumlah tercatat aset yang direvisi, dikurangi nilai sisanya, dengan dasar yang sistematis selama sisa umur manfaatnya.

2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES INFORMATION (continued)

u. Impairment of Non-Financial Assets (continued)

In assessing the value in use, the estimated net future cash flows are discounted to their present value using a pre-tax discount rate that reflects current market assessments of the time value of money and the risks specific to the asset. In determining fair value less costs to sell, recent market transactions are taken into account, if available. If no such transactions can be identified, an appropriate valuation model is used to determine the fair value of the assets. These calculations are corroborated by valuation multiples or other available fair value indicators.

Impairment losses of continuing operation, if any, are recognized as profit or loss under expense categories that are consistent with the functions of the impaired assets.

For assets excluding goodwill, an assessment is made at each reporting date as to whether there is any indication that previously recognized impairment losses may no longer exist or may have decreased. If such indication exists, the asset's or CGU's recoverable amount is estimated. A previously recognized impairment loss for an asset is reversed only if there has been a change in the assumptions used to determine the asset's recoverable amount since the last impairment loss was recognized. If that is the case, the carrying amount of the asset is increased to its recoverable amount. The reversal is limited so that the carrying amount of the assets does not exceed its recoverable amount nor exceed the carrying amount that would have been determined, net of depreciation, had no impairment loss been recognized for the asset in prior years. Reversal of an impairment loss is recognized in the profit and loss.

After such a reversal, the depreciation charge on the said asset is adjusted in future periods to allocate the asset's revised carrying amount, less any residual value, on a systematic basis over its remaining useful life.

2. IKHTISAR INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

v. Laba per Saham

Laba per saham dihitung berdasarkan rata-rata tertimbang jumlah saham yang beredar selama periode yang bersangkutan.

Perusahaan tidak mempunyai efek berpotensi saham biasa yang bersifat dilutif pada tanggal 31 Desember 2025.

w. Informasi Segmen

Untuk tujuan manajemen, Kelompok Usaha dibagi menjadi empat (4) segmen operasi utama berdasarkan produk dan jasa yang dikelola secara independen oleh masing-masing pengelola segmen yang bertanggung jawab atas kinerja dari masing-masing segmen. Para pengelola segmen melaporkan secara langsung kepada manajemen yang secara teratur mengkaji laba segmen sebagai dasar untuk mengalokasikan sumber daya ke masing-masing segmen dan untuk menilai kinerja segmen. Pengungkapan tambahan pada masing-masing segmen terdapat dalam Catatan 32, termasuk faktor yang digunakan untuk mengidentifikasi segmen yang dilaporkan dan dasar pengukuran informasi segmen.

Aset dan liabilitas yang digunakan bersama dalam satu segmen atau lebih dialokasikan kepada setiap segmen jika, dan hanya jika, pendapatan dan beban yang terkait dengan aset tersebut juga dialokasikan kepada segmen-segmen tersebut.

x. Pengukuran Nilai Wajar

Nilai wajar dari aset atau liabilitas diukur dengan menggunakan asumsi yang akan digunakan pelaku pasar ketika menentukan harga aset atau liabilitas tersebut, dengan asumsi bahwa pelaku pasar bertindak dalam kepentingan ekonomi terbaiknya.

Pengukuran nilai wajar dari suatu aset non-keuangan memperhitungkan kemampuan pelaku pasar untuk menghasilkan manfaat ekonomik dengan menggunakan aset dalam penggunaan tertinggi dan terbaiknya atau dengan menjualnya kepada pelaku pasar lain yang akan menggunakan aset tersebut pada penggunaan tertinggi dan terbaiknya.

2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES INFORMATION (continued)

v. Earnings per Share

Earnings per share is computed based on the weighted average number of issued and fully paid shares during the period.

The Company has no outstanding dilutive potential ordinary shares as of December 31, 2025.

w. Segment Information

For management purposes, the Group is organized into four (4) main operating segments based on their products and services which are independently managed by the respective segment managers for the performance of the respective segments under their charge. The segment managers report directly to the management who regularly review the segment results in order to allocate resources to the segments and to assess the segment performance. Additional disclosures on each of these segments are shown in Note 32, including the factors used to identify the reportable segments and the measurement basis of segment information.

Assets and liabilities that relate jointly to one or more segments are allocated to their respective segment, if and only if, their related revenues and expenses are also allocated to those segments.

x. Fair Value Measurement

The fair value of an asset or a liability is measured using the assumptions that market participants would use when pricing the asset or liability, assuming that market participants act in their economic best interest.

A fair value measurement of a non-financial asset takes into account a market participant's ability to generate economic benefits by using the asset in its highest and best use or by selling it to another market participant that would use the asset in its highest and best use.

**PT AKR CORPORINDO TBK
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2025 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
kecuali Dinyatakan Lain)**

***PT AKR CORPORINDO TBK
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2025 and
for the Year Then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
unless Otherwise Stated)***

2. IKHTISAR INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

x. Pengukuran Nilai Wajar (lanjutan)

Kelompok Usaha menggunakan teknik penilaian yang sesuai dengan keadaan dan data yang memadai tersedia untuk mengukur nilai wajar, dengan memaksimalkan masukan yang dapat diamati (*observable*) yang relevan dan meminimalkan masukan yang tidak dapat diamati (*unobservable*).

Semua aset dan liabilitas yang nilai wajarnya diukur atau diungkapkan dalam laporan keuangan konsolidasian dikategorikan dalam hirarki nilai wajar berdasarkan *level* masukan paling rendah yang signifikan terhadap pengukuran nilai wajar secara keseluruhan sebagai berikut:

i) *Level* 1 - Harga kuotasian (tanpa penyesuaian) di pasar aktif untuk aset atau liabilitas yang identik yang dapat diakses entitas pada tanggal pengukuran.

ii) *Level* 2 - Teknik penilaian yang menggunakan tingkat masukan (*input*) yang paling rendah yang signifikan terhadap pengukuran nilai wajar yang dapat diamati (*observable*) baik secara langsung atau tidak langsung.

iii) *Level* 3 - Teknik penilaian yang menggunakan tingkat masukan (*input*) yang paling rendah yang signifikan terhadap pengukuran nilai wajar yang tidak dapat diamati (*unobservable*).

Untuk aset dan liabilitas yang diakui pada laporan keuangan konsolidasian secara berulang, Kelompok Usaha menentukan apakah terdapat perpindahan antara *Level* dalam hirarki dengan melakukan evaluasi ulang atas penetapan kategori (berdasarkan *Level* masukan (*input*) paling rendah yang signifikan terhadap pengukuran nilai wajar secara keseluruhan) pada tiap akhir periode pelaporan.

2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES INFORMATION (continued)

x. Fair Value Measurement (continued)

The Group uses valuation techniques that are appropriate in the circumstances and for which sufficient data are available to measure fair value, maximizing the use of relevant observable inputs and minimizing the use of unobservable inputs.

All assets and liabilities for which fair value is measured or disclosed in the consolidated financial statements are categorised within the fair value hierarchy, described as follows, based on the lowest level input that is significant to the fair value measurement as a whole:

i) Level 1 - Quoted (unadjusted) market prices in active markets for identical assets or liabilities.

ii) Level 2 - Valuation techniques for which the lowest level input that is significant to the fair value measurement is directly or indirectly observable.

iii) Level 3 - Valuation techniques for which the lowest level input that is significant to the fair value measurement is unobservable.

For assets and liabilities that are recognized in the consolidated financial statements on a recurring basis, the Group determines whether transfers have occurred between Levels in the hierarchy by re-assessing categorisation (based on the lowest level input that is significant to the fair value measurement as a whole) at the end of each reporting period.

2. IKHTISAR INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

y. Ketidakpastian Sumber Estimasi

Penyusunan laporan keuangan konsolidasian Kelompok Usaha mengharuskan manajemen untuk membuat pertimbangan, estimasi dan asumsi yang mempengaruhi jumlah yang dilaporkan dari pendapatan, beban, aset dan liabilitas, dan pengungkapan atas liabilitas kontinjensi, pada akhir periode pelaporan. Ketidakpastian mengenai asumsi dan estimasi tersebut dapat mengakibatkan penyesuaian material terhadap nilai tercatat aset dan liabilitas dalam periode pelaporan berikutnya.

Pertimbangan

Pertimbangan berikut ini dibuat oleh manajemen dalam rangka penerapan kebijakan akuntansi Kelompok Usaha yang memiliki pengaruh paling signifikan atas jumlah yang diakui dalam laporan keuangan konsolidasian:

Pajak Penghasilan

Ketidakpastian atas interpretasi dari peraturan pajak yang kompleks, perubahan peraturan pajak dan jumlah dan timbulnya penghasilan kena pajak di masa depan, dapat menyebabkan penyesuaian di masa depan atas penghasilan dan beban pajak yang telah dicatat.

Pertimbangan signifikan dilakukan dalam menentukan provisi atas pajak penghasilan badan. Terdapat transaksi dan perhitungan tertentu yang penentuan pajak akhirnya adalah tidak pasti dalam kegiatan usaha normal.

Kelompok Usaha mengakui liabilitas atas pajak penghasilan badan berdasarkan estimasi apakah akan terdapat tambahan pajak penghasilan badan.

Tagihan atas Hasil Pemeriksaan Pajak

Berdasarkan peraturan perpajakan yang berlaku saat ini, manajemen mempertimbangkan apakah jumlah yang tercatat dalam akun di atas dapat dipulihkan dan dikembalikan oleh Kantor Pajak. Penjelasan lebih lanjut atas akun ini diungkapkan pada Catatan 26.

2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES INFORMATION (continued)

y. Source of Estimation Uncertainty

The preparation of the Group's consolidated financial statements requires management to make judgments, estimates and assumptions that affect the reported amounts of revenues, expenses, assets and liabilities, and the disclosure of contingent liabilities, at the end of the reporting period. Uncertainty about these assumptions and estimates could result in outcomes that require a material adjustment to the carrying amount of the asset and liability affected in future periods.

Judgment

The following judgments are made by management in the process of applying the Group's accounting policies that have the most significant effects on the amounts recognized in the consolidated financial statements:

Income Tax

Uncertainties exist with respect to the interpretation of complex tax regulations, changes in tax laws, and the amount and timing of future taxable income, could necessitate future adjustments to tax income and expense already recorded.

Judgment is involved in determining the provision for corporate income tax. There are certain transactions and computation for which the ultimate tax determination is uncertain in the ordinary course of business.

The Group recognizes liabilities for expected corporate income tax issues based on estimates of whether additional corporate income tax will be due.

Claims for Tax Refund and Tax Assessments

Based on the tax regulations currently enacted, the management judged if the amounts recorded under the above account are recoverable and refundable by the Tax Office. Further explanations regarding this account are provided in Note 26.

**PT AKR CORPORINDO TBK
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2025 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
kecuali Dinyatakan Lain)**

***PT AKR CORPORINDO TBK
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2025 and
for the Year Then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
unless Otherwise Stated)***

2. IKHTISAR INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

y. Ketidakpastian Sumber Estimasi (lanjutan)

Pertimbangan (lanjutan)

Penentuan Mata Uang Fungsional

Mata uang fungsional dari setiap entitas dalam Kelompok Usaha adalah mata uang dari lingkungan ekonomi utama di mana entitas tersebut beroperasi. Mata uang tersebut adalah mata uang yang mempengaruhi pendapatan dan biaya dari masing-masing entitas. Penentuan mata uang fungsional bisa membutuhkan pertimbangan karena berbagai kompleksitas, antara lain, suatu entitas dapat bertransaksi dalam lebih dari satu mata uang dalam aktivitas usahanya sehari-hari.

Estimasi dan Asumsi

Asumsi utama masa depan dan ketidakpastian sumber estimasi utama yang lain pada tanggal pelaporan yang memiliki risiko signifikan bagi penyesuaian yang material terhadap nilai tercatat aset dan liabilitas untuk tahun berikutnya diungkapkan di bawah ini. Kelompok Usaha mendasarkan asumsi dan estimasi pada parameter yang tersedia pada saat laporan keuangan konsolidasian disusun. Asumsi dan situasi mengenai perkembangan masa depan mungkin berubah akibat perubahan pasar atau situasi di luar kendali Kelompok Usaha. Perubahan tersebut dicerminkan dalam asumsi terkait pada saat terjadinya.

2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES INFORMATION (continued)

y. Source of Estimation Uncertainty (continued)

Judgment (continued)

Determination of Functional Currency

The functional currency of each entity in the Group is the currency from the primary economic environment where such entity operates. Those currencies are the currencies that influence the revenues and costs of each respective entity. The determination of functional currency may require judgment due to various complexity, among others, the entity may transact in more than one currency in its daily business activities.

Estimates and Assumptions

The key assumptions concerning the future and other key sources of estimation uncertainty at the reporting date that have a significant risk of causing a material adjustment to the carrying amounts of assets and liabilities within the next financial year are disclosed below. The Group based its assumptions and estimates on parameters available when the consolidated financial statements were prepared. Existing circumstances and assumptions about future developments may change due to market changes or circumstances arising beyond the control of the Group. Such changes are reflected in the assumptions when they occur.

2. IKHTISAR INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

y. Ketidakpastian Sumber Estimasi (lanjutan)

Estimasi dan Asumsi (lanjutan)

Provisi Kerugian Kredit Ekspektasian (KKE) atas Piutang Usaha

Kelompok Usaha menetapkan estimasi penyisihan penurunan nilai piutang usaha menggunakan pendekatan yang disederhanakan dari KKE. Kelompok Usaha terutama menggunakan penilaian penurunan nilai secara individu untuk sejumlah pelanggan dalam melakukan pencadangan KKE atas piutang usaha pada tanggal pelaporan. Secara umum, dalam menilai penurunan nilai secara individu atas piutang usaha, manajemen menggunakan pertimbangan untuk mengevaluasi kolektibilitas dari pelanggan secara individual dengan mempertimbangkan kelayakan kredit pelanggan, kesulitan finansial yang dialami pelanggan, pengalaman gagal bayar atau tunggakan pembayaran bunga atau pokok, probabilitas pelanggan akan mengalami kebangkrutan dan analisis umur jatuh tempo, dan bila dapat diterapkan, nilai wajar jaminan yang diberikan oleh pelanggan. Hal ini melibatkan pertimbangan bahwa cadangan KKE harus mencerminkan informasi peristiwa masa lalu, masa kini, dan informasi yang bersifat perkiraan masa depan, serta nilai waktu uang.

Kelompok Usaha juga menggunakan matriks provisi untuk menghitung KKE untuk piutang usaha. Tingkat provisi didasarkan pada hari lewat jatuh tempo untuk pengelompokan berbagai segmen pelanggan yang memiliki pola kerugian yang serupa (yaitu, berdasarkan wilayah geografis, jenis produk, jenis dan peringkat pelanggan, dan pertanggungan berdasarkan surat kredit dan bentuk asuransi kredit lainnya).

2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES INFORMATION (continued)

y. Source of Estimation Uncertainty (continued)

Estimates and Assumptions (continued)

Provision for Expected Credit Losses (ECL) of Trade Receivable

The Group estimates impairment allowance for trade receivables using simplified approach of ECL. The Group mainly uses individual impairment assessment for various customers in respect to provide allowance for ECL of trade receivables at the reporting date. In general, in assessing the individual basis of impairment of trade receivables, management exercised judgments to evaluate the collectability from individual customers after taking into account their creditworthiness, whether they have financial difficulties, experience of default or delinquency in interest or principal payments, the probability that they will enter bankruptcy and aging analysis, and if applicable, the fair value of collateral provided by customers. This involves judgment as the allowance for ECL must reflect information about past events, current conditions and forecasts of future conditions, as well as the time value of money.

The Group also uses a provision matrix to calculate ECLs for trade receivables. The provision rates are based on days past due for groupings of various customer segments that have similar loss patterns (i.e., by geography, product type, customer type and rating, and coverage by letters of credit and other forms of credit insurance).

**PT AKR CORPORINDO TBK
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2025 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
kecuali Dinyatakan Lain)**

***PT AKR CORPORINDO TBK
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2025 and
for the Year Then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
unless Otherwise Stated)***

2. IKHTISAR INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

y. Ketidakpastian Sumber Estimasi (lanjutan)

Estimasi dan Asumsi (lanjutan)

Provisi Kerugian Kredit Ekspektasian (KKE) atas Piutang Usaha (lanjutan)

Matriks provisi pada awalnya didasarkan pada tingkat gagal bayar Kelompok Usaha yang diamati secara historis. Kelompok Usaha akan mengkalibrasi matriks untuk menyesuaikan pengalaman kerugian kredit historis dengan informasi yang bersifat perkiraan masa depan *(forward-looking)*. Misalnya, jika perkiraan kondisi ekonomi (yaitu, minyak mentah, *BI-7 days repo rate, Jakarta Composite Index*) diekspektasikan akan memburuk/membaik pada tahun berikutnya yang dapat menyebabkan peningkatan jumlah gagal bayar di sektor industri, tingkat gagal bayar historis disesuaikan. Pada setiap tanggal pelaporan, tingkat gagal bayar yang diamati secara historis diperbarui dan perubahan dalam estimasi perkiraan masa depan dianalisis.

Penilaian korelasi antara tingkat *default* yang diamati secara historis, prakiraan kondisi ekonomi, dan KKE adalah estimasi yang signifikan. Jumlah KKE sensitif terhadap perubahan keadaan dari informasi pelanggan dan prakiraan kondisi ekonomi. Pengalaman kerugian kredit historis Kelompok Usaha dan perkiraan kondisi ekonomi mungkin juga tidak mewakili gagal bayar pelanggan yang sebenarnya di masa depan. Informasi tentang KKE pada piutang usaha Kelompok Usaha diungkapkan dalam Catatan 5.

Sewa

Kelompok Usaha tidak dapat dengan mudah menentukan tingkat bunga implisit dalam sewa, oleh karena itu Kelompok Usaha menggunakan suku bunga pinjaman tambahan ("IBR") untuk mengukur liabilitas sewa. Ada sejumlah faktor yang perlu dipertimbangkan dalam menentukan IBR. Kelompok Usaha mempertimbangkan faktor-faktor utama berikut: risiko kredit perusahaan, jangka waktu sewa, jangka waktu pembayaran sewa, waktu di mana sewa dimasukkan, dan mata uang di mana pembayaran sewa dalam denominasi.

2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES INFORMATION (continued)

y. Source of Estimation Uncertainty (continued)

Estimates and Assumptions (continued)

Provision for Expected Credit Losses (ECL) of Trade Receivable (continued)

The provision matrix is initially based on the Group's historical observed default rates. The Group will calibrate the matrix to adjust the historical credit loss experience with forward-looking information. For instance, if forecast economic conditions (i.e., crude oil, BI-7 days repo rate, Jakarta Composite Index) are expected to deteriorate/recover over the next year which can lead to an increased number of defaults in the industrial sector, the historical default rates are adjusted. At every reporting date, the historical observed default rates are updated and changes in the forward-looking estimates are analyzed.

The assessment of the correlation between historical observed default rates, forecast economic conditions and ECLs is a significant estimate. The amount of ECLs is sensitive to changes in circumstances of customer information and of forecast economic conditions. The Group's historical credit loss experience and forecast of economic conditions may also not be representative of customer's actual default in the future. The information about the ECLs on the Group's trade receivables is disclosed in Note 5.

Leases

The Group can not readily determine the implicit interest rate in the lease, therefore, the Group uses the Incremental Borrowing Rate ("IBR") to measure lease liabilities. There are number factors to consider in determining an incremental borrowing rate. The Group considers the following main factors: the Company's corporate credit risk, the lease term, the lease payment term, the time at which the lease is entered into, and the currency in which the lease payments are denominated.

2. IKHTISAR INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

y. Ketidakpastian Sumber Estimasi (lanjutan)

Estimasi dan Asumsi (lanjutan)

Sewa (lanjutan)

Dalam menentukan jangka waktu sewa, Perusahaan mempertimbangkan semua fakta dan keadaan yang menciptakan insentif ekonomi untuk menggunakan opsi perpanjangan, atau tidak menggunakan opsi terminasi. Opsi perpanjangan (atau periode setelah opsi pemutusan hubungan kerja) hanya termasuk dalam jangka waktu sewa jika sewa tersebut dipastikan akan diperpanjang (atau tidak dihentikan).

Pensiun dan Imbalan Kerja

Pengukuran liabilitas imbalan kerja Kelompok Usaha bergantung pada pemilihan asumsi yang digunakan oleh aktuaris independen dalam menghitung jumlah-jumlah tersebut. Asumsi tersebut termasuk antara lain, tingkat diskonto, tingkat kenaikan gaji tahunan, tingkat pengunduran diri karyawan tahunan, tingkat kecacatan, umur pensiun dan tingkat kematian. Keuntungan atau kerugian aktuarial yang timbul dari penyesuaian dan perubahan dalam asumsi-asumsi aktuarial diakui secara langsung pada laporan posisi keuangan konsolidasian dengan debit atau kredit ke saldo laba melalui PKL dalam periode terjadinya.

Sementara Kelompok Usaha berkeyakinan bahwa asumsi tersebut adalah wajar dan sesuai, perbedaan signifikan pada hasil aktual atau perubahan signifikan dalam asumsi yang ditetapkan Kelompok Usaha dapat mempengaruhi secara material liabilitas diestimasi atas pensiun dan imbalan kerja dan beban imbalan kerja neto.

Nilai tercatat atas estimasi liabilitas imbalan kerja Kelompok Usaha pada tanggal-tanggal pelaporan diungkapkan dalam Catatan 28.

2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES INFORMATION (continued)

y. Source of Estimation Uncertainty (continued)

Estimates and Assumptions (continued)

Leases (continued)

In determining the lease term, the Company considers all facts and circumstances that create an economic incentive to exercise an extension option, or not exercise a termination option. Extension options (or periods after termination options) are only included in the lease term if the lease is reasonably certain to be extended (or not terminated).

Pension and Employee Benefits

The measurement of the Group's employee benefits liability is dependent on its selection of certain assumptions used by the independent actuaries in calculating such amounts. Those assumptions include among others, discount rates, future annual salary increase, annual employee turn-over rate, disability rate, retirement age and mortality rate. Actuarial gains or losses arising from experience adjustments and changes in actuarial assumptions are recognized immediately in the consolidated statement of financial position with a corresponding debit or credit to retained earnings through OCI in the period which they occur.

While the Group believes that its assumptions are reasonable and appropriate, significant differences in the Group's actual experiences or significant changes in the Group's assumptions may materially affect its estimated liabilities for pension and employee benefits and net employee benefits expense.

The carrying amounts of the Group's estimated employee benefits liabilities at reporting dates are disclosed in Note 28.

**PT AKR CORPORINDO TBK
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2025 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
kecuali Dinyatakan Lain)**

***PT AKR CORPORINDO TBK
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2025 and
for the Year Then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
unless Otherwise Stated)***

2. IKHTISAR INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

y. Ketidakpastian Sumber Estimasi (lanjutan)

Estimasi dan Asumsi (lanjutan)

Pembayaran Berbasis Saham

Dalam mengestimasi nilai wajar untuk transaksi pembayaran berbasis saham memerlukan penentuan model penilaian yang paling tepat, yang bergantung pada syarat dan ketentuan pemberian. Estimasi ini juga membutuhkan penentuan *input* yang paling tepat untuk model penilaian termasuk umur ekspektasian dari opsi saham, volatilitas dan hasil dividen dan membuat asumsi atas hal tersebut. Untuk pengukuran nilai wajar transaksi yang diselesaikan dengan ekuitas dengan karyawan pada tanggal pemberian, Kelompok Usaha menggunakan model *black-scholes*. Asumsi dan model yang digunakan untuk mengestimasi nilai wajar transaksi pembayaran berbasis saham diungkapkan dalam Catatan 20.

Penyusutan Aset Tetap

Biaya perolehan aset tetap disusutkan dengan menggunakan metode garis lurus berdasarkan estimasi masa manfaat ekonomisnya, kecuali hak atas tanah tidak diamortisasi. Manajemen mengestimasi masa manfaat ekonomis aset tetap antara 2 sampai dengan 30 tahun. Umur masa manfaat ini adalah umur yang secara umum diharapkan dalam industri di mana Kelompok Usaha menjalankan bisnisnya. Perubahan tingkat pemakaian dan perkembangan teknologi dapat mempengaruhi masa manfaat ekonomis dan nilai sisa aset, dan karenanya biaya penyusutan masa depan mungkin direvisi. Nilai tercatat neto atas aset tetap Kelompok Usaha pada tanggal-tanggal pelaporan diungkapkan dalam Catatan 10.

2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES INFORMATION (continued)

y. Source of Estimation Uncertainty (continued)

Estimates and Assumptions (continued)

Share-based Payments

Estimating fair value for share-based payment transactions requires determination of the most appropriate valuation model, which depends on the terms and conditions of the grant. This estimate also requires determination of the most appropriate inputs to the valuation model including the expected life of the share option, volatility and dividend yield and making assumptions about them. For the measurement of the fair value of equity-settled transactions with employees at the grant date, the Group uses black-scholes model. The assumptions and models used for estimating fair value for share-based payment transactions are disclosed in Note 20.

Depreciation of Property, Plant and Equipment (PPE)

The costs of PPE are depreciated on a straight-line method over their estimated useful lives, except for landrights which is not amortized. Management estimates the useful lives of these PPE to be within 2 to 30 years. These are common life expectancies applied in the industries where the Group conducts its businesses. Changes in the expected level of usage and technological development could impact the economic useful lives and the residual values of these assets and therefore future depreciation charges could be revised. The net carrying amounts of the Group's PPE at reporting dates are disclosed in Note 10.

2. IKHTISAR INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

y. Ketidakpastian Sumber Estimasi (lanjutan)

Estimasi dan Asumsi (lanjutan)

Penurunan Nilai Aset Non-Keuangan

Penurunan nilai terjadi pada saat nilai tercatat aset atau UPK melebihi jumlah terpulihkannya, yaitu yang lebih tinggi antara nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual dan nilai pakainya. Nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual dan nilai pakai diestimasi berdasarkan arus kas masa depan neto yang didiskontokan ke nilai kini dengan menggunakan tingkat diskonto sebelum pajak yang menggambarkan penilaian pasar kini dari nilai waktu uang dan risiko spesifik atas UPK terkait.

Nilai terpulihkan paling sensitif terhadap tingkat diskonto yang digunakan untuk model arus kas yang didiskontokan seperti halnya dengan arus kas masuk masa depan yang diharapkan dan tingkat pertumbuhan yang digunakan untuk tujuan ekstrapolasi. Manajemen berkeyakinan bahwa tidak diperlukan pencatatan kerugian penurunan nilai pada tanggal-tanggal pelaporan.

Aset Pajak Tangguhan

Aset pajak tangguhan diakui atas seluruh rugi fiskal yang belum digunakan sepanjang besar kemungkinannya bahwa penghasilan kena pajak akan tersedia, sehingga rugi fiskal tersebut dapat digunakan. Estimasi signifikan oleh manajemen diharuskan dalam menentukan jumlah aset pajak tangguhan yang dapat diakui berdasarkan saat penggunaan dan tingkat penghasilan kena pajak serta strategi perencanaan pajak masa depan.

2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES INFORMATION (continued)

y. Source of Estimation Uncertainty (continued)

Estimates and Assumptions (continued)

Impairment of Non-Financial Assets

An impairment exists when the carrying value of an asset or CGU exceeds its recoverable amount, which is the higher of its fair value less costs to sell and its value in use. The fair value less costs to sell and the value in use are estimated based on the net future cash flows discounted to their present values using a pre-tax discount rate that reflects current market assessments of the time value of money and the specific risks to the related CGU.

The recoverable amount is most sensitive to the discount rate used for the discounted cash flow model as well as the expected future cash inflows and the growth rate used for extrapolation purposes. The management believes that no impairment loss is required at reporting dates.

Deferred Tax Assets

Deferred tax assets are recognized for all unused tax losses to the extent that it is probable that taxable profit will be available against which the tax losses can be utilized. Significant management estimates are required to determine the amount of deferred tax assets that can be recognized based upon the likely timing and the level of future taxable profits together with future tax planning strategies.

2. IKHTISAR INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

y. Ketidakpastian Sumber Estimasi (lanjutan)

Estimasi dan Asumsi (lanjutan)

Penyisihan Penurunan Nilai Pasar dan Keusangan Persediaan

Penyisihan nilai realisasi neto persediaan diestimasi berdasarkan fakta dan situasi yang tersedia, termasuk namun tidak terbatas kepada, kondisi fisik persediaan yang dimiliki, harga jual pasar, estimasi biaya penyelesaian dan estimasi biaya yang timbul untuk penjualan. Penyisihan dievaluasi kembali dan disesuaikan jika terdapat tambahan informasi yang mempengaruhi jumlah yang diestimasi. Nilai tercatat persediaan Kelompok Usaha sebelum penyisihan nilai realisasi neto diungkapkan dalam Catatan 6.

z. Perubahan Kebijakan Akuntansi

Kelompok Usaha menerapkan pertama kali seluruh standar baru dan/atau yang direvisi yang berlaku efektif untuk periode yang berlaku pada atau setelah 1 Januari 2025, termasuk standar yang direvisi berikut ini yang mempengaruhi laporan keuangan konsolidasian Kelompok Usaha:

Amandemen PSAK 221: Kekurangan Ketertukaran

Amandemen tersebut menetapkan bagaimana entitas harus menilai apakah suatu mata uang dapat dipertukarkan serta bagaimana entitas harus menentukan kurs spot ketika ketertukaran (e*xchangeability*) tidak tersedia. Amandemen tersebut juga mensyaratkan pengungkapan informasi yang memungkinkan pengguna laporan keuangan untuk memahami bagaimana ketidakmampuan mata uang tersebut untuk dipertukarkan dengan mata uang lainnya memengaruhi, atau diharapkan akan memengaruhi, kinerja keuangan, posisi keuangan, dan arus kas entitas.

Amandemen ini tidak memiliki dampak terhadap laporan keuangan konsolidasian Kelompok Usaha.

2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES INFORMATION (continued)

y. Source of Estimation Uncertainty (continued)

Estimates and Assumptions (continued)

Allowance for Decline in Market Values and Obsolescence of Inventories

Allowance for net realizable value of inventories is estimated based on the best available facts and circumstances, including but not limited to, the inventories' own physical conditions, their market selling prices, estimated costs of completion and estimated costs to be incurred for their sales. The allowance is re-evaluated and adjusted as additional information received affects the amount estimated. The carrying amount of the Group's inventories before allowance for net realizable value are disclosed in Note 6.

z. Changes in Accounting Principles

The Group made first time adoption of all the new and/or revised standards effective for the periods beginning on or after January 1, 2025, including the following revised standards that have affected the consolidated financial statements of the Group:

Amendment of PSAK 221: Lack of Exchangeability

The amendments specifies how an entity should assess whether a currency is exchangeable and how it should determine a spot exchange rate when exchangeability is lacking. The amendments also require disclosure of information that enables users of its financial statements to understand how the currency not being exchangeable into the other currency affects, or is expected to affect, the entity's financial performance, financial position and cash flows.

The amendments had no impact on the Group's consolidated financial statements.

**PT AKR CORPORINDO TBK
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2025 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
kecuali Dinyatakan Lain)**

***PT AKR CORPORINDO TBK
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2025 and
for the Year Then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
unless Otherwise Stated)***

3. NILAI WAJAR ASET DAN LIABILITAS KEUANGAN

Instrumen keuangan yang disajikan dalam laporan posisi keuangan konsolidasian dicatat sebesar nilai wajar, atau disajikan dalam jumlah tercatat baik karena jumlah tersebut adalah kurang lebih sebesar nilai wajarnya atau karena nilai wajarnya tidak dapat diukur secara handal.

Nilai wajar aset dan liabilitas keuangan disajikan dalam jumlah dimana instrumen tersebut dapat dipertukarkan dalam transaksi kini antara pihak-pihak yang berkeinginan (*willing parties*), bukan dalam penjualan akibat kesulitan keuangan atau likuidasi yang dipaksakan.

Metode dan asumsi berikut ini digunakan untuk mengestimasi nilai wajar untuk setiap kelompok instrumen keuangan yang praktis untuk memperkirakan nilai tersebut:

1. Kas dan setara kas, piutang usaha - neto, piutang lain-lain dan aset lancar lainnya.

   Seluruh aset keuangan tersebut merupakan aset keuangan jangka pendek yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 bulan, sehingga nilai tercatat aset keuangan tersebut kurang lebih telah mencerminkan nilai wajarnya. Piutang *forward* dicatat sebesar nilai wajarnya dengan menggunakan model *forward pricing.*

2. Aset keuangan tidak lancar.

   Aset keuangan yang disajikan pada akun ini merupakan piutang usaha jangka panjang dari pihak ketiga - neto dan uang jaminan.

   Piutang usaha jangka panjang dari pihak ketiga - neto merupakan aset keuangan yang tidak dikenakan bunga dan disajikan pada nilai kini dari estimasi penerimaan kas di masa mendatang dengan menggunakan bunga pasar yang tersedia untuk instrumen yang kurang lebih sejenis.

3. FAIR VALUE OF FINANCIAL ASSETS AND LIABILITIES

Financial instruments presented in the consolidated statement of financial position are carried at fair value, otherwise, they are presented at carrying amounts as either these are reasonable approximation of fair values, or their fair values cannot be reliably measured.

The fair values of the financial assets and liabilities are presented at the amounts which instruments could be exchanged in a current transaction between willing parties, not in a forced sale or liquidation.

The following methods and assumptions were used to estimate the fair value of each class of financial instruments for which it is practicable to estimate such value:

1. *Cash and cash equivalents, trade receivables - net, other receivables and other current assets.*

   All these financial assets are short-term financial assets that will due within 12 months, thus the carrying values of the financial assets approximate their fair values. Forward receivables are carried at their fair values using forward pricing model.

2. *Non-current financial assets.*

   The financial assets presented in this account comprises of long-term trade receivables from third parties - net and refundable deposits.

   Long-term trade receivables from third parties - net are financial assets which bear no interest and are presented at the net present value of the estimated future cash receipts using market interest rate available for debt with approximately similar characteristics.

3. NILAI WAJAR ASET DAN LIABILITAS KEUANGAN (lanjutan)

3. Hutang bank jangka pendek, hutang usaha, hutang lain-lain - pihak ketiga, biaya yang masih harus dibayar, liabilitas sewa jangka pendek dan hutang dividen.

   Seluruh liabilitas keuangan tersebut merupakan liabilitas jangka pendek yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 bulan, sehingga nilai tercatat liabilitas keuangan tersebut kurang lebih telah mencerminkan nilai wajarnya. Hutang *forward* dicatat sebesar nilai wajarnya dengan menggunakan model *forward pricing.*

4. Hutang bank jangka panjang dan lainnya dan hutang obligasi, termasuk bagian jatuh tempo dalam waktu satu tahun, liabilitas sewa jangka panjang, dan hutang dividen.

   Hutang bank jangka panjang dan lainnya merupakan pinjaman yang memiliki suku bunga pasar variabel, sehingga nilai tercatat liabilitas keuangan tersebut kurang lebih telah mencerminkan nilai wajarnya. Hutang obligasi merupakan pinjaman yang memiliki suku bunga tetap, namun nilai wajarnya tidak berubah secara signifikan dibandingkan dengan nilai tercatatnya.

   Liabilitas sewa disajikan pada nilai kini dari estimasi pengeluaran kas di masa mendatang dengan menggunakan suku bunga inkremental untuk pinjaman yang kurang lebih sejenis.

3. FAIR VALUE OF FINANCIAL ASSETS AND LIABILITIES (continued)

3. Short-term bank loan, trade payables, other payables - third parties, accrued expenses, current lease liabilities and dividend payable.

   All these financial liabilities are due within 12 months thus the carrying value of the financial liabilities approximate their fair values. Forward payables are carried at their fair values using forward pricing model.

4. Long-term bank loans and others and bonds payables, including their current maturities, non-current lease liabilities, and dividend payable.

   The long-term bank loans and others are liabilities with floating market interest rates, thus the carrying values of the financial liabilities approximate their fair values. Bonds payables are liabilities with fixed interest rates, however the fair value is not significant changed compared to its carrying value.

   Lease liabilities are presented at the net present value of the estimated future cash flows using incremental borrowing rate for debt with approximately similar characteristic.

4. KAS DAN SETARA KAS / *4. CASH AND CASH EQUIVALENTS*

	31 Des. 2025/ *Dec. 31, 2025*	**31 Des. 2024/ *Dec. 31, 2024***	
Kas	18.040.128	17.426.643	*Cash on hand*
Bank - Pihak ketiga			*Cash in banks - Third parties*
Rupiah			***Rupiah***
PT Bank Mizuho Indonesia	1.135.627.382	100.930.538	*PT Bank Mizuho Indonesia*
PT Bank Permata Tbk	1.091.887.477	627.674.517	*PT Bank Permata Tbk*
PT Bank Maybank Indonesia Tbk	605.904.925	585.459.238	*PT Bank Maybank Indonesia Tbk*
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	321.432.591	366.680.948	*PT Bank Mandiri (Persero) Tbk*
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	318.714.419	157.496.577	*PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk*
PT Bank CIMB Niaga Tbk	195.472.986	39.918.511	*PT Bank CIMB Niaga Tbk*
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	63.421.302	47.627.325	*PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk*
PT Bank Central Asia Tbk	63.377.948	65.335.912	*PT Bank Central Asia Tbk*
PT Bank Danamon Indonesia Tbk	20.982.343	224.267.994	*PT Bank Danamon Indonesia Tbk*
Standard Chartered Bank	1.843.421	38.127.241	*Standard Chartered Bank*
Lain-lain	289.262	236.103	*Others*
Dolar AS			***US Dollar***
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	1.264.713.116	752.997.395	*PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk*
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	391.637.832	669.148.128	*PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk*
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	294.032.592	741.453.126	*PT Bank Mandiri (Persero) Tbk*
PT Bank Permata Tbk	30.579.635	24.051.602	*PT Bank Permata Tbk*
PT Bank CIMB Niaga Tbk	10.065.518	3.100.644	*PT Bank CIMB Niaga Tbk*
Bank of China	6.539.258	377.143	*Bank of China*
PT Bank Central Asia Tbk	6.367.704	4.048.546	*PT Bank Central Asia Tbk*
Standard Chartered Bank	4.926.800	6.019.810	*Standard Chartered Bank*
PT Bank Danamon Indonesia Tbk	2.568.364	3.550.427	*PT Bank Danamon Indonesia Tbk*
PT Bank Maybank Indonesia Tbk	1.559.604	411.783.104	*PT Bank Maybank Indonesia Tbk*
PT Bank UOB Indonesia	1.257.514	1.664.085	*PT Bank UOB Indonesia*
PT Bank Mizuho Indonesia	319.716	1.838.536	*PT Bank Mizuho Indonesia*
Lain-lain	761.091	902.773	*Others*
Lainnya	1.970.420	1.937.864	***Others***
Sub-total	5.836.253.220	4.876.628.088	*Sub-total*
Deposito berjangka - Pihak ketiga			*Time deposits - Third parties*
Rupiah			***Rupiah***
PT Bank Maybank Indonesia Tbk	130.000.000	246.000.000	*PT Bank Maybank Indonesia Tbk*
PT Bank Permata Tbk	56.539.576	112.850.000	*PT Bank Permata Tbk*
PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk	27.000.000	27.500.000	*PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk*
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	25.000.000	25.000.000	*PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk*
PT Bank BTPN Syariah Tbk	-	5.000.000	*PT Bank BTPN Syariah Tbk*
Dolar AS			***US Dollar***
DBS Bank Singapore	135.209.817	53.137.186	*DBS Bank Singapore*
PT Bank Permata Tbk	107.838.583	-	*PT Bank Permata Tbk*
PT Bank Maybank Indonesia Tbk	68.418.051	2.449.691	*PT Bank Maybank Indonesia Tbk*
Sub-total	550.006.027	471.936.877	*Sub-total*
Total	**6.404.299.375**	**5.365.991.608**	***Total***

**PT AKR CORPORINDO TBK
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2025 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
kecuali Dinyatakan Lain)**

***PT AKR CORPORINDO TBK
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2025 and
for the Year Then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
unless Otherwise Stated)***

4. KAS DAN SETARA KAS (lanjutan) / 4. CASH AND CASH EQUIVALENTS (continued)

Tingkat suku bunga deposito per tahun pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut:

Interest rates on time deposits per year as of December 31, 2025 and 2024 are as follows:

	31 Des. 2025/ *Dec. 31 2025*	**31 Des. 2024/ *Dec. 31, 2024***	
Rupiah	2,25% - 6,50%	4,70% - 7,00%	*Rupiah*
Dolar AS	3,13% - 4,90%	3,83% - 5,30%	*US Dollar*

5. PIUTANG / 5. ACCOUNT RECEIVABLES

a. Piutang Usaha / *Trade Receivables*

Berdasarkan pelanggan: / *By debtor:*

	31 Des. 2025/ *Dec. 31 2025*	**31 Des. 2024/ *Dec. 31, 2024***	
Pihak berelasi (Catatan 31)	148.422	943.477	*Related parties (Note 31)*
Pihak ketiga	11.095.130.893	8.034.325.171	*Third parties*
Dikurangi:			*Less:*
Penyisihan kerugian kredit ekspektasian	(106.027.293)	(99.124.121)	*Allowance for expected credit losses*
Penyesuaian nilai wajar	(220.011.872)	(68.224.819)	*Fair value adjustment*
Total	10.769.240.150	7.867.919.708	*Total*
Dikurangi bagian jangka panjang	(1.224.582.641)	(304.429.436)	*Less non-current portion*
Neto	**9.544.657.509**	**7.563.490.272**	***Net***

Berdasarkan umur: / *By age:*

	31 Des. 2025/ *Dec. 31 2025*	**31 Des. 2024/ *Dec. 31, 2024***	
Belum jatuh tempo	9.984.363.909	6.903.052.609	*Not yet due*
Jatuh tempo:			*Past due:*
1 - 30 hari	221.295.079	372.181.600	*1 - 30 days*
31 - 60 hari	97.858.407	131.721.552	*31 - 60 days*
> 60 hari	768.602.631	581.462.976	*> 60 days*
Sub-total	11.072.120.026	7.988.418.737	*Sub-total*
WAPU PPN	23.159.289	46.849.911	*VAT Collector*
Dikurangi:			*Less:*
Penyisihan kerugian kredit ekspektasian	(106.027.293)	(99.124.121)	*Allowance for expected credit losses*
Penyesuaian nilai wajar	(220.011.872)	(68.224.819)	*Fair value adjustment*
Neto	**10.769.240.150**	**7.867.919.708**	***Net***

5. PIUTANG (lanjutan) / *5. ACCOUNT RECEIVABLES (continued)*

a. Piutang Usaha (lanjutan) / *a. Trade Receivables (continued)*

Berdasarkan mata uang: / *By currency:*

	31 Dec. 2025/ *Dec. 31, 2025*	31 Des. 2024/ *Dec. 31, 2024*	
Rupiah	6.193.268.560	4.735.522.348	*Rupiah*
Dolar AS	4.902.010.755	3.299.746.300	*US Dollar*
Total	11.095.279.315	8.035.268.648	*Total*
Dikurangi:			*Less:*
Penyisihan kerugian kredit ekspektasian	(106.027.293)	(99.124.121)	*Allowance for expected credit losses*
Penyesuaian nilai wajar	(220.011.872)	(68.224.819)	*Fair value adjustment*
Neto	**10.769.240.150**	**7.867.919.708**	***Net***

Mutasi akun cadangan penyisihan kerugian kredit ekspektasian sebagai berikut: / *The changes in the allowance for expected credit losses are as follows*:

	31 Dec. 2025/ *Dec. 31, 2025*	31 Des. 2024/ *Dec. 31, 2024*	
Saldo awal	99.124.121	94.400.857	*Beginning balance*
Penambahan	20.838.513	6.745.428	*Additions*
Penghapusan	(13.935.341)	(2.022.164)	*Written off*
Saldo akhir	**106.027.293**	**99.124.121**	***Ending balance***

Berdasarkan hasil penelaahan terhadap adanya penurunan nilai pada akhir tahun, manajemen berkeyakinan bahwa penyisihan atas penurunan nilai piutang usaha di atas cukup untuk menutup kerugian atas penurunan nilai piutang tersebut.

Based on the results of review for impairment at the end of the year, the management believes that the above allowance for impairment of trade receivables is sufficient to cover losses from impairment of such receivables.

b. Piutang Lain-lain / *b. Other Receivables*

	31 Dec. 2025/ *Dec. 31, 2025*	31 Des. 2024/ *Dec. 31, 2024*	
Pihak berelasi			***Related parties***
Lain-lain (Catatan 31)	2.315.888	5.357.930	*Others (Note 31)*
Pihak ketiga			***Third parties***
Piutang klaim asuransi	10.130.621	4.409.539	*Insurance claim receivables*
Piutang karyawan	4.409.285	5.474.964	*Employee receivables*
Lain-lain	28.847.121	29.026.478	*Others*
Total	**43.387.027**	**38.910.981**	***Total***

Manajemen berpendapat tidak diperlukan cadangan kerugian kredit ekspektasian atas kemungkinan tidak tertagihnya piutang lain-lain.

Management believes that no allowance for expected credit losses on other receivables is required to cover possible losses on uncollectible accounts.

6. PERSEDIAAN - NETO / *6. INVENTORIES - NET*

	31 Dec. 2025/ *Dec. 31, 2025*	31 Des. 2024/ *Dec. 31, 2024*	
Barang jadi	2.349.040.996	3.290.935.538	*Finished goods*
Bahan baku	212.741.126	124.590.517	*Raw materials*
Bahan kemasan	4.571.179	3.668.156	*Packing materials*
Suku cadang dan lain-lain	34.758.331	43.569.320	*Spare parts and others*
Total	**2.601.111.632**	**3.462.763.531**	***Total***

Persediaan yang dibebankan ke beban pokok penjualan dan pendapatan adalah sebesar Rp37.539.175.692 pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 (2024: Rp32.272.580.889) (Catatan 24).

Inventories charged to cost of sales and revenues for year ended December 31, 2025 amounted to Rp37,539,175,692 (2024: Rp32,272,580,889) (Note 24).

Manajemen berpendapat bahwa tidak diperlukan penyisihan penurunan nilai persediaan pada tanggal-tanggal pelaporan.

Management believes that no allowance for decline in value of inventories is required at reporting dates.

Persediaan telah diasuransikan kepada pihak ketiga terhadap risiko kerugian akibat kebakaran, pencurian dan risiko lainnya berdasarkan paket polis sebagaimana yang dijelaskan di bawah ini:

The inventories are insured to third parties against losses from fire, theft and other risks under blanket policies at reporting dates as mentioned below:

	31 Des. 2025/ *Dec. 31, 2025*	31 Des. 2024/ *Dec. 31, 2024*	
Dolar AS	115.126.375	204.178.946	*US Dollar*
Rupiah	563.746.617	520.364.165	*Rupiah*

Manajemen berpendapat bahwa nilai pertanggungan tersebut cukup untuk menutupi kemungkinan timbulnya kerugian akibat risiko tersebut.

Management believes that the insurance coverage is adequate to cover possible losses arising from such risks.

Nilai asuransi tersebut mencakup asuransi untuk persediaan milik Kelompok Usaha serta persediaan milik pelanggan Perusahaan yang berada di bawah tanggung jawab Perusahaan. Manajemen berpendapat bahwa nilai pertanggungan tersebut cukup untuk menutupi kemungkinan timbulnya kerugian akibat risiko tersebut.

The insurance amounts cover the inventories of the Group, and the inventories of the Company's customers are stored in the Company's premises, which are under the Company's responsibility. Management believes that the insurance coverage is adequate to cover possible losses arising from such risks.

7. BIAYA DIBAYAR DI MUKA / *7. PREPAID EXPENSES*

	31 Des. 2025/ *Dec. 31, 2025*	31 Des. 2024/ *Dec. 31, 2024*	
Asuransi dibayar di muka	25.868.136	23.162.841	*Prepaid insurance*
Pemeliharaan dibayar di muka	19.944.326	19.402.196	*Prepaid maintenance*
Perizinan dan lisensi dibayar di muka	19.357.623	16.831.884	*Prepaid permits and licenses*
Sewa tanah dan bangunan dibayar di muka	2.496.303	2.651.698	*Prepaid land and building rents*
Lain-lain	20.413.996	19.713.519	*Others*
Total	**88.080.384**	**81.762.138**	***Total***

8. ASET LANCAR LAINNYA / *8. OTHER CURRENT ASSETS*

	31 Des. 2025/ *Dec. 31, 2025*	31 Des. 2024/ *Dec. 31, 2024*	
Tagihan pengembalian pajak (Catatan 26c)	418.764.932	415.609.983	*Claims for tax refund (Note 26c)*
Lain-lain	12.225.594	12.800.369	*Others*
Total	**430.990.526**	**428.410.352**	***Total***

9. INVESTASI PADA ENTITAS ASOSIASI / *9. INVESTMENTS IN ASSOCIATES*

Perusahaan, melalui Entitas Anaknya, memiliki investasi dalam entitas-entitas berikut pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024:

The Company, through its Subsidiaries, has investments in the following entities as of December 31, 2025 and 2024:

	Persentase Pemilikan/ *Percentage of Ownership*	Saldo 1 Jan. 2025/ *Balance Jan. 1, 2025*	Bagian atas laba entitas asosiasi/ *Share in profit of associates*	Pengurangan/ *Deduction*	Saldo 31 Dec. 2025/ *Balance Dec. 31, 2025*	
Metode Ekuitas						***Equity Method***
PT Berlian Manyar Sejahtera (BMS)	40,00%	491.864.030	52.203.548	8.242.486	535.825.092	*PT Berlian Manyar Sejahtera (BMS)*
PT Energi Manyar Sejahtera (EMS)	45,00%	495.793*	(3.825)	491.968	-	*PT Energi Manyar Sejahtera (EMS)*
Total		**492.359.823**	**52.199.723**	**8.734.454**	**535.825.092**	***Total***

	Persentase Pemilikan/ *Percentage of Ownership*	Saldo 1 Jan. 2024/ *Balance Jan. 1, 2024*	Bagian atas laba entitas asosiasi/ *Share in profit of associates*	Pengurangan/ *Deduction*	Saldo 31 Des. 2024/ *Balance Dec. 31, 2024*	
Metode Ekuitas						***Equity Method***
PT Berlian Manyar Sejahtera (BMS)	40,00%	445.396.947	46.467.083	-	491.864.030	*PT Berlian Manyar Sejahtera (BMS)*
PT Energi Manyar Sejahtera (EMS)	45,00%	495.793	-	-	495.793*	*PT Energi Manyar Sejahtera (EMS)*
Total		**445.892.740**	**46.467.083**	**-**	**492.359.823**	***Total***

*) Entitas ini dilikuidasi pada tanggal 17 Januari 2025/*This entity is liquidated on January 17, 2025.*

Informasi keuangan dari entitas asosiasi yang bersangkutan adalah sebagai berikut:

The financial information of the related associates is as follows:

Laporan posisi keuangan: / ***Statement of financial position:***

	31 Desember 2025/*December 31, 2025*							
	Aset Lancar/ *Current Assets*	Aset Tidak Lancar/ *Non-current Assets*	Liabilitas Jangka Pendek/ *Current Liabilities*	Liabilitas Jangka Panjang/ *Non-current Liabilities*	Agio Saham/ *Share Premium*	Ekuitas/ *Equity*	Kepentingan/ *Interest*	Nilai Tercatat/ *Carrying Amount*
BMS	131.544.121	2.086.572.692	305.875.947	672.578.136	66.600.000	1.173.062.730	40,00%	535.825.092

	31 Desember 2024/*December 31, 2024*							
	Aset Lancar/ *Current Assets*	Aset Tidak Lancar/ *Non-current Assets*	Liabilitas Jangka Pendek/ *Current Liabilities*	Liabilitas Jangka Panjang/ *Non-current Liabilities*	Agio Saham/ *Share Premium*	Ekuitas/ *Equity*	Kepentingan/ *Interest*	Nilai Tercatat/ *Carrying Amount*
BMS	201.482.548	1.707.701.498	186.871.344	592.552.627	66.600.000	1.063.160.075	40,00%	491.864.030
EMS	1.101.762	-	-	-	-	1.101.762	45,00%	495.793

9. INVESTASI PADA ENTITAS ASOSIASI (lanjutan)

Informasi keuangan dari entitas asosiasi yang bersangkutan adalah sebagai berikut: (lanjutan)

9. INVESTMENTS IN ASSOCIATES (continued)

The financial information of the related associates is as follows: (continued)

Laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain: / ***Statement of profit or loss and other comprehensive income:***

	Tahun yang Berakhir pada tanggal 31 Desember 2025/ *For the Year Ended December 31, 2025*					
	Pendapatan/ *Revenues*	Laba Rugi/ *Profit or Loss*	Total Penghasilan Komprehensif/ *Total Comprehensive Income*	Kepentingan/ *Interest*	Bagian atas Laba Entitas Asosiasi/ *Share in Profit of Associates*	
BMS	322.191.083	130.508.869	130.508.869	40,00%	52.203.548	*BMS*
EMS	-	(8.500)	(8.500)	45,00%	(3.825)	*EMS*

	Tahun yang Berakhir pada tanggal 31 Desember 2024/ *For the Year Ended December 31, 2024*					
	Pendapatan/ *Revenues*	Laba Rugi/ *Profit or Loss*	Total Penghasilan Komprehensif/ *Total Comprehensive Income*	Kepentingan/ *Interest*	Bagian atas Laba Entitas Asosiasi/ *Share in Profit of Associates*	
BMS	437.557.810	116.287.344	116.167.707	40,00%	46.467.083	*BMS*

Pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024, manajemen berkeyakinan bahwa tidak ada penurunan nilai investasi pada entitas asosiasi.

As of December 31, 2025 and 2024, management believes that there is no decline in the value of investment in associates.

UEPN dan PT Berlian Jasa Terminal Indonesia ("BJTI") mendirikan BMS di tahun 2012, yang mana pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024, UEPN telah melakukan jumlah setoran modal sebesar Rp355.000.000 yang mencerminkan kepemilikan 40% di BMS, sedangkan BJTI memiliki 60%. BMS adalah bagian dari fasilitas terpadu di JIIPE (Catatan 32) mengoperasikan 400ha pelabuhan laut dalam yang terletak di lokasi strategis di Selat Madura.

UEPN and PT Berlian Jasa Terminal Indonesia ("BJTI") established BMS in 2012, whereby UEPN as of December 31, 2025 and 2024 has made a total contribution of Rp355,000,000 representing 40% ownership in BMS, while BJTI owns 60%. BMS is part of integrated facilities in JIIPE (Note 32) operating 400ha deep seaport strategically located in Madura Strait.

UEPN mendirikan EMS di tahun 2015. Saat ini pemegang saham EMS adalah UEPN, BJTI, PT Santiniluwansa Lestari dan PT Amanah Indo Invest. Maksud dan tujuan dari EMS adalah menjalankan kegiatan usaha di bidang industri, perdagangan, dan jasa pembangkit listrik di Surabaya, yang mana UEPN telah melakukan jumlah setoran modal sebesar Rp450.000 yang mencerminkan kepemilikan sebesar 45% di EMS.

UEPN established EMS in 2015. Currently, the shareholders of EMS are UEPN, BJTI, PT Santiniluwansa Lestari and PT Amanah Indo Invest. The purpose and objectives of establishment of EMS is to carry out business activities in the industry sector, trade and services of power plant in Surabaya, whereby UEPN has made a total contribution of Rp450,000 representing 45% ownership in EMS.

Berdasarkan Akta Notaris Yulia, S.H., No. 29 tanggal 16 Januari 2025, UEPN dan Perusahaan lainnya yang mengelola kepemilikan saham bersama EMS telah menyetujui dilakukannya pembubaran/ likuidasi EMS. Perusahaan telah melakukan Keterbukaan Informasi melalui Surat No. 007/L-AKR-CS/2025 tanggal 17 Januari 2025 ke OJK dan BEI.

Based on the Notarial Deed of Yulia, S.H., No. 29 dated January 16, 2025, UEPN and other companies who jointly have shares ownership in EMS resolved to the liquidation of EMS. The Company has made the Disclosure of Information in its Letter No. 007/L-AKR-CS/2025 dated January 17, 2025 to OJK and IDX.

10. ASET TETAP / *10. PROPERTY, PLANT AND EQUIPMENT*

	1 Januari 2025/ *January 1, 2025*	Penambahan/ *Additions*	Pengurangan/ *Deductions*	Reklasifikasi/ *Reclassifications*	Selisih Kurs Karena Penjabaran Laporan Keuangan/ *Exchange Difference Due to Translation of Financial Statements*	31 Desember 2025/ *December 31, 2025*	
Biaya Perolehan:							***At Cost:***
Hak atas tanah	688.562.423	14.264.346	-	19.335.432	-	722.162.201	*Landrights*
Bangunan, dermaga, gudang dan tangki penyimpanan	5.250.932.051	43.585.158	5.310.578	238.204.022	73.321.671	5.600.732.324	*Buildings, jetty, warehouses and storage tanks*
Mesin dan peralatan	1.218.858.731	38.030.027	1.811.659	397.418.047	12.993.854	1.665.489.000	*Machineries and equipment*
Peralatan gudang dan peralatan pembongkaran di pelabuhan	627.944.578	1.060.699	1.926.440	65.119.205	-	692.198.042	*Warehouse and port handling equipment*
Kendaraan	468.744.201	13.214.052	22.838.562	45.334.962	8.229	504.462.882	*Vehicles*
Pengembangan gedung yang disewa	96.722.707	680.418	2.013.619	36.258	-	95.425.764	*Leasehold improvements*
Renovasi gedung	611.451.759	1.515.193	12.511.969	9.230.255	-	609.685.238	*Building improvements*
Peralatan kantor	169.630.407	4.979.096	2.198.847	7.155.972	651.374	180.218.002	*Office equipment*
Kapal	957.551.630	5.005.382	-	102.036.868	-	1.064.593.880	*Vessels*
Aset dalam penyelesaian	838.291.356	774.236.578	-	(915.869.796)	532.400	697.190.538	*Construction in progress*
Total	10.928.689.843	896.570.949	48.611.674	(31.998.775)	87.507.528	11.832.157.871	*Total*
Akumulasi Penyusutan:							***Accumulated Depreciation:***
Bangunan, dermaga, gudang dan tangki penyimpanan	2.502.037.427	229.123.825	8.142.553	-	44.659.953	2.767.678.652	*Buildings, jetty, warehouses and storage tanks*
Mesin dan peralatan	360.026.840	85.970.423	2.838.961	-	6.085.865	449.244.167	*Machineries and equipment*
Peralatan gudang dan peralatan pembongkaran di pelabuhan	494.743.512	31.968.669	1.931.559	-	-	524.780.622	*Warehouse and port handling equipment*
Kendaraan	252.478.414	30.251.655	19.410.894	-	8.230	263.327.405	*Vehicles*
Pengembangan gedung yang disewa	94.918.566	1.536.004	2.013.620	-	-	94.440.950	*Leasehold improvements*
Renovasi gedung	517.985.755	16.482.659	11.858.674	-	-	522.609.740	*Building improvements*
Peralatan kantor	111.404.142	11.811.308	2.188.054	-	486.017	121.513.413	*Office equipment*
Kapal	230.085.310	47.662.727	-	-	-	277.748.037	*Vessels*
Total	4.563.679.966	454.807.270	48.384.315	-	51.240.065	5.021.342.986	*Total*
Nilai Tercatat	**6.365.009.877**					**6.810.814.885**	***Carrying Amount***

	1 Januari 2024/ *January 1, 2024*	Penambahan/ *Additions*	Pengurangan/ *Deductions*	Reklasifikasi/ *Reclassifications*	Selisih Kurs Karena Penjabaran Laporan Keuangan/ *Exchange Difference Due to Translation of Financial Statements*	31 Desember 2024/ *December 31, 2024*	
Biaya Perolehan:							***At Cost:***
Hak atas tanah	688.562.423	-	-	-	-	688.562.423	*Landrights*
Bangunan, dermaga, gudang dan tangki penyimpanan	4.849.076.763	86.402.093	3.579.289	240.054.433	78.978.051	5.250.932.051	*Buildings, jetty, warehouses and storage tanks*
Mesin dan peralatan	1.016.015.346	47.579.724	9.595.123	159.496.590	5.362.194	1.218.858.731	*Machineries and equipment*
Peralatan gudang dan peralatan pembongkaran di pelabuhan	599.049.778	2.113.647	1.446.802	28.227.955	-	627.944.578	*Warehouse and port handling equipment*
Kendaraan	423.024.400	41.780.463	41.919.448	45.848.886	9.900	468.744.201	*Vehicles*
Pengembangan gedung yang disewa	95.994.119	133.857	64.220	658.951	-	96.722.707	*Leasehold improvements*
Renovasi gedung	585.409.564	959.294	81.031	25.163.932	-	611.451.759	*Building improvements*
Peralatan kantor	167.913.293	8.736.097	5.854.363	521.003	(1.685.623)	169.630.407	*Office equipment*
Kapal	775.412.298	182.139.332	-	-	-	957.551.630	*Vessels*
Aset dalam penyelesaian	432.303.690	895.709.708	1.110.892	(489.760.697)	1.149.547	838.291.356	*Construction in progress*
Total	9.632.761.674	1.265.554.215	63.651.168	10.211.053	83.814.069	10.928.689.843	*Total*
Akumulasi Penyusutan:							***Accumulated Depreciation:***
Bangunan, dermaga, gudang dan tangki penyimpanan	2.248.693.852	213.139.169	3.558.247	-	43.762.653	2.502.037.427	*Buildings, jetty, warehouses and storage tanks*
Mesin dan peralatan	299.398.633	73.683.158	9.346.819	-	(3.708.132)	360.026.840	*Machineries and equipment*
Peralatan gudang dan peralatan pembongkaran di pelabuhan	464.344.353	31.595.587	1.196.428	-	-	494.743.512	*Warehouse and port handling equipment*
Kendaraan	266.021.974	23.690.843	37.244.303	-	9.900	252.478.414	*Vehicles*
Pengembangan gedung yang disewa	93.893.216	1.089.570	64.220	-	-	94.918.566	*Leasehold improvements*
Renovasi gedung	495.081.680	22.975.601	71.526	-	-	517.985.755	*Building improvements*
Peralatan kantor	108.385.582	10.579.679	5.825.050	-	(1.736.069)	111.404.142	*Office equipment*
Kapal	190.495.488	39.589.822	-	-	-	230.085.310	*Vessels*
Total	4.166.314.778	416.343.429	57.306.593	-	38.328.352	4.563.679.966	*Total*
Nilai Tercatat	**5.466.446.896**					**6.365.009.877**	***Carrying Amount***

10. ASET TETAP (lanjutan)

Sekitar 2,36% pada tanggal 31 Desember 2025 (2024: 4,03%) dari keseluruhan luas tanah Perusahaan masih belum atas nama Perusahaan. Perusahaan belum melakukan proses balik nama menjadi nama Perusahaan sampai dengan tanggal-tanggal pelaporan. Hak Guna Bangunan ("HGB") akan berakhir pada berbagai tanggal sampai dengan 2055. Manajemen berkeyakinan bahwa kepemilikan hak atas tanah dapat diperbaharui dan/atau diperpanjang.

Manajemen berkeyakinan bahwa nilai tercatat aset tetap tidak melebihi nilai yang dapat diperoleh kembali (*recoverable amount*) dari aset tetap pada tanggal-tanggal pelaporan.

Biaya penyusutan dibebankan sebagai berikut:

10. PROPERTY, PLANT AND EQUIPMENT (continued)

Approximately 2.36% as of December 31, 2025 (2024: 4.03%) of the Company's total land area is not under the name of the Company. The Company has not applied for the transfers of titles on the reporting dates. The Building Right Title (Hak Guna Bangunan or "HGB") expires on various dates up to 2055. The management believes that the said titles of land right ownership can be renewed and/or extended.

The management believes that the carrying amounts of the property, plant and equipment do not exceed their recoverable amounts at the reporting dates.

Depreciation expense is charged to the following:

	Tahun yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember/ *Year Ended December 31,*		
	2025	**2024**	
Beban pokok penjualan dan pendapatan (Catatan 24)	408.990.638	374.361.894	*Cost of sales and revenues (Note 24)*
Beban usaha (Catatan 25)	45.816.632	41.981.535	*Operating expenses (Note 25)*
Total	**454.807.270**	**416.343.429**	***Total***

Rincian laba atas penjualan/pengalihan aset tetap sebagai berikut:

The details of gain on sale/transfer of property, plant and equipment are as follows:

	Tahun yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember/ *Year Ended December 31,*		
	2025	**2024**	
Hasil penjualan/pengalihan aset tetap	5.877.959	10.077.582	*Proceeds from sale/transfer of property, plant and equipment*
Nilai tercatat	(3.198.667)	(6.344.575)	*Carrying amount*
Laba atas penjualan/pengalihan aset tetap	**2.679.292**	**3.733.007**	***Gain on sale/transfer of property, plant and equipment***

10. ASET TETAP (lanjutan)

Aset tetap kecuali hak atas tanah, telah diasuransikan kepada pihak ketiga terhadap risiko kerugian akibat kebakaran, pencurian dan risiko lainnya berdasarkan paket polis dengan nilai pertanggungan pada tanggal-tanggal pelaporan sebagaimana yang dijelaskan di bawah ini. Manajemen berpendapat bahwa nilai pertanggungan tersebut cukup untuk menutup kemungkinan timbulnya kerugian akibat risiko tersebut.

10. PROPERTY, PLANT AND EQUIPMENT (continued)

Property, plant and equipment, except for landrights, are insured to third parties against losses from fire, theft and other risks under blanket policies at the reporting dates as mentioned below. The management believes that the insurance coverage is adequate to cover possible losses arising from such risks.

	31 Des. 2025/ *Dec. 31, 2025*	31 Des. 2024/ *Dec. 31, 2024*	
Rupiah	8.304.351.430	7.221.604.779	*Rupiah*
Dolar AS	79.633.690	79.633.690	*US Dollar*

Pada tanggal 31 Desember 2025, aset dalam penyelesaian terutama merupakan berbagai konstruksi seperti fasilitas terminal, dan stasiun pengisian bahan bakar umum ("SPBU"), yang persentase penyelesaiannya berkisar dari 20% - 95% (2024: 9% - 97%).

As of December 31, 2025, the construction in progress mainly represents various construction activities in such as terminal facilities, and gas stations of petroleum ("SPBU"), with completion percentages ranging from 20% - 95% (2024: 9% - 97%).

Pembangunan fasilitas-fasilitas di atas diharapkan selesai dalam waktu sekitar 1-2 tahun. Manajemen tidak mengharapkan akan adanya kesulitan dalam penyelesaian pembangunan pada waktu yang ditargetkan.

The construction of the above facilities is expected to be completed in approximately 1-2 years. The management does not expect any difficulties in meeting the targeted completion date.

Tidak terdapat biaya pinjaman yang dikapitalisasi oleh Kelompok Usaha untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024.

No borrowing costs were capitalized by the Group for the year ended December 31, 2025 and 2024.

Kelompok Usaha memiliki aset tangki penyimpanan yang digunakan untuk sewa operasi sebesar Rp213.321.848 pada tanggal 31 Desember 2025 (2024: Rp224.917.451).

The Group has assets of storage tanks used for the operating lease amounting to Rp213,321,848 as of December 31, 2025 (2024: Rp224,917,451).

Aset tetap yang digunakan sebagai jaminan atas pinjaman yang diperoleh Kelompok Usaha pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 (Catatan 18 dan 33) adalah sebagai berikut:

Property, plant and equipment used as collateral to the loans obtained by the Group as of December 31, 2025 and 2024 (Notes 18 and 33) are as follows:

- UEPN - melalui entitas anak BKMS - tanah dan bangunan proyek Pembangkit Listrik Tenaga Gas ("PLTMG") beserta bangunan infrastruktur, mesin-mesin dan peralatan yang melekat di atasnya yang terletak di Gresik, Jawa Timur, melalui fasilitas *Al Ijarah Muntahiyah Bi Al Tamlik* ("IMBT") dan aset yang dibiayai melalui fasilitas *Musyarakah Mutanaqishah* ("MMQ") dari PT Bank Permata Tbk ("Permata").

- *UEPN - through its subsidiary BKMS - land and building of the gas powerplant ("PLTMG") project including the building infrastructure, machineries and equipment on top of which it is located in Gresik, East Java, through Al Ijarah Muntahiyah Bi Al Tamlik ("IMBT") facilities and assets being financed through Musyarakah Mutanaqishah ("MMQ") facilities from PT Bank Permata Tbk ("Permata").*

10. ASET TETAP (lanjutan)

Aset tetap yang digunakan sebagai jaminan atas pinjaman yang diperoleh Kelompok Usaha pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 (Catatan 18 dan 33) adalah sebagai berikut: (lanjutan)

- Andahanesa - melalui entitas anak TNU - tangki penyimpanan dan peralatan pendukungnya yang berlokasi di Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya yang dibiayai oleh fasilitas pinjaman jangka panjang dari PT Bank Central Asia Tbk ("BCA").

Pada tanggal 31 Desember 2025, nilai perolehan aset yang sudah disusutkan penuh adalah sejumlah Rp1.440.503.893 (2024: Rp1.236.192.237). Aset-aset ini masih digunakan untuk menunjang operasional Kelompok Usaha.

Pada tanggal 31 Desember 2025, nilai tercatat aset yang sementara tidak dipakai dalam operasi adalah sebesar Rp22.141.094 (2024: Rp16.877.390).

10. PROPERTY, PLANT AND EQUIPMENT (continued)

Property, plant and equipment used as collateral to the loans obtained by the Group as of December 31, 2025 and 2024 (Notes 18 and 33) are as follows: (continued)

- *Andahanesa - through its subsidiary TNU - storage tanks and its supporting equipment at Tanjung Perak Port, Surabaya financed by PT Bank Central Asia Tbk ("BCA") under long-term facilities.*

As of December 31, 2025, the acquisition costs of the assets which have been fully depreciated amounted to Rp1,440,503,893 (2024: Rp1,236,192,237). Those assets are still being used by the Group in operations.

As of December 31, 2025, the carrying amount of temporary assets not used in operations amounted to Rp22,141,094 (2024: Rp16,877,390).

11. ASET HAK-GUNA / *11. RIGHT-OF-USE ASSETS*

	Saldo 1 Jan. 2025/ *Balance Jan. 1, 2025*	Penambahan/ *Additions*	Selisih kurs karena penjabaran laporan keuangan/ *Exchange difference due to translation of financial statements*	Saldo 31 Des. 2025/ *Balance Dec. 31, 2025*	
Harga perolehan					***Acquisition costs***
Sewa tanah	1.058.450.321	117.712.550	4.216.457	1.180.379.328	*Land leases*
Sewa bangunan, tangki dan kendaraan	18.537.743	7.949.851	-	26.487.594	*Building, tank and vehicle leases*
	1.076.988.064	125.662.401	4.216.457	1.206.866.922	
Akumulasi depresiasi/amortisasi					***Accumulated depreciation/amortization***
Sewa tanah	271.815.482	80.955.393	496.554	353.267.429	*Land leases*
Sewa bangunan, tangki dan kendaraan	11.805.064	2.633.053	-	14.438.117	*Building, tank and vehicle leases*
	283.620.546	83.588.446	496.554	367.705.546	
Total	**793.367.518**			**839.161.376**	***Total***

11. ASET HAK-GUNA (lanjutan) / *11. RIGHT-OF-USE ASSETS (continued)*

	Saldo 1 Jan. 2024/ *Balance Jan. 1, 2024*	Penambahan/ *Additions*	Selisih kurs karena penjabaran laporan keuangan/ *Exchange difference due to translation of financial statements*	Saldo 31 Des. 2024/ *Balance Dec. 31, 2024*	
Harga perolehan					***Acquisition costs***
Sewa tanah	813.298.281	239.202.516	5.949.524	1.058.450.321	*Land leases*
Sewa bangunan, tangki dan kendaraan	13.451.664	5.086.079	-	18.537.743	*Building, tank and vehicle leases*
	826.749.945	244.288.595	5.949.524	1.076.988.064	
Akumulasi depresiasi/amortisasi					***Accumulated depreciation/amortization***
Sewa tanah	198.206.660	73.018.826	589.996	271.815.482	*Land leases*
Sewa bangunan, tangki dan kendaraan	10.741.396	1.063.668	-	11.805.064	*Building, tank and vehicle leases*
	208.948.056	74.082.494	589.996	283.620.546	
Total	**617.801.889**			**793.367.518**	***Total***

Biaya penyusutan dan amortisasi atas aset hak-guna dibebankan sebagai berikut:

Depreciation and amortization expenses of right-of-use assets are charged to the following:

	Tahun yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember/ *Year Ended December 31,*		
	2025	**2024**	
Beban pokok penjualan dan pendapatan (Catatan 24)	80.955.393	70.876.021	*Cost of sales and revenues (Note 24)*
Beban usaha (Catatan 25)	2.633.053	3.206.473	*Operating expenses (Note 25)*
Total	**83.588.446**	**74.082.494**	***Total***

Kelompok Usaha telah mengakui beban yang berkaitan dengan sewa jangka pendek untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 sebesar Rp8.831.763 (2024: Rp8.086.215) dan dicatat sebagai beban umum dan administrasi (Catatan 25).

The Group has recognized the expense relating to short-term leases for the year ended December 31, 2025 amounted to Rp8,831,763 (2024: Rp8,086,215) and recorded under general and administrative expense (Note 25).

Berdasarkan penilaian manajemen Kelompok Usaha, tidak ada kejadian-kejadian atau perubahan-perubahan keadaan yang mengindikasikan adanya penurunan nilai aset hak-guna pada tanggal 31 Desember 2025.

Based on the assessment of the management of the Group, there are no events or changes in circumstances that indicate any impairment in the value of right-of-use assets as of December 31, 2025.

11. ASET HAK-GUNA (lanjutan)

Kelompok Usaha sebagai Pesewa

Kelompok Usaha telah mengadakan sewa operasi untuk tangki. Sewa ini memiliki jangka waktu sewa 1-5 tahun dan termasuk klausul untuk revisi sewa sesuai dengan kondisi pasar yang berlaku. Pendapatan sewa yang diakui Kelompok Usaha selama tahun berjalan adalah sebesar Rp92.195.897 (2024: Rp78.792.484).

Piutang sewa minimum di masa depan berdasarkan sewa operasi yang tidak dapat dibatalkan pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 terkait dengan sewa tangki yang akan dibebankan berdasarkan penggunaan aktual adalah sebagai berikut:

11. RIGHT-OF-USE ASSETS (continued)

The Group as Lessor

The Group has entered into operating leases on its tank. These leases have lease term of 1-5 years and include a clause for rental revision subject to prevailing market conditions. Lease income recognized by the Group during the year is amounting to Rp92,195,897 (2024: Rp78,792,484).

Future minimum rentals receivable under non-cancellable operating leases as at December 31, 2025 and 2024 relating to tank rental which will be charged based on actual usage are as follows:

	31 Des. 2025/ *Dec. 31, 2025*	**31 Des. 2024/ *Dec. 31, 2024***	
Dalam 1 tahun	47.546.035	29.532.276	*Within 1 year*
Dalam 1-5 tahun	44.240.725	77.283.176	*Within 1-5 years*
Total	**91.786.760**	**106.815.452**	***Total***

12. PROPERTI INVESTASI

Akun ini terdiri dari dua bidang tanah sebagai berikut (i) 193,5 hektar disewakan kepada *anchor tenant* dari BKMS (ii) 80,4 hektar belum ditentukan peruntukkannya, yang dimiliki oleh UEPN, entitas anak dari Perusahaan. Dua bidang tanah tersebut terletak di Manyar, Gresik, Jawa Timur.

Pada tanggal 27 Agustus 2021, BKMS telah merubah perjanjian sewa tanah sebelumnya dengan *tenant* tersebut, untuk masa 18 tahun, dengan hak untuk memperpanjang masa sewa untuk dua (2) tahun dan enam (6) kali berturut-turut untuk periode sepuluh (10) tahun untuk setiap periode perpanjangan serta memiliki hak untuk membeli tanah tersebut selama masa sewa berdasarkan syarat dan ketentuan yang disebutkan dalam perjanjian. Perjanjian tersebut juga berisi mengatur biaya pemeliharaan dan biaya terkait lainnya yang relevan dengan sewa. Kemudian, pada tanggal 12 Agustus 2021, kedua belah pihak juga menandatangani perjanjian sewa area tambahan untuk meletakkan peralatan proyek *smelter* untuk 2 tahun.

12. INVESTMENT PROPERTY

This account consists of two parcels of land i.e. (i) 193.5 hectares leased to an anchor tenant of BKMS (ii) 80.4 hectares reserved for future use, owned by UEPN, a subsidiary of the Company. The two parcels of land are located in Manyar, Gresik, East Java.

On August 27, 2021, BKMS has amended the previous lease agreement of land with the said tenant for a period of 18 years, whereby it has the right to extend the lease term for two (2) years and thereafter six (6) consecutive periods of ten (10) contract years for each renewal period with a right to purchase the land during the lease term based on the terms and conditions stipulated in agreement. The agreement also contains a maintenance fee arrangement and other provisions relevant to the lease. Further, on August 12, 2021, the two parties also signed additional lease of land area for laydown the equipments for its smelter project for a period of 2 years.

12. PROPERTI INVESTASI (lanjutan)

Pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024, BKMS telah menerima uang muka sewa tanah di atas sampai dengan bulan Agustus 2029 sejumlah Rp161,6 juta (2024: Rp858,6 juta), dimana BKMS telah mengakui pendapatan sewa selama periode tersebut. Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 telah diakui sebagai pendapatan sewa sebesar Rp191,1 juta (2024: Rp185,1 juta). Pada tanggal 31 Desember 2025, uang muka sebesar Rp723,7 juta (2024: Rp752,7 juta) termasuk bagian jangka pendek, disajikan sebagai "Liabilitas Kontrak" pada laporan posisi keuangan konsolidasian.

Tidak terdapat beban operasi langsung yang timbul dari properti investasi yang menghasilkan pendapatan sewa dikarenakan BKMS hanya menyewakan lahan kosong tanpa kewajiban kontraktual untuk melakukan konstruksi, membangun atau untuk memperbaiki di atas bidang tanah, atau untuk memelihara atau meningkatkan properti investasi tersebut.

Pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024, total nilai wajar atas properti investasi adalah sebesar Rp2.741.868.158 (2024: Rp2.625.637.708). Pengukuran nilai wajar atas properti investasi menggunakan *Level* 2 hirarki nilai wajar, dimana *level input* terendah yang signifikan terhadap pengukuran nilai wajar adalah dapat diobservasi secara langsung atau tidak langsung.

Nilai wajar *Level* 2 dari tanah dihitung dengan menggunakan pendekatan perbandingan harga pasar. Harga pasar dari tanah yang paling mendekati disesuaikan dengan perbedaan atribut utama seperti ukuran aset, lokasi dan penggunaan aset. *Input* yang paling signifikan dalam pendekatan penilaian ini adalah asumsi harga per meter persegi.

12. INVESTMENT PROPERTY (continued)

As of December 31, 2025 and 2024, BKMS has received advances for the above leases of the land up to period August 2029 amounted to Rp161.6 million (2024: Rp858.6 million), whereby BKMS has recognized the lease income over the periods. For the year ended December 31, 2025, it has recognized rental income amounting to Rp191.1 million (2024: Rp185.1 million). As of December 31, 2025, the outstanding advance amounting to Rp723.7 million (2024: Rp752.7 million) including the current portion, is presented as "Contract Liabilities" in the consolidated statement of financial position.

There are no direct operating expenses arising from the investment property that generated rental income since BKMS leases the land with no contractual obligation to construct, build or repair on the improved parcels of land or for maintenance or enhancements of the investment property.

As of December 31, 2025 and 2024, the total fair value of the investment property amounted to Rp2,741,868,158 (2024: Rp2,625,637,708). The fair value measurement of such investment property uses Level 2 of fair value hierarchy, whereby the lowest level input that is significant to the fair value measurement is directly or indirectly observable.

Level 2 fair value of land is calculated using the comparable market data approach. The approximate market price of comparable land is adjusted for differences in key attributes such as property size, location and use of an asset. The most significant input into this valuation approach is price per square meter assumptions.

13. PERSEDIAAN TANAH KAWASAN INDUSTRI

Akun ini terutama merupakan harga perolehan tanah dan biaya pengembangan terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung, termasuk kapitalisasi biaya pinjaman yang dikapitalisasi pada nilai persediaan tanah sebesar Rp377.349.569 untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 (2024: Rp376.314.777). Pada tanggal 31 Desember 2025, tingkat kapitalisasi bunga adalah sebesar 7,09% (2024: 8,84%). Persediaan tanah ini dijadikan kawasan industri sebagai bagian dari proyek JIIPE yang dikembangkan oleh salah satu entitas anak yang dimiliki tidak langsung, BKMS (Catatan 1b). Tanah ini berlokasi di KEK Gresik, Jawa Timur. Proyek JIIPE mempunyai pelabuhan laut yang dalam, kawasan industri dan perumahan secara terintegrasi. Pelabuhan laut dimiliki dan dikelola oleh BMS yang merupakan entitas asosiasi dari UEPN (Catatan 9), sedangkan kawasan industri dikelola oleh BKMS.

Bagian yang siap untuk dijual dan sedang dalam pengembangan disajikan sebagai bagian dari aset lancar, sedangkan yang diperuntukkan untuk tahap pengembangan berikutnya disajikan sebagai bagian dari aset tidak lancar.

Manajemen berpendapat tidak diperlukan cadangan kerugian penurunan nilai atas persediaan tanah kawasan industri pada tanggal-tanggal pelaporan.

13. INDUSTRIAL ESTATE LAND INVENTORY

This account represents acquisition costs and related development costs, either directly or indirectly, including borrowing costs capitalized to the carrying amounts of land inventory, totaling to Rp377,349,569 for the year ended December 31, 2025 (2024: Rp376,314,777). As of December 31, 2025, the interest capitalization rate is 7.09% (2024: 8.84%). The land inventory is an industrial estate as part of JIIPE project developed through an indirect subsidiary, BKMS (Note 1b). The land is located in SEZ Gresik, East Java. The JIIPE project is an integrated estate complex which has a deep-sea port, industrial estate and residential zone. The sea port is owned and operated by BMS, an associate entity of UEPN (Note 9) while the estate area is operated by BKMS.

The portion available for sale and under development are presented as part of current assets, while those retained for subsequent stage development are presented as part of non-current assets.

Management believes that there is no allowance for decline in value of industrial estate land inventory at reporting dates.

14. HUTANG

a. Hutang Usaha - Pihak Ketiga

Berdasarkan umur:

14. ACCOUNT PAYABLES

a. Trade Payables - Third Parties

By age:

	31 Des. 2025/ *Dec. 31, 2025*	**31 Des. 2024/ *Dec. 31, 2024***	
Belum jatuh tempo	12.246.204.170	10.287.513.531	*Not yet due*
Jatuh tempo:			*Past due:*
1 - 30 hari	31.701.112	48.424.423	*1 - 30 days*
31 - 60 hari	52.724	590.532	*31 - 60 days*
> 60 hari	915.621	225.379	*> 60 days*
Total	**12.278.873.627**	**10.336.753.865**	***Total***

14. HUTANG (lanjutan) / *14. ACCOUNT PAYABLES (continued)*

a. Hutang Usaha - Pihak Ketiga (lanjutan) / *a. Trade Payables - Third Parties (continued)*

Berdasarkan mata uang: / *By currency:*

	31 Des. 2025/ *Dec. 31, 2025*	31 Des. 2024/ *Dec. 31, 2024*	
Rupiah	6.411.561.349	3.946.472.352	*Rupiah*
Dolar AS	5.867.007.345	6.388.493.791	*US Dollar*
Mata uang lainnya	304.933	1.787.722	*Other currencies*
Total	**12.278.873.627**	**10.336.753.865**	***Total***

Hutang usaha tidak dijamin dan tidak dikenakan bunga. / *Trade payables are unsecured and non-interest bearing.*

b. Hutang Lain-lain - Pihak Ketiga / *b. Other Payables - Third Parties*

	31 Des. 2025/ *Dec. 31, 2025*	31 Des. 2024/ *Dec. 31, 2024*	
Hutang pembelian aset tetap (Catatan 33)	147.222.281	284.050.163	*Purchase of property, plant and equipment payable (Note 33)*
Hutang kepada kontraktor	24.988.648	91.447.809	*Payables to contractor*
Hutang jasa profesional	1.308.208	67.320	*Professional fees payables*
Hutang royalti	-	16.957.240	*Royalty payable*
Lain-lain	35.832.436	71.521.466	*Miscellaneous*
Total	**209.351.573**	**464.043.998**	***Total***

15. BIAYA MASIH HARUS DIBAYAR / *15. ACCRUED EXPENSES*

	31 Des. 2025/ *Dec. 31, 2025*	31 Des. 2024/ *Dec. 31, 2024*	
Beban impor	183.620.400	152.590.115	*Import charges*
Biaya angkut dan penanganan	94.312.932	116.600.487	*Freight in and handling*
Bunga	81.210.127	118.975.699	*Interest*
Konstruksi	61.331.209	26.887.405	*Construction*
Biaya profesional	30.518.109	18.089.182	*Professional fees*
Beban penjualan dan pemasaran	16.490.833	14.176.718	*Selling and marketing expenses*
Lain-lain	195.751.111	138.365.516	*Miscellaneous*
Total	**663.234.721**	**585.685.122**	***Total***

16. LIABILITAS SEWA / *16. LEASE LIABILITIES*

	31 Des. 2025/ *Dec. 31, 2025*	31 Des. 2024/ *Dec. 31, 2024*	
Didiskontokan menggunakan suku bunga pinjaman inkremental indikatif pada awal tahun	524.227.040	380.386.577	*Discounted using the indicative incremental borrowing rate as at beginning year*
Penambahan sewa	125.662.401	244.288.595	*Addition of lease*
Penambahan bunga	18.938.347	29.620.167	*Accretion of interest*
Selisih kurs	904.520	1.197.547	*Exchange rate difference*
Pembayaran	(79.841.595)	(131.265.846)	*Payments*
Total liabilitas sewa	589.890.713	524.227.040	*Total lease liabilities*
Dikurangi:			*Less:*
Bagian jangka pendek	71.402.299	45.084.227	*Current portion*
Bagian jangka panjang	**518.488.414**	**479.142.813**	***Long term portion***

Estimasi arus kas keluar masa depan pada saat jatuh tempo menggunakan tingkat suku bunga 5,96% - 9,78% untuk Rupiah dan 2,02% untuk Dolar AS per tahun adalah sebagai berikut:

The estimated cash outflows by maturity calculated using interest rate of 5.96% - 9.78% for Rupiah and 2.02% for US Dollar per annum are as follows:

**Tahun yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2025/
*For the Year Ended December 31, 2025***

	Arus kas keluar/ *Cash outflows*	Komponen bunga/ *Interest component*	Nilai kini/ *Present value*	
Dalam 1 tahun	112.766.657	41.364.358	71.402.299	*Within 1 year*
Dalam 1-5 tahun	400.909.910	149.353.687	251.556.223	*Within 1-5 years*
Lebih dari 5 tahun	326.519.078	59.586.887	266.932.191	*More than 5 years*
Total	**840.195.645**	**250.304.932**	**589.890.713**	***Total***

**Tahun yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2024/
*Year Ended December 31, 2024***

	Arus kas keluar/ *Cash outflows*	Komponen bunga/ *Interest component*	Nilai kini/ *Present value*	
Dalam 1 tahun	47.734.252	2.650.025	45.084.227	*Within 1 year*
Dalam 1-5 tahun	315.948.429	148.541.317	167.407.112	*Within 1-5 years*
Lebih dari 5 tahun	399.390.680	87.654.979	311.735.701	*More than 5 years*
Total	**763.073.361**	**238.846.321**	**524.227.040**	***Total***

Tidak ada opsi perpanjangan dan penghentian dimana Kelompok Usaha berpotensi memiliki eksposur yang tidak termasuk dalam pengukuran liabilitas sewa.

There is no extension and termination options which the Group is potentially exposed that are not reflected in the measurements of lease liabilities.

17. HUTANG BANK JANGKA PENDEK / *17. SHORT-TERM BANK LOAN*

	31 Des. 2025/ *Dec. 31, 2025*	31 Des. 2024/ *Dec. 31, 2024*	
AKRIDA dan Entitas Anak			*AKRIDA and Subsidiaries*
PT Standard Chartered Bank	220.000.000	-	*PT Standard Chartered Bank*
PT Bank Permata Tbk	17.365.000	7.000.000	*PT Bank Permata Tbk*
Total	**237.365.000**	**7.000.000**	**Total**

AKRIDA melalui entitas anak, APR

PT Standard Chartered Bank ("SCB")

Pada tanggal 20 November 2025, APR menandatangani Perubahan atas Surat Fasilitas No. JKT/FF1/6185 yang merujuk kepada Surat Fasilitas (Tanpa Ikatan) No. JKT/FA1/5741 tanggal 6 Maret 2023 untuk memperpanjang jangka waktu fasilitas kredit dari Standard Chartered Bank hingga 31 Oktober 2026 dan untuk menambah jenis fasilitas menjadi:

i) L/C Impor - tidak dijamin sebesar US$25.000.000;
ii) L/C Impor - dijamin sebesar US$25.000.000;
iii) Pinjaman jangka pendek sebesar US$25.000.000;
iv) Obligasi dan jaminan sebesar US$15.000.000;
v) Pembiayaan faktur impor sebesar US$15.000.000;
vi) Pinjaman Impor sebesar US$25.000.000;

Fasilitas ini bersifat tanpa komitmen dengan *limit* gabungan yang ditentukan sebesar US$25.000.000.

AKRIDA through its subsidiary, APR

PT Standard Chartered Bank ("SCB")

On November 20, 2025, APR signed Amendment of Facility Letter No. JKT/FF1/6185, which refers to Facility Letter (Unsecured) No. JKT/FA1/5741 dated March 6, 2023, to extend the credit facility from Standard Chartered Bank until October 31, 2026, and to expand the types of facilities to include:

i) L/C Import - unsecured at US$25,000,000;
ii) L/C Import - secured at US$25,000,000;
iii) Short term loan at US$25,000,000;
iv) Bond and guarantees at US$15,000,000;
v) Import invoice financing at US$15.000.000;
vi) Import loan at US$25,000,000;

The facilities are uncommitted and designed with combined limit of US$25,000,000.

AKRIDA melalui entitas anak, ALR

PT Bank Permata Tbk ("Permata")

ALR memiliki fasilitas *Omnibus Revolving Loan* dari Permata dengan total *limit* Rp18.000.000 dan pada tanggal 26 Maret 2025 *limit* atas fasilitas tersebut naik menjadi Rp40.000.000, yang mencakup (i) fasilitas pinjaman berulang tanpa komitmen, (ii) Bank Garansi/*Standby Letter of Credit* ("SBLC") dan (iii) *Payable Services*. Fasilitas ini tersedia sampai dengan tanggal 7 Oktober 2028.

Perjanjian pinjaman mengharuskan pemenuhan beberapa persyaratan oleh ALR, antara lain, untuk mempertahankan sejumlah rasio keuangan serta tidak mengubah komposisi pemegang saham.

AKRIDA through its subsidiary, ALR

PT Bank Permata Tbk ("Permata")

ALR obtained an Omnibus Revolving Loan Facility from Permata with total limit amounting to Rp18,000,000 and on March 26, 2025, the limit on this facility increased to Rp40,000,000, comprising of (i) uncommitted revolving loan facility, (ii) Bank Guarantee/Standby Letter of Credit ("SBLC") and (iii) Payable Services. This facility is available until October 7, 2028.

The loan agreement contains several loan covenants whereby it requires ALR, among others, to maintain certain financial ratios and not to change the shareholders' composition.

17. HUTANG BANK JANGKA PENDEK (lanjutan)

Fasilitas kredit yang dijelaskan di atas dikenakan tingkat suku bunga tahunan sebagai berikut:

	31 Des. 2025/ *Dec. 31, 2025*	31 Des. 2024/ *Dec. 31, 2024*	
Rupiah	5,24% - 8,80%	6,36% - 8,80%	*Rupiah*

Pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024, manajemen berpendapat bahwa Kelompok Usaha telah memenuhi semua persyaratan terkait sebagaimana diharuskan dalam semua perjanjian kredit di atas.

17. SHORT-TERM BANK LOANS (continued)

The above-mentioned credit facilities are subject to annual interest rates as follows:

As of December 31, 2025 and 2024, the management believes that Group has complied with all the relevant covenants as required under all the credit agreements mentioned above.

18. HUTANG BANK JANGKA PANJANG / *18. LONG-TERM BANK LOANS*

	31 Dec. 2025/ *Dec. 31, 2025*	31 Des. 2024/ *Dec. 31, 2024*	
Perusahaan			*The Company*
PT Bank Central Asia Tbk	253.333.333	600.000.000	*PT Bank Central Asia Tbk*
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	201.580.541	-	*PT Bank Mandiri (Persero) Tbk*
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	25.000.000	-	*PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk*
Sub-total	479.913.874	600.000.000	*Sub-total*
UEPN dan Entitas Anak			*UEPN and Subsidiary*
Dana Syirkah Temporer -			*Dana Syirkah Temporer -*
PT Bank Permata Tbk	2.043.862.785	2.263.739.793	*PT Bank Permata Tbk*
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	2.230.694.332	1.784.997.012	*PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk*
Sub-total	4.274.557.117	4.048.736.805	*Sub-total*
Andahanesa dan Entitas Anak			*Andahanesa and Subsidiary*
PT Bank Central Asia Tbk	95.136.123	137.148.148	*PT Bank Central Asia Tbk*
Sub-total	**4.849.607.114**	**4.785.884.953**	***Sub-total***
Keuntungan ditangguhkan	35.919.458	-	*Deferred gain*
Total	**4.885.526.572**	**4.785.884.953**	***Total***
Dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun	1.182.438.653	1.140.851.204	*Less current maturities*
Bagian jangka panjang	**3.703.087.919**	**3.645.033.749**	***Long-term portion***

18. HUTANG BANK JANGKA PANJANG (lanjutan)

Perusahaan

PT Bank Central Asia Tbk ("BCA")

Fasilitas Kredit *Installment Loan* 4

Pada tanggal 27 November 2019, Perusahaan mendapatkan fasilitas baru *Installment Loan* 4 dari BCA sebesar Rp1.250.000.000 yang digunakan untuk membiayai kembali hutang obligasi. Fasilitas ini terdiri dari:

i) *Tranche* A dengan jumlah Rp500.000.000 yang digunakan untuk membiayai kembali Obligasi I Tahun 2012 Seri B. Periode ketersediaan dari fasilitas ini sampai dengan Desember 2019 dan telah ditarik sepenuhnya.

ii) *Tranche* B dengan jumlah Rp750.000.000 yang digunakan untuk membiayai kembali Obligasi Berkelanjutan I AKR Corporindo Tahap 1 Tahun 2017 Seri A. Periode ketersediaan dari fasilitas ini sampai dengan Juli 2020 dan telah ditarik sepenuhnya.

Fasilitas ini berjangka waktu 5 tahun sejak penarikan pertama setiap *Tranche* (tidak ada masa tenggang). Pokok pinjaman dan bunga terhutang secara kuartalan. Perjanjian ini juga mengandung sejumlah rasio keuangan yang serupa dengan fasilitas-fasilitas lainnya yang diberikan oleh BCA kepada Perusahaan.

Perusahaan telah melakukan pelunasan pinjaman pada tahun 2025.

Fasilitas Kredit Investasi 6

Pada tanggal 22 September 2023, Perusahaan menandatangani Perjanjian Fasilitas Kredit Investasi 6 dengan *limit* sebesar Rp300.000.000 dengan jangka waktu kredit 5 tahun yang digunakan untuk *capital expenditure* dan atau peningkatan modal pada entitas anak. Pada tahun 2025, Perusahaan melakukan penarikan atas seluruh fasilitas sebesar Rp150.000.000.

Perusahaan telah melakukan pembayaran pinjaman sebesar Rp46.666.667 untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025.

Pada tanggal 31 Desember 2025, nilai hutang dari fasilitas ini adalah sebesar Rp253.333.333 (31 Desember 2024: Rp150.000.000).

18. LONG-TERM BANK LOANS (continued)

The Company

PT Bank Central Asia Tbk ("BCA")

Installment Loan Facility 4

On November 27, 2019, the Company obtained a new Installment Loan 4 facility from BCA amounting to Rp1,250,000,000 which was used for refinancing bonds payables. The facilities are:

i) Tranche A amounting to Rp500,000,000 used for refinancing B Series - Bonds I Year 2012. The availability period of this facility was until December 2019 and has been fully drawn down.

ii) Tranche B amounting to Rp750,000,000 to be used for refinancing A Series - Shelf Registration Bonds I AKR Corporindo 1st Tranche Year 2017. The availability period of this facility was until July 2020 and has been fully drawn down.

The term of this facility was 5 years from the first utilization date of each Tranche (with no grace period). The loan principal and interest were payable on a quarterly basis. The loan agreement also contains certain financial ratios similar to the other facilities provided by BCA to the Company.

The Company has fully paid the related loan facility in 2025.

Investment Credit 6 Facility

On September 22, 2023, the Company signed Investment Credit 6 facility with limit amount of Rp300,000,000 with a credit period of 5 years to be used for capital expenditure and/or increase capital in subsidiaries. In 2025, the Company has fully drawdown for all of the facility of Rp150,000,000.

The Company has paid the related loan balance amounted to Rp46,666,667 for the year ended December 31, 2025.

The outstanding loan from this facility is Rp253,333,333 as of December 31, 2025 (December 31, 2024: Rp150,000,000).

18. HUTANG BANK JANGKA PANJANG (lanjutan)

Perusahaan (lanjutan)

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk ("Mandiri")

Perjanjian ini mengandung sejumlah persyaratan yang serupa dengan fasilitas-fasilitas lainnya yang diberikan oleh BCA kepada Perusahaan (Catatan 33q).

Pada tanggal 19 Desember 2025, Perusahaan mendapatkan Fasilitas *Term Loan* dari Mandiri sebesar Rp237.500.000 yang ditujukan untuk memenuhi *cashflow gap* dalam rangka invenstasi, pengembangan usaha, serta kebutuhan umum perusahaan dan grup usahanya. Fasilitas ini terdiri dari:

i. *Tranche* A dengan jumlah Rp118.750.000 dengan jangka waktu 5 tahun sejak penandatanganan perjanjian kredit.
ii. *Tranche* B dengan jumlah Rp118.750.000 dengan jangka waktu 7 tahun sejak penandatanganan perjanjian kredit.

Pokok pinjaman terhutang diakhir jangka waktu masing-masing *Tranche* dan bunga terhutang secara semesteran. Fasilitas ini dijamin dengan investasi aset keuangan sebesar Rp250.000.000 yang dibiayai oleh fasilitas ini. Perjanjian ini mengandung sejumlah persyaratan yang serupa dengan fasilitas-fasilitas lainnya yang diberikan oleh Mandiri kepada Perusahaan (Catatan 33h).

Pada tanggal 30 Desember 2025, Perusahaan telah menarik seluruh fasilitas pinjaman tersebut.

PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk ("BNI")

Pada tanggal 24 Oktober 2025, Perusahaan mendapatkan Fasilitas KMK Aflopend dari BNI sebesar Rp500.000.000 yang digunakan untuk pinjaman korporasi, untuk tujuan umum yang perkenankan untuk *corporate action* termasuk penyertaan modal kepada entitas anak, rencana *capital expenditure,* dan/atau beban operasional serta *refinancing capital expenditure/corporate action* yang telah dilakukan selama periode tahun 2024, 2025 dan 2026. Periode ketersediaan dari fasilitas ini adalah 18 (delapanbelas) bulan sejak tanggal penandatanganan. Pada tanggal 31 Desember 2025, Perusahaan telah menarik fasilitas pinjaman sebesar Rp25.000.000.

18. LONG-TERM BANK LOANS (continued)

The Company (continued)

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk ("Mandiri")

The loan agreement also contains certain financial ratios similar to the other facilities provided by BCA to the Company (Note 33q).

On December 19, 2025, the Company obtained a Loan Term Facility from Mandiri amounting to Rp237,500,000 which intended to refinancing the cashflow gap for investment, business development, and the general corporate purposes of the company. The facilities are:

i. Tranche A amounting to Rp118,750,000 with term of this facility is 5 years from the signing of the credit agreement.
ii. Tranche B amounting to Rp118,750,000 with term of this facility is 7 years from the signing of the credit agreement.

The loan principal is payable at the end of each Tranch's term and interest is payable semi-annually. The facility is secured by financial assets investment amounting to Rp250,000,000 that financed by the facility. The loan agreement also contains certain financial ratios similar to the other facilities provided by Mandiri to the Company (Note 33h).

As of December 30, 2025, the Company has fully drawdown the facility.

PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk ("BNI")

On October 24, 2025, the Company obtained a KMK Aflopend Facility from BNI amounting to Rp500,000,000 which is used for corporate loan, for general purposes used for corporate actions including capital injection to subsidiaries, capital expenditure, operating expense and refinancing capital expenditure/corporate action undertaken during 2024, 2025 and 2026. The availability period of this facility is 18 (eighteen) months from the signing date. As of December 31, 2025, the Company has drawdown the facility amounting Rp25,000,000.

18. HUTANG BANK JANGKA PANJANG (lanjutan)

Perusahaan (lanjutan)

PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk ("BNI") (lanjutan)

Fasilitas tersebut berjangka waktu 5 tahun sejak tanggal awal Perjanjian Kredit. Pokok pinjaman harus dilunasi secara tiga-bulanan dan bunga secara bulanan. Perjanjian ini mengandung sejumlah persyaratan yang serupa dengan fasilitas-fasilitas lainnya yang diberikan oleh BNI kepada Perusahaan (Catatan 33j).

UEPN melalui Entitas Anak, BKMS

Dana Syirkah Temporer - PT Bank Permata Tbk ("Permata")

BKMS telah menandatangani beberapa fasilitas pembiayaan Syariah atau *Islamic* dengan Permata melalui model MMQ ("*Musyarakah Mutanaqishah*") pada tanggal 25 Agustus 2022, yang telah di adendum terakhir kali pada tanggal 1 Juli 2024. Fasilitas tersebut digunakan untuk pembiayaan proyek dan pembiayaan kembali aset/fasilitas tertentu seperti instalasi pengolahan air limbah, fasilitas air bersih, gedung perkantoran dan lainnya. Total fasilitas sejumlah Rp2.788 miliar dan dijamin dengan aset yang dibiayai. Pada tanggal 18 September 2025, seluruh aset yang menjadi jaminan atas fasilitas kredit ini sudah dilepas oleh Bank.

Fasilitas ini dikenakan biaya bunga INDONIA ditambah dengan persentase margin tertentu dan memiliki tenor selama 5 tahun.

Fasilitas kredit ini juga mensyaratkan BKMS untuk memelihara sejumlah rasio keuangan.

Pada tanggal 31 Desember 2025, BKMS telah melakukan penarikan sebesar Rp138.245.613 dan BKMS telah memenuhi seluruh batasan yang dipersyaratkan dalam perjanjian.

BKMS telah melakukan pembayaran pokok pinjaman sebesar Rp360.424.574 untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 (2024: Rp295.424.574).

18. LONG-TERM BANK LOANS (continued)

The Company (continued)

PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk ("BNI") (continued)

The term of this facility is 5 years since the first Credit Agreement. The loan principal is repayable on a quarterly basis and interest is repayable on a monthly basis. The loan agreement contains certain loan covenants similar to those facilities provided by BNI to the Company (Note 33j).

UEPN through its Subsidiary, BKMS

Dana Syirkah Temporer - PT Bank Permata Tbk ("Permata")

BKMS signed several Shariah or Islamic financing facilities with Permata under MMQ model ("Musyarakah Mutanaqishah") on August 25, 2022, which was last amended on July 1, 2024. The facilities are set for both financing and refinancing of certain supporting assets/facilities such as waste-water treatment plant, freshwater facilities, office buildings and others. The amounts of facilities totalled Rp2,788 billion which is secured by the assets being financed. On September 18, 2025, all assets pledged as collateral for this credit facility were released by the Bank.

These facilities are subject to interest at INDONIA plus a certain percentage margin and have a tenor of 5 years.

These financing facilities require BKMS to maintain several financial ratios.

As of December 31, 2025, BKMS has withdrawn Rp138,245,613 and BKMS has met all the covenants as required in the agreement.

BKMS has paid the related loan principal facility amounting to Rp360,424,574 for the year ended December 31, 2025 (2024: Rp295,424,574).

18. HUTANG BANK JANGKA PANJANG (lanjutan)

UEPN melalui Entitas Anak, BKMS (lanjutan)

PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk ("BNI")

Pada tanggal 27 Juni 2023, BKMS telah menandatangani fasilitas kredit berjangka dengan BNI dengan total pinjaman sejumlah Rp2.000.000.000 dalam dua *tranche.* Fasilitas tersebut dikenakan biaya bunga INDONIA 3 bulanan ditambah dengan persentase *margin* tertentu, yang digunakan untuk membiayai kembali pinjaman pemegang saham. Fasilitas ini berjangka waktu 7 tahun dengan porsi tertentu yang harus diselesaikan paling lambat tanggal 26 Juni 2030.

Pada tanggal 31 Desember 2023, BKMS telah melakukan penarikan sebesar Rp2.000.000.000. Hal ini sesuai dengan semua kondisi yang dipersyaratkan dalam perjanjian pada tanggal pelaporan.

BKMS telah melakukan pembayaran pinjaman sebesar Rp364.203.000 pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 (2024: Rp315.958.070).

Pada tanggal 19 Juni 2024, BKMS telah menandatangani fasilitas kredit berjangka dengan BNI dengan total pinjaman sejumlah Rp500.000.000. Fasilitas tersebut dikenakan biaya bunga INDONIA 3 bulanan ditambah dengan persentase *margin* tertentu, yang digunakan untuk pembayaran kembali pinjaman pihak ketiga. Fasilitas ini berjangka waktu 3 tahun dengan porsi tertentu yang harus diselesaikan paling lambat bulan Desember 2027.

Pada tanggal 28 Juni 2024, BKMS telah melakukan penarikan sebesar Rp500.000.000. Hal ini sesuai dengan semua kondisi yang dipersyaratkan dalam perjanjian pada tanggal pelaporan.

BKMS telah melakukan pembayaran pokok pinjaman sebesar Rp80.000.000 untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 (2024: Rp250.000.000).

18. LONG-TERM BANK LOANS (continued)

UEPN through its Subsidiary, BKMS (continued)

PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk ("BNI")

On June 27, 2023, BKMS signed a loan term credit facility with BNI with a total plafond of Rp2,000,000,000 under two tranches. The facility, which bears interest at 3-months INDONIA plus a certain percentage margin, shall be used to refinance existing shareholder loans. It has a tenor of 7 years with a certain portion to be settled no longer than June 26, 2030.

As of December 31, 2023, BKMS has withdrawn Rp2,000,000,000. It is in compliance with all the conditions required in the agreement at the reporting date.

BKMS has paid the related loan balance amounting to Rp364,203,000 for the year ended December 31, 2025 (2024: Rp315,958,070).

On June 19, 2024, BKMS signed a term loan credit facility with BNI with a total plafond of Rp500,000,000. The facility, which bears interest at 3-month INDONIA plus a certain percentage margin, shall be used to refinance existing third-party loans. It has a tenor of 3 years with a certain portion to be settled no longer than December 2027.

On June 28, 2024, BKMS withdrew Rp500,000,000. It is in compliance with all the conditions required in the agreement at the reporting date.

BKMS has paid the related loan principal facility amounting to Rp80,000,000 for the year ended December 31, 2025 (2024: Rp250,000,000).

18. HUTANG BANK JANGKA PANJANG (lanjutan)

UEPN melalui Entitas Anak, BKMS (lanjutan)

PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk ("BNI") (lanjutan)

Selanjutnya, pada Maret 2025, BKMS mendapatkan persetujuan pemberian tambahan fasilitas kredit dengan BNI untuk total pinjaman sejumlah Rp638.000.000. Fasilitas tersebut dikenakan biaya bunga Indonia 3 bulanan ditambah dengan persentase *margin* tertentu. Fasilitas ini berjangka waktu 6 tahun. Pada tanggal 31 Desember 2025, BKMS telah melakukan penarikan sebesar Rp638.000.000. Fasilitas tambahan ini mengacu kepada total fasilitas awal yang sudah diberikan kepada BKMS.

BKMS telah melakukan pembayaran pokok pinjaman sebesar Rp47.850.000 untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025.

Pada bulan Desember 2025, BKMS mendapatkan persetujuan pemberian tambahan fasilitas kredit dengan BNI dengan total pinjaman sejumlah Rp750.000.000. Fasilitas tersebut dikenakan biaya bunga INDONIA 3 bulanan ditambah dengan persentase *margin* tertentu. Fasilitas ini berjangka waktu 2 tahun dengan pembayaran baki debit 180 hari sejak tanggal penarikan dan paling lambat diselesaikan tanggal 15 Desember 2027.

Pada tanggal 31 Desember 2025, BKMS telah melakukan penarikan sebesar Rp300.000.000. Fasilitas tambahan ini mengacu kepada total fasilitas awal yang sudah diberikan kepada BKMS.

Andahanesa melalui Entitas Anak, TNU

PT Bank Central Asia Tbk ("BCA")

Pada tanggal 27 Oktober 2017, TNU memperoleh pinjaman Kredit Investasi dari BCA dengan maksimum pinjaman sejumlah Rp250.000.000. Tujuan fasilitas ini adalah untuk membiayai pembangunan tangki penyimpanan Tahap I di Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya. Fasilitas ini berjangka waktu 8 tahun (termasuk *grace period* 18 bulan sejak penarikan pertama atau selambat-lambatnya pada tanggal 31 Januari 2019). Perjanjian ini telah mengalami perubahan dari waktu ke waktu, perubahan terakhir pada bulan Mei 2024, atas penambahan tenor 3 tahun, sampai dengan Agustus 2030.

18. LONG-TERM BANK LOANS (continued)

UEPN through its Subsidiary, BKMS (continued)

PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk ("BNI") (continued)

Further, on March 2025, BKMS signed an additional credit facility with BNI for a total plafond of Rp638,000,000. The facility, which bears interest at 3-months Indonia plus a certain percentage margin. It has a tenor of 6 years. As of December 31, 2025, BKMS has withdrawn Rp638,000,000. This additional facility refers to the initial facilities that has been given to BKMS.

BKMS has paid the related loan principal facility amounting to Rp47,850,000 for the year ended December 31, 2025.

On December 2025, BKMS signed an additional credit facility with BNI with a total plafond of Rp750,000,000. The facility, which bears interest at 3-months INDONIA plus a certain percentage margin. It has a tenor of 2 years with debit balance payment in 180 days from the withdrawal date and no longer than December 31, 2027.

On December 31, 2025 BKMS has withdrawn Rp300,000,000. This additional facility refers to the initial facilities has been given to BKMS.

Andahanesa through its Subsidiary, TNU

PT Bank Central Asia Tbk ("BCA")

On October 27, 2017, TNU obtained an Investment Credit facility loan from BCA with maximum plafond totalling Rp250,000,000. The purpose of the facility is to finance storage tanks Phase I in Tanjung Perak Port, Surabaya. The term of the facility is 8 years (including a grace period of 18 months from the first utilization date or at the latest by January 31, 2019). The agreement has been amended from time to time, the latest of which was in May 2024, pertaining to an additional tenor of 3 years, to August 2030.

18. HUTANG BANK JANGKA PANJANG (lanjutan)

Andahanesa melalui Entitas Anak, TNU (lanjutan)

PT Bank Central Asia Tbk ("BCA") (lanjutan)

Fasilitas ini dijamin dengan seluruh aset yang dibiayai oleh fasilitas ini mencakup 13 unit tangki penyimpanan.

Fasilitas ini juga mengharuskan pemenuhan sejumlah persyaratan, antara lain, (i) Perusahaan mempertahankan kepemilikannya paling sedikit sebesar 50,1% atas TNU, baik secara langsung ataupun tidak langsung, serta (ii) pemenuhan sejumlah rasio keuangan tertentu.

TNU telah melakukan pembayaran pinjaman sebesar Rp42.012.025 pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 (2024: Rp33.222.222).

Semua fasilitas kredit yang dijelaskan di atas dikenakan tingkat suku bunga tahunan sebagai berikut:

	31 Des. 2025/ *Dec. 31, 2025*	31 Des. 2024/ *Dec. 31, 2024*	
Rupiah	5,24% - 9,52%	7,15% - 9,33%	*Rupiah*

Kepatuhan atas Kovenan

Pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024, Kelompok Usaha telah memenuhi semua persyaratan terkait sebagaimana diharuskan dalam seluruh perjanjian kredit di atas.

18. LONG-TERM BANK LOANS (continued)

Andahanesa through its Subsidiary, TNU (continued)

PT Bank Central Asia Tbk ("BCA") (continued)

The facility is secured by the related assets financed by the facility covering 13 units of storage tanks.

It requires compliance with certain covenants, among others, (i) the Company shall retain control of at least 50.1% of TNU directly or indirectly, and (ii) compliance with certain financial ratios.

TNU has paid the related loan facility amounting to Rp42,012,025 for the year ended December 31, 2025 (2024: Rp33,222,222).

All the above-mentioned credit facilities are subject to annual interest rates as follows:

Compliance with Covenants

As of December 31, 2025 and 2024, the Group has complied with all the relevant covenants as required under all the credit agreements mentioned above.

19. KEPENTINGAN NONPENGENDALI / *19. NON-CONTROLLING INTERESTS*

Anak Perusahaan/ *Subsidiaries*	Saldo 1 Januari 2025/ *Balance January 1, 2025*	Bagian Atas Laba (Rugi) Tahun Berjalan/ *Share in Current Year Profit (Loss)*	Selisih Kurs Karena Penjabaran Laporan Keuangan/ *Exchange Difference Due to Translation of Financial Statements*	Bagian Atas Perubahan Lainnya Dari Ekuitas Entitas Anak/ *Share of Other Changes in Equity of Subsidiary*	Penambahan Investasi/ *Additional of Investment*	Saldo 31 Desember 2025/ *Balance December 31, 2025*
PT Jakarta Tank Terminal	539.085.278	47.410.898	24.886.185	-	-	611.382.361
PT Berkah Kawasan Manyar Sejahtera, entitas anak UEPN	1.791.263.025	307.923.410	-	-	-	2.099.186.435
PT Terminal Nilam Utara, entitas anak Andahanesa	84.395.723	4.149.843	-	-	-	88.545.566
PT Dirgantara Petroindo Raya, entitas anak AKRIDA	36.562.958	(5.588.743)	-	696	16.871.190	47.846.101
PT Aneka Petroindo Raya, entitas anak AKRIDA	586.645.684	(15.227.821)	-	-	-	571.417.863
PT Anugerah Lubrindo Raya, entitas anak AKRIDA	5.669.254	(350.702)	-	-	-	5.318.552
PT Anugerah Kimia Indonesia, entitas anak ANI	10.242.556	8.251.950	-	-	-	18.494.506
PT Berkah Buana Energi	7.591.357	4.231.096	-	-	-	11.822.453
Total	**3.061.455.835**	**350.799.931**	**24.886.185**	**696**	**16.871.190**	**3.454.013.837**

Anak Perusahaan/ *Subsidiaries*	Saldo 1 Januari 2024/ *Balance January 1, 2024*	Bagian Atas Laba (Rugi) Tahun Berjalan/ *Share in Current Year Profit (Loss)*	Selisih Kurs Karena Penjabaran Laporan Keuangan/ *Exchange Difference Due to Translation of Financial Statements*	Bagian Atas Perubahan Lainnya Dari Ekuitas Entitas Anak/ *Share of Other Changes in Equity of Subsidiary*	Penambahan Investasi/ *Additional of Investment*	Saldo 31 Desember 2024/ *Balance December 31, 2024*
PT Jakarta Tank Terminal	501.713.322	13.176.105	24.195.851	-	-	539.085.278
PT Berkah Kawasan Manyar Sejahtera, entitas anak UEPN	1.583.228.242	208.034.783	-	-	-	1.791.263.025
PT Terminal Nilam Utara, entitas anak Andahanesa	77.329.764	7.065.959	-	-	-	84.395.723
PT Dirgantara Petroindo Raya, entitas anak AKRIDA	34.176.272	(5.300.409)	-	-	7.687.095	36.562.958
PT Aneka Petroindo Raya, entitas anak AKRIDA	563.876.964	(52.121.327)	-	1.418	74.888.629	586.645.684
PT Anugerah Lubrindo Raya, entitas anak AKRIDA	5.315.356	353.898	-	-	-	5.669.254
PT Anugerah Kimia Indonesia, entitas anak ANI	6.748.509	3.494.047	-	-	-	10.242.556
PT Berkah Buana Energi	7.944.876	(353.519)	-	-	-	7.591.357
Total	**2.780.333.305**	**174.349.537**	**24.195.851**	**1.418**	**82.575.724**	**3.061.455.835**

Ringkasan informasi keuangan BKMS, entitas anak yang dimiliki 60% oleh UEPN sebelum eliminasi disajikan di bawah ini:

The summarized financial information of BKMS, a subsidiary held 60% by UEPN before elimination is provided below:

Laporan posisi keuangan	**31 Des. 2025/ *Dec. 31, 2025***	**31 Des. 2024/ *Dec. 31, 2024***	***Statement of financial position***
Aset Lancar	7.123.347.162	7.008.236.857	*Current Assets*
Aset Tidak Lancar	5.509.824.445	4.663.282.129	*Non-Current Assets*
Liabilitas Jangka Pendek	3.416.467.065	2.891.060.093	*Current Liabilities*
Liabilitas Jangka Panjang	3.965.131.143	4.055.697.761	*Non-Current Liabilities*
Ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik Perusahaan	5.251.573.399	4.724.761.132	*Equity attributable to the owners of the Company*

19. KEPENTINGAN NONPENGENDALI (lanjutan)

Dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang diselenggarakan pada tanggal 26 April 2018, para pemegang saham BKMS menyetujui pembagian dividen sebesar Rp135.269.845 (termasuk bagian untuk Pemegang Saham Pengendali) dari laba tahun 2015, 2016 dan 2017. Pembayaran dividen tergantung ketersediaan kas setelah memperhitungkan pembayaran hutang bank dan pemegang saham, saldo hutang dividen kepada pihak nonpengendali disajikan dalam "Hutang Dividen".

19. NON-CONTROLLING INTERESTS (continued)

Based on the Annual General Shareholders' Meeting held on April 26, 2018, the BKMS's shareholders approved the declaration of dividends of Rp135,269,845 (including the portion for the Controlling Interest) out of the profit for the year 2015, 2016 and 2017. The payment is subject to availability of cashflows after reserve for bank and shareholder loans, the outstanding balance to the NCI of which is presented under "Dividend Payable".

20. MODAL SAHAM / *20. SHARE CAPITAL*

Nama Pemegang Saham / *Names of Shareholders*	31 Desember 2025 / *December 31, 2025*			31 Desember 2024 / *Desember 31, 2024*		
	Total Saham / *Number of Shares*	Persentase Kepemilikan / *Percentage of Ownership*	Total Modal Disetor / *Total Paid-up Capital*	Total Saham / *Number of Shares*	Persentase Kepemilikan / *Percentage of Ownership*	Total Modal Disetor / *Total Paid-up Capital*
PT Arthakencana Rayatama	12.787.818.600	63.71%	255.756.372	12.768.961.300	63,61%	255.379.226
Haryanto Adikoesoemo	212.604.600	1.06%	4.252.092	205.604.600	1,02%	4.112.092
Soegiarto Adikoesoemo	145.267.000	0.72%	2.905.340	101.604.800	0,51%	2.032.096
Jimmy Tandyo	48.000.000	0.24%	960.000	39.000.000	0,19%	780.000
Mery Sofi	8.303.000	0.04%	166.060	2.303.000	0,01%	46.060
Bambang Soetiono	7.780.000	0.04%	155.600	4.780.000	0,02%	95.600
Suresh Vembu	4.927.500	0.02%	98.550	3.727.500	0,02%	74.550
Nery Polim	2.965.000	0.01%	59.300	1.050.000	0,01%	21.000
Termurti Tiban	1.650.000	0.01%	33.000	450.000	0,00%	9.000
Masyarakat (masing-masing di bawah kepemilikan 5%) / *Public (each below 5% ownership)*	6.580.453.900	32.79%	131.609.078	6.625.338.400	33,01%	132.506.768
Sub-total	19.799.769.600	98.64%	395.995.392	19.752.819.600	98,40%	395.056.392
Saham treasuri / *Treasury stocks*	273.705.000	1.36%	5.474.100	320.655.000	1,60%	6.413.100
Total	**20.073.474.600**	**100,00%**	**401.469.492**	**20.073.474.600**	**100,00%**	**401.469.492**

Saham Treasuri

Perusahaan melaksanakan pembelian kembali saham yang beredar dalam jangka waktu paling lama 3 bulan, antara tanggal 16 Maret 2020 sampai dengan tanggal 12 Juni 2020. Perusahaan mengalokasikan dana sebanyak-banyaknya Rp500.000.000 untuk pembelian maksimum sejumlah 172.631.882 lembar saham atau sekitar 4,3% dari seluruh saham ditempatkan dan disetor penuh Perusahaan.

Program ini sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ("OJK") No. 2/POJK.04/2013. Manajemen Perusahaan berkeyakinan bahwa Program ini dapat mengembalikan kepercayaan investor kepada Perusahaan dan harga saham Perusahaan dapat mencerminkan nilai yang sepadan dengan kelipatan pasar.

Treasury Shares

The Company has conducted shares buyback within a maximum period of 3 months, from March 16, 2020 up to June 12, 2020. The Company allocated the maximum funds amounted to Rp500,000,000 with maximum buyback of 172,631,882 shares or approximately 4.3% of the Company's total issued and fully paid shares.

The Program is in compliance with the Financial Services Authority Regulation ("OJK") No. 2/POJK.04/2013. The management believes that the Program can increase and bring back investors' confidence in the Company and its share price can reflect the value that is based on market multiples.

20. MODAL SAHAM (lanjutan)

Saham Treasuri (lanjutan)

Perusahaan telah melakukan *buyback* saham treasuri sebanyak 67.261.000 saham (setara dengan 336.305.000 setelah *stock split* di Januari 2022) dengan harga perolehan sebesar Rp118.071.864, yang disajikan sebagai akun "Saham Treasuri" yang mengurangi ekuitas pada laporan posisi keuangan konsolidasian. *Buyback* saham dilakukan sebelum *stock split*.

Perusahaan telah melakukan Keterbukaan Informasi melalui Surat No. 016/L-AKR-CS/2020 tanggal 13 Maret 2020 ke OJK dan BEI.

Seperti yang diungkapkan pada Surat No. 072/L-AKR-CS/2023 tanggal 19 September 2023 ke OJK, Perusahaan berencana untuk mengalihkan sebagian saham (atau sebanyak 156.500.000 saham) dari saham hasil pembelian kembali (saham treasuri) dalam bentuk Program Pemberian Hak Opsi Kepemilikan Saham kepada Manajemen dan Karyawan Perusahaan ("MESOP"). MESOP ini akan diberikan kepada para peserta terpilih ("Peserta"), yang mana hak opsi tersebut kemudian akan diberikan kepada Peserta untuk membeli (atau melaksanakan) sejumlah saham Perusahaan, dengan syarat dan ketentuan yang ditentukan dan diatur dalam Program. Pelaksanaan dari hak opsi tersebut telah disetujui RUPS pada bulan April 2024.

Opsi Saham

Opsi saham yang diberikan dapat dieksekusi selama tiga tahun dengan periode pelaksanaan sebagai berikut:

20. SHARE CAPITAL (continued)

Treasury Shares (continued)

The Company has made a buyback of 67,261,000 treasury shares (equivalent to 336,305,000 after stock split in January 2022) at a total acquisition cost of Rp118,071,864, which is presented as "Treasury Shares" account that deducted the equity in the consolidated statement of financial position. Stock buyback is done before the stock split.

The Company has made the Disclosure of Information in its Letter No. 016/L-AKR-CS/2020 dated March 13, 2020 to OJK and IDX.

As disclosed in its Letter No. 072/L-AKR-CS/2023 dated September 19, 2023 to OJK, the Company planned to transfer a portion of the shares (or 156,500,000 shares) from the buyback (treasury shares) through the Management and Employees Stock Option Program ("MESOP"). The MESOP shall be granted to selected participants ("Participants"), whereby these option rights will later give the Participants the right to purchase (or exercise) a number of the Company's shares, with the terms and conditions determined and regulated in the Program. The Option has been approved in the AGM held in April 2024.

Share Options

The share options granted per phase are exercisable over the next three years with the following exercise period:

Total opsi MESOP		*Total options* *MESOP*
Phase I - Agustus 2024	15.650.000	*Phase I - August 2024*
Phase II - Agustus 2025	46.950.000	*Phase II - August 2025*
Phase III.A - 1-26 Mei 2026	46.950.000	*Phase III.A - May 1-26, 2026*
Phase III.B - 1-26 Mei 2026	46.950.000	*Phase III.B - May 1-26, 2026*
Total opsi yang diberikan	**156.500.000**	***Total options granted***

20. MODAL SAHAM (lanjutan)

Opsi Saham (lanjutan)

Opsi saham tahap I dan II telah dieksekusi seluruhnya pada Agustus 2024 dan 2025.

Opsi saham yang diberikan setiap tahap dapat dieksekusi selama tiga tahun sebesar 10%, 30% dan 60% setiap tahunnya dari opsi yang diberikan.

Harga pelaksanaan opsi saham sama dengan harga Rp499. Tidak ada alternatif penyelesaian tunai bagi karyawan. Kelompok Usaha tidak memiliki praktik penyelesaian tunai di masa lalu untuk penghargaan ini.

Tidak ada pembatalan atau modifikasi pada penghargaan pada tahun 2024 dan 2025.

Rata-rata tertimbang sisa umur kontrak opsi saham yang beredar pada tanggal 31 Desember 2025 adalah 0,25 tahun (2024: 1,35 tahun).

Tabel berikut mencantumkan input ke model yang digunakan untuk ketiga rencana untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024:

20. SHARE CAPITAL (continued)

Share Options (continued)

Phase I and II options are fully exercised in August 2024 and 2025.

The stock options granted per phase are exercisable over the next three years at 10%, 30% and 60% of the options granted in such year.

The exercise price of the share options is equal to Rp499. There are no cash settlement alternatives for the employees. The Group does not have a past practice of cash settlement for these awards.

There were no cancellations or modifications to the awards in 2024 and 2025.

The weighted average remaining contractual life for the share options outstanding as at December 31, 2025 was 0.25 years (2024: 1.35 years).

The following tables list the inputs to the models used for the three plans for the year ended December 31, 2025 and 2024:

	31 Des. 2025/ *Dec. 31, 2025*	**31 Des. 2024/ *Dec. 31, 2024***	
Nilai wajar rata-rata tertimbang pada tanggal pengukuran (Rp)	845,97	845,97	*Weighted average fair values at the measurement date (Rp)*
Hasil dividen (%)	6,10	6,10	*Dividend yield (%)*
Volatilitas yang diharapkan (%)	41,70	41,70	*Expected volatility (%)*
Suku bunga bebas risiko (%)	6,22	6,22	*Risk-free interest rate (%)*
Ekspektasi opsi gagal diperoleh (%)			*Expected forfeited option (%)*
Tahun 2024	2	2	*Year 2024*
Tahun 2025	2	2	*Year 2025*
Tahun 2026	15,8	15,8	*Year 2026*
Rata-rata tertimbang harga saham (Rp)	499	499	*Weighted average share price (Rp)*
Model yang digunakan	*Black-scholes*	*Black-scholes*	*Model used*

21. TAMBAHAN MODAL DISETOR / *21. ADDITIONAL PAID-IN CAPITAL*

Pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024, rincian akun Tambahan Modal Disetor adalah sebagai berikut:

As of December 31, 2025 and 2024, the Additional Paid-in Capital account details are as follows:

	31 Des. 2025/ *Dec. 31, 2025*	**31 Des. 2024/ *Dec. 31, 2024***	
Penawaran Umum Saham Perdana - 1994	6.000.000	6.000.000	*Initial Public Offering - 1994*
Biaya emisi efek			*Share issuance costs -*
Rights Issue I (2004)	(5.616.855)	(5.616.855)	*Rights Issue I (2004)*
Rights Issue II (2010), setelah dikurangi dengan biaya emisi efek sebesar Rp8.257.089	468.763.370	468.763.370	*Rights Issue II (2010), net-against share issuance costs at Rp8,257,089*
Pelaksanaan opsi saham MESOP	862.129.183	804.973.325	*Exercise of MESOP share options*
Penerbitan kembali saham treasuri	9.259.438	2.314.860	*Reissuance of treasury stock*
Selisih nilai transaksi restrukturisasi entitas sepengendali	25.043.217	25.043.217	*Difference in values of restructuring transactions of entities under common control*
Total	**1.365.578.353**	**1.301.477.917**	***Total***

22. BAGIAN ATAS PERUBAHAN LAINNYA DARI EKUITAS ENTITAS ANAK / *22. SHARE OF OTHER CHANGES IN EQUITY OF SUBSIDIARIES*

	31 Desember 2025/*December 31, 2025*			
	Saldo Awal/ *Beginning Balance*	**Penambahan (Pengurangan)/ *Additions (Deductions)***	**Saldo Akhir/ *Ending Balance***	
JTT	70.963.060	-	70.963.060	*JTT*
UEPN	2.838.223	-	2.838.223	*UEPN*
Anugrah	(4.794.465)	-	(4.794.465)	*Anugrah*
Andahanesa	(1.386)	-	(1.386)	*Andahanesa*
AKRIDA	(10.650)	(696)	(11.346)	*AKRIDA*
Neto	**68.994.782**	**(696)**	**68.994.086**	***Net***

	31 Desember 2024/*December 31, 2024*			
	Saldo Awal/ *Beginning Balance*	**Penambahan (Pengurangan)/ *Additions (Deductions)***	**Saldo Akhir/ *Ending Balance***	
JTT	70.963.060	-	70.963.060	*JTT*
UEPN	2.838.223	-	2.838.223	*UEPN*
Anugrah	(4.794.465)	-	(4.794.465)	*Anugrah*
Andahanesa	(1.386)	-	(1.386)	*Andahanesa*
AKRIDA	(9.232)	(1.418)	(10.650)	*AKRIDA*
Neto	**68.996.200**	**(1.418)**	**68.994.782**	***Net***

23. PENDAPATAN DARI KONTRAK DENGAN PELANGGAN

Di bawah ini adalah pemisahan pendapatan Kelompok Usaha dari kontrak dengan pelanggan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024:

23. REVENUE FROM CONTRACT WITH CUSTOMERS

Set out below is the disaggregation of the Group's revenue from contracts with customers for the year ended December 31, 2025 and 2024:

	Tahun yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember/ *Year Ended December 31,*		
	2025	**2024**	
Berdasarkan produk dan jasa			***By product and services***
Perdagangan dan distribusi			*Trading and distribution*
Bahan Bakar Minyak (BBM)			*Petroleum*
Pihak berelasi (Catatan 31)	712.164	1.654.576	*Related parties (Note 31)*
Pihak ketiga	34.012.629.455	28.932.533.511	*Third parties*
Kimia dasar dan lainnya			*Basic chemical and others*
Pihak ketiga	7.301.072.740	6.598.060.864	*Third parties*
Sub-total	41.314.414.359	35.532.248.951	*Sub-total*
Pabrikan - Pihak ketiga			*Manufacturing - Third parties*
Adhesive	464.361.072	651.720.510	*Adhesive*
Jasa logistik			*Logistic services*
Operasi pelabuhan dan transportasi			*Port operations and transportation*
Pihak berelasi (Catatan 31)	4.200	8.800	*Related party (Note 31)*
Pihak ketiga	1.063.998.483	812.566.838	*Third parties*
Jasa penyimpanan	239.896.740	202.011.078	*Storage services*
Lain-lain	102.542.299	63.161.330	*Others*
Sub-total	1.406.441.722	1.077.748.046	*Sub-total*
Tanah kawasan industri dan lainnya			*Industrial estate land and others*
Penjualan tanah kawasan industri	1.820.296.692	877.260.909	*Industrial estate land sales*
Listrik dan utilitas lainnya	727.027.010	318.147.628	*Electricity and other utilities*
Sub-total	2.547.323.702	1.195.408.537	*Sub-total*
Total	**45.732.540.855**	**38.457.126.044**	***Total***

	Tahun yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember/ *Year Ended December 31,*		
	2025	**2024**	
Berdasarkan waktu pengakuan pendapatan			***By timing of revenue recognition***
Barang ditransfer pada suatu waktu	43.599.072.125	37.061.230.387	*Goods transferred at a point in time*
Jasa yang ditransfer pada suatu waktu	1.924.820.988	1.216.398.944	*Services transferred at a point in time*
Jasa yang ditransfer dari waktu ke waktu	208.647.742	179.496.713	*Services transferred over time*
Pendapatan total dari kontrak dengan pelanggan	**45.732.540.855**	**38.457.126.044**	***Total revenue from contract with customers***

**PT AKR CORPORINDO TBK
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2025 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
kecuali Dinyatakan Lain)**

***PT AKR CORPORINDO TBK
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2025 and
for the Year Then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
unless Otherwise Stated)***

24. BEBAN POKOK PENJUALAN DAN PENDAPATAN / *24. COST OF SALES AND REVENUES*

	Tahun yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember/ *Year Ended December 31,*		
	2025	**2024**	
Perdagangan dan distribusi			*Trading and distribution*
Beban pokok pendapatan:			*Cost of revenues:*
Kimia dasar, BBM dan lainnya	37.550.784.586	32.284.931.864	*Basic chemical, petroleum, and others*
Pengiriman, bongkar-muat dan pengepakan dan lainnya	544.116.204	422.513.553	*Freight-out, handling charges and packaging and others*
Penyusutan (Catatan 10)	154.500.050	146.992.960	*Depreciation (Note 10)*
Penyusutan atas aset hak-guna (Catatan 11)	60.540.810	48.773.268	*Depreciation of right-of-use assets (Note 11)*
Sub-total	38.309.941.650	32.903.211.645	*Sub-total*
Pabrikan			*Manufacturing*
Beban pokok penjualan:			*Cost of goods sold*:
Bahan baku yang digunakan	222.558.948	327.433.402	*Raw materials used*
Tenaga kerja langsung dan biaya *overhead* pabrik	29.166.764	27.265.461	*Direct labor and factory overhead*
Penyusutan (Catatan 10)	2.554.786	2.958.585	*Depreciation (Note 10)*
Beban pokok produksi	254.280.498	357.657.448	*Cost of goods manufactured*
Persediaan barang jadi			*Finished goods*
Awal periode	15.067.738	13.385.650	*At beginning of period*
Akhir periode	(13.038.304)	(15.067.738)	*At end of period*
Sub-total	256.309.932	355.975.360	*Sub-total*
Jasa logistik			*Logistic services*
Pengiriman, bongkar-muat dan pengepakan	761.887.964	559.846.694	*Freight-out, handling charges and packaging*
Penyusutan (Catatan 10)	221.244.120	224.410.349	*Depreciation (Note 10)*
Perbaikan dan pemeliharaan	87.163.114	89.127.799	*Repairs and maintenance*
Penyusutan dan amortisasi atas aset hak-guna (Catatan 11)	20.414.583	22.102.753	*Depreciation and amortization of right-of-use assets (Note 11)*
Lain-lain	358.537.210	282.524.725	*Others*
Sub-total	1.449.246.991	1.178.012.320	*Sub-total*
Tanah kawasan industri dan lainnya	1.904.980.844	783.258.042	*Industrial estate land and others*
Total	**41.920.479.417**	**35.220.457.367**	***Total***

25. BEBAN USAHA / *25. OPERATING EXPENSES*

	Tahun yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember/ *Year Ended December 31,*		
	2025	**2024**	
Beban Umum dan Administrasi			***General and Administrative Expenses***
Gaji, upah dan kesejahteraan karyawan	596.647.047	593.371.399	*Salaries, wages and employee benefits*
Beban operasional kantor	103.306.891	54.186.518	*Office expenses*
Penyusutan (Catatan 10)	45.061.539	41.226.442	*Depreciation (Note 10)*
Perjalanan dinas dan transportasi	44.747.439	40.304.536	*Travelling and transportation*
Biaya profesional	32.670.644	39.766.599	*Professional fees*
Pajak dan perizinan	26.405.730	19.133.166	*Taxes and licenses*
Cadangan penurunan nilai kerugian atas piutang usaha (Catatan 5)	20.838.513	6.745.428	*Allowance for impairment losses on trade (Note 5)*
Prasarana dan telekomunikasi	15.978.550	11.934.916	*Utilities and telecommunication*
Perbaikan dan pemeliharaan	9.594.750	8.624.203	*Repairs and maintenance*
Sewa kantor dan bangunan (Catatan 11)	8.831.763	8.086.215	*Office and building rental (Note 11)*
Biaya bank dan administrasi	1.979.376	1.508.710	*Bank charges and administration*
Asuransi	6.031.825	4.811.592	*Insurance*
Perlengkapan kantor	2.814.758	2.777.757	*Office supplies*
Penyusutan dan amortisasi aset hak-guna (Catatan 11)	2.633.053	3.206.473	*Depreciation and amortization of right-of-use assets (Note 11)*
Lain-lain	43.627.954	37.759.969	*Miscellaneous*
Sub-total	961.169.832	873.443.923	*Sub-total*
Beban Penjualan			***Selling Expenses***
Iklan dan promosi	16.951.936	18.039.442	*Advertising and promotion*
Transportasi	13.676.245	18.281.853	*Transportation*
Perjamuan	4.038.943	4.306.251	*Entertainment*
Penyusutan (Catatan 10)	755.093	755.093	*Depreciation (Note 10)*
Lain-lain	62.705.619	59.765.295	*Miscellaneous*
Sub-total	98.127.836	101.147.934	*Sub-total*
Total	**1.059.297.668**	**974.591.857**	***Total***

26. PERPAJAKAN / *26. TAXATION*

a. Pajak Dibayar di Muka / *a. Prepaid Taxes*

	31 Des. 2025/ *Dec. 31, 2025*	**31 Des. 2024/ *Dec. 31, 2024***	
Pajak pertambahan nilai - neto	114.799.729	126.272.187	*Value added tax – net*
Lain-lain	20.865.797	20.926.761	*Others*
Total	**135.665.526**	**147.198.948**	***Total***

b. Hutang Pajak / *b. Taxes Payable*

	31 Des. 2025/ *Dec. 31, 2025*	**31 Des. 2024/ *Dec. 31, 2024***	
Pajak lain-lain			*Other taxes*
Pasal 4 (2)	5.381.222	4.298.000	*Article 4 (2)*
Pasal 21	3.372.004	1.846.512	*Article 21*
Pasal 22	8.682.641	7.065.587	*Article 22*
Pasal 23 dan 26	7.790.973	2.858.703	*Articles 23 and 26*
Pajak penghasilan			*Income taxes*
Pasal 29	25.607.175	23.991.617	*Article 29*
Pajak pertambahan nilai - neto	155.398.785	82.527.855	*Value added tax - net*
Pajak Bahan Bakar atas Kendaraan Bermotor (“PBBKB”)	437.717.366	279.485.206	*Motor Vehicle Fuel Tax (“PBBKB”)*
Lain-lain	9.637.064	626.344	*Others*
Total	**653.587.230**	**402.699.824**	***Total***

26. PERPAJAKAN (lanjutan) / *26. TAXATION (continued)*

c. Beban Pajak Kini / *c. Current Tax Expense*

Rekonsiliasi antara laba sebelum pajak final dan pajak penghasilan menurut laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian dengan penghasilan kena pajak Perusahaan adalah sebagai berikut:

A reconciliation between profit before final and income tax per consolidated statements of profit or loss and other comprehensive income and taxable income of the Company are as follows:

	Tahun yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember/ *Year Ended December 31,*		
	2025	**2024**	
Laba sebelum pajak final dan pajak penghasilan menurut laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian	3.307.520.236	2.838.907.151	*Profit before final and income tax per consolidated statements of profit or loss and other comprehensive income*
Laba entitas anak sebelum pajak	(1.175.959.085)	(778.327.873)	*Profit of subsidiaries before tax*
Lain-lain	190.976.075	121.478.921	*Others*
Laba Perusahaan sebelum beban pajak	2.322.537.226	2.182.058.199	*Income before tax attributable to the Company*
Efek penyesuaian translasi atas laporan keuangan konsolidasian Perusahaan	2.566.812	2.566.812	*Adjustment translation effect on the consolidated financial statements of the Company*
Pendapatan dividen dari entitas anak	(139.965.261)	(99.961.538)	*Dividend income from subsidiaries*
Laba Perusahaan sebelum beban pajak, tidak termasuk efek penyesuaian translasi dan pendapatan dividen yang dikenakan pajak final	2.185.138.777	2.084.663.473	*Income before tax attributable to the Company, excluding adjustment translation effect and dividend income subject to final tax*
Perbedaan temporer:			*Temporary differences:*
Penambahan penyisihan kerugian ekspektasian	5.603.416	4.581.248	*Addition for expected credit loss*
Penyusutan	(36.194.202)	(34.774.818)	*Depreciation*
Laba (rugi) penjualan aset tetap	(29.682.541)	4.001.261	*Gain (loss) on disposal of property and equipment*
Imbalan kerja dan lainnya	(930.460)	(49.482.599)	*Employment benefits and others*
Sub-total	(61.203.787)	(175.674.908)	*Sub-total*
Perbedaan tetap:			*Permanent differences:*
Beban terkait penghasilan yang pajaknya bersifat final	309.594.019	214.774.045	*Expenses subjected to final tax*
Penghasilan sewa yang pajaknya bersifat final	(603.545.615)	(446.667.451)	*Rent income subjected to final tax*
Penghasilan bunga yang pajaknya bersifat final	(145.134.665)	(177.010.655)	*Finance income subjected to final tax*
Beban pajak	846.602	(3.064.936)	*Tax expenses*
Lain-lain	33.351.688	9.754.215	*Others*
Sub-total	(404.887.971)	(402.214.782)	*Sub-total*
Penghasilan kena pajak Perusahaan	**1.719.047.019**	**1.606.773.783**	***Taxable income of the Company***

**PT AKR CORPORINDO TBK
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2025 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
kecuali Dinyatakan Lain)**

***PT AKR CORPORINDO TBK
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2025 and
for the Year Then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
unless Otherwise Stated)***

26. PERPAJAKAN (lanjutan) / *26. TAXATION (continued)*

c. Beban Pajak Kini (lanjutan) / *c. Current Tax Expense (continued)*

Perhitungan beban pajak dan hutang pajak kini Perusahaan adalah sebagai berikut: / *The current tax expenses and payable of the Company are calculated as follows:*

	Tahun yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember/ *Year Ended December 31,*		
	2025	**2024**	
Beban pajak kini			*Current tax expense*
Perusahaan	378.190.344	353.490.232	*The Company*
Entitas Anak	56.206.166	40.275.478	*Subsidiaries*
Total	**434.396.510**	**393.765.710**	***Total***
Dikurangi pembayaran pajak di muka			*Less prepaid taxes*
Perusahaan			*The Company*
Pajak penghasilan			*Income taxes*
Pasal 22	383.886.580	274.823.800	*Article 22*
Pasal 23	4.024.439	21.087.718	*Article 23*
Pasal 25	23.864.782	43.055.737	*Article 25*
Sub-total	411.775.801	338.967.255	*Sub-total*
Entitas Anak	34.526.104	31.896.286	*Subsidiaries*
Total	**446.301.905**	**370.863.541**	***Total***
Hutang pajak - Pasal 29			*Current tax payable - Article 29*
Perusahaan	-	14.522.977	*The Company*
Entitas Anak	25.607.175	9.468.640	*Subsidiaries*
Total	**25.607.175**	**23.991.617**	***Total***
Estimasi tagihan pajak penghasilan			*Estimated claims for tax refund*
Perusahaan			*The Company*
2025	33.585.457	-	*2025*
Entitas Anak			*Subsidiaries*
2025	16.598.307	-	*2025*
2024	12.919.088	-	*2024*
2023	7.898.117	-	*2023*
2022	2.835.982	-	*2022*
2021	92.321	-	*2021*
Sub-total	**73.929.272**	**-**	***Sub-total***
Estimasi tagihan Pajak Pertambahan Nilai			*Estimated claims for VAT refund*
Perusahaan	387.577.762	405.211.438	*The Company*
Entitas Anak	27.707.338	25.969.720	*Subsidiaries*
Sub-total	**415.285.100**	**431.181.158**	***Sub-total***
Total	**489.214.372**	**431.181.158**	***Total***
Bagian jangka pendek - disajikan pada aset lancar lainnya (Catatan 8)	418.764.932	415.609.983	*Current portion - presented under other current assets (Note 8)*
Bagian jangka panjang	**70.449.440**	**15.571.175**	***Long-term portion***

26. PERPAJAKAN (lanjutan)

c. Beban Pajak Kini (lanjutan)

Kecuali Aruki, JTT, AST, ATI, BBE, dan ADH, entitas anak lainnya masih dalam posisi rugi fiskal.

Pajak Penghasilan Pilar Dua

Berbagai negara telah memberlakukan atau bermaksud memberlakukan peraturan perpajakan untuk mematuhi aturan model Pilar Dua, termasuk Indonesia yang diatur oleh PMK 136/2024.

PMK 136/2024 menerapkan mekanisme perpajakan baru yang mensyaratkan Perusahaan Multinasional ("PMN") untuk membayar pajak tambahan di suatu yurisdiksi ketika tarif pajak efektif, yang ditentukan berdasarkan yurisdiksi menurut aturan Pilar Dua, lebih rendah dari tarif minimum 15%. PMK 136/2024 menetapkan mekanisme untuk menentukan entitas mana (atau entitas-entitas mana) dalam Grup PMN yang harus menerapkan pajak tambahan tersebut dan porsi pajak yang dibebankan kepada setiap entitas terkait.

Kelompok Usaha telah melakukan penilaian potensi eksposur terhadap pajak penghasilan Pilar Dua berdasarkan pelaporan per negara terbaru dan laporan keuangan entitas konstituen Kelompok Usaha. Berdasarkan penilaian, tarif pajak efektif Pilar Dua di semua yurisdiksi tempat Kelompok Usaha beroperasi di atas 15%. Oleh karena itu, Kelompok usaha tidak mengharapkan mereka akan dikenakan pajak tambahan Pilar Dua.

26. TAXATION (continued)

c. Current Tax Expense (continued)

Except for Aruki, JTT, AST, ATI, BBE, and ADH, other subsidiaries are still in fiscal loss position.

Pillar Two Income Taxes

Various countries have enacted or intend to enact tax legislation to comply with Pillar Two model rules, including Indonesia which is governed by PMK 136/2024.

PMK 136/2024 applies new taxing mechanisms under which a Multinational Enterprises (“MNE”) would pay a top-up tax in a jurisdiction whenever the efective tax rate, determined on a jurisdictional basis under the Pillar Two rules is below a 15% minimum rate. PMK 136/2024 sets out the mechanics for determining which entity (or entities) in an MNE Group should apply the top-up tax and the portion of such tax that is charged to each relevant entity.

The Group has performed an assessment of the potential exposure to Pillar Two income taxes based on the most recent country-by-country reporting and financial statements of the Group's constituent entities. Based on the assessment, Pillar Two effective tax rates in all of the jurisdictions in which the Group operates are above 15%. Therefore, the Group does not expect that it will be subject to Pillar Two top-up taxes.

26. PERPAJAKAN (lanjutan)

d. Pajak Tangguhan

Rincian dari aset dan liabilitas pajak tangguhan Perusahaan dan Entitas Anak adalah sebagai berikut:

26. TAXATION (continued)

d. Deferred Tax

The details of the Company and its Subsidiaries' deferred tax assets and liabilities are as follows:

	1 Jan. 2025/ *Jan. 1, 2025*	Pengaruh ke laba rugi/ *Effect to profit and loss*	Pengaruh ke posisi keuangan atau ekuitas/ *Effect to financial position or equity*	31 Des. 2025/ *Dec. 31, 2025*	
Aset pajak tangguhan					*Deferred tax assets*
Perusahaan					*The Company*
Liabilitas imbalan kerja	51.184.186	(204.701)	1.351.295	52.330.780	*Employment benefits liabilities*
Cadangan penurunan nilai kerugian atas piutang usaha	21.522.249	1.232.752	-	22.755.001	*Allowance for impairment losses on trade receivables*
Akumulasi penyusutan	100.464.779	(14.492.883)	-	85.971.896	*Accumulated depreciation*
Entitas Anak	15.172.578	4.680.415	326.466	20.179.459	*Subsidiaries*
Aset pajak tangguhan - neto	**188.343.792**	**(8.784.417)**	**1.677.761**	**181.237.136**	***Deferred tax assets - net***
Liabilitas pajak tangguhan - neto	**(25.699.726)**	**(15.464.870)**	**224.906**	**(40.939.690)**	***Deferred tax liabilities - net***

	1 Jan. 2024/ *Jan. 1, 2024*	Pengaruh ke laba rugi/ *Effect to profit and loss*	Pengaruh ke posisi keuangan atau ekuitas/ *Effect to financial position or equity*	31 Des. 2024/ *Dec. 31, 2024*	
Aset pajak tangguhan					*Deferred tax assets*
Perusahaan					*The Company*
Liabilitas imbalan kerja	62.968.280	(10.886.172)	(897.922)	51.184.186	*Employment benefits liabilities*
Cadangan penurunan nilai kerugian atas piutang usaha	20.514.374	1.007.875	-	21.522.249	*Allowance for impairment losses on trade receivables*
Akumulasi penyusutan	107.234.962	(6.770.183)	-	100.464.779	*Accumulated depreciation*
Entitas Anak	10.580.234	4.627.358	(35.014)	15.172.578	*Subsidiaries*
Aset pajak tangguhan - neto	**201.297.850**	**(12.021.122)**	**(932.936)**	**188.343.792**	***Deferred tax assets - net***
Liabilitas pajak tangguhan - neto	**(18.384.131)**	**(7.096.746)**	**(218.849)**	**(25.699.726)**	***Deferred tax liabilities - net***

Manajemen berkeyakinan bahwa aset pajak tangguhan pada setiap tanggal pelaporan di atas dapat terpulihkan.

The management believes that the above deferred tax assets at each reporting date are recoverable.

26. PERPAJAKAN (lanjutan) / *26. TAXATION (continued)*

d. Pajak Tangguhan (lanjutan) / *d. Deferred Tax (continued)*

Rekonsiliasi antara beban pajak yang dihitung dengan menggunakan tarif pajak yang berlaku terhadap laba sebelum pajak penghasilan adalah sebagai berikut:

A reconciliation between tax expense and amounts computed by applying the applied tax rate to profit before income tax are as follows:

	Tahun yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember/ *Year Ended December 31,*		
	2025	**2024**	
Laba sebelum pajak final dan beban pajak penghasilan konsolidasian	3.307.520.236	2.838.907.151	*Consolidated profit before final and income tax expense*
Laba yang dikenakan pajak final	(1.144.031.547)	(866.164.342)	*Profit subject to final tax*
Laba sebelum beban pajak penghasilan konsolidasian tidak final yang dikenakan tarif pajak yang berlaku	2.163.488.689	1.972.742.809	*Consolidated profit before income tax expense non-final subject to the applicable tax rate*
Beban pajak atas laba diluar penghasilan final dengan tarif pajak yang berlaku	(475.967.512)	(434.003.417)	*Tax expense on profit subject to non-final tax at prevailing tax rates*
Dampak pajak atas:			*Tax effects of:*
Perbedaan tetap dan lainnya	17.321.715	21.119.839	*Permanent differences and other*
Beban pajak - neto	**(458.645.797)**	**(412.883.578)**	***Tax expense - net***

Pada tanggal 31 Desember 2025, Kelompok Usaha memiliki estimasi rugi pajak dari entitas anaknya yang tidak diakui sebagai aset pajak tangguhan, sebagai berikut:

As of December 31, 2025, the Group has an estimated tax losses carry forward from its subsidiaries, which is not recognized as deferred tax assets, as follows:

	Tahun Kedaluwarsa/ *Expired Year*	**Jumlah/ *Amount***	**Aset pajak tangguhan/ *Deferred tax assets***	
Tahun pajak 2025	2030	12.999.156	2.859.814	*2025 fiscal year*
Tahun pajak 2024	2029	6.669.306	1.467.247	*2024 fiscal year*
Tahun pajak 2023	2028	10.448.272	2.298.620	*2023 fiscal year*
Tahun pajak 2022	2027	28.122.764	6.187.008	*2022 fiscal year*
Tahun pajak 2021	2026	30.520.840	6.714.585	*2021 fiscal year*
Total		**88.760.338**	**19.527.274**	***Total***

27. DIVIDEN DAN PENCADANGAN UMUM

Berdasarkan Keputusan Direksi Perusahaan tanggal 24 Juli 2025 yang disetujui oleh Komisaris pada tanggal 25 Juli 2025, Perusahaan menyetujui pembagian dividen tunai interim sebesar Rp50 (dalam Rupiah penuh) per saham atau secara keseluruhan sebesar Rp989.988.480 dari laba interim tahun 2025 yang diatribusikan kepada pemilik entitas induk. Dividen ini telah dibayarkan pada tanggal 19 Agustus 2025.

Dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang diselenggarakan pada tanggal 28 April 2025, para pemegang saham Perusahaan menyetujui pembagian dividen tunai sebesar Rp1.975.281.960 atau Rp100 (dalam Rupiah penuh) per saham dari laba tahun 2024 yang diatribusikan kepada pemilik entitas induk. Sebagian dividen ini adalah dividen interim yang telah dibayarkan pada tanggal 15 Agustus 2024 sebesar Rp986.858.480 dan pada tahun 2025 sebesar Rp782.500 atau Rp50 (dalam Rupiah penuh) per saham. Dividen final sebesar Rp987.640.980 atau Rp50 per saham (dalam Rupiah penuh) telah dibayarkan pada tanggal 22 Mei 2025.

Dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan disebutkan di atas, para pemegang saham juga menyetujui pencadangan umum sebesar Rp200.000 dari laba tahun 2024.

Dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang diselenggarakan pada tanggal 29 April 2024, para pemegang saham Perusahaan menyetujui pembagian dividen tunai sebesar Rp2.467.146.200 atau Rp125 (dalam Rupiah penuh) per saham dari laba tahun 2023 yang diatribusikan kepada pemilik entitas induk. Sebagian dividen ini adalah dividen interim yang telah dibayarkan pada tanggal 16 Agustus 2023 sebesar Rp986.858.480 atau Rp50 (dalam Rupiah penuh) per saham dan pada tanggal 15 November 2023 sebesar Rp493.429.240 atau Rp25 (dalam Rupiah penuh) per saham. Dividen final sebesar Rp986.858.480 atau Rp50 per saham (dalam Rupiah penuh) telah dibayarkan pada tanggal 27 Mei 2024.

Dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan disebutkan di atas, para pemegang saham juga menyetujui pencadangan umum sebesar Rp200.000 dari laba tahun 2023.

27. DIVIDENDS AND GENERAL RESERVE

Based on Decision of the Company's Board of Directors on July 24, 2025 which was approved by the Board of Commissioners on July 25, 2025, the Company's declared interim cash dividends at Rp50 (in full Rupiah) per share or amounting Rp989,988,480 out of the 2025 interim profit, attributable to equity holders of the parent entity. This dividend has been paid on August 19, 2025.

In the Annual General Shareholders' Meeting held on April 28, 2025, the Company's shareholders approved the distribution of cash dividends of Rp1,975,281,960 or Rp100 (in full Rupiah) per share out of the 2024 profit attributable to equity holders of the parent entity. A partial portion of this dividend was paid as interim dividends amounting to Rp987,640,980 or Rp50 (in full Rupiah) per share were paid on August 15, 2024 and Rp782,500 on year 2025. Final dividends of Rp986,858,480 or Rp50 per share (in full Rupiah) have been paid on May 22, 2025.

In the Annual General Shareholder's Meeting mentioned above, the shareholders also approved the appropriation for general reserve of Rp200,000 from the profit of 2024.

In the Annual General Shareholders' Meeting held on April 29, 2024, the Company's shareholders approved the distribution of cash dividends of Rp2,467,146,200 or Rp125 (in full Rupiah) per share out of the 2023 profit attributable to equity holders of the parent entity. A partial portion of this dividend was paid as interim dividends amounting to Rp986,858,480 or Rp50 (in full Rupiah) per share were paid on August 16, 2023 and Rp493,429,240 or Rp25 (in full Rupiah) per share were paid on November 15, 2023. Final dividends of Rp986,858,480 or Rp50 per share (in full Rupiah) have been paid on May 27, 2024.

In the Annual General Shareholder's Meeting mentioned above, the shareholders also approved the appropriation for general reserve of Rp200,000 from the profit of 2023.

28. LIABILITAS IMBALAN KERJA

A. Imbalan kerja jangka pendek

Akrual mencerminkan estimasi imbalan kerja jangka pendek berupa bonus.

B. Imbalan pasca kerja

Perusahaan dan Entitas Anak di Indonesia memberikan imbalan pasca kerja yang belum didanai untuk karyawan sesuai dengan Peraturan Pemerintah yang berlaku dan kebijakan Kelompok Usaha.

a. Beban neto manfaat karyawan

28. EMPLOYMENT BENEFITS LIABILITIES

A. Short-term employee benefits

The accrual represents estimated short-term benefits i.e. bonuses.

B. Post-employment benefits

The Company and its Subsidiaries in Indonesia provide post-employment benefits for their qualifying employees in accordance with prevailing Government Regulation and the Group's policies.

a. Net employee benefits expenses

	Tahun yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember/ *Year Ended December 31,*		
	2025	**2024**	
Biaya jasa kini	20.151.073	18.993.061	*Current service cost*
Biaya bunga	12.163.022	9.971.833	*Interest cost*
Penyesuaian biaya jasa lalu	(672.840)	(2.927.389)	*Adjustment of past service cost*
Total	**31.641.255**	**26.037.505**	***Total***

b. Perubahan liabilitas imbalan pasca kerja adalah sebagai berikut:

b. Changes in post-employment benefit liabilities are as follows:

	31 Des. 2025/ *Dec. 31, 2025*	**31 Des. 2024/ *Dec. 31, 2024***	
Saldo awal	179.043.946	177.230.676	*Beginning balance*
Biaya diakui dalam laba rugi	31.641.255	26.037.505	*Expense recognized in profit or loss*
(Keuntungan) kerugian diakui dalam penghasilan komprehensif lain	6.468.599	(4.324.503)	*(Gain) loss recognized in other comprehensive income*
Imbalan yang dibayar	(7.148.762)	(19.899.732)	*Benefits paid*
Saldo akhir	**210.005.038**	**179.043.946**	***Ending balance***

28. LIABILITAS IMBALAN KERJA (lanjutan) / *28. EMPLOYMENT BENEFITS LIABILITIES (continued)*

B. Imbalan pasca kerja (lanjutan) / *B. Post-employment benefits (continued)*

c. Perubahan nilai kini kewajiban manfaat karyawan adalah sebagai berikut: / *c. Changes in present value for the benefits obligations are as follows:*

	31 Des. 2025/ *Dec. 31, 2025*	**31 Des. 2024/ *Dec. 31, 2024***	
Saldo awal tahun	179.043.946	177.230.676	*Beginning of year*
Biaya jasa kini	20.151.073	18.993.061	*Current service cost*
Biaya bunga	12.163.022	9.971.833	*Interest cost*
Imbalan yang dibayar	(7.148.762)	(19.899.732)	*Benefits paid*
Penyesuaian biaya jasa lalu	(672.840)	(2.927.389)	*Adjustment of past service cost*
(Keuntungan) kerugian aktuarial atas:			*Actuarial (gain) loss arising from:*
Perubahan asumsi finansial	10.359.246	(3.357.314)	*Changes in financial assumptions*
Penyesuaian historis	(967.362)	(967.189)	*Experience adjustment*
Penyesuaian demografis	(2.923.285)	-	*Demographic assumptions*
Saldo akhir	**210.005.038**	**179.043.946**	***Ending balance***

Akrual atas kewajiban Perusahaan dan Entitas Anak pada tanggal 31 Desember 2025 didasarkan pada perhitungan aktuaris independen, kecuali Andahanesa, BBE dan AKPI didasarkan pada perhitungan internal. Perhitungan aktuaris tersebut menggunakan metode "*Projected Unit Credit*" yang mempertimbangkan asumsi-asumsi berikut:

The costs of providing post-employment benefits of the Company and Subsidiaries as of December 31, 2025, were calculated by independent actuaries, except for Andahanesa, BBE and AKPI, were determined based on internal computation. The actuarial valuation was carried out using the "Projected Unit Credit" method with the following assumptions:

Tingkat bunga diskonto	:	5,50% - 6,75% per tahun/*per year* (31 Des. 2024/*Dec. 31, 2024:* 5,50% - 7,13%)	:	*Discount rate*
Tabel mortalitas	:	TMI 2019	:	*Mortality table*
Tingkat kenaikan gaji	:	5,00% - 7,00%	:	*Salary increase*
Umur pensiun	:	56-58 tahun untuk karyawan dan 62 tahun untuk direktur/*56-58 years for employees and 62 years for directors*	:	*Retirement age*
Tingkat cacat	:	10% dari tingkat mortalitas/*from mortality rate*	:	*Disability rate*
Tingkat pengunduran diri	:	2% atau 6% (tergantung jabatan) sampai usia 30 tahun dan akan menurun sampai 0% pada usia 2 tahun sebelum usia pensiun normal/ *2% or 6% (depends on position) up to age 30 and will decrease until 0% at the age of 2 years before retirement age*	:	*Resignation rate*

28. LIABILITAS IMBALAN KERJA (lanjutan) / 28. EMPLOYMENT BENEFITS LIABILITIES (continued)

B. Imbalan pasca kerja (lanjutan) / *B. Post-employment benefits (continued)*

Analisa sensitivitas untuk asumsi-asumsi yang signifikan pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut:

The sensitivity analysis for significant assumptions as of December 31, 2025 and 2024 are as follows:

	31 Desember 2025/*December 31, 2025*		31 Desember 2024/*December 31, 2024*		
	Kenaikan tingkat bunga diskonto/ *Increase in discount rate 1%*	**Penurunan tingkat bunga diskonto/ *Decrease in discount rate 1%***	**Kenaikan tingkat bunga diskonto/ *Increase in discount rate 1%***	**Penurunan tingkat bunga diskonto/ *Decrease in discount rate 1%***	
Dampak terhadap liabilitas imbalan pasti	(13.612.984)	15.260.611	(12.162.629)	12.795.674	*Effect on defined benefit obligation*

	31 Desember 2025/*December 31, 2025*		31 Desember 2024/*December 31, 2024*		
	Kenaikan tingkat gaji/ *Increase in salary rate 1%*	**Penurunan tingkat gaji/ *Decrease in salary rate 1%***	**Kenaikan tingkat gaji/ *Increase in salary rate 1%***	**Penurunan tingkat gaji/ *Decrease in salary rate 1%***	
Dampak terhadap liabilitas imbalan pasti	16.960.149	(15.133.892)	14.346.980	(13.689.537)	*Effect on defined benefit obligation*

Durasi rata-rata liabilitas manfaat pasca kerja diakhir periode pelaporan Kelompok Usaha berkisar antara 2,30 - 15,59 tahun.

The average duration of the Group's defined benefits plan obligation at the end of the reporting period ranging from 2.30 - 15.59 years.

Jadwal jatuh tempo dari program imbalan pasca kerja yang tidak didiskontokan pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut:

The undiscounted maturity profile of post-employment benefit obligation as of December 31, 2025 and 2024 are as follows:

	31 Des. 2025/ *Dec. 31, 2025*	**31 Des. 2024/ *Dec. 31, 2024***	
Dalam 1 tahun	22.150.264	10.295.915	*Within 1 year*
2 - 5 tahun	100.328.610	89.395.952	*2 - 5 years*
Lebih dari 5 tahun	1.025.218.076	1.008.422.150	*More than 5 years*

Manajemen berkeyakinan bahwa jumlah tersebut di atas cukup untuk memenuhi ketentuan yang berlaku pada tanggal-tanggal pelaporan.

Management believes that the above amounts are adequate to cover the requirements at reporting dates.

**PT AKR CORPORINDO TBK
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2025 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
kecuali Dinyatakan Lain)**

***PT AKR CORPORINDO TBK
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2025 and
for the Year Then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
unless Otherwise Stated)***

29. ASET DAN LIABILITAS MONETER DALAM MATA UANG ASING SELAIN RUPIAH

Kelompok Usaha memiliki aset dan liabilitas moneter yang signifikan dalam mata uang asing selain Rupiah sebagai berikut:

29. MONETARY ASSETS AND LIABILITIES DENOMINATED IN CURRENCIES OTHER THAN RUPIAH

The Group has significant monetary assets and liabilities denominated in currencies other than Rupiah as follows:

		31 Desember 2025/ *December 31, 2025*		31 Desember 2024/ *December 31, 2024*		
		Mata Uang Asing/ *Foreign Currency*	Ekuivalen dalam Rupiah/ *Equivalent in Rupiah*	Mata Uang Asing/ *Foreign Currency*	Ekuivalen dalam Rupiah/ *Equivalent in Rupiah*	
Aset						*Assets*
Kas dan setara kas	US$	139.071.367	2.333.895.675	166.039.818	2.683.535.537	*Cash and cash equivalents*
Piutang usaha						*Trade receivables*
Pihak ketiga	US$	292.099.318	4.902.010.755	204.166.953	3.299.746.300	*Third parties*
Total aset			7.235.906.430		5.983.281.837	*Total assets*
Liabilitas						*Liabilities*
Hutang usaha						*Trade payables*
Pihak ketiga	US$	349.601.200	5.867.007.345	395.278.665	6.388.493.791	*Third parties*
Biaya masih harus dibayar	US$	10.312.488	173.064.176	8.991.638	145.322.861	*Accrued expenses*
Total liabilitas			6.040.071.521		6.533.816.652	*Total liabilities*
Aset (liabilitas) neto			**1.195.834.909**		**(550.534.815)**	***Net assets (liabilities)***

Perusahaan memiliki kontrak *forward* untuk lindung nilai yang disajikan pada Catatan 33a.

The Company has outstanding forward contracts as disclosed in Note 33a.

30. LABA PER SAHAM

Berikut adalah data yang digunakan untuk perhitungan laba per saham:

30. EARNINGS PER SHARE

The computation of profit per share is based on the following data:

	Tahun yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember/ *Year Ended December 31,*		
	2025	2024	
Laba tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk	2.472.616.076	2.225.117.975	*Profit for the year attributable to equity holders of the parent entity*
Jumlah rata-rata tertimbang saham biasa - dasar	19.742.486.312	19.738.498.778	*Weighted average number of common shares - basic*
Laba per saham (dalam Rupiah penuh) Yang diatribusikan kepada pemilik entitas induk			*Earnings per share (in full Rupiah) Attributable to the equity holders of the parent entity*
Dasar	125,24	112,73	*Basic*

31. TRANSAKSI DAN SALDO DENGAN PIHAK-PIHAK BERELASI

Dalam kegiatan usaha normal, Perusahaan dan Entitas Anak melakukan transaksi dengan pihak-pihak berelasi, dan diringkas sebagai berikut ini:

31. NATURE OF RELATIONSHIP AND TRANSACTIONS WITH RELATED PARTIES

The Company and its Subsidiaries, in their regular conduct of business, have engaged in transactions with related parties, and summarized as follows:

Pihak berelasi/ *Related parties*	Jenis transaksi/ *Type of transaction*	Total transaksi/ *Total transactions*	Saldo/ *Balances*
Transaksi dengan entitas di bawah pengendalian yang sama/ *Transactions with entities under common control*			
PT Komersial Logistik Nusantara	Sewa kantor/ *Office rent*	Rp24.000 di/*in* 2025 dan/*and* 2024	-
Persentase terhadap laba neto tahun berjalan/*net profit for the year*			0.0%
PT AKR Land Development dan Entitas Anak/ *Subsidiaries*	*Service charge* kepada Perusahaan dan Entitas Anak/ *Service charge to the Company and Subsidiaries*	Rp6.141.203 di/in 2025 (2024: Rp6.097.978)	-
Persentase terhadap beban usaha/*Percentage to operating expenses*			0.6%
	Penjualan bahan bakar minyak (BBM)/*Petroleum sales*	Rp278.240 di/*in* 2025 (2024: Rp485.017) (Catatan/*Note* 23)	Rp124.027 pada tanggal 31 Des. 2025/*as of Dec. 31, 2025* (31 Des. 2024/*as of Dec. 31, 2024*: Rp106.000) (Catatan/*Note* 5a)
Persentase terhadap penjualan/*Percentage to sales*			0.0%
	Pendapatan transportasi/ *Transportation revenue*	Rp4.200 di/*in* 2025 (2024: Rp8.800) (Catatan/*Note* 23)	Rp1.600 pada tanggal 31 Des. 2025/*as of Dec. 31, 2025* (31 Des. 2024/*as of Dec. 31, 2024*: Rp1.616) (Catatan/*Note* 5a*)*
Persentase terhadap pendapatan/*Percentage to revenues*			0.0%
	Jual beli tanah/ *Sale and purchase of land*	-	Rp54.828.597 pada tanggal 31 Des. 2025/*as of Dec. 31, 2025* dan/*and* 31 Des. 2024/*Dec. 31, 2024*
Persentase terhadap liabilitas/*Percentage to liability*			0.3%

Perusahaan telah melakukan Keterbukaan Informasi melalui Surat No. 061/L-AKR-CS/2024 pada tanggal 19 Juni 2024 terkait pembelian ruang kantor dari PT AKR Land Development ke OJK dan BEI. Transaksi telah dilakukan di bulan September 2024 dengan nilai wajar sesuai dengan keterangan dalam surat keterbukaan informasi.

The Company has made the Disclosure of Information in its Letter No. 061/L-AKR-CS/2024 dated June 19, 2024 to OJK and IDX related to the office purchase to PT AKR Land Development. The transaction has been executed in September 2024 at fair value as stated in the disclosure of information.

31. TRANSAKSI DAN SALDO DENGAN PIHAK-PIHAK BERELASI (lanjutan)

Dalam kegiatan usaha normal, Perusahaan dan Entitas Anak melakukan transaksi dengan pihak-pihak berelasi, dan diringkas sebagai berikut ini: (lanjutan)

31. NATURE OF RELATIONSHIP AND TRANSACTIONS WITH RELATED PARTIES (continued)

The Company and its Subsidiaries, in their regular conduct of business, have engaged in transactions with related parties, and summarized as follows: (continued)

Pihak berelasi/ *Related parties*	Jenis transaksi/ *Type of transaction*	Total transaksi/ *Total transactions*	Saldo/ *Balances*
Transaksi dengan entitas asosiasi/ *Transactions with an associate*			
PT Berlian Manyar Sejahtera	Penjualan bahan bakar minyak (BBM)/*Petroleum sales*	Rp433.924 di/*in* 2025 (2024: Rp1.169.559) (Catatan/*Note* 23)	Rp22.795 pada tanggal 31 Des. 2025/*Dec 31, 2025* (31 Des. 2024/*Dec. 31, 2024*: Rp835.861) (Catatan/*Note* 5a)
Persentase terhadap penjualan/*Percentage to sales*			0.0%
	Management fee kepada Perusahaan dan Entitas Anak/ *Management fee to the Company and Subsidiaries*	Rp1.519.500 di/*in* 2025 (2024: Rp3.578.736)	Rp158.346 pada tanggal 31 Des. 2025/Dec. 31, *2025* (31 Des. 2024/*Dec. 31, 2024*: RpNil) (Catatan/*Note* 5b)
Persentase terhadap laba neto tahun berjalan/*Percentage to net profit for the year*			0.0%
	Sewa tanah/ *Land lease*	Rp2.893.598 di/*in* 2025 (2024: Rp2.844.703)	RpNil pada tanggal 31 Des. 2025/*Dec. 31, 2025* (31 Des. 2024/*Dec. 31, 2024*: Rp2.133.528)
Persentase terhadap aset/*Percentage to assets*			0.0%

Semua transaksi-transaksi di atas secara individu tidak melebihi 1% dari jumlah konsolidasian.

All the above transactions individually are less than 1% of total consolidated amounts.

Transaksi-transaksi dengan pihak-pihak berelasi dilakukan dengan persyaratan dan kondisi yang disepakati antara para pihak.

The transactions with the related parties are made on terms and conditions as agreed among the parties.

Manajemen berpendapat tidak diperlukan cadangan kerugian penurunan nilai atas kemungkinan tidak tertagihnya piutang dari pihak berelasi.

Management believes that no allowance for impairment losses on related party receivables is required to cover possible losses on uncollectible accounts.

31. TRANSAKSI DAN SALDO DENGAN PIHAK-PIHAK BERELASI (lanjutan)

Kompensasi manajemen kunci

Manajemen kunci termasuk Dewan Komisaris dan Direksi Perusahaan. Rincian atas kompensasi yang diberikan adalah sebagai berikut:

31. NATURE OF RELATIONSHIP AND TRANSACTIONS WITH RELATED PARTIES (continued)

Key management compensation

Key management includes the Company's Boards of Commissioners and Directors. The details of compensation provided are as follows:

Dewan Komisaris / *Board of Commissioners*

	Tahun yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember/ *Year Ended December 31,*		
	2025	**2024**	
Imbalan jangka pendek	19.736.629	24.366.897	*Short-term benefits*

Direksi / *Board of Directors*

	Tahun yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember/ Year Ended December 31,		
	2025	**2024**	
Imbalan jangka pendek	86.150.001	107.379.782	*Short-term benefits*
Imbalan pasca kerja	2.348.551	2.326.944	*Post-employment benefits*
Total	**88.498.552**	**109.706.726**	***Total***

32. INFORMASI SEGMEN

Aktivitas usaha Perusahaan dan Entitas Anak dibagi atas empat (4) segmen operasi utama dan melayani pasar domestik dan internasional.

Segmen operasi adalah sebagai berikut:

- Perdagangan dan distribusi

  Segmen ini mendistribusikan produk BBM dan beragam jenis bahan-bahan kimia dasar seperti *caustic soda*, sodium sulfat, PVC resin dan *soda ash*.

- Jasa logistik

  Segmen ini menyediakan beragam jasa logistik seperti penyewaan tangki penyimpanan dan gudang, jasa pengepakan, bongkar muat dan jasa transportasi darat dan laut, terutama untuk produk-produk kimia cair dan padat di Indonesia serta produk BBM di Indonesia.

- Pabrikan

  Segmen ini memproduksi bahan perekat oleh Aruki.

32. SEGMENT INFORMATION

The Company's and Subsidiaries' businesses are divided into four (4) main operating segments and serve the local and international market.

The operating segments are as follows:

- *Trading and distribution*

  This segment distributes petroleum products and various kinds of basic chemicals such as caustic soda, sodium sulphate, PVC resin and soda ash.

- *Logistics services*

  This segment provides various kinds of logistics services such as rental of storage tanks and warehouses, bagging, port handling and land and sea transportation services mainly for liquid and solid chemical and petroleum products in Indonesia.

- *Manufacturing*

  This segment produces adhesive materials by Aruki.

32. INFORMASI SEGMEN (lanjutan)

Segmen operasi adalah sebagai berikut: (lanjutan)

- Kawasan industri dan jasa utilitas lainnya yang terkait

  Segmen ini merupakan segmen Kelompok Usaha di bawah BKMS, entitas anak yang dimiliki secara tidak langsung lewat UEPN. Kawasan industri ini adalah bagian dari proyek JIIPE (Catatan 13) yang dikembangkan antara BKMS dan BJTI, entitas anak dari Pelindo. Segmen ini terdiri dari penjualan dan penyewaan tanah kawasan industri, penjualan listrik dan jasa terkait lainnya kepada *tenants* kawasan tersebut.

Manajemen memantau hasil operasi dari unit usahanya secara terpisah guna keperluan pengambilan keputusan mengenai alokasi sumber daya dan penilaian kinerja. Kinerja segmen dievaluasi berdasarkan laba atau rugi operasi dan diukur secara konsisten dengan laba atau rugi operasi pada laporan keuangan konsolidasian.

Tabel berikut ini menyajikan informasi pendapatan dan laba dan aset dan liabilitas tertentu sehubungan dengan segmen operasi Kelompok Usaha:

32. SEGMENT INFORMATION (continued)

The operating segments are as follows: (continued)

- *Industrial estate and related utility services*

  This segment of the Group is under BKMS, an indirect subsidiary of the Company through UEPN. The industrial estate is part of JIIPE project (Note 13) developed together by BKMS and BJTI, a subsidiary of Pelindo. The segment comprises of sales and lease of industrial estate land, sales of electricity and other related services to tenants of the estate.

Management monitors the operating results of its business units separately for the purpose of making decisions about resource allocation and performance assessment. Segment performance is evaluated based on operating profit or loss and is measured consistently with operating profit or loss in the consolidated financial statements.

The following table presents revenue and profit, and certain asset and liability information regarding the Group's operating segments:

**31 Desember 2025/*December 31, 2025* dan/*and*
tahun yang berakhir tanggal tersebut/*the year then ended***

	Perdagangan dan distribusi/ *Trading and distribution*	Pabrikan/ *Manufacturing*	Logistik/ *Logistics*	Kawasan industri/ *Industrial estate*	Lainnya/ *Others*	Total/ *Total*	Penyesuaian/ Eliminasi/ *Adjustments/ Eliminations*	Neto/ *Net*	
Pendapatan dari kontrak dengan pelanggan	41.314.414.359	464.361.072	1.406.441.722	2.547.323.703	-	45.732.540.855	-	45.732.540.855	*Revenue from contract with customers*
Pendapatan sewa	-	-	92.200.698	193.726.519	-	285.927.217	-	285.927.217	*Rental income*
Pendapatan antar segmen	276.711.812	-	530.340.385	9.666.410	-	816.718.607	(816.718.607)	-	*Inter-segment sales*
	41.591.126.171	**464.361.072**	**2.028.982.804**	**2.750.716.632**	**-**	**46.835.186.679**	**(816.718.607)**	**46.018.468.072**	
Penyusutan	181.657.308	6.643.166	227.261.639	37.999.382	-	453.561.495	1.245.775	454.807.270	*Depreciation*
Bagian atas laba entitas asosiasi	-	-	52.199.723	-	-	52.199.723	-	52.199.723	*Share in profit of associates*
Penghasilan keuangan - neto	256.475.907	3.817.641	10.624.846	65.654.550	-	366.572.944	(91.286.085)	245.286.859	*Finance income - net*
Beban keuangan	(83.439.319)	(244.352)	(23.652.985)	(5.230.017)	(2.038.099)	(114.604.772)	40.836.847	(73.767.925)	*Finance costs*
Laba (rugi) segmen	2.517.109.533	73.270.987	406.185.563	776.787.125	(2.076.453)	3.771.276.755	(463.756.519)	3.307.520.236	*Segment profit (loss)*
Aset segmen	13.209.947.067	335.507.664	4.114.938.303	13.653.835.316	42.599.242	31.356.827.592	5.205.453.665	36.562.281.257	*Segment assets*
Liabilitas segmen	13.489.041.836	34.794.441	222.537.889	7.285.146.479	40.924.660	21.072.445.305	(120.113.517)	20.952.331.788	*Segment liabilities*
Penambahan aset tetap	458.172.008	17.924.906	202.588.954	217.885.081	-	896.570.949	-	896.570.949	*Additions to property, plant and equipment*

32. INFORMASI SEGMEN (lanjutan)

Tabel berikut ini menyajikan informasi pendapatan dan laba dan aset dan liabilitas tertentu sehubungan dengan segmen operasi Kelompok Usaha: (lanjutan)

32. SEGMENT INFORMATION (continued)

The following table presents revenue and profit, and certain asset and liability information regarding the Group's operating segments: (continued)

31 Desember 2024/*December 31, 2024* dan/*and* tahun yang berakhir tanggal tersebut/*the year then ended*

	Perdagangan dan distribusi/ *Trading and distribution*	Pabrikan/ *Manufacturing*	Logistik/ *Logistics*	Kawasan industri/ *Industrial estate*	Lainnya/ *Others*	Total/ *Total*	Penyesuaian/ Eliminasi/ *Adjustments/ Eliminations*	Neto/ *Net*	
Pendapatan dari kontrak dengan pelanggan	35.532.248.951	651.720.510	1.077.748.046	1.195.408.537	-	38.457.126.044	-	38.457.126.044	*Revenue from contract with customers*
Pendapatan sewa	-	-	87.258.660	185.108.594	-	272.367.254	-	272.367.254	*Rental income*
Pendapatan antar segmen	293.723.964	-	446.085.669	-	-	739.809.633	(739.809.633)	-	*Inter-segment sales*
	35.825.972.915	**651.720.510**	**1.611.092.375**	**1.380.517.131**	**-**	**39.469.302.931**	**(739.809.633)**	**38.729.493.298**	
Penyusutan	172.832.766	7.186.451	212.475.176	22.603.261	-	415.097.654	1.245.775	416.343.429	*Depreciation*
Bagian atas laba entitas asosiasi	-	-	46.467.083		-	46.467.083	-	46.467.083	*Share in profit of associates*
Penghasilan keuangan - neto	285.415.426	4.657.621	9.700.267	94.394.444	-	394.167.758	(95.283.661)	298.884.097	*Finance income - net*
Beban keuangan	(98.128.056)	(16.248)	(23.699.859)	(28.660.269)	(2.513.219)	(153.017.651)	68.108.540	(84.909.111)	*Finance costs*
Laba (rugi) segmen	2.231.274.772	154.462.683	286.730.148	524.958.053	(2.610.180)	3.194.815.476	(355.908.325)	2.838.907.151	*Segment profit (loss)*
Aset segmen	11.705.359.539	377.797.547	3.658.626.343	12.798.290.626	42.653.746	28.582.727.801	4.525.956.567	33.108.684.368	*Segment assets*
Liabilitas segmen	11.004.246.246	43.667.813	45.392.084	7.357.071.127	40.403.652	18.490.780.922	(6.089.028)	18.484.691.894	*Segment liabilities*
Penambahan aset tetap	573.336.690	1.599.207	482.080.884	208.537.434	-	1.265.554.215	-	1.265.554.215	*Additions to property, plant and equipment*

Beberapa akun tertentu tidak dialokasikan ke segmen individual karena akun-akun tersebut dikelola secara kelompok di mana rekonsiliasinya disajikan di bawah:

Certain accounts are not allocated to individual segments as those accounts are managed on a group basis which reconciliations are shown belows:

Rekonsiliasi atas: / *Reconciliation of:*

	Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember/ *Year Ended December 31,*		
	2025	**2024**	
Laba segmen	3.771.276.755	3.194.815.476	*Segment profit*
Eliminasi antar segmen	(53.048.913)	(23.629.008)	*Inter-segment eliminations*
Beban penjualan	(48.673.613)	(34.120.243)	*Selling expenses*
Beban umum dan administrasi	(595.706.434)	(533.769.430)	*General and administratives expenses*
Penghasilan keuangan	239.819.380	273.810.521	*Finance income*
Beban keuangan	(42.970.326)	(74.355.128)	*Finance costs*
Laba (rugi) selisih kurs - neto	(89.015)	1.562.004	*Foreign exchange gain (loss) - net*
Lain-lain	36.912.402	34.592.959	*Others*
Laba Kelompok Usaha	**3.307.520.236**	**2.838.907.151**	***Group Segment Profit***

32. INFORMASI SEGMEN (lanjutan)

Beberapa akun tertentu tidak dialokasikan ke segmen individual karena akun-akun tersebut dikelola secara kelompok di mana rekonsiliasinya disajikan di bawah: (lanjutan)

Rekonsiliasi atas: (lanjutan)

32. SEGMENT INFORMATION (continued)

Certain accounts are not allocated to individual segments as those accounts are managed on a group basis which reconciliations are shown belows: (continued)

Reconciliation of: (continued)

	31 Des. 2025/ *Dec. 31, 2025*	31 Des. 2024/ *Dec. 31, 2024*	
Aset segmen	31.350.659.475	28.582.727.801	*Segment assets*
Eliminasi antar segmen	(1.514.499.248)	(1.328.271.564)	*Inter-segment eliminations*
Kas dan setara kas	5.096.357.756	4.225.823.761	*Cash and cash equivalents*
Aset lain-lain	812.183.926	808.126.273	*Other assets*
Aset tetap - neto	799.282.992	794.552.081	*Property, plant and equipment - net*
Piutang lain-lain	18.296.356	25.726.016	*Other receivables*
Aset Operasi Kelompok Usaha	**36.562.281.257**	**33.108.684.368**	***Group Operating Assets***

	31 Des. 2025/ *Dec. 31, 2025*	31 Des. 2024/ *Dec. 31, 2024*	
Liabilitas segmen	21.039.121.330	18.465.081.196	*Segment liabilities*
Eliminasi antar segmen	(813.876.441)	(599.010.701)	*Inter-segment eliminations*
Hutang lain-lain dan biaya masih harus dibayar	387.689.685	372.039.492	*Other payables and accrued expenses*
Liabilitas imbalan pasca kerja	147.976.198	126.472.041	*Post-employment benefits liabilities*
Hutang pajak	150.481.318	94.410.140	*Taxes payable*
Liabilitas pajak tangguhan	40.939.698	25.699.726	*Deferred tax liabilities*
Liabilitas Operasi Kelompok Usaha	**20.952.331.788**	**18.484.691.894**	***Group Operating Liabilities***

Semua unit Kelompok Usaha, beroperasi di Indonesia.

All the business units in the Group, operate in Indonesia.

33. PERJANJIAN PENTING, IKATAN, DAN LIABILITAS KONTINJENSI

Perusahaan

a. Pada tanggal 31 Desember 2025, Perusahaan memiliki kontrak *forward* dari beberapa bank di bawah ini. Tujuan penandatanganan kontrak ini adalah untuk lindung nilai dari risiko fluktuasi mata uang Dolar AS terhadap Rupiah yang berasal dari pembayaran kepada pemasok. Semua kontrak tersebut memiliki periode jatuh tempo kurang dari tiga bulan. Jumlah bersih nilai wajar keseluruhan kontrak tersebut sebesar Rp4.321.802 disajikan pada akun hutang lain-lain pada laporan posisi keuangan konsolidasian tanggal 31 Desember 2025 dan perubahan nilai wajar sebesar jumlah yang sama disajikan pada akun laba selisih kurs pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian. Perusahaan tidak menerapkan akuntansi lindung nilai untuk kontrak *forward* tersebut.

33. SIGNIFICANT AGREEMENTS, COMMITMENTS, AND CONTINGENT LIABILITY

The Company

a. As of December 31, 2025, the Company has outstanding forward contracts from several banks below. The purpose of entering those contracts is to hedge the US Dollar currency movement risk against Rupiah arising from the payments to its suppliers. All the contracts have a maturity date of less than three months period. The net total fair values of those contracts amounting to Rp4,321,802 are presented as other payables in the consolidated statement of financial position on December 31, 2025 and the net changes in fair values at the same amount are presented as foreign exchange gain in the consolidated statement of profit or loss and other comprehensive income. The Company's forward contracts are not accounted for under hedge accounting.

	Nilai nominal/ *Nominal value* (dalam Dolar AS/ *in US Dollar*)	**Nilai wajar/ *Fair value* (dalam Rupiah/ *in Rupiah*)**	
PT Bank Central Asia Tbk	25.700.000	(1.432.501)	*PT Bank Central Asia Tbk*
PT Bank Danamon Indonesia Tbk	19.000.000	(1.124.660)	*PT Bank Danamon Indonesia Tbk*
PT Bank Permata Tbk	14.700.000	(1.076.260)	*PT Bank Permata Tbk*
PT Bank Rakyat Indonesia Tbk	8.200.000	(226.182)	*PT Bank Rakyat Indonesia Tbk*
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	3.000.000	(199.093)	*PT Bank Mandiri (Persero) Tbk*
PT Bank CIMB Niaga Tbk	3.000.000	(169.206)	*PT Bank CIMB Niaga Tbk*
PT Bank Mizuho Indonesia	2.000.000	(93.900)	*PT Bank Mizuho Indonesia*
Total	**75.600.000**	**(4.321.802)**	***Total***

b. Perusahaan memiliki perjanjian distribusi dengan PT Asahimas Chemical (Asahimas) dimana Asahimas telah menunjuk Perusahaan sebagai penyalur untuk produk-produk kimia Asahimas di Indonesia. Perjanjian ini berlaku satu tahun dan diperbaharui secara tahunan kecuali jika dihentikan oleh kedua belah pihak dengan pemberitahuan tertulis lebih dahulu.

Sehubungan dengan perjanjian di atas, Perusahaan diharuskan untuk menerbitkan bank garansi (*payment bonds*) kepada Asahimas sebesar Rp32.000.000. Bank garansi tersebut akan dipegang oleh Asahimas sampai dengan perjanjian tersebut dihentikan oleh kedua belah pihak. Bank garansi tersebut dikeluarkan oleh Mandiri (Catatan 33h).

b. The Company has a dealership agreement with PT Asahimas Chemical (Asahimas) whereby Asahimas has appointed the Company as the dealer of Asahimas chemical products in Indonesia. The agreement is valid for a one-year period and is renewable on a yearly basis unless terminated by both parties with prior written notice.

In connection with the above agreement, the Company is required to issue a bank guarantee (payment bonds) to Asahimas amounting to Rp32,000,000. Such a bank guarantee will be held by Asahimas until the dealership agreement is terminated by both parties. The bank guarantee was provided by Mandiri (Note 33h).

33. PERJANJIAN PENTING, IKATAN, DAN LIABILITAS KONTINJENSI (lanjutan)

Perusahaan (lanjutan)

c. Perusahaan mengadakan perjanjian sewa tanah jangka panjang dengan PT Pelabuhan Indonesia (Persero) ("Pelindo") di pelabuhan Tanjung Priok dan pelabuhan lainnya dimana tangki-tangki penyimpanan milik Perusahaan berada. Masa sewa akan berakhir pada tahun 2026 hingga 2034 dan untuk yang berakhir di tahun 2026 sedang dalam proses perpanjangan. Saldo yang belum diamortisasi atas hak sewa tanah sebesar Rp65.144.072 pada tanggal 31 Desember 2025 (2024: Rp69.979.287) dicatat sebagai bagian dari "Aset hak-guna" (Catatan 11).

d. Pada tanggal 31 Desember 2025, Perusahaan memiliki *acceptance* dan *open L/C* sebesar US$79.213.092 dan Rp265.912.231 serta *Payable Services* sebesar US$192.701.851 dan Rp3.398.370.687 dari beberapa bank.

Pada tanggal 31 Desember 2025, Perusahaan juga memiliki bank garansi sebesar Rp38.178.870 dari Mandiri.

e. Pada tanggal 29 Desember 2025, Perusahaan telah ditunjuk kembali oleh Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi ("BPH Migas") sebagai pendamping dari PT Pertamina (Persero) (PERTAMINA) untuk penyediaan dan pendistribusian minyak solar sebanyak 181.000 kiloliter di tahun 2026 yang mencakup wilayah Sumatera, DKI Jakarta, Banten, Jawa dan Kalimantan berdasarkan Surat Keputusan dari Kepala BPH Migas No. 95/P3JBT.KOM/BPH.DBBM/2025.

Sehubungan dengan penunjukan di atas, Perusahaan telah menandatangani perjanjian dengan pihak-pihak lain (operator) dari waktu ke waktu sejak bulan Desember 2009 untuk membuka SPBU di area yang dialokasikan ke Perusahaan berdasarkan surat penunjukan. Terdapat beberapa jenis perjanjian yang ditawarkan kepada pihak-pihak tersebut sehubungan dengan pengoperasian stasiun penyalur seperti jenis "*dealer owns dealer operates"* dan *"company owns dealer operates"*. Pompa dispenser BBM untuk stasiun penyalur disediakan oleh Perusahaan dengan sistem pinjam tanpa biaya dan harus dikembalikan kepada Perusahaan pada akhir perjanjian.

33. SIGNIFICANT AGREEMENTS, COMMITMENTS, AND CONTINGENT LIABILITY (continued)

The Company (continued)

c. The Company entered into several long-term land lease agreements with PT Pelabuhan Indonesia (Persero) ("Pelindo") in Tanjung Priok and other port areas where the Company's storage tanks are located. The lease agreements will expire from 2026 to 2034, and those expired in 2026 are in progress of renewal. The balance of unamortized land lease rights of Rp65,144,072 as of December 31, 2025 (2024: Rp69,979,287) is recorded as part of "Right-of-use assets" (Note 11).

d. As of December 31, 2025, the Company has acceptance and open L/C amounting to US$79,213,092 and Rp265,912,231 as well as Payable Services amounting to US$192,701,851 and Rp3,398,370,687 from several banks.

As of December 31, 2025, the Company also has an outstanding bank guarantee amounting to Rp38,178,870 from Mandiri.

e. On December 29, 2025, the Company has been reappointed by Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi ("BPH Migas") as the partner of PT Pertamina (Persero) (PERTAMINA) in the supply and distribution of gas oil with a total of 181,000 kiloliters in 2026 which covers an area of Sumatera, DKI Jakarta, Banten, Java and Kalimantan, based on the Decision Letters of the Chairman of BPH Migas No. 95/P3JBT.KOM/BPH.DBBM/2025.

In relation to the appointment above, the Company has entered into agreements with other parties (operators) from time to time since December 2009 to open SPBU in the area allocated to the Company based on the appointment letter. There are several types of arrangement offered to the parties in relation to the operations of the gas stations such as "dealer owns dealer operates" type and "company owns dealer operates" type. The oil pump dispenser for the gas station in all types of arrangement are supplied by the Company on loan basis at no cost and shall be returned to the Company at the end of the agreement.

The original consolidated financial statements included herein are in the Indonesian language.

33. PERJANJIAN PENTING, IKATAN, DAN LIABILITAS KONTINJENSI (lanjutan)

Perusahaan (lanjutan)

Perjanjian dengan operator dari SPBU berkisar antara 10 sampai 20 tahun dengan pembayaran kompensasi yang dihitung tergantung jumlah penjualan di masa yang akan datang, namun dapat dihentikan lebih awal tergantung dari kondisi tertentu, yang berhubungan dengan kepatuhan operator terhadap ketentuan yang dipersyaratkan dalam perjanjian untuk pengoperasian SPBU.

Perusahaan juga memiliki dan mengoperasikan SPBU yang dikenal dengan jenis "*company owns company operates*".

Perusahaan berhak menerima pembayaran penggantian subsidi dari harga jual dari Pemerintah berdasarkan ketentuan yang berlaku. Jumlah penyaluran minyak solar yang diakui adalah sebesar Rp1.752.754.788 untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 (2024: Rp1.709.434.235), termasuk subsidi yang diklaim ke Kementerian Keuangan.

f. Pada tanggal 31 Desember 2025, Perusahaan telah menandatangani kesepakatan kerja atas pekerjaan pembangunan fasilitas dermaga, fasilitas tangki penyimpanan dan lainnya dengan kontraktor dan memiliki komitmen pengeluaran modal untuk aset tetap sekitar Rp68.777.100 (2024: Rp151.344.517).

g. Pada tahun 2007, Perusahaan memperoleh fasilitas kredit tanpa jaminan dengan dasar uncommitted dari JP Morgan Chase Bank N.A., Cabang Jakarta, dengan jumlah maksimum kredit adalah sebesar US$30.000.000, untuk fasilitas *L/C*, *Payable Financing* dan *Trust Receipt*. Fasilitas ini telah ditutup per tanggal 11 November 2025.

33. SIGNIFICANT AGREEMENTS, COMMITMENTS, AND CONTINGENT LIABILITY (continued)

The Company (continued)

The agreements with the operators of SPBU range from 10 to 20 years with compensation computed dependent on the sales quantity in the future and can be terminated early dependent on certain conditions, among others. related to the compliance of the operators with the provisions in the agreements in operating SPBUs.

The Company also owns and operates SPBU known as "company owns company operates" type.

The Company is entitled to receive the subsidized portion of the selling price from the Government based on the applicable ruling. Total distribution amounts of gas oil and gasoline recognized amounted RpRp1,752,754,788 for the year ended December 31, 2025 (2024: Rp1,709,434,235), including the subsidy claimed to Ministry of Finance.

f. As of December 31, 2025, the Company has signed an agreement for constructions of jetty, storage and other facilities with contractors and has committed capital expenditure for property, plant and equipment approximately Rp68,777,100 (2024: Rp151,344,517).

g. In 2007, the Company obtained unsecured and uncommitted credit facilities from JP Morgan Chase Bank N.A., Jakarta Branch, with maximum facility amount US$30,000,000, for issuance of L/C, Payable Financing and Trust Receipt. These facilities have been closed as of November 11, 2025.

33. PERJANJIAN PENTING, IKATAN, DAN LIABILITAS KONTINJENSI (lanjutan)

Perusahaan (lanjutan)

h. Pada tanggal 11 November 2009, Perusahaan menandatangani perjanjian pinjaman dengan Mandiri, dimana Mandiri setuju untuk menyediakan tiga fasilitas kredit (termasuk fasilitas pinjaman berjangka yang disajikan pada Catatan 18) kepada Perusahaan. Fasilitas tersebut digunakan untuk pembelian produk bahan bakar minyak (BBM) dan bahan kimia, transaksi lindung nilai (*hedging*) dan keperluan tender proyek dan fasilitas ini tersedia untuk jangka waktu satu tahun dari tanggal penandatanganan perjanjian. Perjanjian ini telah diamendemen pada bulan November 2025 dengan penambahan sublimit fasilitas NCL-UPAS Non DC di fasilitas Pinjaman Non-Kas.

Fasilitas yang tersedia adalah sebagai berikut:
i) Fasilitas Pinjaman Non-Kas sebesar US$450.000.000, dengan beberapa *sub-limit* untuk fasilitas LC/SKBDN, *T/R* atas dasar *L/C*, *Standby L/C ("SBLC"), Deferred Payment, NCL-UPAS Non DC* dan *Global line berupa plafond L/C yang* dapat digunakan oleh CPIT, entitas anak Perusahaan, dengan jumlah tertentu;
ii) Fasilitas Bank Garansi sebesar US$100.000.000;
iii) Fasilitas *hedging FX* sebesar US$50.000.000.

Fasilitas telah diperpanjang sampai dengan tanggal 9 November 2027.

i. Perusahaan memiliki fasilitas pinjaman dari Permata yang mencakup:
i) Fasilitas *Revolving Loan* yang bersifat *uncommitted* sebesar Rp200.000.000;
ii) Fasilitas transaksi valuta asing dengan *LER* sebesar US$20.000.000;
iii) Fasilitas *Omnibus L/C* Impor, yang terdiri dari fasilitas *L/C* dan SKBDN, *CBN Discrepant*, Bank Garansi dan *Payable Services,* dengan total *limit* US$300.000.000.
iv) Fasilitas *Payable Services* dengan limit US$200.000.000.

Fasilitas ini tersedia sampai dengan tanggal 7 Oktober 2028.

33. SIGNIFICANT AGREEMENTS, COMMITMENTS, AND CONTINGENT LIABILITY (continued)

The Company (continued)

h. On November 11, 2009, the Company signed loan agreements with Mandiri, whereby Mandiri agreed to provide three credit facilities (including the term loan facility as disclosed in Note 18) to the Company. These facilities are intended for purchase of petroleum and chemical products, hedging and tender projects and are available for one year from the signing date. This agreement has been amended in November 2025 with an addition of a sublimit for the NCL-UPAS Non DC facility in the non-cash loan facility.

The facilities available are as follows:
i) Non-Cash Loan at US$450,000,000, with various sub-limit for LC/SKBDN, T/R facility base on L/C, Standby L/C ("SBLC") facility Deferred Payment, NCL-UPAS Non DC and also available a Global line (L/C plafond) for CPIT, the Company's subsidiary, at certain limit;
ii) Bank Guarantee facility at US$100,000,000;
iii) Hedging FX facility at US$50,000,000.

This agreement has been extended until November 9, 2027.

i. The Company obtained loan facilities from Permata comprising of:
i) Uncommitted Revolving Loan facility amounting to Rp200,000,000;
ii) Foreign exchange facility with LER amounting to US$20,000,000;
iii) Facilities of Omnibus L/C Import consisting of L/C and SKBDN, CBN Discrepant, Bank Guarantee and Payable Services Facility, with a total limit US$300,000,000.
iv) Payable Services facility amounting to US$200,000,000.

These facilities are available until October 7, 2028.

33. PERJANJIAN PENTING, IKATAN, DAN LIABILITAS KONTINJENSI (lanjutan)

Perusahaan (lanjutan)

j. Pada tanggal 15 Agustus 2022, Perusahaan menandatangani perjanjian pinjaman dengan BNI. Pada 14 Agustus 2025, Perusahaan dan BNI melakukan perubahan atas Perjanjian Kredit, dimana BNI setuju untuk menyediakan fasilitas kredit berupa:

i) Fasilitas kredit tidak langsung sebesar US$200.000.000 dengan *sub-limit* Fasilitas *SCF-Payable Financing plafond L/C*, SKBDN, Bank Garansi, *Trust Receipt*;
ii) Fasilitas *Limit* Negosiasi Wesel Ekspor ("LNWE") sebesar US$25.000.000; dan
iii) Fasilitas *Treasury Line* sebesar US$5.000.000.

Perjanjian ini juga mensyaratkan Perusahaan, antara lain untuk mempertahankan rasio keuangan tertentu. Perjanjian kredit ini berlaku sampai dengan tanggal 14 Agustus 2026.

k. Pada tanggal 15 Desember 2022 yang telah diubah dari waktu ke waktu, Perusahaan menandatangani perjanjian pinjaman dengan PT Bank Mizuho Indonesia (Mizuho) dengan *limit* untuk fasilitas *Import L/C* sebesar US$100.000.000 dengan rincian:

i) Fasilitas *Import* L/C/*Acceptance/ Trust Receipt/Export L/C*, Bank Garansi, *Revolving Loan* sebesar US$100.000.000;

ii) Fasilitas *Forex Line* sebesar US$10.000.000.

Perjanjian ini juga mensyaratkan Perusahaan, antara lain untuk mempertahankan rasio keuangan tertentu. Perjanjian kredit ini berlaku sampai dengan tanggal 15 Desember 2026.

33. SIGNIFICANT AGREEMENTS, COMMITMENTS, AND CONTINGENT LIABILITY (continued)

The Company (continued)

j. On August 15, 2022, the Company signed several loan agreements with BNI. On August 14, 2025, the Company signed amendment of Loan Agreement with BNI, where BNI agreed to provide the following credit facilities:

i) Indirect Credit Agreement at US$200,000,000 with sub-limit SCF-Payable Financing facilities L/C, SKBDN, Bank Guarantee and Trust Receipt;
ii) Limit Negotiation Wesel Export ("LNWE") facility at US$25,000,000; and
iii) Treasury Line Facility at US$5,000,000.

These loan agreements also require the Company, among others, to maintain several financial ratios. These loan agreements are valid until August 14, 2026.

k. On December 15, 2022 which has been amended from time to time, the Company signed loan agreements with PT Bank Mizuho Indonesia (Mizuho) with a limit for the Import L/C of US$100,000,000, with details:

i) Import L/C/Acceptance/ Trust Receipt/Export L/C, Bank Guarantee, Revolving Loan Facilities at US$100,000,000;

ii) Forex Line facility at US$10,000,000.

These loan agreements also require the Company, among others, to maintain several financial ratios. These loan agreements are valid until December 15, 2026.

33. PERJANJIAN PENTING, IKATAN, DAN LIABILITAS KONTINJENSI (lanjutan)

Perusahaan (lanjutan)

l. Pada tanggal 28 Maret 2014, Perusahaan menandatangani perjanjian pinjaman dengan Danamon, dimana Danamon setuju untuk menyediakan fasilitas kredit kepada Perusahaan. Fasilitas tersebut digunakan untuk pembelian produk bahan bakar minyak ("BBM") dan bahan kimia, transaksi lindung nilai (*hedging*), keperluan tender proyek dan tersedia untuk jangka waktu satu tahun dari tanggal penandatanganan perjanjian.

Perjanjian fasilitas pinjaman telah diubah dari waktu ke waktu dimana perubahan terakhir pada bulan September 2024 yang memberikan fasilitas sebagai berikut:

i) Fasilitas *Omnibus Trade* sebesar US$120.000.000 dengan beberapa *sub-limit* untuk *LC*/SKBDN, *Trust Receipt* ("*T/R*"), *Open Account Financing* ("*OAF*"), Bank Garansi/*Standby Letter of Credit* ("*SBLC*") dan *Trade Supplier Financing* ("*TSF*");

ii) Fasilitas transaksi lindung nilai (*hedging*) dengan *Pre-Settlement Exposure* ("*PSE*") sebesar US$10.000.000.

Perjanjian ini juga mensyaratkan Perusahaan untuk mempertahankan rasio keuangan tertentu. Fasilitas ini telah diperpanjang sampai dengan tanggal 28 Mei 2026.

m. Melalui Surat Keterbukaan Informasi kepada OJK dan BEI No. 066/L-AKR-CS/2023 tanggal 31 Agustus 2023, Perusahaan melaporkan bahwa pada tanggal 28 Agustus 2023 telah menandatangani *Letter of Intent* dengan Sichuan Hebang Biotechnology Co., Ltd. ("Hebang"), kedua belah pihak sepakat untuk mendirikan perusahaan patungan di JIIPE, dengan kepemilikan saham Hebang dan Perusahaan/affiliasi yang ditunjuk, masing-masing sebesar 90% dan 10%. *Letter of Intent* ditandatangani bersamaan dengan penandatangan Perjanjian Pengikatan Jual Beli Bersyarat antara Hebang dan BKMS atas lahan di JIIPE sekitar 67 hektar untuk pembangunan pabrik yang berkaitan dengan bahan kimia dengan perkiraan total nilai investasi sebesar US$800 juta.

33. SIGNIFICANT AGREEMENTS, COMMITMENTS, AND CONTINGENT LIABILITY (continued)

The Company (continued)

l. On March 28, 2014, the Company signed several loan agreements with Danamon, whereby Danamon agreed to provide credit facilities to the Company. These facilities are intended for the purchase of petroleum and chemical products, hedging, tender projects and available for a year from the signing date.

The facility agreements have been amended from time to time whereby the latest amendments were made in September 2024 providing the following credit lines:

i) Omnibus Trade facility at US$120,000,000 with various sub-limit for LC/SKBDN, Trust Receipt ("T/R"), Open Account Financing ("OAF"), Bank Guarantee/Standby Letter of Credit ("SBLC") and Trade Supplier Financing ("TSF");

ii) Hedging FX facility with Pre-Settlement Exposure ("PSE") at US$10,000,000.

The agreement also requires the Company to maintain several financial ratios. These facilities have been extended until May 28, 2026.

m. Through its Disclosure of Information Letter to OJK and IDX No. 066/L-AKR-CS/2023 dated August 31, 2023, the Company reported that on August 28, 2023, it has signed Letter of Intent with Sichuan Hebang Biotechnology Co., Ltd. ("Hebang"), which both parties, among others, agreed to establish a joint venture in JIIPE, with ownership interest of Hebang and the Company/any affiliates designated, of 90% and 10%, respectively. The Letter of Intent is signed in parallel with the signing of a Conditional Sales and Purchase Binding Agreement between Hebang and BKMS of industrial land in JIIPE approximate 67 hectares for a chemical related plant with a total estimated investment value of US$800 million.

33. PERJANJIAN PENTING, IKATAN, DAN LIABILITAS KONTINJENSI (lanjutan)

Perusahaan (lanjutan)

n. Pada tanggal 20 Juni 2024, Perusahaan menandatangani perjanjian pinjaman dengan PT Bank CIMB Niaga Tbk ("CIMB"), dimana CIMB setuju untuk menyediakan fasilitas kredit berupa:

i) Fasilitas Pinjaman Transaksi Khusus *Trade Account Payable*, yang terdiri dari SKBDN/*LC* dan *Trust Receipt* dengan total *limit* sebesar US$75.000.000;

ii) Fasilitas *Forex Line* dengan *Pre Settlement limit* sebesar US$5.000.000.

Perjanjian ini juga mensyaratkan Perusahaan untuk mempertahankan rasio keuangan tertentu. Fasilitas ini telah diperpanjang sampai dengan tanggal 20 Juni 2026.

o. Pada bulan Oktober 2024, Perusahaan menandatangani perjanjian pinjaman dengan PT Bank HSBC Indonesia ("HSBC"), dimana HSBC setuju untuk menyediakan fasilitas kredit berupa:

i) Fasilitas SKBDN/*LC*, *Trust Receipt, Import Loan* dengan total *limit* sebesar US$32.000.000;

ii) Fasilitas *Forex Line* dengan *limit LER* sebesar US$500.000.

Fasilitas ini berlaku sampai dengan 10 Oktober 2025 dan akan dengan otomatis diperpanjang untuk periode yang sama pada setiap tanggal ulang tahunnya.

p. Pada tanggal 15 Januari 2025, Perusahaan menandatangani perjanjian pinjaman dengan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk ("BRI"), dimana BRI setuju untuk menyediakan fasilitas berupa:

i) Fasilitas kredit dengan total US$200.000.000 dengan *sub-limit*: KMK *Buyer, LC*/SKBDN, Kredit Jangka Pendek, BG/*SBLC*, *SCF A/P*;

ii) Fasilitas *Forex Line* dengan *limit* sebesar US$20.000.000.

Perjanjian ini juga mensyaratkan Perusahaan untuk mempertahankan rasio keuangan tertentu, Fasilitas ini berlaku sampai dengan tanggal 15 Januari 2028.

33. SIGNIFICANT AGREEMENTS, COMMITMENTS, AND CONTINGENT LIABILITY (continued)

The Company (continued)

n. On June 20, 2024, the Company signed loan agreements with PT Bank CIMB Niaga Tbk ("CIMB"), whereby CIMB agreed to provide credit facilities:

i) Special Transaction of Trade Account Payable, consisting of SKBDN/LC and Trust Receipt Facilities with total limit at US$75,000,000;

ii) Forex Line facility with Pre Settlement limit at US$5,000,000.

The agreement also requires the Company to maintain several financial ratios. These facilities have been extended until June 20, 2026.

o. In October 2024, the Company signed loan agreements with PT Bank HSBC Indonesia ("HSBC"), whereby HSBC agreed to provide credit facilities:

i) SKBDN/LC, Trust Receipt, Import Loan Facilities with total limit at US$32,000,000;

ii) Forex Line facility with LER limit at US$500,000.

These facilities valid until October 10, 2025 and shall be automatically extended for the same period on each anniversary date hereof.

p. On January 15, 2025, the Company signed loan agreements with PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk ("BRI"), whereby BRI agreed to provide credit facilities:

i) Credit facility at US$200,000,000 with sub-limit to KMK Buyer, LC/SKBDN, Short-term Credit, BG/SBLC, SCF A/P;

ii) Forex Line facility with limit at US$20,000,000.

The agreement also requires the Company to maintain several financial ratios, These facilities valid until January 15, 2028.

33. PERJANJIAN PENTING, IKATAN, DAN LIABILITAS KONTINJENSI (lanjutan)

Perusahaan (lanjutan)

q. Pada tahun 2005 dan 2006, Perusahaan mengadakan perjanjian pinjaman dengan BCA dimana BCA setuju untuk memberikan beberapa fasilitas kepada Perusahaan. Fasilitas-fasilitas tersebut digunakan untuk modal kerja, mengimpor BBM dan bahan kimia, transaksi lindung nilai (*hedging*) dan untuk keperluan tender.

Perjanjian-perjanjian kredit dengan BCA tersebut diubah dari waktu ke waktu. Berdasarkan perubahan terakhir di bulan Maret 2025, fasilitas yang tersedia selain yang dijelaskan di atas adalah:

i) Fasilitas cerukan sebesar US$2.000.000 dan Rp80.000.000;

ii) Fasilitas pinjaman non-kas sebesar US$300.000.000 dengan beberapa *sub-limit* fasilitas untuk *L/C* uncommitted, SKBDN, *Standby L/C* ("SBLC"), Bank Garansi, dan pinjaman berjangka *Money Market Line*;

iii) Fasilitas valuta asing sebesar US$65.000.000.

Fasilitas pinjaman ini dijamin dengan *negative pledge* atas aset (Entitas Induk) dimana Perusahaan tidak boleh memberikan jaminan kepada pihak lain di masa depan tanpa persetujuan tertulis dari BCA. Perusahaan disyaratkan untuk mengajukan terlebih dahulu kepada BCA apabila Perusahaan bermaksud untuk memperoleh pinjaman atau kredit baru. Dan juga tanpa persetujuan dari BCA, Perusahaan tidak boleh melakukan antara lain hal-hal sebagai berikut:

- mengagunkan harta kekayaan Perusahaan; mengajukan permohonan pailit;
- melakukan peleburan, penggabungan, pengambilalihan atau pembubaran;
- mengubah status kelembagaan;
- mengubah kepemilikan mayoritas saham pada Perusahaan dan/atau PT AKRT oleh Keluarga Adikoesoemo, baik secara langsung maupun tidak langsung yang mengakibatkan jumlah kepemilikan saham menjadi kurang dari 50,1%.

Perjanjian ini juga mensyaratkan Perusahaan, antara lain untuk mempertahankan rasio keuangan tertentu. Perjanjian kredit ini telah diperpanjang sampai dengan tanggal 30 September 2026.

33. SIGNIFICANT AGREEMENTS, COMMITMENTS, AND CONTINGENT LIABILITY (continued)

The Company (continued)

q. In 2005 and 2006, the Company entered into loan agreements with BCA whereby BCA agreed to provide several credit facilities to the Company. These facilities are used for working capital, petroleum and chemical import transactions, hedging and for participation in tender offer.

The loan agreements with BCA are amended from time to time. Based on the latest amendment in March 2025, the available facilities aside from the above-mention are:

i) Overdraft facility of US$2,000,000 and Rp80,000,000;

ii) Non-cash loan facilities at US$300,000,000 with various sub-limit facility for uncommitted L/C, SKBDN, Standby L/C ("SBLC"), Bank Guarantee, and Money Market Line;

iii) Foreign exchange line facility amounted to US$65,000,000.

The loan facilities are secured by a negative pledge on assets (Parent Entity) whereby the Company commits not to create any securities with future lenders without prior written consent from BCA. The Company is obliged to BCA's right of first offer whenever the Company is seeking new loan or credit facility. Also, the Company without prior approval from BCA, shall not among others:

- *pledge of its assets; file for bankruptcy;*
- *conduct consolidation, merger, takeover or liquidation;*
- *change the organization status;*
- *change the majority shareholding of the Company and/or PT AKRT by Adikoesoemo's Family, either directly or indirectly, which will result in the reduction of the shareholding to less than 50.1%.*

The Agreement also requires the Company, among others, to maintain several financial ratios. The credit agreement has been extended to September 30, 2026.

33. PERJANJIAN PENTING, IKATAN, DAN LIABILITAS KONTINJENSI (lanjutan)

Perusahaan (lanjutan)

r. Pada tanggal 26 Juni 2014, Perusahaan memperoleh fasilitas kredit bersifat tanpa komitmen dari The Standard Chartered Bank, cabang Indonesia dengan kombinasi *limit* dari dengan beberapa *sub-limit* dari *Import L/C Sight and Usance facilities*, *Import Loan Facility, Import Invoice Financing Facility*, dan *Export Invoice Financing Facility* dengan total *limit* US$50.000.000. Fasilitas ini telah ditutup per tanggal 17 September 2025.

Entitas anak

Aruki

a. Aruki memiliki perjanjian dengan Mitsui Chemicals Inc. (“MCI”), Jepang, dimana MCI memberikan Aruki hak untuk menggunakan pengetahuan teknis dalam memproduksi kimia perekat dan logo/merek dagang di Indonesia tanpa dibebani biaya. Perjanjian ini berlaku tanpa waktu terbatas selama Perusahaan tetap merupakan pemegang saham pengendali atas Aruki.

b. Pada tanggal 4 Mei 2018, Aruki menandatangani perjanjian kredit dengan BCA, dimana BCA setuju untuk menyediakan fasilitas kredit non-kas dengan jumlah tidak melebihi ekuivalen US$3.000.000 dengan beberapa *sub-limit* untuk *Usance L/C*, *Sight L/C* dan SKBDN. Fasilitas tersebut digunakan untuk pembelian bahan baku, suku cadang/mesin. Pada bulan Agustus 2020, fasilitas kredit diperpanjang dengan tambahan fasilitas *forex line* sebesar US$2.000.000 untuk jangka waktu kontrak sampai dengan 2 bulan. Fasilitas tersebut tersedia sampai dengan tanggal 4 Mei 2026.

   Perjanjian ini mensyaratkan Aruki untuk mempertahankan rasio keuangan tertentu.

c. Aruki memiliki fasilitas pinjaman dari PT Bank Mizuho Indonesia dengan total *limit* US$2.000.000 yang mencakup (i) fasilitas pinjaman berulang tanpa komitmen, (ii) fasilitas surat kredit berdokumen berulang dan (iii) fasilitas *forex line*. Fasilitas ini telah diperpanjang sampai dengan tanggal 9 September 2026.

   Perjanjian-perjanjian pinjaman ini mensyaratkan pemenuhan beberapa persyaratan tertentu oleh Aruki.

33. SIGNIFICANT AGREEMENTS, COMMITMENTS, AND CONTINGENT LIABILITY (continued)

The Company (continued)

r. On June 26, 2014, the Company obtained uncommitted non-cash credit facilities from The Standard Chartered Bank Indonesia branch with a combined limit of various sub-limit in Import L/C Sight and Usance facilities, Import Loan Facility, Import Invoice Financing Facility, and Export Invoice Financing Facility with total limit amounting to US$50,000,000. These facilities have been closed as of September 17, 2025.

Subsidiaries

Aruki

a. Aruki has agreement with Mitsui Chemicals Inc. (“MCI”), Japan, whereby MCI granted Aruki to use the technical know how to produce its adhesive chemical products and to use the logo/trademark in Indonesia free of charge. The agreement shall remain in force for an unlimited period as long as the Company remains as the controlling shareholder of Aruki.

b. On May 4, 2018, Aruki signed a credit agreement with BCA, whereby BCA agreed to provide non-cash credit facilities with amount not exceeding equivalent US$3,000,000 with various sub-limit of Usance L/C, Sight L/C and SKBDN. These facilities are intended for the purchase of raw materials, spare parts/machines. In August 2020, there is an additional facility - forex line amounting to US$2,000,000 with term of contract up to 2 months. Those facilities are available until May 4, 2026.

   The agreement requires Aruki to maintain certain financial ratios.

c. Aruki obtained loan facilities from PT Bank Mizuho Indonesia with total limit amounting to US$2,000,000 with comprising of (i) uncommitted revolving loan facility, (ii) revolving letter of credit facility, and (iii) forex line facility. This facility has been extended until September 9, 2026.

   The agreements requires Aruki to maintain several loan covenants.

33. PERJANJIAN PENTING, IKATAN, DAN LIABILITAS KONTINJENSI (lanjutan)

Entitas anak (lanjutan)

JTT

JTT mempunyai perjanjian sewa tanah jangka panjang dengan Pelindo, termasuk sewa jalur pipa bawah laut sampai dengan tahun 2034 di Tanjung Priok, Jakarta. Saldo hak pakai tanah yang belum diamortisasi adalah Rp62.930.022 pada tanggal 31 Desember 2025 (2024: Rp67.820.275) disajikan sebagai bagian dari "Aset hak-guna" (Catatan 11).

PT Bank Permata Tbk ("Permata")

Pada tanggal 15 Desember 2021, Permata setuju untuk memberikan tambahan fasilitas pinjaman berulang (*revolving*) kepada JTT sebesar US$1.500.000. Tujuan dari fasilitas ini adalah untuk modal kerja.

Fasilitas Forex Line dengan *Loan Equivalent Risk* (LER) sebesar US$1.000.000

Fasilitas ini telah diperpanjang sampai dengan tanggal 7 Oktober 2028.

BKMS

a. Sehubungan dengan konstruksi proyek JIIPE sebagaimana diungkapkan dalam Catatan 13 dan catatan lainnya atas laporan keuangan konsolidasian yang relevan, pada tanggal 31 Desember 2025, BKMS telah menandatangani/meng-*award* kontrak dengan/ kepada berbagai kontraktor dan penyedia jasa dengan rincian sebagai berikut:

33. *SIGNIFICANT AGREEMENTS, COMMITMENTS, AND CONTINGENT LIABILITY (continued)*

Subsidiaries (continued)

JTT

JTT has a long-term land lease agreement with Pelindo, including lease of underwater ways for pipelines until 2034 in Tanjung Priok, Jakarta. The balance of unamortized land lease rights of Rp62,930,022 as of December 31, 2025 (2024: Rp67,820,275) is recorded as part of "Right-of-use assets" (Note 11).

PT Bank Permata Tbk ("Permata")

On December 15, 2021, Permata agreed to provide an additional facility of revolving loan to JTT at US$1,500,000. The purpose of this facility is for working capital.

Forex Line Facility with Loan Equivalent Risk (ELR) of US1,000,000.

These facilities have been extended until October 7, 2028.

BKMS

a. In relation to the construction of JIIPE project as disclosed in Note 13 and other relevant notes to the consolidated financial statements, as of December 31, 2025, BKMS has signed/awarded contracts with/to various contractors and vendors as follows:

	31 Desember 2025/ *December 31, 2025*			31 Desember 2024/ *December 31, 2024*			
	Nilai Kontrak/ *Contract Value*	Pembayaran Uang Muka/ *Advance Payment*	Nilai Komitmen/ *Commitment Value*	Nilai Kontrak/ *Contract Value*	Pembayaran Uang Muka/ *Advance Payment*	Nilai Komitmen/ *Commitment Value*	
Rupiah	266.143.233	130.183.028	135.960.205	436.652.196	215.476.739	221.175.457	*Rupiah*

Uang muka yang dibayarkan dicatat sebagai bagian dari akun Uang Muka atau Persediaan Tanah Kawasan Industri dalam dan untuk Pengembangan atau Aset Tetap, tergantung dari sifat pembayaran yang dilakukan, dalam laporan posisi keuangan konsolidasian pada tanggal pelaporan. Jenis pekerjaan yang dicakup antara lain adalah persiapan pembangunan jalan akses sementara, pekerjaan pelindungan pantai di beberapa area dari kawasan industri, pekerjaan reklamasi tanah, pasokan pasir, instalasi pipa angkut dan lainnya.

The downpayment made is recorded as part of Advanced Payments or Industrial Estate Land Inventory under and for Development or Property, Plant, and Equipment, depending on the nature of payment, in the consolidated statement of financial position at the reporting date. The type of work covered in the contracts, among others, preparing temporary access road, seashore protection works in certain parts of industrial estate location, land reclamation work, supply of sand, pipeline installation, and others.

**PT AKR CORPORINDO TBK
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2025 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
kecuali Dinyatakan Lain)**

***PT AKR CORPORINDO TBK
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2025 and
for the Year Then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
unless Otherwise Stated)***

33. PERJANJIAN PENTING, IKATAN, DAN LIABILITAS KONTINJENSI (lanjutan)

Entitas anak (lanjutan)

BKMS (lanjutan)

b. BKMS juga menandatangani perjanjian dengan beberapa Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah ("PPAT") Kabupaten Gresik untuk penyediaan jasa pembuatan akta jual beli dan pengurusan sertifikat Hak Guna Bangunan ("HGB").

c. Pada tanggal 8 Desember 2020, BKMS memperoleh fasilitas pembiayaan IMBT dari Permata dengan jumlah maksimum sebesar Rp162.000.000 dengan jangka waktu pembiayaan selama 6 tahun untuk pembiayaan kembali pinjaman sindikasi yang ada.

Transaksi pembiayaan kembali ini mengadopsi prinsip Akuntansi Syariah "Ijarah" sesuai dengan PSAK 107 dimana BKMS seolah-olah mengalihkan 6-tahun-manfaat PLTMG sebagai aset jaminan ("objek ijarah untuk sewa") kepada Permata, dan kemudian BKMS akan menyewa kembali PLTMG tersebut selama masa berlaku fasilitas. Pada akhir masa pinjaman, Permata harus mengalihkan kembali objek sewa ke BKMS dengan menggunakan akad hibah tanpa biaya. Perbedaan antara nilai manfaat 6-tahun dan nilai fasilitas pinjaman yang diterima diakui sebagai laba atas pengalihan objek "ijarah" untuk sewa sebesar Rp61.312.010. Pembayaran cicilan dari fasilitas pinjaman harus dicatat sebagai biaya sewa.

BKMS juga diwajibkan untuk mempertahankan rasio keuangan tertentu.

d. Pada tanggal 31 Desember 2025, BKMS memiliki kontrak *forward* dan fasilitas Bank Permata dengan nilai nominal sebesar US$20.855.400 dan nilai wajar sebesar Rp1.002.199 disajikan pada akun piutang lain-lain pada laporan posisi keuangan konsolidasian.

33. SIGNIFICANT AGREEMENTS, COMMITMENTS, AND CONTINGENT LIABILITY (continued)

Subsidiaries (continued)

BKMS (continued)

b. BKMS also entered into agreements with several Notaries and Land Deed Officers ("PPAT") resided at Gresik Regency in providing services for certification of notarial of sale and purchase agreements and certificates of building rights title ("HGB").

c. On December 8, 2020, BKMS obtained an IMBT financing facility from Permata with a maximum amount of Rp162,000,000 with a credit term of 6 years to refinance its existing syndication loan.

This refinancing transaction adopted the Islamic Shariah Accounting "Ijarah" principle in accordance with PSAK 107 whereby BKMS as if transferred the 6-year-benefits of its PLTMG as the collateralized asset ("ijarah object for lease") to Permata, which then BKMS lease back the PLTMG over the tenor of the facility. At the end of the tenor, Permata shall transfer back the lease object to BKMS using the "akad hibah" at no cost. The difference between the cost of the 6-year-benefits and the facility amount received is recognized as gain on the transferred of a "ijarah" object for lease amounting to Rp61,312,010. The payment of the installment of the loan facility shall be recorded as lease expense.

BKMS also required to maintain certain financial ratios.

d. As of December 31, 2025, BKMS has outstanding forward contracts from Bank Permata with a notional value of US$20,855,400 and with the fair value of Rp1,002,199 is presented as other receivables in the consolidated statement of financial position.

33. PERJANJIAN PENTING, IKATAN, DAN LIABILITAS KONTINJENSI (lanjutan)

Entitas anak (lanjutan)

BKMS (lanjutan)

e. Pada bulan September 2023, BKMS dan *anchor tenant* menandatangani Perjanjian Serah Terima untuk sistem kabel listrik dan infrastrukturnya, dimana BKMS membeli aset tersebut dengan jumlah yang disepakati sebesar Rp293 juta. Kedua belah pihak setuju untuk melanjutkannya dengan Perjanjian Penjualan/Penyerahan secara formal dan dengan perjanjian sewa tanah tambahan terkait dengan infrastruktur tersebut. Aset terkait telah dicatat sebagai bagian dari Aset Tetap pada tahun 2023 (Catatan 10).

TNU

a. TNU, entitas anak Andahanesa, mempunyai perjanjian sewa tanah jangka panjang dengan BJTI sampai dengan tahun 2034 di Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya. Saldo hak pakai tanah yang belum diamortisasi adalah Rp12.273.361 pada tanggal 31 Desember 2025 (2024: Rp14.973.117), yang disajikan sebagai bagian dari "Aset hak-guna" (Catatan 11).

b. Pada tahun 2018, TNU, entitas anak tidak langsung Perusahaan, menerima klaim dari pihak ketiga dalam hubungannya dengan pembangunan asetnya. Klaim ini sedang dalam proses penyelesaian oleh kedua belah pihak melalui proses mediasi pada tanggal pelaporan.

Anugrah

Pada bulan Juli 2011 dan beserta perubahan berikutnya, Anugrah menandatangani perjanjian investasi modal dengan dua pemegang saham individual PT Jabal Nor ("Jabal Nor") untuk mengakuisisi keseluruhan 59,40% kepemilikan saham di Jabal Nor sebesar Rp176.000.000 yang akan dicapai dalam beberapa tahapan sesuai dengan pencapaian ketentuan-ketentuan tertentu dalam perjanjian oleh semua pihak. Pada tanggal 31 Desember 2016, Anugrah belum mencapai target persentase kepemilikan, sehingga jumlah setoran tunai yang telah dilakukan yang mencerminkan 42,94% kepemilikan di Jabal Nor diperlakukan sebagai investasi pada entitas asosiasi.

33. SIGNIFICANT AGREEMENTS, COMMITMENTS, AND CONTINGENT LIABILITY (continued)

Subsidiaries (continued)

BKMS (continued)

e. On September 2023, BKMS and an anchor tenant have signed a Handover Agreement for electrical cabling system and its infrastructures, whereby BKMS purchased such assets at the agreed amount of Rp293 million. Both parties have agreed to proceed with a formal Sales/Transfer Agreement and with the additional land lease agreement related to the infrastructure. The related assets have been recorded as part of Property, Plant and Equipment in 2023 (Note 10).

TNU

a. TNU, a subsidiary of Andahanesa, has a long-term land lease agreement with BJTI until 2034 in Port of Tanjung Perak, Surabaya. The balance of unamortized land lease rights of Rp12,273,361 as of December 31, 2025 (2024: Rp14,973,117), which is presented as part of "Right-of-use assets" (Note 11).

b. In 2018, TNU, an indirect subsidiary of the Company, received a claim from a third party pertinent to its asset construction. The claim is in the process to be settled by the parties through a mediation process at reporting date.

Anugrah

On July 2011 and further as amended, Anugrah signed a capital investment agreement with two individual shareholders of PT Jabal Nor ("Jabal Nor") to acquire a total of 59.40% ownership interest in Jabal Nor at Rp176,000,000 to be achieved in certain stages upon the completion of certain requirements as stipulated in the agreement by all parties. As of December 31, 2016, Anugrah has not reached the total targeted ownership percentage and therefore the total cash contribution made reflecting a 42.94% ownership interest in Jabal Nor is treated as investment in an associate.

33. PERJANJIAN PENTING, IKATAN, DAN LIABILITAS KONTINJENSI (lanjutan)

Entitas anak (lanjutan)

Anugrah (lanjutan)

Berdasarkan Akta Notaris Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., No. 27 tanggal 9 Maret 2017, Anugrah, entitas anak Perusahaan, selaku pemegang 42,94% saham Jabal Nor, telah menandatangani akta Pengalihan Saham atas seluruh kepemilikan saham Anugrah atas Jabal Nor. Transaksi pengalihan saham tersebut dicatat di dalam akun "Aset keuangan tidak lancar lainnya".

Berdasarkan ikatan perjanjian tanggal 29 Juli 2020, pemegang saham individual telah sepakat untuk menyelesaikan kewajibannya dengan pengalihan aset berupa tanah kepada Anugrah.

AKRIDA

Pada tanggal 15 November 2016, AKRIDA dan BP Global Investments Limited menandatangani Perjanjian Pendahuluan (*Heads of Agreement*) untuk usaha *Joint Venture* Ritel di London. Maksud dan tujuan dari Perjanjian Pendahuluan ini adalah untuk mengeksplorasi pendirian usaha *joint venture* dalam rangka membangun dan mengembangkan jaringan ritel BBM untuk memasok BBM berkualitas *premium* dan memberikan tawaran yang berbeda untuk konsumen Indonesia. Perusahaan telah melakukan Keterbukaan Informasi melalui Surat No. 112/L-AKR-CS/2016 tanggal 16 November 2016 ke OJK dan BEI (Catatan 1b).

Pada tanggal yang sama, kedua pihak di atas juga menandatangani Perjanjian Usaha Patungan di bidang bahan bakar penerbangan di London. Maksud dan tujuan dari Perjanjian ini adalah untuk mendukung pengembangan industri penerbangan dan memberikan kontribusi pada pertumbuhan ekonomi Indonesia dengan berinvestasi di bidang infrastruktur, menerapkan teknologi inovatif terkini, serta penerapan sistem operasional terbaik untuk pasokan bahan bakar penerbangan. Perusahaan telah melakukan Keterbukaan Informasi melalui Surat No. 111/L-AKR-CS/2016 tanggal 16 November 2016 ke OJK dan BEI (Catatan 1b).

33. SIGNIFICANT AGREEMENTS, COMMITMENTS, AND CONTINGENT LIABILITY (continued)

Subsidiaries (continued)

Anugrah (continued)

Based on the Notarial Deed of Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., No. 27 dated March 9, 2017, Anugrah, a subsidiary of the Company, as the holder of 42.94% shares in Jabal Nor, has signed the deed of transfer Anugrah whole shares ownership in Jabal Nor. The transaction from the share transfer is recorded under "Other non-current financial assets".

Based on the commitment agreement on July 29, 2020, individual shareholders agreed to settle the transaction by transferring assets in the form of lands to Anugrah.

AKRIDA

On November 15, 2016, AKRIDA and BP Global Investments Limited signed a Heads of Agreement for Retail Joint Venture in London. The purpose and objective of entering into the Heads of Agreement is to explore the creation of a joint venture to establish and grow retail fuel network to supply premium quality fuels and provide differentiated offer to the Indonesia customers. The Company has made the Disclosure of Information in its Letter No. 112/L-AKR-CS/2016 dated November 16, 2016 to OJK and IDX (Note 1b).

On the same date, both parties also signed a Joint Venture Agreement related to Aviation Fuels business in London. The purpose and objective of entering into the Agreement is to support the development of the growth of the Indonesian economy by investing in infrastructure, applying the latest innovative technology and operational best practices for the supply of aviation fuel. The Company has made the Disclosure of Information in its Letter No. 111/L-AKR-CS/2016 dated November 16, 2016 to OJK and IDX (Note 1b).

33. PERJANJIAN PENTING, IKATAN, DAN LIABILITAS KONTINJENSI (lanjutan)

Entitas anak (lanjutan)

APR

a. APR, entitas anak AKRIDA, mempunyai perjanjian sewa tanah jangka panjang sampai dengan tahun 2040 di Jakarta dan Surabaya. Saldo hak pakai tanah yang belum diamortisasi adalah Rp184.847.871 pada tanggal 31 Desember 2025 (2024: Rp201.167.388) yang disajikan sebagai bagian dari "Aset hak-guna" (Catatan 11).

b. Pada tanggal 27 Januari 2026, APR menandatangani Perubahan Ke-8 (Kedelapan) terhadap Perjanjian Kredit No. 064/CB/JKT/2018 tanggal 30 November 2018 dengan PT Bank CIMB Niaga Tbk ("CIMB") untuk memperpanjang jangka waktu fasilitas kredit hingga 30 April 2026. CIMB setuju untuk menyediakan fasilitas kredit kepada APR dalam rangka pembelian produk, transaksi lindung nilai, dan keperluan tender proyek

Perjanjian fasilitas pinjaman memberikan fasilitas sebagai berikut:

i) Fasilitas *Credit Commercial Lines*: Fasilitas *Letter of Credit* ("*L/C*") dan/atau Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri ("SKBDN") sebesar US$13.000.000 ("Fasilitas *CC Lines*") yang bersifat *interchangeable* atau dapat dipergunakan secara bersama-sama dengan;

ii) Fasilitas Bank Garansi dengan ketentuan jumlah total penggunaan Fasilitas *CC Lines* tidak diperkenankan lebih dari US$13.000.000 ("Fasilitas BG/*SBLC*");

iii) Perjanjian Jual Beli Valuta Asing dengan *Pre-Settlement Limit* secara keseluruhan tidak melebihi ekuivalen US$5.000.000.

Pada tanggal 31 Desember 2025, APR tidak memiliki *open L/C* dan *outstanding* Bank Garansi.

33. SIGNIFICANT AGREEMENTS, COMMITMENTS, AND CONTINGENT LIABILITY (continued)

Subsidiaries (continued)

APR

a. APR, a subsidiary of AKRIDA, has a long-term land lease agreement until 2040 in Jakarta and Surabaya. The balance of unmortized land lease rights of Rp184,847,871 as of December 31, 2025 (2024: Rp201,167,388) which is presented as part of "Right-of-use assets" (Note 11).

b. On January 27, 2026, APR signed 8th (Eighth) Amendment and Restatement to the Credit Agreement No. 064/CB/JKT/2018 dated November 30, 2018 with PT Bank CIMB Niaga Tbk ("CIMB") to extend the credit facility availability period up to April 30, 2026. CIMB agreed to provide credit facilities to APR for purchase of products, hedging transactions, and tender projects.

The facility agreements are providing the following credit lines:

i) Credit Commercial Lines Facility: Letter of Credit ("L/C") Facility and/or Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri ("SKBDN") amounting to US$13,000,000 ("CC Lines Facility") which is interchangeable with or can be used in conjunction with;

ii) Bank Guarantee Facility with the provisions of total amount CC Lines Facility no more than US$13,000,000 ("BG/SBLC Facility");

iii) Foreign Exchange Agreement with Pre-Settlement Limit as a whole not exceeding the equivalent US$5,000,000.

As of December 31, 2025, APR has no open L/C and no outstanding of Bank Guarantee.

33. PERJANJIAN PENTING, IKATAN, DAN LIABILITAS KONTINJENSI (lanjutan)

Entitas anak (lanjutan)

DPR

Pada tanggal 23 Januari 2020, DPR menandatangani perjanjian pinjaman dengan Standard Chartered Bank - Cabang Indonesia ("SCB"), dimana SCB setuju untuk menyediakan (i) Fasilitas *L/C* Impor *unsecured* US$2.000.000; (ii) Fasilitas *L/C* Impor *secured* US$2.000.000; (iii) Obligasi dan Bank Garansi US$200.000, dengan total gabungan batas fasilitas sejumlah US$2.000.000.

Fasilitas ini digunakan untuk penerbitan *L/C* impor barang dan untuk penerbitan jaminan *(bid bond, advance payment bond* dan *performance bond*). Fasilitas ini telah diperpanjang otomatis.

ANI melalui Entitas Anak, AKI

PT Bank Permata Tbk ("Permata")

Pada bulan Januari 2026, AKI menandatangani perjanjian perpanjangan pinjaman dengan Permata, dimana Permata setuju untuk menyediakan fasilitas kredit kepada AKI. Fasilitas tersebut digunakan untuk pembelian produk bahan kimia, modal kerja dan transaksi lindung nilai (*hedging*). Fasilitas ini tersedia untuk jangka waktu sampai tanggal 7 Januari 2026.

Fasilitas yang tersedia adalah sebagai berikut:

i) *Omnibus Revolving Loan* sebesar US$4.000.000 meliputi *Revolving Loan* dan *L/C*/SKBDN;
ii) Fasilitas *hedging FX* sebesar US$500.000 dengan *Loan Equivalent Risk ("LER") Spot transaction* maksimal US$25.000.000.
iii) Fasilitas pinjaman rekening koran sebesar Rp16.000.000.

Pada tanggal 31 Desember 2025, AKI memiliki kontrak forward dari fasilitas FX dengan nilai nominal sebesar US$3.424.282 dan dengan nilai wajar sebesar Rp160.320 disajikan pada akun aset lain-lain pada laporan posisi keuangan konsolidasian.

AKPI

AKPI, entitas anak Andahanesa, mempunyai perjanjian sewa tanah jangka panjang dengan BMS sampai dengan tahun 2043 di Kawasan JIIPE, Gresik, Jawa Timur. Saldo hak pakai tanah yang belum diamortisasi per 31 Desember 2025 adalah RpNihil (31 Desember 2024: Rp2.133.528) yang disajikan sebagai bagian dari "Aset hak-guna" (Catatan 11).

33. SIGNIFICANT AGREEMENTS, COMMITMENTS, AND CONTINGENT LIABILITY (continued)

Subsidiaries (continued)

DPR

On January 23, 2020, DPR signed a loan agreement with Standard Chartered Bank - Indonesia Branch ("SCB"), whereby SCB agreed to provide (i) L/C Import unsecured facility US$2,000,000; (ii) L/C Import secured facility US$2,000,000; (iii) Bonds and Guarantees US$200,000, with total combined facilities limit of US$2,000,000.

These facilities are intended for issuance of L/C covering the import of goods and issuance of guarantees (bid bond, advance payment bond and performance bond). The facilities have been automatically extended.

ANI through its Subsidiary, AKI

PT Bank Permata Tbk ("Permata")

On January 2026, AKI signed extension of loan agreements with Permata, whereby Permata agreed to provide credit facility to AKI. These facilities are intended for the purchase of chemical products, working capital and hedging transactions. The facilities are available for a period date until January 7, 2026.

The facilities available are as follows:

i) Omnibus Revolving Loan at US$4,000,000 covering Revolving Loan and L/C/SKBDN;
ii) Hedging FX facility at US$500,000 with Loan Equivalent Risk ("LER") Spot transaction at maximum of US$25,000,000.
iii) Overdraft facility at Rp16,000,000.

As of December 31, 2025, AKI has outstanding forward contracts from its FX facility with a nominal value of US$3,424,282 and with the fair value of Rp160,320 is presented as other payable in the consolidated statement of financial position.

AKPI

AKPI, a subsidiary of Andahanesa, has a long-term land lease agreement with BMS until 2043 in Kawasan JIIPE, Gresik, East Java. The balance of the unamortized land lease rights is RpNil as of December 31, 2025 (December 31, 2024: Rp2,133,528), which is presented as part of "Right-of-use assets" (Note 11).

33. PERJANJIAN PENTING, IKATAN, DAN LIABILITAS KONTINJENSI (lanjutan)

Entitas anak (lanjutan)

BBE

Pada tanggal 11 November 2024, BBE menandatangani perjanjian pinjaman dengan BNI, dimana BNI setuju untuk menyediakan fasilitas kredit kepada BBE berupa:

i) Fasilitas Kredit Modal Kerja Terbatas maksimal sebesar Rp5.000.000;
ii) Fasilitas Kredit Investasi *Refinancing* maksimal sebesar Rp51.000.000;
iii) Fasilitas *Standby L/C ("SBLC")* sebesar US$60.000.000;
iv) Fasilitas Bank Garansi sebesar US$1.900.000.

Fasilitas Kredit Modal Kerja, *Standby L/C ("SBLC"),* serta Bank Garansi untuk jangka waktu satu tahun dari tanggal penandatanganan perjanjian yang berakhir di 10 November 2026.

Fasilitas Kredit Investasi untuk jangka waktu lima tahun dari tanggal penandatanganan perjanjian yang berakhir di 10 November 2029.

Pada tanggal 31 Desember 2025, BBE memiliki *open Standby Letter of Credit* sebesar US$6.151.290.

33. SIGNIFICANT AGREEMENTS, COMMITMENTS, AND CONTINGENT LIABILITY (continued)

Subsidiaries (continued)

BBE

On November 11, 2024, BBE signed loan agreements with BNI, whereby BNI agreed to provide credit facilities to BBE as follow:

i) Working Capital Loan facility maximum amount of Rp5,000,000;
ii) Investment Credit Refinancing facility maximum amount of Rp51,000,000;
iii) Standby L/C ("SBLC") facility at US$60,000,000;
iv) Bank Guarantee facility at US$1,900,000.

The facility for Working Capital Loan, Standby L/C ("SBLC"), and Bank Guarantee are available for one year from the signing date and will expire on November 10, 2026.

The facility for Invesment Credit is available for five years from the signing date and will expire on November 10, 2029.

As of December 31, 2025, BBE has open Standby Letter of Credit amounting to US$6,151,290.

34. TUJUAN DAN KEBIJAKAN MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN

Dalam aktivitas usahanya sehari-hari, Kelompok Usaha dihadapkan pada berbagai risiko. Risiko utama yang dihadapi Kelompok Usaha yang timbul dari instrumen keuangan adalah risiko kredit, risiko pasar (yaitu tingkat suku bunga, risiko nilai tukar mata uang asing dan risiko harga komoditas) dan risiko likuiditas. Fungsi utama dari manajemen risiko Kelompok Usaha adalah untuk mengidentifikasi seluruh risiko kunci, mengukur risiko-risiko ini dan mengelola posisi risiko sesuai dengan kebijakan dan *risk appetite* Kelompok Usaha. Kelompok Usaha secara rutin menelaah kebijakan dan sistem manajemen risiko untuk menyesuaikan dengan perubahan di pasar, produk dan praktik pasar terbaik.

34. FINANCIAL RISK MANAGEMENT OBJECTIVES AND POLICIES

In their daily business activities, the Group is exposed to risks. The main risks facing by the Group arising from its financial instruments are credit risk, market risk (i.e. interest rate risk, foreign exchange rate risk and commodity price risk) and liquidity risk. The core function of the Group's risk management is to identify all key risks for the Group, measure these risks and manage the risk positions in accordance with its policies and group risk appetite. The Group regularly reviews its risk management policies and systems to reflect changes in markets, products and best market practice.

34. TUJUAN DAN KEBIJAKAN MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (lanjutan)

a. Risiko Kredit

Risiko kredit adalah risiko kerugian keuangan yang timbul jika pelanggan Kelompok Usaha gagal memenuhi kewajiban kontraktualnya kepada Kelompok Usaha. Risiko kredit terutama berasal dari piutang usaha dari pelanggan yang timbul dari aktivitas perdagangan dan distribusi, penjualan produk dan sejumlah jasa terpadu kepada pelanggan seperti jasa penyimpanan dan penanganan barang dan lainnya.

Maksimum risiko kredit yang dihadapi oleh Kelompok Usaha kurang lebih sebesar nilai tercatat neto dari piutang usaha sebagaimana ditunjukkan dalam Catatan 5a. Manajemen berpendapat bahwa tidak terdapat risiko yang terkonsentrasi secara signifikan atas piutang usaha.

Risiko kredit pelanggan dikelola oleh masing-masing unit usaha sesuai dengan kebijakan, prosedur dan pengendalian dari Kelompok Usaha yang berhubungan dengan pengelolaan risiko kredit pelanggan. Batasan kredit ditentukan untuk semua pelanggan berdasarkan kriteria penilaian secara internal. Saldo piutang pelanggan dimonitor secara teratur oleh unit-unit usaha terkait.

Sehubungan dengan risiko kredit yang timbul dari aset keuangan lainnya yang terutama mencakup kas dan setara kas, risiko kredit yang dihadapi timbul karena wanprestasi dari *counterparty*. Kelompok Usaha memiliki kebijakan untuk tidak menempatkan investasi pada instrumen yang memiliki risiko kredit tinggi dan hanya menempatkan investasinya pada bank-bank dengan peringkat kredit yang tinggi. Nilai maksimal eksposur setara dengan nilai tercatat sebagaimana ditunjukkan pada Catatan 4.

b. Risiko Pasar

Risiko pasar adalah risiko dimana nilai wajar dari arus kas masa depan dari suatu instrumen keuangan akan berfluktuasi karena perubahan harga pasar. Kelompok Usaha dipengaruhi oleh risiko pasar, terutama risiko tingkat suku bunga, risiko nilai tukar mata uang asing dan risiko harga komoditas.

34. FINANCIAL RISK MANAGEMENT OBJECTIVES AND POLICIES (continued)

a. Credit Risk

Credit risk is the risk of suffering financial loss, should any of the Group's customers fail to fulfill their contractual obligations to the Group. Credit risk arises mainly from trade receivables from customers generated from the Group's trading and distribution activities, product sales and various integrated services to customers such as storage and handling of goods and others.

The maximum Group's exposure of the credit risk approximates its net carrying amounts of trade receivables as shown in Note 5a. Management believes that there are no significant concentrations of credit risk in the trade receivables.

Customer credit risk is managed by each business unit subject to the Group's established policy, procedures and control relating to customer risk management. Credit limits are established for all customers based on internal rating criteria. Outstanding customer receivables are regularly monitored by relevant business units.

With respect to credit risk arising from the other financial assets, which mainly comprise of cash and cash equivalents, the Group's exposure to credit risk arises from the default of counterparty. The Group has a policy to not place investments in instruments that have a high credit risk and only puts the investments in banks with high credit ratings. The maximum exposure equals to the carrying amounts as disclosed in Note 4.

b. Market Risk

The market risk is the risk that the fair value of future cash flows of a financial instrument will fluctuate because of changes in market prices. The Group is exposed to market risks, in particular, interest rate risk, foreign currency exchange risk and commodity price risk.

34. TUJUAN DAN KEBIJAKAN MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (lanjutan)

b. Risiko Pasar (lanjutan)

Risiko tingkat suku bunga

Risiko tingkat suku bunga adalah risiko dimana nilai wajar atau arus kas masa depan dari suatu instrumen keuangan berfluktuasi karena perubahan suku bunga pasar. Pengaruh dari risiko perubahan suku bunga pasar berhubungan dengan pinjaman jangka pendek dan panjang dari Kelompok Usaha yang dikenakan suku bunga mengambang.

Kelompok Usaha memonitor secara ketat fluktuasi suku bunga pasar dan ekspektasi pasar sehingga dapat mengambil langkah-langkah yang paling menguntungkan Kelompok Usaha secara tepat waktu. Manajemen tidak menganggap perlunya melakukan *swap* suku bunga pada saat ini.

Tabel berikut menunjukkan sensitivitas atas perubahan yang wajar dari tingkat suku bunga atas saldo pinjaman yang dikenakan suku bunga mengambang pada tanggal 31 Desember 2025, dimana semua variabel lainnya dianggap konstan, terhadap laba sebelum pajak penghasilan konsolidasian untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025:

34. FINANCIAL RISK MANAGEMENT OBJECTIVES AND POLICIES (continued)

b. Market Risk (continued)

Interest rate risk

The interest rate risk is the risk that the fair value or future cash flows of a financial instrument will fluctuate because of changes in market interest rates. The Group's exposure to the risk of changes in market interest rates relates primarily to the Group's short-term and long-term debt obligations with floating interest rates.

The Group closely monitors the market interest rate fluctuation and market expectation, so it can take necessary actions benefited most to the Group in due time. The management currently does not consider the necessity to enter into any interest rate swaps.

The following table demonstrates the sensitivity to a reasonably change in interest rates on the floating interest loans on December 31, 2025, with all other variables held constant, to the consolidated profit before income tax for the year ended December 31, 2025:

	Kenaikan (penurunan) dalam persentase/ *Increase (decrease) in percentage*	Efek terhadap laba sebelum pajak/ *Effect on income before tax*	
Mata uang pinjaman			***Loan currency***
Rupiah	0,5%	(25.614.458)	*Rupiah*
	(0,5%)	25.614.458	

Risiko nilai tukar mata uang asing

Risiko mata uang asing adalah risiko dimana nilai wajar atau arus kas masa mendatang dari suatu instrumen keuangan karena perubahan dari nilai tukar mata uang asing. Pengaruh dari risiko perubahan nilai tukar mata uang asing terutama berasal dari aktivitas usaha Kelompok Usaha (ketika pendapatan dan beban terjadi dalam dalam uang yang berbeda dari mata uang fungsional Kelompok Usaha), dan pinjaman dalam mata uang Dolar AS.

Foreign exchange risk

The foreign currency risk is the risk that the fair value or future cash flows of a financial instrument will fluctuate because of changes in foreign exchange rates. The Group's exposure to the risk of changes in foreign exchange rates relates primarily to the Group's operating activities (when revenue or expense are denominated in a different currency from the Group's functional currency), and US Dollar denominated loans.

**PT AKR CORPORINDO TBK
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2025 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
kecuali Dinyatakan Lain)**

***PT AKR CORPORINDO TBK
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2025 and
for the Year Then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
unless Otherwise Stated)***

34. TUJUAN DAN KEBIJAKAN MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (lanjutan)

b. Risiko Pasar (lanjutan)

Risiko nilai tukar mata uang asing (lanjutan)

Eksposur fluktuasi nilai tukar atas Perusahaan dan entitas anak tertentu di Indonesia berasal dari nilai tukar antara Dolar AS dan Rupiah karena mata uang fungsional adalah Rupiah, sedangkan penjualan dan pendapatan tertentu, beban pokok penjualan dan pendapatan tertentu serta pinjaman tertentu dilakukan dalam Dolar AS. Bagian signifikan dari risiko nilai tukar mata uang asing berasal dari kas dan setara kas, piutang, hutang, dan biaya yang masih harus dibayar.

Untuk mengantisipasi dan mengurangi risiko fluktuasi kurs terhadap Dolar AS, Perusahaan mengusahakan, dimana memungkinkan, untuk memastikan bahwa sebagian besar pembelian dan penjualan dilakukan dalam mata uang yang sama serta dilakukan pada saat yang hampir bersamaan dan mengimplementasikan kebijakan dimana hutang dalam mata uang asing yang digunakan untuk membiayai kegiatan usaha dilakukan dalam mata uang yang sama (lindung nilai alami). Manajemen juga memantau untuk memastikan bahwa kebijakan tersebut diimplementasikan semaksimum mungkin, dimana memungkinkan, Perusahaan juga melakukan transaksi pembelian *forward* untuk membeli Dolar AS dari bank sehubungan dengan pembelian produk BBM yang dilakukan dalam mata uang Dolar AS dengan tujuan untuk menciptakan lindung nilai terhadap risiko nilai tukar tersebut.

Kelompok Usaha memonitor secara ketat fluktuasi dari nilai tukar mata uang asing, sehingga dapat mengambil langkah-langkah yang paling menguntungkan Kelompok Usaha pada waktu yang tepat, antara lain, dengan membeli transaksi *forward* dengan tujuan untuk lindung nilai dari risiko nilai tukar pembelian produk BBM dalam mata uang Dolar AS seperti yang dijelaskan di atas.

34. FINANCIAL RISK MANAGEMENT OBJECTIVES AND POLICIES (continued)

b. Market Risk (continued)

Foreign exchange risk (continued)

Exposure to exchange rate fluctuations to the Company and certain subsidiaries in Indonesia comes from the exchange rate between US Dollar and Rupiah as the functional currency is Rupiah, while certain sales and revenues, costs of sales and revenues and loans are denominated in US Dollar. The significant portion of the foreign exchange risk is contributed by cash and cash equivalents, account receivables, account payables, and accrued expenses.

In order to anticipate and mitigate the risk of exchange rate fluctuations against the US Dollar, the Company seeks, where possible, to ensure that significant portions of purchases and sales are carried out in the same currency as well as matching the timing of transactions and to implement a policy whereby debts in foreign currency used to finance business activities are made in the same currency (natural hedging). The management monitors to make sure that such policies are implemented to the maximum extent possible. The Company also enters, as appropriate, into forward transactions with banks to buy US Dollar in relation to the purchases of petroleum products made in US Dollar to create a hedging over the risk of currency exchange.

The Group closely monitors the foreign exchange rate fluctuation and market expectation so it can take the necessary actions benefited most to the Group in due time, among others, by buying forward with the purpose of hedging the exchange risk from its US Dollar purchases of petroleum products as mentioned above.

**PT AKR CORPORINDO TBK
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2025 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
kecuali Dinyatakan Lain)**

***PT AKR CORPORINDO TBK
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2025 and
for the Year Then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
unless Otherwise Stated)***

34. TUJUAN DAN KEBIJAKAN MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (lanjutan)

b. Risiko Pasar (lanjutan)

Risiko nilai tukar mata uang asing (lanjutan)

Tabel berikut menunjukkan sensitivitas atas perubahan yang wajar dari nilai tukar Rupiah terhadap Dolar AS, dimana semua variabel lain konstan dan mengasumsikan tidak ada pembelian tambahan kontrak *forward*, atas aset dan liabilitas moneter dalam Dolar AS terhadap laba sebelum pajak penghasilan konsolidasian untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025:

	Kenaikan (penurunan) dalam persentase/ *Increase (decrease) in percentage*	Efek terhadap laba sebelum pajak/ *Effect on income before tax*	
Dolar AS - Rupiah	1%	11.958.349	*US Dollar - Rupiah*
	(1%)	(11.958.349)	

Aset dan liabilitas moneter yang signifikan dari Kelompok Usaha dalam mata uang asing pada tanggal-tanggal pelaporan disajikan pada Catatan 29.

Risiko harga komoditas

Kelompok Usaha, secara khusus Perusahaan, dipengaruhi oleh labilnya harga beberapa komoditas di pasar dari waktu ke waktu, terutama dari komoditas harga minyak ("BBM"). Penjualan BBM menyumbangkan lebih dari 50% pada kedua periode yang disajikan dari penjualan dan pendapatan konsolidasian. Manajemen memonitor pergerakan (tren) dan analisa pasar atas harga BBM secara ketat dan terus menerus untuk meminimalisasi efek signifikan dan negatif terhadap kinerja keuangannya. Manajemen juga mengurangi risiko ini dengan memelihara tingkat persediaan secara tepat untuk mengambil efek terbaik dari lindung nilai alami.

34. FINANCIAL RISK MANAGEMENT OBJECTIVES AND POLICIES (continued)

b. Market Risk (continued)

Foreign exchange risk (continued)

The following table demonstrates the sensitivity to a reasonably change in Rupiah exchange rate against US Dollar, with all other variables held constant and assuming no additional forward contracts were purchased, on the US Dollar denominated monetary assets and liabilities, to the consolidated profits before income tax for the year ended December 31, 2025:

The Group's significant monetary assets and liabilities denominated in foreign currencies at reporting dates are presented in Note 29.

Commodity price risk

The Group, in particular the Company, is affected by the volatility of certain commodity prices in the market from time to time, specifically from petroleum products ("BBM"). The sales of BBM contributed over 50% for both periods presented from total consolidated sales and revenues. The management monitors the market trend and analysis of BBM price strictly and continuously to minimize significant and negative impact to its financial performance. Management also reduces the risk by maintaining a proper inventory level to get the optimum effect from natural hedging.

**PT AKR CORPORINDO TBK
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2025 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
kecuali Dinyatakan Lain)**

***PT AKR CORPORINDO TBK
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2025 and
for the Year Then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
unless Otherwise Stated)***

34. TUJUAN DAN KEBIJAKAN MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (lanjutan)

c. Risiko Likuiditas

Risiko likuiditas adalah risiko dimana Kelompok Usaha tidak bisa memenuhi kewajiban pada saat jatuh tempo. Manajemen melakukan evaluasi dan pengawasan yang ketat atas arus kas masuk (*cash-in*) dan kas keluar (*cash-out*) untuk memastikan tersedianya dana untuk memenuhi kebutuhan pembayaran kewajiban yang jatuh tempo. Secara umum, kebutuhan dana untuk pelunasan kewajiban jangka pendek maupun jangka panjang yang jatuh tempo diperoleh dari penjualan kepada pelanggan.

Tabel di bawah merupakan profil jatuh tempo liabilitas keuangan Kelompok Usaha pada jumlah kontraktual yang belum didiskonto pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024:

34. FINANCIAL RISK MANAGEMENT OBJECTIVES AND POLICIES (continued)

c. Liquidity Risk

Liquidity risk is the risk that the Group is unable to meet its obligations when they fall due. The management evaluates and monitors cash-in flows and cash-out flows to ensure the availability of funds to settle the due obligation. In general, fund needed to settle the current and long-term liabilities is obtained from sales activities to customers.

The table below summarizes the maturity profile of the Group's financial liabilities at undiscounted contractual amount as of December 31, 2025 and 2024:

	31 Desember 2025/*December 31, 2025*				
	Di bawah 1 tahun/ *Below 1 year*	Lebih dari 1 tahun sampai dengan 2 tahun/ *Over 1 year up to 2 years*	Lebih dari 3 tahun/ *Over 3 years*	Total/ *Total*	
Liabilitas Keuangan					***Financial Liabilities***
Hutang bank jangka pendek	238.560.912	-	-	238.560.912	*Short-term bank loan*
Hutang usaha	12.338.231.994	-	-	12.338.231.994	*Trade payables*
Hutang lain-lain - pihak ketiga	205.008.603	-	-	205.008.603	*Other payables - third parties*
Biaya masih harus dibayar	663.234.721	-	-	663.234.721	*Accrued expenses*
Liabilitas imbalan kerja jangka pendek	118.052.612	-	-	118.052.612	*Short-term employee benefits liabilities*
Liabilitas sewa	112.766.657	371.843.006	355.585.982	840.195.645	*Lease liabilities*
Hutang bank jangka panjang	1.466.374.801	2.650.895.746	1.491.751.833	5.609.022.380	*Long-term bank loans*
Hutang dividen	56.785.476	-	-	56.785.476	*Dividend payable*
Total Liabilitas Keuangan	**15.199.015.776**	**3.022.738.752**	**1.847.337.815**	**20.069.092.343**	***Total Financial Liabilities***

34. TUJUAN DAN KEBIJAKAN MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (lanjutan)

34. FINANCIAL RISK MANAGEMENT OBJECTIVES AND POLICIES (continued)

c. Risiko Likuiditas (lanjutan)

c. Liquidity Risk (continued)

Tabel di bawah merupakan profil jatuh tempo liabilitas keuangan Kelompok Usaha pada jumlah kontraktual yang belum didiskonto pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024: (lanjutan)

The table below summarizes the maturity profile of the Group's financial liabilities at undiscounted contractual amount as of December 31, 2025 and 2024: (continued)

	31 Desember 2024/*December 31, 2024*				
	Di bawah 1 tahun/ *Below 1 year*	Lebih dari 1 tahun sampai dengan 2 tahun/ *Over 1 year up to 2 years*	Lebih dari 3 tahun/ *Over 3 years*	Total/ *Total*	
Liabilitas Keuangan					***Financial Liabilities***
Hutang bank jangka pendek	7.047.633	-	-	7.047.633	*Short-term bank loan*
Hutang usaha	10.391.582.462	-	-	10.391.582.462	*Trade payables*
Hutang lain-lain - pihak ketiga	464.043.998	-	-	464.043.998	*Other payables - third parties*
Biaya masih harus dibayar	585.685.122	-	-	585.685.122	*Accrued expenses*
Liabilitas imbalan kerja jangka pendek	144.298.160	-	-	144.298.160	*Short-term employee benefits liabilities*
Liabilitas sewa	47.734.252	281.892.436	433.446.673	763.073.361	*Lease liabilities*
Hutang bank jangka panjang	1.523.314.120	2.194.403.473	2.185.504.208	5.903.221.801	*Long-term bank loans*
Hutang dividen	1.000.288	54.107.938	-	55.108.226	*Dividend payable*
Total Liabilitas Keuangan	**13.164.706.035**	**2.530.403.847**	**2.618.950.881**	**18.314.060.763**	***Total Financial Liabilities***

Perubahan pada Liabilitas yang Timbul dari Aktivitas Pendanaan

Changes in Liabilities Arising from Financing Activities

	2025					
	1 Januari/ *January 1*	Arus Kas Neto/ *Net Cash Flow*	Efek Selisih Kurs/ *Exchange Rate Effect*	Lain-lain/ *Others*	31 Desember/ *December 31*	
Hutang bank jangka pendek	7.000.000	230.365.000	-	-	237.365.000	*Short-term bank loan*
Bagian lancar atas hutang bank jangka panjang	1.140.851.204	(1.391.156.266)	-	1.432.743.715	1.182.438.653	*Current maturities on long-term bank loans*
Hutang bank jangka panjang	3.645.033.749	1.488.745.613	-	(1.430.691.443)	3.703.087.919	*Long-term bank loans*
Liabilitas sewa	524.227.040	(79.841.595)	904.520	144.600.748	589.890.713	*Lease liabilities*
Hutang dividen	55.108.226	-	-	1.677.250	56.785.476	*Dividend payable*
Total liabilitas dari aktivitas pendanaan	**5.372.220.219**	**248.112.752**	**904.520**	**148.330.270**	**5.769.567.761**	***Total liabilities from financing activities***

**PT AKR CORPORINDO TBK
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2025 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
kecuali Dinyatakan Lain)**

***PT AKR CORPORINDO TBK
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2025 and
for the Year Then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
unless Otherwise Stated)***

34. TUJUAN DAN KEBIJAKAN MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (lanjutan)

c. Risiko Likuiditas (lanjutan)

Perubahan pada Liabilitas yang Timbul dari Aktivitas Pendanaan (lanjutan)

34. FINANCIAL RISK MANAGEMENT OBJECTIVES AND POLICIES (continued)

c. Liquidity Risk (continued)

Changes in Liabilities Arising from Financing Activities (continued)

	2024					
	1 Januari/ *January 1*	Arus Kas Neto/ *Net Cash Flow*	Efek Selisih Kurs/ *Exchange Rate Effect*	Lain-lain/ *Others*	31 Desember/ *December 31*	
Hutang bank jangka pendek	5.000.000	2.000.000	-	-	7.000.000	*Short-term bank loan*
Bagian lancar atas hutang bank jangka panjang	1.089.267.780	(2.120.433.982)	-	2.172.017.406	1.140.851.204	*Current maturities on long-term bank loans*
Hutang bank jangka panjang	3.117.277.847	2.700.000.000	(4.763.279)	(2.167.480.819)	3.645.033.749	*Long-term bank loans*
Bagian lancar atas hutang obligasi	36.833.937	(37.000.000)	-	166.063	-	*Current maturities on bonds payables*
Liabilitas sewa	380.386.577	(131.265.846)	1.197.547	273.908.762	524.227.040	*Lease liabilities*
Hutang dividen	55.536.914	-	-	(428.688)	55.108.226	*Dividend payable*
Total liabilitas dari aktivitas pendanaan	**4.684.303.055**	**413.300.172**	**(3.565.732)**	**278.182.724**	**5.372.220.219**	***Total liabilities from financing activities***

Kolom ‘Lain-lain’ mencakup efek reklasifikasi ke bagian lancar atas hutang bank jangka panjang, hutang obligasi, penambahan sewa dan penyesuaian karena berlalunya waktu, Kelompok Usaha mengklasifikasikan bunga yang dibayarkan sebagai arus kas dari aktivitas operasi.

The ‘Others’ column includes the effect of reclassification to current maturities on long-term bank loans and bonds payables, lease addition and adjustments due to the passage of time, The Group classifies interest paid as cash flows from operating activities.

PENGELOLAAN MODAL

Tujuan utama pengelolaan modal Kelompok Usaha AKR adalah untuk memastikan pemeliharaan rasio modal tertentu yang sehat untuk mendukung usaha dan memaksimalkan imbalan bagi pemegang saham. Secara kelompok maupun pada tingkat entitas induk saja, manajemen menetapkan batas-batas, yang tergantung kepada sifat proyek, untuk pengukuran rasio-rasio utama sehubungan dengan modal, antara lain, yaitu Rasio Pengembalian atas Ekuitas (“ROE”) dan Rasio Hutang terhadap Ekuitas (“DER”), tergantung pada sifat dari proyek. Manajemen mengelola struktur permodalan dan melakukan penyesuaian. berdasarkan perubahan kondisi ekonomi. Untuk memelihara dan menyesuaikan struktur permodalan, Kelompok Usaha AKR dapat memilih sejumlah opsi seperti, antara lain, menyesuaikan pembayaran dividen atau menerbitkan saham baru.

CAPITAL MANAGEMENT

The primary objective of AKR Group’s capital management is to ensure that it maintains certain healthy capital ratios in order to support its business and maximize shareholder value. On a group basis, as well as at parent level, the management sets up the measurement limits, on the key capital related ratios, among others. Return of Equity (“ROE”) and Debt to Equity Ratio (“DER”), depending on the nature of the project, The management manages the capital structure and makes adjustments to it in line of changes in economic conditions. To maintain or adjust the capital structure, AKR Group may choose several options, among others, adjustment to dividend payment or issue new shares.

34. TUJUAN DAN KEBIJAKAN MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (lanjutan)

PENGELOLAAN MODAL (lanjutan)

Pada tingkat entitas induk, Perusahaan juga memiliki sejumlah persyaratan rasio keuangan yang diminta para kreditur sehubungan dengan fasilitas kredit yang diberikan kepada Perusahaan. Sejumlah Entitas Anak juga dimintakan hal yang sama oleh para krediturnya. Di luar ROE dan DER, rasio terkait modal yang juga disyaratkan para kreditur adalah rasio Investasi terhadap Ekuitas ("IER") pada tingkat Perusahaan. Selain itu, Perusahaan juga dipersyaratkan oleh Undang-undang Perusahaan Tahun 2007 untuk mengkontribusikan sampai dengan 20% dari modal saham diterbitkan dan dibayar penuh ke dalam dana cadangan yang tidak boleh didistribusikan. Perusahaan telah melakukan pencadangan secara tahunan dalam Rapat Umum Tahunan Para Pemegang Saham ke akun Saldo Laba yang Ditentukan Penggunaannya.

Pada tanggal-tanggal pelaporan, manajemen dapat mempertahankan rasio aktual di atas batasan yang yang dijelaskan dalam Catatan 17 dan 18.

35. STANDAR AKUNTANSI YANG TELAH DITERBITKAN NAMUN BELUM BERLAKU EFEKTIF

Standar akuntansi baru dan amandemen standar akuntansi yang telah diterbitkan sampai tanggal penerbitan laporan keuangan konsolidasian Kelompok Usaha namun belum berlaku efektif diungkapkan berikut ini. Manajemen bermaksud untuk menerapkan standar-standar tersebut yang dipertimbangkan relevan terhadap Kelompok Usaha pada saat efektif, dan dampaknya terhadap posisi dan kinerja keuangan konsolidasian Kelompok Usaha masih diestimasi pada tanggal 31 Desember 2025:

Mulai efektif pada atau setelah tanggal 1 Januari 2026

Amendemen PSAK 109 and PSAK 107: Klasifikasi dan Pengukuran Instrument Keuangan

Amandemen tersebut mencakup klarifikasi atas suatu liabilitas keuangan dihentikan pengakuannya pada "tanggal penyelesaian" serta memperkenalkan pilihan kebijakan akuntansi (apabila kondisi tertentu terpenuhi) untuk menghentikan pengakuan liabilitas keuangan yang diselesaikan melalui sistem pembayaran elektronik sebelum tanggal penyelesaian.

34. FINANCIAL RISK MANAGEMENT OBJECTIVES AND POLICIES (continued)

CAPITAL MANAGEMENT (continued)

At the parent entity level, the Company also has certain financial ratio covenants imposed by the lenders from the available credit facilities provided to the Company. Certain Subsidiaries are also required the same requirements by their lenders. In addition to the above ROE and DER, the ratio which is also imposed by the lenders related to capital is the Investment to Equity Ratio ("IER") at the Company's level. In addition, the Company is also required by the Corporate Law Year 2007 to contribute to and maintain a non-distributable reserve fund until the said reserve reaches 20% of the issued and fully paid share capital. The Company has set aside a reserve on a yearly basis through the Annual General Shareholders' Meeting to the Appropriated Retained Earnings account.

At reporting dates, the management is able to maintain the actual ratios above the limits set as mentioned in Notes 17 and 18.

35. ACCOUNTING STANDARDS ISSUED BUT NOT YET EFFECTIVE

The new and amended standards that have been issued up to the date of issuance of the Group's consolidated financial statements, but not yet effective are disclosed below. The management intends to adopt these standards that are considered relevant to the Group when they become effective, and the impact to the consolidated financial position and performance of the Group is still being estimated as of December 31, 2025:

Effective beginning on or after January 1, 2026

Amendments to PSAK 109 and PSAK 107: Classification and Measurement of Financial Instruments

The amendments includes a clarification that a financial liability is derecognised on the 'settlement date' and the introduction of an accounting policy choice (if specific conditions are met) to derecognise financial liabilities settled using an electronic payment system before the settlement date.

35. STANDAR AKUNTANSI YANG TELAH DITERBITKAN NAMUN BELUM BERLAKU EFEKTIF (lanjutan)

Mulai efektif pada atau setelah tanggal 1 Januari 2026 (lanjutan)

Amendemen PSAK 109 and PSAK 107: Klasifikasi dan Pengukuran Instrument Keuangan (lanjutan)

Selain itu, panduan tambahan ditambahkan mengenai bagaimana arus kas kontraktual untuk aset keuangan dengan fitur lingkungan, sosial, dan tata kelola perusahaan (ESG) serta fitur serupa harus dinilai. Amandemen tersebut juga mengklarifikasi apa saja yang merupakan fitur non-recourse dan karakteristik instrumen yang terkait secara kontraktual. Selain itu, amandemen tersebut memperkenalkan persyaratan pengungkapan untuk instrumen keuangan dengan fitur kontinjensi serta persyaratan pengungkapan tambahan untuk instrumen ekuitas yang diklasifikasikan pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain (OCI).

Amandemen tersebut berlaku efektif untuk periode tahunan yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2026, dengan penerapan dini diperkenankan hanya untuk klasifikasi aset keuangan dan pengungkapan terkait. Kelompok Usaha tidak memperkirakan bahwa amandemen tersebut akan memberikan dampak material terhadap laporan keuangan Kelompok Usaha.

Amandemen tersebut mengklarifikasi penerapan persyaratan own-use untuk kontrak yang berada dalam ruang lingkup, mengubah persyaratan penetapan (designation) atas item yang dilindungi dalam hubungan lindung nilai arus kas untuk kontrak-kontrak tersebut, serta menambahkan persyaratan pengungkapan baru untuk memungkinkan investor memahami dampak kontrak tersebut terhadap kinerja keuangan dan arus kas perusahaan.

35. ACCOUNTING STANDARDS ISSUED BUT NOT YET EFFECTIVE (continued)

Effective beginning on or after January 1, 2026 (continued)

Amendments to PSAK 109 and PSAK 107: Classification and Measurement of Financial Instruments (continued)

Further, additional guidance is added on how the contractual cash flows for financial assets with environmental, social and corporate governance (ESG) and similar features should be assessed. The amendments also clarifiies what constitute 'non-recourse features' and what are the characteristics of contractually linked instruments. The amendments also introduces of disclosures for financial instruments with contingent features and additional disclosure requirements for equity instruments classified at fair value through other comprehensive income (OCI).

Further, additional guidance is added on how the contractual cash flows for financial assets with environmental, social and corporate governance (ESG) and similar features should be assessed. The amendments also clarifiies what constitute 'non-recourse features' and what are the characteristics of contractually linked instruments. The amendments also introduces of disclosures for financial instruments with contingent features and additional disclosure requirements for equity instruments classified at fair value through other comprehensive income (OCI).

The amendments clarify the application of the 'own-use' requirements for in-scope contracts, amend the designation requirements for a hedged item in a cash flow hedging relationship for in-scope contracts, and add new disclosure requirements to enable investors to understand the effect of these contracts on a company's financial performance and cash flows.

35. STANDAR AKUNTANSI YANG TELAH DITERBITKAN NAMUN BELUM BERLAKU EFEKTIF (lanjutan)

Mulai efektif pada atau setelah tanggal 1 Januari 2026 (lanjutan)

Amendemen PSAK 109 and PSAK 107: Klasifikasi dan Pengukuran Instrument Keuangan (lanjutan)

Amandemen tersebut akan berlaku efektif untuk periode pelaporan tahunan yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2026. Penerapan dini diperbolehkan, namun harus diungkapkan. Amandemen terkait pengecualian own-use diterapkan secara retrospektif, sedangkan amandemen akuntansi lindung nilai diterapkan secara prospektif untuk hubungan lindung nilai baru yang ditetapkan sejak tanggal penerapan awal. Selain itu, amandemen pengungkapan dalam PSAK 107 harus diterapkan bersamaan dengan amandemen PSAK 109. Kelompok Usaha tidak memperkirakan bahwa amandemen tersebut akan memberikan dampak material terhadap laporan keuangan Kelompok Usaha.

Penyesuaian tahunan 2024

DSAK IAI menerbitkan Penyesuaian Tahunan 2024 SAK Indonesia), yang mencakup klarifikasi, penyederhanaan, koreksi, atau perubahan untuk meningkatkan konsistensi dalam PSAK 107 Instrumen Keuangan: Pengungkapan, PSAK 109 Instrumen Keuangan, PSAK 10 Laporan Keuangan Konsolidasian, dan PSAK 207 Laporan Arus Kas. Amandemen tersebut akan berlaku efektif untuk periode pelaporan yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2026. Penerapan lebih awal diperkenankan dan harus diungkapkan. Amandemen tersebut tidak diharapkan menimbulkan dampak material terhadap laporan keuangan Kelompok Usaha.

Mulai efektif pada atau setelah tanggal 1 Januari 2027

PSAK 118: Penyajian dan Pengungkapan dalam Laporan Keuangan

PSAK 118 akan menggantikan PSAK 201. Standar baru ini memperkenalkan persyaratan baru terkait penyajian dalam laporan laba rugi, termasuk total dan subtotal tertentu. Selain itu, entitas diwajibkan untuk mengklasifikasikan seluruh pendapatan dan beban dalam laporan laba rugi ke dalam salah satu dari lima kategori: operasi, investasi, pendanaan, pajak penghasilan, dan operasi yang dihentikan.

35. ACCOUNTING STANDARDS ISSUED BUT NOT YET EFFECTIVE (continued)

Effective beginning on or after January 1, 2026 (continued)

Amendments to PSAK 109 and PSAK 107: Classification and Measurement of Financial Instruments (continued)

The amendments will take effect for annual reporting periods starting on or after January 1, 2026. Early adoption is allowed, but it must be disclosed. The amendments concerning the own-use exception are to be applied retrospectively, while the hedge accounting amendments should be applied prospectively to new hedging relationships designated from the initial application date. Additionally, the PSAK 107 disclosure amendments must be implemented alongside the PSAK 109 amendments. The Group does not anticipate that the amendments will have a material effect on the Group's financial statements.

Annual Improvements 2024

The DSAK IAI issued Annual Improvements 2024 to SAK Indonesia, which include clarifications, simplifications, corrections or changes to improve consistency in, PSAK 107 Financial instruments: Disclosure, PSAK 109 Financial Instruments, PSAK 110 Consolidated Financial Statements and PSAK 207 Statements of Cash Flows. The amendments will be effective for reporting periods beginning on or after 1 January 2026. Earlier application is permitted and must be disclosed. The amendments are not expected to have a material impact on the Group's financial statements.

Effective beginning on or after January 1, 2027

PSAK 118: Presentation and Disclosure in Financial Statements

PSAK 118 will replace PSAK 201. The new standard introduces new requirements for presentation within the statement of profit or loss, including specified totals and subtotals. Furthermore, entities are required to classify all income and expenses within the statement of profit or loss into one of five categories: operating, investing, financing, income taxes and discontinued operations.

35. STANDAR AKUNTANSI YANG TELAH DITERBITKAN NAMUN BELUM BERLAKU EFEKTIF (lanjutan)

Mulai efektif pada atau setelah tanggal 1 Januari 2027 (lanjutan)

PSAK 118: Penyajian dan Pengungkapan dalam Laporan Keuangan (lanjutan)

Standar ini juga mensyaratkan pengungkapan ukuran kinerja yang didefinisikan manajemen, subtotal pendapatan dan beban, serta mencakup persyaratan baru terkait agregasi dan disagregasi informasi keuangan.

PSAK 118 berlaku efektif untuk periode pelaporan yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2027, dengan penerapan dini diperkenankan dan harus diungkapkan. PSAK 118 akan diterapkan secara retrospektif.

Kelompok Usaha saat ini sedang mengidentifikasi seluruh dampak yang akan timbul atas laporan keuangan utama dan catatan atas laporan keuangan terkait implementasi amandemen tersebut.

PSAK 119: Entitas Anak Tanpa Akuntabilitas Publik - Pengungkapan

Standar baru tersebut memungkinkan entitas yang memenuhi syarat untuk memilih menerapkan pengungkapan yang lebih singkat dan tetap menerapkan persyaratan pengakuan, pengukuran, dan penyajian dalam standar akuntansi lainnya. Untuk memenuhi syarat, pada akhir periode pelaporan, entitas harus merupakan entitas anak sebagaimana didefinisikan dalam PSAK 110, tidak memiliki akuntabilitas publik, dan memiliki entitas induk (baik entitas induk akhir atau entitas induk perantara) yang menyusun laporan keuangan konsolidasian yang tersedia untuk penggunaan publik dan sesuai dengan standar akuntansi keuangan SAK Indonesia, SAK Internasional atau IFRS accounting standards.

PSAK 119 akan berlaku efektif untuk periode pelaporan yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2027, dengan penerapan dini diperkenankan. Kelompok Usaha memperkirakan bahwa standar baru tersebut tidak akan memberikan dampak material terhadap laporan keuangan Kelompok Usaha.

35. ACCOUNTING STANDARDS ISSUED BUT NOT YET EFFECTIVE (continued)

Effective beginning on or after January 1, 2027 (continued)

PSAK 118: Presentation and Disclosure in Financial Statements (continued)

The standard requires disclosure of newly defined management-defined performance measures, subtotals of income and expenses, and it also includes new requirements for aggregation and disaggregation of financial information.

PSAK 118 are effective for reporting periods beginning on or after January 1, 2027, but earlier application is permitted and must be disclosed. PSAK 118 will apply retrospectively.

The Group is currently working to identify all impacts the amendments will have on the primary financial statements and notes to the financial statements.

PSAK 119: Subsidiaries without Public Accountability - Disclosures

The new standard allows eligible entities to elect to apply its reduced disclosure requirements and still applying the recognition, measurement and presentation requirements in other accounting standards. To be eligible, at the end of the reporting period, an entity must be a subsidiary as defined in PSAK 110, cannot have public accountability and must have a parent (ultimate or intermediate) that prepares consolidated financial statements, available for public use, which comply with SAK Indonesia, SAK Internasional or IFRS accounting standards.

PSAK 119 will become effective for reporting periods beginning on or after January 1, 2027, with early application permitted. The Group anticipates that the new standard will have no material effect on the Group's financial statements.

36. AKTIVITAS NON-KAS

Aktivitas non-kas yang mendukung laporan arus kas konsolidasian pada setiap tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

36. NON-CASH ACTIVITIES

Non-cash activities supporting the consolidated statements of cash flows at each reporting date is as follows:

	31 Des. 2025/ *Dec. 31, 2025*	31 Des. 2024/ *Dec. 31, 2024*	
Penambahan aset tetap melalui penambahan hutang - akumulasi	233.542.138	402.385.377	*Acquisitions of property, plant and equipment through incurrence of liabilities - accumulated*
Penambahan aset tetap melalui reklasifikasi uang muka	-	12.354.068	*Acquisitions of property, plant and equipment through reclassification from advance payments*
Pengurangan aset tetap melalui reklasifikasi ke akun biaya dibayar dimuka	(29.589.757)	-	*Deduction of property, plant and equipment through reclassification from prepaid expenses*

37. PERISTIWA SETELAH PERIODE PELAPORAN

Ketegangan geopolitik di Timur Tengah

Ketegangan meningkat baru-baru ini pada akhir Februari 2026 dengan adanya serangan udara oleh Amerika Serikat dan Israel ke berbagai lokasi dan kota di Iran, dan masih berlanjut hingga saat ini, dengan Iran merespons melalui serangan rudal dan *drone* terhadap Israel serta berbagai pangkalan militer Amerika Serikat dan negara-negara sekutu AS di kawasan tersebut. Serangan tersebut telah menimbulkan berbagai tantangan secara global, khususnya gangguan terhadap pasokan minyak dan gas ke seluruh dunia akibat penutupan Selat Hormuz. Harga minyak telah meningkat secara signifikan sejak saat itu, termasuk biaya logistik. Seiring dengan situasi yang terus berkembang, dunia menghadapi berbagai faktor yang tidak pasti, ketidakpastian, serta kelangkaan pasokan energi.

Manajemen memantau secara ketat dampak terhadap operasionalnya, dan akan mengambil tindakan/strategi yang paling tepat dalam menghadapi berbagai kondisi, termasuk bersikap *prudent* dalam analisis kredit dengan berfokus pada kinerja pelanggan, serta berhati-hati dalam pengeluaran dan investasi.

Kelompok Usaha telah dan dapat terus menilai dampak dari ketegangan di kawasan tersebut terhadap operasional Kelompok Usaha. Dampak signifikan lebih lanjut dari konflik yang berkelanjutan, apabila ada, akan tercermin dalam laporan keuangan konsolidasian Kelompok Usaha pada periode berikutnya.

37. EVENTS AFTER THE REPORTING PERIOD

Geopolitic tension in the Middle East

The tension escalated recently in the end of February 2026 with airstrikes by the United States and Israel on multiple sites and cities across Iran and continues until now with the Iranian responded by missile and drone strikes against the Israel and various US bases and US-allied countries in the region. The strikes has posed wide-ranging challenges globally, particularly disruption to the oil and gas supply to around the world with the closing of Strait of Hormuz. Oil prices has increased significantly ever since, included the logistics costs. Given the evolving situation, the world is facing many unknown factors, uncertainties and scarcity of supplies of energy.

The management is closely monitoring the impacts to its operations, and shall take the most appropriate action/strategy in dealing with different situation, including prudent in credit analysis by focusing on its customers' performances, careful in spendings and investments.

The Group has and may continue to assess the impact of the tension in the Region to the Group's operations. Further significant impact of the continued war, if any, will be reflected in the Group's consolidated financial statement in the subsequent periods.

Referensi Silang SEOJK No. 16/SEOJK.04/2021: **Bentuk dan Isi Laporan Tahunan Emiten Perusahaan Publik**

	Keterangan	Halaman
I.	**Ketentuan Umum**	
II.	**Bentuk Laporan**	
1.	Laporan Tahunan disajikan dalam bentuk dokumen cetak dan dokumen elektronik	✓
2.	Laporan Tahunan yang disajikan dalam bentuk dokumen cetak, dicetak pada kertas yang berwarna terang, berkualitas baik, berukuran A4, dijilid, dan dapat diperbanyak dengan kualitas yang baik.	✓
3.	Laporan Tahunan dapat menyajikan informasi berupa gambar, grafik, tabel, dan/atau diagram dengan mencantumkan judul dan/atau keterangan yang jelas, sehingga mudah dibaca dan dipahami.	✓
4.	Laporan Tahunan yang disajikan dalam bentuk dokumen elektronik merupakan Laporan Tahunan yang dikonversi dalam *portable document format* (PDF).	✓
III.	**Isi Laporan Tahunan**	
1.	Laporan Tahunan paling sedikit memuat:	
	a. ikhtisar data keuangan penting;	24
	b. informasi saham (jika ada);	28
	c. laporan Direksi;	44
	d. laporan Dewan Komisaris;	38
	e. profil Emiten atau Perusahaan Publik;	58
	f. analisis dan pembahasan manajemen;	112
	g. tata kelola Emiten atau Perusahaan Publik;	166
	h. tanggung jawab sosial dan lingkungan Emiten atau Perusahaan Publik;	280
	i. laporan keuangan tahunan yang telah diaudit; dan	285
	j. surat pernyataan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris tentang tanggung jawab atas Laporan Tahunan.	54–55
2.	Uraian Isi Laporan Tahunan	
a.	**Ikhtisar Data Keuangan Penting Ikhtisar data keuangan penting memuat informasi keuangan yang disajikan dalam bentuk perbandingan selama 3 (tiga) tahun buku atau sejak memulai usahanya jika Emiten atau Perusahaan Publik tersebut menjalankan kegiatan usahanya kurang dari 3 (tiga) tahun, paling sedikit memuat:**	
	i. pendapatan/penjualan;	25
	ii. laba bruto;	25
	iii. laba (rugi);	25
	iv. jumlah laba (rugi) yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk dan kepentingan non pengendali	25
	v. total laba (rugi) komprehensif;	25
	vi. jumlah laba (rugi) komprehensif yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk dan kepentingan non pengendali;	25
	vii. laba (rugi) per saham;	25
	viii. jumlah aset;	24
	ix. jumlah liabilitas	24

	Keterangan	Halaman
	x. jumlah ekuitas;	24
	xi. rasio laba (rugi) terhadap jumlah aset;	26
	xii. rasio laba (rugi) terhadap ekuitas;	26
	xiii. rasio laba (rugi) terhadap pendapatan/penjualan;	26
	xiv. rasio lancar;	26
	xv. rasio liabilitas terhadap ekuitas;	26
	xvi. rasio liabilitas terhadap jumlah aset; dan	26
	xvii. informasi dan rasio keuangan lainnya yang relevan dengan Emiten atau Perusahaan Publik dan jenis industrinya.	26
b.	**Informasi Saham** **Informasi saham bagi Perusahaan Terbuka paling sedikit memuat:**	
	i. saham yang telah diterbitkan untuk setiap masa triwulan yang disajikan dalam bentuk perbandingan selama 2 (dua) tahun buku terakhir, paling sedikit memuat:	28
	• jumlah saham yang beredar;	✓
	• kapitalisasi pasar berdasarkan harga pada bursa efek tempat saham dicatatkan;	✓
	• harga saham tertinggi, terendah, dan penutupan berdasarkan harga pada bursa efek tempat saham dicatatkan; dan	✓
	• volume perdagangan pada bursa efek tempat saham dicatatkan.	✓
	Informasi dalam huruf b), huruf c) dan huruf d) hanya diungkapkan jika sahamnya tercatat di bursa efek;	
	ii. dalam hal terjadi aksi korporasi yang menyebabkan terjadinya perubahan pada saham, seperti pemecahan saham (*stock split*), penggabungan saham (*reverse stock*), dividen saham, saham bonus, perubahan nilai nominal saham, penerbitan efek konversi, serta penambahan dan pengurangan modal, informasi saham sebagaimana dimaksud pada angka 1) ditambahkan penjelasan paling sedikit mengenai:	29
	• tanggal pelaksanaan aksi korporasi;	
	• rasio pemecahan saham (*stock split*), penggabungan saham (*reverse stock*), dividen saham, saham bonus, jumlah efek konversi yang diterbitkan, dan perubahan nilai nominal saham;	
	• jumlah saham beredar sebelum dan sesudah aksi korporasi;	
	• jumlah efek konversi yang dilaksanakan (jika ada); dan	
	• harga saham sebelum dan sesudah aksi korporasi;	
	iii. dalam hal terjadi penghentian sementara perdagangan saham (*suspension*) dan/atau pembatalan pencatatan saham (*delisting*) dalam tahun buku, dijelaskan alasan penghentian sementara perdagangan saham (*suspension*) dan/atau pembatalan pencatatan saham (*delisting*) tersebut; dan	29
	iv. dalam hal penghentian sementara perdagangan saham (*suspension*) sebagaimana dimaksud pada angka 3) dan/atau proses pembatalan pencatatan saham (*delisting*) masih berlangsung hingga akhir periode Laporan Tahunan, dijelaskan tindakan yang dilakukan untuk menyelesaikan penghentian sementara perdagangan saham (*suspension*) dan/atau pembatalan pencatatan saham (*delisting*) tersebut.	29
c.	**Laporan Direksi**	
	Laporan Direksi paling sedikit memuat uraian singkat mengenai:	
	i. kinerja Emiten atau Perusahaan Publik, paling sedikit memuat:	44
	• strategi dan kebijakan strategis Emiten atau Perusahaan Publik;	46
	• peranan Direksi dalam perumusan strategi dan kebijakan strategis Emiten atau Perusahaan Publik;	46
	• proses yang dilakukan Direksi untuk memastikan implementasi strategi Emiten atau Perusahaan Publik;	46
	• perbandingan antara hasil yang dicapai dengan yang ditargetkan Emiten atau Perusahaan Publik; dan	47

	Keterangan	Halaman
	• kendala yang dihadapi Emiten atau Perusahaan Publik	46
	ii. gambaran tentang prospek usaha Emiten atau Perusahaan Publik; dan	50
	iii. penerapan tata kelola Emiten atau Perusahaan Publik.	48
d.	**Laporan Dewan Komisaris**	
	Laporan Dewan Komisaris paling sedikit memuat uraian singkat mengenai:	
	i. penilaian terhadap kinerja Direksi mengenai pengelolaan Emiten atau Perusahaan Publik, termasuk pengawasan Dewan Komisaris dalam perumusan dan implementasi strategi Emiten atau Perusahaan Publik yang dilakukan oleh Direksi;	40
	ii. pandangan atas prospek usaha Emiten atau Perusahaan Publik yang disusun oleh Direksi; dan	41
	iii. pandangan atas penerapan tata kelola Emiten atau Perusahaan Publik.	41
e.	**Profil Emiten atau Perusahaan Publik**	
	Profil Emiten atau Perusahaan Publik paling sedikit memuat informasi:	
	i. nama Emiten atau Perusahaan Publik termasuk apabila terdapat perubahan nama, alasan perubahan, dan tanggal efektif perubahan nama pada tahun buku;	58
	ii. akses terhadap Emiten atau Perusahaan Publik termasuk kantor cabang atau kantor perwakilan yang memungkinkan masyarakat dapat memperoleh informasi mengenai Emiten atau Perusahaan Publik, meliputi:	59
	• alamat;	59
	• nomor telepon;	59
	• alamat surat elektronik; dan	59
	• alamat situs web;	59
	iii. riwayat singkat Emiten atau Perusahaan Publik;	60
	iv. visi dan misi Emiten atau Perusahaan Publik serta budaya perusahaan (*corporate culture*) atau nilai-nilai perusahaan; ✓	6
	v. kegiatan usaha menurut anggaran dasar terakhir, kegiatan usaha yang dijalankan pada tahun buku, serta jenis barang dan/atau jasa yang dihasilkan;	66
	vi. wilayah operasional Emiten atau Perusahaan Publik; wilayah operasional merupakan wilayah atau daerah pelaksanaan kegiatan operasional atau jangkauan dari kegiatan operasional perusahaan.	106–109
	vii. struktur organisasi Emiten atau Perusahaan Publik dalam bentuk bagan, paling sedikit sampai dengan struktur 1 (satu) tingkat di bawah Direksi termasuk komite di bawah Direksi (jika ada) dan komite di bawah Dewan Komisaris, disertai dengan nama dan jabatan;	74
	viii. daftar keanggotaan asosiasi industri baik dalam skala nasional maupun internasional yang berkaitan dengan penerapan keuangan berkelanjutan;	73
	ix. profil Direksi, paling sedikit memuat	78–84
	• nama dan jabatan yang sesuai dengan tugas dan tanggung jawab;	✓
	• foto terbaru;	✓
	• usia;	✓
	• Kewarganegaraan;	✓
	• riwayat pendidikan dan/atau sertifikasi;	✓
	• riwayat jabatan, meliputi informasi;	✓
	▶ dasar hukum pengangkatan sebagai anggota Direksi pada Emiten atau Perusahaan Publik yang bersangkutan;	✓
	▶ rangkap jabatan, baik sebagai anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan/atau anggota komite serta jabatan lainnya baik di dalam maupun di luar Emiten atau Perusahaan Publik. Dalam hal anggota Direksi tidak memiliki rangkap jabatan, maka diungkapkan mengenai hal tersebut; dan	✓
	▶ pengalaman kerja beserta periode waktunya baik di dalam maupun di luar Emiten atau Perusahaan Publik;	✓

Keterangan	Halaman
• hubungan afiliasi dengan anggota Direksi lainnya, anggota Dewan Komisaris, pemegang saham utama, dan pengendali baik langsung maupun tidak langsung sampai kepada pemilik individu, meliputi nama pihak yang terafiliasi. Dalam hal anggota Direksi tidak memiliki hubungan afiliasi, maka Emiten atau Perusahaan Publik mengungkapkan hal tersebut; dan	✓
• perubahan komposisi anggota Direksi dan alasan perubahannya. Dalam hal tidak terdapat perubahan komposisi anggota Direksi, maka diungkapkan mengenai hal tersebut;	✓
x. profil Dewan Komisaris, paling sedikit memuat:	75–77
• nama dan jabatan;	✓
• foto terbaru;	✓
• usia;	✓
• kewarganegaraan;	✓
• riwayat pendidikan dan/atau sertifikasi;	✓
• riwayat jabatan, meliputi informasi:	✓
► dasar hukum pengangkatan sebagai anggota Dewan Komisaris;	✓
► dasar hukum pengangkatan pertama kali sebagai anggota Dewan Komisaris yang merupakan komisaris independen pada Emiten atau Perusahaan Publik yang bersangkutan;	✓
► rangkap jabatan, baik sebagai anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, dan/atau anggota komite serta jabatan lainnya baik di dalam maupun di luar Emiten atau Perusahaan Publik. Dalam hal anggota Dewan Komisaris tidak memiliki rangkap jabatan, maka diungkapkan mengenai hal tersebut; dan	✓
► pengalaman kerja beserta periode waktunya baik di dalam maupun di luar Emiten atau Perusahaan Publik;	✓
• hubungan afiliasi dengan anggota Dewan Komisaris lainnya, pemegang saham utama, dan pengendali baik langsung maupun tidak langsung sampai kepada pemilik individu, meliputi nama pihak yang terafiliasi; Dalam hal anggota Dewan Komisaris tidak memiliki hubungan afiliasi, maka Emiten atau Perusahaan Publik mengungkapkan hal tersebut;	202
• pernyataan independensi komisaris independen dalam hal komisaris independen telah menjabat lebih dari 2 (dua) periode; dan	77
• perubahan komposisi anggota Dewan Komisaris dan alasan perubahannya. Dalam hal tidak terdapat perubahan komposisi anggota Dewan Komisaris, maka diungkapkan mengenai hal tersebut;	85
xi. dalam hal terdapat perubahan susunan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang terjadi setelah tahun buku berakhir sampai dengan batas waktu penyampaian Laporan Tahunan, susunan yang dicantumkan dalam Laporan Tahunan adalah susunan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang terakhir dan sebelumnya;	85
xii. jumlah karyawan menurut jenis kelamin, jabatan, usia, tingkat pendidikan, dan status ketenagakerjaan (tetap/kontrak) dalam tahun buku; Pengungkapan informasi dapat disajikan dalam bentuk tabel;	154–155
xiii. nama pemegang saham dan persentase kepemilikan pada awal dan akhir tahun buku, yang terdiri dari informasi mengenai:	91–95
• pemegang saham yang memiliki 5% (lima persen) atau lebih saham Emiten atau Perusahaan Publik;	91
• anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris yang memiliki saham Emiten atau Perusahaan Publik. Dalam hal seluruh anggota Direksi dan/atau seluruh anggota Dewan Komisaris tidak memiliki saham, maka diungkapkan mengenai hal tersebut; dan	94
• kelompok pemegang saham masyarakat, yaitu kelompok pemegang saham yang masing-masing memiliki kurang dari 5% (lima persen) saham Emiten atau Perusahaan Publik;	92
Informasi di atas dapat disajikan dalam bentuk tabel.	
xiv. persentase kepemilikan tidak langsung atas saham Emiten atau Perusahaan Publik oleh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris pada awal dan akhir tahun buku, termasuk informasi mengenai pemegang saham yang terdaftar dalam daftar pemegang saham untuk kepentingan kepemilikan tidak langsung anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris;	94

	Keterangan	Halaman
	Dalam hal seluruh anggota Direksi dan/atau seluruh anggota Dewan Komisaris tidak memiliki kepemilikan tidak langsung atas saham Emiten atau Perusahaan Publik, maka diungkapkan mengenai hal tersebut.	
	xv. jumlah pemegang saham dan persentase kepemilikan per akhir tahun buku berdasarkan klasifikasi:	92
	• kepemilikan institusi lokal;	✓
	• kepemilikan institusi asing;	✓
	• kepemilikan individu lokal; dan	✓
	• kepemilikan individu asing;	✓
	xvi. informasi mengenai pemegang saham utama dan pengendali Emiten atau Perusahaan Publik, baik langsung maupun tidak langsung, sampai kepada pemilik individu, yang disajikan dalam bentuk skema atau bagan;	94
	xvii. nama entitas anak, perusahaan asosiasi, perusahaan ventura bersama dimana Emiten atau Perusahaan Publik memiliki pengendalian bersama entitas (jika ada), beserta persentase kepemilikan saham, bidang usaha, total aset, dan status operasi entitas anak, perusahaan asosiasi, perusahaan ventura bersama; Untuk entitas anak, ditambahkan informasi mengenai alamat entitas anak tersebut	99–100
	xviii. kronologis pencatatan saham, jumlah saham, nilai nominal, dan harga penawaran dari awal pencatatan hingga akhir tahun buku serta nama bursa efek dimana saham Emiten atau Perusahaan Publik dicatatkan, termasuk pemecahan saham (*stock split*), penggabungan saham (*reverse stock*), dividen saham, saham bonus, dan perubahan nilai nominal saham, pelaksanaan efek konversi, pelaksanaan penambahan dan pengurangan modal (jika ada);	96–97
	xix. informasi pencatatan efek lainnya selain efek sebagaimana dimaksud pada angka 18), yang belum jatuh tempo pada tahun buku paling sedikit memuat nama efek, tahun penerbitan, tingkat suku bunga/imbal hasil, tanggal jatuh tempo, nilai penawaran, dan peringkat efek (jika ada)	97
	xx. informasi penggunaan jasa akuntan publik (AP) dan kantor akuntan publik (KAP) beserta jaringan/asosiasi/aliansinya meliputi:	101–102
	• nama dan alamat;	✓
	• periode penugasan;	✓
	• informasi jasa audit dan/atau non audit yang diberikan;	✓
	• biaya jasa (*fee*) audit dan/atau non audit untuk masing-masing penugasan yang diberikan selama tahun buku; dan	✓
	• dalam hal AP dan KAP beserta jaringan/asosiasi/aliansinya, yang ditunjuk tidak memberikan jasa non audit, maka diungkapkan mengenai informasi tersebut; dan	✓
	• Pengungkapan informasi penggunaan jasa AP dan KAP beserta jaringan/asosiasi/aliansinya dapat disajikan dalam bentuk tabel.	✓
	• nama dan alamat lembaga dan/atau profesi penunjang pasar modal selain AP dan KAP	✓
f.	**Analisis dan Pembahasan Manajemen**	
	Analisis dan pembahasan manajemen memuat analisis dan pembahasan mengenai laporan keuangan dan informasi penting lainnya dengan penekanan pada perubahan material yang terjadi dalam tahun buku, yaitu paling sedikit memuat:	
	i. tinjauan operasi per segmen usaha sesuai dengan jenis industri Emiten atau Perusahaan Publik, paling sedikit mengenai:	113–121
	• produksi, yang meliputi proses, kapasitas, dan perkembangannya;	114–120
	• pendapatan/penjualan; dan	114–121
	• profitabilitas;	120–121
	ii. kinerja keuangan komprehensif yang mencakup perbandingan kinerja keuangan dalam 2 (dua) tahun buku terakhir, penjelasan tentang penyebab adanya perubahan dan dampak perubahan tersebut, paling sedikit mengenai:	122–133
	• aset lancar, aset tidak lancar, dan total aset;	122–126
	• liabilitas jangka pendek, liabilitas jangka panjang, dan total liabilitas;	126–127
	• ekuitas;	127–128

Keterangan	Halaman
• pendapatan/penjualan, beban, laba (rugi), penghasilan komprehensif lain, dan total laba (rugi) komprehensif; dan	128–132
• arus kas;	132–133
iii. kemampuan membayar utang atau kewajiban dengan menyajikan perhitungan rasio yang relevan;	133–134
iv. tingkat kolektibilitas piutang Emiten atau Perusahaan Publik dengan menyajikan perhitungan rasio yang relevan;	124
v. struktur modal (*capital structure*) dan kebijakan manajemen atas struktur modal (*capital structure*) tersebut disertai dasar penentuan kebijakan dimaksud;	134–135
vi. bahasan mengenai ikatan yang material untuk investasi barang modal dengan penjelasan paling sedikit memuat:	135
• tujuan dari ikatan tersebut;	✓
• sumber dana yang diharapkan untuk memenuhi ikatan tersebut;	✓
• mata uang yang menjadi denominasi; dan	✓
• langkah yang direncanakan Emiten atau Perusahaan Publik untuk melindungi risiko dari posisi mata uang asing yang terkait;	✓
vii. bahasan mengenai investasi barang modal yang direalisasikan dalam tahun buku terakhir, paling sedikit memuat:	136
• jenis investasi barang modal;	✓
• tujuan investasi barang modal; dan	✓
• nilai investasi barang modal yang dikeluarkan;	✓
viii. informasi dan fakta material yang terjadi setelah tanggal laporan akuntan (jika ada);	138
ix. prospek usaha dari Emiten atau Perusahaan Publik dikaitkan dengan kondisi industri, ekonomi secara umum dan pasar internasional disertai data pendukung kuantitatif dari sumber data yang layak dipercaya;	139–142
x. perbandingan antara target/proyeksi pada awal tahun buku dengan hasil yang dicapai (realisasi), mengenai:	136
• pendapatan/penjualan;	✓
• laba (rugi);	✓
• struktur modal (*capital structure*); atau	✓
• hal lainnya yang dianggap penting bagi Emiten atau Perusahaan Publik;	✓
xi. target/proyeksi yang ingin dicapai Emiten atau Perusahaan Publik untuk 1 (satu) tahun mendatang, mengenai:	137
• pendapatan/penjualan;	✓
• laba (rugi);	✓
• struktur modal (*capital structure*); atau	✓
• hal lainnya yang dianggap penting bagi Emiten atau Perusahaan Publik;	✓
xii. aspek pemasaran atas barang dan/atau jasa Emiten atau Perusahaan Publik, paling sedikit mengenai strategi pemasaran dan pangsa pasar;	144–145
xiii. uraian mengenai dividen selama 2 (dua) tahun buku terakhir, paling sedikit:	143
• kebijakan dividen, antara lain memuat informasi persentase jumlah dividen yang dibagikan terhadap laba bersih;	✓
• tanggal pembayaran dividen kas dan/atau tanggal distribusi dividen non kas;	✓
• jumlah dividen per saham (kas dan/atau non kas); dan	✓
• jumlah dividen per tahun yang dibayar;	✓
• Pengungkapan informasi dapat disajikan dalam bentuk tabel. Dalam hal Emiten atau Perusahaan Publik tidak membagikan dividen dalam 2 (dua) tahun terakhir, maka diungkapkan mengenai hal tersebut.	✓

	Keterangan	Halaman
	xiv. realisasi penggunaan dana hasil penawaran umum, dengan ketentuan:	145
	• dalam hal selama tahun buku, Emiten memiliki kewajiban menyampaikan laporan realisasi penggunaan dana, maka diungkapkan realisasi penggunaan dana hasil penawaran umum secara kumulatif sampai dengan akhir tahun buku; dan	
	• dalam hal terdapat perubahan penggunaan dana sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai laporan realisasi penggunaan dana hasil penawaran umum, maka Emiten menjelaskan perubahan tersebut;	
	xv. informasi material (jika ada), antara lain mengenai investasi, ekspansi, divestasi, penggabungan/ peleburan usaha, akuisisi, restrukturisasi utang/modal, transaksi material, transaksi afiliasi, dan transaksi benturan kepentingan, yang terjadi pada tahun buku, paling sedikit memuat:	145
	• tanggal, nilai, dan objek transaksi;	147
	• nama pihak yang melakukan transaksi;	147
	• sifat hubungan afiliasi (jika ada);	147
	• penjelasan mengenai kewajaran transaksi;	146
	• pemenuhan ketentuan terkait; dan	146
	• dalam hal terdapat hubungan afiliasi, selain mengungkapkan informasi sebagaimana dimaksud dalam huruf a) sampai dengan huruf e), Emiten atau Perusahaan Publik juga mengungkapkan informasi:	
	▶ pernyataan Direksi bahwa transaksi afiliasi telah melalui prosedur yang memadai untuk memastikan bahwa transaksi afiliasi dilaksanakan sesuai dengan praktik bisnis yang berlaku umum antara lain dilakukan dengan memenuhi prinsip transaksi yang wajar (*armslength principle*); dan	148
	▶ peran Dewan Komisaris dan komite audit dalam melakukan prosedur yang memadai untuk memastikan bahwa transaksi afiliasi dilaksanakan sesuai dengan praktik bisnis yang berlaku umum antara lain dilakukan dengan memenuhi prinsip transaksi yang wajar (*armslength principle*);	148
	• untuk transaksi afiliasi atau transaksi material yang merupakan kegiatan usaha yang dijalankan dalam rangka menghasilkan pendapatan usaha dan dijalankan secara rutin, berulang, dan/atau berkelanjutan, ditambahkan penjelasan bahwa transaksi afiliasi atau transaksi material tersebut merupakan kegiatan usaha yang dijalankan dalam rangka menghasilkan pendapatan usaha dan dijalankan secara rutin, berulang, dan/atau berkelanjutan;	148
	Dalam hal transaksi afiliasi atau transaksi material dimaksud telah diungkapkan dalam laporan keuangan tahunan, ditambahkan informasi mengenai rujukan pengungkapan dalam laporan keuangan tahunan tersebut.	147
	• untuk pengungkapan transaksi afiliasi dan/atau transaksi benturan kepentingan yang merupakan hasil pelaksanaan transaksi afiliasi dan/atau transaksi benturan kepentingan yang telah disetujui pemegang saham independen, ditambahkan informasi mengenai tanggal pelaksanaan RUPS yang menyetujui transaksi afiliasi dan/ atau transaksi benturan kepentingan tersebut;	
	• dalam hal tidak terdapat transaksi afiliasi dan/atau transaksi benturan kepentingan, maka diungkapkan mengenai hal tersebut;	
	xvi. perubahan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berpengaruh signifikan terhadap Emiten atau Perusahaan Publik dan dampaknya terhadap laporan keuangan (jika ada); dan	148
	xvii. perubahan kebijakan akuntansi, alasan dan dampaknya terhadap laporan keuangan (jika ada).	
g.	**Tata Kelola Emiten atau Perusahaan Publik**	
	Tata kelola Emiten atau Perusahaan Publik paling sedikit memuat uraian singkat mengenai:	
	i. RUPS, paling sedikit memuat:	176
	• Informasi mengenai keputusan RUPS pada tahun buku dan 1 (satu) tahun sebelum tahun buku meliputi:	
	▶ keputusan RUPS pada tahun buku dan 1 (satu) tahun sebelum tahun buku yang direalisasikan pada tahun buku; dan	178
	▶ keputusan RUPS pada tahun buku dan 1 (satu) tahun sebelum tahun buku yang belum direalisasikan beserta alasan belum direalisasikan;	183
	• dalam hal Emiten atau Perusahaan Publik menggunakan pihak independen dalam pelaksanaan RUPS untuk melakukan perhitungan suara, maka diungkapkan mengenai hal tersebut;	179

Keterangan	Halaman
ii. Direksi, paling sedikit memuat:	
• tugas dan tanggung jawab masing-masing anggota Direksi;	195
• Informasi mengenai tugas dan tanggung jawab masing-masing anggota Direksi diuraikan dan dapat disajikan dalam bentuk tabel.	196
• pernyataan bahwa Direksi memiliki pedoman atau piagam (*charter*) Direksi;	194
• kebijakan dan pelaksanaan frekuensi rapat Direksi, rapat Direksi bersama Dewan Komisaris, dan tingkat kehadiran anggota Direksi dalam rapat tersebut termasuk kehadiran dalam RUPS;	206–207
• Informasi tingkat kehadiran anggota Direksi dalam rapat Direksi, rapat Direksi bersama Dewan Komisaris, atau RUPS dapat disajikan dalam bentuk tabel.	206–207
• pelatihan dan/atau peningkatan kompetensi anggota Direksi:	200
▶ kebijakan pelatihan dan/atau peningkatan kompetensi anggota Direksi, termasuk program orientasi bagi anggota Direksi yang baru diangkat (jika ada); dan	
▶ pelatihan dan/atau peningkatan kompetensi yang diikuti anggota Direksi dalam tahun buku (jika ada);	
• penilaian Direksi terhadap kinerja komite yang mendukung pelaksanaan tugas Direksi pada tahun buku paling sedikit memuat:	208
prosedur penilaian kinerja; dan	
kriteria yang digunakan seperti capaian kinerja selama tahun buku, kompetensi dan kehadiran dalam rapat; dan	
• dalam hal Emiten atau Perusahaan Publik tidak memiliki komite yang mendukung pelaksanaan tugas Direksi, maka diungkapkan mengenai hal tersebut.	
iii. Dewan Komisaris, paling sedikit memuat:	
• tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris;	187
• pernyataan bahwa Dewan Komisaris memiliki pedoman atau piagam (*charter*) Dewan Komisaris;	186
• kebijakan dan pelaksanaan frekuensi rapat Dewan Komisaris, rapat Dewan Komisaris bersama Direksi dan tingkat kehadiran anggota Dewan Komisaris dalam rapat tersebut termasuk kehadiran dalam RUPS;	204–206
Informasi tingkat kehadiran anggota Dewan Komisaris dalam rapat Dewan Komisaris, rapat Dewan Komisaris bersama Direksi, atau RUPS dapat disajikan dalam bentuk tabel.	204–206
• pelatihan dan/atau peningkatan kompetensi anggota Dewan Komisaris:	192
▶ kebijakan pelatihan dan/atau peningkatan kompetensi anggota Dewan Komisaris, termasuk program orientasi bagi anggota Dewan Komisaris yang baru diangkat (jika ada); dan	
▶ pelatihan dan/atau peningkatan kompetensi yang diikuti anggota Dewan Komisaris dalam tahun buku (jika ada);	
• penilaian kinerja Direksi dan Dewan Komisaris serta masing-masing anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris, paling sedikit memuat:	208
▶ prosedur pelaksanaan penilaian kinerja;	
▶ kriteria yang digunakan seperti capaian kinerja selama tahun buku, kompetensi dan kehadiran dalam rapat; dan	✓
▶ pihak yang melakukan penilaian; dan	✓
• penilaian Dewan Komisaris terhadap kinerja Komite yang mendukung pelaksanaan tugas Dewan Komisaris pada tahun buku meliputi:	192
▶ prosedur penilaian kinerja; dan	✓
▶ kriteria yang digunakan seperti capaian kinerja selama tahun buku, kompetensi dan kehadiran dalam rapat;	✓
iv. Nominasi dan remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris, paling sedikit memuat:	208–210
• prosedur nominasi, meliputi uraian singkat mengenai kebijakan dan proses nominasi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris; dan	208
• prosedur dan pelaksanaan remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris, antara lain:	210
▶ prosedur penetapan remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris;	210

Keterangan	Halaman
▶ struktur remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris seperti, gaji, tunjangan, tantiem/bonus dan lainnya; dan	210
▶ besarnya remunerasi masing-masing anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris; Pengungkapan informasi dapat disajikan dalam bentuk tabel.	210
v. Dewan pengawas syariah, bagi Emiten atau Perusahaan Publik yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah sebagaimana tertuang dalam anggaran dasar, paling sedikit memuat:	-
• nama;	-
• dasar hukum pengangkatan dewan pengawas syariah;	-
• periode penugasan dewan pengawas syariah;	-
• tugas dan tanggung jawab dewan pengawas syariah; dan	-
• frekuensi dan cara pemberian nasihat dan saran serta pengawasan pemenuhan prinsip syariah di pasar modal terhadap Emiten atau Perusahaan Publik;	-
vi. Komite audit, paling sedikit memuat:	211–216
• nama dan jabatannya dalam keanggotaan komite;	212–213
• usia;	212–213
• kewarganegaraan;	212–213
• riwayat pendidikan;	212–213
• riwayat jabatan, meliputi informasi:	212–213
▶ dasar hukum penunjukan sebagai anggota komite;	✓
▶ rangkap jabatan, baik sebagai anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, dan/atau anggota komite serta jabatan lainnya (jika ada); dan	✓
▶ pengalaman kerja beserta periode waktunya baik di dalam maupun di luar Emiten atau Perusahaan Publik;	✓
• periode dan masa jabatan anggota komite audit;	211–212
• pernyataan independensi komite audit	213
• pelatihan dan/atau peningkatan kompetensi yang telah diikuti dalam tahun buku (jika ada);	215
• kebijakan dan pelaksanaan frekuensi rapat komite audit dan tingkat kehadiran anggota komite audit dalam rapat tersebut; dan	214
• pelaksanaan kegiatan komite audit pada tahun buku sesuai dengan yang dicantumkan dalam pedoman atau piagam (*charter*) komite audit;	215
vii. komite atau fungsi nominasi dan remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik, paling sedikit memuat:	216–220
• nama dan jabatannya dalam keanggotaan komite;	217–218
• usia;	217–218
• kewarganegaraan;	217–218
• riwayat pendidikan;	217–218
• riwayat jabatan, meliputi informasi:	217–218
▶ dasar hukum penunjukan sebagai anggota komite;	✓
▶ rangkap jabatan, baik sebagai anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, dan/atau anggota komite serta jabatan lainnya (jika ada); dan	✓
▶ pengalaman kerja beserta periode waktunya baik di dalam maupun di luar Emiten atau Perusahaan Publik;	✓
• periode dan masa jabatan anggota komite;	217
• pernyataan independensi komite;	218
• pelatihan dan/atau peningkatan kompetensi yang telah diikuti dalam tahun buku (jika ada);	220
• uraian tugas dan tanggung jawab;	219
• pernyataan bahwa telah memiliki pedoman atau piagam (*charter*);	216
• kebijakan dan pelaksanaan frekuensi rapat dan tingkat kehadiran anggota dalam rapat tersebut;	218–219
• uraian singkat pelaksanaan kegiatan pada tahun buku; dan	219

Keterangan	Halaman
• dalam hal tidak dibentuk komite nominasi dan remunerasi, Emiten atau Perusahaan Publik cukup mengungkapkan informasi sebagaimana dimaksud dalam huruf i) sampai dengan huruf l) dan mengungkapkan:	-
► alasan tidak dibentuknya komite; dan	
► pihak yang melaksanakan fungsi nominasi dan remunerasi;	
viii. komite lain yang dimiliki Emiten atau Perusahaan Publik dalam rangka mendukung fungsi dan tugas Direksi (jika ada) dan/atau komite yang mendukung fungsi dan tugas Dewan Komisaris, paling sedikit memuat:	221–223
• nama dan jabatannya dalam keanggotaan komite;	221
• usia;	221
• kewarganegaraan;	221
• riwayat pendidikan;	221
• riwayat jabatan, meliputi informasi:	221
► dasar hukum penunjukan sebagai anggota komite;	✓
► rangkap jabatan, baik sebagai anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, dan/atau anggota komite serta jabatan lainnya (jika ada); dan	✓
► pengalaman kerja beserta periode waktunya baik di dalam maupun di luar Emiten atau Perusahaan Publik;	✓
• periode dan masa jabatan anggota komite;	221
• pernyataan independensi komite;	221
• pelatihan dan/atau peningkatan kompetensi yang telah diikuti dalam tahun buku (jika ada);	221
• uraian tugas dan tanggung jawab;	222
• pernyataan bahwa telah memiliki pedoman atau piagam (*charter*);	221
• kebijakan dan pelaksanaan frekuensi rapat dan tingkat kehadiran anggota dalam rapat tersebut; dan	222
• uraian singkat pelaksanaan kegiatan pada tahun buku;	222
ix. Sekretaris perusahaan, paling sedikit memuat:	223–225
• nama;	82
• domisili;	82
• riwayat jabatan, meliputi:	82
► dasar hukum penunjukan sebagai sekretaris perusahaan; dan	82
► pengalaman kerja beserta periode waktunya baik di dalam maupun di luar Emiten atau Perusahaan Publik;	82
• riwayat pendidikan;	82
• pelatihan dan/atau peningkatan kompetensi yang diikuti dalam tahun buku; dan	224–225
• uraian singkat pelaksanaan tugas sekretaris perusahaan pada tahun buku;	224
x. Unit audit internal, paling sedikit memuat:	225–230
• nama kepala unit audit internal;	226
• riwayat jabatan, meliputi:	226
► dasar hukum penunjukan sebagai kepala unit audit internal; dan	226
► pengalaman kerja beserta periode waktunya baik di dalam maupun di luar Emiten atau Perusahaan Publik;	226
• kualifikasi atau sertifikasi sebagai profesi audit internal (jika ada);	227–228
• pelatihan dan/atau peningkatan kompetensi yang diikuti dalam tahun buku;	227–228
• struktur dan kedudukan unit audit internal;	226
• uraian tugas dan tanggung jawab;	227
• pernyataan bahwa telah memiliki pedoman atau piagam (*charter*) unit audit internal; dan	225

Keterangan	Halaman
• uraian singkat pelaksanaan tugas unit audit internal pada tahun buku termasuk kebijakan dan pelaksanaan frekuensi rapat dengan Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau komite audit;	229–230
xi. uraian mengenai sistem pengendalian internal (*internal control*) yang diterapkan oleh Emiten atau Perusahaan Publik, paling sedikit memuat:	230–234
• pengendalian keuangan dan operasional, serta kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan lainnya;	230
• tinjauan atas efektivitas sistem pengendalian internal; dan	233
• pernyataan Direksi dan/atau Dewan Komisaris atas kecukupan sistem pengendalian internal;	234
xii. sistem manajemen risiko yang diterapkan oleh Emiten atau Perusahaan Publik, paling sedikit memuat:	234–240
• gambaran umum mengenai sistem manajemen risiko Emiten atau Perusahaan Publik;	235–237
• jenis risiko dan cara pengelolaannya;	238–239
• tinjauan atas efektivitas sistem manajemen risiko Emiten atau Perusahaan Publik; dan	239
• pernyataan Direksi dan/atau Dewan Komisaris atau komite audit atas kecukupan sistem manajemen risiko;	239
xiii. perkara hukum yang berdampak material yang dihadapi oleh Emiten atau Perusahaan Publik, entitas anak, anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris (jika ada), paling sedikit memuat:	240
• pokok perkara/gugatan;	240
• status penyelesaian perkara/gugatan; dan	
• pengaruhnya terhadap kondisi Emiten atau Perusahaan Publik;	
xiv. informasi tentang sanksi administratif/sanksi yang dikenakan kepada Emiten atau Perusahaan Publik, anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi, oleh Otoritas Jasa Keuangan dan otoritas lainnya pada tahun buku (jika ada);	240
xv. informasi mengenai kode etik Emiten atau Perusahaan Publik meliputi:	244
• pokok-pokok kode etik;	245
• bentuk sosialisasi kode etik dan upaya penegakannya; dan	245
• pernyataan bahwa kode etik berlaku bagi anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan karyawan Emiten atau Perusahaan Publik;	245
xvi. uraian singkat mengenai kebijakan pemberian kompensasi jangka panjang berbasis kinerja kepada manajemen dan/ atau karyawan yang dimiliki oleh Emiten atau Perusahaan Publik (jika ada), antara lain berupa program kepemilikan saham oleh manajemen (*management stock ownership program*/ MSOP) dan/atau program kepemilikan saham oleh karyawan (*employee stock ownership program*/ ESOP);	246
Dalam hal pemberian kompensasi berupa program kepemilikan saham oleh manajemen (*management stock ownership program*/MSOP) dan/atau program kepemilikan saham oleh karyawan (*employee stock ownership program*/ ESOP), informasi yang diungkapkan paling sedikit memuat:	246–247
• jumlah saham dan/atau opsi;	
• jangka waktu pelaksanaan;	
• persyaratan karyawan dan/atau manajemen yang berhak; dan	
• harga pelaksanaan atau penentuan harga pelaksanaan;	
xvii. uraian singkat mengenai kebijakan pengungkapan informasi mengenai:	201–202
• kepemilikan saham anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah terjadinya kepemilikan atau setiap perubahan kepemilikan atas saham Perusahaan Terbuka; dan	
• pelaksanaan atas kebijakan dimaksud:	
xviii. uraian mengenai sistem pelaporan pelanggaran (*whistleblowing system*) di Emiten atau Perusahaan Publik, paling sedikit memuat:	248–249
• cara penyampaian laporan pelanggaran;	248
• perlindungan bagi pelapor;	249
• penanganan pengaduan;	249

	Keterangan	Halaman
	• pihak yang mengelola pengaduan; dan	249
	• hasil dari penanganan pengaduan, paling sedikit:	249
	► jumlah pengaduan yang masuk dan diproses dalam tahun buku; dan	
	► tindak lanjut pengaduan;	
	Dalam hal Emiten atau Perusahaan Publik tidak memiliki sistem pelaporan pelanggaran (*whistleblowing system*), maka diungkapkan mengenai hal tersebut.	
	xix. uraian mengenai kebijakan anti korupsi Emiten atau Perusahaan Publik, paling sedikit memuat:	247–248
	• program dan prosedur yang dilakukan dalam mengatasi praktik korupsi, balas jasa (*kickbacks*), *fraud*, suap dan/ atau gratifikasi dalam Emiten atau Perusahaan Publik; dan	247
	• pelatihan/sosialisasi anti korupsi kepada karyawan Emiten atau Perusahaan Publik;	248
	• Dalam hal Emiten atau Perusahaan Publik tidak memiliki kebijakan anti korupsi, maka dijelaskan alasan tidak dimilikinya kebijakan dimaksud.	
	xx. penerapan atas pedoman tata kelola Perusahaan Terbuka bagi Emiten yang menerbitkan efek bersifat ekuitas atau Perusahaan Publik, meliputi:	256–276
	• pernyataan mengenai rekomendasi yang telah dilaksanakan; dan/atau	
	• penjelasan atas rekomendasi yang belum dilaksanakan, disertai alasan dan alternatif pelaksanaannya (jika ada).	
	Pengungkapan informasi dapat disajikan dalam bentuk tabel.	
h.	**Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Emiten atau Perusahaan Publik**	
	i. Informasi yang diungkapkan dalam bagian tanggung jawab sosial dan lingkungan merupakan Laporan Keberlanjutan (*Sustainability Report*) sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 51/POJK.03/2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten, dan Perusahaan Publik, paling sedikit memuat:	280/SR
	• penjelasan strategi keberlanjutan;	✓
	• ikhtisar aspek keberlanjutan (ekonomi, sosial, dan lingkungan hidup);	✓
	• profil singkat Emiten atau Perusahaan Publik;	✓
	• penjelasan Direksi;	✓
	• tata kelola keberlanjutan;	✓
	• kinerja keberlanjutan;	✓
	• verifikasi tertulis dari pihak independen, jika ada;	✓
	• lembar umpan balik (*feedback*) untuk pembaca, jika ada; dan	✓
	• tanggapan Emiten atau Perusahaan Publik terhadap umpan balik laporan tahun sebelumnya;	✓
	ii. Laporan Keberlanjutan sebagaimana dimaksud pada angka 1), harus disusun sesuai Pedoman Teknis Penyusunan Laporan Keberlanjutan (*Sustainability Report*) Bagi Emiten dan Perusahaan Publik sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini;	✓
	iii. informasi Laporan Keberlanjutan (*Sustainability Report*) pada angka 1) dapat:	✓
	• diungkapkan pada bagian lain yang relevan di luar bagian tanggung jawab sosial dan lingkungan, seperti penjelasan Direksi terkait Laporan Keberlanjutan diungkapkan dalam bagian terkait Laporan Direksi; dan/atau	✓
	• merujuk pada bagian lain di luar bagian tanggung jawab sosial dan lingkungan dengan tetap mengacu pada Pedoman Teknis Penyusunan Laporan Keberlanjutan (*Sustainability Report*) Bagi Emiten dan Perusahaan Publik sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini, seperti profil Emiten atau Perusahaan Publik;	✓
	iv. Laporan Keberlanjutan (*Sustainability Report*) sebagaimana dimaksud pada angka 1) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Tahunan namun dapat disajikan secara terpisah dengan Laporan Tahunan;	✓

	Keterangan	Halaman
	v. Dalam hal Laporan Keberlanjutan disajikan secara terpisah dengan Laporan Tahunan, informasi yang diungkapkan dalam Laporan Keberlanjutan dimaksud harus:	✓
	• memuat seluruh informasi sebagaimana dimaksud pada angka 1); dan	✓
	• disusun sesuai Pedoman Teknis Penyusunan Laporan Keberlanjutan (*Sustainability Report*) Bagi Emiten dan Perusahaan Publik sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini;	✓
	vi. Dalam hal Laporan Keberlanjutan disajikan secara terpisah dengan Laporan Tahunan, maka dalam bagian tanggung jawab sosial dan lingkungan memuat informasi bahwa informasi mengenai tanggung jawab sosial dan lingkungan telah diungkapkan dalam Laporan Keberlanjutan yang disajikan secara terpisah dari Laporan Tahunan; dan	✓
	vii. Penyampaian Laporan Keberlanjutan (*Sustainability Report*) yang disajikan secara terpisah dengan Laporan Tahunan harus disampaikan bersamaan dengan penyampaian Laporan Tahunan.	✓
i.	**Laporan Keuangan Tahunan yang Telah Diaudit**	
	Laporan keuangan tahunan yang dimuat dalam Laporan Tahunan disusun sesuai dengan standar akuntansi keuangan di Indonesia dan telah diaudit oleh akuntan publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan. Laporan keuangan tahunan dimaksud memuat pernyataan mengenai pertanggungjawaban atas laporan keuangan sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai tanggung jawab Direksi atas laporan keuangan atau peraturan perundangundangan di sektor pasar modal yang mengatur mengenai laporan berkala perusahaan efek dalam hal Emiten merupakan perusahaan efek.	285
j.	**Surat Pernyataan Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris tentang Tanggung Jawab atas Laporan Tahunan Surat pernyataan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris tentang tanggung jawab atas Laporan Tahunan disusun sesuai dengan format Surat Pernyataan Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris tentang Tanggung Jawab atas Laporan Tahunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini.**	**54–55**

2025

Laporan Tahunan

PT AKR Corporindo Tbk

AKR Tower Lantai 26
JL. Panjang No. 5 Kebon Jeruk
Jakarta Barat 11530, Indonesia

(021) 5311110
www.akr.co.id